



BUPATI LUMAJANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lumajang, Mei 2026

BUPATI LUMAJANG

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025
(AUDITED)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai entitas pelaporan telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan LKPD tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

LKPD tahun 2025 disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya LKPD yang telah diperiksa, digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025.

LKPD tahun 2025 merupakan konsolidasi laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang di dalamnya telah menggabungkan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD, termasuk laporan keuangan atas transaksi keuangan di luar mekanisme Rekening Kas Umum daerah seperti Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKPD tahun 2025 ini. Kami tetap mengharapkan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga kualitas LKPD di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah Daerah akan konsisten menyajikan LKPD secara andal sebagai bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2025 dapat tetap dipertahankan.

Semoga LKPD tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Lumajang, Mei 2026
BUPATI LUMAJANG

Ir. Hj. INDAH AMPERAWATI, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. PENDAHULUAN	1
II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	7
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	32
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	42
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	61
5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	146
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	149
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	297
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	417
5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	423
VI. INFORMASI NON KEUANGAN	454
VII. PENUTUP.....	462

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1. PDRB Kabupaten Lumajang tahun 2021–2025	7
Tabel 2. Indeks Gini Tahun 2021–2025.....	12
Tabel 3. Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020–2024.....	14
Tabel 4. Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD Tahun 2020–2024.....	15
Tabel 5. Rasio Ketergantungan Daerah.....	17
Tabel 6. Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF).....	17
Tabel 7. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF) Kab. Lumajang Tahun 2020–2024.....	18
Tabel 8. Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan PAD dengan Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2025.....	18
Tabel 9. Keselarasan/Harmonisasi Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025	21
Tabel 10. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025	32
Tabel 11. Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025.....	33
Tabel 12. Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025	34
Tabel 13. Ringkasan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2025	34
Tabel 14. Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Tahun 2025.....	35
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan–Belanja dan Transfer Tahun 2025.....	36
Tabel 16. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2025.....	36
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan–Pembiayaan Daerah Tahun 2025	36
Tabel 18. Perkembangan Posisi Aset Daerah Per 31 Desember 2021–2025	37
Tabel 19. Perkembangan Posisi Kewajiban Daerah Per 31 Desember 2021–2025	38
Tabel 20. Perkembangan Posisi Ekuitas per 31 Desember 2021–2025.....	39
Tabel 21. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	61
Tabel 22. Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	62
Tabel 23. Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024 ..	62
Tabel 24. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	63
Tabel 25. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dan 2024.....	65
Tabel 26. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024	66
Tabel 27. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	67
Tabel 28. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	67
Tabel 29. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	68
Tabel 30. Realisasi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2025 dan 2024	68
Tabel 31. Realisasi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Tahun 2025 dan 2024.....	69
Tabel 32. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak Tahun 2025 dan 2024.....	69
Tabel 33. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Tahun 2025 dan 2024.....	70
Tabel 34. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	71
Tabel 35. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	71
Tabel 36. Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-PBG	73
Tabel 37. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2025 dan 2024.....	73

b

Tabel 38. Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	74
Tabel 39. Realisasi Anggaran Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah.....	75
Tabel 40. Realisasi Anggaran Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	76
Tabel 41. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Yang Tidak Dipisahkan	76
Tabel 42. Realisasi Anggaran Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 dan 2024	77
Tabel 43. Rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.....	77
Tabel 44. Rincian Penerimaan atas TGR Tahun 2025 dan 2024.....	78
Tabel 45. Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 dan 2024.....	78
Tabel 46. Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 dan 2024	79
Tabel 47. Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 dan 2024	80
Tabel 48. Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan 2024	81
Tabel 49. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 dan 2024.....	82
Tabel 50. Pendapatan Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2025 dan 2024.....	83
Tabel 51. Penerimaan Lain-lain Tahun 2025 dan 2024.....	83
Tabel 52. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024	83
Tabel 53. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024	84
Tabel 54. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024.....	85
Tabel 55. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun 2025 dan 2024.....	85
Tabel 56. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan Dana Alokasi Cukai Tahun 2025 dan 2024	86
Tabel 57. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024.....	86
Tabel 58. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 dan 2024.....	87
Tabel 59. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2025 dan 2024	89
Tabel 60. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 dan 2024	89
Tabel 61. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2025 dan 2024	90
Tabel 62. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024	92
Tabel 63. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024.....	92
Tabel 64. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024	93
Tabel 65. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024.....	97
Tabel 66. Realisasi Belanja Barang dan Jasa-Belanja Persediaan Tahun 2025 dan 2024.....	98
Tabel 67. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa–Belanja Jasa Tahun 2025 dan 2024.....	99
Tabel 68. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa- Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024.....	104
Tabel 69. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa-Belanja Perjalanan Dinas	108
Tabel 70. Belanja Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	108
Tabel 71. Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024	110
Tabel 72. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	112
Tabel 73. Belanja Hibah barang kepada BUMN	112
Tabel 74. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025	113

6

Tabel 75. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	115
Tabel 76. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.....	118
Tabel 77. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	119
Tabel 78. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	122
Tabel 79. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	123
Tabel 80. Realisasi Belanja Operasi –Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024.....	123
Tabel 81. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	124
Tabel 82. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	124
Tabel 83. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	128
Tabel 84. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	128
Tabel 85. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	128
Tabel 86. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024	129
Tabel 87. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024	129
Tabel 88. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024	130
Tabel 89. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133
Tabel 90. Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024	134
Tabel 91. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	134
Tabel 92. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	135
Tabel 93. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024	136
Tabel 94. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Desa Tahun 2025 dan 2024.....	137
Tabel 95. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Ke Desa Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024.....	138
Tabel 96. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Desa Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 dan 2024	138
Tabel 97. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan kepada Desa Tahun 2025.....	139
Tabel 98. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2025	139
Tabel 99. Surplus/Defisit Tahun 2025 dan 2024.....	140
Tabel 100. Daftar Rincian Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan	141
Tabel 101. Daftar Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024	142
Tabel 102. Daftar Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024.....	142
Tabel 103. Pembiayaan Neto Tahun 2025 dan 2024.....	143
Tabel 104. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 dan 2024	144
Tabel 105. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terikat dan Tidak Terikat	145
Tabel 106. Saldo Anggaran Lebih Awal	146
Tabel 107. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan	147
Tabel 108. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2025 dan 2024.....	147
Tabel 109. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024.....	148
Tabel 110. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024	148
Tabel 111. Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	149
Tabel 112. Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2025.....	149
Tabel 113. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2025.....	150
Tabel 114. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dan 2024	150
Tabel 115. Rincian Saldo Kas Bendahara BLUD Tahun 2025	151

Tabel 116. Perbandingan Rincian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 dan 2024	152
Tabel 117. Perbandingan Rincian Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2025 dan 2024	163
Tabel 118. Perkembangan Piutang Pajak Reklame Tahun 2025	165
Tabel 119. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2025	166
Tabel 120. Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025	166
Tabel 121. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025	166
Tabel 122. Perkembangan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025	167
Tabel 123. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah 2025	167
Tabel 124. Perkembangan Piutang PBB-P2 Tahun 2025	167
Tabel 125. Perhitungan Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2025	168
Tabel 126. Perkembangan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 ...	168
Tabel 127. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025	169
Tabel 128. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2025	170
Tabel 129. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2025	171
Tabel 130. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025	171
Tabel 131. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025	172
Tabel 132. Daftar Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025	172
Tabel 133. Perhitungan Penyisihan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025	172
Tabel 134. Daftar Piutang Retribusi Terminal Tahun 2025	173
Tabel 135. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Terminal Tahun 2025	173
Tabel 136. Piutang Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2025	173
Tabel 137. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2025	174
Tabel 138. Daftar dan Mutasi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025	175
Tabel 139. Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	176
Tabel 140. Piutang Pendapatan Bunga Tahun 2025	176
Tabel 141. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	177
Tabel 142. Perhitungan Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	177
Tabel 143. Piutang Pendapatan BLUD	177
Tabel 144. Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	177
Tabel 145. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	178
Tabel 146. Piutang Lain-lain	179
Tabel 147. Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain	179
Tabel 148. Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2025 dan 2024	180
Tabel 149. Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025 dan 2024	180
Tabel 150. Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2025 dan 2024	182
Tabel 151. Daftar Persediaan Tahun 2025 dan 2024	183
Tabel 152. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	184
Tabel 153. Persediaan Bahan Kimia	184
Tabel 154. Persediaan Bahan Baku	185
Tabel 155. Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	185
Tabel 156. Persediaan Isi Tabung Gas	185
Tabel 157. Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	185
Tabel 158. Persediaan Bahan Lainnya	185
Tabel 159. Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	187



Tabel 160. Persediaan Alat Tulis Kantor	187
Tabel 161. Persediaan Kertas dan Cover.....	189
Tabel 162. Persediaan Bahan Cetak	190
Tabel 163. Persediaan Benda Pos.....	192
Tabel 164. Persediaan Bahan Komputer	192
Tabel 165. Persediaan Perabot Kantor	192
Tabel 166. Persediaan Alat Listrik	193
Tabel 167. Persediaan Perlengkapan Dinas.....	194
Tabel 168. Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga	194
Tabel 169. Persediaan Suvenir/Cendera Mata.....	194
Tabel 170. Persediaan Obat.....	194
Tabel 171. Persediaan Obat-obatan Lainnya.....	195
Tabel 172. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat.....	195
Tabel 173. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	196
Tabel 174. Persediaan Natura.....	196
Tabel 175. Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	197
Tabel 176. Metode Penilaian Investasi.....	197
Tabel 177. Perkembangan Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal.....	198
Tabel 178. Perkembangan Penyertaan Modal Pada Bank Jatim	200
Tabel 179. Perkembangan Penyertaan Modal Pada BPR Jatim	200
Tabel 180. Penyertaan Modal Pada Perumda BPR Bank Lumajang.....	201
Tabel 181. Jumlah Modal Disetor-Penyertaan Modal pada Perumda BPR Bank Lumajang.....	202
Tabel 182. Penyertaan Modal Pada Perumda Semeru Lumajang.....	203
Tabel 183. Jumlah Modal Disetor - Penyertaan Modal Pada PD Semeru Kabupaten Lumajang.....	203
Tabel 184. Perkembangan Penyertaan Modal Pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru.....	204
Tabel 185. Jumlah Modal Disetor-Penyertaan Modal Pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang	204
Tabel 186. Daftar Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025 ...	207
Tabel 187. Penambahan Aset Tetap Tahun 2025.....	208
Tabel 188. Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025.....	211
Tabel 189. Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2025	217
Tabel 190. Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2025.....	218
Tabel 191. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	221
Tabel 192. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	224
Tabel 193. Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025.....	228
Tabel 194. Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025	232
Tabel 195. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025.....	235
Tabel 196. Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025	237
Tabel 197. Penambahan Aset tetap Lainnya Tahun 2025	239
Tabel 198. Pengurangan Aset tetap Lainnya Tahun 2025.....	240
Tabel 199. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025	241
Tabel 200. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025.....	243
Tabel 201. Perkembangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	244
Tabel 202. Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025.....	244
Tabel 203. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	245
Tabel 204. Beban Penyusutan Tahun 2025	245
Tabel 205. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025.....	246
Tabel 206. Dana Cadangan 2025.....	247
Tabel 207. Saldo Aset Lainnya Tahun 2025	248
Tabel 208. Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2025	249

Tabel 209. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025.....	250
Tabel 210. Rincian Aset Yang Dibatasi Penggunaanya Tahun 2025.....	251
Tabel 211. Perkembangan Aset Lain-lain Tahun 2025	256
Tabel 212. Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2025.....	258
Tabel 213. Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain Tahun 2025.....	258
Tabel 214. Pendapatan Diterima Dimuka.....	259
Tabel 215. Rekap Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	260
Tabel 216. Rekap Utang Lain-lain Tahun 2025	261
Tabel 217. Rekap Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun 2025	262
Tabel 218. Rincian Utang Bagi Hasil Retribusi	267
Tabel 219. Rincian Utang Jasa Bongkar Tahun 2025	272
Tabel 220. Rincian Utang Belanja Tahun 2025	273
Tabel 221. Rekap Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	274
Tabel 222. Rincian Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	275
Tabel 223. Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	275
Tabel 224. Rincian Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS...	275
Tabel 225. Rincian Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	275
Tabel 226. Rincian Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	275
Tabel 227. Rincian Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS.....	275
Tabel 228. Rincian Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	276
Tabel 229. Rincian Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS.....	276
Tabel 230. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/ Tunjangan Khusus PNS.....	276
Tabel 231. Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	276
Tabel 232. Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK.....	276
Tabel 233. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS.....	276
Tabel 234. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	277
Tabel 235. Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	278
Tabel 236. Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.....	278
Tabel 237. Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS ..	278
Tabel 238. Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PPPK	278
Tabel 239. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	278
Tabel 240. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	280
Tabel 241. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	280
Tabel 242. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	280
Tabel 243. Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN	280
Tabel 244. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	280
Tabel 245. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	280

Tabel 246. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan	281
Tabel 247. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	281
Tabel 248. Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	281
Tabel 249. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	282
Tabel 250. Rekap Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025.....	282
Tabel 251. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.....	283
Tabel 252. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	283
Tabel 253. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	283
Tabel 254. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	283
Tabel 255. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	284
Tabel 256. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	284
Tabel 257. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat.....	284
Tabel 258. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman	284
Tabel 259. Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	284
Tabel 260. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium.....	284
Tabel 261. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	285
Tabel 262. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	285
Tabel 263. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon.....	285
Tabel 264. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air.....	286
Tabel 265. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	288
Tabel 266. Utang Belanja Jasa Kantor-LangganJurnal/Surat Kabar/Majalah	289
Tabel 267. Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	289
Tabel 268. Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman.....	291
Tabel 269. Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	291
Tabel 270. Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum.....	291
Tabel 271. Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah.....	291
Tabel 272. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	291
Tabel 273. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	292
Tabel 274. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	292
Tabel 275. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame.....	293
Tabel 276. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	293
Tabel 277. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	293
Tabel 278. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	293
Tabel 279. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN.....	293
Tabel 280. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	294
Tabel 281. Utang Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	294

b

Tabel 282. Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	294
Tabel 283. Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa.....	294
Tabel 284. Rekap Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025	295
Tabel 285. Daftar Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang	296
Tabel 286. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang.....	296
Tabel 287. Daftar Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2025 dan 2024	297
Tabel 288. Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO Tahun 2025	298
Tabel 289. Daftar Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 dan 2024.....	300
Tabel 290. Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2025.....	301
Tabel 291. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Tahun 2025 dan 2024.....	304
Tabel 292. Hubungan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas LRA dan LO	305
Tabel 293. Hubungan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah LRA dan LO Tahun 2025.....	307
Tabel 294. Hubungan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis LRA dan LO Tahun 2025	307
Tabel 295. Pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO Tahun 2025 dan 2024.....	308
Tabel 296. Hubungan Pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum LRA dan LO.....	308
Tabel 297. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO Tahun 2025 dan 2024	308
Tabel 298. Hubungan Pendapatan Retribusi Pelataran LRA dan LO Tahun 2025	309
Tabel 299. Hubungan Pendapatan Retribusi Los LRA dan LO	309
Tabel 300. Hubungan Pendapatan Retribusi Kios LRA dan LO.....	309
Tabel 301. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO Tahun 2025 dan 2024...310	
Tabel 302. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO Tahun 2025 dan 2024.....310	
Tabel 303. Hubungan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan LRA dan LO.....310	
Tabel 304. Hubungan Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus LRA dan LO Tahun 2025 dan 2024.....	311
Tabel 305. Pendapatan Retribusi Terminal - Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO 2025 dan 2024.....	311
Tabel 306. Hubungan Pendapatan Retribusi Terminal - Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha LRA dan LO.....	311
Tabel 307. Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 2025 dan 2024.....312	
Tabel 308. Hubungan Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya LRA dan LO..312	
Tabel 309. Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Tahun 2025 dan 2024.....	313
Tabel 310. Hubungan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan LRA dan LO.....	313
Tabel 311. Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	313
Tabel 312. Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	314
Tabel 313. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO Tahun 2025 dan 2024	314
Tabel 314. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ..314	
Tabel 315. Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024.....	315
Tabel 316. Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	315
Tabel 317. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024....316	
Tabel 318. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.....	317

Tabel 319. Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO Tahun 2025 dan 2024.....	319
Tabel 320. Hubungan Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LRA dan LO.....	319
Tabel 321. Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO.....	319
Tabel 322. Hubungan Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).....	320
Tabel 323. Daftar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Per 31 Desember 2025 dan 2024	320
Tabel 324. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA dan LO Tahun 2025	321
Tabel 325. Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Per 31 Desember 2025 dan 2024	321
Tabel 326. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA dan LO Tahun 2025.....	326
Tabel 327. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024	332
Tabel 328. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak LO Tahun 2025 dan 2024	332
Tabel 329. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 dan 2024.....	333
Tabel 330. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum LO Tahun 2025 dan 2024	333
Tabel 331. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus LO Tahun 2025 dan 2024	334
Tabel 332. Hubungan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA dan LO Tahun 2025	334
Tabel 333. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2025 dan 2024.....	336
Tabel 334. Hubungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2025.....	336
Tabel 335. Transfer Pemerintah Provinsi –LO Tahun 2025 dan 2024.....	337
Tabel 336. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024	337
Tabel 337. Pendapatan Transfer Antar Daerah Bantuan Keuangan-LO	338
Tabel 338. Hubungan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA dan LO Tahun 2025	338
Tabel 339. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024.....	339
Tabel 340. Hubungan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA dan LO Tahun 2025	340
Tabel 341. Pendapatan Hibah Tahun 2025 dan 2024.....	341
Tabel 342. Rincian Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat Tahun 2025.....	342
Tabel 343. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2025..	345
Tabel 344. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri–LO Tahun 2025	346
Tabel 345. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri–LO Tahun 2025.....	347
Tabel 346. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun 2025	351
Tabel 347. Pendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun 2025	351
Tabel 348. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024	352
Tabel 349. Pendapatan Lainnya LRA dan LO Tahun 2025	352
Tabel 350. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	353
Tabel 351. Hubungan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2025	356
Tabel 352. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024.....	362

b

Tabel 353. Hubungan Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2025.....	364
Tabel 354. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024.....	370
Tabel 355. Hubungan Beban Jasa dengan Belanja Jasa Tahun 2025.....	375
Tabel 356. Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024.....	382
Tabel 357. Hubungan Beban pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan	387
Tabel 358. Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024.....	395
Tabel 359. Hubungan Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025	395
Tabel 360. Daftar Rincian Belanja Bunga dan Beban Bunga Tahun 2025	396
Tabel 361. Daftar Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024.....	396
Tabel 362. Hubungan Beban hibah dengan Belanja hibah Tahun 2025.....	398
Tabel 363. Daftar Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024	402
Tabel 364. Daftar Beban Bantuan Sosial LRA dan LO Per 31 Desember 2025	403
Tabel 365. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024.....	404
Tabel 366. Hubungan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dengan Beban Penyusutan Amortisasi Tahun 2025	405
Tabel 367. Penyisihan Piutang Dengan Beban Penyisihan Piutang	405
Tabel 368. Daftar Rincian Transfer Tahun 2025 dan 2024.....	406
Tabel 369. Daftar Rincian Transfer LRA dan LO Tahun 2025 dan 2024.....	406
Tabel 370. Daftar Rincian Beban Lainnya Tahun 2025 dan 2024	407
Tabel 371. Hubungan Beban Lain-lain dengan Belanja Lain-lain Tahun 2025	409
Tabel 372. Daftar Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2025	411
Tabel 373. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	413
Tabel 374. Beban Luar Biasa	415
Tabel 375. Hubungan Belanja Luar Biasa dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025.....	415
Tabel 376. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2025 dan 2024.....	416
Tabel 377. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024.....	417
Tabel 378. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024	419
Tabel 379. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024.....	420
Tabel 380. Rincian Potongan Per Jenis Pajak Tahun 2025	420
Tabel 381. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024.....	421
Tabel 382. Rincian Kenaikan Kas Tahun 2025 dan 2024	421
Tabel 383. Surplus/Defisit LO Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	423
Tabel 384. Rekapitulasi Daftar Akun Yang Dikoreksi Tahun 2025	424
Tabel 385. Koreksi Kas di BLUD	426
Tabel 386. Koreksi Piutang Pajak Reklame	426
Tabel 387. Koreksi Piutang Pajak Air Tanah.....	426
Tabel 388. Koreksi Piutang PBJT - Jasa Perhotelan	426
Tabel 389. Koreksi Piutang PBJT - Jasa Parkir.....	426
Tabel 390. Koreksi Piutang PBJT – Penyedia Jasa Boga atau Katering	427
Tabel 391. Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	427
Tabel 392. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB.....	427
Tabel 393. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21.....	427
Tabel 394. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	428
Tabel 395. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum - DBH CHT	428
Tabel 396. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	428
Tabel 397. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi .	428
Tabel 398. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent.....	429

6

Tabel 399. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	429
Tabel 400. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan - PSDH.....	429
Tabel 401. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	429
Tabel 402. Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	430
Tabel 403. Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	430
Tabel 404. Koreksi Penyisihan Piutang PBJT - Jasa Perhotelan.....	430
Tabel 405. Koreksi Penyisihan Piutang PBJT - Jasa Parkir	430
Tabel 406. Koreksi Penyisihan Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	431
Tabel 407. Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	431
Tabel 408. Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	431
Tabel 409. Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.....	431
Tabel 410. Koreksi Persediaan Alat Tulis Kantor	432
Tabel 411. Koreksi Persediaan Isi Tabung Gas.....	432
Tabel 412. Koreksi Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	432
Tabel 413. Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	433
Tabel 414. Koreksi Aset Tetap Tanah	434
Tabel 415. Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	434
Tabel 416. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	434
Tabel 417. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	447
Tabel 418. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	450
Tabel 419. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Pelayanan Pasar	450
Tabel 420. Koreksi Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	451
Tabel 421. Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan	451
Tabel 422. Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	451
Tabel 423. Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	451
Tabel 424. Koreksi Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.....	452
Tabel 425. Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	452
Tabel 426. Koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	452
Tabel 427. Koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	452
Tabel 428. Laporan Perubahan Ekuitas	453
Tabel 429. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	456

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1. Grafik % pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang (BPS Tahun 2026)	8
Gambar 2. Grafik Laju Inflasi Kabupaten Lumajang (BPS Tahun 2026).....	9
Gambar 3. Grafik Tingkat Pengangguran Kabupaten Lumajang (BPS Tahun 2026)	10
Gambar 4. Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lumajang (BPS Tahun 2026).....	11
Gambar 5. Grafik IPM Tahun 2021–2025 (BPS Tahun 2026)	11
Gambar 6. Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2025	35
Gambar 7. Grafik Perkembangan Nilai Aset Daerah Tahun 2021–2025	38
Gambar 8. Grafik Perkembangan Kewajiban (Utang) Daerah Tahun 2021–2025.....	39
Gambar 9. Grafik Perkembangan Ekuitas Tahun 2021–2025	40

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran 1. Daftar Tanah Fasilitas Umum Perumahan Yang Diserahkan Ke Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025	464
Lampiran 2. Jumlah Perkembangan Tanah Yang Bersertifikat Tahun 2025.....	469
Lampiran 3. Daftar Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025	470
Lampiran 4. Daftar Sewa Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025	472
Lampiran 5. Daftar Tanah Milik TNI dan BUMN yang tercatat pada KIB Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025	475
Lampiran 6. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	477
Lampiran 7. Daftar Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025	480
Lampiran 8. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025	494
Lampiran 9. Daftar Bangunan Milik Pemkab Lumajang yang menempati Tanah milik TNI dan BUMN	496
Lampiran 10. Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	498
Lampiran 11. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun 2025	500
Lampiran 12. Daftar Jalan yang dibangun bukan di atas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang.....	501
Lampiran 13. Daftar Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025.....	503
Lampiran 14. Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025	505
Lampiran 15. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahun 2025	506
Lampiran 16. Daftar Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025.....	507
Lampiran 17. Daftar Rincian Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025.....	510

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good government*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomi serta bermanfaat untuk masyarakat.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah disesuaikan dengan susunan entitas yang ada. Rekonsiliasi telah dilakukan antara Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagai salah satu tahapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025. Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan serta perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1) Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2) Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor: 10 No. Reg Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 334-8/2020);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor: 12 No. Reg Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 338-12/2024);
- 27) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor: 34)
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor: 7 No. Reg Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 136-4/2025);
- 29) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor: 31);
- 30) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

- 31) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 64);
- 32) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 83);
- 33) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Nomor 52).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
	2.1. Ekonomi Makro
	2.2. Kebijakan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMERINTAH DAERAH
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.1.1 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
	3.1.2 Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan
	3.2. Posisi Keuangan
	3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2. Basis Akuntansi
	4.3. Basis Pengukuran
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
	5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.1 Pendapatan–LRA
	5.1.2 Belanja Dan Transfer
	5.1.3 Pembiayaan

- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan–LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Pos-pos Luar Biasa
- 5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
- 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus (Defisit)–LO
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar.
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI
BAB VII

INFORMASI NON KEUANGAN
PENUTUP

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 menggunakan asumsi ekonomi makro dengan berpedoman pada asumsi ekonomi makro APBN tahun 2025. Beberapa indikator ekonomi makro pada APBD Kabupaten Lumajang tahun 2025 antara lain: (1) Produk Domestik Bruto (PDRB); (2) Pertumbuhan ekonomi; (3) Laju inflasi; (4) Nilai tukar rupiah; (5) Tingkat suku bunga; (6) Harga minyak; (7) *Lifting* minyak dan gas bumi; (8) Tingkat pengangguran; (9) Tingkat kemiskinan; (10) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan (11) Indeks Gini Rasio.

Gambaran perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2025 mencapai 46.492,44 miliar rupiah, mengalami kenaikan kurang lebih 3,432.99 miliar dari tahun 2024 yang mencapai 43.059,45 miliar rupiah.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan besarnya perbandingan setara antar tahun pada suatu daerah (ekuivalen antar tahun/periode tertentu). Besaran nilai PDRB ADHK pada tahun 2025 mengalami kenaikan 1,387.93 miliar rupiah dari tahun 2024 yang mencapai 25.929,92 miliar rupiah.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Lumajang tahun 2021–2025

Dalam Miliar Rupiah

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)
2021	33.678,62	22.623,40
2022	36.663,73	23.626,58
2023	40.072,78	24.808,35
2024	43.059,45	25.929,92
2025	46.492,44	27.317,85

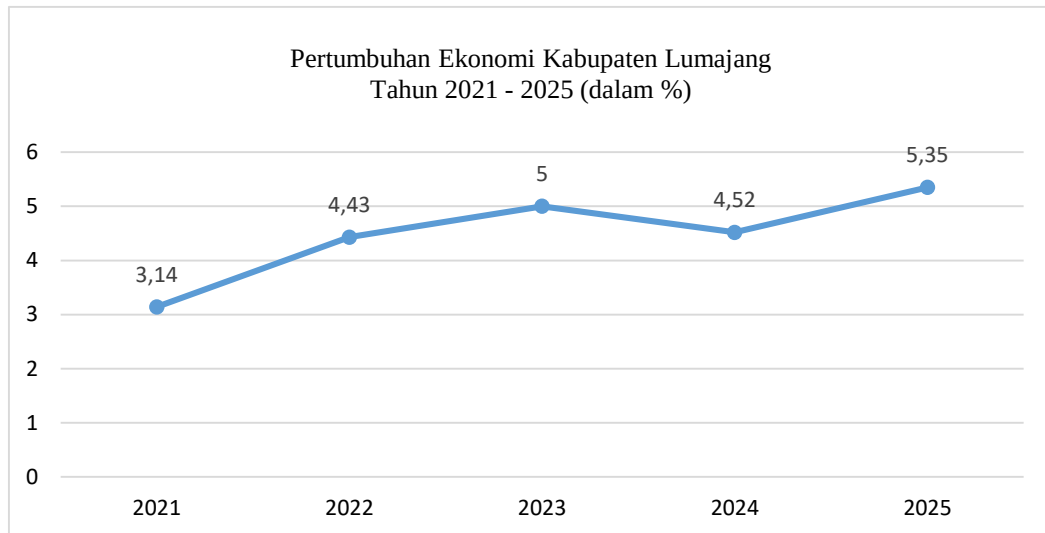
Sumber: Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2026 (BPS 2026)

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2021 meskipun masih dalam situasi pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang 3,14%. Meskipun masih dibayangi ketidakpastian global dimana berbagai krisis melanda dunia yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional dan regional, tetapi pertumbuhan ekonomi menunjukkan kondisi yang semakin baik sehingga aktivitas masyarakat sudah berjalan normal dan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai angka 4,43%.

Pada tahun 2023, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD dengan melakukan intervensi langsung melalui program/kegiatan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu juga memberikan stimulan pada sektor-sektor yang dapat mengungkit perekonomian daerah, seperti infrastruktur pendukung perekonomian dan

kemudahan-kemudahan perizinan terkait perekonomian serta membangkitkan perekonomian masyarakat terutama UMKM. Dampak kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang di tahun 2023 semakin meningkat mencapai angka 5,00%. Namun pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,52%. Selanjutnya Tahun 2025 naik lagi menjadi 5,35% (BPS Lumajang 2026)



Gambar 1. Grafik % pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang (BPS Tahun 2026)

3) Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional.

Pada tahun 2021, tingkat inflasi Kabupaten Lumajang mencapai angka 0,9 tetapi angka ini tidak lebih baik dari angka inflasi Jawa Timur 0,69 dan nasional 0,57. Melihat berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2022 termasuk kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Timur di semester 2 tahun 2022 dimana kondisi krisis ekonomi yang ditandai dengan naiknya angka inflasi, yang salah satunya dipicu kenaikan TDL dan harga BBM menyebabkan harga barang dan jasa semakin tinggi. Akibatnya kemampuan daya beli masyarakat semakin menurun. Kondisi ini berdampak pada angka inflasi Kabupaten Lumajang yang semakin naik mencapai angka 3,14.

Kondisi perekonomian Kabupaten Lumajang tahun 2022 mulai stabil dan angka inflasi mampu ditekan hingga angka 1,61 dimana harga barang-barang kebutuhan pokok relatif stabil. Pada tahun 2023 intervensi Pemerintah Daerah dan jajaran terkait melalui beberapa kebijakan seperti operasi pasar, penyelenggaraan pasar murah, pemberian bantuan kepada masyarakat menyebabkan harga-harga terus turun, tetapi kondisinya menyebabkan deflasi pada angka minus 0,54. Posisi deflasi akan menguntungkan konsumen tetapi merugikan produsen. Upaya menstabilkan harga barang-barang kebutuhan pokok terus dilakukan oleh Pemerintah daerah. Pada tahun 2024 angka inflasi mencapai 1,72 terutama disebabkan kenaikan harga bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam. Pada tahun 2025 angka inflasi mencapai 2,86. Pada periode ini cabai merah mengalami kenaikan harga tertinggi dibanding komoditas lainnya.



Gambar 2. Grafik Laju Inflasi Kabupaten Lumajang (BPS Tahun 2026)

4) Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung terhadap kondisi keuangan di dalam APBD karena transaksi APBD tidak menggunakan valuta asing. Pengaruh tidak langsung dari nilai tukar rupiah terhadap APBD terbatas pada pengaruh kenaikan harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada saat APBD disusun, kemungkinan berbeda dengan nilai tukar rupiah pada saat APBD dilaksanakan, sehingga pada saat penyusunan standar satuan harga untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sudah memperhitungkan tingkat inflasi tahun 2025 dan nilai tukar rupiah pada tahun 2025 yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu nilai tukar rupiah yang digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 sama dengan nilai tukar rupiah dalam asumsi APBN tahun 2025 yaitu Rp15.300,00–Rp16.000,00 per USD.

5) Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro pada APBD Tahun Anggaran 2025 mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku secara nasional sebesar 6,9%–7,3%.

6) Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah tidak berpengaruh langsung terhadap penyusunan APBD Kabupaten Lumajang karena di dalam APBD tidak ada sumber penerimaan daerah yang berasal dari minyak mentah. Oleh karena itu harga minyak mentah tidak digunakan sebagai dasar penentuan asumsi makro dalam penyusunan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.

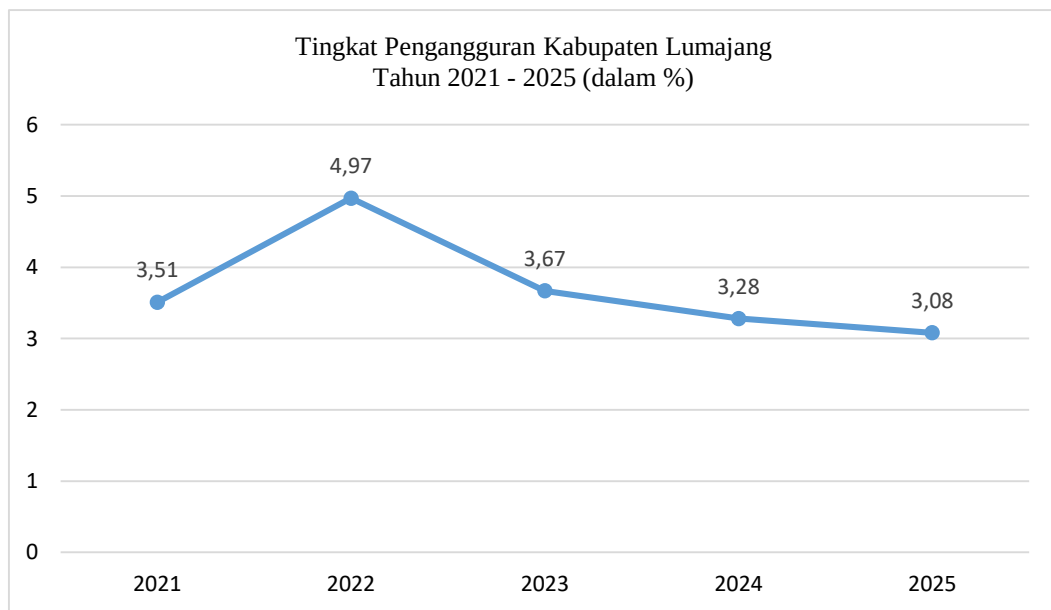
7) *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi juga tidak berpengaruh secara langsung pada pembentukan penyusunan APBD Kabupaten Lumajang karena di dalam APBD tidak ada sumber penerimaan daerah yang berasal dari hasil penjualan minyak dan gas bumi, kecuali pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam dari minyak dan gas bumi yang penetapan

alokasinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu *lifting* minyak dan gas bumi tidak digunakan sebagai dasar penentuan asumsi makro dalam APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.

8) Tingkat Pengangguran

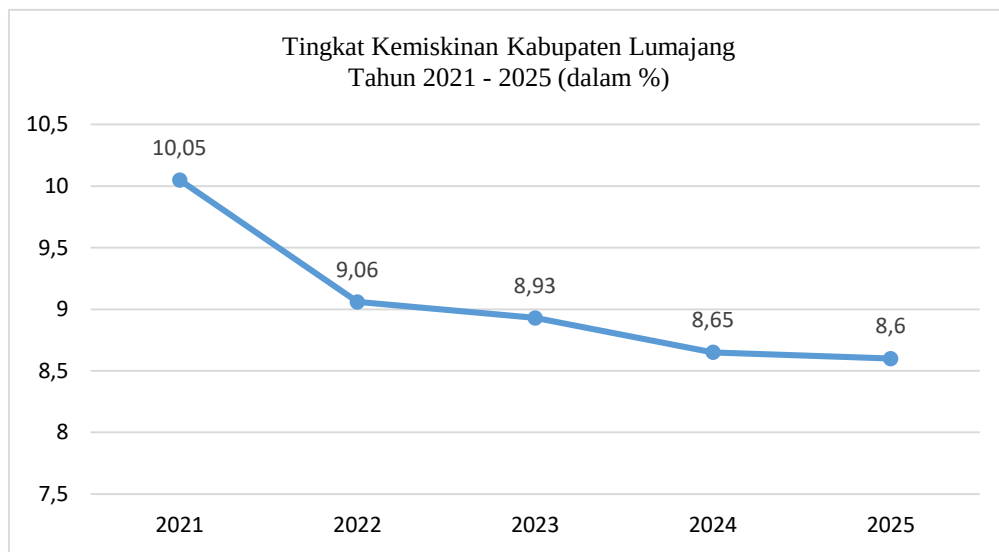
Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Tahun 2021 aktivitas masyarakat dan aktivitas perekonomian belum pulih dari pandemi Covid-19 sehingga angka pengangguran terbuka 3,51%. Pada tahun 2022 tingkat pengangguran mencapai angka 4,97%. Pada tahun 2023 penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan APBD tahun 2023. Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, serta intervensi berbagai program dan kegiatan pada pelaksanaan APBD tahun 2023 berdampak pada penurunan angka pengangguran terbuka dari angka 4,97% pada tahun 2022, turun menjadi 3,67% di tahun 2023. Pada tahun 2024, TPT kembali turun menjadi 3,28%. Tahun 2025 TPT menurun menjadi 3,08% (BPS Kab. Lumajang 2026)



Gambar 3. Grafik Tingkat Pengangguran Kabupaten Lumajang (BPS Tahun 2026)

9) Tingkat Kemiskinan

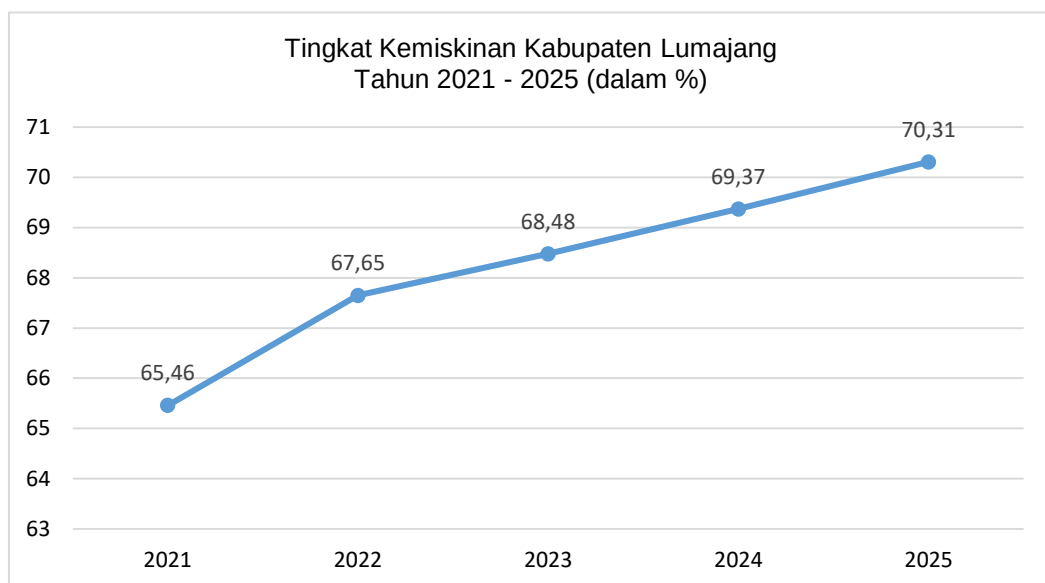
Tingkat kemiskinan tahun 2021 pada angka 10,05%. Tahun 2022 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi yang memberikan optimisme perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pelaksanaan berbagai program prioritas dan penguatan program PEN sehingga tingkat kemiskinan turun menjadi 9,06%. Pada tahun 2023 tingkat kemiskinan semula diharapkan turun pada kisaran angka 7,0%–8,0%, namun demikian berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai angka 8,93%, melebihi yang diprediksikan. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan kembali turun menjadi 8,65%. Pada tahun 2025 menurun lagi menjadi 8,60%.



Gambar 4. Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lumajang (BPS Tahun 2026)

10) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka IPM Kabupaten Lumajang terus mengalami kenaikan. Tahun 2021 IPM mencapai angka 67,65, dan tahun 2022 IPM tercapai pada angka 68,48. Pada tahun 2023 IPM naik menjadi 69,37, dan tahun 2024 naik menjadi 70,31. Tahun 2025 IPM meningkat 0.71 poin menjadi 71,02. Kenaikan tahun 2025 disebabkan kenaikan seluruh indikator pembentuknya, baik indikator kesehatan, indikator pendidikan maupun indikator pengeluaran penduduk. (BPS Kabupaten Lumajang 2026)



Gambar 5. Grafik IPM Tahun 2021–2025 (BPS Tahun 2026)

11) Indeks Gini Rasio

Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Semakin rendah mendekati nilai 0 (nol) yang berarti pemerataan semakin baik. Patokan nilai koefisien Gini Rasio $<0,4$ menunjukkan tingkat ketimpangan rendah. Sedangkan koefisien Gini Rasio $0,4-0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan sedang, jika $>0,5$ menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Data Indeks Gini Kabupaten Lumajang selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Indeks Gini Tahun 2021–2025

Uraian	Satuan	Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Gini	Indeks	Lumajang	0,309	0,349	0,391	0,363	0,305
		Jawa Timur	0,374	0,371	0,387	0,372	0,369
		Indonesia	0,384	0,381	0,388	0,381	0,363

Sumber : <https://bps.go.id>

Tren Indeks Gini di Kabupaten Lumajang fluktuatif. Pada tahun 2021 Indeks Gini 0,309, namun angkanya kurang dari nilai Indeks Gini nasional dan provinsi. Kondisi tahun 2022 angka indeks gini naik menjadi 0,349 dan 0,391 di tahun 2023. Pada tahun 2024 indeks gini berkurang menjadi 0,363, dan tahun 2025 berkurang lagi menjadi 0,305. Angka Indeks Gini Kabupaten Lumajang kurang dari 0,4 hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan rendah.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Sumber pendanaan APBD tahun 2025 yang terbatas dengan kebutuhan alokasi belanja yang semakin besar disikapi dengan menetapkan strategi kebijakan keuangan yang tepat sehingga program prioritas pembangunan tahun 2025 dapat dicapai. Secara umum kebijakan keuangan tahun 2025 diarahkan pada terwujudnya penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBD, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata; penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan; peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar; peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBD sebagai peredam (*shock absorber*) untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan memberikan dampak positif pada capaian berbagai indikator keberhasilan pembangunan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka, penurunan angka kematian, penurunan stunting, peningkatan angka IPM dan indikator-indikator lainnya.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025, kebijakan keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi dan peningkatan pendapatan daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan pembangunan daerah.

- 2) Mengalokasikan belanja untuk penguatan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur perpajakan daerah.
- 3) Peningkatan rasio alokasi belanja bersifat mandatory, terutama belanja di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang infrastruktur dasar masyarakat serta belanja bersifat wajib dan mengikat lainnya, untuk tercapainya tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.
- 4) Peningkatan alokasi belanja untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pencegahan stunting, penurunan angka kemiskinan dan pelayanan publik serta percepatan konvergensi antar daerah.
- 5) Alokasi belanja tidak terduga sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kondisi tanggap darurat dan keperluan mendesak lainnya mengingat wilayah Kabupaten Lumajang memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.
- 6) Alokasi belanja perlindungan sosial sebagai antisipasi dampak inflasi untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial masyarakat sehingga memiliki daya tahan akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu.
- 7) Alokasi anggaran belanja untuk Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar pada basis data Badan Kepegawaian Negara mendasari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I No.B/1527/M.SM.01.00/2003 tanggal 25 Juli 2023.
- 8) Menjaga posisi defisit APBD tahun 2025 dalam batas wajar sehingga dapat dijangkau melalui sumber pembiayaan yang realistis.
- 9) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan APBD pada periode berikutnya.
- 10) Penganggaran Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2029 mendasari Perda Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.
- 11) Melakukan efisiensi belanja daerah berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor 07 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor SE-900.1.12.1/12/427.73/2025 tentang Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2025.
- 12) Merealokasi hasil efisiensi belanja untuk peningkatan infrastruktur daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber pendanaan APBD paling utama adalah dari pendapatan daerah, meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah di dalam APBD adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Untuk merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2025 perlu mempertimbangkan capaian kinerja pendapatan daerah periode-periode sebelumnya baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya kebijakan

pendapatan daerah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap pendapatan negara tahun 2025 serta diselaraskan dengan perubahan regulasi khususnya pasca terbitnya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang di dalamnya memuat perubahan mendasar terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan yang mendasar terhadap ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut ketentuan tersebut, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan dan diatur dalam 1 (satu) Perda saja, dalam hal ini Pemerintah Daerah telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam menentukan kebijakan PAD, telah dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja PAD periode sebelumnya dengan menggunakan variabel pengukuran antara lain:

- Rasio efektivitas keuangan daerah, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan.
- Rasio pertumbuhan PAD, dengan membandingkan selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi PAD periode sebelumnya dibandingkan dengan realisasi PAD periode sebelumnya.
- Rasio ketergantungan keuangan daerah, diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.
- Rasio Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan membandingkan realisasi PAD dengan total belanja daerah dan pinjaman.

1) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD

Efektivitas keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan target PAD yang dianggarkan pada APBD. Semakin tinggi angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin efektif, sebaliknya semakin rendah angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin tidak efektif.

Sedangkan rasio pertumbuhan PAD diukur dengan membandingkan antara selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi PAD tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan PAD positif menunjukkan terdapat peningkatan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan ada penurunan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya.

Gambaran riil efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020–2024

Dalam Rupiah

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi		Pertumbuhan	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2020	280.977.944.540,86	300.263.112.642,77	106,86	1.795.738.468,40	0,60
2021	304.209.601.165,00	325.045.892.762,36	106,85	24.782.780.119,59	8,25

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi		Pertumbuhan	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2022	317.330.963.487,00	361.388.610.784,38	113,88	36.342.718.022,02	1,24
2023	325.257.004.731,00	343.188.815.384,80	105,51	(18.199.795.399,58)	(5,04)
2024	375.813.925.261,00	393.568.995.459,39	104,72	50.380.180.074,59	14,68
Sumber data : LKPD Audited					

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat ketercapaian target PAD sebesar 106,86% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan kondisi di tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2020 hanya 0,60% dari realisasi tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan PAD pada tahun 2021 jauh lebih baik, mencapai 8,25% dari realisasi tahun 2020. Realisasi PAD tahun 2022 mencapai 113,88% dari anggaran, pertumbuhannya mencapai 1,24% dari realisasi tahun 2021. Pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian target realisasi menjadi 105,51% dengan pertumbuhan (5,04). Pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian target realisasi menjadi 104,72% namun mengalami pertumbuhan 14,68% dari realisasi tahun 2023.

Melihat capaian target dalam 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi PAD telah melampaui anggarannya (lebih dari 100%), namun demikian kondisi tersebut belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan mengingat secara detail per jenis rincian PAD menggambarkan kondisi yang sangat beragam dan berbeda-beda tingkat pencapaiannya.

Selanjutnya, evaluasi terhadap efektivitas dan pertumbuhan tiap-tiap jenis PAD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD Tahun 2020–2024

Dalam Miliar Rupiah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan	
			Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
Pajak Daerah	2020	70,00	68,66	98,09	(5,57)	(7,51)
	2021	90,41	81,66	90,32	13,00	18,93
	2022	92,66	94,33	101,80	12,67	15,52
	2023	105,00	104,53	99,55	10,20	10,81
	2024	105,21	116,11	110,37	11,58	11,08
Retribusi Daerah	2020	50,02	46,06	92,08	(12,14)	(20,85)
	2021	37,88	32,01	84,52	(13,96)	(30,50)
	2022	21,65	20,15	93,07	(11,86)	(37,05)
	2023	21,57	19,07	88,41	(1,08)	(5,36)
	2024	258,27	261,09	101,09	242,02	1.269,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg. Dipisahkan	2020	5,11	5,11	100	0,14	2,75
	2021	6,84	4,71	68,81	(0,40)	(7,83)
	2022	5,19	6,62	127,55	1,91	40,55
	2023	5,98	5,92	99,00	(28,55)	(10,57)
	2024	6,60	6,71	101,55	0,79	13,34
Lain-lain PAD yang sah	2020	155,85	180,44	115,77	21,37	13,43
	2021	169,07	206,65	122,23	26,21	14,50
	2022	197,80	240,29	121,48	33,64	16,28
	2023	192,71	213,67	110,88	(10,60)	(11,08)
	2024	5,74	9,65	168,23	(204,02)	(95,48)

Sumber data : LRA audited

Dari data di atas menunjukkan bahwa:

- a. Realisasi Pajak Daerah terdapat kecenderungan naik jumlahnya namun fluktuatif persentasenya. Menurunnya realisasi tahun 2020 dari tahun sebelumnya menyebabkan pertumbuhan pajak daerah negatif, sedangkan tahun 2021 realisasinya mengalami pertumbuhan positif. Tahun 2022 merupakan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak positif pada realisasi pajak daerah yang mencapai 101,8% dari anggaran dengan pertumbuhan mencapai 15,52% dari realisasi tahun sebelumnya. Kinerja pajak daerah tahun 2023 tidak sebagus tahun sebelumnya, realisasi hanya mencapai 99,5% dengan pertumbuhan 10,81%. Namun tahun 2024 realisasi pajak daerah mencapai 110,37% dengan pertumbuhan 11,08%.
- b. Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2020 tidak mencapai target dan pertumbuhannya negatif. Kondisi ini terus berlanjut pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Kinerja retribusi daerah tahun 2024 naik sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD yang semula disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah disesuaikan menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dipengaruhi oleh kinerja badan usaha tempat Pemerintah Daerah melakukan investasi/penyertaan modal. Pada tahun 2020 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai target 100% karena pagu anggaran telah disesuaikan dengan kinerja perusahaan daerah dalam melakukan penyetoran bagian laba pada pemerintah daerah. Tahun 2021 realisasinya mencapai 68,81% dan di tahun 2022 realisasi naik mencapai 127,55% dengan pertumbuhan 40,55% dari realisasi periode sebelumnya. Tahun 2023 terjadi penurunan dengan capaian target 99% pertumbuhan mencapai (10,57%). Tahun 2024 terjadi kenaikan dengan capaian target 101,55% pertumbuhan mencapai 13,34%.
- d. Realisasi lain-lain PAD yang sah terdapat kecenderungan mencapai target lebih dari 100% dengan pertumbuhan positif yang cenderung meningkat. Kondisi ini tentunya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pendapatan BLUD yang semula disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah disesuaikan menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Kinerja realisasi PAD sangat menentukan pada kemandirian keuangan daerah atau ketergantungan keuangan daerah. Untuk mengukurnya menggunakan analisis Rasio ketergantungan daerah yang menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan.

Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio dana transfer, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio dana transfer yang rendah.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total

pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio dana transfer, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio dana transfer yang rendah.

Rasio ketergantungan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan			Rasio Ketergantungan Daerah	
	PAD	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	Rasio Transfer Terhadap Total Pendapatan
2020	300.263.112.642,77	1.725.518.141.013,00	2.118.849.571.641,14	14,17	81,44
2021	325.045.892.762,36	1.702.191.186.437,14	2.161.880.436.241,41	19,09	78,74
2022	361.388.610.784,38	1.808.039.850.407,00	2.198.459.140.759,22	16,44	82,24
2023	343.188.815.384,80	1.811.115.660.924,00	2.157.475.774.208,15	15,91	83,95
2024	393.568.995.459,39	1.898.032.999.357,00	2.293.895.944.229,91	17,16	82,74

Sumber data: LRA *audited*

Data di atas menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap dana transfer dalam 5 tahun terakhir masih tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan angka rasio PAD terhadap total Pendapatan kurang dari 50% dan sebaliknya rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan lebih dari 50%.

3) Indeks Kemandirian Fiskal

Mengukur indeks kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada pendapatan transfer. Dengan mengukur kemandirian daerah dapat diketahui pula apakah pemerintah daerah memiliki kerentanan terhadap pengaruh sumber pendanaan yang berada diluar kendalinya, seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dan sumber-sumber lainnya. Kemandirian daerah diukur dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total belanja daerah dan pinjaman.

Tabel 6. Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum mandiri
2	$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat mandiri

Sumber data: BPK R.I

Dengan melihat data historis selama 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

Tabel 7. Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF) Kab. Lumajang Tahun 2020–2024

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja	Realisasi Pembayaran Pinjaman	Total Belanja dan Pembayaran Pinjaman	IKF	Keterangan
2020	300.263.112.642,77	2.028.732.782.607,05	0,00	2.028.732.782.607,05	0,1480	Belum mandiri
2021	325.045.892.762,36	2.150.424.463.380,39	0,00	2.150.424.463.380,39	0,1512	Belum mandiri
2022	361.388.610.784,38	2.248.761.063.560,50	40.907.406.043,00	2.289.668.469.603,50	0,1578	Belum mandiri
2023	343.188.815.384,80	2.118.597.507.107,33	70.126.981.788,00	2.188.724.488.895,33	0,1568	Belum mandiri
2024	393.568.995.459,39	2.213.027.574.700,85	64.283.084.169,00	2.277.310.658.869,85	0,1728	Belum mandiri

Sumber data : LRA *audited*

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki angka IKF pada interval $0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$ yang berarti belum mandiri. Hal ini disebabkan karena realisasi dan pertumbuhan PAD yang rendah. Pada tahun 2020 PAD mampu menutup belanja daerah sebesar 14,80% dan di tahun 2021 naik menjadi 15,12%. Kemudian pada tahun 2022 PAD hanya mampu menutup belanja daerah sebesar 15,78%. Pada tahun 2023 tidak lebih baik dari tahun 2022 dimana PAD hanya mampu menutup belanja dan pinjaman sebesar 15,68%. Pada tahun 2024 PAD hanya mampu menutup belanja daerah sebesar 17,28%. Melihat perkembangan tersebut, kebijakan perencanaan PAD tahun berikutnya harus mampu mendorong untuk meningkatkan IKF dari belum mandiri menjadi menuju mandiri.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan daerah dan indeks kemandirian fiskal yang diselaraskan dengan kebijakan pendapatan negara tahun 2025, secara umum kebijakan perencanaan PAD di tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 8. Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan PAD dengan Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2025

No	Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan PAD
1	Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut: a. menjaga efektivitas reformasi perpajakan; b. memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi; c. mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan; d. mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; e. reformasi pengelolaan SDA dan aset;	Kebijakan PAD diarahkan untuk mendorong optimalisasi PAD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, sebagai berikut: a. menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan daerah melalui implementasi Perda PDRD yang telah ditetapkan dan diharmonisasikan dengan UU HKPD dan PP Ketentuan Umum PDRD; b. memberikan insentif perpajakan daerah yang terarah dan terukur; c. mendorong kepatuhan dan perluasan basis perpajakan daerah; d. mendorong sistem perpajakan daerah yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional; e. reformasi pengelolaan SDA dan aset daerah; f. inovasi layanan dan penguatan tata kelola

No	Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan PAD
	f. inovasi layanan dan penguatan tata kelola.	pendapatan daerah; g. Pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Substansi kebijakan PNPB 2025 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu kebijakan PNPB 2025 adalah sebagai berikut: a. Reformasi pengelolaan SDA yang lebih memberi nilai tambah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha melalui langkah-langkah seperti (i) memperbaiki tata kelola pemanfaatan SDA; (ii) mendorong tingkat produksi yang optimal; (iii) menyempurnakan kebijakan pemungutan PNPB dari royalti atau jenis penerimaan negara lainnya secara maksimal; dan (iv) memperluas objek PNPB; b. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, agent of development, persepsi investor, regulasi, dan covenant disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk BLU, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; d. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi seperti penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dan <i>Automatic Blocking System</i> (ABS), diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik melalui <i>joint analysis</i> dan <i>joint audit</i>.	Upaya menghadapi tantangan dan mencapai target PAD selain pajak daerah, diperlukan kebijakan sebagai berikut: a. Optimalisasi Retribusi Daerah melalui implementasi Perda PDRD yang telah ditetapkan dan diharmonisasikan dengan UU HKPD dan PP Ketentuan Umum PDRD; b. Optimalisasi penerimaan dividen dan bagian laba BUMD dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan daerah; c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan perangkat daerah, BLUD serta penguatan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang lebih optimal; d. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.
3	Pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi aset BMN. Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2025 antara lain: a. integrasi perencanaan aset dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN; b. optimalisasi BMN melalui pemanfaatan BMN pada K/L yang belum didayagunakan secara optimal; dan c. pemberian stimulus berupa faktor penyesuaian untuk mendorong iklim	Kebijakan optimalisasi pemanfaatan BMD tahun 2025, antara lain: a. integrasi perencanaan BMD dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMD; b. optimalisasi BMD melalui pemanfaatan BMD pada pengguna/pengelola barang yang belum didayagunakan secara optimal melalui sewa, kerjasama pemanfaatan atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

No	Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan PAD
	investasi dan pemenuhan layanan kepada masyarakat.	
4	Penguatan Kebijakan BLU tahun 2025 terus dilakukan agar dapat memperluas dan memperkuat pelayanan, serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap PNPB. Adapun untuk mendukung optimalisasi PNPB dari BLU di tahun 2025, maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain: - peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi; - integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas; - inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; - modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan; - klasterisasi tarif dan remunerasi.	Upaya peningkatan PAD melalui pendapatan BLUD dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut: - peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLUD melalui penggunaan teknologi informasi; - integrasi dan sinergi sumber daya antar BLUD untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas; - inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLUD; - modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan BLUD; - klasterisasi tarif dan remunerasi.

2.2.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Pengalokasian pendapatan transfer pemerintah pusat ke daerah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah. sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian dana perimbangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengalokasian transfer keuangan ke daerah ditetapkan melalui Peraturan Presiden R.I tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah baik pendapatan bagi hasil maupun bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan.

2.2.1.3 Kebijakan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai PAD dan pendapatan transfer, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- Perencanaan hibah didasarkan pada surat pernyataan resmi kesediaan memberikan hibah dan/atau penetapan/persetujuan pemberian hibah dari pemberi dana dan/atau surat perjanjian hibah/penerusan hibah atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perencanaan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan didasarkan pada dokumen resmi mengenai penetapan alokasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja negara sebagaimana dimuat di dalam kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan belanja negara, yaitu diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Keselarasan kebijakan belanja negara dan belanja daerah sebagai berikut:

Tabel 9. Keselarasan/Harmonisasi Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025

No	Arah Kebijakan Belanja Negara	Arah Kebijakan Belanja Daerah Kab. Lumajang
1	Efisiensi belanja non prioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif.	Efisiensi terhadap belanja daerah non prioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk produktif.
2	Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi.	Penguatan belanja modal infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi ekonomi.
3	Reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.	Belanja bantuan sosial pada belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
4	Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.	Efektivitas implementasi UU HKPD sebagai dasar harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat.

Kebijakan belanja daerah di tahun 2025 disamping menekankan pada pelaksanaan program prioritas urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional dan provinsi, juga melanjutkan kebijakan belanja sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni penanganan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penyediaan bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi serta dampak inflasi di daerah, yang diformulasikan di dalam program dan kegiatan di dalam APBD tahun anggaran 2025. Disamping itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan belanja yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) dan belanja wajib lainnya, yakni:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD;
- Alokasi belanja pegawai paling tinggi 30% di luar tunjangan guru dari dana transfer;
- Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari dana transfer umum;
- Alokasi DAU terikat bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kelurahan, PPPK;
- Alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari DAU dan dana bagi hasil;
- Mengalokasikan hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum;
- Mengalokasikan hasil penerimaan Pajak Rokok bagian kabupaten/kota, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

Pada perjalanan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa situasi yang mengharuskan adanya penyesuaian belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja sumber dana *Earmarked* perlu disesuaikan dengan Keputusan Kementerian terkait yang mengatur rincian Alokasi transfer ke daerah kegiatan sumber dana transfer;
- b. Belanja sumber dana DAK Non Fisik perlu disesuaikan dengan Keputusan Kementerian terkait yang mengatur rincian alokasi kegiatan sumber dana DAK Non Fisik;
- c. Adanya Instruksi Presiden yang menginstruksikan efisiensi terhadap belanja daerah untuk dialokasikan pada belanja tertentu sesuai dengan tematik efisiensi yang telah ditentukan;
- d. Adanya kepastian jumlah dan peruntukan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap beberapa jenis belanja sumber dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi;
- e. Adanya kondisi darurat dan keperluan mendesak mengharuskan dilakukannya pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi program/kegiatan SKPD yang menangani kondisi darurat dan keperluan mendesak;
- f. Pelampauan SiLPA tahun 2024 mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap belanja SKPD;
- g. Pemenuhan program-program kepala daerah antara lain bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur, keamanan dan ketertiban umum, pelayanan publik, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan dukungan ketahanan pangan.

Kebijakan belanja daerah secara umum dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga sebagai berikut:

2.2.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan instrumen krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas ASN dan melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan belanja pegawai menjadi penting untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 difokuskan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi *flexible working arrangement*;
- b. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN;
- c. Reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- d. Menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Sejalan dengan kebijakan belanja pegawai Pemerintah Pusat, kebijakan belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2025 antara lain:

- a. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran pemberian THR, gaji 13 dan gaji 14 sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian THR, gaji 13 dan gaji 14;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dengan berpedoman pada:
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung layanan publik berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, seperti belanja persediaan, belanja jasa, belanja

pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023–2026.

Pemerintah akan terus melakukan kebijakan efisiensi belanja barang seiring optimasi TIK antara lain melalui digitalisasi birokrasi, terutama komponen belanja barang yang tumbuh tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada:

- a. Penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional dan dialihkan pada belanja yang lebih produktif;
- b. Efisiensi belanja perjalanan dinas rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK;
- c. Penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda (termasuk bantuan Pemerintah) dan sinergitas kebijakan belanja antara pusat dan daerah;
- d. Penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran; dan
- e. Optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Sejalan dengan kebijakan belanja barang pemerintah pusat, kebijakan belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2025 tidak mengalami banyak perubahan sebagaimana berikut ini:

- a. Penganggaran belanja barang-barang persediaan seperti barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar pekerjaan kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penganggaran belanja jasa seperti jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak/retribusi bagi pegawai non ASN, dianggarkan sesuai kebutuhan;
- c. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- d. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), mengupayakan pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Tambahan dari alokasi sementara pajak rokok mendasari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat, staf, pimpinan dan anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belanja perjalanan dinas dilakukan efisiensi sebesar 50% dari APBD murni;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Tahun 2025 tidak dianggarkan belanja bunga.

4) Belanja Hibah

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD,

dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah daerah merencanakan untuk memberikan hibah berupa uang atau barang dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Hibah kepada partai politik diberikan kepada 8 (delapan) partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lumajang, yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/PL.01.8-Pu/3508/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Hibah kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan telah diusulkan melalui Musrenbang dan/atau melalui pokok-pokok pikiran DPRD dan tercantum di dalam RKPD tahun 2025;
- d. Belanja hibah dianggarkan di SKPD terkait pada program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditunjuk selaku penanggung jawab hibah;
- e. Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah–Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- f. Perencanaan dan penganggaran belanja hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang hibah dan Keputusan Bupati Lumajang yang mengatur tentang standarisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan khusus.

Perubahan kebijakan perencanaan belanja hibah disesuaikan dengan regulasi yang mengatur Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penambahan belanja hibah atas pokok pikir anggota DPRD, penyesuaian belanja hibah akibat adanya penyesuaian pendapatan transfer DAU *Earmarked*, penyesuaian hibah atas pergeseran anggaran dari BTT untuk keperluan mendesak, dan pemberian hibah kepada Polres dan Kodim untuk operasional keamanan dan ketertiban umum.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial (bansos) merupakan instrumen fiskal untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta investasi pembangunan SDM. Dalam jangka pendek, bansos diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, bansos diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan ekonomi.

Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlinsos dan mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan belanja bantuan sosial tahun 2025 akan melanjutkan berbagai program bansos untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan berfokus antara lain:

- a. peningkatan efektivitas bansos melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat, sinergi antar program, penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme penyaluran;
- b. perluasan cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan;
- c. penyusunan protokol implementasi bansos di masa krisis/darurat dalam skema perlinsos yang adaptif; dan
- d. percepatan graduasi dari kemiskinan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMi dan KUR.

Sejalan dengan arah kebijakan belanja hibah pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah terkait bantuan sosial tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bantuan sosial uang yang direncanakan, diberikan kepada individu/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD, sebagai berikut:
 - Bantuan Sosial untuk perbaikan Rumah Masyarakat Miskin (Rumah Tidak Layak Huni/RTLH);
 - Bantuan sosial untuk penanganan dan penanggulangan dampak bencana alam;
 - Bantuan sosial untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang kurang mampu;
 - Bantuan sosial air limbah setempat untuk pembangunan/penyediaan sub sistem pengelolaan setempat;
 - Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;
 - Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat (PAMSIMAS) untuk pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
 - Bantuan sosial kepada LKSA/Panti Asuhan untuk penyediaan permakanan.
- c. Bantuan sosial berupa barang yang direncanakan kepada individu/keluarga miskin yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD, berupa sembako;
- d. Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pagu alokasinya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, dianggarkan di belanja tidak terduga;
- e. Perencanaan dan penganggaran belanja bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang bantuan sosial dan Keputusan Bupati Lumajang yang mengatur tentang standarisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan khusus.

2.2.2.2 Belanja Modal

Selain sumber daya manusia dan sumber dana berupa uang, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai berupa aset tetap dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut dianggarkan melalui belanja modal yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka peningkatan efisiensi pengeluaran belanja modal.

Di dalam kebijakan fiskal tahun 2025, kebijakan belanja modal pemerintah pusat tahun 2025 diarahkan untuk:

- a. Mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi;
- b. Realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap pertumbuhan; dan
- c. Mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Sejalan dengan kebijakan belanja modal pemerintah pusat tersebut, kebijakan perencanaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja modal mendasari perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penganggaran belanja modal;
- b. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pengadaan/pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan publik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, utamanya peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur daerah yang sebelumnya telah direncanakan melalui dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- c. Alokasi belanja modal harus dapat mencukupi kebutuhan mandatory spending belanja infrastruktur sebesar 40% dari dana transfer umum;
- d. Alokasi DAU terikat (*earmark*) infrastruktur berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan;
- e. Penganggaran belanja modal terutama infrastruktur diarahkan pada upaya keterlibatan tenaga kerja lokal (padat karya) dan menggunakan bahan baku lokal atau peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian daerah dan nasional.

2.2.2.3 Belanja Tidak Terduga (BTT)

Kabupaten Lumajang secara geografis berada pada wilayah yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Kabupaten Lumajang memiliki 11 jenis potensi bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, gelombang pasang atau badai dan abrasi, sehingga penyediaan belanja tidak terduga di dalam APBD merupakan keharusan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga tahun 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- d. Penggunaan belanja tidak terduga dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan untuk bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- e. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta hunian sementara;
- f. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat adalah waktu status tanggap darurat bencana yaitu dimulainya saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai;
- g. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD;
- h. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - Memanfaatkan kas yang tersedia.
 - Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA jika terjadi setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2.2.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam lingkup hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah desa, belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan penganggaran belanja transfer tahun anggaran 2025 pada pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan alokasi anggaran belanja bagi hasil tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Alokasi didasarkan pada realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah tahun anggaran 2025;
- b. Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah/retribusi daerah termasuk kewajiban kurang bayar pada periode sebelumnya.

2) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan kepada desa dapat bersifat umum dan khusus dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Bantuan keuangan bersifat umum meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan paling sedikit 10% dari DAU dan dana bagi hasil yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan. Pada perubahan APBD 2025, Pemerintah Daerah memberikan tambahan ADD yang ditentukan penggunaannya (ADD *Earmarked*) dalam rangka peningkatan sarana mobilitas pelayanan umum pemerintah desa;
- b. Bantuan keuangan bersifat khusus berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bantuan keuangan khusus lainnya yang pengajuannya berdasarkan usulan dari desa termasuk melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan melalui Musrenbang dan telah tercantum di dalam Perubahan RKPD tahun 2025. Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Desa untuk melakukan pemeliharaan terhadap sarana pelayanan Kesehatan milik desa dengan memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa;
- d. Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi defisit yang disebabkan jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Sebaliknya kebijakan pengeluaran pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi surplus dimana jumlah pendapatan lebih besar daripada belanja.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap penerimaan pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2025 antara lain bersumber dari:

- 1) Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp259.634.877.397,03 yang disesuaikan dari Perubahan APBD tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi SILPA *audited* tahun 2024;
- 2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada masyarakat.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap pengeluaran pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pendanaan Pembentukan Dana Cadangan Rp15.000.000.000,00.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD meliputi indikator pencapaian target kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

2.3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Daerah

Indikator pencapaian target kinerja pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara keseluruhan mencapai Rp2.226.493.007.443,52. Jumlah tersebut merupakan 101,13% dari anggaran sebesar Rp2.201.559.427.970,94. Dengan demikian pencapaian target kinerja pendapatan secara total sudah memenuhi anggaran yang telah ditetapkan.

2.3.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Belanja Daerah

Indikator pencapaian target kinerja belanja berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Di dalam APBD Tahun 2025 belanja dianggarkan sebesar Rp2.446.194.305.367,97 dengan realisasi sebesar Rp2.084.460.541.205,11.

2.3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Indikator pencapaian target pembiayaan daerah dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan target pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2025 sebesar Rp259.639.867.397,03 dari anggaran sebesar Rp259.634.877.397,03. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00. Secara keseluruhan pencapaian kinerja pembiayaan 100,00% mengindikasikan pencapaian target kinerja sesuai harapan di dalam APBD.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA LUMAJANG

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

1) Perubahan Pendapatan Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp2.197.052.739.748,00. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pendapatan daerah berkurang sebesar Rp4.057.494.777,06 sehingga menjadi Rp2.192.995.244.970,94. Kondisi yang menyebabkan perubahan anggaran pendapatan daerah adalah mempertimbangkan realisasi pendapatan semester pertama tahun 2025 dan prognosis realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 yang mengharuskan anggaran pendapatan dilakukan perubahan. Ringkasan perubahan anggaran pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 10. Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025

Dalam Rupiah				
No	Jenis Pendapatan	APBD 2025	P-APBD 2025	Bartambah (Berkurang)
1	Pendapatan Asli Daerah	423.551.579.045,00	439.975.119.873,40	16.423.540.828,40
2	Pendapatan Transfer	1.773.501.160.703,00	1.753.020.125.097,54	(20.481.035.605,46)
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.197.052.739.748,00	2.192.995.244.970,94	(4.057.494.777,06)

a. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp423.551.579.045,00. Pada P-APBD Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi Rp439.975.119.873,40 atau bertambah sebesar Rp16.423.540.828,40. Perubahan PAD disebabkan kondisi sebagai berikut:

- Kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. BPHTB-Pemindahan Hak yang semula dianggarkan sebesar Rp21.250.000.000,00, pada P-APBD dianggarkan sebesar Rp21.050.000.000,00;
- PBJT-Restoran yang semula dianggarkan Rp1.435.000.000,00, pada P-APBD dianggarkan Rp2.435.000.000,00.
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang semula dianggarkan Rp156.932.000.000,00 pada P-APBD dianggarkan Rp176.908.280.500,00.
- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang semula dianggarkan Rp4.159.473.929,00 pada P-APBD dianggarkan Rp 4.138.039.798,15.

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) yang semula dianggarkan Rp1.141.630.400,00 pada P-APBD dianggarkan Rp1.727.795.759,25.
- Lain-lain PAD yang Sah yang semula dianggarkan Rp5.147.079.523,00 pada P-APBD dianggarkan Rp5.879.799.023,00. Upaya peningkatan PAD ini melalui peningkatan pendapatan BLUD.

b. Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer di APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.773.501.160.703,00. Pada P-APBD TA. 2025 berubah menjadi Rp1.753.020.125.097,54 atau berkurang sebesar Rp20.481.035.605,46. Perubahan pendapatan transfer disebabkan karena adanya perubahan penetapan pendapatan transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat.

c. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak ada perubahan pada APBD Tahun Anggaran 2025, sebelum dan sesudah perubahan tidak dianggarkan.

2) Perubahan Belanja Daerah

Pada APBD Tahun Anggaran 2025, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp2.241.234.752.873,00. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belanja daerah bertambah sebesar Rp196.395.369.494,97 sehingga menjadi Rp2.437.630.122.367,97.

Tabel 11. Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025

No	Jenis Belanja	APBD 2025	P-APBD 2025	Dalam Rupiah
				Bertambah (Berkurang)
1	Belanja Operasi	1.696.044.317.206,31	1.758.895.248.612,18	62.850.931.405,87
2	Belanja Modal	147.635.623.857,69	250.639.689.733,79	103.004.065.876,10
3	Belanja Tidak Terduga (BTT)	15.000.000.000,00	15.232.257.213,00	232.257.213,00
4	Belanja Transfer	382.554.811.809,00	412.862.926.809,00	30.308.115.000,00
	Jumlah Belanja	2.241.234.752.873,00	2.437.630.122.367,97	196.395.369.494,97

Perubahan belanja di dalam P-APBD Tahun 2025 merupakan perubahan anggaran yang merupakan konsekuensi dari adanya beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Belanja dengan sumber dana *Earmarked* disesuaikan dengan Keputusan Kementerian terkait yang mengatur rincian alokasi transfer ke daerah kegiatan sumber dana transfer.
- b. Belanja dengan sumber dana DAK Non Fisik disesuaikan dengan Keputusan Kementerian terkait yang mengatur rincian alokasi kegiatan sumber dana DAK Non Fisik.
- c. Adanya Instruksi Presiden yang menginstruksikan efisiensi terhadap belanja daerah untuk dialokasikan pada belanja tertentu sesuai dengan tematik efisiensi yang telah ditentukan.
- d. Adanya kepastian jumlah dan peruntukan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap beberapa jenis belanja dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
- e. Adanya kondisi darurat dan keperluan mendesak yang mengharuskan dilakukannya pergeseran dari Belanja Tidak Terduga menjadi program/kegiatan SKPD yang menangani kondisi darurat dan keperluan mendesak.

- f. Pelampauan SILPA Tahun 2024 mengharuskan dilakukan penyesuaian terhadap belanja SKPD.
- g. Pemenuhan program-program kepala daerah antara lain bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur, keamanan dan ketertiban umum, pelayanan publik, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan dukungan ketahanan pangan.

3) Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan pembiayaan pada P-APBD TA 2025 adalah pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pada APBD 2025, penerimaan pembiayaan penggunaan SiLPA tahun lalu dianggarkan sebesar Rp59.182.013.125,00, pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (*Audited*) SiLPA dari hasil pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp259.634.877.397,03. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian untuk menganggarkan kembali selisih lebih SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp200.452.864.272,03.

Tabel 12. Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Dalam Rupiah				
No	Jenis Pembiayaan	APBD 2025	P-APBD 2025	Bartambah (Berkurang)
1	Penerimaan Pembiayaan	59.182.013.125,00	259.634.877.397,03	200.452.864.272,03
	SILPA Tahun sebelumnya	59.182.013.125,00	259.634.877.397,03	200.452.864.272,03
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Neto	44.182.013.125,00	244.634.877.397,03	200.452.864.272,03

3.1.2 IKTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Capaian kinerja keuangan dari pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2025 dengan membandingkan antara target dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagai berikut:

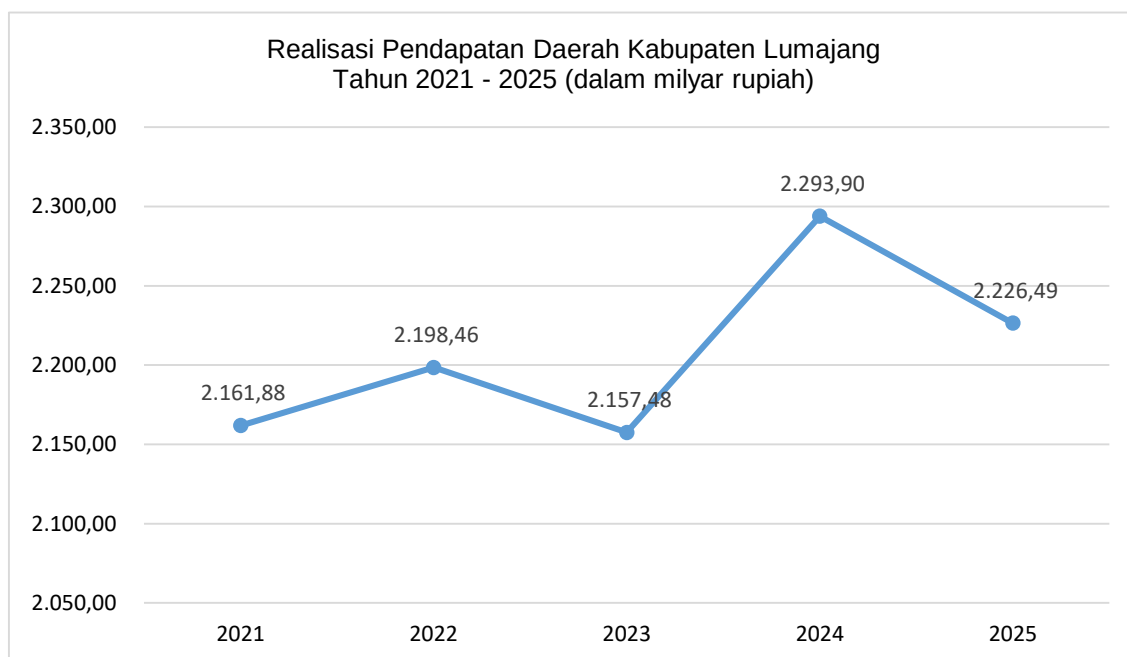
1) Kinerja Pendapatan Daerah

Tabel 13. Ringkasan Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2025

Dalam Rupiah				
No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	439.975.119.873,40	480.129.304.402,52	109,13
2	Pendapatan Transfer	1.761.584.308.097,54	1.745.824.170.892,00	99,11
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	539.532.149,00	0,00
	Jumlah	2.201.559.427.970,94	2.226.493.007.443,52	101,13

Secara total, capaian kinerja pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang efektif, hal tersebut dapat dilihat dari capaian target pendapatan telah melampaui 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendapatan dan implementasi strategi pencapaiannya berjalan efektif.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir perkembangan pendapatan daerah menunjukkan realisasi yang fluktuatif. Kinerja pendapatan di tahun 2024 sempat meningkat, tetapi di tahun 2025 mengalami penurunan sebagaimana grafik berikut:



Gambar 6. Grafik Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2025

Dilihat dari komposisi pendapatan total, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong rendah, hanya mencapai 21,56% dari total pendapatan sebesar Rp2.226.493.007.443,52. Namun, angka ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dimana pada tahun 2024 kontribusi PAD terhadap total pendapatan mencapai 17,16% dari total pendapatan sebesar Rp2.293.895.944.229,91.

Kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah, karena sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Lumajang masih tergantung kepada Pendapatan Transfer. Kondisi ini merupakan tugas berat bagi pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kinerjanya sehingga PAD bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang.

Tabel 14. Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Realisasi (Rp)	Proporsi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	480.129.304.402,52	21,56
2	Pendapatan Transfer	1.745.824.170.892,00	78,41
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	539.532.149,00	0,02
	Jumlah	2.226.493.007.443,52	100,00

2) Kinerja Belanja Daerah

Realisasi penyerapan anggaran belanja pada pelaksanaan APBD Tahun 2025 secara total mencapai 85,21%. Dari anggaran belanja sebesar Rp2.446.194.305.367,97 realisasi belanja sebesar Rp2.084.460.541.205,11. Setiap jenis belanja penyerapan anggarannya telah optimal kecuali Belanja Tidak Terduga realisasinya rendah.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan—Belanja dan Transfer Tahun 2025

Dalam Rupiah					
No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.766.036.726.454,43	1.531.914.968.843,36	86,74	234.121.757.611,07
2	Belanja Modal	252.062.394.891,54	174.629.510.813,75	69,28	77.432.884.077,79
3	Belanja Tidak Terduga	15.232.257.213,00	4.007.496.476,00	26,31	11.224.760.737,00
4	Belanja Transfer	412.862.926.809,00	373.908.565.072,00	90,56	38.954.361.737,00
	Jumlah Belanja	2.446.194.305.367,97	2.084.460.541.205,11	85,21	361.733.764.162,86

Komposisi belanja daerah menunjukkan bahwa dari total realisasi belanja, sebesar 73,49% atau Rp1.531.914.968.843,36 digunakan untuk belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Penggunaan belanja untuk investasi barang-barang modal yang menambah aset tetap seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya hanya 8,38% dari total belanja atau sebesar Rp174.629.510.813,75.

Penggunaan belanja tidak terduga relatif kecil, hanya sebesar Rp4.007.496.476,00 atau 0,19% dari total belanja daerah. Rendahnya belanja tidak terduga karena tergantung adanya kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan kondisi darurat lainnya. Rendahnya penyerapan belanja tidak terduga mengindikasikan kesiapan daerah dalam penanganan bencana telah berjalan baik.

Belanja transfer kepada desa yang meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah kepada Desa dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) realisasinya mencapai Rp373.908.565.072,00 atau 17,94% dari total realisasi belanja daerah.

Tabel 16. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2025

Dalam Rupiah			
No	Jenis Belanja	Realisasi (Rp)	Komposisi (%)
1	Belanja Operasi	1.531.914.968.843,36	73,49
2	Belanja Modal	174.629.510.813,75	8,38
3	Belanja Tidak Terduga	4.007.496.476,00	0,19
4	Belanja Transfer	373.908.565.072,00	17,94
	Total Belanja Daerah	2.084.460.541.205,11	100

3) Kinerja Pembiayaan Daerah

Realisasi penyerapan anggaran pembiayaan daerah pada pelaksanaan APBD Tahun 2025 baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan telah terserap secara optimal mencapai 100%.

Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan—Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Dalam Rupiah				
No	Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penerimaan Pembiayaan	259.634.877.397,03	259.639.867.397,03	100,00
	Penggunaan SILPA	259.634.877.397,03	259.634.242.397,03	100,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	5.625.000,00	0,00

No	Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	%
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
	Pembiayaan Netto	244.634.877.397,03	244.639.867.397,03	100,00

3.2. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

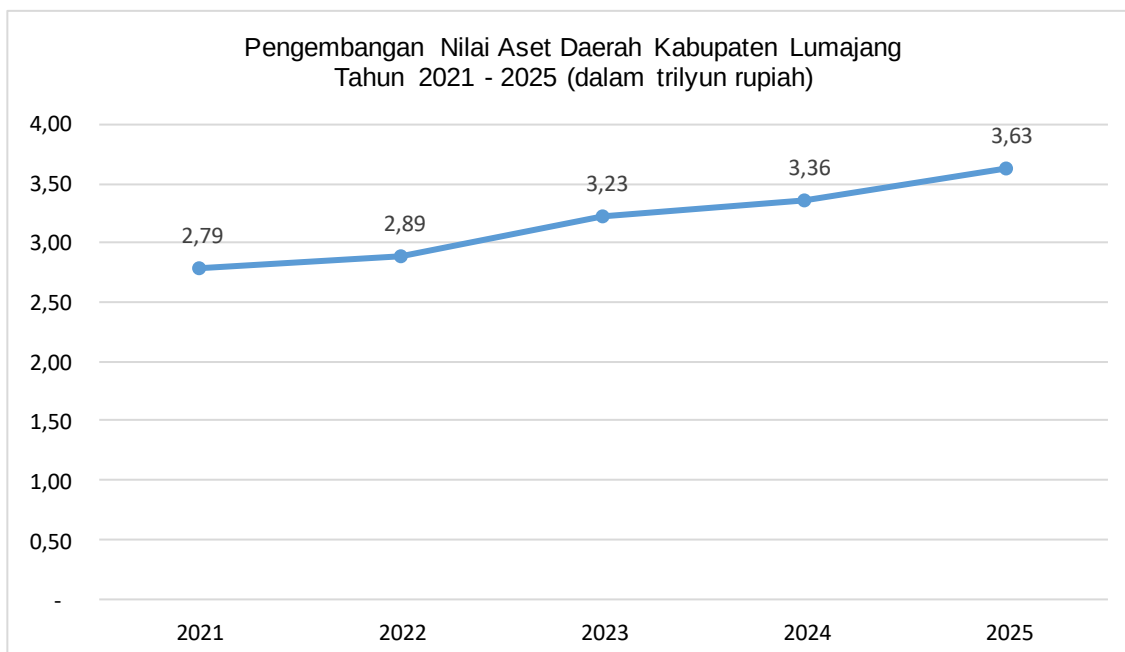
3.2.1. ASET DAERAH

Aset Pemerintah Kabupaten Lumajang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dana cadangan, dan aset lainnya.

Hasil pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran berdampak pada terjadinya perubahan terhadap jumlah nilai aset yang dimiliki pemerintah daerah. Perkembangan aset pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang fluktuatif dan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data perkembangan aset daerah sebagai berikut:

Tabel 18. Perkembangan Posisi Aset Daerah Per 31 Desember 2021–2025

Dalam Rupiah					
Jenis Aset	2021	2022	2023	2024	2025
1. Aset Lancar	422.832.313.912,78	374.844.061.052,31	297.639.324.881,75	379.828.354.281,27	536.901.196.936,35
2. Invest. Jk. Panjang	52.996.422.652,66	48.577.966.333,16	42.004.227.028,57	41.518.694.472,38	49.892.261.042,84
3. Aset Tetap	2.300.488.473.239,97	2.381.337.552.090,63	2.800.468.104.140,06	2.490.840.203.229,76	2.609.959.809.767,92
4. Properti Investasi	0,00	0,00	19.075.473.275,42	16.688.419.600,00	16.688.419.600,00
5. Dana Cadangan	0,00	15.441.096.443,57	36.629.531.961,19	0,00	15.189.318.358,61
6. Aset Lainnya	12.679.327.055,47	69.321.585.816,95	29.388.923.723,94	437.323.899.003,13	459.427.465.627,51
Jumlah	2.788.996.536.860,88	2.889.522.261.736,62	3.225.205.585.010,93	3.366.199.570.586,54	3.688.058.471.333,23



Gambar 7. Grafik Perkembangan Nilai Aset Daerah Tahun 2021–2025

3.2.2. KEWAJIBAN DAERAH

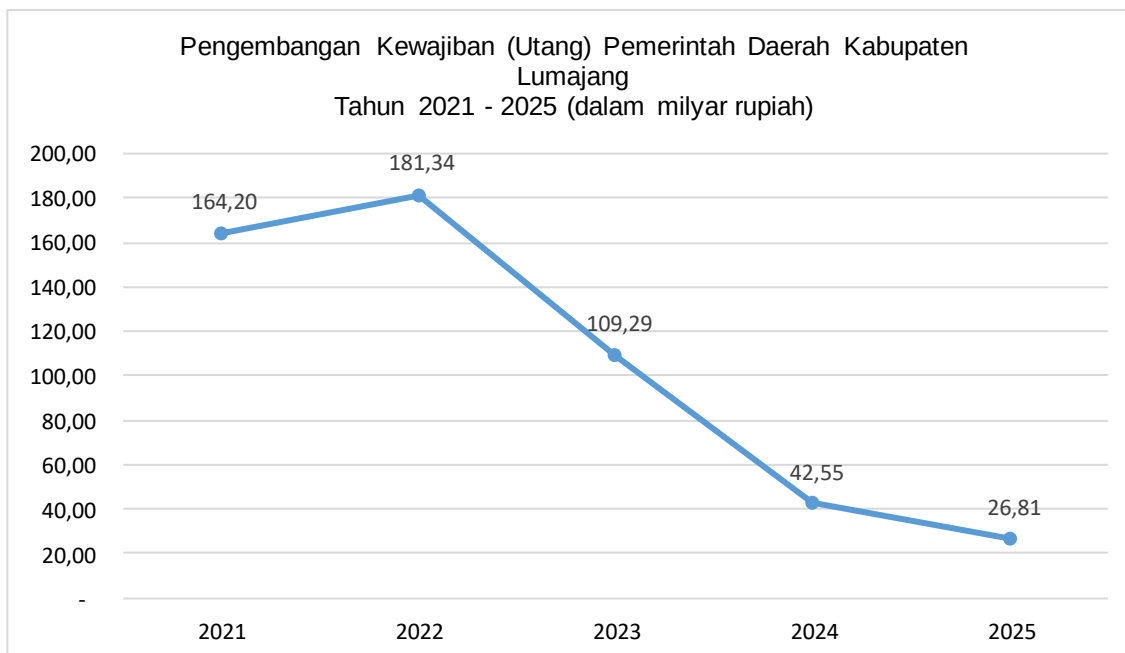
Kewajiban Daerah dibedakan menjadi kewajiban lancar atau jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat berupa pendapatan diterima dimuka, utang belanja dan bagian lancar utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Perkembangan jumlah kewajiban pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin menurun. Kewajiban jangka pendek perkembangannya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang dalam 3 (tiga) tahun terakhir sudah bersaldo nol karena kewajiban telah diselesaikan. Kewajiban yang ada di tahun 2025 merupakan pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Perkembangan posisi kewajiban daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Perkembangan Posisi Kewajiban Daerah Per 31 Desember 2021–2025

Dalam Rupiah

NO	KEWAJIBAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kewajiban Jangka Pendek	132.207.147.536,96	117.056.648.500,37	109.294.856.745,09	42.550.082.655,79	34.019.915.456,62
2	Kewajiban Jangka Panjang	31.993.006.414,00	64.283.084.169,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	164.200.153.950,96	181.339.732.669,37	109.294.856.745,09	42.550.082.655,79	34.019.915.456,62



Gambar 8. Grafik Perkembangan Kewajiban (Utang) Daerah Tahun 2021–2025

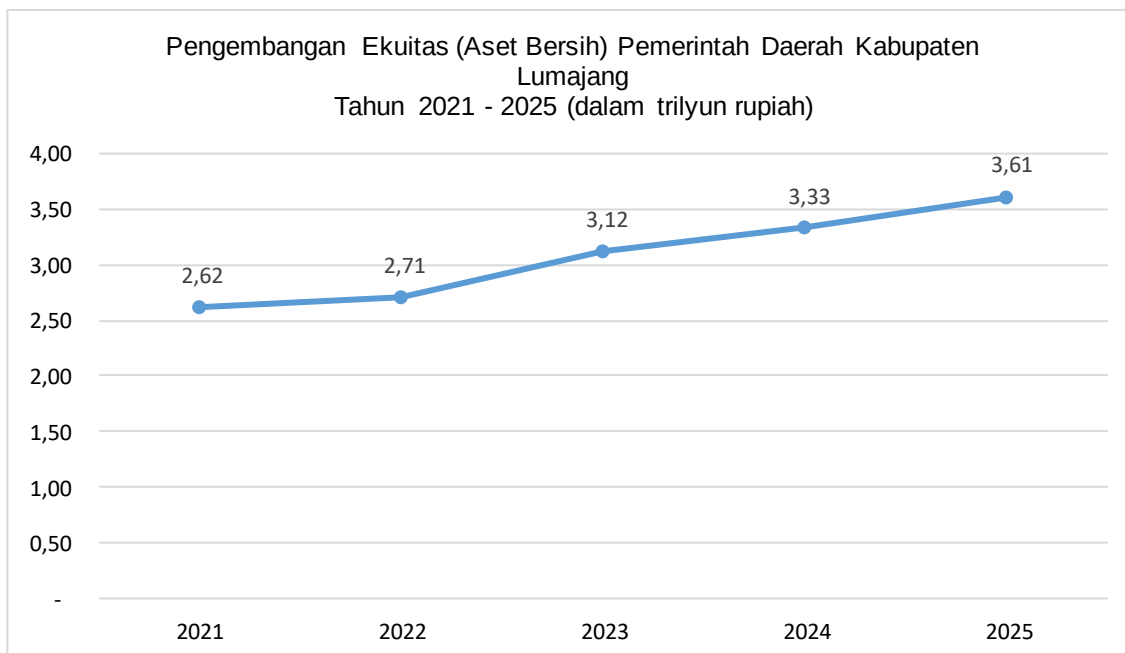
3.2.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas mencerminkan jumlah kekayaan neto/bersih milik pemerintah daerah. Posisi ekuitas pemerintah daerah pada akhir Tahun 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan jumlah aset daerah yang semakin naik setiap tahun dan adanya penurunan jumlah kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah.

Tabel 20. Perkembangan Posisi Ekuitas per 31 Desember 2021–2025

Dalam Rupiah

Tahun	Aset Daerah	Kewajiban Daerah	Ekuitas
2021	2.788.996.536.860,88	164.200.153.950,96	2.624.796.382.909,92
2022	2.889.522.261.736,62	181.339.732.669,37	2.708.182.529.067,25
2023	3.225.205.585.010,93	109.294.856.745,09	3.115.910.728.265,84
2024	3.366.199.570.586,54	42.550.082.655,79	3.323.649.487.930,75
2025	3.688.058.471.333,23	34.019.915.456,62	3.654.038.555.876,61



Gambar 9. Grafik Perkembangan Ekuitas Tahun 2021–2025

3. 3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

3.3.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Sebagian besar fungsi akuntansi pada seluruh entitas belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi belum memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan yang paling menonjol adalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana BOS, dana BOK dan BLUD dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang kurang memadai terutama dalam pemahaman pengelolaan keuangan maupun akuntansi dan pelaporan keuangan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/provinsi dan institusi lain sesuai dengan bidang kewenangannya.

3.3.2. Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan melakukan bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya Biro Keuangan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.

3.3.3. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah belum optimalnya terhadap pengelolaan aset/barang milik daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan lebih intensif. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya pembinaan pengelolaan barang milik daerah kepada pengurus barang pengguna, inventarisasi barang milik daerah, meskipun belum optimal telah dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran. Penatausahaan BMD melalui perubahan sistem dengan memanfaatkan E-BMD juga telah dilaksanakan meskipun belum berjalan optimal, karena keterbatasan anggaran, terkendala jaringan internet dan kapasitas server yang masih perlu ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

3.3.4. Belum Optimalnya Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum optimal. Saat ini penggunaan SIPD secara penuh baru pada perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan belum memanfaatkan SIPD. Penatausahaan keuangan daerah dan akuntansi pelaporan masih menggunakan aplikasi lain (SIPKD) sebagai pendamping, sehingga transaksi di input pada dua sistem yaitu SIPD dan SIPKD. Akan tetapi implementasinya lebih utama pada penggunaan SIPKD dari pada SIPD karena pada implementasi SIPD tahun 2025 setiap ada kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kementerian Dalam Negeri sangat lambat dalam merespon setiap permasalahan yang dikonsultasikan, sementara pengelolaan keuangan daerah harus tetap berjalan dan tidak bisa menunggu penyelesaian dari pengembang sistem. Dengan kondisi ini SIPKD menjadi alternatif terkait adanya resiko tidak dapat dihasilkannya laporan keuangan daerah secara akurat yang disebabkan implementasi SIPD yang belum optimal.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan entitas akuntansi terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Puskesmas Tempursari
4. Puskesmas Pronojiwo
5. Puskesmas Candipuro
6. Puskesmas Penanggal
7. Puskesmas Pasirian
8. Puskesmas Bades
9. Puskesmas Tempeh
10. Puskesmas Gesang
11. Puskesmas Rogotruran
12. Puskesmas Labruk Kidul
13. Puskesmas Tekung
14. Puskesmas Kunir
15. Puskesmas Yosowilangun
16. Puskesmas Sumbersari
17. Puskesmas Jatiroto
18. Puskesmas Randuagung
19. Puskesmas Sukodono
20. Puskesmas Padang
21. Puskesmas Pasrujambe
22. Puskesmas Senduro
23. Puskesmas Gucialit
24. Puskesmas Kedungjajang
25. Puskesmas Klakah
26. Puskesmas Ranuyoso
27. Puskesmas Tunjung
28. Laboratorium Kesehatan Kabupaten
29. Instalasi Perbekalan Farmasi Kabupaten Lumajang
30. RSUD dr. Haryoto
31. RSUD Pasirian
32. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
33. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
34. Satuan Polisi Pamong Praja
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38. Dinas Tenaga Kerja

- 39.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- 40.Dinas Lingkungan Hidup
- 41.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 42.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 43.Dinas Perhubungan
- 44.Dinas Komunikasi dan Informatika
- 45.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 46.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 47.Dinas Pemuda dan Olahraga
- 48.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 49.Dinas Perikanan
- 50.Dinas Pariwisata
- 51.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 52.Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 53.Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- 54.Badan Kepegawaian Daerah
- 55.Sekretariat Daerah-Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 56.Sekretariat Daerah-Bagian Hukum
- 57.Sekretariat Daerah-Bagian Tata Pemerintahan
- 58.Sekretariat Daerah-Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 59.Sekretariat Daerah-Bagian Organisasi
- 60.Sekretariat Daerah-Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan
- 61.Sekretariat Daerah-Bagian Umum
- 62.Sekretariat Daerah-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- 63.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 64.Inspektorat Daerah
- 65.Kecamatan Lumajang
- 66.Kecamatan Lumajang-Kelurahan Citrodiwangsan
- 67.Kecamatan Lumajang-Kelurahan Ditotrunan
- 68.Kecamatan Lumajang-Kelurahan Jogotrunan
- 69.Kecamatan Lumajang-Kelurahan Jogoyudan
- 70.Kecamatan Lumajang-Kelurahan Tompokersan
- 71.Kecamatan Lumajang-Kelurahan Rogotrunan
- 72.Kecamatan Lumajang-Kelurahan Kepuharjo
- 73.Kecamatan Sukodono
- 74.Kecamatan Padang
- 75.Kecamatan Gucialit
- 76.Kecamatan Senduro
- 77.Kecamatan Pasrujambe
- 78.Kecamatan Sumbersuko
- 79.Kecamatan Tempeh
- 80.Kecamatan Pasirian
- 81.Kecamatan Candipuro
- 82.Kecamatan Pronojiwo
- 83.Kecamatan Tempursari
- 84.Kecamatan Kunir
- 85.Kecamatan Yosowilangun

- 86.Kecamatan Tekung
- 87.Kecamatan Rowokangkung
- 88.Kecamatan Jatiroto
- 89.Kecamatan Randuagung
- 90.Kecamatan Klakah
- 91.Kecamatan Ranuyoso
- 92.Kecamatan Kedungjajang

4.2. BASIS AKUNTANSI

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun berdasarkan basis akrual (*accrual*). Penerapan basis akrual dimaksud adalah:

- a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
- b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Basis pengukuran terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 3) Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.
- 4) Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Kas di Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan;
 - c. Kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- 5) Kas di Bendahara Penerimaan, yaitu penerimaan pendapatan pada SKPD yang belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi.
- 6) Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi:
 - a. Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi; dan
 - b. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
- 7) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), meliputi:
 - a. Kas di Bendahara Umum BLUD terdiri dari rekening penerimaan BLUD, rekening pengeluaran BLUD, dan rekening Kas Umum Umum BLUD;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD, yaitu penerimaan pendapatan BLUD yang belum disetorkan ke Rekening Penerimaan BLUD sampai dengan akhir periode akuntansi;
 - c. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, meliputi sisa uang tunai dan/atau saldo bank yang ada pada rekening Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas;
 - d. Kas di entitas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Kas Daerah, seperti saldo rekening di bank maupun uang tunai yang menjadi tanggung jawab Bendahara Dana BOS serta kas lainnya dalam bentuk apapun yang pengelolaannya di luar mekanisme Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Kas dicatat sebagai berikut:
 - a. Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
 - b. Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
 - c. Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

4.3.2 Piutang Daerah

1) Piutang Pajak dan Retribusi

- a. Piutang pajak dan piutang retribusi diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- b. Piutang pajak/piutang retribusi daerah diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan.

2) Piutang lainnya

Piutang lainnya meliputi jenis piutang berikut:

- a. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - Atas penyertaan modal pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas, piutang diakui pada saat perusahaan mengumumkan pembagian deviden melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah.
 - Untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah (BUMD) berbentuk selain perseroan terbatas, piutang diakui pada saat timbul hak atas laba perusahaan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perusahaan daerah.
 - Diukur sebesar nilai nominal pendapatan deviden/bagian laba perusahaan daerah yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

b. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang sah diakui pada saat timbul hak tagih atas Lain-lain PAD yang sah dan diukur sebesar nilai nominal yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan berdasarkan bukti pendukung/dokumen.

c. Piutang Transfer

- Piutang transfer meliputi piutang kepada Pemerintah Pusat atas dana bagi hasil pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah provinsi.
- Piutang transfer diakui pada akhir periode akuntansi pada saat timbul hak atas pendapatan transfer dari pemerintah pusat/provinsi yang kurang salur/belum ditransfer ke kas daerah dan pemerintah pusat/provinsi mengakuinya dengan menerbitkan Peraturan Presiden/SK Menteri Keuangan R.I/SK. Gubernur Jatim atau dokumen lainnya yang sah.
- Piutang transfer diukur sebesar nilai pendapatan transfer yang belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi berdasarkan Peraturan Presiden/SK Menteri Keuangan R.I/SK. Gubernur Jatim atau dokumen lainnya yang sah.

d. Piutang pendapatan daerah lainnya

Piutang pendapatan daerah lainnya seperti pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya, disajikan sebesar jumlah hak atas pendapatan tersebut yang belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

e. Piutang pemberian pinjaman

- Piutang pemberian pinjaman diakui pada saat terjadi realisasi pengeluaran pembiayaan dari kas daerah, dan didukung dengan adanya naskah perjanjian pemberian pinjaman yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
- Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

f. Piutang Tuntutan Ganti Rugi (Piutang TGR)

- TGR yang diselesaikan di luar pengadilan, piutang diakui pada saat diterbitkan SK Pembebanan/SKP2K/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
- TGR yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, piutang diakui setelah ada surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- Piutang tuntutan ganti rugi disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

3) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan

penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4) Pemberhentian Pengakuan Piutang

- a. Pemberhentian pengakuan piutang disebabkan karena pelunasan, penghapustagihan (*write off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
- b. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern pemerintah daerah, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- c. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.
- d. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

5) Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus Buku

Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbuku, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan akun penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

6) Penilaian Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

7) Kualitas Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- a. Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 Tahun; dan/atau Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak likuid; dan/atau Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun; dan/atau Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 Tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Macet, jika umur piutang di atas 5 Tahun; dan/atau Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

8) Kualitas Piutang Retribusi dibedakan sebagai berikut:

- a. Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

9) Kualitas Piutang Lainnya dibedakan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kurang Lancar, apabila umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Diragukan, apabila umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan
- d. Macet, apabila umur piutang di atas 5 tahun.

10) Penyisihan piutang tidak tertagih

- a. Persentase penyisihan piutang tak tertagih ditentukan sebagai berikut:
 - 0,5% dari jumlah piutang kategori lancar;
 - 10% dari jumlah piutang kategori kurang lancar;
 - 50% dari jumlah piutang kategori diragukan; dan
 - 100% dari jumlah piutang kategori macet.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, tetapi merupakan penyesuaian agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam Daftar Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

4.3.3 Persediaan

1) Persediaan meliputi:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, materai, perangko dan benda pos, peralatan kebersihan habis pakai dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Pengakuan Persediaan

- a. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisi fisik.
- b. Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- c. Selisih antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kedaluwarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

3) Pengukuran persediaan

Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, diukur sebesar biaya perolehan menggunakan metode harga pembelian terakhir, kecuali persediaan obat menggunakan metode FIFO.

- a. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, diukur sebesar harga pokok produksi;
- b. Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi diukur dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian

- kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- c. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; dan
 - d. Persediaan dicatat dengan metode fisik/periodik.

4.3.4 Investasi

- 1) Perolehan investasi secara tunai, diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah. Sedangkan investasi yang perolehannya dengan penyerahan aset selain kas diakui pada saat aset selain kas tersebut diserahkan.
- 2) Pengakuan investasi harus memenuhi kriteria yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

3) Pengukuran investasi jangka pendek

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga yang terdapat nilai biaya perolehannya, dicatat sebesar biaya perolehan yang mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. Sedangkan jika tidak terdapat biaya perolehannya, dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

4) Pengukuran investasi jangka panjang sebagai berikut

- a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi non permanen:
 - (1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - (4) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - (5) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5) Penilaian investasi

- a. **Metode biaya**, untuk kepemilikan investasi kurang dari 20% dan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi.
- b. **Metode ekuitas**, untuk kepemilikan investasi 20% sampai 50%; lebih dari 50%; atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan:
 - (1) Investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

- (2) Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
- (3) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, termasuk investasi non permanen. Investasi dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi

6) Pengakuan Hasil Investasi

- a. Hasil investasi jangka pendek seperti bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividen*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
 - b. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
 - d. Hasil investasi berupa dividen saham tidak menambah nilai investasi pemerintah daerah.
- 7) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan karena sebab lainnya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi dan disajikan di laporan operasional.

4.3.5 Aset Tetap

1) Pengakuan, Penilaian, dan Penyajian Aset Tetap

- a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- d. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- e. Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau melewati satu periode Tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam

pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

- f. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- g. Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- h. Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- i. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
- j. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakan mengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*).
- k. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- l. Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban Tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- m. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang, dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- n. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.
- b. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

- c. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
 - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
 - (3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.
- d. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.
- e. Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu diabaikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingkan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya pada sektor privat (swasta).
- f. Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat 2 Tahun (50%) untuk aset tetap alat angkutan berat tak bermotor.
 - (2) Masa manfaat 4 Tahun (25%) untuk aset tetap alat angkut apung tak bermotor; alat pengolahan pertanian; alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian; peralatan komputer; persenjataan non senjata api.
 - (3) Masa manfaat 5 Tahun (20%) untuk aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin; Alat Ukur; Alat Kantor; Alat Rumah Tangga; Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; Alat Studio; alat komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Kesehatan; Alat Keamanan dan Perlindungan.
 - (4) Masa manfaat 8 Tahun (12,5%) untuk aset tetap Alat-alat Besar Apung; Alat Angkutan Darat Bermotor; Unit-Unit Laboratorium; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
 - (5) Masa manfaat 10 Tahun (10%) untuk aset tetap Alat-Alat Besar Darat; Alat Angkut Apung Bermotor; Alat Bengkel Bermesin; Peralatan Pemancar; Alat Peraga/Praktek Sekolah; Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir; Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; *Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory*; senjata api;
 - (6) Masa manfaat 15 Tahun (6,67%) untuk aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika.
 - (7) Masa manfaat 20 Tahun (5%) untuk aset tetap Alat Angkut Bermotor Udara.
- g. Masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat 50 Tahun (2%) untuk aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Bangunan bersejarah; Tugu peringatan; Monumen; Tugu titik kontrol; rambu-rambu; dan
 - (2) Masa manfaat 40 Tahun (2,5%) untuk aset tetap bangunan Menara.
- h. Masa manfaat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat 10 Tahun (10%) untuk aset tetap Jalan; Bangunan; Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam; Instalasi Pengolahan Sampah; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan;

- (2) Masa manfaat 20 Tahun (5%) untuk aset tetap Instalasi Pengaman, jaringan telepon;
- (3) Masa manfaat 25 Tahun (4%) untuk aset tetap Bangunan Air Rawa; Bangunan Pengembangan Sbr. Air dan Air Tanah; Instalasi Air Minum/Air Bersih; Instalasi Air Kotor; Instalasi Pertahanan; Instalasi Gas; Jaringan Air Minum; Jaringan Gas;
- (4) Masa manfaat 40 Tahun (2,5%) untuk aset tetap Bangunan Air Bersih/Baku; Bangunan Air Kotor; Bangunan Air; Instalasi Pembangkit Listrik; Instalasi Gardu Listrik; Jaringan Listrik;
- (5) Masa manfaat 50 Tahun (2%) untuk aset tetap Jembatan; bangunan air irigasi; bangunan air pasang surut;
- i. Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya.
- j. Penyusutan aset tetap dilakukan satu semester (pendekatan semester) pada akhir semester tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

3) Kapitalisasi Aset Tetap

- a. Pengeluaran atas pembelian baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dikapitalisasi sebagai aset tetap sepanjang pengeluaran tersebut memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap.
- b. Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap tanah dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap tanah, meliputi biaya pembebasan tanah; biaya pembayaran honor tim pembebasan tanah; biaya pembuatan sertifikat tanah; biaya pematangan, pengukuran dan pengurukan tanah; biaya-biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga membawa aset tetap tanah ke kondisi siap untuk dimanfaatkan.
- c. Batasan minimal jumlah harga perolehan awal atau pengadaan baru yang dikapitalisasi ke nilai aset tetap peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit.
- d. Pengeluaran biaya setelah perolehan awal dikapitalisasi menambah nilai peralatan dan mesin sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat dan memenuhi batas minimal pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin Rp500.000,00.
- e. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin dengan jumlah berapapun untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar peralatan dan mesin berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai peralatan dan mesin serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
- f. Batasan minimal jumlah harga perolehan awal atau pengadaan baru yang dikapitalisasi ke nilai aset tetap gedung dan bangunan adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.
- g. Pengeluaran biaya setelah perolehan awal aset tetap minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikapitalisasi menambah nilai gedung dan bangunan sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat.
- h. Pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi

atau untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar gedung dan bangunan berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan dan dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

- i. Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan, sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat, yang disebabkan karena adanya perbaikan, penambahan dan pengembangan.
- j. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap jalan, irigasi dan jaringan untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar jalan, irigasi dan jaringan berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai jalan, irigasi dan jaringan serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.
- k. Semua pengeluaran dalam rangka pengadaan baru atau pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset tetap lainnya, sepanjang pengeluaran tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas atau masa manfaat.
- l. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya untuk pemeliharaan rutin (*maintenance*) guna mempertahankan agar aset tetap lainnya berfungsi normal sebagaimana mestinya, diakui sebagai beban dan tidak dikapitalisasi menambah nilai aset tetap lainnya serta dianggarkan pada belanja barang dan jasa.

4) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

- a. Suatu aset berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika pekerjaan konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- d. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- e. Konstruksi yang dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman seperti bunga dan biaya pinjaman lainnya yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

4.3.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud (ATB), dan Aset Lain-lain.

1) Tagihan jangka panjang, meliputi:

- a. Tagihan penjualan angsuran diperoleh dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/pejabat daerah pemerintah daerah, diakui pada saat timbul hak/klaim atas penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Bagian Lancar Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam 1 (satu) periode akuntansi diakui sebagai piutang sebagai bagian dari aset lancar.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2) Kemitraan dengan pihak ketiga, meliputi:

- a. Sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.
- b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya, diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).
- c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT) adalah kerjasama pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3) Aset Tak Berwujud

- a. Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas

dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi *Software* komputer; Lisensi dan *Frenchise*; Hak Paten dan Hak Cipta; Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; ATB dalam pengerjaan.

- b. Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- c. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Masa Manfaat aset tak berwujud ditetapkan 5 (lima) Tahun, setiap tahun terdapat tarif amortisasi sebesar 20%.

4) Aset Lain-lain

- a. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- b. Aset Lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain.

4.3.7 Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (LS).
- 2) Pembentukan Dana Cadangan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam SP2D LS pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan.
- 3) Bunga/Jasa Giro dari rekening dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal diakui/dikapitalisasi menambah saldo dana cadangan; dan
- 4) Pencairan Dana Cadangan dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Daerah berdasarkan surat perintah pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah kepada Bank tempat Rekening Dana Cadangan disimpan.

4.3.8 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

1) Jenis Kewajiban

- a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya

- b. Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri–Pemerintah Pusat, utang dalam negeri–Pemerintah Daerah lainnya; Utang Dalam Negeri–Lembaga Keuangan Bank; Utang Dalam Negeri– Lembaga Keuangan Bukan Bank; Utang Dalam Negeri–Obligasi; Utang jangka panjang lainnya.

2) Pengakuan kewajiban

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non exchange transactions*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government related events*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government acknowledge events*), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3) Pengukuran Kewajiban

- a. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- b. Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- d. Pendapatan diterima dimuka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah.
- e. Utang belanja/Utang kepada pihak ketiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
- f. Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- h. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut:

- (1) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.
- (2) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.3.9 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.10 Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan–LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

1) Pendapatan–LO

- a. Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan–LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.
- c. Pendapatan–LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

2) Pendapatan–LRA

- a. Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan–LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.
- c. Pendapatan–LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.
- d. Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan–LRA dan Pendapatan–LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama

BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan-LO sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah.

- e. Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya

4.3.11 Belanja dan Beban

1) Belanja

- a. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil.
- d. Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- e. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang barang, belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.
- c. Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi.
- d. Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.
- e. Beban bunga diakui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga diakui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.
- f. Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang diakui pada akhir periode akuntansi.
- g. Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud diakui pada akhir periode akuntansi.
- h. Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

- i. Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- j. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4.3.12 Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan

- a. Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah, diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima.

2) Pengeluaran pembiayaan

- a. Adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah, diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana diatur di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka memenuhi tujuan umum (*general purpose financial statements*), Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 telah berpedoman kepada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah berpedoman pada dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana diatur di dalam PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.
- c. Penyusunan Laporan Arus Kas telah berpedoman pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.
- d. Penyusunan Laporan Operasional telah berpedoman pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional.
- e. Penyusunan neraca telah berpedoman pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- f. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA mencakup pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA; pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.1 PENDAPATAN	2.201.559.427.970,94	2.226.493.007.443,52	2.293.895.944.229,91

Pendapatan daerah di dalam LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi anggaran pendapatan daerah Tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pendapatan Asli Daerah	439.975.119.873,40	480.129.304.402,52	109,13	393.568.995.459,39	86.560.308.943,13	21,99
2	Pendapatan Transfer	1.761.584.308.097,54	1.745.824.170.892,00	99,11	1.898.032.999.357,00	(152.208.828.465,00)	(8,02)
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	539.532.149,00	0,00	2.293.949.413,52	(1.754.417.264,52)	(76,48)
	Jumlah	2.201.559.427.970,94	2.226.493.007.443,52	101,13	2.293.895.944.229,91	(67.402.936.786,39)	(2,94)

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	439.975.119.873,40	480.129.304.402,52	393.568.995.459,39

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Rincian realisasi PAD Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 22. Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pajak Daerah	171.794.657.379,00	179.795.142.722,20	104,66	116.114.772.143,00	63.680.370.579,20	54,84
2	Retribusi Daerah	256.434.827.914,00	275.107.208.572,00	107,28	261.093.948.672,04	14.013.259.899,96	5,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.865.835.557,40	5.909.911.408,20	100,75	6.707.256.552,09	(797.345.143,89)	(11,89)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	5.879.799.023,00	19.317.041.700,12	328,53	9.653.018.092,26	9.664.023.607,86	100,11
	Jumlah	439.975.119.873,40	480.129.304.402,52	109,13	393.568.995.459,39	86.560.308.943,13	21,99

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1) Pajak Daerah	171.794.657.379,00	179.795.142.722,20	116.114.772.143,00

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan sebagai landasan hukum pemungutan pajak daerah di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2024.

Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari PBB-P2, pajak reklame, PAT, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Sedangkan BPHTB, PBJT, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Rincian realisasi pajak daerah Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 23. Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pajak Reklame	2.300.000.000,00	2.045.192.403,00	88,92	2.086.396.815,00	(41.204.412,00)	(1,97)
2	Pajak Air Tanah	1.150.000.000,00	1.178.497.194,00	102,48	1.125.559.856,00	52.937.338,00	4,70
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.350.000.000,00	24.060.776.375,20	98,81	24.668.654.088,00	(607.877.712,80)	(2,46)
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.670.000.000,00	18.908.814.878,00	83,41	19.308.429.792,00	(399.614.914,00)	(2,07)
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	21.050.000.000,00	26.346.566.606,00	125,16	24.498.626.661,00	1.847.939.945,00	7,54
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	42.500.000.000,00	46.331.616.366,00	109,02	44.427.104.931,00	1.904.511.435,00	4,29
	- PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.500.000.000,00	5.364.177.592,00	97,53	4.491.931.421,00	872.246.171,00	19,42
	- PBJT-Tenaga Listrik	35.000.000.000,00	37.964.264.753,00	108,47	38.366.437.590,00	(402.172.837,00)	(1,05)

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
	- PBJT-Jasa Perhotelan	1.300.000.000,00	1.344.843.493,00	103,45	1.007.024.597,00	337.818.896,00	33,55
	- PBJT-Jasa Parkir	550.000.000,00	473.880.441,00	86,16	425.429.646,00	48.450.795,00	11,39
	- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	150.000.000,00	1.184.450.087,00	789,63	136.281.677,00	1.048.168.410,00	769,12
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	44.449.251.083,00	45.231.016.500,00	101,76	0,00	45.231.016.500,00	0,00
8	Opsen BBNKB	13.325.406.296,00	15.692.662.400,00	117,76	0,00	15.692.662.400,00	0,00
	Jumlah	171.794.657.379,00	179.795.142.722,20	104,66	116.114.772.143,00	63.680.370.579,20	54,84

Realisasi pajak daerah tahun 2025 secara total melampaui target, realisasi mencapai 104,66% dari anggarannya. Dibanding tahun 2024, realisasinya terjadi peningkatan sebesar 54,84%. Sebanyak 5 jenis pajak telah melampaui target yang telah ditetapkan, untuk yang 3 jenis pajak tidak mencapai target.

Pada tahun 2025 opsen pajak PKB dan opsen pajak BBNKB telah diberlakukan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur sehingga ada realisasi yang melebihi target.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2) Retribusi Daerah	256.434.827.914,00	275.107.208.572,00	261.093.948.672,04

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 24. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah							
No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
I	Retribusi Jasa Umum						
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	238.210.719.619,00	261.657.756.093,00	109,84	248.547.177.784,00	13.110.578.309,00	5,27
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.773.510.000,00	1.275.041.000,00	71,89	778.020.500,00	497.020.500,00	63,88
3	Retribusi Pelayanan Pasar	9.531.908.014,00	6.321.948.776,00	66,32	6.454.148.875,00	(132.200.099,00)	(2,05)
4	Retribusi Pelayanan Kebersihan	764.105.000,00	755.037.563,00	98,81	715.981.264,04	39.056.298,96	5,45
II	Retribusi Jasa Usaha						
1	Retribusi Terminal	65.000.000,00	48.132.600,00	74,05	36.892.200,00	11.240.400,00	30,47
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.520.000,00	24.680.000,00	169,97	9.790.000,00	14.890.000,00	152,09
3	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	255.168.000,00	391.417.000,00	153,40	207.948.500,00	183.468.500,00	88,23

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
4	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	297.735.000,00	222.620.000,00	74,77	265.350.000,00	(42.730.000,00)	(16,10)
5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.641.448.000,00	2.110.904.432,00	79,91	2.131.405.650,00	(20.501.218,00)	(0,96)
6	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.100.000,00	8.250.000,00	13,73	6.345.000,00	1.905.000,00	30,02
7	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.761.804.681,00	1.435.229.898,00	81,46	1.050.176.308,00	385.053.590,00	36,67
III	Retribusi Perizinan Tertentu						
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	796.311.210,00	79,63	890.712.591,00	(94.401.381,00)	(10,60)
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	58.809.600,00	59.880.000,00	101,82	0,00	59.880.000,00	0,00
	Jumlah	256.434.827.914,00	275.107.208.572,00	107,28	261.093.948.672,04	14.013.259.899,96	5,37

Landasan hukum pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Lumajang adalah Perda Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana jenis retribusi yang dapat pungut di wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 3 (tiga) jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan; Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan Retribusi Pelayanan Pasar. Selanjutnya Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan; Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa, Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak; Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga; Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan	238.210.719.619,00	261.657.756.093,00	248.547.177.784,00

Retribusi pelayanan kesehatan adalah pendapatan retribusi yang dipungut atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi Puskesmas, RSUD, dan Laboratorium Kesehatan. Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025 sebesar Rp261.657.756.093,00 merupakan pendapatan retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas, RSUD dan Laboratorium Kesehatan. Sedangkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2024 sebesar Rp248.547.177.784,00 merupakan pendapatan yang dipungut oleh Balai Kesehatan dan Olah Raga Dinas Kesehatan P2KB.

Rincian realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 25. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Keniakan (Penurunan)	%
I	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	56.827.151.546,00	69.413.670.082,00	122,15	65.945.634.493,00	3.468.035.589,00	5,26
1	Puskesmas Tempursari	1.770.153.000,00	1.940.019.375,00	118,16	2.091.554.775,00	(151.535.400,00)	(7,25)
2	Puskesmas Pronojiwo	1.543.044.000,00	2.428.707.379,00	126,30	1.948.922.427,00	479.784.952,00	24,62
3	Puskesmas Candipuro	2.204.389.580,00	2.865.545.961,00	116,77	2.574.003.672,00	291.542.289,00	11,33
4	Puskesmas Penanggal	1.362.830.000,00	2.131.129.699,00	141,80	1.932.541.066,00	198.588.633,00	10,28
5	Puskesmas Pasirian	3.281.979.320,00	3.924.767.055,00	110,86	3.638.501.400,00	286.265.655,00	7,87
6	Puskesmas Bades	1.398.000.000,00	1.787.108.443,00	115,43	1.613.670.806,00	173.437.637,00	10,75
7	Puskesmas Tempeh	3.220.198.000,00	3.646.584.318,00	119,83	3.858.901.304,00	(212.316.986,00)	(5,50)
8	Puskesmas Gesang	1.676.265.283,00	2.171.551.333,00	121,80	2.041.731.306,00	129.820.027,00	6,36
9	Puskesmas Rogotrunan	2.575.095.108,00	3.359.569.044,00	123,63	3.183.681.815,00	175.887.229,00	5,52
10	Puskesmas Labruk Kidul	1.661.479.000,00	1.997.574.679,00	111,84	1.858.182.213,00	139.392.466,00	7,50
11	Puskesmas Tekung	1.821.654.000,00	2.385.286.529,00	111,02	2.022.433.946,00	362.852.583,00	17,94
12	Puskesmas Kunir	3.480.393.277,00	3.857.516.829,00	113,66	3.955.973.942,00	(98.457.113,00)	(2,49)
13	Puskesmas Yosowilangun	2.600.969.236,00	3.272.181.822,00	116,93	3.041.413.625,00	230.768.197,00	7,59
14	Puskesmas Sumbersari	2.100.315.000,00	2.715.822.721,00	123,90	2.602.370.070,00	113.452.651,00	4,36
15	Puskesmas Jatiroto	2.231.325.000,00	3.184.665.328,00	127,91	2.854.118.448,00	330.546.880,00	11,58
16	Puskesmas Randuagung	2.322.108.600,00	2.614.208.947,00	101,68	2.361.181.570,00	253.027.377,00	10,72
17	Puskesmas Sukodono	2.139.644.662,00	2.702.705.775,00	121,50	2.599.639.862,00	103.065.913,00	3,96
18	Puskesmas Padang	2.112.937.264,00	2.523.916.409,00	114,14	2.411.714.068,00	112.202.341,00	4,65
19	Puskesmas Pasrumambe	1.435.003.768,00	2.017.114.950,00	116,45	1.671.056.714,00	346.058.236,00	20,71
20	Puskesmas Senduro	2.595.144.062,00	3.043.193.820,00	113,31	2.940.569.116,00	102.624.704,00	3,49
21	Puskesmas Gucialit	1.625.044.652,00	1.858.207.565,00	108,90	1.769.724.199,00	88.483.366,00	5,00
22	Puskesmas Kedungjajang	3.172.402.146,00	3.333.336.852,00	104,84	3.326.029.567,00	7.307.285,00	0,22
23	Puskesmas Klakah	3.825.393.969,00	4.217.498.879,00	113,69	4.349.037.146,00	(131.538.267,00)	(3,02)
24	Puskesmas Ranuyoso	2.418.792.019,00	3.013.455.034,00	124,94	3.022.066.733,00	(8.611.699,00)	(0,28)
25	Puskesmas Tunjung	2.252.590.600,00	2.422.001.336,00	101,07	2.276.614.703,00	145.386.633,00	6,39
II	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	176.908.280.500,00	185.480.566.011,00	104,85	178.356.902.191,00	7.123.663.820,00	3,99
1	RSUD dr Haryoto	147.826.280.500,00	154.273.071.181,00	104,36	143.679.788.308,00	10.593.282.873,00	7,37
2	RSUD Pasirian	29.082.000.000,00	31.207.494.830,00	107,31	34.677.113.883,00	(3.469.619.053,00)	(10,01)
III	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis	4.475.287.573,00	6.763.520.000,00	151,13	4.244.641.100,00	2.518.878.900,00	59,34
1	Laboratorium Kesehatan	4.475.287.573,00	6.763.520.000,00	151,13	4.244.641.100,00	2.518.878.900,00	59,34
	Jumlah	238.210.719.619,00	261.657.756.093,00	109,84	248.547.177.784,00	13.110.578.309,00	5,27

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
b) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.773.510.000,00	1.275.041.000,00	778.020.500,00

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut oleh Dinas Perhubungan. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Tahun 2025 mencapai Rp1.275.041.000,00 atau 71,89% dari anggaran sebesar Rp1.773.510.000,00. Dibanding Tahun 2024, realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp497.020.500,00 atau 63,88%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya perubahan sistem pemungutannya dimana awalnya dipungut secara berlangganan kemudian beralih menjadi konvensional.

Rincian realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Retribusi Parkir	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Parkir Konvensional	1.622.880.000,00	1.273.416.000,00	78,47	425.871.500,00	847.544.500,00	199,01
2	Retribusi Parkir Insidentil	114.230.000,00	0,00	0,00	5.729.000,00	(5.729.000,00)	(100,00)
3	Retribusi Parkir Berlangganan	36.400.000,00	1.625.000,00	4,46	346.420.000,00	(344.795.000,00)	(99,53)
	Jumlah	1.773.510.000,00	1.275.041.000,00	71,89	778.020.500,00	497.020.500,00	63,88

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
c) Retribusi Pelayanan pasar	9.531.908.014,00	6.321.948.776,00	6.454.148.875,00

Retribusi pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa toko bertingkat, toko, kios, los, dan halaman/pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan). Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, lokasi pasar, dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Retribusi pelayanan pasar Tahun 2025 tidak mencapai target, dari anggaran sebesar Rp9.531.908.014,00 terealisasi sebesar Rp6.321.948.776,00 atau 66,32%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp132.200.099,00 atau 2,05% dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya.

Tabel 27. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Jenis Retribusi Pasar	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pelataran	526.356.000,00	769.683.200,00	146,23	833.429.000,00	(63.745.800,00)	(7,65)
2	Retribusi Los	1.088.769.076,00	1.111.957.662,50	102,13	1.144.954.750,00	(32.997.087,50)	(2,88)
3	Retribusi Kios	7.916.782.938,00	4.440.307.913,50	56,09	4.475.765.125,00	(35.457.211,50)	(0,79)
	Jumlah	9.531.908.014,00	6.321.948.776,00	66,32	6.454.148.875,00	(132.200.099,00)	(2,05)

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
d) Retribusi Pelayanan Kebersihan	764.105.000,00	755.037.563,00	715.981.264,04

Retribusi pelayanan kebersihan merupakan dari 2 (dua) jenis retribusi dengan nomenklatur retribusi pelayanan persampahan yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dan retribusi penyedotan kakus/tinja yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi retribusi pelayanan kebersihan tahun 2025 sebesar Rp755.037.563,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	718.885.000,00	693.170.000,00	96,42	647.869.000,00	45.301.000,00	6,99
2	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.220.000,00	61.867.563,00	136,81	68.112.264,04	(6.244.701,04)	(9,17)
	Jumlah	764.105.000,00	755.037.563,00	98,81	715.981.264,04	39.056.298,96	5,45

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
e) Retribusi Jasa Usaha Terminal	65.000.000,00	48.132.600,00	36.892.200,00

Pendapatan Retribusi Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan atas pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6

Realisasi pendapatan Retribusi Terminal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00 terealisasi 74,05% atau sebesar Rp48.132.600,00. Dibanding Tahun 2024, total realisasi pendapatan Retribusi Terminal mengalami kenaikan sebesar Rp11.240.400,00 atau 30,47%.

**Tabel 29. Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Terminal
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	65.000.000,00	48.132.600,00	74,05	36.892.200,00	11.240.400,00	30,47
	Jumlah	65.000.000,00	48.132.600,00	74,05	36.892.200,00	11.240.400,00	30,47

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
f) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	14.520.000,00	24.680.000,00	9.790.000,00

Retribusi jasa usaha penyediaan tempat kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan). Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, lokasi, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya. Realisasi tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Dalam rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. (Retribusi Kios Permanent Taman Artagama Toga, Parkir dan Sport Park Alun- alun Lumajang)	14.520.000,00	24.680.000,00	169,97	9.790.000,00	14.890.000,00	152,09
	Jumlah	14.520.000,00	24.680.000,00	169,97	9.790.000,00	14.890.000,00	152,09

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
g) Retribusi			
Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	255.168.000,00	391.417.000,00	207.948.500,00

Retribusi jasa usaha Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Dinas Perhubungan. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Tabel 31. Realisasi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Tahun 2025 dan 2024

Dalam rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	255.168.000,00	391.417.000,00	153,40	207.948.500,00	183.468.500,00	88,23
	Jumlah	255.168.000,00	391.417.000,00	153,40	207.948.500,00	183.468.500,00	88,23

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
h) Retribusi			
Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	297.735.000,00	222.620.000,00	265.350.000,00

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian). Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, dan/atau frekuensi layanan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan.

Tabel 32. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak Tahun 2025 dan 2024

Dalam rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	297.735.000,00	222.620.000,00	74,77	265.350.000,00	(42.730.000,00)	(16,10)
	Jumlah	297.735.000,00	222.620.000,00	74,77	265.350.000,00	(42.730.000,00)	(16,10)

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
i) Retribusi Pelayanan			
Tempat Rekreasi,	2.641.448.000,00	2.110.904.432,00	2.131.405.650,00
Pariwisata, dan Olahraga			

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dikelola oleh Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olah Raga, dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 33. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam rupiah							
No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	51.470.000,00	52.840.000,00	102,66	52.461.000,00	379.000,00	0,72
	Balai Kesehatan dan Olah Raga	51.470.000,00	52.840.000,00	102,66	52.461.000,00	379.000,00	0,72
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	200.550.000,00	223.295.000,00	111,34	261.899.000,00	(38.604.000,00)	(14,74)
	Kolam Renang Veteran	56.400.000,00	66.603.000,00	118,09	56.632.000,00	9.971.000,00	17,61
	Stadion Semeru	94.660.000,00	121.990.000,00	128,87	178.820.000,00	(56.830.000,00)	(31,78)
	Sewa GOR Wira Bakti	39.690.000,00	32.702.000,00	82,39	23.547.000,00	9.155.000,00	38,88
	- Lapangan Suko Raya	9.800.000,00	2.000.000,00	20,41	2.900.000,00	(900.000,00)	(31,03)
3	Dinas Pariwisata	2.389.428.000,00	1.834.769.432,00	76,79	1.817.045.650,00	17.723.782,00	0,98
	Pemandian alam Selokambang	1.856.428.000,00	1.473.522.042,00	79,37	1.406.593.800,00	66.928.242,00	4,76
	Water Park KWT	400.000.000,00	226.675.390,00	56,67	283.914.850,00	(57.239.460,00)	(20,16)
	Ranu Klakah	125.000.000,00	130.676.000,00	104,54	114.832.000,00	15.844.000,00	13,80
	B 29 Area Parkir	8.000.000,00	3.896.000,00	48,70	11.705.000,00	(7.809.000,00)	(66,72)
	Jumlah 1+2+3	2.641.448.000,00	2.110.904.432,00	79,91	2.131.405.650,00	(20.501.218,00)	(0,96)

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
j) Retribusi			
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	60.100.000,00	8.250.000,00	6.345.000,00

Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola oleh RSUD dr. Haryoto dan Dinas Lingkungan Hidup, dengan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 34. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	RSUD Dr. Haryoto	55.000.000,00	5.000.000,00	9,09	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	Kantong Jenazah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peti Jenazah	25.000.000,00	5.000.000,00	20,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	Plastik Erat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	5.100.000,00	3.250.000,00	63,73	3.845.000,00	(595.000,00)	(15,47)
	Jasa Pelayanan Uji Lab	5.100.000,00	3.250.000,00	63,73	3.845.000,00	(595.000,00)	(15,47)
	Jumlah 1+2	60.100.000,00	8.250.000,00	13,73	6.345.000,00	1.905.000,00	30,02

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
k) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.761.804.681,00	1.435.229.898,00	1.050.176.308,00

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa barang milik daerah yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, atau kerja sama penyediaan infrastruktur. Secara rinci realisasi Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 35. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2025 dan 2024

Dalam rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	6.500.000,00	6.120.000,00	94,15	1.090.000,00	5.030.000,00	461,47
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	4.560.000,00	7.940.000,00	174,12	2.100.000,00	5.840.000,00	278,10
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	13.000.000,00	11.730.000,00	90,23	11.550.000,00	180.000,00	1,56
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	13.000.000,00	10.970.000,00	84,38	6.490.000,00	4.480.000,00	69,03
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	19.981.000,00	7.220.000,00	36,13	3.640.000,00	3.580.000,00	98,35
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	1.725.000,00	550.000,00	31,88	600.000,00	(50.000,00)	(8,33)
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	12.545.000,00	9.375.000,00	74,73	3.800.000,00	5.575.000,00	146,71
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	11.000.000,00	7.560.000,00	68,73	3.240.000,00	4.320.000,00	133,33
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	1.200.000,00	1.500.000,00	125,00	600.000,00	900.000,00	150,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	3.000.000,00	3.100.000,00	103,33	700.000,00	2.400.000,00	342,86
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	7.665.000,00	4.500.000,00	58,71	2.700.000,00	1.800.000,00	66,67
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	22.362.500,00	11.210.000,00	50,13	5.860.000,00	5.350.000,00	91,30

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	7.500.000,00	6.260.000,00	83,47	1.180.000,00	5.080.000,00	430,51
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumber Sari	7.500.000,00	4.770.000,00	63,60	2.180.000,00	2.590.000,00	118,81
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	2.000.000,00	2.520.000,00	126,00	800.000,00	1.720.000,00	215,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	12.000.000,00	8.320.000,00	69,33	10.610.000,00	(2.290.000,00)	(21,58)
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	3.450.000,00	1.000.000,00	28,99	500.000,00	500.000,00	100,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	5.400.000,00	5.200.000,00	96,30	2.300.000,00	2.900.000,00	126,09
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirjambe	15.000.000,00	9.500.000,00	63,33	12.250.000,00	(2.750.000,00)	(22,45)
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	10.640.000,00	14.524.000,00	136,50	6.298.000,00	8.226.000,00	130,61
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	2.900.000,00	1.910.000,00	65,86	590.000,00	1.320.000,00	223,73
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	8.000.000,00	6.305.000,00	78,81	9.152.500,00	(2.847.500,00)	(31,11)
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	34.310.000,00	24.535.000,00	71,51	25.977.500,00	(1.442.500,00)	(5,55)
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	16.560.000,00	27.540.000,00	166,30	7.845.000,00	19.695.000,00	251,05
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	23.537.000,00	3.500.000,00	14,87	2.950.000,00	550.000,00	18,64
26	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. HARYOTO	360.000.000,00	314.642.768,00	87,40	106.291.600,00	208.351.168,00	196,02
27	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	245.800.000,00	0,00	0,00	115.830.383,00	(115.830.383,00)	(100,00)
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	782.189.681,00	689.933.130,00	88,21	640.715.325,00	49.217.805,00	7,68
29	Dinas Lingkungan Hidup	7.277.000,00	7.445.000,00	102,31	7.277.000,00	168.000,00	2,31
30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	44.452.500,00	52.050.000,00	117,09	55.059.000,00	(3.009.000,00)	(5,47)
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.750.000,00	750.000,00	3,45	0,00	750.000,00	0,00
32	Dinas Pariwisata	35.000.000,00	172.750.000,00	493,57	0,00	172.750.000,00	0,00
	Jumlah	1.761.804.681,00	1.435.229.898,00	81,46	1.050.176.308,00	385.053.590,00	36,67

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
l) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	796.311.210,00	890.712.591,00

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini dipungut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Tabel 36. Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-PBG

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	796.311.210,00	79,63	890.712.591,00	(94.401.381,00)	(10,60)
	Jumlah	1.000.000.000,00	796.311.210,00	79,63	890.712.591,00	(94.401.381,00)	(10,60)

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
m) Retribusi			
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	58.809.600,00	59.880.000,00	0,00

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah pungutan daerah yang dibebankan kepada pemberi kerja TKA sebagai kompensasi atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan, yang sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kini menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan pemanfaatan utamanya untuk pengembangan sumber daya manusia lokal. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 yang mulai direalisasikan di tahun anggaran 2025.

Tabel 37. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	58.809.600,00	59.880.000,00	101,82	0,00	59.880.000,00	0,00
	Jumlah	58.809.600,00	59.880.000,00	101,82	0,00	59.880.000,00	0,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.865.835.557,40	5.909.911.408,20	6.707.256.552,09

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pendapatan dividen/bagian laba dari hasil investasi/penyertaan modal Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Dalam Rupiah							
No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)						
	PT. Bank Jatim	3.567.968.929,00	3.676.842.721,95	103,05	3.655.336.787,55	21.505.934,40	0,59
	PT. BPR Jatim	41.505.000,00	39.760.000,00	95,80	38.980.000,00	780.000,00	2,00
	Perumda BPR Bank Lumajang	528.565.869,15	528.565.869,15	100,00	383.053.017,00	145.512.852,15	37,99
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)						
	Perumda Air Minum Tirta Mahameru	1.727.795.759,25	1.664.742.817,10	96,35	2.629.886.747,54	(965.143.930,44)	(36,70)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)						
	Perumda Semeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.865.835.557,40	5.909.911.408,20	100,75	6.707.256.552,09	(797.345.143,89)	(11,89)

- Hasil penyertaan modal pada PT Bank Jatim Tbk pada Tahun 2025 sebesar Rp3.676.842.721,95 merupakan pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2024. Sedangkan hasil penyertaan modal pada PT Bank Jatim Tbk pada Tahun 2024 sebesar Rp3.655.336.787,55 merupakan pendapatan deviden tunai atas laba bersih Tahun 2023.
- Hasil penyertaan modal pada PT BPR Jatim Tahun 2025 sebesar Rp39.760.000,00 merupakan pendapatan deviden tunai atas atas laba bersih Tahun 2024. Sedangkan hasil penyertaan modal pada PT BPR Jatim pada Tahun 2024 sebesar Rp38.980.000,00 merupakan pendapatan deviden tunai atas atas laba bersih Tahun 2023.
- Hasil penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Lumajang Tahun 2025 sebesar Rp528.565.869,15 merupakan bagian laba atas laba bersih Tahun 2024. Sedangkan hasil penyertaan modal pada Tahun 2024 sebesar Rp383.053.017,00 merupakan bagian laba atas laba bersih Tahun 2023.
- Hasil penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru Tahun 2025 sebesar Rp 1.664.742.817,10 merupakan bagian laba atas laba bersih Tahun 2024. Sedangkan hasil penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru Tahun 2024 sebesar Rp2.629.886.747,54 merupakan bagian laba atas laba bersih Tahun 2023.
- Perumda Semeru pada tahun 2025 dan 2024 tidak menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah Daerah karena masih dalam posisi rugi.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
4) Lain-lain PAD yang Sah	5.879.799.023,00	19.317.041.700,12	9.653.018.092,26

Lain-lain PAD yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 sebesar Rp19.317.041.700,12 atau mencapai 328,53% dari anggaran sebesar Rp5.879.799.023,00. Dibanding Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 100,11% atau sebesar Rp9.664.023.607,86.

Tabel 39. Realisasi Anggaran Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	222.000.000,00	157.450.000,00	70,92	305.398.000,00	(147.948.000,00)	(48,44)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan (Hasil Sewa & Hasil Kerjasama Pemanfaatan)	1.586.623.950,00	2.219.821.044,00	139,91	2.232.598.000,00	(12.776.956,00)	(0,57)
3	Jasa Giro	1.500.000.000,00	2.778.944.085,89	185,26	1.673.230.869,65	1.105.713.216,24	66,08
4	Penerimaan Bunga	500.000.000,00	1.290.289.923,19	258,06	1.640.616.438,11	(350.326.514,92)	(21,35)
5	Tuntutan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah	0,00	4.472.675,00	0,00	23.500.000,00	(19.027.325,00)	(80,97)
6	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	399.785.362,86	0,00	35.861.899,00	363.923.463,86	1.014,79
7	Pendapatan Denda Pajak	0,00	197.746.903,00	0,00	123.633.494,43	74.113.408,57	59,95
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	9.824.164.874,90	0,00	1.166.514.965,37	8.657.649.909,53	742,18
10	Pendapatan BLUD :	2.071.175.073,00	2.437.844.565,34	117,70	2.446.515.757,70	(8.671.192,36)	(0,35)
	- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.361.192.800,00	1.606.094.644,00	117,99	1.739.057.979,12	(132.963.335,12)	(7,65)
	- Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	709.982.273,00	831.749.921,34	117,15	707.457.778,58	124.292.142,76	17,57
11	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	1.879.800,00	0,00	1.953.200,00	(73.400,00)	(3,76)
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	113.700,00	(113.700,00)	(100,00)
13	Penerimaan Lain-lain	0,00	4.642.465,94	0,00	3.081.768,00	1.560.697,94	50,64
	Jumlah	5.879.799.023,00	19.317.041.700,12	328,53	9.653.018.092,26	9.664.023.607,86	100,11

a) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan meliputi penjualan peralatan dan mesin dan penjualan aset tetap lainnya, terinci sebagai berikut:

**Tabel 40. Realisasi Anggaran Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Penjualan Peralatan dan Mesin (Badan Pengelola Keuangan Daerah)	0,00	0,00	0,00	96.900.000,00	(96.900.000,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya :	222.000.000,00	142.816.000,00	64,33	208.498.000,00	(65.682.000,00)	(31,50)
	- Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya (Dinas Perikanan)	150.000.000,00	70.816.000,00	47,21	136.498.000,00	(65.682.000,00)	(48,12)
	- Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman (DKPP)	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	72.000.000,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	0,00	14.634.000,00	0,00	0,00	14.634.000,00	100,00
	Jumlah	222.000.000,00	157.450.000,00	70,92	305.398.000,00	(147.948.000,00)	(48,44)

b) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Yang Tidak Dipisahkan

Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan merupakan penerimaan pendapatan sewa dari pemanfaatan BMD berupa hasil sewa tanah dan hasil sewa gedung dan bangunan. Realisasi tahun 2025 sebesar Rp2.219.821.044,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.232.598.000,00 masing-masing terdiri dari pendapatan sewa tanah dan pendapatan sewa bangunan, terinci sebagai berikut:

**Tabel 41. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Yang Tidak Dipisahkan
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	DPUTR	0,00	0,00	0,00	1.292.829.000,00	(1.292.829.000,00)	(100,00)
	Sewa Tanah Eks. Bengkok (Hasil sewa BMD)	0,00	0,00	0,00	1.292.829.000,00	(1.292.829.000,00)	(100,00)
2	DKPP	60.273.950,00	15.918.000,00	26,41	280.525.000,00	(264.607.000,00)	(94,33)
	Kebun Dinas (Hasil kerjasama pemanfaatan BMD)	53.400.000,00	8.250.000,00	15,45	274.850.000,00	(266.600.000,00)	(97,00)
	Rumah Dinas (Hasil sewa BMD)	6.873.950,00	7.668.000,00	111,55	5.675.000,00	1.993.000,00	35,12
3	DISKOPINDAG	391.120.000,00	115.065.900,00	29,42	150.920.000,00	(35.854.100,00)	(23,76)
	Retribusi Penyewaan BMD, Mopic (Hasil sewa BMD)	391.120.000,00	115.065.900,00	29,42	150.920.000,00	(35.854.100,00)	(23,76)
4	BPKD	970.050.000,00	1.944.507.144,00	200,45	350.750.000,00	1.593.757.144,00	454,39
	Hasil Sewa BMD	797.100.000,00	1.944.507.144,00	243,95	350.750.000,00	1.593.757.144,00	454,39
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	172.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DPKP	165.180.000,00	144.330.000,00	87,38	157.574.000,00	(13.244.000,00)	(8,40)
	Pendapatan Sewa Bangunan Rusunawa	165.180.000,00	144.330.000,00	87,38	157.574.000,00	(13.244.000,00)	(8,40)
	Jumlah (1 s/d 6)	1.586.623.950,00	2.219.821.044,00	139,91	2.232.598.000,00	(12.776.956,00)	(0,57)

c) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro meliputi penerimaan jasa giro atas rekening giro milik Pemerintah Daerah meliputi rekening penerimaan daerah; rekening pengeluaran daerah; rekening kas umum daerah; rekening bendahara pengeluaran, rekening BOS, dan rekening Dana Cadangan yang terinci sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Anggaran Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2025	2025	%	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.462.500.000,00	2.611.190.851,45	178,54	1.456.976.865,97	1.154.213.985,48	79,22
	Jasa giro rek. kas umum daerah	0,00	2.418.266.626,82	0,00	1.240.718.785,61	1.177.547.841,21	94,91
	Jasa giro rek. pengeluaran daerah	0,00	192.908.930,07	0,00	216.212.979,57	(23.304.049,50)	(10,78)
	Jasa giro rek. penerimaan daerah	0,00	15.294,56	0,00	45.100,79	(29.806,23)	(66,09)
2	Jasa giro rek. bendahara pengeluaran	37.500.000,00	165.875.794,96	442,34	170.821.552,15	(4.945.757,19)	(2,90)
3	Jasa giro rek. bendahara pengeluaran BOS	0,00	675.519,21	0,00	506.849,83	168.669,38	33,28
4	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	1.201.920,27	0,00	3.359.568,70	(2.157.648,43)	(64,22)
5	Jasa Giro Rekening BOK	0,00	0,00	0,00	41.566.033,00	(41.566.033,00)	(100,00)
	Jumlah	1.500.000.000,00	2.778.944.085,89	185,26	1.673.230.869,65	1.105.713.216,24	66,08

d) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Pada tahun 2025 dianggarkan pendapatan bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp500.000.000,00 dan terealisasi Rp1.290.289.923,19 atau 258,06% dari anggaran. Rincian bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 43. Rincian Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Bunga Deposito	500.000.000,00	1.290.289.923,19	258,06	1.640.616.438,11	(350.326.514,92)	(21,35)
	Jumlah	500.000.000,00	1.290.289.923,19	258,06	1.640.616.438,11	(350.326.514,92)	(21,35)

Pendapatan bunga atas penempatan uang daerah tahun 2025 sebesar Rp1.290.289.923,19 tersebut merupakan penerimaan dari:

- Bunga deposito atas Dana cadangan sebesar Rp188.116.438,34 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selaku Bendahara Umum Daerah dengan P.T Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Lumajang tentang Penempatan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2029 dalam Bentuk Deposito Nomor: 916/810/427.73/2025 dan Nomor : 064/724/LMK/PN/PKS tanggal 4 Agustus 2025 dengan Nomor Seri DB 682300.

- Bunga deposito lainnya sebesar Rp1.102.173.484,85 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selaku Bendahara Umum Daerah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Lumajang tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito Berjangka Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Lumajang Nomor: 916/1793/427.73/2025 dan Nomor: 064/709.1/LMJ/PN/PKS tanggal 1 Agustus 2025 dengan Nomor Seri DB 682296, DB 682292, DB 682293, DB 682294, DB 682295.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan dari TGR 2025 sebesar Rp4.472.675,00 dan tahun 2024 sebesar Rp23.500.000,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 44. Rincian Penerimaan atas TGR Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Keterangan	2025	2024
1	2	3	4
1	TGR atas nama M.Saiful (Kec. Pasrujambe)	0,00	10.000.000,00
2	TGR atas nama Ratri (Dinas Pendidikan)	0,00	4.000.000,00
3	TGR atas nama Yudi Pradonggo (Kec. Sumbersuko)	0,00	9.500.000,00
4	TGR barang inventaris -Pompa Air (Dinas Sosial)	2.472.675,00	0,00
5	Setoran TGR (BPKD)	1.500.000,00	0,00
6	TGR DKPP	500.000,00	0,00
	Jumlah	4.472.675,00	23.500.000,00

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan dari Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp399.785.362,86 merupakan pendapatan atas denda yang dipungut kepada Rekanan Pemerintah Daerah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terinci sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
1	KU -Thanissa Contractors CV	72.000.000,00	0,00
2	CV Barokah Properti	25.450.230,00	0,00
3	CV Swapraja Utama	16.127.600,00	0,00
4	CV CIPTA GRAHA ENGINEERING	2.792.000,00	0,00
5	Denda Sukodono	1.246.000,00	0,00
6	Denda keterlambatan CV. Aztex (DKPP)	98.500,00	0,00
7	Denda keterlambatan pekerjaan CV Melati Kurai (RSUD dr Haryoto)	269.495.581,98	0,00
8	Pembayaran denda (Dinas Pendidikan)	2.316.535,00	0,00
9	Pembayaran denda CV. DAENGK (Diskopindag)	1.013.014,00	0,00
10	Denda PT. ENSEVAL (RSUD dr Haryoto)	483.152,00	0,00
11	Pembayaran denda	57.509,00	0,00

No	Uraian	2025	2024
1	2	3	4
12	Puskesmas Randuagung denda keterlambatan kontrak	39.694,00	0,00
13	Puskesmas Randuagung denda keterlambatan kontrak	74.876,00	0,00
14	Puskesmas Randuagung denda keterlambatan kontrak	1.681.870,00	0,00
15	Denda Performa Optima Solusind	21.000,00	0,00
16	Pembayaran denda CV ALAMPERSADA-DORA	234.433,00	0,00
17	Denda rehabilitasi SDN KLMPK A	1.995.100,00	0,00
18	Denda keterlambatan Desa Rowokangkung	3.776.470,00	0,00
19	Denda gedung Inspektorat CV. GAPURA	881.797,88	0,00
20	Denda TV (Diskopindag)	0,00	682.203,00
21	Pembangunan Jalan CV.USMN	0,00	736.550,00
22	Denda CV. LIMA JAYA	0,00	13.394.000,00
23	Denda Pipa Alun Alun	0,00	3.749.506,00
24	Pembayaran denda CV. Aga	0,00	7.700.000,00
25	Denda keterlambatan CV. Rizky	0,00	9.599.640,00
	Jumlah	399.785.362,86	35.861.899,00

g) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Daerah sehingga dikenakan denda pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian denda pajak Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Jenis Denda	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan denda pajak hotel	0,00	207.466,00	(207.466,00)	(100,00)
2	Pendapatan denda pajak restoran	0,00	6.144.465,00	(6.144.465,00)	(100,00)
3	Pendapatan denda pajak hiburan	0,00	4.000,00	(4.000,00)	(100,00)
4	Pendapatan denda pajak reklame	1.747.523,00	1.383.931,25	363.591,75	26,27
5	Pendapatan denda pajak parkir	0,00	61.903,00	(61.903,00)	(100,00)
6	Pendapatan denda pajak air bawah tanah	0,00	215.794,18	(215.794,18)	(100,00)
	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	489.233,00	0,00	489.233,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	111.300,00	4.513.750,00	(4.402.450,00)	(97,53)
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	187.405.689,00	111.102.185,00	76.303.504,00	0,00
9	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.769.158,00	0,00	7.769.158,00	0,00
	Jumlah	197.746.903,00	123.633.494,43	74.113.408,57	59,95

h) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan pendapatan yang diterima dari pengembalian belanja pada periode sebelumnya seperti pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai, pengembalian belanja modal karena kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan pada periode sebelumnya, dan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Rincian Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.413.000,00	4.683.952,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.118.400,00	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	3.498.282,00	20.838.712,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	524.187.900,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	6.213.800,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	23.106.337,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.955.878,88	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	5.000.000,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	823.418.327,25
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	7.756.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	40.000.000,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	500.000,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	8.988.000,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.856.629.127,02	0,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	244.148.950,00	0,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	0,00	257.104.174,12
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	85.346.000,00	0,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	21.425.000,00	0,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	9.598.000,00	0,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	1.000.000,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.020.750.000,00	0,00
	Jumlah	9.824.164.874,90	1.166.514.965,37

i) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto, Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, 25 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2025 dan 2024

No	BLUD	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
			4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain						
1	DINKES P2KB - Puskesmas Pronojiwo	252.000,00	252.000,00	100,00	0,00	252.000,00	0,00
2	DINKES P2KB - Puskesmas Candipuro	1.506.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DINKES P2KB - Puskesmas Bades	271.000,00	0,00	0,00	90.000,00	(90.000,00)	(100,00)
4	DINKES P2KB - Puskesmas Tempeh	25.050.000,00	25.860.000,00	103,23	1.550.000,00	24.310.000,00	1.568,39
5	DINKES P2KB - Puskesmas Rogotrunan	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	(160.000,00)	(100,00)
6	DINKES P2KB - Puskesmas Labruk Kidul	1.572.000,00	2.522.920,00	160,49	1.733.820,00	789.100,00	45,51
7	DINKES P2KB - Puskesmas Tekung	653.400,00	1.819.600,00	278,48	1.787.400,00	32.200,00	1,80
8	DINKES P2KB - Puskesmas Kunir	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DINKES P2KB - Puskesmas Yosowilangun	1.208.000,00	24.580.000,00	2.034,77	858.000,00	23.722.000,00	2.764,80
10	DINKES P2KB - Puskesmas Sumbersari	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DINKES P2KB - Puskesmas Jatiroto	1.360.000,00	1.170.000,00	86,03	850.000,00	320.000,00	37,65
12	DINKES P2KB - Puskesmas Randuagung	192.000,00	30.192.000,00	15.725,00	192.000,00	30.000.000,00	15.625,00
13	DINKES P2KB - Puskesmas Sukodono	3.672.000,00	2.472.000,00	67,32	1.800.000,00	672.000,00	37,33
14	DINKES P2KB - Puskesmas Pasrujambe	144.000,00	144.000,00	100,00	144.000,00	0,00	0,00
15	DINKES P2KB - Puskesmas Senduro	3.356.000,00	4.296.000,00	128,01	2.972.000,00	1.324.000,00	44,55
16	DINKES P2KB - Puskesmas Gucialit	762.000,00	762.000,00	100,00	762.000,00	0,00	0,00
17	DINKES P2KB - Puskesmas Kedungjajang	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
18	DINKES P2KB - Puskesmas Klakah	1.476.000,00	2.016.000,00	136,59	0,00	2.016.000,00	0,00
19	DINKES P2KB - Puskesmas Ranuyoso	378.000,00	24.378.000,00	6.449,21	378.000,00	24.000.000,00	6.349,21
20	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	1.258.719.500,00	1.406.335.124,00	111,73	1.244.544.906,00	161.790.218,00	13,00
21	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	60.200.000,00	78.675.000,00	130,69	481.235.853,12	(402.560.853,12)	(83,65)
	Jumlah I	1.361.192.800,00	1.606.094.644,00	117,99	1.739.057.979,12	(132.963.335,12)	(7,65)
	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah						
	a. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro						
1	DINKES P2KB - Puskesmas Tempursari	4.000.000,00	2.618.754,78	65,47	1.897.765,33	720.989,45	37,99
2	DINKES P2KB - Puskesmas Pronojiwo	1.578.000,00	4.791.424,24	303,64	2.304.464,98	2.486.959,26	107,92
3	DINKES P2KB - Puskesmas Candipuro	4.007.520,00	5.805.716,24	144,87	5.253.958,58	551.757,66	10,50
4	DINKES P2KB - Puskesmas Penanggal	3.000.000,00	8.165.114,21	272,17	4.970.011,73	3.195.102,48	64,29
5	DINKES P2KB - Puskesmas Pasirian	6.219.680,00	12.631.682,77	203,09	9.947.321,69	2.684.361,08	26,99
6	DINKES P2KB - Puskesmas Bades	1.658.000,00	3.167.056,50	191,02	2.050.302,90	1.116.753,60	54,47
7	DINKES P2KB - Puskesmas Tempeh	4.622.000,00	7.755.738,07	167,80	7.482.387,96	273.350,11	3,65
8	DINKES P2KB - Puskesmas Gesang	2.509.717,00	4.862.797,11	193,76	3.444.294,20	1.418.502,91	41,18

No	BLUD	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
9	DINKES P2KB - Puskesmas Rogotrunan	3.912.892,00	9.593.787,18	245,18	5.169.042,09	4.424.745,09	85,60
10	DINKES P2KB - Puskesmas Labruk Kidul	2.935.000,00	3.577.174,63	121,88	3.521.407,50	55.767,13	1,58
11	DINKES P2KB - Puskesmas Tekung	3.421.600,00	5.669.935,17	165,71	4.024.045,06	1.645.890,11	40,90
12	DINKES P2KB - Puskesmas Kunir	3.743.223,00	5.348.610,97	142,89	4.838.360,38	510.250,59	10,55
13	DINKES P2KB - Puskesmas Yosowilangun	6.378.764,00	10.409.180,31	163,18	8.033.569,70	2.375.610,61	29,57
14	DINKES P2KB - Puskesmas Sumber Sari	4.900.000,00	7.163.693,39	146,20	6.536.437,28	627.256,11	9,60
15	DINKES P2KB - Puskesmas Jatiroto	3.000.000,00	7.837.677,27	261,26	6.611.191,41	1.226.485,86	18,55
16	DINKES P2KB - Puskesmas Randuagung	3.381.400,00	3.917.575,47	115,86	2.721.314,64	1.196.260,83	43,96
17	DINKES P2KB - Puskesmas Sukodono	3.725.338,00	5.104.071,85	137,01	5.213.930,70	(109.858,85)	(2,11)
18	DINKES P2KB - Puskesmas Padang	3.411.736,00	6.588.621,17	193,12	4.790.716,64	1.797.904,53	37,53
19	DINKES P2KB - Puskesmas Pasrujambe	3.001.232,00	4.950.432,29	164,95	3.491.276,18	1.459.156,11	41,79
20	DINKES P2KB - Puskesmas Senduro	3.821.938,00	6.113.621,47	159,96	4.397.801,19	1.715.820,28	39,02
21	DINKES P2KB - Puskesmas Gucilait	2.843.348,00	3.567.204,30	125,46	3.314.471,43	252.732,87	7,63
22	DINKES P2KB - Puskesmas Kedungjajang	4.796.854,00	6.003.539,14	125,16	4.880.533,78	1.123.005,36	23,01
23	DINKES P2KB - Puskesmas Klakah	2.685.031,00	5.377.545,43	200,28	3.691.821,73	1.685.723,70	45,66
24	DINKES P2KB - Puskesmas Ranuyoso	5.047.600,00	4.441.241,68	87,99	3.346.012,19	1.095.229,49	32,73
25	DINKES P2KB - Puskesmas Tunjung	3.381.400,00	3.131.805,44	92,62	3.536.650,37	(404.844,93)	(11,45)
26	DINKES P2KB - UPT Labkes	6.000.000,00	15.159.281,96	252,65	8.811.592,81	6.347.689,15	72,04
27	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	500.000.000,00	342.386.388,90	68,48	583.177.096,13	(240.790.707,23)	(41,29)
28	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Pasirian	106.000.000,00	315.851.994,40	297,97	0,00	315.851.994,40	0,00
29	b. Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	6.000.000,00	9.758.255,00	162,64	0,00	9.758.255,00	0,00
	Jumlah II	709.982.273,00	831.749.921,34	117,15	707.457.778,58	124.292.142,76	17,57
	JUMLAH	2.071.175.073,00	2.437.844.565,34	117,70	2.446.515.757,70	(8.671.192,36)	(0,35)

j) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan merupakan denda atas pengakhiran sewa BMD dan denda atas keterlambatan pembayaran biaya sewa gedung Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terinci sebagai berikut:

**Tabel 49. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah							
No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Denda Pengakhiran Sewa BMD (DPKP)	0,00	1.879.800,00	0,00	1.953.200,00	(73.400,00)	(3,76)
	Jumlah	0,00	1.879.800,00	0,00	1.953.200,00	(73.400,00)	(3,76)

k) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah merupakan denda atas pelanggaran perda Kabupaten Lumajang, terinci sebagai berikut:

Tabel 50. Pendapatan Denda Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah							
No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	113.700,00	(113.700,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	113.700,00	(113.700,00)	(100,00)

l) Penerimaan Lain-lain

Penerimaan Lain-lain Tahun 2025 adalah penerimaan lain-lain pada BPRD senilai Rp4.642.465,94 yang merupakan penerimaan dari piutang pajak yang sudah dihapus namun tetap dibayar oleh Wajib Pajak.

Tabel 51. Penerimaan Lain-lain Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah							
No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Penerimaan Lain-lain	0,00	4.642.465,94	0,00	3.081.768,00	1.560.697,94	50,64
	Jumlah	0,00	4.642.465,94	0,00	3.081.768,00	1.560.697,94	50,64

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
b. PENDAPATAN TRANSFER	1.761.584.308.097,54	1.745.824.170.892,00	1.898.032.999.357,00

Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 52. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah							
No.	Jenis Transfer	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.398.206.311.097,54	1.398.804.306.958,00	100,04	1.476.064.293.757,00	(77.259.986.799,00)	(5,23)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	247.675.400.000,00	220.159.902.934,00	88,89	244.170.863.000,00	(24.010.960.066,00)	(9,83)
3	Transfer Pemerintah Propinsi	115.702.597.000,00	126.859.961.000,00	109,64	177.797.842.600,00	(50.937.881.600,00)	(28,65)
	Jumlah	1.761.584.308.097,54	1.745.824.170.892,00	99,11	1.898.032.999.357,00	(152.208.828.465,00)	(8,02)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1) Transfer Pem.			
Pusat–Dana	1.398.206.311.097,54	1.398.804.306.958,00	1.476.064.293.757,00
Perimbangan			

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan meliputi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Total realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan mencapai 100,04% atau Rp1.398.804.306.958,00 terinci sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 53. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah							
No.	Jenis Dana Perimbangan	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Dana Bagi Hasil Pajak	28.639.594.000,00	28.003.574.600,00	97,78	25.877.280.462,00	2.126.294.138,00	8,22
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /SDA	30.367.266.000,00	33.606.733.000,00	110,67	40.047.486.550,00	(6.440.753.550,00)	(16,08)
3	Dana Bagi Hasil Cukai	34.926.951.000,00	35.909.560.000,00	102,81	30.976.244.000,00	4.933.316.000,00	15,93
4	Dana Alokasi Umum	961.861.827.000,00	960.719.475.165,00	99,88	979.563.765.934,00	(18.844.290.769,00)	(1,92)
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) :						
	- Fisik Reguler	15.371.491.000,00	13.621.572.268,00	88,62	99.973.953.623,00	(86.352.381.355,00)	(86,37)
	- DAK Non Fisik	327.039.182.097,54	326.943.391.925,00	99,97	299.625.563.188,00	27.317.828.737,00	9,12
	Jumlah DAK	342.410.673.097,54	340.564.964.193,00	99,46	399.599.516.811,00	(59.034.552.618,00)	(14,77)
	Jumlah	1.398.206.311.097,54	1.398.804.306.958,00	100,04	1.476.064.293.757,00	(77.259.986.799,00)	(5,23)

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagaimana tabel berikut:

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
a) Transfer Pemerintah			
Pusat - Dana Perimbangan	28.639.594.000,00	28.003.574.600,00	25.877.280.462,00
Bagi Hasil Pajak			

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp28.003.574.600,00 atau 97,78% dari anggaran sebesar Rp28.639.594.000,00, terinci sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 54. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Bagi hasil pajak bumi dan bangunan	10.052.672.000,00	10.206.905.800,00	101,53	9.316.463.462,00	890.442.338,00	9,56
2	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 21	16.391.748.000,00	15.617.585.200,00	95,28	15.662.311.200,00	(44.726.000,00)	(0,29)
3	Bagi hasil pajak penghasilan pasal 25, 29	2.195.174.000,00	2.179.083.600,00	99,27	898.505.800,00	1.280.577.800,00	142,52
	Jumlah	28.639.594.000,00	28.003.574.600,00	97,78	25.877.280.462,00	2.126.294.138,00	8,22

	<u>Anggaran 2025 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2025 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2024 (Rp)</u>
b) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	30.367.266.000,00	33.606.733.000	40.047.486.550,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp33.606.733.000,00 dengan persentase sebesar 110,67%, terinci sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 55. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Bagi Hasil Bukan
Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	24.629.565.000,00	26.008.297.000,00	105,60	33.004.447.200,00	(6.996.150.200,00)	(21,20)
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.867.329.000,00	4.151.521.000,00	144,79	4.293.740.800,00	(142.219.800,00)	(3,31)
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.398.000,00	14.501.000,00	139,46	15.577.550,00	(1.076.550,00)	(6,91)
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.482.000,00	3.428.000,00	231,31	747.383.000,00	(743.955.000,00)	(99,54)
5	DBH SDA Minerba -Royalty	1.578.910.000,00	2.149.403.000,00	136,13	244.019.000,00	1.905.384.000,00	780,83
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	298.472.000,00	298.473.000,00	100,00	423.868.000,00	(125.395.000,00)	(29,58)
7	Bagi hasil sumber daya alam perikanan	981.110.000,00	981.110.000,00	100,00	1.318.451.000,00	(337.341.000,00)	(25,59)
	Jumlah	30.367.266.000,00	33.606.733.000,00	110,67	40.047.486.550,00	(6.440.753.550,00)	(16,08)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
c) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Alokasi Cukai	34.926.951.000,00	35.909.560.000,00	30.976.244.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Alokasi Cukai sebesar Rp35.909.560.000,00 dengan persentase sebesar 102,81 %, terinci sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 56. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-
Dana Perimbangan Dana Alokasi Cukai Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah							
No	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Bagi hasil cukai hasil tembakau	34.926.951.000,00	35.909.560.000,00	102,81	30.976.244.000,00	4.933.316.000,00	15,93
	Jumlah	34.926.951.000,00	35.909.560.000,00	102,81	30.976.244.000,00	4.933.316.000,00	15,93

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
d) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Alokasi Umum	961.861.827.000,00	960.719.475.165,00	979.563.765.934,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum sebesar Rp960.719.475.165,00 dengan persentase sebesar 99,88%, terinci sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 57. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah							
No	Dana Alokasi Umum	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dana Alokasi Umum (DAU)						
	• Tidak Ditetapkan Penggunaannya	836.570.285.000,00	835.724.195.927,00	99,90	840.987.139.000,00	(5.262.943.073,00)	(0,63)
	• Tambahan Dukung Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
	• Tambahan Dukung Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	15.170.089.000,00	14.873.826.238,00	98,05	19.060.536.934,00	(4.186.710.696,00)	(21,97)
	• Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	62.428.437.000,00	62.428.437.000,00	100,00	63.751.852.000,00	(1.323.415.000,00)	(2,08)
	• Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	46.293.016.000,00	46.293.016.000,00	100,00	42.112.116.000,00	4.180.900.000,00	9,93
	• Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	12.252.122.000,00	(12.252.122.000,00)	(100,00)
	Jumlah	961.861.827.000,00	960.719.475.165,00	99,88	979.563.765.934,00	(18.844.290.769,00)	(1,92)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
e) Transfer Pemerintah			
Pusat - Dana Alokasi Khusus	342.410.673.097,54	340.564.964.193,00	399.599.516.811,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp340.564.964.193,00 dengan persentase sebesar 99,46%, terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 58. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	15.371.491.000,00	13.621.572.268,00	88,62	99.973.953.623,00	(86.352.381.355,00)	(86,37)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	0,00	0,00	0,00	702.894.150,00	(702.894.150,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	623.783.000,00	564.359.520,00	90,47	16.099.796.000,00	(15.535.436.480,00)	(96,49)
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	228.000.000,00	215.774.001,00	94,64	2.793.040.150,00	(2.577.266.149,00)	(92,27)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	3.808.871.700,00	(3.808.871.700,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	6.804.921.000,00	5.979.141.816,00	87,86	18.924.798.942,00	(12.945.657.126,00)	(68,41)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	209.971.130,00	(209.971.130,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	0,00	0,00	0,00	19.786.756.000,00	(19.786.756.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	0,00	0,00	0,00	9.749.752.880,00	(9.749.752.880,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	1.338.076.000,00	1.033.726.700,00	77,25	1.339.595.600,00	(305.868.900,00)	(22,83)
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM	2.134.900.000,00	2.134.900.000,00	100,00	13.107.374.000,00	(10.972.474.000,00)	(83,71)
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	0,00	0,00	0,00	1.379.999.000,00	(1.379.999.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	4.241.811.000,00	3.693.670.231,00	87,08	4.253.628.351,00	(559.958.120,00)	(13,16)
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	0,00	0,00	0,00	3.586.960.000,00	(3.586.960.000,00)	(100,00)
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan)	0,00	0,00	0,00	4.230.515.720,00	(4.230.515.720,00)	(100,00)

No	Dana Alokasi Khusus	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	327.039.182.097,54	326.943.391.925,00	99,97	299.625.563.188,00	27.317.828.737,00	9,12
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	691.528.540,00	691.528.540,00	100,00	683.213.350,00	8.315.190,00	1,22
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	417.318.450,00	(417.318.450,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.633.118.484,00	(1.633.118.484,00)	(100,00)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	99.321.967.318,54	99.216.762.123,00	99,89	100.850.998.962,00	(1.634.236.839,00)	(1,62)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4.160.750.000,00	4.160.750.000,00	100,00	4.290.000.000,00	(129.250.000,00)	(3,01)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	20.788.480.000,00	20.718.066.092,00	99,66	21.629.710.000,00	(911.643.908,00)	(4,21)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	690.000.000,00	690.000.000,00	100,00	990.000.000,00	(300.000.000,00)	(30,30)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.250.270.000,00	5.219.534.750,00	99,41	6.047.254.700,00	(827.719.950,00)	(13,69)
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	90.000.000,00	135.000.000,00	150,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.748.374.958,00	12.478.895.158,00	97,89	19.979.220.502,00	(7.500.325.344,00)	(37,54)
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	207.809.169,00	209.748.000,00	100,93	0,00	209.748.000,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.296.766.129,00	14.296.765.979,00	100,00	4.170.199.120,00	10.126.566.859,00	242,83
	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	157.222.194.000,00	158.224.799.300,00	100,64	126.803.273.820,00	31.421.525.480,00	24,78
	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	738.500.000,00	114.000.000,00	15,44	1.262.652.000,00	(1.148.652.000,00)	(90,97)
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	10.159.461.983,00	10.159.461.983,00	100,00	10.778.603.800,00	(619.141.817,00)	(5,74)
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	538.080.000,00	538.080.000,00	100,00	0,00	538.080.000,00	0,00
	Jumlah DAK	342.410.673.097,54	340.564.964.193,00	99,46	399.599.516.811,00	(59.034.552.618,00)	(14,77)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	247.675.400.000,00	220.159.902.934,00	244.170.863.000,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat lainnya tahun 2025 merupakan Dana Penyesuaian yang meliputi Dana Desa (DD) dan Insentif Fiskal dengan realisasi sebesar Rp220.159.902.934,00 atau mencapai 88,89% dari anggaran sebesar Rp247.675.400.000,00. Dibanding Tahun 2024, Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya turun 9,83% atau sebesar Rp24.010.960.066,00.

Tabel 59. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya–Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Transfer	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Dana Desa (DD)	219.002.212.000,00	191.486.714.934,00	87,44	221.147.868.000,00	(29.661.153.066,00)	(13,41)
2	Insentif Fiskal	28.673.188.000,00	28.673.188.000,00	100,00	23.022.995.000,00	5.650.193.000,00	24,54
	Jumlah	247.675.400.000,00	220.159.902.934,00	88,89	244.170.863.000,00	(24.010.960.066,00)	(9,83)

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2) Transfer Pemerintah Provinsi	115.702.597.000,00	126.859.961.000,00	177.797.842.600,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi merupakan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp126.859.961.000,00 meliputi pendapatan bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp113.959.707.000,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp12.900.254.000,00

Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024 mencapai 109,64% dari anggaran. Dibanding Tahun 2024, Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp50.937.881.600,00 atau 28,65% Penurunan tersebut terinci sebagaimana tabel berikut

Tabel 60. Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
A	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	102.802.143.000,00	113.959.707.000,00	110,85	169.600.395.100,00	(55.640.688.100,00)	(32,81)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	289.000.000,00	4.605.283.700,00	1.593,52	44.144.659.900,00	(39.539.376.200,00)	(89,57)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi			Kenaikan (Penurunan)	%
			2025	%	2024		
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	102.000.000,00	2.208.781.200,00	2.165,47	18.498.225.600,00	(16.289.444.400,00)	(88,06)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.370.000.000,00	44.851.288.400,00	105,86	46.597.613.100,00	(1.746.324.700,00)	(3,75)
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	447.000.000,00	653.491.400,00	146,19	565.566.700,00	87.924.700,00	15,55
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	59.594.143.000,00	61.640.862.300,00	103,43	59.794.329.800,00	1.846.532.500,00	3,09
B	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	12.900.254.000,00	12.900.254.000,00	100,00	8.197.447.500,00	4.702.806.500,00	57,37
	Bantuan Keuangan Program JATIM PUSPA	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	0,00	108.000.000,00	0,00
	BKK Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.042.954.000,00	1.042.954.000,00	100,00	1.333.547.500,00	(290.593.500,00)	(21,79)
	BKK Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tahap II	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	0,00	27.600.000,00	0,00
	BKK Peningkatan Pendidikan	5.256.000.000,00	5.256.000.000,00	100,00	5.318.000.000,00	(62.000.000,00)	(1,17)
	Pendidikan, Rehabilitasi Ruang Kelas SD	4.999.800.000,00	4.999.800.000,00	100,00	0,00	4.999.800.000,00	0,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.465.900.000,00	1.465.900.000,00	100,00	1.545.900.000,00	(80.000.000,00)	(5,17)
	Jumlah	115.702.597.000,00	126.859.961.000,00	109,64	177.797.842.600,00	(50.937.881.600,00)	(28,65)

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	539.532.149,00	2.293.949.413,52

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan selain PAD dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 dan 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 61. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah							
No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
I	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	2.238.000.000,00	(2.238.000.000,00)	(100,00)
	• Dana hibah IPDMIP (<i>Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• Hibah Air Limbah Setempat	0,00	0,00	0,00	2.238.000.000,00	(2.238.000.000,00)	(100,00)
2	Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	0,00	513.569.244,00	0,00	0,00	513.569.244,00	100,00
	• Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	513.569.244,00	0,00	0,00	513.569.244,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Hibah (1+2)	0,00	513.569.244,00	0,00	2.238.000.000,00	(1.724.430.756,00)	(77,05)

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	25.962.905,00	0,00	55.949.413,52	(29.986.508,52)	(53,60)
	• Lain-lain Pendapatan	0,00	25.962.905,00	0,00	55.949.413,52	(29.986.508,52)	(53,60)
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	539.532.149,00	0,00	2.293.949.413,52	(1.754.417.264,52)	(76,48)

Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp539.532.149,00 terdiri dari:

1	Sumbangan dari PG. Jatiroto	236.217.354,00
2	Sumbangan dari PG. Jatiroto	277.351.890,00
		513.569.244,00
3	Dana Hibah DWP	12.000.000,00
4	Transfer dest only	5.000.000,00
5	Setoran Kecamatan Senduro	14.019,00
6	Setoran DKPP	306,00
7	KU- Rek. Antara PT. Taspen	182.819,00
8	KU- Rek. Antara PT. Taspen	12.054,00
9	KU- Rek. Antara PT. Taspen	36.162,00
10	KU- Rek. Antara PT. Taspen	267.197,00
11	Pendapatan Lainnya	3.500,00
12	Kelebihan pembayaran retribusi dari DPKP	1,00
13	Pendapatan Lainnya	950,00
14	KU- Rek. Antara PT. Taspen	32.950,00
15	KU- Rek. Antara PT. Taspen	10.983,00
16	KU- Rek. Antara PT. Taspen	163.606,00
17	KU- Rek. Antara PT. Taspen	239.117,00
18	Pindah Buku on us	220.000,00
19	Setoran DPKP	89,00
20	Pindah Buku on us	1.065.893,00
21	Pindah Buku on us	450.826,00
22	Kelebihan dana perjadi Reza DPU 2025	51.400,00
23	Pindah Buku on us	1.259.800,00
24	BI Fast Transfer	2.212.605,00
25	Pendapatan lainnya	154.105,00
26	RKUD Kab. Lumajang	2.084.523,00
27	Setoran Dispora-Penebangan	500.000,00
		25.962.905,00
	Total	539.532.149,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5.1.2. BELANJA DAN TRANSFER	2.446.194.305.367,97	2.084.460.541.205,11	2.213.027.574.700,85

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa, sebagai berikut:

Tabel 62. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Jenis Belanja	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Operasi	1.766.036.726.454,43	1.531.914.968.843,36	86,74	1.661.614.498.340,69
2	Belanja Modal	252.062.394.891,54	174.629.510.813,75	69,28	184.376.264.107,16
3	Belanja Tidak Terduga	15.232.257.213,00	4.007.496.476,00	26,31	3.583.315.382,00
4	Transfer Bagi Hasil ke Desa	412.862.926.809,00	373.908.565.072,00	90,56	363.453.496.871,00
	Jumlah	2.446.194.305.367,97	2.084.460.541.205,11	85,21	2.213.027.574.700,85

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
a. BELANJA OPERASI	1.766.036.726.454,43	1.531.914.968.843,36	1.661.614.498.340,69

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, hibah, dan bantuan sosial. Realisasi belanja operasi Tahun anggaran 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 63. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah						
No	Belanja Operasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)
1	Belanja Pegawai	930.747.063.220,57	822.145.345.798,00	88,33	809.308.568.776,01	12.836.777.021,99
2	Belanja Barang dan Jasa	707.184.672.709,71	592.877.971.874,36	83,84	645.327.410.714,68	(52.449.438.840,32)
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	1.791.485.606,00	(1.791.485.606,00)
4	Belanja Hibah	116.068.736.948,90	105.752.137.801,00	91,11	190.056.893.844,00	(84.304.756.043,00)
5	Belanja Bantuan Sosial	12.036.253.575,25	11.139.513.370,00	92,55	15.130.139.400,00	(3.990.626.030,00)
	Jumlah	1.766.036.726.454,43	1.531.914.968.843,36	86,74	1.661.614.498.340,69	(129.699.529.497,33)

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1) Belanja Pegawai	930.747.063.220,57	822.145.345.798,00	809.308.568.776,01

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan dan anggota DPRD, meliputi:

- Belanja gaji dan tunjangan ASN
- Belanja tambahan penghasilan ASN
- Belanja gaji dan tunjangan DPRD
- Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Belanja penerimaan lainnya Pimpinan Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Realisasi belanja pegawai Tahun 2025 sebesar Rp822.145.345.798,00 atau 88,33% dari anggaran sebesar Rp930.747.063.220,57. Dibanding realisasi Tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp12.855.746.569,99 atau 1,59%, terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 64. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	543.599.763.232,68	485.040.652.054,00	89,23	477.630.116.332,00	7.410.535.722,00	1,55
1.2	Belanja Gaji Pokok ASN	403.069.621.853,00	368.272.629.724,00	91,37	358.496.923.185,00	9.775.706.539,00	2,73
	Belanja Gaji Pokok PNS	300.907.815.533,00	274.552.485.706,00	91,24	292.349.111.612,00	(17.796.625.906,00)	(6,09)
	Belanja Gaji Pokok PPPK	102.161.806.320,00	93.720.144.018,00	91,74	66.147.811.573,00	27.572.332.445,00	41,68
1.3	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	38.068.849.613,00	34.504.565.350,00	90,64	33.772.500.320,00	732.065.030,00	2,17
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.474.988.869,00	25.790.859.488,00	90,57	27.567.449.992,00	(1.776.590.504,00)	(6,44)
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.593.860.744,00	8.713.705.862,00	90,83	6.205.050.328,00	2.508.655.534,00	40,43
1.4	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.854.784.554,00	4.686.203.950,00	96,53	5.195.076.506,00	(508.872.556,00)	(9,80)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.854.784.554,00	4.686.203.950,00	96,53	5.195.076.506,00	(508.872.556,00)	(9,80)
1.5	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.189.714.894,00	20.917.982.460,00	98,72	21.969.420.890,00	(1.051.438.430,00)	(4,79)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	21.189.714.894,00	20.917.982.460,00	98,72	21.969.420.890,00	(1.051.438.430,00)	(4,79)
1.6	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.205.347.154,00	8.097.290.774,00	98,68	6.708.950.700,00	1.388.340.074,00	20,69
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.733.605.422,00	2.682.265.000,00	98,12	2.884.295.700,00	(202.030.700,00)	(7,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.471.741.732,00	5.415.025.774,00	98,96	3.824.655.000,00	1.590.370.774,00	41,58
1.7	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.139.046.455,00	19.949.944.305,00	99,06	19.225.813.034,00	724.131.271,00	3,77
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.116.893.000,00	13.962.845.015,00	98,91	14.970.583.620,00	(1.007.738.605,00)	(6,73)
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.022.153.455,00	5.987.099.290,00	99,42	4.255.229.414,00	1.731.869.876,00	40,70
1.8	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.547.084.561,00	2.447.972.182,00	69,01	3.173.062.895,00	(725.090.713,00)	(22,85)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.214.237.149,00	2.152.249.622,00	66,96	2.989.543.723,00	(837.294.101,00)	(28,01)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	332.847.412,00	295.722.560,00	88,85	183.519.172,00	112.203.388,00	61,14
1.9	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.703.063,00	5.130.528,00	76,54	5.325.354,00	(194.826,00)	(3,66)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.687.139,00	3.468.170,00	73,99	3.954.277,00	(486.107,00)	(12,29)
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.015.924,00	1.662.358,00	82,46	1.371.077,00	291.281,00	21,24
1.10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	41.078.126.721,68	23.121.209.160,00	56,29	26.122.521.407,00	(3.001.312.247,00)	(11,49)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.217.316.433,68	17.733.446.292,00	50,35	22.981.577.905,00	(5.248.131.613,00)	(22,84)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.860.810.288,00	5.387.762.868,00	91,93	3.140.943.502,00	2.246.819.366,00	71,53

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
1.11	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	872.788.300,00	759.468.725,00	87,02	742.076.931,00	17.391.794,00	2,34
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	650.708.979,00	562.044.395,00	86,37	599.711.892,00	(37.667.497,00)	(6,28)
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	222.079.321,00	197.424.330,00	88,90	142.365.039,00	55.059.291,00	38,67
1.12	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.567.696.064,00	2.278.254.896,00	88,73	2.218.445.110,00	59.809.786,00	2,70
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.911.077.120,00	1.686.147.395,00	88,23	1.793.904.736,00	(107.757.341,00)	(6,01)
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	656.618.944,00	592.107.501,00	90,18	424.540.374,00	167.567.127,00	39,47
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	96.331.833.940,00	59.981.633.571,00	62,27	63.500.791.289,00	(3.519.157.718,00)	(5,54)
2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	96.138.412.266,00	59.792.186.935,00	62,19	63.310.228.063,00	(3.518.041.128,00)	(5,56)
2.2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	193.421.674,00	189.446.636,00	97,94	190.563.226,00	(1.116.590,00)	(0,59)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.836.655.568,00	159.994.477.873,00	97,65	167.720.653.598,02	(7.726.175.725,02)	(4,61)
3.1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.363.779.652,00	619.981.932,00	45,46	858.543.751,00	(238.561.819,00)	(27,79)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	6.871.098,00	(6.871.098,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	21.396.193,00	(21.396.193,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	891.075,00	(891.075,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	18.255.972,00	13.993.807,00	76,65	17.544.763,00	(3.550.956,00)	(20,24)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	103.751.826,00	(103.751.826,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	2.792.106,00	(2.792.106,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.848.649,00	3.977.631,00	40,39	4.817.764,00	(840.133,00)	(17,44)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	215.850.723,00	156.883.696,00	72,68	237.691.696,00	(80.808.000,00)	(34,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	194.919.205,00	84.942.280,00	43,58	153.117.877,00	(68.175.597,00)	(44,52)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	268.750.686,00	176.771.117,00	65,78	217.863.265,00	(41.092.148,00)	(18,86)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	271.519.636,00	183.413.401,00	67,55	91.806.088,00	91.607.313,00	99,78
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	295.920.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	88.713.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	795.627.158,00	61.846.641,00	7,77	374.417.004,02	(312.570.363,02)	(83,48)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	7.669.344,00	(7.669.344,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	110.000.000,00	0,00	0,00	78.653.323,91	(78.653.323,91)	(100,00)

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	476.595.401,00	0,00	0,00	187.057.706,00	(187.057.706,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	16.610.867,16	(16.610.867,16)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.851.839,00	1.851.839,00	100,00	0,00	1.851.839,00	100,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	32.035.766,00	32.035.766,00	100,00	39.560.768,00	(7.525.002,00)	(19,02)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.136.442,00	3.136.442,00	100,00	0,00	3.136.442,00	100,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	1.449.983,17	(1.449.983,17)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	1.685.025,78	(1.685.025,78)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	24.822.594,00	24.822.594,00	100,00	0,00	24.822.594,00	100,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	39.455.150,00	0,00	0,00	22.760.438,00	(22.760.438,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	40.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Pematangan Hewan Ternak	5.980.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	57.197.500,00	0,00	0,00	18.969.548,00	(18.969.548,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.586.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	159.943.257.700,00	158.224.799.300,00	98,93	160.788.279.800,00	(2.563.480.500,00)	(1,59)
3.4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	927.531.058,00	302.750.000,00	32,64	1.169.250.000,00	(866.500.000,00)	(74,11)
3.5	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	806.460.000,00	785.100.000,00	97,35	0,00	785.100.000,00	100,00
3.6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.258.190.043,00	(1.258.190.043,00)	(100,00)
3.7	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	3.271.973.000,00	(3.271.973.000,00)	(100,00)

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.778.684.000,00	(2.778.684.000,00)	(100,00)
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	493.289.000,00	(493.289.000,00)	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.071.814.162,00	29.854.799.429,00	99,28	29.056.673.296,00	798.126.133,00	2,75
4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.109.535.000,00	99,58	1.094.415.000,00	15.120.000,00	1,38
4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	123.744.640,00	121.665.600,00	98,32	121.277.100,00	388.500,00	0,32
4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	161.206.926,00	159.396.420,00	98,88	158.382.540,00	1.013.880,00	0,64
4.4	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.035.500,00	99,51	93.681.000,00	1.354.500,00	1,45
4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.608.825.750,00	99,58	1.586.901.750,00	21.924.000,00	1,38
4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	154.198.800,00	153.650.700,00	99,64	127.372.300,00	26.278.400,00	20,63
4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	57.550.492,00	28.775.250,00	50,00	33.571.125,00	(4.795.875,00)	(14,29)
4.8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.775.900.000,00	99,50	8.658.300.000,00	117.600.000,00	1,36
4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	1.440.600.000,00	764.400.000,00	53,06
4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	154.202.200,00	154.087.156,00	99,93	4.755.155,00	149.332.001,00	3.140,42
4.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	23.800,00	19.495,00	81,91	20.690,00	(1.195,00)	(5,78)
4.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.489.827.304,00	8.414.133.558,00	99,11	8.274.731.636,00	139.401.922,00	1,68
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	116.136.150,00	89.202.000,00	76,81	95.998.360,00	(6.796.360,00)	(7,08)
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.292.200,00	2.280.852,00	99,50	2.248.344,00	32.508,00	1,45
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.876.600,00	6.842.556,00	99,50	6.745.032,00	97.524,00	1,45
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.364.522.354,00	8.315.808.150,00	99,42	8.169.739.900,00	146.068.250,00	1,79
4.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.065.600.000,00	7.027.200.000,00	99,46	6.988.800.000,00	38.400.000,00	0,55
4.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.015.000,00	1.575.000,00	10,49	473.865.000,00	(472.290.000,00)	(99,67)
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.094.589.848,00	677.278.095,00	61,88	910.757.993,00	(233.479.898,00)	(25,64)
5.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.978.000,00	46.800.000,00	85,12	0,00	46.800.000,00	100,00
5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.552.000,00	5.544.000,00	84,62	0,00	5.544.000,00	100,00
5.3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	84.240.000,00	85,71	0,00	84.240.000,00	100,00
5.4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00	5.214.240,00	85,71	0,00	5.214.240,00	100,00
5.5	Belanja Tunjangan Khusus PPh/Tunjangan KDH/WKDH	2.700.000,00	1.820.204,00	67,41	0,00	1.820.204,00	100,00
5.6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.660,00	760,00	28,57	0,00	760,00	100,00
5.7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.484.448,00	4.097.520,00	74,71	0,00	4.097.520,00	100,00
5.8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.380,00	93.600,00	70,71	0,00	93.600,00	100,00
5.9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	377.080,00	280.800,00	74,47	0,00	280.800,00	100,00
5.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	920.000.000,00	529.186.971,00	57,52	910.757.993,00	(381.571.022,00)	(41,90)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	8.206.436,00	(8.206.436,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	47.415.613,00	(47.415.613,00)	(100,00)

No	Belanja Pegawai	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (penurunan)	%
1	2	3	4	5=4/3	6	7=4-6	8=7/6
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.052.039,00	(1.052.039,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	30.363.623,00	6.782.203,00	22,34	21.002.814,00	(14.220.611,00)	(67,71)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	180.599.023,00	(180.599.023,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	4.220.246,00	(4.220.246,00)	(100,00)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	20.710.650,00	8.495.494,00	41,02	5.891.520,00	2.603.974,00	44,20
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	218.058.815,00	33.152.335,00	15,20	197.561.067,00	(164.408.732,00)	(83,22)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	197.855.589,00	80.451.791,00	40,66	143.508.167,00	(63.056.376,00)	(43,94)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	208.719.652,00	203.970.453,00	97,72	263.290.876,00	(59.320.423,00)	(22,53)
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	244.291.671,00	196.334.695,00	80,37	38.010.192,00	158.324.503,00	416,53
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	960.360.000,00	32.760.000,00	3,41
6.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	360.360.000,00	32.760.000,00	9,09
6.2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00	0,00	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	94.819.286.469,89	85.603.384.776,00	90,28	69.529.216.267,99	16.074.168.508,01	23,12
	Jumlah	930.747.063.220,57	822.145.345.798,00	88,33	809.308.568.776,01	12.836.777.021,99	1,59

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2) Belanja Barang dan Jasa	707.184.672.709,71	592.877.971.874,36	645.327.410.714,68

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya, terinci sebagai berikut:

Tabel 65. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah							
No	Belanja Operasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja Persediaan	232.803.927.389,33	194.316.013.026,73	83,47	193.879.161.670,90	436.851.355,83	0,23
2	Belanja Jasa	377.099.327.469,21	313.052.271.537,79	83,02	312.772.027.305,99	280.244.231,80	0,09
3	Belanja Pemeliharaan	38.140.482.111,77	30.376.625.963,84	79,64	36.808.960.763,79	(6.432.334.799,95)	(17,47)

No	Belanja Operasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
4	Belanja Perjalanan Dinas	39.324.797.172,00	36.099.730.847,00	91,80	66.618.667.470,00	(30.518.936.623,00)	(45,81)
5	Belanja Lainnya	19.816.138.567,40	19.033.330.499,00	96,05	35.248.593.504,00	(16.215.263.005,00)	(46,00)
	Jumlah	707.184.672.709,71	592.877.971.874,36	83,84	645.327.410.714,68	(52.449.438.840,32)	(8,13)

a) Belanja Persediaan

Belanja Persediaan meliputi belanja yang menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Realisasi belanja persediaan tahun 2025 dan 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 66. Realisasi Belanja Barang dan Jasa-Belanja Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Persediaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.996.719.222,80	1.982.114.802,00	99,27	2.830.734.707,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.364.035.906,18	2.870.022.017,00	85,31	3.053.387.933,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.540.397.101,43	7.735.429.575,00	81,08	7.950.788.434,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	181.290.072,63	176.032.623,00	97,10	271.088.352,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	59.534.772,00	48.585.670,00	81,61	54.907.600,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	101.808.915,00	78.864.028,00	77,46	91.114.500,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.036.296.155,90	2.640.953.824,00	65,43	3.158.492.587,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	87.735.000,00	83.298.750,00	94,94	308.850.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	62.420.818.408,73	51.307.216.932,00	82,20	21.782.059.620,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	11.181.945,00	8.697.600,00	77,78	50.262.429,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.150.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.812.843.613,81	9.430.363.213,00	96,10	11.977.882.355,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.701.937.303,52	4.530.321.533,00	96,35	4.900.091.738,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.805.955.534,94	17.954.827.710,60	95,47	20.298.248.370,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	361.931.000,00	319.450.000,00	88,26	351.286.199,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.203.925,00	1.202.260,00	99,86	3.005.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	498.477.592,00	478.469.286,00	95,99	376.303.745,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.800.174.098,45	2.686.119.176,00	95,93	2.307.409.559,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	100.162.519,00	98.496.960,00	98,34	110.740.000,00
21	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	293.151.000,00	290.100.500,00	98,96	0,00
22	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	13.930.000,00	13.300.930,00	95,48	0,00
23	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	158.660.500,00	158.600.500,00	99,96	0,00
24	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	319.419.910,00	215.536.600,00	67,48	0,00
25	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	152.458.500,00	149.485.100,00	98,05	0,00
26	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	23.150.000,00	22.400.000,00	96,76	0,00
27	Belanja Pakaian Adat Daerah	258.321.500,00	250.849.996,00	97,11	0,00
28	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.175.000,00	36.647.500,00	65,24	0,00
29	Belanja Pakaian Olahraga	207.831.025,00	145.094.201,00	69,81	0,00
30	Belanja Pakaian Paskibraka	355.700.000,00	348.986.745,00	98,11	0,00

No	Belanja Persediaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.097.837.020,00	1.091.153.020,00	99,39	1.191.294.205,00
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	157.040.000,00	136.960.726,00	87,21	169.269.075,00
33	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	113.571.744,72	64.243.637,00	56,57	82.319.970,00
34	Belanja Obat-Obatan-Obat	39.652.700.905,79	32.461.310.630,00	81,86	31.979.083.405,00
35	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	361.807.128,95	296.395.480,00	81,92	690.559.395,00
36	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.061.239.029,85	19.185.657.849,13	73,62	43.160.798.997,90
37	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.000.000,00	1.672.000,00	20,90	337.892.000,00
38	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10.680.696.488,63	7.525.608.171,00	70,52	8.329.500.937,00
39	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	137.800.500,00	128.986.398,00	93,60	193.567.500,00
40	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	814.374.550,00	792.646.086,00	97,33	940.710.015,00
41	Belanja Barang Sampel Pangan	4.500.000,00	3.529.750,00	78,44	0,00
42	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.591.019.500,00	19.952.099.497,00	84,57	16.417.390.201,00
43	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.698.970.000,00	3.252.716.180,00	87,94	1.671.992.510,00
44	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	181.582.000,00	145.095.771,00	79,91	156.664.400,00
45	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.866.768.000,00	1.849.158.000,00	99,06	2.516.733.000,00
46	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.406.510.000,00	1.318.101.000,00	93,71	1.290.556.752,00
47	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	204.500.000,00	201.780.000,00	98,67	135.525.000,00
48	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.043.710.000,00	1.847.430.800,00	90,40	1.922.486.000,00
49	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.601.500,00
50	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	555.000.000,00
51	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	269.850.000,00
52	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	183.721.500,00
53	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	172.700.000,00
54	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	431.287.000,00
55	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00
56	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
57	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	89.050.000,00
58	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	339.276.680,00
59	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	331.456.500,00
60	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	251.772.000,00
	Jumlah	232.803.927.389,33	194.316.013.026,73	83,47	193.879.161.670,90

b) Belanja Jasa

Belanja Jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yang bersifat jasa. Realisasi Belanja Tahun 2025 dan 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 67. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa–Belanja Jasa Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Belanja Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.620.537.582,00	18.292.839.500,00	88,71	20.460.271.000,00
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.322.803.000,00	1.864.063.936,00	80,25	1.425.167.703,00

No	Belanja Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	35.000.000,00	0,00	0,00	14.050.000,00
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	544.080.000,00	530.840.000,00	97,57	7.000.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	8.400.000,00	2.200.000,00	26,19	9.770.000,00
7	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.198.256.250,00	1.169.836.750,00	97,63	1.044.010.250,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	420.000.000,00	337.600.000,00	80,38	9.600.000,00
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	280.800.000,00	276.900.000,00	98,61	275.400.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	29.504.415.000,00	22.586.613.000,00	76,55	31.128.093.000,00
11	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.016.552.996,00	15.182.072.729,00	79,84	22.553.956.929,00
12	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.162.681.999,00	1.792.787.175,00	82,90	1.808.228.956,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.795.595.000,00	2.680.955.000,00	95,90	4.311.643.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.191.300.000,00	2.184.500.000,00	99,69	2.598.400.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	408.000.000,00	408.000.000,00	100,00	428.400.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	87.900.000,00	87.900.000,00	100,00	606.000.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.146.600.000,00	1.139.800.000,00	99,41	1.392.600.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.429.000.000,00	1.409.500.000,00	98,64	1.274.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	324.000.000,00	198.220.000,00	61,18	22.750.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	304.500.000,00	209.100.000,00	68,67	50.250.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.062.151.000,00	44.664.672.000,00	96,97	46.885.546.361,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.135.900.000,00	2.769.015.000,00	88,30	724.880.920,00
24	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.253.280.000,00	928.154.780,00	74,06	3.432.238.500,00
25	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.362.976.432,00	12.712.317.798,00	95,13	12.079.200.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.215.256.050,00	1.958.136.750,00	88,39	2.160.614.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.304.391.825,00	2.185.696.750,00	94,85	1.968.500.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.348.398.000,00	1.005.315.150,00	74,56	1.020.257.524,00
29	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	49.903.250,00
30	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	238.480.000,00	194.180.000,00	81,42	115.500.000,00
31	Belanja Jasa Tata Rias	247.140.000,00	238.225.000,00	96,39	165.300.000,00
32	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	126.400.000,00
33	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	165.875.110,00	157.706.679,00	95,08	33.474.180,00
34	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	13.466.300,00	2.054.300,00	15,26	2.935.000,00
35	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.812.816.427,00	1.487.067.400,00	82,03	1.550.257.125,00
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	58.000.000,00	47.760.015,00	82,34	43.960.000,00
37	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	58.069.500,00	35.408.550,00	60,98	27.921.700,00
38	Belanja Jasa Kalibrasi	1.709.613.722,51	1.034.066.519,00	60,49	918.360.550,00
39	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.852.222.100,00	930.688.527,00	50,25	1.020.827.677,00
40	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	19.600.000,00	5.152.000,00	26,29	5.328.000,00
41	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.445.100.000,00	1.371.049.460,00	94,88	2.063.790.000,00
42	Belanja Tagihan Telepon	393.052.422,00	191.736.589,00	48,78	215.668.897,00
43	Belanja Tagihan Air	1.355.192.996,00	887.339.307,00	65,48	1.003.958.780,00
44	Belanja Tagihan Listrik	13.272.412.138,00	11.337.295.942,00	85,42	11.492.082.741,00
45	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	48.228.000,00	41.643.000,00	86,35	130.969.000,00
46	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.835.599.109,00	7.323.794.781,00	93,47	7.554.520.567,00
47	Belanja Paket/Pengiriman	191.762.500,00	62.036.582,00	32,35	24.360.033,00
48	Belanja Penambahan Daya	3.256.850,00	3.256.850,00	100,00	507.000,00
49	Belanja Registrasi/Keanggotaan	232.576.314,00	227.792.472,00	97,94	127.526.531,00

No	Belanja Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
50	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	198.025.000,00	30.623.219,00	15,46	30.552.186,00
51	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	16.367.987.600,00	14.472.587.683,00	88,42	16.919.673.286,00
52	Belanja Pengolahan Air Limbah	557.930.870,00	416.039.377,00	74,57	468.517.781,00
53	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Lembur	9.441.798.000,00	8.371.462.800,00	88,66	6.584.977.408,00
55	Belanja Medical Check Up	136.000.000,00	110.219.154,00	81,04	77.068.300,00
56	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	50.872.046.169,10	30.905.475.016,00	60,75	34.929.455.118,01
57	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	60.000.000,00	59.841.653,00	99,74	0,00
58	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.032.996.400,00	4.350.211.400,00	86,43	0,00
59	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.067.421.000,00	756.923.000,00	70,91	0,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.722.455.900,00	2.559.051.888,00	94,00	2.346.734.160,00
61	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	68.096.490.000,00	58.611.280.000,00	86,07	39.990.440.000,00
62	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	6.792.629.200,00	6.053.101.600,00	89,11	4.527.524.400,00
63	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.987.692.185,60	5.586.764.267,00	93,30	5.891.329.288,00
64	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	372.619.300,00	331.889.288,06	89,07	379.810.021,66
65	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	462.008.634,00	408.311.237,18	88,38	473.506.047,34
66	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	99.970.000,00	49.776.000,00	49,79	0,00
67	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	2.349.157.635,00	1.834.839.970,55	78,11	360.351.170,00
68	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	654.500.000,00	451.976.000,00	69,06	0,00
69	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	594.445.600,00	341.530.000,00	57,45	0,00
70	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	446.423.000,00	446.000.000,00	99,91	0,00
71	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
72	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	168.500.000,00	153.335.300,00	91,00	158.335.300,00
73	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
74	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	15.600.000,00	13.000.000,00	83,33	15.600.000,00
75	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan	175.000.000,00	0,00	0,00	401.915.699,00
76	Belanja Sewa Tanah untuk Taman	40.000.000,00	39.999.999,00	100,00	19.999.999,00
77	Belanja Sewa Electric Generating Set	63.000.000,00	50.632.499,00	80,37	19.500.000,00
78	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
79	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	101.600.000,00	101.525.000,00	99,93	0,00
80	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.334.040.000,00	1.237.629.949,00	92,77	1.538.750.000,00
81	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	95.150.000,00	82.100.000,00	86,28	28.300.000,00
82	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0,00
83	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
84	Belanja Sewa Alat Panen	0,00	0,00	0,00	4.998.000,00
85	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	68.127.000,00	66.132.000,00	97,07	49.502.000,00
86	Belanja Sewa Mebel	213.055.000,00	146.766.908,00	68,89	103.340.000,00
87	Belanja Sewa Alat Pendingin	15.200.000,00	4.000.000,00	26,32	8.000.000,00
88	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	821.740.000,00	674.735.956,00	82,11	698.646.400,00
89	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	17.000.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00
90	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	74.000.000,00	66.500.000,00	89,86	73.530.000,00
91	Belanja Sewa Analytical Instrument	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	3.408.102,60
92	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	24.200.000,00	24.200.000,00	100,00	6.000.000,00
93	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	2.000.000,00
94	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	40.100.000,00	40.100.000,00	100,00	84.200.000,00

No	Belanja Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
95	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	100.964.000,00	99.656.804,00	98,71	82.011.750,00
96	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
97	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	216.800.000,00	171.724.406,00	79,21	155.340.000,00
98	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
99	Belanja Sewa Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
100	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
101	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
102	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.504.650.000,00	562.367.000,00	37,38	837.123.500,00
103	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	29.400.000,00
104	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
105	Belanja Sewa Hotel	26.760.000,00	24.970.000,00	93,31	13.080.000,00
106	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	186.000.000,00
107	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	15.000.000,00
108	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
109	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	40.141.174,00	38.241.701,00	95,27	43.034.544,00
110	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	47.783.140,00	47.644.749,00	99,71	2.998.998,00
111	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	97.111.680,00
112	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	19.500.000,00	19.218.325,00	98,56	654.900,00
113	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	513.500.000,00	373.890.985,00	72,81	0,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	345.000.000,00	252.839.600,00	73,29	423.255.392,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	9.977.790,00
116	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	8.855.140,00
117	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	0,00	0,00	194.216.700,00
118	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	0,00
119	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.600.000,00	7.766.595,00	90,31	13.637.600,00
120	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	52.426.676,00	44.250.341,00	84,40	8.239.370,00
121	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	5.969.000,00
122	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	3.000.000,00	2.687.703,00	89,59	386.838.224,00
123	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000,00	99.191.820,00	99,19	0,00
124	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000,00	99.248.400,00	99,25	247.546.650,00
125	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	182.362.000,00
126	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	100.000.000,00	99.678.000,00	99,68	99.900.000,00
127	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	0,00
128	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	831.705.350,00	689.893.400,00	82,95	89.321.700,00
129	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0,00	0,00	0,00	446.690.500,00

No	Belanja Jasa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
130	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	479.000.000,00	477.564.805,00	99,70	17.760.000,00
131	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	350.000.000,00	249.416.794,00	71,26	546.880.000,00
132	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	17.000.000,00
133	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	821.800.000,00	740.004.240,00	90,05	1.447.370.561,00
134	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
135	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	0,00	0,00	0,00	178.525.900,00
136	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	1.260.748.023,00	1.223.865.000,00	97,07	0,00
137	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.871.656.000,00	4.747.585.381,00	80,86	5.014.839.078,00
138	Belanja Bimbingan Teknis	315.000.000,00	291.000.000,00	92,38	430.975.000,00
139	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	6.772.414,00
140	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	18.257.567,00
141	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	865.502,00
142	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	34.000.000,00	16.534.136,00	48,63	12.968.259,00
143	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	88.062.167,00
144	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	2.189.874,00
145	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	18.300.000,00	15.373.303,00	84,01	3.593.976,00
146	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.900.000,00	93.284.067,00	23,27	204.640.696,00
147	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	314.000.000,00	183.546.046,00	58,45	113.632.762,00
148	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	398.105.000,00	388.241.066,00	97,52	161.693.390,00
149	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	473.600.000,00	376.642.666,00	79,53	53.423.541,00
150	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	389.542.124,00	0,00	0,00	0,00
151	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	116.780.529,00	0,00	0,00	0,00
152	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	75.000.000,00	0,00	0,00	60.433.013,69
153	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
154	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak	3.458.337,00	0,00	0,00	0,00
155	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	12.762.903,24
156	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	1.114.089,63
157	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	1.294.683,82
158	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	89.000.000,00	33.325.000,00	37,44	42.312.450,00
159	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	245.850.000,00	228.767.750,00	93,05	24.350.200,00
	JUMLAH	377.099.327.469,21	313.052.271.537,79	83,02	312.772.027.305,99

c) Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 68. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa- Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0,00	0,00	0,00	397.003.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	149.647.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	52.000.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	136.111.079,54	136.110.900,00	100,00	123.196.700,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	400.000.000,00	151.759.200,00	37,94	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	7.190.000,00	7.190.000,00	100,00	14.357.750,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	98.900.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	251.260.000,00	214.127.487,00	85,22	329.749.075,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	11.100.000,00	9.591.000,00	86,41	6.944.500,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	128.195.000,00	111.055.621,00	86,63	21.183.800,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.869.735.330,00	3.579.399.222,00	92,50	3.447.942.528,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	901.499.850,00	748.340.137,00	83,01	1.030.385.840,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	769.380.000,00	700.156.011,00	91,00	757.237.081,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	514.740.751,00	405.905.675,00	78,86	335.374.800,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	190.765.000,00	141.847.256,00	74,36	134.067.144,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.502.064.268,50	1.910.439.090,00	76,35	1.409.456.899,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.653.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	350.000.000,00	346.129.840,00	98,89	0,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	69.930.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3.560.000,00	3.559.400,00	99,98	7.100.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	13.700.000,00	13.477.000,00	98,37	0,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	100.000.000,00	99.750.150,00	99,75	99.109.458,00

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
24	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	9.791.450,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	0,00	0,00	0,00	8.945.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	259.160.000,00	66.464.400,00	25,65	88.733.400,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	434.161.500,00	403.011.643,00	92,83	578.133.050,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.551.930.000,00	2.547.977.508,00	99,85	2.217.476.402,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	17.500.000,00	16.035.000,00	91,63	21.357.200,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.341.309.399,00	886.675.838,00	66,11	900.989.612,00
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	6.100.000,00	5.497.000,00	90,11	593.500,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.476.000.000,00	758.990.553,00	51,42	526.140.052,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.875.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	30.000.000,00	27.999.972,00	93,33	14.900.000,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	5.700.000,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	770.046.600,00	706.097.138,00	91,70	601.329.582,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	103.814.079,00	82.615.943,00	79,58	56.874.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	354.000.000,00	351.160.077,00	99,20	221.753.577,00
43	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	50.000.000,00	47.430.004,00	94,86	19.850.000,00
44	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	17.000.000,00	16.650.000,00	97,94	13.041.509,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	82.500.000,00	81.039.264,00	98,23	18.538.273,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	45.500.000,00	45.348.312,00	99,67	199.150.800,00
49	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	7.000.000,00	1.510.000,00	21,57	3.800.000,00

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
50	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	164.000.000,00	163.463.033,00	99,67	206.571.230,00
51	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	34.000.000,00	32.312.100,00	95,04	32.190.000,00
52	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	10.000.000,00	1.570.000,00	15,70	0,00
54	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	108.150.000,00	104.813.324,00	96,91	65.146.350,00
55	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	251.000.000,00	249.556.545,00	99,42	248.443.000,00
56	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00
57	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
58	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00	20.500.000,00
59	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	34.000.000,00
60	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	152.500.000,00	133.185.332,00	87,33	99.108.150,00
61	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	1.443.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	15.077.478,00
63	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	14.800.000,00	12.700.000,00	85,81	9.200.000,00
64	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00	2.600.000,00
65	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.553.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	46.300.000,00
67	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	191.997.000,00	177.443.025,00	92,42	141.815.406,00
68	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.208.531.265,56	2.126.018.753,00	96,26	2.327.462.850,00
69	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	6.500.000,00
70	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.418.230.000,00	1.348.619.825,00	95,09	1.312.461.986,00
71	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	80.160.000,00	77.699.800,00	96,93	62.294.000,00
72	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	72.273.696,00	71.015.000,00	98,26	31.980.000,00
73	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.670.745.178,23	1.662.208.044,84	99,49	102.959.407,01
74	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	52.672.830,00	52.170.000,00	99,05	47.920.000,00
75	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.666.207.746,57	1.496.239.867,00	89,80	897.814.061,00

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
76	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	1.586.000,00
77	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.291.000,00	42.256.250,00	99,92	0,00
78	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	138.550.800,00
79	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	265.200.000,00	265.200.000,00	100,00	0,00
80	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	225.411.997,60	136.429.600,00	60,52	452.021.427,78
81	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	5.322.100,00
82	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	87.811.611,95	66.571.914,00	75,81	44.000.000,00
83	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	24.697.500,00	0,00	0,00	24.617.000,00
84	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	168.000.295,98	0,00	0,00	4.967.500,00
85	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	111.800.302,23	0,00	0,00	0,00
86	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	80.000.000,00	78.099.000,00	97,62	48.668.433,00
87	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	95.237.811,30	95.150.440,00	99,91	95.000.000,00
88	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan	134.700.000,00	134.296.500,00	99,70	0,00
89	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00	96.702.735,00
90	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
91	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.184.772.301,00	985.648.000,00	30,95	9.500.849.000,00
92	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
93	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	749.679.000,00
94	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	70.000.001,04	69.255.600,00	98,94	49.904.600,00
95	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.142.181.310,00	3.114.275.000,00	99,11	3.140.654.000,00
96	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	81.486.250,00	81.482.000,00	99,99	109.273.000,00
97	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	279.315.960,00	278.313.000,00	99,64	247.455.000,00
98	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	710.246.000,00	162.527.280,00	22,88	212.464.077,00
99	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	21.798.000,00	4.242.420,00	19,46	0,00
100	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	15.000.000,00	13.500.000,00	90,00	192.541.060,00
101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	0,00	0,00	217.000,00

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	853.594.525,30	247.231.197,00	0,00	175.698.092,00
103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	420.000.000,00	149.220.505,00	35,53	0,00
104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.879.640,00
105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	33.300.000,00	0,00	0,00	53.143.500,00
106	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	1.451.468.617,74	1.329.365.813,00	91,59	766.415.710,00
107	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	160.000.054,23	159.363.171,00	99,60	184.717.500,00
108	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	25.000.000,00	8.602.500,00	34,41	152.123.000,00
109	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	175.000.000,00	157.068.329,00	89,75	69.923.229,00
110	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	7.501.400,00
111	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	24.032.000,00	23.932.155,00	99,58	1.000.000,00
112	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	15.000.000,00	14.990.000,00	99,93	443.091.060,00
	JUMLAH	38.140.482.111,77	30.376.625.963,84	79,64	36.808.960.763,79

d) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas meliputi belanja perjalanan dinas biasa baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 terinci sebagai berikut:

**Tabel 69. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa-Belanja Perjalanan Dinas
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah					
No	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.331.005.180,00	13.574.516.729,00	94,72	28.866.499.870,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.822.415.000,00	18.369.729.592,00	92,67	28.123.176.727,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.945.964.992,00	3.101.214.226,00	78,59	6.446.306.494,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.225.412.000,00	1.054.270.300,00	86,03	3.182.684.379,00
	Jumlah	39.324.797.172,00	36.099.730.847,00	91,80	66.618.667.470,00

e) Belanja Lainnya

Belanja Lainnya merupakan belanja untuk pembelian barang-barang *extrakomptabel* yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap, belanja hadiah, belanja lainnya. Realisasi belanja lainnya tahun 2025 dan 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 70. Belanja Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	117.165.869,64	96.639.539,00	82,48	267.715.500,00
2	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	127.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	31.168.800,00	0,00	0,00	835.000,00

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	288.000,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	20.089.000,00
8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	188.867.166,00	158.594.046,00	83,97	1.738.843.800,00
9	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	2.039.999,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
11	Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.107.594,80	49.765.601,00	93,71	166.276.750,00
12	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	21.850.000,00
13	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.164.940,00	535.000,00	8,68	1.900.000,00
14	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	3.589.740,00	3.583.080,00	99,81	0,00
16	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum	29.140.647,59	24.572.270,00	84,32	75.916.276,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Gigi	14.095.249,37	8.932.980,00	63,38	0,00
18	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Gawat Darurat	4.113.660,00	3.828.495,00	93,07	0,00
19	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.543.000,00
20	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	800.000,00	800.000,00	100,00	2.627.914,00
21	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	55.002.600,00
22	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	0,00	56.733.600,00
23	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	166.402.320,00	161.765.841,00	97,21	0,00
24	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.566.540,00	4.454.999,00	97,56	2.800.000,00
25	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.403.040,00	799.200,00	56,96	0,00
26	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.425.825.500,00	2.104.804.448,00	86,77	1.452.579.015,00
27	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	29.000.000,00
28	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	343.200.000,00	79.005.000,00	23,02	418.529.100,00
29	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	13.439.300.000,00	13.378.900.000,00	99,55	28.244.023.950,00
30	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	36.000.000,00	10.800.000,00	30,00	0,00

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
31	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.051.200.000,00	1.051.200.000,00	100,00	1.046.400.000,00
32	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	259.200.000,00	259.200.000,00	100,00	254.400.000,00
33	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	1.600.150.000,00	1.600.150.000,00	100,00	1.366.200.000,00
	Jumlah	19.816.138.567,40	19.033.330.499,00	96,05	35.248.593.504,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3) Belanja Bunga	0,00	0,00	1.791.485.606,00

Tahun 2025 tidak ada belanja bunga. Tahun 2024 belanja bunga sebesar Rp1.791.485.606,00 merupakan bunga pinjaman atas pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berdasarkan Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor: PERJ-114/SMI/0821.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
4) Belanja Hibah	116.068.736.948,90	105.752.137.801,00	190.056.893.844,00

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja hibah tahun 2025 sebesar Rp105.752.137.801,00 dan tahun 2024 sebesar Rp190.056.893.844,00 terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 71. Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Hibah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	2024
A	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.758.097.000,00	4.500.000.000,00	94,58	54.668.374.875,00
A1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	47.422.620.600,00
	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	0,00	0,00	0,00	8.079.870.600,00
	b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	0,00	0,00	0,00	30.600.000.000,00
	2. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00
	3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	5.242.750.000,00
A2	Belanja Hibah barang kepada Pemerintah Pusat	258.097.000,00	0,00	0,00	7.245.754.275,00
	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	258.097.000,00	0,00	0,00	6.060.050.260,00

No	Belanja Hibah		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	2024
	2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	1.185.704.015,00
B	Belanja Hibah kepada BUMN		616.920.000,00	416.398.950,00	67,50	0,00
B1	Belanja Hibah barang kepada BUMN		616.920.000,00	416.398.950,00	67,50	0,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		616.920.000,00	416.398.950,00	67,50	0,00
C	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.		49.277.404.948,90	47.847.530.210,00	97,10	88.103.995.630,00
C1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		13.459.000.000,00	13.172.340.000,00	97,87	14.753.768.000,00
C1.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		13.459.000.000,00	13.172.340.000,00	97,87	14.753.768.000,00
	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.354.000.000,00	8.067.340.000,00	96,57	9.503.768.000,00
	2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
	3.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.055.000.000,00	4.055.000.000,00	100,00	3.700.000.000,00
	5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
C2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		19.434.096.641,00	18.670.453.480,00	96,07	22.784.621.195,00
C2.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		19.162.326.350,00	18.449.280.430,00	96,28	22.390.920.195,00
	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.955.885.000,00	1.805.885.000,00	92,33	3.900.000.000,00
	2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.871.191.350,00	2.868.691.350,00	99,91	2.569.500.000,00
	3.	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	580.000.000,00
	4.	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	14.335.250.000,00	13.774.704.080,00	96,09	15.241.420.195,00
	5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
C2.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		271.770.291,00	221.173.050,00	81,38	393.701.000,00
	1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	271.770.291,00	221.173.050,00	81,38	393.701.000,00
C3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		16.384.308.307,90	16.004.736.730,00	97,68	50.565.606.435,00
C3.1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		13.735.100.000,00	13.690.100.000,00	99,67	39.921.539.600,00
	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.169.600.000,00	5.169.600.000,00	100,00	12.666.750.000,00
	2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.887.530.000,00	6.887.530.000,00	100,00	22.327.900.000,00
	3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	1.225.000.000,00
	4.	Dinas Pemuda dan Olahraga	231.300.000,00	186.300.000,00	80,54	1.209.389.600,00
	5.	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
	6.	Dinas Pariwisata	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
	7.	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Masyarakat	871.670.000,00	871.670.000,00	100,00	1.242.500.000,00
	8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	50.000.000,00
C3.2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		2.649.208.307,90	2.314.636.730,00	87,37	10.644.066.835,00
	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.649.208.307,90	2.314.636.730,00	87,37	10.044.786.835,00
	2	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Hibah		Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	2024
	3	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Citrodiwangsan	0,00	0,00	0,00	99.940.000,00
	4	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Ditotrunan	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00
	5	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogoyudan	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
	6	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Tompokersan	0,00	0,00	0,00	99.800.000,00
	7	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Rogotrunan	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
	8	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Kepuharjo	0,00	0,00	0,00	99.940.000,00
D	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		3.157.505.000,00	3.157.505.000,00	100,00	3.041.975.000,00
	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.157.505.000,00	3.157.505.000,00	100,00	3.041.975.000,00
E	Belanja Hibah Dana BOSP		58.258.810.000,00	49.830.703.641,00	85,53	44.242.548.339,00
E1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS		22.009.500.000,00	17.902.102.799,00	81,34	15.830.463.639,00
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.009.500.000,00	17.902.102.799,00	81,34	15.830.463.639,00
E2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS PAUD		30.774.040.000,00	26.484.066.092,00	86,06	22.274.830.000,00
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.774.040.000,00	26.484.066.092,00	86,06	22.274.830.000,00
E3	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan		5.475.270.000,00	5.444.534.750,00	99,44	6.137.254.700,00
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.475.270.000,00	5.444.534.750,00	99,44	6.137.254.700,00
Jumlah Belanja Hibah (A + B + C + D + E)			116.068.736.948,90	105.752.137.801,00	91,11	190.056.893.844,00

Tabel 72. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

				Dalam Rupiah
No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kementerian Agama untuk pembayaran insentif GTK jenjang MI	2.085.000.000,00	
2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kementerian Agama untuk pembayaran insentif GTK jenjang MTs	1.542.000.000,00	
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kementerian Agama untuk pembayaran insentif GTK jenjang RA	873.000.000,00	
JUMLAH			4.500.000.000,00	

Tabel 73. Belanja Hibah barang kepada BUMN

				Dalam Rupiah
No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)	
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya	PT Perkebunan Nusantara I Regional V	416.398.950,00	
JUMLAH			416.398.950,00	

Tabel 74. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru	KB Kenanga	200.000.000,00
		TK Ceria Bodang	200.000.000,00
		MI Miftahul Ulum Pandanwangi	100.000.000,00
		MI Nurul Islam Denok	200.000.000,00
		MI Roudlotul Maksu Wonogriyo	200.000.000,00
		SMP Islam Miftahul Ulum Kunir	250.000.000,00
		MI Nurul Islam Kraton	150.000.000,00
		SDI Terpadu Nurul Islam Klakah	215.000.000,00
		RA Ulul Albab Darungan	150.000.000,00
	2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	TK Dharma Wanita Sumberwuluh 01	100.000.000,00
		TK Dharma Wanita Kabuaran	200.000.000,00
		MTs Miftahul Ulum Selokgondang	100.000.000,00
		KB Apel	100.000.000,00
		PAUD Bunda	20.000.000,00
		MI Darul Falah Wonosari	50.000.000,00
		MI Darul Falah Karangbendo	100.000.000,00
		TK GPRI Meninjo	50.000.000,00
		KB Idola	35.000.000,00
		TK Dharma Wanita Pandansari	30.000.000,00
		TK DW Jugosari	100.000.000,00
		TK Dharma Wanita Candipuro	150.000.000,00
		TK Dharma Wanita 4 Pasrujambe	40.000.000,00
		PAUD KB Kartini Supiturang	85.000.000,00
	3. Penyediaan infrastruktur TIK	MTs Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul	200.000.000,00
	4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	TK Dharma Wanita IV	100.000.000,00
	5. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Hibah uang Madin Ula BOSDA Madin Propinsi	1.629.450.000,00
		Hibah uang Madin Ula BOSDA Madin Kabupaten	1.629.450.000,00
	6. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Hibah uang Madin Wustha BOSDA Madin Propinsi	202.500.000,00
		Hibah uang Madin Wustha BOSDA Madin Kabupaten	202.500.000,00
	7. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	PKBM AL Amin (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Sakinah (DAU)	19.310.000,00
		PKBM Prose Sportif (DAU)	25.740.000,00
		PKBM Pertiwi (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Permata (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Nusantara (DAU)	19.320.000,00
		PKBM Tumbuh Kembang (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Tunas Bangsa (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Budi Utomo (DAU)	24.780.000,00
		PKBM Harapan Bangsa (DAU)	23.160.000,00
		PKBM Cahaya Kehidupan (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Ceria (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Cahaya Kurnia Bangsa (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Mandiri (DAU)	19.320.000,00
		PKBM Mutiara Ilmu (DAU)	13.510.000,00
		PKBM Mahameru (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Mitra Mandiri (DAU)	23.160.000,00
		PKBM Citra (DAU)	24.780.000,00
		PKBM Mutiara (DAU)	24.770.000,00

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
		PKBM Kasih Ibu (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Intan Mulia (DAU)	24.780.000,00
		PKBM Bintang (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Berlian (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Berkobar (DAU)	24.770.000,00
		PKBM Amanah Bangsa (DAU)	25.420.000,00
		PKBM Al Fatah (DAU)	18.980.000,00
		PKBM Al Amin	30.200.000,00
		PKBM Amanah Bangsa	31.200.000,00
		PKBM Al Fatah	28.800.000,00
		PKBM Berlian	32.400.000,00
		PKBM Bintang	28.800.000,00
		PKBM Budi Utomo	28.800.000,00
		PKBM Mandiri	28.800.000,00
		PKBM Cahaya Kehidupan	25.400.000,00
		PKBM Kasih Ibu	32.400.000,00
		PKBM Mahameru	25.200.000,00
		PKBM Mutiara	25.200.000,00
		PKBM Nusantara	28.800.000,00
		PKBM Sakinah	25.400.000,00
		PKBM Pertiwi	28.800.000,00
		PKBM Prose Sportif	28.800.000,00
		PKBM Tumbuh Kembang	25.400.000,00
	8. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SMP Maarif NU Riyadus Sholihin	100.000.000,00
		MI Miftahul Ulum Tempursari	65.000.000,00
	9. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	SDI Al Maliki	50.000.000,00
	JUMLAH		8.067.340.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PMI Kabupaten Lumajang	1.000.000.000,00
	JUMLAH		1.000.000.000,00
3	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	1. Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	KONI Kabupaten.Lumajang	3.500.000.000,00
		NPCI Kabupaten.Lumajang	30.000.000,00
	2. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	KORMI Kabupaten.Lumajang	25.000.000,00
	3. Penyelenggaraan Bidang Pendidikan	PRAMUKA Kabupaten.Lumajang	500.000.000,00
	JUMLAH		4.055.000.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lumajang	50.000.000,00
	JUMLAH		50.000.000,00
TOTAL			13.172.340.000,00

**Tabel 75. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**

Dalam Rupiah

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1. Pelindungan, Pemanfaatan Kebudayaan	Pengembangan, Objek Pemajuan	
		Al Banjari Al Samii	25.000.000,00
		Al Banjari Ar Rohman	25.000.000,00
		Al Banjari Az Zahir	25.000.000,00
		Al Banjari An Nisa	25.000.000,00
		Al Banjari Khusnul Khotimah	25.000.000,00
		Al Banjari Al Farizqi	25.000.000,00
		Al Banjari At Taqwa	25.000.000,00
		Pokmas Al Hidayah Kemamang	25.000.000,00
		Pokmas Majelis Maulid Al Ikhlas	20.000.000,00
		Pokmas Al Khoirot	15.000.000,00
		Pokmas Albanjari Al Ikhlas	20.000.000,00
		Pokmas Dibaiyah Karunia Ilahi	15.000.000,00
		Pokmas Al Habsi Annur	25.000.000,00
		Pokmas Kuda Lumping	50.000.000,00
		Pokmas Wayang Kulit	100.000.000,00
		Kelompok Seni Sekar Taji	50.000.000,00
		Kel Kes Bhineka Tunggal Rasa	90.000.000,00
		Al Jiduri Nurul Hikmah	15.000.000,00
		Albanjari Al Karomah	15.000.000,00
		Pokmas Pecalang Gana Niraksa	30.000.000,00
		Pokmas Dodo Samboyo	50.000.000,00
		Pokmas Habsyi Al Muttaqin	25.000.000,00
		Campursari Gita Iswara	20.000.000,00
		Pokmas Lestari	20.000.000,00
		Pokmas Lestari Budaya	30.000.000,00
		Pokdarwis Watu Pecak	30.000.000,00
		Pokmas Beringin Muda	25.000.000,00
		Pokmas Al Banjari Al Mahabbah	25.000.000,00
		Hadrah Albanjari Assulaimaniyah	10.000.000,00
		Al Banjari Nurul Musthofa	15.000.000,00
		Pokmas Ar Rohman	100.000.000,00
		Pokmas As Salamah	100.000.000,00
		Pokmas Hikmah	100.000.000,00
		Paguyuban Krajan I	50.000.000,00
		Pokmas Sanggar AC Musik	34.885.000,00
		Lumajang Community Club	30.000.000,00
		Majelis Sholawat Al Hidayah	25.000.000,00
		Majelis Sholawat An Nisa	25.000.000,00
		Pokmas Perjuangan	50.000.000,00
		Al Banjari At Taqwa	17.000.000,00
		Majelis Taklim An Nadliriyyah	9.000.000,00
		Sanggar Karya Budaya	100.000.000,00
		Pokkes Singo Murti Joyo	25.000.000,00
		Yysn Karawitan Nata Budaya	80.000.000,00
		Pokmas Putra Madas RW 04	25.000.000,00
		Pokmas Nurul Mustofa	25.000.000,00
		Pokmas Al Karomah	15.000.000,00
		OK Keroncong Simponi Sutra	100.000.000,00
	JUMLAH		1.805.885.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	1. Pembangunan, Pemeliharaan Lainnya	Rehabilitasi dan Prasarana Pertanian	
		Poktan Kembang Tirto II	16.500.000,00
		Gapoktan Makmur Jaya	33.000.000,00
		Poktan Kembang Tirto I	33.000.000,00

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
		Poktan Mulyo Tani	33.000.000,00
		Poktan Suko Makmur	33.000.000,00
		Poktan Tani Makmur II	33.000.000,00
		Poktan Sumber Rejeki	33.000.000,00
		Poktan Suko Tani	33.000.000,00
		Poktan Melati	33.000.000,00
		Poktan Sumber Makmur Sejahtera	49.500.000,00
		Poktan Kerto Raharjo	16.500.000,00
		Gapoktan Mulyo Indah	33.000.000,00
		Poktan Sumber Tani I	16.500.000,00
		Poktan Suka Maju	16.500.000,00
		Poktan Harapan Tani	33.000.000,00
		Gapoktan Gonorejo	33.000.000,00
		Poktan Dairun Jaya	16.500.000,00
		Poktan Serasi	33.000.000,00
		Poktan Tani Makmur II	16.500.000,00
		Poktan Sari Makmur	49.500.000,00
		Poktan Asoka Jaya	16.500.000,00
		Poktan Bintang Makmur	49.500.000,00
		Poktan Jengger Sari	33.000.000,00
		Poktan Panguripan	16.500.000,00
		Poktan Dewi Sri	16.500.000,00
		Gapoktan Mekar Sari	33.000.000,00
		Poktan Tegal Sari I	16.500.000,00
		Poktan Kali Putih	16.500.000,00
		Poktan Sari Rejeki I	33.000.000,00
		Poktan Argo Mulyo III	33.000.000,00
		Poktan Tani Makmur II	16.500.000,00
		Gapoktan Mulyo Indah	16.500.000,00
	2.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Poktan Eka Tani	100.000.000,00
		Poktan Suka Tani	100.000.000,00
		Poktan Tani Murni	150.000.000,00
		Poktan Mulya Tani	150.000.000,00
	3.Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Poktan Rukun Jaya	150.191.350,00
		Poktan Mandira	150.000.000,00
		Poktan Bumi Berkah	200.000.000,00
		Poktan Surya Luhur	50.000.000,00
		Poktan Karya Tani	100.000.000,00
		Poktan Beji Jaya	40.000.000,00
	4.Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Gapoktan Mitra Tani	200.000.000,00
		Gapoktan Sejahtera	60.000.000,00
		Poktan Tani Rowo	450.000.000,00
		Poktan Rinjani	20.000.000,00
		Poktan Sumber Rejeki	20.000.000,00
		Poktan Adil	37.500.000,00
	JUMLAH		2.868.691.350,00
3	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dewan Masjid Indonesia (DEMASINDO)	1.476.000.000,00
		BAZNAS Kabupaten Lumajang	150.000.000,00
		LPTQ Kabupaten Lumajang	3.779.954.080,00
		TPQ Qurrotul Uyun	100.000.000,00
		Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Lumajang	100.000.000,00
		Badan Kerja Sama Antar Gereja (BKSAG)	85.300.000,00
		Buddha Maitreya	7.500.000,00
		Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	25.000.000,00
		Paroki Maria Ratu Damai	10.000.000,00
		Program Study Diluar Kampus Utama	2.000.000.000,00

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
		Akademi Komunitas Negeri (PSDKU) Lumajang	
		Masjid Jamik Al Amin	80.000.000,00
		TPA Umar Bin Khattab	50.000.000,00
		Masjid Al Huda	50.000.000,00
		Mushola Baitul Mukhlisin	25.000.000,00
		Madin Darul Ilyas Wonogriyo	100.000.000,00
		Pondok Pesantren Miftahul Ulum	200.000.000,00
		Masjid Akbar MA Miftahul Ulum	100.000.000,00
		Masjid At Taqwa	100.000.000,00
		Masjid Babus Salam Jenggong	50.000.000,00
		SMK Al Haromain	200.000.000,00
		Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Nurul Faroh	200.000.000,00
		Masjid Jami' Darul Muttaqin	25.000.000,00
		Masjid Al Muslimin Candilor	50.000.000,00
		Musholla An Nur Kampung Baru	50.000.000,00
		Musholla Al Barokah Poncosumo	50.000.000,00
		Masjid Al Istiqomah	50.000.000,00
		Mushola Al Mubaroq	15.000.000,00
		Masjid Haqqul Yaqin	200.000.000,00
		Majelis Taklim Al Hidayah	10.500.000,00
		Majelis Taklim Al Mawaddah	18.000.000,00
		Majelis Taklim Imraah	13.500.000,00
		Majelis Taklim Muslimat Almuhajirin	22.500.000,00
		Majelis Taklim Al Muhajirin	15.000.000,00
		Majelis Taklim Mawaddah	27.000.000,00
		Majelis Taklim Dasa Wisma Pisang Agung 27 28	10.500.000,00
		Majelis Taklim Al Mubarak	21.000.000,00
		Majelis Taklim Nikmatul Azizah	27.000.000,00
		Majelis Taklim Pengajian RW 09	15.000.000,00
		Majelis Taklim Manaqib Syeh Abdul Qodir Jailani	31.500.000,00
		Majelis Taklim Riyatul Jannah	21.000.000,00
		Majelis Taklim Baitur Rohim	18.000.000,00
		Majelis Taklim Al Qodiri	13.500.000,00
		Majelis Taklim Sholawat Nariyah	19.500.000,00
		Mushollah Ulul Albab Randuagung	100.000.000,00
		Yayasan Annaahdiyyin	25.000.000,00
		Majelis Taklim Nurul Abror	25.000.000,00
		Masjid Al Adha	50.000.000,00
		Yayasan Darun Nasichin	200.000.000,00
		Musholla Nurussalam	80.000.000,00
		Musholla Miftahul Jannah	75.000.000,00
		Majelis Taklim Muslimat Al Hidayah	100.000.000,00
		Musholla At Taubah	150.000.000,00
		Yayasan Syifaul Qulub	25.000.000,00
		Musholla Al Huda	15.000.000,00
		Majelis Taklim Khadijah 01	13.000.000,00
		Musholla Roudhotul Muta'alimin	50.000.000,00
		Majelis Taklim Ainur Rohmah	65.000.000,00
		Majelis Taklim Al Mawaddah	100.000.000,00
		Majelis Taklim Nur Asyifa	100.000.000,00
		Pondok Pesantren Al Afkaar Salafy	100.000.000,00
		Pondok Pesantren Nurul Sholah	150.000.000,00
		Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Ichsan	100.000.000,00
		Madrasah Diniyah Al Furqon	100.000.000,00
		Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Bahrul Ulum	100.000.000,00
		Madrasah Diniyah Roudlotul Falah	100.000.000,00
		Majelis Taklim Al Hidayah	50.000.000,00

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
		Masjid Roudhotul Nur	50.000.000,00
		Majelis Taklim Al Barokah	25.000.000,00
		Masjid Nurul Rohmah	50.000.000,00
		Masjid Al Asyhar	50.000.000,00
		Majelis Taklim Al Khoir	25.500.000,00
		Majelis Taklim Al Hikmah	40.250.000,00
		Majelis Taklim Nurul Hidayah	52.500.000,00
		Majelis Taklim Baitul Muttaqim	38.400.000,00
		Majelis Taklim Jam'iyah Manakib Putri	25.800.000,00
		Majelis Taklim Al Hidayah Miftahul Ulum	30.000.000,00
		Majelis Taklim Al-Hidayah	21.000.000,00
		Majelis Rotibul Haddad Roudatul Jannah	50.000.000,00
		Musholla Al Barokah Dusun Masjid	40.000.000,00
		TPQ Nurul Hidayah	6.000.000,00
		Majelis Taklim An Nisa	30.000.000,00
		Majelis Taklim Al - Ikhlas	50.000.000,00
		Musholla Al Ikhlas	100.000.000,00
		Musholla Roudlotul Solihin	100.000.000,00
		Majelis Taklim As-Sturoya Sumberwuluh	25.000.000,00
		Majelis Taklim As-Sturoya Candipuro	25.000.000,00
		Majelis Taklim As-Sturoya Jarit	25.000.000,00
		Madrasah Diniyah Apita Nurussalam	100.000.000,00
		Madrasah Diniyah Roudlotul Qoni'iyah	50.000.000,00
		Musholla Al Mukhlisin	50.000.000,00
		Masjid Mujahidin Sembon	200.000.000,00
		Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah As-Salam	200.000.000,00
		Masjid Nurul Iman Sunan Kalijogo	200.000.000,00
		Majelis Taklim Al Huda	50.000.000,00
		Majelis Taklim Khoirun Nisa'	50.000.000,00
		Masjid Nurul Amin	30.000.000,00
		Musholla Nurul Imam	50.000.000,00
		Majelis Taklim Barokah	50.000.000,00
		Madrasah Diniyah Miftahul Amin	200.000.000,00
		TPQ Nadlotuth Thullab	100.000.000,00
		Pondok Pesantren Al - Istiqomah	50.000.000,00
		Musholla Pondok Pesantren Miftahul Islam Kunir	50.000.000,00
		JUMLAH	13.774.704.080,00
		TOTAL	18.449.280.430,00

Tabel 76. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Dalam Rupiah

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	Gapoktan Sri Rejeki Ds. Jonggrang Kec. Ranuyoso (1 unit)-Samsudin.	12.210.000,00
		Poktan Tani Mulyo Ds. Sombo Kec. Gucialit (1unit)- Tulik.	12.210.000,00
		Poktan Suko Makmur II Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko (1 unit)-Isman Wahyudi.	12.210.000,00
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Poktan Umbul Sari Ds. Sememu Kec. Pasirian (1505 buah)-Rumiyon.	68.492.550,00

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
		Poktan Kembang Tirto I Ds. Kaliwungu Kec. Tempeh (1000 buah)-Salam Wahyudi.	45.510.000,00
		Poktan Sidodadi Ds. Nogosari Kec. Rowokangkung (800 buah)-Subaeri.	36.408.000,00
		Poktan Serasi Ds. Kunir lor Kec. Kunir (750 buah)- Agung Eko Suyatno.	34.132.500,00
	JUMLAH		221.173.050,00

Tabel 77. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Dalam Rupiah

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Belanja Hibah BOSDA MADIN untuk honor guru jenjang MI dan Ula (Sumber Dana: DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan)	2.214.000.000,00
		Belanja Hibah BOSDA MADIN untuk honor guru jenjang MI dan Ula (Sumber Dana: BKK Provinsi)	2.214.000.000,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Belanja Hibah BOSDA MADIN untuk honor guru jenjang MTs dan Wustho (Sumber Dana: DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan)	370.800.000,00
		Belanja Hibah BOSDA MADIN untuk honor guru jenjang MTs dan Wustho (Sumber Dana: BKK Provinsi)	370.800.000,00
	JUMLAH		5.169.600.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pokmas Al Muttaqin	50.000.000,00
		Pokmas Al Fatih	50.000.000,00
		Pokmas Gizta	100.000.000,00
		Pokmas Sumber Jaya	100.000.000,00
		Pokmas Sumber Abadi	100.000.000,00
		Pokmas Tanggul Sari	40.000.000,00
		Pokmas Tirta Makmur	35.000.000,00
		Pokmas Kirana	50.000.000,00
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pokmas Maju Jaya	50.000.000,00
		Pokmas Krajan Jaya	55.000.000,00
		Pokmas Gotong Royong	75.000.000,00
		Pokmas Arjuna	100.000.000,00
		Pokmas Budiman	100.000.000,00
		Pokmas Mekar Bersinar	100.000.000,00
		Pokmas Bence Indah	100.000.000,00
		Pokmas Maju Jaya	100.000.000,00
		Pokmas Makmur Jaya	100.000.000,00
		Pokmas Mitra	100.000.000,00
		Pokmas Guyub Rukun	150.000.000,00
		Pokmas Abadi	150.000.000,00
		Pokmas Banteng Bersatu	150.000.000,00
		Pokmas Banteng Jaya	150.000.000,00
		Pokmas Samudra	200.000.000,00
		Pokmas Babakan Makmur	200.000.000,00
		Pokmas Babakan Bersatu	200.000.000,00
		Pokmas Mandala	200.000.000,00
		Pokmas Arjuna	250.000.000,00
		Pokmas Desa Barat	50.000.000,00
		Pokmas Wonoayu	100.000.000,00
		Pokmas Mekar Sari	130.000.000,00

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
		Pokmas Bintang Jaya	50.000.000,00
		Pokmas Merdeka	200.000.000,00
		Pokmas Jurang Dawir Berseri	35.000.000,00
		Pokmas Sriti	100.000.000,00
		Pokmas Raudloh	190.000.000,00
		Pokmas Dusun Selorejo	100.000.000,00
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya	Pokmas Perjuangan	100.000.000,00
		Pokmas Bahagia	75.000.000,00
		Pokmas Blimbing Manis	115.000.000,00
		Pokmas Jatisari Berkah	85.000.000,00
		Pokmas Curah Barokah	56.000.000,00
		Pokmas Bence Amanah	74.000.000,00
		Pokmas Pandansari Karomah	100.000.000,00
		Pokmas Grobogan Asri	100.000.000,00
		Pokmas Darussalam	100.000.000,00
		Pokmas Mangga	100.000.000,00
		Pokmas Sedari	100.000.000,00
		Pokmas Pemuda Wangkit	100.000.000,00
		Pokmas Amanah	100.000.000,00
		Pokmas Sumber Makmur	70.000.000,00
		Pokmas Sido Rukun	50.000.000,00
		Pokmas Samawa	50.000.000,00
		Pokmas Mandiri	50.000.000,00
		Pokmas Merpati	100.000.000,00
		Pokmas Karya Selokbesuki	50.000.000,00
		Pokmas Tani Manis	200.000.000,00
		Pokmas Walet	100.000.000,00
		Pokmas Markisa	200.000.000,00
		Pokmas Tebu	200.000.000,00
		Pokmas Denok Berseri	36.000.000,00
		Pokmas Bernas	39.680.000,00
		Pokmas Seruni	53.650.000,00
		Pokmas Kepuharjo Berseri	33.750.000,00
		Pokmas Ghozali	57.200.000,00
		Pokmas Sido Rukun	50.000.000,00
		Pokmas Wates Wetan Amanah	50.000.000,00
		Pokmas Mojosari Berseri	47.250.000,00
		Pokmas Amanah Berseri	45.000.000,00
		Pokmas Manunggal Jaya	90.000.000,00
		Pokmas Sido Mbangun	100.000.000,00
	JUMLAH		6.887.530.000
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan		
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Ngateman/DEKOPINDA Kabupaten Lumajang	25.000.000,00
		Mauludiyatus Syarifah/Koperasi Konsumen Bhakti Yudha Pertiwi	150.000.000,00
	JUMLAH		175.000.000,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Club Bola Volly Djoker	25.000.000,00
		Wiraraja Sentul Adventure	10.000.000,00
		Klub Watu Redjeng	15.000.000,00

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
		Klub Pentanque Semangat Jaya Lumajang	10.000.000,00
		Club Badminton Bina Muda	25.000.000,00
		Club Laskar Semeru Lumajang	11.300.000,00
		Club Volly Bima Sena VC	40.000.000,00
		Pelatihan Pertanian Hydroponik	50.000.000,00
	JUMLAH		186.300.000,00
5	Dinas Pariwisata		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Badan Usaha Milik Desa "SUMBER REJEKI" Dusun Krajan RT 01 RW V Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro	200.000.000,00
	JUMLAH		200.000.000,00
6	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Masyarakat		
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rukem RW 01	15.000.000,00
		Rukem RW 19	15.000.000,00
		Rukem RW 18	15.000.000,00
		Rukem RW 14	15.000.000,00
		Rukem Dusun Besuksat	20.000.000,00
		Rukem Al Hikmah	5.000.000,00
		Rukem Dusun Krajan I	20.000.000,00
		Rukem Dusun Krajan II	20.000.000,00
		Rukem Al Hikmah	15.000.000,00
		Rukem Krajan Khomsah	15.000.000,00
		Rukem Krajan Salasah	15.000.000,00
		Rukem Krajan Tisah	15.000.000,00
		Rukem Maghfiroh	15.000.000,00
		Rukem Marganing Urip	15.000.000,00
		Rukem RT 04 RW 02	20.000.000,00
		Rukem Muslimat	15.000.000,00
		Rukem Al Hidayah	20.000.000,00
		Rukem Mekarsari	10.000.000,00
		Rukem Gotong Royong	15.000.000,00
		Rukem Citra 17	25.000.000,00
		Rukem Al Muttaqin	25.000.000,00
		Rukem Al Khoirot	25.000.000,00
		Rukem Ar-Rohmah	25.000.000,00
		Rukem RT 06 RW 02	25.000.000,00
		Rukem RW 01 Kraton	25.000.000,00
		Rukem Lompongan Al Barokah	25.000.000,00
		Rukem Al Fajar	25.000.000,00
		Rukem Al Amin	25.000.000,00
		Rukem Sido Rukun	25.000.000,00
		Rukem Al Amin	25.000.000,00
		Rukem Gotong Royong Dsn Wonorejo	15.000.000,00
		Rukem Budi Raharjo	2.000.000,00
		Rukem Mardi Luhur	2.000.000,00
		Rukem Awet Luhur	2.000.000,00
		Rukem Dwi Tunggal	2.000.000,00
		Rukem Agawe Santoso	2.000.000,00
		Rukem Rohmat	2.000.000,00
		Rukem Nurul Iksan	10.000.000,00
		Rukem Al Barokah RW 04	16.670.000,00
		Rukem RT 014 RW 005	8.000.000,00
		Rukem RT 10 RW 04 Bulurejo	25.000.000,00
		Rukem RT 03 RW 08 Amanah	25.000.000,00
		Rukem RT 01 RW 04 Al Khoirot	25.000.000,00
		Rukem RT 01 RW 01 Dono Palaseno	25.000.000,00
		Rukem Madurejo RT 06 RW 03 Sepi Ing Pamrih	25.000.000,00

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
		Rukem Umbulsari RT 03 RW 01	25.000.000,00
		Rukem Kebonan RT 02 RW 03	25.000.000,00
		Rukem RT 09 RW 05	25.000.000,00
		Rukem RT 14 RW 06	25.000.000,00
		Rukem Margo Mulyo	15.000.000,00
	JUMLAH		871.670.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lumajang	200.000.000,00
	JUMLAH		200.000.000,00
	TOTAL		13.690.100.000,00

Tabel 78. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Dalam Rupiah

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi "Tirta Bening" Desa Penawungan Kecamatan Ranuyoso	635.371.370,00
		Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi "Sumber Tirta" Desa Sawaran Kulon Kecamatan Kedungjajang	223.733.720,00
	2. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi "Lestari" Desa Barat Kecamatan Padang	149.009.300,00
		Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi "Tirto Wulung" Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro	78.537.400,00
		Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi "Tirto Gemilang" Desa Jambekumbu Kecamatan Pasrujambe	106.809.200,00
		Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi "Meninjo Makmur" Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso	98.413.600,00
		Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi "Tegalciut Bangkit" Desa Tegalciut Kecamatan Klakah	148.244.200,00
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kelompok Swadaya Masyarakat "Semeru Agung" Desa Senduro Kecamatan Senduro	176.503.170,00
		Kelompok Swadaya Masyarakat "Barokah" Desa Senduro Kecamatan Senduro	106.073.946,80
		Kelompok Swadaya Masyarakat "Mandara Giri" Desa Senduro Kecamatan Senduro	94.778.823,20
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya	Pokmas Mangun Karyo	152.330.000,00
		Pokmas Hajida	344.832.000,00
	JUMLAH		2.314.636.730,00

Tabel 79. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Dalam Rupiah			
No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	DPC Partai Gerindra	695.155.000,00
		DPC PKB	614.600.000,00
		DPC PDIP	472.445.000,00
		DPD Partai Golkar	266.860.000,00
		DPD Partai Nasdem	198.265.000,00
		DPD PKS	199.570.000,00
		DPC Partai Demokrat	172.460.000,00
		DPC PPP	538.150.000,00
	JUMLAH		3.157.505.000,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5) Belanja Bantuan Sosial	12.036.253.575,25	11.139.513.370,00	15.130.139.400,00

Belanja bantuan sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yang berarti dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan sosial telah lepas dari risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian/peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin memburuk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp12.036.253.575,25 terealisasi sebesar Rp11.139.513.370,00 terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 80. Realisasi Belanja Operasi–Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Hibah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.855.200.000,00	2.539.800.000,00	88,95	4.262.400.000,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.855.200.000,00	2.539.800.000,00	88,95	4.262.400.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.157.500.000,00	2.842.500.000,00	90,02	2.860.000.000,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.077.500.000,00	2.762.500.000,00	89,76	2.860.000.000,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00

No	Belanja Hibah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	454.053.575,25	226.673.370,00	49,92	187.714.400,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	454.053.575,25	226.673.370,00	49,92	187.714.400,00
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	4.240.500.000,00
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	4.240.500.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.419.500.000,00	5.380.540.000,00	99,28	3.579.525.000,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.419.500.000,00	5.380.540.000,00	99,28	3.579.525.000,00
JUMLAH		12.036.253.575,25	11.139.513.370,00	92,55	15.130.139.400,00

Tabel 81. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

Dalam Rupiah			
No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	22 warga negara migran korban tindak kekerasan	66.000.000,00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	30 orang Eks. ODGJ	75.000.000,00
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	329 mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang telah terdaftar di Dinas Sosial P3A	2.368.800.000,00
		5 orang anak usia sekolah dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu	30.000.000,00
	JUMLAH		2.539.800.000,00

Tabel 82. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga

Dalam Rupiah			
No	SKPD/Kegiatan	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Sekat	15.000.000,00
		Paham	15.000.000,00
		Tukimin	15.000.000,00
		Ngatijah	15.000.000,00
		Timan	15.000.000,00
		Ali Abdul Rohman	15.000.000,00
		Ngatiman	15.000.000,00

No	SKPD/Kegiatan	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah (Rp)
		Sugeng Arifin	15.000.000,00
		Ngatinah	15.000.000,00
		Misdadi/Misadi	15.000.000,00
		Buiran	15.000.000,00
		Buadi	15.000.000,00
		Tutik Wartini	15.000.000,00
		Ponimah	15.000.000,00
		Anan	15.000.000,00
		Moch. Solihin	15.000.000,00
		Saki	15.000.000,00
		Troni	15.000.000,00
		Khoirul Holel	15.000.000,00
		Sakima	15.000.000,00
		Satruyan	15.000.000,00
		Moh Hasan	15.000.000,00
		Misnali	15.000.000,00
		Narima	15.000.000,00
		Joni Purwanto	15.000.000,00
		Sutrisno	15.000.000,00
		Samsul Arifin/Syamsul Arifin	15.000.000,00
		Misrin	15.000.000,00
		Tohed	15.000.000,00
		Baet	15.000.000,00
		Warso Effendi	15.000.000,00
		Muhammad Arik	15.000.000,00
		Nuryati	15.000.000,00
		Wanto	15.000.000,00
		Mukaram	15.000.000,00
		Sumarni	15.000.000,00
		Khuma'yah	15.000.000,00
		Mochammad Sirri	15.000.000,00
		Umi Kulsum	15.000.000,00
		Siti Sundari	15.000.000,00
		Nur Aini	15.000.000,00
		Tutik	15.000.000,00
		Susiyo	15.000.000,00
		Royhan Jefri Laksana	15.000.000,00
		Rosid	15.000.000,00
		Repi	15.000.000,00
		Miskan	15.000.000,00
		Subakri	15.000.000,00
		Sanidin	15.000.000,00
		Mustajab	15.000.000,00
		Mursi	15.000.000,00
		Nasi	15.000.000,00
		Fatima	15.000.000,00
		Salip	15.000.000,00
		Rupia	15.000.000,00
		Juma'ati	15.000.000,00
		Prasetio	15.000.000,00
		Lilik Astutik	15.000.000,00
		Mawi	15.000.000,00
		Khusnul Khotimah	15.000.000,00
		Kojen	15.000.000,00
		Mahat	15.000.000,00
		Anang Abdullah	15.000.000,00
		Mochlaten	15.000.000,00

No	SKPD/Kegiatan	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah (Rp)
		Lukgianto	15.000.000,00
		Lastini	15.000.000,00
		Gigik Hariyanto	15.000.000,00
		Urifun	15.000.000,00
		Supiati	15.000.000,00
		Musrifah	15.000.000,00
		Suwoto	15.000.000,00
		Supiyari	15.000.000,00
		Sucik Uswatun Khasanah	15.000.000,00
		Bawon Sutrisno	15.000.000,00
		Nur Hisam	15.000.000,00
		Sarah	15.000.000,00
		Supawi	15.000.000,00
		Sohib	15.000.000,00
		Selamet	15.000.000,00
		Narsi	15.000.000,00
		Misnari	15.000.000,00
		Sholihin	15.000.000,00
		Tumini	15.000.000,00
		Rusni	15.000.000,00
		Ngaisah	15.000.000,00
		Darmawan	15.000.000,00
		Sri Yunanik/Nandita Intan	15.000.000,00
		Sukarni	15.000.000,00
		Cicik Andiriani	15.000.000,00
		Tohir	15.000.000,00
		Hartutik	15.000.000,00
		Lasipa	15.000.000,00
		Jamal	15.000.000,00
		Sudianto	15.000.000,00
		Bunah Febrianti	15.000.000,00
		Ketang	15.000.000,00
		Warti	15.000.000,00
		Pairin	15.000.000,00
		Marimin	15.000.000,00
		Erni Purwaningsih	15.000.000,00
		Mutiara Rahmadhani	15.000.000,00
		Lasinem	15.000.000,00
		Suwarno	15.000.000,00
		Bawadi/Suwarsi	15.000.000,00
		Paijem	15.000.000,00
		Sutikno	15.000.000,00
		Mai Sulima	15.000.000,00
		Ira	12.500.000,00
		Asia Agustina	15.000.000,00
		Gianto	15.000.000,00
		Rosidah	15.000.000,00
		Fidiyanti	15.000.000,00
		Solikin	15.000.000,00
		Saiful	15.000.000,00
		Muhammad Nur Wahyudi	15.000.000,00
		Mentik Dwi Aditiya	15.000.000,00
		Menik	15.000.000,00
		Siti Nur Aisyah	20.000.000,00
		Sumiani	15.000.000,00
		Jami	15.000.000,00
		Buinah	15.000.000,00

No	SKPD/Kegiatan	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah (Rp)
		Sumo	20.000.000,00
		Chumrotun	20.000.000,00
		Ervina	20.000.000,00
		Rahib Rajab	15.000.000,00
		Sugiono	15.000.000,00
		Ponaji	20.000.000,00
		Su'udik	15.000.000,00
		Jumaiyah	15.000.000,00
		Taufiq Hidayah	15.000.000,00
		Buari	20.000.000,00
		Ma'at Abadi	20.000.000,00
		Suhut Hariyanto	20.000.000,00
		Sumartono	20.000.000,00
		Sunik	20.000.000,00
		Puha	20.000.000,00
		Suparetno Jiwondo	15.000.000,00
		Miswan	20.000.000,00
		Ngadiono	12.500.000,00
		Joko Suprayono	12.500.000,00
		Juari	12.500.000,00
		Marsid H. Dahlawi	12.500.000,00
		Kamsiati	12.500.000,00
		Moh. Suaidi	12.500.000,00
		Tukirin	12.500.000,00
		Sutaji	12.500.000,00
		Musrifah	12.500.000,00
		Samsudin	25.000.000,00
		Hanafi	15.000.000,00
		Yuyud Wahyudi	15.000.000,00
		Jumani	15.000.000,00
		Yani Irawati	15.000.000,00
		Muhammad Sandy	15.000.000,00
		M Khodim	15.000.000,00
		Zainul Arifin	15.000.000,00
		Selamet Priambodo	15.000.000,00
		Abdul Wasik H	17.500.000,00
		Sukatno	15.000.000,00
		Humaiyah	15.000.000,00
		Sana	15.000.000,00
		Leha	15.000.000,00
		Juri	15.000.000,00
		Budi	15.000.000,00
		Abd Kholil	15.000.000,00
		Kandi	15.000.000,00
		Edi Sugianto	15.000.000,00
		Samak	15.000.000,00
		Satuki	15.000.000,00
		Siam	15.000.000,00
		Sanimun	15.000.000,00
		Sarima	15.000.000,00
		Amat	15.000.000,00
		Sumi	15.000.000,00
		Djinab Siah	15.000.000,00
		Rumbiyem	15.000.000,00
		Ngatiyem	15.000.000,00
		Desendi Kurniawan	15.000.000,00
		Endang Wahyudi	15.000.000,00

No	SKPD/Kegiatan	Penerima Bantuan Sosial	Jumlah (Rp)
		Ramelan	15.000.000,00
		Dewi Sekar Wulandari	15.000.000,00
		Hadi Susanto	15.000.000,00
	Jumlah		2.762.500.000,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	40 orang wanita rawan sosial ekonomi yang usia 18 - 57 tahun, wanita yang berstatus janda, istri yang membantu suami mencari nafkah, atau wanita yang berpenghasilan rendah, Memiliki embrio usaha atau keinginan untuk berusaha.	80.000.000,00
	Jumlah		80.000.000,00
	TOTAL		2.842.500.000,00

Tabel 83. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga

Dalam Rupiah

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1260 keluarga miskin terdaftar DTSEN Desil 1-5, non penerima PKH dan/atau BPNT	226.673.370,00
	Jumlah		226.673.370,00

Tabel 84. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

Dalam Rupiah

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Fisik Pemugaran Kawasan Kumuh KOTAKU APBD	BKM KAPTEN KYAI ILYAS DESA BANJARWARU	150.000.000,00
	Jumlah		150.000.000,00

Tabel 85. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Dalam Rupiah

No	SKPD/Sub Kegiatan	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Penyediaan Permakanan	Lembaga LKSA sebanyak 74 Lembaga	5.078.340.000,00
	Pemberian Layanan Rujukan	Anak korban kekerasan seksual dan kekerasan lainnya (Lembaga)	102.200.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bansos LKSA (pembelian meubelair untuk kamar anak asuh : LKSA Nurul Ulum Kalipenggung Randuagung	200.000.000,00
	Jumlah		5.380.540.000,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
b. BELANJA MODAL	252.062.394.891,54	174.629.510.813,75	184.376.264.107,16

Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Total realisasi belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp174.629.510.813,75 atau 69,28% dari anggaran sebesar Rp252.062.394.891,54 terinci sebagai berikut:

Tabel 86. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Tanah	3.795.295.600,00	855.646.000,00	22,54	585.773.600,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	92.243.793.587,93	72.047.391.795,00	78,11	57.685.686.097,75
3	Belanja Gedung dan Bangunan	33.644.623.889,14	22.010.344.774,68	65,42	57.436.151.960,41
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.622.865.165,99	65.357.007.049,07	61,30	56.976.108.552,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.004.682.648,00	10.970.520.852,00	91,39	7.837.161.820,00
6	Belanja Aset Lainnya	3.751.134.000,48	3.388.600.343,00	90,34	3.855.382.077,00
	Jumlah Belanja Modal	252.062.394.891,54	174.629.510.813,75	69,28	184.376.264.107,16

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1) Belanja Modal Tanah	3.795.295.600,00	855.646.000,00	585.773.600,00

Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.795.295.600,00 dengan realisasi sebesar Rp855.646.000,00 atau 22,54%, terinci sebagai berikut.

Tabel 87. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Modal Tanah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.993.000.000,00	719.000.000,00	24,02	70.473.600,00
2	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	129.515.000,00
3	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	802.295.600,00	136.646.000,00	17,03	385.785.000,00
	Jumlah	3.795.295.600,00	855.646.000,00	22,54	585.773.600,00

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp855.646.000,00 merupakan belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja senilai Rp719.000.000,00 dan belanja modal tanah untuk bangunan air senilai Rp136.646.000,00.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2) Belanja Modal			
Peralatan dan Mesin	92.243.793.587,93	72.047.391.795,00	57.685.686.097,75

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp92.243.793.587,93 terealisasi sebesar 78,11% atau sebesar Rp72.047.391.795,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 88. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Excavator	1.351.980.000,00	1.198.800.000,00	88,67	0,00
2	Belanja Modal Electric Generating Set	550.660.965,98	440.671.420,00	80,03	1.231.800.000,00
3	Belanja Modal Pompa	41.603.290,00	27.815.826,00	66,86	66.050.000,00
4	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	0,00	28.685.000,00
5	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.972.943.713,81	3.802.452.500,00	95,71	2.442.000.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.282.450.000,71	477.930.000,00	37,27	0,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	530.051.640,00	500.450.003,00	94,42	0,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	13.811.500.000,00	10.924.688.966,00	79,10	3.224.527.000,00
10	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
11	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	331.416.046,77	322.255.200,00	97,24	0,00
12	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	87.250.000,00
13	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	65.230.260,00	65.046.000,00	99,72	0,00
14	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	6.885.000,00
15	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	11.512.476,00	11.433.000,00	99,31	0,00
16	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	4.720.800,00
17	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	14.231.532,00	14.063.700,00	98,82	1.676.000,00
18	Belanja Modal Alat Ukur Universal	66.240.582,00	60.489.450,00	91,32	0,00
19	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	174.396.025,00	173.862.000,00	99,69	0,00
20	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	2.845.000,00
21	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	189.966.510,00	137.973.000,00	72,63	62.420.700,00
23	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	30.691.500,00
24	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	483.080.000,00
25	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.771.000,00	6.771.000,00	100,00	0,00
26	Belanja Modal Mesin Ketik	8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8.394.375,00	8.103.000,00	96,53	0,00
28	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	206.601.525,00	206.060.000,00	99,74	90.000.000,00
29	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	989.648.825,00	937.484.663,00	94,73	562.556.380,00
30	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.260.406.698,44	2.557.888.682,00	78,45	1.558.081.000,00
31	Belanja Modal Mebel	3.374.721.925,91	3.142.129.137,00	93,11	2.244.943.197,00
32	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	114.000,00	0,00	0,00	0,00

No	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
33	Belanja Modal Alat Pembersih	252.664.669,50	189.356.400,00	74,94	87.686.000,00
34	Belanja Modal Alat Pendingin	2.781.760.940,27	2.090.001.539,00	75,13	1.062.616.151,00
35	Belanja Modal Alat Dapur	53.026.346,50	51.091.860,00	96,35	59.283.300,00
36	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	4.940.383.136,50	4.409.291.794,00	89,25	1.496.817.608,00
37	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	214.290.123,88	145.250.160,00	67,78	162.266.500,00
38	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	162.637.200,00	134.865.000,00	82,92	8.991.000,00
39	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	86.500.000,00
40	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	38.517.319,68	34.665.300,00	90,00	48.291.500,00
41	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	39.613.680,00	38.761.200,00	97,85	4.400.000,00
42	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	56.700.000,00
43	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	189.113.580,00	177.646.614,00	93,94	9.730.000,00
44	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.761.635.999,60	2.310.120.549,00	83,65	835.250.000,00
45	Belanja Modal Peralatan Cetak	3.957.000,00	3.957.000,00	100,00	0,00
46	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	115.995.000,00	115.995.000,00	100,00	0,00
47	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	53.885.000,00	53.607.500,00	99,49	0,00
48	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	516.575.673,22	490.849.579,00	95,02	260.084.828,00
49	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	97.600.000,00
50	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	57.753.300,00	57.165.000,00	98,98	0,00
51	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	37.052.910,00	36.852.500,00	99,46	1.190.000,00
52	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	7.492.500,00	7.381.500,00	98,52	0,00
53	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	19.278.815.547,87	8.533.991.577,00	44,27	13.274.745.671,75
54	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	992.875.439,58	960.251.900,00	96,71	791.940.000,00
55	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.025.895.100,00	1.019.923.500,00	99,42	4.684.118.000,00
56	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	651.372.943,12	590.131.050,00	90,60	466.579.270,00
57	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	8.572.927,00	6.858.700,00	80,00	0,00
58	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	16.500.000,00	5.520.000,00	33,45	0,00
59	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	4.255.868.446,01	4.010.267.905,00	94,23	53.202.000,00
60	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	3.516.441.592,89	2.975.993.572,00	84,63	1.598.600.000,00
61	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	327.799.999,65	327.749.999,00	99,98	36.293.000,00
62	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	1.280.000.000,00
63	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	114.931.380,00	14.430.000,00	12,56	60.798.808,00
64	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	33.300.000,00	28.000.000,00	84,08	0,00
65	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	0,00	0,00	0,00	3.329.429.999,00
66	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
67	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.355.629.500,00
68	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	6.660.000,00	5.661.000,00	85,00	24.710.000,00
69	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	17.742.240,00	17.094.000,00	96,35	6.627.000,00
70	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	104.895.000,00	103.452.000,00	98,62	0,00
71	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	15.540.000,00	11.100.000,00	71,43	0,00
72	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.215.835.394,31	2.103.712.660,00	94,94	1.556.176.903,00
73	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	88.500.000,30	88.377.090,00	99,86	0,00

No	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
74	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	52.464.150,00	52.464.150,00	100,00	90.900.000,00
75	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	990.000.000,00	840.825.000,00	84,93	0,00
76	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	39.770.710,00	19.268.490,00	48,45	0,00
77	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	0,00	26.602.200,00
78	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	164.000,00	0,00	0,00	14.089.800,00
79	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0,00	0,00	0,00	3.885.000,00
80	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	53.600.000,00
82	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	96.704.494,00	85.986.968,00	88,92	0,00
83	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	58.046.784,00	54.008.160,00	93,04	0,00
84	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	1.827.000,00	1.827.000,00	100,00	0,00
85	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	10.499.991,72	9.922.290,00	94,50	0,00
86	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	0,00	0,00	0,00	94.900,00
87	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
88	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	4.047.000,00	4.047.000,00	100,00	0,00
89	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	0,00	0,00	0,00	1.362.000,00
90	Belanja Modal Komputer Jaringan	4.702.000,00	1.150.000,00	24,46	45.900.000,00
91	Belanja Modal Personal Computer	11.232.862.183,15	10.705.340.365,00	95,30	9.155.116.347,00
92	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	963.600.400,00	958.314.400,00	99,45	185.500.450,00
93	Belanja Modal Peralatan Mainframe	20.439.000,00	20.439.000,00	100,00	0,00
94	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	179.993.700,00	179.884.700,00	99,94	85.168.500,00
95	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.342.108.649,95	1.897.451.362,00	81,01	1.715.559.685,00
96	Belanja Modal Peralatan Jaringan	424.670.162,00	389.470.217,00	91,71	80.690.000,00
97	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	400.698.900,00	390.069.259,00	97,35	72.308.600,00
98	Belanja Modal Bor Mesin Putar	0,00	0,00	0,00	5.607.000,00
99	Belanja Modal Baju Pengaman	1.259.949,90	0,00	0,00	0,00
100	Belanja Modal Alat Penolong	84.915.000,00	83.550.000,00	98,39	18.936.000,00
101	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	22.200.000,00	21.978.000,00	99,00	0,00
102	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	6.660.000,00	6.573.975,00	98,71	0,00
103	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	142.803.132,40	141.603.964,00	99,16	170.597.000,00
104	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.799.999,31	400.000,00	22,22	0,00
105	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00	0,00
106	Belanja Modal Peralatan Permainan	17.160.600,00	13.930.500,00	81,18	0,00
107	Belanja Modal Peralatan Senam	1.694.000,00	1.694.000,00	100,00	
	JUMLAH	92.243.793.587,93	72.047.391.795,00	78,11	57.685.686.097,75

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.644.623.889,14	22.010.344.774,68	57.436.151.960,41

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp33.644.623.889,14 terealisasi sebesar 65,42% atau sebesar Rp22.010.344.774,68. Rincian belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 89. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah					
No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.716.009.168,70	3.415.125.146,18	72,42	9.442.023.891,73
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	89.310.600,00	88.065.250,00	98,61	147.194.652,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	91.239.000,00	91.113.715,00	99,86	4.719.645.600,00
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.326.950.796,00	2.158.930.775,00	92,78	13.965.581.005,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	199.998.635,00	199.896.348,00	99,95	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.200.107.000,00	9.525.335.000,00	55,38	23.481.520.050,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	216.483.514,00	215.234.860,00	99,42	338.083.700,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.002.932.778,93	769.728.963,00	38,43	544.382.505,33
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	0,00	0,00	0,00	1.191.069.325,35
10	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	125.918.400,00	120.990.000,00	96,09	0,00
11	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	228.800.400,51	228.550.525,00	99,89	0,00
12	Belanja Modal Taman	5.206.144.911,98	4.225.524.300,00	81,16	89.222.460,00
13	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	475.996.000,00
14	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	699.990.906,00	432.849.831,00	61,84	104.693.681,00
15	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	22.799.998,99	22.710.000,00	99,61	0,00
16	Belanja Modal Asrama	101.989.178,00	101.756.493,50	99,77	0,00
17	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	397.263.296,15	395.962.205,00	99,67	0,00
18	Belanja Modal Pagar	18.685.304,88	18.571.363,00	99,39	0,00
19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	2.936.739.090,00
	JUMLAH	33.644.623.889,14	22.010.344.774,68	65,42	57.436.151.960,41

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	106.622.865.165,99	65.357.007.049,07	56.976.108.552,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp106.622.865.165,99 terealisasi sebesar 61,30% atau sebesar Rp65.357.007.049,07 terinci sebagai berikut:

Tabel 90. Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	82.654.526.486,50	47.262.504.908,07	57,18	39.135.875.410,00
2	Belanja Modal Jalan Lainnya	3.686.371.667,75	3.049.542.786,00	82,72	2.233.287.820,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	920.000.000,00	898.476.835,00	97,66	2.054.384.750,00
4	Belanja Modal Jembatan Lainnya	260.702.999,37	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	7.169.057.743,00	7.103.719.450,00	99,09	4.860.736.500,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.129.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.294.490.076,01	842.473.870,00	65,08	2.585.657.840,00
8	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	81.004.000,00
9	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	179.088.292,00
10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.531.800.000,00	1.500.000.000,00	97,92	3.988.339.169,00
11	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	1.342.630.000,00
12	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	4.641.172.000,00	4.463.725.200,00	96,18	0,00
13	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas	133.200.000,00	133.194.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.331.544.193,36	103.370.000,00	2,39	223.772.100,00
15	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	260.203.671,00
	JUMLAH	106.622.865.165,99	65.357.007.049,07	61,30	56.976.108.552,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.004.682.648,00	10.970.520.852,00	7.837.161.820,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp12.004.682.648,00 terealisasi sebesar 91,39% atau sebesar Rp10.970.520.852,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 91. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Buku Umum	3.013.544.298,00	3.002.580.202,00	99,64	709.312.200,00
2	Belanja Modal Buku Filsafat	55.897.200,00	55.897.200,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Buku Agama	841.062.000,00	609.106.100,00	72,42	0,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	725.693.300,00	634.908.300,00	87,49	0,00

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
5	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	3.654.691.900,00	3.400.005.600,00	93,03	0,00
6	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.667.619.200,00	1.550.956.500,00	93,00	0,00
7	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	370.277.100,00	255.833.100,00	69,09	0,00
8	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.658.761.150,00	1.444.097.350,00	87,06	0,00
9	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	3.219.500,00	3.219.500,00	100,00	0,00
10	Belanja Modal Serial	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Audio Visual	8.950.000,00	8.950.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
13	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	2.147.000,00	2.147.000,00	100,00	0,00
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	7.097.849.620,00
	Jumlah	12.004.682.648,00	10.970.520.852,00	91,39	7.837.161.820,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
6) Belanja Modal Aset Lainnya	3.751.134.000,48	3.388.600.343,00	3.855.382.077,00

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp3.751.134.000,48 terealisasi sebesar 90,34% atau sebesar Rp3.388.600.343,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 92. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.145.534.000,48	1.131.727.663,00	98,79	643.559.250,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	2.605.600.000,00	2.256.872.680,00	86,62	2.611.923.327,00
3	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	599.899.500,00
	Jumlah	3.751.134.000,48	3.388.600.343,00	90,34	3.855.382.077,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
c. BELANJA TIDAK TERDUGA	15.232.257.213,00	4.007.496.476,00	3.583.315.382,00

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Tahun 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp15.232.257.213,00 dengan realisasi sebesar Rp4.007.496.476,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 93. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Realisasi 2025	No	URAIAN	Realisasi 2024
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	
	Dana operasional penanganan darurat infrastruktur DAS Rejati di Kabupaten Lumajang Tahun 2025	91.740.000,00		Dana Operasional Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Lumajang (BPBD)	773.815.200,00
	Dana operasional penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten lumajang tahun 2025	206.752.050,00		Penanganan Darurat Kekeringan Krisis Air Bersih di Kabupaten Lumajang.	958.501.050,00
	Dana operasional penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lumajang tahun 2025	1.562.077.426,00		Tambahan untuk kebutuhan kekeringan krisis air bersih di Kabupaten Lumajang	286.127.700,00
	Jumlah penggunaan BTT melalui BPBD	1.860.569.476,00		Jumlah penggunaan BTT melalui BPBD	2.018.443.950,00
2	DINAS SOSIAL		2	DINAS SOSIAL	
	BTT untuk Korban Cuaca Ekstream di Wilayah Kabupaten Lumajang	112.650.000,00		Bantuan Sosial untuk biaya perbaikan rumah bagi korban bencana alam	4.000.000,00
	Santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang	1.392.500.000,00		Bantuan Sosial untuk biaya perbaikan rumah bagi korban bencana alam	2.500.000,00
	Bantuan Soaial biaya obat tambahan diluar jaminan BPJS dan kebutuhan hidup selama menjalani perawatan di RSUD Dr Soetomo Surabaya serta biaya kebutuhan hidup selama menjalani perawatan bagi penderita (KJB)	15.000.000,00		Biaya kebutuhan hidup bagi penderita kelainan jantung bawaan (KJB) selama menjalani perawatan di Rumah Sakit bagi keluarga miskin	40.000.000,00
	BTT untuk Santunan Bagi Permerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.500.000,00		Santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Lumajang	192.000.000,00
	Jumlah penggunaan BTT melalui Dinas Sosial	1.522.650.000,00		Jumlah penggunaan BTT melalui Dinas Sosial	238.500.000,00
3	DINAS KESEHATAN		3	DINAS KESEHATAN	
	Pembayaran Tahap I pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kab lumajang 2025	26.276.000,00		Pembayaran klaim Biaya Bersalin Gratis bulan Desember 2023	88.133.100,00
	Pembayaran Tahap II pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kab lumajang 2026	27.030.200,00		Hutang pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat msikin tahun 2023	249.916.938,00
	Pembayaran Tahap III pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kab lumajang 2027	15.970.800,00		Biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Lumajang di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Kabupaten Lumajang	181.543.000,00
				Biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Lumajang di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Kabupaten Lumajang	16.334.073,00
				Biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Lumajang di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Kabupaten Lumajang	31.441.500,00

No	URAIAN	Realisasi 2025	No	URAIAN	Realisasi 2024
				Biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Kabupaten Lumajang di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan Kabupaten Lumajang	5.460.700,00
	Jumlah Penggunaan BTT oleh Dinas Kesehatan	69.277.000,00		Jumlah Penggunaan BTT oleh Dinas Kesehatan	572.829.311,00
4	BPKD		4	BPKD	
	Penyetoran Kembali sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Propinsi TA 2024	555.000.000,00		Penyetoran Kembali sisa dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Propinsi TA 2023	753.542.121,00
	Jumlah Penggunaan BTT oleh BPKD	555.000.000,00		Jumlah Penggunaan BTT oleh BPKD	753.542.121,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	4.007.496.476,00		Jumlah Belanja Tidak Terduga	3.583.315.382,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
d. BELANJA TRANSFER	412.862.926.809,00	373.908.565.072,00	363.453.496.871,00

Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa meliputi bagi hasil pajak/retribusi daerah ke desa, dan bantuan keuangan bersifat umum dan khusus kepada desa. Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp412.862.926.809,00 dengan realisasi sebesar Rp373.908.565.072,00. Rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 94. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Desa
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah					
No	Transfer / Bagi Hasil Ke Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Bagi Hasil Pajak	19.830.786.284,00	10.966.870.605,00	55,30	6.706.632.157,00
2	Bagi Hasil Retribusi	3.600.250.325,00	1.726.272.357,00	47,95	1.787.735.538,00
3	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	389.431.890.200,00	361.215.422.110,00	92,75	354.959.129.176,00
	Jumlah Transfer	412.862.926.809,00	373.908.565.072,00	90,56	363.453.496.871,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1) Transfer/Bagi Hasil ke Desa - Bagi Hasil Pajak	19.830.786.284,00	10.966.870.605,00	6.706.632.157,00

Realisasi bagi hasil pajak tahun 2025 sebesar Rp10.966.870.605,00 merupakan pembayaran bagi hasil pajak tahun 2024 yang terutang sebesar Rp7.294.208.928,00 dan pembayaran bagi hasil pajak ke desa periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp3.672.661.677, dengan persentase sebesar 55,30%, rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 95. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Ke Desa Bagi Hasil Pajak
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	Transfer/Bagi Hasil	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Bagi Hasil Pajak:	19.830.786.284,00	10.966.870.605,00	55,30	6.706.632.157,00
	Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023	0,00	0,00	0,00	6.706.632.157,00
	Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024	0,00	7.294.208.928,00	0,00	0,00
	Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah periode 1 Januari s/d 30 Juni 2025	19.830.786.284,00	3.672.661.677,00	55,30	0,00
	Jumlah	19.830.786.284,00	10.966.870.605,00	55,30	6.706.632.157,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2) Transfer/Bagi Hasil Ke Desa - Bagi Hasil Retribusi	3.600.250.325,00	1.726.272.357,00	1.787.735.538,00

Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2025 sebesar Rp1.726.272.357,00 merupakan pembayaran bagi hasil retribusi tahun 2024 yang terutang sebesar Rp1.178.979.844,00 dan pembayaran bagi hasil retribusi periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar Rp547.292.513,00 dengan persentase sebesar 47,95%, rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 96. Perbandingan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Desa Bagi Hasil Retribusi
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Bagi Hasil Retribusi	3.600.250.325,00	1.726.272.357,00	47,95	1.787.735.538,00
	Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023	0,00	0,00	0,00	1.787.735.538,00
	Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2025	3.600.250.325,00	1.726.272.357,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.600.250.325,00	1.726.272.357,00	47,95	1.787.735.538,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3) Transfer/ Bagi Hasil Ke Desa-Bantuan Keuangan	389.431.890.200,00	361.215.422.110,00	354.959.129.176,00

Realisasi Transfer/Bagi Hasil Ke Desa Bantuan Kuangan pada Tahun 2025 sebesar Rp361.215.422.110,00 dengan persentase sebesar 92,75%. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp389.431.890.200,00, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 97. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan kepada Desa Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Bantuan Keuangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Dana Desa (DD)	219.002.212.000,00	191.486.714.934,00	87,44	221.147.868.000,00
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	125.091.999.200,00	125.091.799.200,00	100,00	118.632.000.000,00
3	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	45.337.679.000,00	44.636.907.976,00	98,45	15.179.261.176,00
	Jumlah	389.431.890.200,00	361.215.422.110,00	92,75	354.959.129.176,00

Tabel 98. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	JUMLAH
1	BKK untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 123 di Dusun Tugu - Dusun Mlaming Desa Burno Kecamatan Senduro Tahun Anggaran 2025.	1.137.564.000,00
2	BKK untuk desa lunas PBB-P2 Tahap I Tahun 2025 (Reward).	795.665.306,00
3	BKK untuk pemenuhan sarana dan prasarana kesenian bidang kebudayaan dan pendidikan masyarakat TA 2025.	81.300.000,00
4	BKK penyediaan infrastruktur air minum (DPKP)	315.000.000,00
5	BKK untuk desa lunas PBB -P2 Tahap I Tahun 2025 (Reward)	215.309.376,00
6	BKK untuk 32 desa di 18 kecamatan Tahun 2025 (DPU)	6.941.569.200,00
7	BKK Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025	745.000.000,00
8	BKK untuk 25 Desa di 13 Kecamatan Tahun 2025 (DPU)	7.300.000.000,00
9	BKK bidang penerangan jalan Tahap I untuk 8 Desa di 5 kecamatan Tahun 2025 (DISHUB)	800.000.000,00
10	BKK untuk Desa lunas PBB-P2 Tahap III Tahun 2025 (Reward)	90.292.702,00
11	BKK untuk 59 desa di 15 kecamatan Tahun 2025 (DPU)	7.052.000.000,00
12	BKK bidang sarana dan prasarana olah raga untuk 6 desa di 4 kecamatan Tahun 2025 (Dispora)	660.000.000,00
13	BKK bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahap II untuk 5 desa di 5 kecamatan Tahun 2025 (DPM)	570.000.000,00
14	BKK bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	1.430.000.000,00
15	BKK bidang kebudayaan dan pendidikan untuk 8 desa di 4 kecamatan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	325.115.000,00
16	BKK bidang Perhubungan untuk penerangan jalan Tahap II (DISHUB)	968.000.000,00

NO	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	JUMLAH
17	BKK untuk Desa Lunas PBB-P2 Tahun 2025	27.186.920,00
18	BKK bidang pembangunan untuk pagar makam umum di 2 desa 1 kecamatan	350.000.000,00
19	BKK bidang infrastruktur tahap IV untuk 38 desa di 17 kecamatan TA 2025	7.584.500.000,00
20	BKK bidang infrastruktur tahap V untuk 13 desa di 6 kecamatan TA 2025	1.500.130.800,00
21	BKK bidang Perhubungan untuk penerangan jalan Tahap III (DISHUB)	1.625.000.000,00
22	BKK bidang infrastruktur tahap VI untuk 1 desa di 1 kecamatan TA 2025 (DPU)	250.000.000,00
23	BKK bidang pariwisata untuk 4 desa di 2 kecamatan TA 2025 (Pariwisata)	280.000.000,00
24	BKK untuk karang taruna di 2 desa di 2 kecamatan Tahun 2025 (DINSOS)	35.000.000,00
25	BKK bidang Pembangunan untuk 5 desa di 5 kecamatan TA 2025 (DLH)	503.500.000,00
26	BKK bidang pemberdayaan masyarakat desa tahap III untuk 10 desa di 7 kecamatan	1.178.000.000,00
27	BKK bidang pemberdayaan masyarakat desa tahap IV untuk 11 desa di 7 kecamatan	664.000.000,00
28	BKK bidang pemberdayaan masyarakat desa tahap V untuk 27 desa di 14 kecamatan	884.774.672,00
29	BKK bidang pemberdayaan masyarakat desa tahap VI untuk 6 desa di 5 kecamatan	328.000.000,00
	Jumlah BKK	44.636.907.976,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit)	(244.634.877.397,03)	142.032.466.238,41	80.868.369.529,06

Surplus (defisit) merupakan selisih realisasi pendapatan dan transfer dikurangi realisasi belanja dan transfer, sebagai berikut:

Tabel 99. Surplus/Defisit Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pendapatan & Transfer	2.201.559.427.970,94	2.226.493.007.443,52	101,13	2.293.895.944.229,91
2	Belanja & Transfer	2.446.194.305.367,97	2.084.460.541.205,11	85,21	2.213.027.574.700,85
	Surplus (Defisit)	(244.634.877.397,03)	142.032.466.238,41	(58,06)	80.868.369.529,06

5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.634.877.397,03	259.639.867.397,03	243.549.592.036,97

Realisasi Penerimaan Pembiayaan, meliputi penggunaan SILPA, pencairan Dana Cadangan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, terinci sebagai berikut:

Tabel 100. Daftar Rincian Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Penggunaan SILPA	259.634.877.397,03	259.634.242.397,03	99,99	208.451.257.036,97
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	35.000.000.000,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	5.625.000,00	0,00	98.335.000,00
	Jumlah	259.634.877.397,03	259.639.867.397,03	100,00	243.549.592.036,97

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1) Penggunaan SILPA	259.634.877.397,03	259.634.242.397,03	208.451.257.036,97

Penggunaan SILPA Tahun 2025 sebesar Rp259.634.242.397,03 merupakan realisasi SILPA Tahun anggaran 2024 yang digunakan kembali di dalam APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan Realisasi penggunaan SILPA Tahun 2024 sebesar Rp208.451.257.036,97 merupakan realisasi SILPA Tahun anggaran 2023 yang digunakan di dalam APBD 2024.

Penggunaan anggaran SILPA sebesar Rp259.634.877.397,03 dan realisasi sebesar Rp259.634.242.397,03 terkoreksi sebesar Rp635.000,00 hal ini disebabkan adanya koreksi lebih catat saldo akhir 2024 karena Kesalahan Tranfer Bank Jatim Atas Pendapatan Puskesmas Pronojiwo tahun 2024 yang ditransfer ke rekening Puskesmas Tempursari.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2) Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	35.000.000.000,00

Tahun 2025 tidak dianggarkan pencairan dana cadangan.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat	0,00	5.625.000,00	98.335.000,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Tahun 2025 dan 2024 merupakan jumlah penerimaan kembali atas pemberian pinjaman kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tabel 101. Daftar Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	150.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.625.000,00	98.185.000,00
	Jumlah	5.625.000,00	98.335.000,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	64.783.084.169,00

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.000.000.000,00 yang digunakan untuk .

Tabel 102. Daftar Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No.	Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	64.283.084.169,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	64.783.084.169,00

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1) Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00

Pada Tahun 2025 Pembentukan Dana Cadangan dengan anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00 terealisasi 100% sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Dana Cadangan tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029 mendatang.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
2) Penyertaan Modal	0,00	0,00	500.000.000,00

Pada tahun 2025 tidak ada penyertaan modal pemerintah daerah.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	64.283.084.169,00

Pada tahun 2025 tidak ada Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank dari pemerintah daerah.

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
c) PEMBIAYAAN NETTO	244.634.877.397,03	244.639.867.397,03	178.766.507.867,97

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut:

Tabel 103. Pembiayaan Neto Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah					
No.	Keterangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Penerimaan Pembiayaan	259.634.877.397,03	259.639.867.397,03	100,00	243.549.592.036,97
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	64.783.084.169,00
	Pembiayaan Netto	244.634.877.397,03	244.639.867.397,03	100,00	178.766.507.867,97

	Anggaran TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2025 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
d) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03

SILPA sebesar Rp386.672.333.635,44 merupakan jumlah realisasi surplus/(defisit) Tahun 2025 sebesar Rp142.032.466.238,41 dan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp244.639.867.397,03, SILPA tersebut mencerminkan jumlah saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2025, terinci sebagai berikut:

Tabel 104. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Uraian	2025	2024
1	SILPA LRA	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03
2	Terdiri dari:		
3	Kas di kas daerah	291.749.912.862,52	190.671.849.474,49
4	Kas di bendahara penerimaan	1.660.000,00	1.090.953,00
5	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
6	Kas Lainnya (BOS)	265.852.691,46	231.092.611,46
7	Kas Lainnya (BOK)	804.043.907,00	1.771.550.871,00
8	Kas RSUD dr. Haryoto	37.423.339.888,54	20.917.507.299,64
9	Kas RSUD Pasirian	33.548.455.845,14	30.973.029.721,74
10	Kas Puskesmas Tempursari	304.452.314,14	408.821.353,36
11	Kas Puskesmas Pronojiwo	1.002.966.032,50	456.795.947,26
12	Kas Puskesmas Candipuro	847.807.124,29	439.378.778,05
13	Kas Puskesmas Penanggal	940.182.215,90	774.340.462,69
14	Kas Puskesmas Pasirian	1.746.482.347,75	1.074.328.468,98
15	Kas Puskesmas Bades	535.703.970,07	307.204.514,57
16	Kas Puskesmas Tempeh	743.308.540,82	624.182.516,75
17	Kas Puskesmas Gesang	790.410.447,27	415.668.016,16
18	Kas Puskesmas Rogotrunan	1.042.659.761,77	944.059.766,59
19	Kas Puskesmas Labruk Kidul	611.550.698,02	280.781.693,39
20	Kas Puskesmas Tekung	860.927.937,03	491.899.602,86
21	Kas Puskesmas Kunir	763.866.971,88	544.994.412,91
22	Kas Puskesmas Yosowilangun	1.072.027.614,49	978.996.070,57
23	Kas Puskesmas Summersari	981.757.566,05	734.589.870,84
24	Kas Puskesmas Jatiroto	1.186.777.116,25	726.456.356,98
25	Kas Puskesmas Randuagung	531.506.291,20	278.189.359,73
26	Kas Puskesmas Sukodono	752.520.175,44	426.158.998,59
27	Kas Puskesmas Padang	993.753.840,00	630.363.642,83
28	Kas Puskesmas Pasrujambe	897.371.366,91	472.314.877,62
29	Kas Puskesmas Senduro	773.927.332,50	572.314.295,03
30	Kas Puskesmas Gucialit	356.637.028,37	349.646.374,07

No	Uraian	2025	2024
31	Kas Puskesmas Kedungjajang	298.094.138,22	376.903.870,08
32	Kas Puskesmas Klakah	632.898.803,84	541.531.512,41
33	Kas Puskesmas Ranuyoso	833.640.752,52	648.446.612,84
34	Kas Puskesmas Tunjung	507.455.430,84	239.256.537,40
35	Kas Laboratorium Kesehatan	2.681.064.264,10	1.331.152.594,14
36	Rek Jasa giro dan Bunga Dana Cadangan	189.318.358,61	0,00
37	Pajak Pusat belum disetor ke Kas Negara	0,00	(20.041,00)
38	SILPA	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03

Dari SILPA tahun 2025 sebesar Rp386.672.333.635,44, sebesar Rp151.712.191.347,31 merupakan SILPA terikat yang harus dialokasikan kembali sesuai peruntukannya. Sisanya sebesar Rp234.960.142.288,13 merupakan SILPA tidak terikat yang dapat digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan di APBD Tahun Anggaran 2026. Dari SILPA tidak terikat sebesar Rp234.960.142.288,13 telah digunakan di dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp124.774.389.188,40 sisanya sebesar Rp110.185.753.099,73 dapat dialokasikan melalui Perubahan APBD Tahun 2026.

Tabel 105. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terikat dan Tidak Terikat Tahun 2025

Dalam Rupiah			
No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Jumlah SILPA LRA tahun 2025		386.672.333.635,44
2	SILPA Terikat:		
3	- Sisa DBHCHT tahun 2025	6.189.010.968,00	
4	- Sisa DAK Fisik tahun 2025	22.639.443,00	
5	- Sisa DAK Non Fisik 2025	8.145.094.150,00	
6	- Sisa BKK Propinsi tahun 2025	1.262.259.115,00	
7	- Penggajian PPPK sisa Th 2024	12.601.398,00	
8	- Sisa DAU Earmark (Kesehatan) 2025	7.726.577.193,00	
9	- Sisa DAU Earmark (Kesehatan) 2024	3.367.229.091,00	
10	- Sisa DAU Earmark (Pendidikan) 2025	15.229.654.038,00	
11	- Sisa DAU Earmark (Pendidikan) 2024	5.994.892.632,00	
12	- Sisa DAU Earmark (Infrastruktur) 2024	8.218.843,00	
13	- Sisa DAU Earmark (Kelurahan)	1.800.000,00	
14	- Sisa dana Insentif Fiskal	9.020.772.062,00	
15	- SILPA BLUD (RSUD, Puskesmas, Labkesda)	93.661.545.815,85	
16	- SILPA BOS	265.852.691,46	
17	- SILPA BOK	804.043.907,00	
18	Jumlah SILPA Terikat (3 s/d 17)		151.712.191.347,31
19	SILPA Tidak Terikat (1 – 18)		234.960.142.288,13
20	Penggunaan SILPA di APBD Tahun Anggaran 2026		124.774.389.188,40
21	Sisa SILPA Tidak Terikat (19 - 20)		110.185.753.099,73

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	259.634.877.397,03	208.451.257.036,97

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan saldo anggaran lebih akhir periode sebelumnya. Saldo anggaran lebih awal Tahun 2025 sebesar Rp259.634.877.397,03 merupakan saldo anggaran lebih akhir Tahun 2024. Masing-masing terdiri dari saldo kas sebagai berikut:

Tabel 106. Saldo Anggaran Lebih Awal

Dalam Rupiah			
No	Saldo Awal	2025	2024
1	Kas di BUD	190.671.849.474,49	110.038.907.873,19
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	998.782,00
3	Kas di bendahara penerimaan	1.090.953,00	188.552.250,00
4	Kas BLUD	66.959.313.528,08	94.948.954.767,13
5	Kas Lainnya (Dana BOS)	231.092.611,46	124.147.982,46
6	Kas Lainnya (Dana BOK)	1.771.550.871,00	1.521.162.203,00
7	Jasa giro dan Bunga Dana Cadangan	0,00	1.629.531.961,19
9	Pajak BOS Belum di Setor	0,00	(998.782,00)
10	Pajak Pusat belum disetor ke Kas Negara	(20.041,00)	0,00
	Jumlah saldo awal	259.634.877.397,03	208.451.257.036,97

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.2 PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	259.634.242.397,03	208.451.257.036,97

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Awal Sebagai Penerimaan Pembiayaan merupakan saldo anggaran lebih Tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD Tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp259.634.242.397,03 merupakan saldo anggaran lebih Tahun 2024 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD 2025.

Penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp208.451.257.036,97 merupakan saldo anggaran lebih Tahun 2023 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan di APBD 2024.

Tabel 107. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025	2024
1	Silpa periode sebelumnya (<i>audited</i>)	259.634.877.397,03	208.451.257.036,97
2	Koreksi Silpa periode sebelumnya	(635.000,00)	0,00
3	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan	259.634.242.397,03	208.451.257.036,97

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan (SILPA/SIKPA) merupakan jumlah surplus (defisit) LRA ditambah pembiayaan netto. SILPA tersebut mencerminkan jumlah saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Lumajang pada akhir periode, sebagai berikut:

Tabel 108. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	2025	2024
1	Surplus (defisit)	142.032.466.238,41	80.868.369.529,06
2	Pembiayaan netto	244.639.867.397,03	178.766.507.867,97
	SILPA/SIKPA (1+2)	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(635.000,00)	0,00

Tahun 2025 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp635.000), koreksi kesalahan ini terjadi karena pendapatan dicatat doble pada Puskesmas Tempursari dan Puskesmas Pronojiwo pada tahun 2024 sehingga perlu dilakukan pembetulan di tahun 2025. Sedangkan tahun 2024 tidak ada koreksi kesalahan pembukuann tahun sebelumnya.

b

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.2.5 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), sebagai berikut:

Tabel 109. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Uraian	2025	2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	259.634.877.397,03	208.451.257.036,97
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	259.634.242.397,03	208.451.257.036,97
3	Subtotal (1-2)	635.000,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03
5	Subtotal (3+4)	386.672.968.635,44	259.634.877.397,03
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(635.000,00)	0,00
7	Lain - lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03

Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari saldo kas sebagai berikut:

Tabel 110. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Uraian	2025	2024
1	Surplus (defisit)	142.032.466.238,41	80.868.369.529,06
2	Pembiayaan neto	244.639.867.397,03	178.766.507.867,97
3	Silpa/Sikpa (1+2)	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03
4	Rincian Silpa/Sikpa:		
5	Kas di kas daerah	291.749.912.862,52	190.671.849.474,49
6	Kas di bendahara penerimaan	1.660.000,00	1.090.953,00
7	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
8	Kas di BLUD	93.661.545.815,85	66.959.313.528,08
9	Kas Lainnya (Dana BOS)	265.852.691,46	231.092.611,46
10	Kas Lainnya (BOK)	804.043.907,00	1.771.550.871,00
12	Jasa Giro dan Bunga Dana Cadangan	189.318.358,61	0,00
13	Jumlah Silpa	386.672.333.635,44	259.634.897.438,03
14	Selisih	0,00	(20.041,00)
15	Utang Pajak (PPN dan PPh 22)	0,00	20.041,00
16	Saldo Anggaran Lebih Akhir (13 - 15)	386.672.333.635,44	259.634.877.397,03

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.3.1 ASET

a. ASET LANCAR

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Saldo masing-masing aset lancar dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 111. Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah		
Keterangan	2025	2024
Kas dan setara kas	386.483.015.276,83	259.634.897.438,03
Piutang	98.975.256.229,26	77.969.347.396,26
Belanja di bayar di muka	416.266.666,67	0.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(23.073.707.247,15)	(19.574.654.478,48)
Persediaan	74.100.366.010,74	61.798.763.925,46
Jumlah	536.901.196.936,35	379.828.354.281,27

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Kas dan Setara Kas	386.483.015.276,83	259.634.897.438,03

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 dan 2024 terinci sebagaimana berikut ini.

Tabel 112. Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah			
No	Jenis Kas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Kas Daerah	291.749.912.862,52	190.671.849.474,49
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.660.000,00	1.090.953,00
3	Kas di BLUD	93.661.545.815,85	66.959.313.528,08
4	Kas Dana BOS	265.852.691,46	0,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	804.043.907,00	0,00
6	Kas Lainnya	0,00	2.002.643.482,46
	Jumlah	386.483.015.276,83	259.634.897.438,03

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Kas di Kas Daerah	291.749.912.862,52	190.671.849.474,49

Kas di Kas Daerah adalah kas milik pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD), meliputi rekening giro sebagaimana tersaji di dalam tabel berikut.

Tabel 113. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah					
No	Nama Bank	Jenis Rekening	Nomor Rekening	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Bank Jatim Cab. Lumajang	Giro	91026881	291.749.912.862,52	190.671.849.474,49
2	Bank Jatim Cab. Lumajang	Giro	91000755	0,00	0,00
3	Bank Jatim Cab. Lumajang	Giro	91026899	0,00	0,00
	Jumlah			291.749.912.862,52	190.671.849.474,49

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b) Kas di Bendahara Penerimaan	1.660.000,00	1.090.953,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih ada di dalam rekening bank Bendahara Penerimaan maupun di brankas yang sampai dengan tanggal neraca belum disetorkan ke kas daerah. Kas di bendahara penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan atas penerimaan pendapatan atau penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga periode pelaporan.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.660.000,00 dan Rp1.090.953,00.

Tabel 114. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
NO	URAIAN	2025	2024
1	Kas Tunai di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	1.660.000,00	1.072.000,00
2	Kas Bank di Bendahara Penerimaan Badan Pajak dan Retribusi	0,00	18.953,00
	JUMLAH	1.660.000,00	1.090.953,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
c) Kas di BLUD	93.661.545.815,85	66.959.313.528,08

Kas di BLUD adalah kas milik pemerintah daerah yang dikelola, dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja di bawah OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Menurut ketentuan perundang-undangan, BLUD dapat menggunakan langsung pendapatannya. Dengan demikian saldo kas di bendahara BLUD pada akhir periode meliputi saldo kas tunai, rekening giro dan deposito di bank yang berasal dari sisa pendapatan yang dikelola sendiri. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, OPD/Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai BLUD antara lain RSUD dr. Haryoto, RSUD Pasirian dan 25 Puskesmas di Kabupaten Lumajang.

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing tercatat sebesar Rp93.661.545.815,85 dan Rp66.959.313.528,08. Saldo kas di BLUD terinci sebagai berikut:

Tabel 115. Rincian Saldo Kas Bendahara BLUD Tahun 2025

Dalam Rupiah			
NO REKENING	NAMA REKENING	31 Des 2025	31 Des 2024
Kas BLUD RSUD Haryoto		37.423.339.888,54	20.917.507.299,64
0091031752	Bendahara Umum BLUD RSD Haryoto	37.423.339.888,54	20.917.507.299,64
Kas BLUD RSUD Pasirian		33.548.455.845,14	30.973.029.721,74
0431011051	Bendahara Umum BLUD RSD Pasirian	33.548.455.845,14	30.973.029.721,74
Kas BLUD Puskesmas		22.687.915.082,17	15.068.776.506,70
0431092280	Rek Kas BLUD Puskesmas Tempursari	304.452.314,14	408.821.353,36
0431092301	Rek Kas BLUD Puskesmas Pronojiwo	1.002.966.032,50	456.795.947,26
0431092328	Rek Kas BLUD Puskesmas Candipuro	847.807.124,29	439.378.778,05
0431092344	Rek Kas BLUD Puskesmas Penanggal	940.182.215,90	774.340.462,69
0431092361	Rek Kas BLUD Puskesmas Pasirian	1.746.482.347,75	1.074.328.468,98
0431092387	Rek Kas BLUD Puskesmas Bades	535.703.970,07	307.204.514,57
0431092409	Rek Kas BLUD Puskesmas Tempeh	743.308.540,82	624.182.516,75
0431092425	Rek Kas BLUD Puskesmas Gesang	790.410.447,27	415.668.016,16
0091303396	Rek Kas BLUD Puskesmas Rogotrunan	1.042.659.761,77	944.059.766,59
0091303418	Rek Kas BLUD Puskesmas Labruk Kidul	611.550.698,02	280.781.693,39
0091303434	Rek Kas BLUD Puskesmas Tekung	860.927.937,03	491.899.602,86
0091303451	Rek Kas BLUD Puskesmas Kunir	763.866.971,88	544.994.412,91
0091303477	Rek Kas BLUD Puskesmas Yosowilangun	1.072.027.614,49	978.996.070,57
0091303493	Rek Kas BLUD Puskesmas Sumbersari	981.757.566,05	734.589.870,84
1061000051	Rek Kas BLUD Puskesmas Jatiroto	1.186.777.116,25	726.456.356,98
1061000069	Rek Kas BLUD Puskesmas Randuagung	531.506.291,20	278.189.359,73
1061000077	Rek Kas BLUD Puskesmas Sukodono	752.520.175,44	426.158.998,59
1061000085	Rek Kas BLUD Puskesmas Padang	993.753.840,00	630.363.642,83
0091303515	Rek Kas BLUD Puskesmas Pasrujambe	897.371.366,91	472.314.877,62
0091303574	Rek Kas BLUD Puskesmas Senduro	773.927.332,50	572.314.295,03
1061000093	Rek Kas BLUD Puskesmas Gucialit	356.637.028,37	349.646.374,07
1061000107	Rek Kas BLUD Puskesmas Kedungjajang	298.094.138,22	376.903.870,08

NO REKENING	NAMA REKENING	31 Des 2025	31 Des 2024
1061000115	Rek Kas BLUD Puskesmas Klakah	632.898.803,84	541.531.512,41
1061000123	Rek Kas BLUD Puskesmas Ranuyoso	833.640.752,52	648.446.612,84
0091303558	Rek Kas BLUD Puskesmas Tunjung	507.455.430,84	239.256.537,40
0091313421	Rek Kas BLUD UPT LABKES	2.681.064.264,10	1.331.152.594,14
	TOTAL KAS BLUD	93.661.545.815,85	66.959.313.528,08

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
d) Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	265.852.691,46	0,00

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pada tahun 2024 sisa kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masuk ke dalam akun Kas Lainnya sebesar Rp231.092.611,46, dan pada tahun 2025 sisa dana di reklasifikasi ke akun Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebesar Rp265.852.691,46

Tabel 116. Perbandingan Rincian Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
1	2	3	4
1	SD NEGERI GESANG 01	0,00	0,00
2	SD NEGERI BANYUPUTIH KIDUL 02	0,00	0,00
3	SD NEGERI TAMANAYU 03	27.800,00	0,00
4	SD NEGERI SUMBERSARI 04	493.300,00	145.600,00
5	SD NEGERI JATIGONO 01	42.000,00	0,00
6	SD NEGERI SUMBERMUJUR 05	0,00	0,00
7	SD NEGERI KANDANGAN 01	0,00	0,00
8	SD NEGERI PRONOJIWO 01	160.000,00	0,00
9	SD NEGERI JATIGONO 02	0,00	0,00
10	SD NEGERI SEMEMU 01	150.322,00	419.050,00
11	SDN CANDIPURO 03	68.300,00	0,00
12	SD NEGERI KERTOSARI 03	15.000,00	0,00
13	SD NEGERI PENANGGAL 03	0,00	0,00
14	SD NEGERI SUMBERSARI 01	129.000,00	0,00
15	SD NEGERI LEMPENI 03	100.000,00	114.000,00
16	SD NEGERI KALIWUNGU 03	70.854,00	89.700,00
17	SD NEGERI PENANGGAL 04	900,00	0,00
18	SD NEGERI BANDARAN	248.500,00	0,00
19	SD NEGERI SELOKBESUKI 01	677.650,00	990.900,00
20	SD NEGERI KALIBOTO LOR 09	0,00	0,00
21	SD NEGERI BORENG 02	0,00	0,00
22	SD NEGERI WONOGRIYO 01	0,00	0,00
23	SDN JAMBEKUMBU 04	0,00	2.700,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
24	SD NEGERI BADES 06	0,00	0,00
25	SD NEGERI BODANG 01	44.000,00	0,00
26	SD NEGERI KARANGBENDO 03	0,00	0,00
27	SD NEGERI SIDOREJO 02	28.000,00	0,00
28	SD NEGERI DADAPAN 02	0,00	0,00
29	SD NEGERI MOJO 02	97.100,00	0,00
30	SD NEGERI SUPITURANG 03	0,00	0,00
31	SD NEGERI KRASAK 02	0,00	0,00
32	SDN KARANGANOM 01	0,00	0,00
33	SD NEGERI TEMPURSARI 05	0,00	0,00
34	SD NEGERI KLAKAH 04	0,00	0,00
35	SD NEGERI SALAK 02	0,00	100.000,00
36	SD NEGERI TUKUM 02	37.950,00	0,00
37	SD NEGERI URANGGANTUNG 02	161.926,00	5.234.500,00
38	SD NEGERI CITRODIWANGSAN 04	174.500,00	50.100,00
39	SD NEGERI KALIDILEM 02	114.000,00	0,00
40	SD NEGERI TEGALRANDU 01	16.000,00	0,00
41	SD NEGERI NGUTER 03	64.200,00	0,00
42	SD NEGERI TEMPUREJO 02	32.250,00	0,00
43	SD NEGERI KALISEMUT 03	691.000,00	0,00
44	SD NEGERI KEBONSARI 02	100.200,00	0,00
45	SD NEGERI PURWOREJO 01	0,00	0,00
46	SD NEGERI JARIT 02	298.300,00	125.600,00
47	SD NEGERI SAWARAN KULON 03	0,00	0,00
48	SDN PASRUJAMBE 05	0,00	0,00
49	SD NEGERI KLAKAH 01	256.929,00	0,00
50	SD NEGERI TEMPURSARI 01	1.750,00	0,00
51	SDN YOSOWILANGUN KIDUL 02	0,00	0,00
52	SDN KEDUNGJAJANG 01	201.600,00	0,00
53	SD NEGERI LEDOKTEMPURO	146.500,00	1.000,00
54	SD NEGERI JERUK 03	0,00	0,00
55	SD NEGERI WONOKERTO 02	0,00	0,00
56	SD NEGERI KALIDILEM 01	0,00	0,00
57	SD NEGERI KALIPEPE 03	600.000,00	0,00
58	SD NEGERI SUMBERMUJUR 02	0,00	0,00
59	SD NEGERI SUMBERMUJUR 01	0,00	0,00
60	SD NEGERI KANDANGTEPUS 03	152.628,90	126.999,90
61	SD NEGERI JERUK 01	0,00	0,00
62	SD NEGERI WONOAYU 02	253.000,00	842.800,00
63	SD NEGERI TEMPUREJO 01	5.000,00	0,00
64	SD NEGERI ROWOKANGKUNG 04	0,00	0,00
65	SD NEGERI KERTOSARI 01	0,00	6.400,00
66	SDN WONOKERTO 02 GUCIALIT	12.100,00	0,00
67	SD NEGERI SELOKGONDANG 02	222.450,00	361.200,00
68	SD NEGERI LABRUK KIDUL	186.300,00	0,00
69	SD NEGERI PASIRIAN 06	0,00	0,00
70	SD NEGERI BLUKON	0,00	0,00
71	SD NEGERI PASRUJAMBE 01	376.300,00	0,00
72	SD NEGERI JARIT 03	48.000,00	0,00
73	SD NEGERI RANDUAGUNG 01	230.100,00	65.916,00
74	SD NEGERI BABAKAN 01	24.020,00	2.272.000,00
75	SD NEGERI WOTGALIH 03	0,00	0,00
76	SD NEGERI KALIULING 04	0,00	0,00
77	SD NEGERI MOJOSARI 01	740.500,00	8.700,00
78	SD NEGERI KERTOWONO 03	0,00	0,00
79	SD NEGERI KUNIR KIDUL 02	1.401.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
80	SD NEGERI BENICE 02	1.100.000,00	0,00
81	SD NEGERI BURNO 03	84.600,00	13.800,00
82	SD NEGERI TANGGUNG 01	0,00	0,00
83	SD NEGERI PANDANSARI 01	320.400,00	0,00
84	SD NEGERI RANULOGONG 01	0,00	0,00
85	SD NEGERI JENGGRONG 01	500,00	192.000,00
86	SD NEGERI KANDANGAN 02	300,00	0,00
87	SD NEGERI KLAKAH 03	0,00	0,00
88	SDN SUMBEREJO 01	9.000,00	0,00
89	SDN PASRUJAMBE 02	0,00	0,00
90	SD NEGERI BODANG 03	256.164,00	0,00
91	SD NEGERI ARGOSARI 03	0,00	0,00
92	SD NEGERI RANUYOSO 02	232.600,00	543.900,00
93	SD NEGERI SUPITURANG 04	47,00	0,00
94	SD NEGERI KALI PEPE 02	133.100,00	0,00
95	SD NEGERI WONOAYU 01	332.325,00	749.100,00
96	SD NEGERI SIDOMULYO 04	0,00	600,00
97	SD NEGERI KEBONAGUNG 01	0,00	0,00
98	SD NEGERI KALISEMUT 01	150.000,00	0,00
99	SD NEGERI RANUYOSO 03	0,00	0,00
100	SD NEGERI TEMPEH KIDUL 01	0,00	24.000,00
101	SD NEGERI SUKOSARI 01	932.888,00	167.422,00
102	SD NEGERI DUREN 01	246.800,00	0,00
103	SD NEGERI SUMBERURIP 01	0,00	0,00
104	SD NEGERI GUCIALIT 01	0,00	0,00
105	SD NEGERI SUMBEREJO 04	34.017,00	0,00
106	SD NEGERI RANUYOSO 01	527.940,00	126.950,00
107	SD NEGERI TEGALREJO 01	484.700,00	0,00
108	SD NEGERI KALIBOTO KIDUL 01	13.300,00	0,00
109	SD NEGERI KALIDILEM 04	0,00	0,00
110	SD NEGERI DAWUHAN LOR 02	36.000,00	84.000,00
111	SD NEGERI TOMPOKERSAN 01	49.950,00	0,00
112	SD NEGERI SUMBERPETUNG 02	205.000,00	222.000,00
113	SD NEGERI MADUREJO 02	0,00	25.000,00
114	SD NEGERI RANUPAKIS 02	0,00	0,00
115	SD NEGERI TUNJUNG 03	0,00	0,00
116	SD NEGERI TEMPEH TENGAH 02	50.000,00	147.000,00
117	SD NEGERI DAWUHAN LOR 03	744.307,00	997.439,00
118	SD NEGERI BAGO 03	0,00	0,00
119	SD NEGERI TUNJUNG 02	0,00	0,00
120	SD NEGERI ROJOPOLO 03	0,00	9.400,00
121	SD NEGERI PULO 01	275.260,00	12.000,00
122	SD NEGERI BADES 02	312.000,00	0,00
123	SD NEGERI PANDANWANGI 01	150.000,00	128.400,00
124	SDN GONDOROSO 02	0,00	0,00
125	SD NEGERI MENINJO	3.000,00	6.000,00
126	SD NEGERI PENAWUNGAN 02	0,00	0,00
127	SD NEGERI MLAWANG 01	159.000,00	1.554.000,00
128	SD NEGERI SUMBERWULUH 05	83.000,00	0,00
129	SD NEGERI JOKARTO 04	0,00	0,00
130	SDN GONDORUSO 01	0,00	121.202,00
131	SD NEGERI SUMBERMUJUR 03	0,00	0,00
132	SD NEGERI KEDAWUNG 03	295.750,00	0,00
133	SD NEGERI DAWUHAN LOR 01	1.147.878,00	442.500,00
134	SD NEGERI BODANG 02	239.500,00	0,00
135	SD NEGERI KALIBOTO LOR 05	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
136	SD NEGERI BEDAYUTALANG	400,00	60.600,00
137	SD NEGERI PENAWUNGAN 01	190.250,00	675,00
138	SD NEGERI KALIULING 02	0,00	0,00
139	SD NEGERI YOSOWILANGUN LOR 04	784.800,00	89.000,00
140	SDN TAMBAHREJO 01	79.140,00	0,00
141	SDN PENANGGAL 01	90.000,00	0,00
142	SD NEGERI KALIULING 03	0,00	0,00
143	SD Negeri Darungan 01	610.700,00	2.719.900,00
144	SD NEGERI PENANGGAL 02	9.200,00	0,00
145	SD NEGERI YOSOWILANGUN LOR 03	112.700,00	0,00
146	SD NEGERI YOSOWILANGUN KIDUL 4	0,00	0,00
147	SD NEGERI SUPITURANG 01	86.900,00	0,00
148	SD NEGERI PUOREJO 03	0,00	0,00
149	SD NEGERI TEMPURSARI 02	350.000,00	0,00
150	SD NEGERI KLOPOSOWIT 03	0,00	173.100,00
151	SD NEGERI BESUK 01	0,00	0,00
152	SDN TUNJUNG 01	994.400,00	0,00
153	SD NEGERI ROJOPOLO 02	0,00	0,00
154	SD NEGERI SUMBEREJO 02	100.000,00	72.000,00
155	SD NEGERI KEDUNG MORO 01	0,62	0,62
156	SD NEGERI RANUBEDALI 03	1.500,00	0,00
157	SD NEGERI KEDUNG MORO 02	208.400,00	142.972,00
158	SD NEGERI PAKEL 01	0,00	0,00
159	SD NEGERI GEDANGMAS 03	0,00	0,00
160	SD NEGERI KUTORENON 03	487.200,00	650.000,00
161	SD NEGERI KERTOWONO 06	0,00	0,00
162	SD NEGERI KALIBOTO LOR 12	0,00	0,00
163	SD NEGERI DOROGOWOK 01	111.900,00	300.000,00
164	SD NEGERI KARANGSARI 03	149.000,00	1.350.000,00
165	SD NEGERI PANDANWANGI 04	0,00	0,00
166	SD NEGERI KENONGO	0,00	0,00
167	SD NEGERI ROWOKANGKUNG 02	300.000,00	0,00
168	SDN BADES 05	0,00	0,00
169	SD NEGERI KARANGBENDO 01	114.000,00	0,00
170	SD NEGERI UMBUL 01	0,00	0,00
171	SD NEGERI TUNJUNG 01	0,00	0,00
172	SD NEGERI TEMPURSARI 02	0,00	0,00
173	SD NEGERI MLAWANG 02	0,00	0,00
174	SDN SUMBERWULUH 01	0,00	0,00
175	SD NEGERI TEGALREJO 02	419.788,00	0,00
176	SD NEGERI KUTORENON 02	1.030.900,00	405.000,00
177	SD NEGERI JAMBEARUM	154.800,00	721.800,00
178	SD NEGERI PURWOREJO 02	160.350,00	170.000,00
179	SD NEGERI BUWEK	0,00	0,00
180	SD NEGERI JOKARTO 01	0,00	0,00
181	SD NEGERI TAMBAHREJO 03	193.750,00	293.100,00
182	SD NEGERI ROWOKANGKUNG 01	0,00	0,00
183	SD NEGERI SUMBEREJO 03	9.600,00	200.000,00
184	SD NEGERI DAWUHAN WETAN 02	450.000,00	252.000,00
185	SD NEGERI JARIT 01	246.000,00	50.000,00
186	SD NEGERI WONOGRIYO 02	104.000,00	0,00
187	SD NEGERI CANDIPURO 01	86.600,00	4.500,00
188	SD NEGERI RANUPAKIS 01	0,00	0,00
189	SD NEGERI PURWOSONO	726.100,00	0,00
190	SD NEGERI SARIKEMUNING 02	155.200,00	0,00
191	SD NEGERI KEBONSARI 01	77.700,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
192	SD NEGERI KUNIR LOR 01	3.000,00	0,00
193	SD NEGERI MUNDER 02	673.400,00	0,00
194	SD NEGERI GUCIALIT 03	0,00	0,00
195	SD NEGERI KALIBENDO 01	306.000,00	145.600,00
196	SD NEGERI BANYUPUTIH LOR 01	278.400,00	0,00
197	SD NEGERI TEGALCIUT 02	100.000,00	0,00
198	SD NEGERI ALUN-ALUN 01	0,00	0,00
199	SD NEGERI NGUTER 05	0,00	1.323.700,00
200	SD NEGERI JUGOSARI 01	0,00	0,00
201	SD NEGERI BANYUPUTIH LOR 02	0,00	0,00
202	SDN JAMBEKUMBU 03	0,00	16.000,00
203	SD NEGERI BADES 01	0,00	0,00
204	SD NEGERI PAPRINGAN 01	0,00	0,00
205	SD NEGERI GUCIALIT 04	0,00	0,00
206	SD NEGERI KALIBOTO LOR 08	0,00	0,00
207	SD NEGERI KLOPOSOWIT 02	174.650,00	0,00
208	SD NEGERI RANDUAGUNG 03	51.500,00	325.000,00
209	SD NEGERI KARANGLO 02	21.550,00	94.700,00
210	SD NEGERI KABUARAN	26.000,00	1.437.000,00
211	SD NEGERI TUMPENG 01	0,00	0,00
212	SD NEGERI KRASAK 01	0,00	0,00
213	SD NEGERI MOJO 03	0,00	300.000,00
214	SD NEGERI DAWUHAN WETAN 01	215.200,00	0,00
215	SD NEGERI DARUNGAN 02	379.500,00	0,00
216	SD NEGERI BESUK 03	196.000,00	0,00
217	SD NEGERI ROJOPOLO 06	0,00	0,00
218	SD NEGERI NGUTER 02	388.300,00	0,00
219	SD NEGERI KARANGREJO 01	188.050,00	8.000,00
220	SD NEGERI KALIBOTO LOR 02	0,00	0,00
221	SD NEGERI KEDUNGREJO 01	0,00	0,00
222	SD NEGERI BODANG 05	0,00	0,00
223	SDN PASRUJAMBE 09	2.064.000,00	0,00
224	SD NEGERI KANDANGTEPUS 02	2.181.150,00	0,00
225	SD NEGERI PANDANSARI 03	53.400,00	1.578.900,00
226	SD NEGERI SUKOSARI 02	682.170,00	0,00
227	SD NEGERI KARANGBENDO 05	0,00	200,00
228	SD NEGERI KALIBOTO KIDUL 04	1.800,00	0,00
229	SD NEGERI WATES WETAN 01	163.400,00	0,00
230	SD NEGERI SUMBERWRINGIN 01	462.000,00	0,00
231	SD NEGERI TEGALCIUT 01	30.000,00	0,00
232	SDN YOSOWILANGUN KIDUL 01	563.800,00	0,00
233	SD NEGERI PRONOJIWO 03	57,00	0,00
234	SD NEGERI PAPRINGAN 02	0,00	0,00
235	SD NEGERI MERAKAN 01	440.400,00	0,00
236	SD NEGERI YOSOWILANGUN LOR 05	16.688,00	0,00
237	SD NEGERI WONOCEPOKOAYU 02	46.350,00	0,00
238	SD NEGERI TEMPURSARI 03	0,00	0,00
239	SD NEGERI JOGOYUDAN 02	100,00	0,00
240	SD NEGERI TANGGUNG 02	2.404.000,00	200.000,00
241	SD NEGERI GEDANGMAS 02	0,00	24.900,00
242	SD NEGERI SUMBERWRINGIN 03	13.500,00	0,00
243	SD NEGERI SIDOMULYO 02	310.500,00	40.000,00
244	SD NEGERI KEDUNGREJO 02	16.000,00	0,00
245	SD NEGERI WOTGALIH 02	169.059,00	0,00
246	SD NEGERI UMBUL 02	0,00	0,00
247	SD NEGERI PULO 04	135.398,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
248	SD NEGERI KEPUHARJO 01	18.000,00	0,00
249	SD NEGERI NGUTER 04	18.000,00	0,00
250	SD NEGERI MUNDER 03	326.284,00	26.100,00
251	SD NEGERI KEBONAN 1	0,00	0,00
252	SDN BORENG 01	40.700,00	0,00
253	SD NEGERI KEBONAN 2	6.000,00	0,00
254	SD NEGERI SUMBEREJO 01	342.844,00	598.200,00
255	SD NEGERI GESANG 02	0,00	0,00
256	SD NEGERI PEJARAKAN 02	0,00	0,00
257	SD NEGERI SUMBERSARI 03	0,00	100.099,00
258	SD NEGERI WATES WETAN 02	116.900,00	0,00
259	SD NEGERI ORO-ORO OMBO 04	98.800,00	0,00
260	SDN ORO-ORO OMBO 02	656.352,00	0,00
261	SD NEGERI KALIWUNGU 01	357.234,00	2.476.600,00
262	SD NEGERI KALIBOTO LOR 07	0,00	0,00
263	SD NEGERI URANGGANTUNG 01	9.400,00	0,00
264	SD NEGERI TEMPEH TENGAH 04	25.750,00	207.350,00
265	SD NEGERI KUNIR KIDUL 01	31.548,00	0,00
266	SD NEGERI KUDUS 01	0,00	0,00
267	SD NEGERI DOROGOWOK 03	0,00	0,00
268	SD NEGERI KRAI 03	60.762,00	0,00
269	SD NEGERI WONOKERTO 03 GUCIALIT	167.279,00	0,00
270	SD NEGERI PRONOJIWO 04	11.300,00	0,00
271	SD NEGERI SUPITURANG 02	377.050,00	0,00
272	SD NEGERI SAWARAN LOR 01	13.153,00	1.042.100,00
273	SD NEGERI SUMBERWRINGIN 02	0,00	0,00
274	SD NEGERI WOTGALIH 01	0,00	0,00
275	SDN PAGOWAN 02	1.300.000,00	0,00
276	SD NEGERI GROBOGAN 03	0,00	0,00
277	SD NEGERI KLANTING 02	3.146.016,00	300.000,00
278	SD NEGERI SIDOMULYO 01	135.400,00	0,00
279	SD NEGERI SENDURO 03	456.000,00	384.900,00
280	SD NEGERI KUNIR KIDUL 04	35.000,00	0,00
281	SDN KALIPENGGUNG 04	0,00	0,00
282	SD NEGERI BADES 03	0,00	0,00
283	SD NEGERI SAWARAN LOR 02	0,00	0,00
284	SD NEGERI KRAI 04	0,00	900,00
285	SD NEGERI ROGOTRUNAN 01	0,00	0,00
286	SD NEGERI ROJOPOLO 05	0,00	0,00
287	SD NEGERI BARAT 01	181.000,00	0,00
288	SD NEGERI CURAHPETUNG 01	0,00	0,00
289	SD NEGERI KLAMPOKARUM	209.800,00	0,00
290	SD NEGERI SIDOMULYO 03	45.600,00	0,00
291	SDN JENGGRONG 04	0,00	0,00
292	SD NEGERI JOKARTO 02	0,00	0,00
293	SD NEGERI PANDANARUM 01	0,00	0,00
294	SD NEGERI KARANGANOM 02	400,00	0,00
295	SDN WONOKERTO 01 GUCIALIT	36.780,00	0,00
296	SD NEGERI KARANGREJO 02	32.832,00	40.200,00
297	SD NEGERI PUOREJO 01	163.200,00	0,00
298	SD NEGERI NOGOSARI 01	482.438,00	673.428,00
299	SD NEGERI SELOK AWAR AWAR 05	1.697.900,00	0,00
300	SD NEGERI SIDOREJO 01	96.000,00	0,00
301	SDN KERTOSARI 02	0,00	0,00
302	SD NEGERI SRUNI 02	127.800,00	0,00
303	SD NEGERI SUMBERJATI 02	600.000,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
304	SD NEGERI BURNO 01	81.250,00	3.000,00
305	SD NEGERI KARANGLO 01	0,00	0,00
306	SD NEGERI KUDUS 02	263.831,00	0,00
307	SD NEGERI JUGOSARI 02	160.000,00	0,00
308	SDN CONDRO 02	0,00	0,00
309	SD NEGERI JATISARI 01	0,00	0,00
310	SD NEGERI KANDANGAN 03	400,00	0,00
311	SD NEGERI BADES 04	642.400,00	100.200,00
312	SD NEGERI SUMBERWULUH 04	0,00	0,00
313	SD NEGERI KARANGBENDO 04	322.400,00	0,00
314	SD NEGERI KALIBOTO LOR 16	381.400,00	0,00
315	SD NEGERI ROJOPOLO 04	0,00	0,00
316	SD NEGERI SUMBERSUKO	169.300,00	0,00
317	SD NEGERI TAMANAYU 02	0,00	0,00
318	SD NEGERI TEMPEH LOR 01	1.711.000,00	566.048,00
319	SD NEGERI RANUWURUNG 02	500,00	0,00
320	SD NEGERI ORO-ORO OMBO 01	122.590,00	0,00
321	SD NEGERI CANDIPURO 02	900.000,00	0,00
322	SD NEGERI CURAHPETUNG 02	0,00	34.000,00
323	SD NEGERI JENGGRONG 02	11.000,00	0,00
324	SD NEGERI WONOSARI 01	0,00	0,00
325	SD NEGERI SUMBERJATI 01	0,00	0,00
326	SDN BANYUPUTIH KIDUL 01	300.000,00	0,00
327	SD NEGERI MADUREJO 01	230.050,00	0,00
328	SD NEGERI KERTOWONO 01	0,00	119.000,00
329	SD NEGERI KUNIR LOR 03	0,00	0,00
330	SDN ROWOKANGKUNG 05	1.734.000,00	0,00
331	SD NEGERI BURNO 02	70.050,00	0,00
332	SD NEGERI KALIPENGGUNG 03	0,00	0,00
333	SD NEGERI GROBOGAN 02	0,00	0,00
334	SD NEGERI KARANG ANYAR 01	29.500,00	0,00
335	SDN PASRUJAMBE 06	0,00	0,00
336	SD NEGERI JOGOTRUNAN	7.718.720,00	349.594,00
337	SD NEGERI ALUN-ALUN 03	30.000,00	0,00
338	SD NEGERI JOGOYUDAN 01	0,00	0,00
339	SD NEGERI MOJOSARI 02	340.500,00	19.200,00
340	SD NEGERI SUMBERSARI 02	42.000,00	0,00
341	SD NEGERI JERUK 02	0,00	0,00
342	SD NEGERI KALIBOTO LOR 10	0,00	0,00
343	SD NEGERI TUNJUNGREJO 02	0,00	0,00
344	SD NEGERI MERAKAN 02	236.000,00	120.300,00
345	SD NEGERI RANUPANI	100.000,00	0,00
346	SD NEGERI SALAK 01	0,00	0,00
347	SD NEGERI SEMEMU 02	33.000,00	0,00
348	SD NEGERI TUMPENG 02	0,00	0,00
349	SD NEGERI PUNDUNGSARI 01	50.000,00	0,00
350	SD NEGERI SUMBERWULUH 03	0,00	0,00
351	SD NEGERI WATES KULON 02	231.500,00	162.000,00
352	SD NEGERI KALIBOTO LOR 01	0,00	0,00
353	SD NEGERI DADAPAN 04	0,00	0,00
354	SDN JATISARI 02 TEMPEH	369.287,78	(0,22)
355	SD NEGERI KANDANGTEPUS 01	43.000,00	200.200,00
356	SD NEGERI KANDANGTEPUS 05	51.000,00	126.500,00
357	SD NEGERI JATISARI 01	0,00	0,00
358	SD NEGERI RANULOGONG 03	0,00	0,00
359	SD NEGERI KALIDILEM 03	2.000,00	10.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
360	SD NEGERI TAMANAYU 01	58.100,00	0,00
361	SD NEGERI TEMPEH KIDUL 02	17.600,00	7.200,00
362	SD NEGERI KEPUHARJO 02	298.900,00	0,00
363	SD NEGERI KEDAWUNG 01	400.000,00	0,00
364	SD NEGERI KUTORENON 01	2.718.060,00	177.498,00
365	SD NEGERI TEMPEH LOR 02	44.000,00	500.000,00
366	SD NEGERI PEJARAKAN 01	10.000,00	0,00
367	SD NEGERI MANGUNSARI	64.000,00	0,00
368	SD NEGERI ORO-ORO OMBO 05	607.740,00	0,00
369	SD NEGERI KALIWUNGU 02	340.000,00	126.600,00
370	SD NEGERI PAGOWAN 01	1.500.000,00	0,00
371	SD NEGERI BABAKAN 02	0,00	0,00
372	SD NEGERI ROJOPOL 01	9.817,00	0,00
373	SD NEGERI KALIBOTO LOR 11	0,00	0,00
374	SD NEGERI TUNJUNGREJO 03	0,00	0,00
375	SD NEGERI WONOCEPOKOAYU 01	50.000,00	396.300,00
376	SD NEGERI SUKOREJO 01	154.564,00	13.800,00
377	SD NEGERI CITRODIWANGSAN 03	1.422.800,00	0,00
378	SD NEGERI KLOPOSAWIT 01	8.632,44	3.632,44
379	SD NEGERI BULUREJO 01	560.502,00	0,00
380	SD NEGERI TEMPURSARI 01	0,00	0,00
381	SD NEGERI TUKUM 01	10.000,00	26.000,00
382	SD NEGERI RANUWURUNG 01	0,00	0,00
383	SD NEGERI SUMBERURIP 02	74.000,00	0,00
384	SD NEGERI ROWOKANGKUNG 03	0,00	0,00
385	SD NEGERI GRATI 02	286.200,00	0,00
386	SDN JAMBEKUMBU 01	0,00	42.000,00
387	SD NEGERI DENOK	0,00	88.000,00
388	SD NEGERI PASIRIAN 05	184.600,00	453.900,00
389	SD NEGERI ROWOKANGKUNG 06	0,00	0,00
390	SDN KALIBENDO 02	0,00	0,00
391	SD NEGERI TOMPOKERSAN 02	750.580,00	0,00
392	SD NEGERI SELOKGONDANG 01	601.491,90	87.899,90
393	SDN JAMBEKUMBU 02	0,00	0,00
394	SD NEGERI SRUNI 01	0,00	0,00
395	SD NEGERI MERAHAN 03	249.050,00	0,00
396	SD NEGERI PUOREJO 02	0,00	0,00
397	SD NEGERI DITOTRUNAN 01	356.800,00	73.338,00
398	SD NEGERI LEMPENI 01	92.000,00	21.900,00
399	SD NEGERI KALIBOTO KIDUL 05	0,00	0,00
400	SD NEGERI KEBONAGUNG 02	357.256,00	300.000,00
401	SD NEGERI DITOTRUNAN 02	288.000,00	0,00
402	SD NEGERI WATES WETAN 03	0,00	0,00
403	SD NEGERI JARIT 04	73.360,00	0,00
404	SD NEGERI RANDUAGUNG 02	0,00	0,00
405	SD NEGERI GROBOGAN 01	0,00	0,00
406	SD NEGERI WONOSARI 02	24.500,00	0,00
407	SD NEGERI YOSOWILANGUN KIDUL 03	153.200,00	51.600,00
408	SD NEGERI RANUBEDALI 01	171.400,00	500,00
409	SD NEGERI ARGOSARI 01	0,00	0,00
410	SD NEGERI CITRODIWANGSAN 01	33.645,00	0,00
411	SD NEGERI ARGOSARI 02	0,00	0,00
412	SD NEGERI SENDURO 02	400,00	2.800,00
413	SD NEGERI KUNIR KIDUL 03	147.640,00	89.800,00
414	SD NEGERI JUGOSARI 03	57.500,00	0,00
415	SD NEGERI PUOREJO 04	0,00	0,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
416	SD NEGERI NOGOSARI 02	0,00	125.000,00
417	SD NEGERI PANDANWANGI 02	400.000,00	0,00
418	SD NEGERI KEBONSARI	160.000,00	0,00
419	SD NEGERI TEMPURSARI 04	0,00	0,00
420	SD NEGERI DAWUHAN LOR 05	472.200,00	168.000,00
421	SD NEGERI SAWARAN LOR 03	0,00	0,00
422	SDN TUNJUNG 02	0,00	0,00
423	SD NEGERI KALIBOTO KIDUL 06	16.000,00	0,00
424	SD NEGERI ROGOTRUNAN 02	12.000,00	0,00
425	SD NEGERI PASIRIAN 01	0,00	57.600,00
426	SD NEGERI CONDR0 01	0,00	0,00
427	SD NEGERI SAWARAN LOR 04	0,00	0,00
428	SD NEGERI PASIRIAN 02	199.894,00	0,00
429	SD NEGERI PUNDUNGSARI 03	0,00	0,00
430	SD NEGERI SELOK AWAR-AWAR 01	0,00	0,00
431	SD NEGERI JOKARTO 03	354.200,00	1.621.000,00
432	SDN PASRUJAMBE 03	2.149.900,00	0,00
433	SD NEGERI GRATI 01	96.700,00	0,00
434	SD NEGERI SELOK AWAR-AWAR 02	0,00	0,00
435	SD NEGERI TEKUNG 02	280.000,00	0,00
436	SD NEGERI ROJOPOL0 07	0,00	0,00
437	SD Negeri Duren 02	113.200,00	0,00
438	SD NEGERI MUNDER 01	28.000,00	0,00
439	SD NEGERI KALIBOTO KIDUL 02	0,00	0,00
440	SD NEGERI KALIBOTO LOR 04	(0,03)	(0,03)
441	SD NEGERI KARANGANYAR 02	100.000,00	0,00
442	SD NEGERI BAGO 01	548.000,00	0,00
443	SD NEGERI CURAHPETUNG 03	0,00	0,00
444	SD NEGERI JATIREJO	0,00	0,00
445	SD NEGERI WONOREJO 02	0,00	0,00
446	SD NEGERI TEMPEH TENGAH 03	104.000,00	0,00
447	SD NEGERI TOMPOKERSAN 03 LUMAJANG	537.500,00	600,00
448	SDN TUMPENG 03	0,00	0,00
449	SDN KALIPENGGUNG 01	0,00	0,00
450	SD NEGERI CITRODIWANGSAN 02	21.000,00	578.300,00
451	SD NEGERI KALISEMUT 02	991.000,00	0,00
452	SD NEGERI PADANG 01	845.972,00	72,00
453	SD NEGERI BEDAYU	72.578,00	0,00
454	SD NEGERI BAGO 04	0,00	0,00
455	SD NEGERI KEDUNGJAJANG 02	0,00	9.000,00
456	SD NEGERI NGUTER 01	58.000,00	0,00
457	SD NEGERI KEDUNGREJO 03	56.000,00	0,00
458	SD NEGERI PANDANSARI 01	409.365,00	297.000,00
459	SD NEGERI RANULOGONG 02	0,00	0,00
460	SD NEGERI PANDANSARI 02	532.400,00	1.670.100,00
461	SD NEGERI BARAT 03	43.350,00	0,00
462	SD NEGERI WONOREJO 01	0,00	0,00
463	SD NEGERI TEGALRANDU 02	0,00	204.000,00
464	SDN KRATON 01	15.000,00	0,00
465	SD NEGERI TEGALBANGSRI 01	67.000,00	101.650,00
466	SD NEGERI SAWARAN KULON 01	0,00	0,00
467	SD NEGERI DAWUHAN WETAN 03	129.400,00	2.587.800,00
468	SD NEGERI JATIMULYO 02	13.000,00	20.000,00
469	SD NEGERI SELOK AWAR - AWAR 03	0,00	0,00
470	SDN SUKOREJO	0,00	0,00
471	SD NEGERI TEGALBANGSRI 02	271.049,58	999,58

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
472	SD NEGERI KALIULING 01	0,00	0,00
473	SD NEGERI SAWARAN KULON 02	0,00	0,00
474	SD NEGERI MLAWANG 03	0,00	0,00
475	SD NEGERI TEMPEH TENGAH 01	285.000,00	32.000,00
476	SD NEGERI ORO-ORO OMBO 03	28.400,00	4.500,00
477	SD NEGERI KUNIR LOR 02	0,00	0,00
478	SD NEGERI KERTOWONO 04	0,00	0,00
479	SD NEGERI SUMBERPETUNG 03	400,00	0,00
480	SD NEGERI YOSOWILANGUN LOR 02	200.527,00	0,00
481	SD NEGERI KALIPENGGUNG 02	0,00	0,00
482	SD NEGERI KRAI 01	175.000,00	0,00
483	SD NEGERI PRONOJIWO 02	203.602,00	(398,00)
484	SD NEGERI SUMBERJATI 03	0,00	2.923.500,00
485	SD NEGERI LEMPENI 02	0,00	0,00
486	SD NEGERI ALUN-ALUN 02	19.800,00	0,00
487	SD NEGERI SENDURO 01	3.056.850,00	1.025.500,00
488	SD NEGERI RANUBEDALI 02	29.400,00	107.150,00
489	SDN SUMBERMUJUR 04	0,00	0,00
490	SD NEGERI PENANGGAL 05	100.000,00	57,00
491	SD NEGERI BAGO 02	340.700,00	0,00
492	SD NEGERI SUMBERWULUH 02	158.000,00	0,00
493	SD NEGERI BESUK 02	75.900,00	0,00
494	SDN YOSOWILANGUN LOR 01	500.000,00	0,00
495	SDN PASRUJAMBE 08	106.000,00	0,00
496	SDN PANDANSARI 02 KEDUNGJAJANG	0,00	0,00
497	SD NEGERI GUCIALIT 02	0,00	0,00
498	SD NEGERI PANDANWANGI 03	0,00	0,00
499	SD NEGERI BARAT 02	400.000,00	0,00
500	SD NEGERI PUNDUNGSARI 02	0,00	0,00
501	SD NEGERI KARANGSARI 01	622.084,00	77.000,00
502	SD NEGERI TEKUNG 01	0,00	566.700,00
503	SD NEGERI KEDAWUNG 02	179.067,00	0,00
504	SDN SUMBERREJO 02	0,00	0,00
505	SD NEGERI PASIRIAN 03	381.000,00	0,00
506	SD NEGERI RANUYOSO 04	0,00	0,00
507	SD NEGERI JATISARI 02	0,00	0,00
508	SD NEGERI KARANGSARI 02	4.756.100,00	69.000,00
509	SD NEGERI DOROGOWOK 02	0,00	0,00
510	SD NEGERI PASIRIAN 04	300.000,00	0,00
511	SD NEGERI SOMBO	0,00	0,00
512	SDN DAWUHAN WETAN 04	0,00	100,00
513	SD NEGERI TEMPEH LOR 03	200.000,00	0,00
514	SDN SELOK AWAR-AWAR 04	0,00	0,00
515	SD NEGERI GEDANGMAS 01	0,00	0,00
516	SD NEGERI BENCE 03	0,00	0,00
517	SD NEGERI KLAKAH 02	11.900,00	10.200,00
518	SD NEGERI TAMBAHREJO 02	0,00	0,00
519	SD NEGERI SENTUL 01	446.900,00	36.100,00
520	SD NEGERI KALIBOTO LOR 15	0,00	0,00
521	SDN GONDOROSO 03	0,00	0,00
522	SD NEGERI BONDOYUDO 02	352.832,00	389.073,00
523	SD NEGERI JATIMULYO 01	0,00	120.000,00
524	SD NEGERI SENTUL 02	50.600,00	0,00
525	SD NEGERI BULUREJO 02	0,00	0,00
526	SD NEGERI SUKOREJO 03	0,00	0,00
527	SMP NEGERI 2 PASIRIAN	1.154.500,00	3.482.469,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
528	SMP NEGERI 4 CANDIPURO	836.800,00	658.250,00
529	SMP NEGERI 3 PASIRIAN	295.038,00	54.698,00
530	SMP SSA NEGERI KLOPOSOWIT 1 CANDIPURO	0,00	8.738.100,00
531	SMP NEGERI 1 TEKUNG	1.262.371,00	728.200,00
532	SMP SSA NEGERI PAJARAKAN RANDUAGUNG	1.120.700,00	62.120,00
533	SMP SSA NEGERI SUMBERWULUH CANDIPURO	0,00	0,00
534	SD-SMP NEGERI SATU ATAP TAMBAHREJO CANDIPURO	275.035,00	0,00
535	SMP NEGERI 1 GUCIALIT	1.174.992,00	785.000,00
536	SMP NEGERI 2 GUCIALIT	1.359.417,00	125.071,00
537	SMP NEGERI 1 PADANG LUMAJANG	573.190,00	0,00
538	SMP NEGERI 3 CANDIPURO	1.144.750,00	110.500,00
539	SMP NEGERI 2 SENDURO	493.874,00	393.702,00
540	SMP NEGERI 2 TEKUNG	989.400,00	85.700,00
541	SD-SMP NEGERI SATU ATAP BURNO SENDURO	0,00	0,00
542	SMP NEGERI 1 TEMPEH	48.673.379,00	6.268.596,00
543	SMP NEGERI 4 PASIRIAN SATU ATAP	500,00	1.900,00
544	SMP NEGERI 2 TEMPEH	1.360.288,00	644.594,00
545	SMP NEGERI 1 YOSOWILANGUN	15.191.899,73	7.632.159,73
546	SMP NEGERI 1 TEMPURSARI	152.700,00	174.900,00
547	SMP NEGERI 1 SUKODONO	9.250.836,00	29.982.009,00
548	SMP NEGERI 2 KUNIR	393.900,00	900.000,00
549	SMP NEGERI SATU ATAP RANUPANE SENDURO	900.000,00	0,00
550	SMP NEGERI SATU ATAP GONDORUSO 01	0,00	0,00
551	SMP SSA NEGERI JERUK GUCIALIT	984.800,00	0,00
552	SMP NEGERI 1 ROWOKANGKUNG	2.194.498,00	1.874.142,00
553	SMP NEGERI 1 SUMBERSUKO	37.000,00	2.600.000,00
554	SMP NEGERI 1 PRONOJIWO	2.933.967,00	28.534.450,00
555	SMP NEGERI 5 PASIRIAN SATU ATAP	0,00	0,00
556	SD-SMP NEGERI SATU ATAP ARGOSARI SENDURO	740.292,00	1.864.380,00
557	SMP NEGERI 2 SUKODONO	7.926.566,00	2.533.300,00
558	SMP NEGERI 1 SENDURO	976.325,00	53.472,00
559	SMP NEGERI 1 LUMAJANG	4.285.184,00	8.976.922,00
560	SMP NEGERI 4 YOSOWILANGUN SATU ATAP	279.131,64	83.199,64
561	SMP NEGERI 2 YOSOWILANGUN	1.457.743,00	3.829.536,00
562	SMP NEGERI 2 PASRUJAMBE	502.400,00	135.000,00
563	SMP NEGERI 1 RANUYOSO	503.600,00	1.030.128,00
564	SMP NEGERI SATU ATAP JARIT	370.000,00	188.900,00
565	SMP NEGERI 4 LUMAJANG	6.438.636,00	5.506.567,00
566	SMP NEGERI 1 CANDIPURO	4.911.081,00	8.656.033,00
567	SMP SSA NEGERI JENGGRONG RANUYOSO	185.432,00	0,00
568	SMP NEGERI 5 CANDIPURO	670.000,00	1.108.544,00
569	SMP NEGERI 2 PADANG	190.600,00	30.600,00
570	SMP NEGERI 1 KEDUNGJAJANG	3.066.140,00	805.300,00
571	SMP NEGERI 2 SUMBERSUKO	0,00	0,00
572	SMP NEGERI 1 KUNIR	2.098.850,00	1.627.070,00
573	SMP NEGERI 3 LUMAJANG	7.211.500,00	18.558.681,00
574	SMP NEGERI 1 RANDUAGUNG	1.387.592,00	262.488,00
575	SMP NEGERI 2 JATIROTO	646.510,00	458.800,00
576	SMP NEGERI 2 CANDIPURO	135.000,00	600.100,00
577	SMP SSA NEGERI PASRUJAMBE 7	0,00	8.688.700,00
578	SMP NEGERI 2 LUMAJANG	488.006,00	5.277.507,00
579	SMP NEGERI 3 YOSOWILANGUN	1.217.300,00	1.417.500,00
580	SD-SMP NEGERI SATU ATAP JUGOSARI CANDIPURO	0,00	0,00
581	SMP NEGERI 2 PRONOJIWO	807.162,00	472.120,00
582	SMP NEGERI 2 ROWOKANGKUNG	395.985,00	211.990,00
583	SMP NEGERI 1 PASRUJAMBE	441.395,00	1.064.692,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
584	SMP NEGERI 1 JATIROTO	164.019,00	0,00
585	SMP NEGERI 2 RANDUAGUNG LUMAJANG	4.474.350,00	1.294.400,00
586	SMP NEGERI 1 KLAKAH	969.263,00	165.600,00
587	SD-SMP NEGERI SATU ATAP ALUN ALUN RANUYOSO	0,00	0,00
588	SMP NEGERI 3 SENDURO	648.850,00	0,00
589	SMP NEGERI 2 KLAKAH	3.608.889,90	4.735.604,90
590	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PANDANSARI	0,00	250,00
591	SMP NEGERI 3 TEMPEH	1.468.950,00	777.201,00
592	SMP NEGERI 2 TEMPURSARI	56.000,00	0,00
593	SMP NEGERI 1 PASIRIAN	3.441.500,00	1.826.000,00
594	SMP NEGERI 05 LUMAJANG	6.029.888,00	1.418.648,00
595	SMP SSA NEGERI PASRUJAMBE 5	136.900,00	0,00
596	SMP SSA NEGERI SOMBO GUCIALIT	3.695.800,00	1.000.000,00
597	SMP SSA NEGERI WONOKERTO GUCIALIT	90.000,00	0,00
598	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN YOSOWILANGUN	0,00	0,00
599	TK NEGERI PEMBINA LUMAJANG	0,00	0,00
600	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN YOSOWILANGUN	0,00	0,00
601	TK NEGERI PEMBINA LUMAJANG	0,00	0,00
602	TK NEGERI PEMBINA PASIRIAN	12.000,00	0,00
603	TK NEGERI PEMBINA SUKODONO	0,00	0,00
604	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN YOSOWILANGUN	28.000,00	0,00
605	TK NEGERI PEMBINA TEMPEH	27.550,00	0,00
606	TK NEGERI PEMBINA LUMAJANG	0,00	0,00
JUMLAH		265.852.691,46	231.092.611,46

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
e) Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	804.043.907,00	0,00

Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas merupakan dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.

Pada tahun 2024 sisa Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas masuk ke dalam akun Kas Lainnya sebesar sebesar Rp1.771.550.871,00 dan pada tahun 2025 sisa dana di reklasifikasi ke akun Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebesar Rp804.043.907,00

Tabel 117. Perbandingan Rincian Sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
NO	PUSKESMAS/UPT	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
1	Puskesmas Tempursari	4.856.000,00	108.311.281,00
2	Puskesmas Pronojiwo	22.071.640,00	73.094.175,00
3	Puskesmas Candipuro	8.951.947,00	38.676.353,00
4	Puskesmas Penanggal	32.954.180,00	84.907.132,00

NO	PUSKESMAS/UPT	SALDO 31 DESEMBER 2025	SALDO 31 DESEMBER 2024
5	Puskesmas Pasirian	31.228.058,00	68.384.633,00
6	Puskesmas Bades	9.759.000,00	59.128.950,00
7	Puskesmas Tempeh	30.187.082,00	45.872.436,00
8	Puskesmas Gesang	13.858.631,00	52.047.433,00
9	Puskesmas Rogotrunan	12.723.500,00	94.373.142,00
10	Puskesmas Labruk	111.210.175,00	162.285.435,00
11	Puskesmas Tekung	8.357.703,00	22.298.871,00
12	Puskesmas Kunir	22.522.709,00	35.414.861,00
13	Puskesmas Yosowilangun	61.211.587,00	45.899.971,00
14	Puskesmas Sumbersari	46.227.629,00	57.682.965,00
15	Puskesmas Jatiroto	30.120.823,00	31.277.642,00
16	Puskesmas Randuagung	12.105.470,00	53.236.357,00
17	Puskesmas Sukodono	14.706.850,00	94.972.147,00
18	Puskesmas Padang	38.402.128,00	119.300.252,00
19	Puskesmas Pasrujambe	42.605.000,00	66.206.481,00
20	Puskesmas Senduro	139.543.500,00	127.194.431,00
21	Puskesmas Gucialit	26.695.437,00	150.733.768,00
22	Puskesmas Kedungjajang	31.393.545,00	58.245.737,00
23	Puskesmas Klakah	22.801.835,00	47.788.603,00
24	Puskesmas Ranuyoso	18.331.665,00	48.759.416,00
25	Puskesmas Tunjung	11.217.813,00	25.458.399,00
TOTAL		804.043.907,00	1.771.550.871,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
f) Kas Lainnya	0,00	2.002.643.482,46

Pada tahun 2025 akun Kas Lainnya direklasifikasi ke akun Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Dimana sebelumnya Kas Lainnya merupakan gabungan dari Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah

...

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
g) Piutang Pajak	37.520.802.898,00	32.986.616.838,00

Piutang Pajak merupakan hak pemerintah daerah atas pendapatan pajak daerah yang sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah, tetapi sampai dengan 31 Desember masih belum diterima. Saldo Piutang pajak per per 31 Desember 2025 dan 2024, terinci sebagai berikut:

	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Piutang Pajak Reklame	246.239.044,00	194.418.194,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	750.588.750,00	797.855.000,00
Piutang Pajak Air Tanah	10.439.071,00	2.752.575,00
Piutang PBB P2	32.946.123.604,00	28.681.188.864,00
Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.567.412.429,00	3.310.402.205,00
Jumlah	37.520.802.898,00	32.986.616.838,00

(1) Piutang Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Assessment*). Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp246.239.044,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 118. Perkembangan Piutang Pajak Reklame Tahun 2025

Dalam Rupiah					
Tahun SKP	Saldo 31 Des 2024	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2025
2017	1.784.000,00	0,00	0,00	0,00	1.784.000,00
2018	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
2019	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
2020	3.172.500,00	0,00	0,00	0,00	3.172.500,00
2021	926.200,00	0,00	0,00	0,00	926.200,00
2022	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
2023	525.000,00	(525.000,00)	0,00	0,00	0,00
2024	185.697.994,00	0,00	0,00	182.379.094,00	3.318.900,00
2025	0,00	0,00	234.724.944,00	0,00	234.724.944,00
Jumlah	194.418.194,00	(525.000,00)	234.724.944,00	182.379.094,00	246.239.044,00

Tabel 119. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2025

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 Tahun	234.724.944,00	0,50%	1.173.624,72
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	3.318.900,00	10%	331.890,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	4.361.200,00	50%	2.180.600,00
Macet	> 5 Tahun	3.834.000,00	100%	3.834.000,00
Jumlah		246.239.044,00		7.520.114,72

Penambahan piutang pajak reklame sebesar Rp234.724.944,00 merupakan penambahan yang diperoleh dari SKP tahun 2025 yang belum terbayar.

Pengurangan piutang piutang pajak reklame sebesar Rp182.379.094,00 merupakan pengurangan piutang pajak reklame tahun 2024 yang masing - masing terdiri dari reklame papan senilai Rp182.271.594,00 dan reklame kain senilai Rp107.500,00.

(2) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp750.588.750,00.

Tabel 120. Perkembangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2024	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2025
2020	481.440.000,00	0,00	0,00	0,00	481.440.000,00
2022	201.111.250,00	0,00	0,00	10.000.000,00	191.111.250,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	115.303.750,00	0,00	0,00	37.266.250,00	78.037.500,00
Jumlah	797.855.000,00	0,00	0,00	47.266.250,00	750.588.750,00

Tabel 121. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	78.037.500,00	10%	7.803.750,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	672.551.250,00	50%	336.275.625,00
Macet	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		750.588.750,00		344.079.375,00

Pengurangan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2025 sebesar Rp47.266.250,00 merupakan pembayaran piutang tahun lalu dengan rincian CV. Anugerah pembayaran piutang tahun 2022 dengan nilai Rp10.000.000,00, Jumbani pembayaran piutang tahun 2024 dengan sebesar Rp31.106.250,00 dan CV. Arah Gemilang pembayaran tahun 2024 sebesar Rp6.160.000,00.

(3) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.439.071,00, terinci sebagai berikut:

Tabel 122. Perkembangan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2024	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2025
2023	236.035,00	957.304,00	0,00	28.608,00	1.164.731,00
2024	2.516.540,00	0,00	0,00	1.274.460,00	1.242.080,00
2025	0,00	0,00	8.032.260,00	0,00	8.032.260,00
Jumlah	2.752.575,00	957.304,00	8.032.260,00	1.303.068,00	10.439.071,00

Tabel 123. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah 2025

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 Tahun	8.032.260,00	0,50%	40.161,30
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	2.406.811,00	10%	240.681,10
Diragukan	>2 – 5 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		10.439.071,00		280.842,40

Pajak Air Tanah merupakan pajak daerah yang pemungutannya berdasarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) atau bisa disebut Official Assessment. Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.752.575,00. Pada Tahun 2025 terdapat koreksi sebesar Rp957.304,00, penambahan piutang sejumlah Rp8.032.260,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp1.303.068,00 sehingga saldo akhir piutang pajak air tanah sebesar Rp10.439.071,00.

(4) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.946.123.604,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 124. Perkembangan Piutang PBB-P2 Tahun 2025

Dalam Rupiah

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2024	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2025
2017	1.768.888.402,00	0,00	0,00	8.563.796,00	1.760.324.606,00
2018	2.131.091.971,00	0,00	0,00	9.677.618,00	2.121.414.353,00
2019	2.376.507.704,00	0,00	0,00	13.702.510,00	2.362.805.194,00
2020	2.647.605.012,00	0,00	0,00	94.983.185,00	2.552.621.827,00
2021	4.992.087.126,00	0,00	0,00	225.335.554,00	4.766.751.572,00
2022	4.739.903.022,00	0,00	0,00	258.533.801,00	4.481.369.221,00
2023	4.707.923.970,00	0,00	0,00	381.852.661,00	4.326.071.309,00

Tahun SKP	Saldo 31 Des 2024	Koreksi/Reklasifikasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2025
2024	5.317.181.657,00	0,00	0,00	913.358.115,00	4.403.823.542,00
2025	0,00	0,00	6.170.941.980,00	0,00	6.170.941.980,00
Jumlah	28.681.188.864,00	0,00	6.170.941.980,00	1.906.007.240,00	32.946.123.604,00

Tabel 125. Perhitungan Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2025

Dalam Rupiah				
Kualitas Piutang	Umur Piutang Pajak	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 Tahun	6.170.941.980,00	0,50%	30.854.709,90
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	8.729.894.851,00	10%	872.989.485,10
Diragukan	>2 – 5 Tahun	11.800.742.620,00	50%	5.900.371.310,00
Macet	> 5 Tahun	6.244.544.153,00	100%	6.244.544.153,00
Jumlah		32.946.123.604,00		13.048.759.658,00

PBB-P2 pemungutannya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Official Assessment) dengan menerbitkan SPPT PBB-P2. Penambahan sebesar Rp6.170.941.980,00 merupakan jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan pada Tahun 2025 dan pengurangan sebesar Rp1.906.007.240,00 terdiri dari pembayaran piutang tahun 2017 sebesar Rp8.563.796,00; Tahun 2018 sebesar Rp9.677.618,00; Tahun 2019 sebesar Rp13.702.510,00; Tahun 2020 sebesar Rp94.983.185,00; Tahun 2021 sebesar Rp225.335.554,00; Tahun 2022 sebesar Rp258.533.801,00; Tahun 2023 sebesar Rp381.852.661,00; Tahun 2024 Rp913.358.115,00.

(5) Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada tahun 2025 sebesar Rp3.567.412.429,00 yang terdiri dari Piutang PBJT Tenaga Listrik Rp3.529.817.754; Piutang PBJT Hotel Rp6.883.000,00; Piutang PBJT Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage Rp4.360.000,00; Piutang PBJT Parkir Rp1.410.700,00; Piutang PBJT Restoran Rp17.349.775,00 dan Piutang PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering Rp7.591.200,00.

Tabel 126. Perkembangan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025

Dalam Rupiah					
Jenis Piutang	Saldo 31-Des-24	Koreksi/Reklasifikasi	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31-Des-25
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik (PPJ)	3.310.402.205,00	0,00	3.529.817.754,00	3.310.402.205,00	3.529.817.754,00
PBJT Hotel	0,00	3.627.000,00	3.256.000,00	0,00	6.883.000,00
PBJT Rumah Penginapan/ Guesthouse/ Bungalo/ Resort/ Cottage	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00
PBJT Parkir	0,00	120.000,00	1.290.700,00	0,00	1.410.700,00
PBJT Restoran	0,00	0,00	17.349.775,00	0,00	17.349.775,00
PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	517.800,00	7.073.400,00	0,00	7.591.200,00
Jumlah	3.310.402.205,00	4.264.800,00	3.563.147.629,00	3.310.402.205,00	3.567.412.429,00

Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025:

- a. Penambahan sebesar Rp3.529.817.754,00 merupakan PBJT Listrik yang belum diterima dari PLN sampai 31 Desember 2025. Pengurangan sebesar Rp3.310.402.205,00 merupakan penerimaan piutang PBJT konsumsi tenaga listrik tahun 2024.
- b. Ada penambahan koreksi kurang catat PBJT Hotel sebesar Rp3.627.000,00 yang baru ditemukan pada saat audit, sedangkan penambahan sebesar Rp3.256.000,00 merupakan penambahan piutang tahun berjalan.
- c. Penambahan Piutang PBJT Rumah Penginapan/ Guesthouse/ Bungalo/ Resort/ Cottage sebesar Rp4.360.000,00 merupakan penambahan piutang tahun berjalan.
- d. Ada penambahan koreksi kurang catat PBJT Parkir sebesar Rp120.000,00 yang baru ditemukan pada saat audit, sedangkan penambahan sebesar Rp1.290.700,00 merupakan penambahan piutang tahun berjalan.
- e. Penambahan Piutang Restoran sebesar Rp17.349.775,00 merupakan penambahan piutang tahun berjalan.
- f. Ada penambahan koreksi kurang catat PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering sebesar Rp517.800,00 yang baru ditemukan pada saat audit, sedangkan penambahan sebesar Rp7.073.400,00 merupakan penambahan piutang tahun berjalan

Tabel 127. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025

Kualitas Piutang	Umur	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
	Piutang Pajak			
Lancar	< 1 Tahun	3.563.147.629,00	0,50%	17.687.168,77
Kurang Lancar	1 – 2 Tahun	637.800,00	10%	63.780,00
Diragukan	>2 – 5 Tahun	3.627.000,00	50%	1.813.500,00
Macet	> 5 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		3.567.412.429,00		19.693.018,15

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
h) Piutang Retribusi	2.746.162.040,50	22.941.110.667,50

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.746.162.040,50 dan Rp22.941.110.667,50 terinci sebagai berikut:

Jenis Retribusi	31 Des. 2025 (Rp)	31 Des. 2024 (Rp)
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.148.174.358,00	22.330.005.235,00
• Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	5.612.812,50	5.612.812,50
• Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	401.016.000,00	401.016.000,00
• Piutang Retribusi Terminal	26.984.400,00	32.604.600,00
• Piutang Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	164.374.470,00	171.872.020,00
Jumlah	2.746.162.040,50	22.941.110.667,50

(1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.148.174.358,00 dan tahun 2024 sebesar Rp22.330.005.235,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 128. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2025

Dalam Rupiah						
No	Nama SKPD	Saldo 31 Des 24	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 25
I	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas					
1	Puskesmas Tempursari	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
2	Puskesmas Pronojiwo	0,00	0,00	61.800.000,00	0,00	61.800.000,00
3	Puskesmas Candipuro	1.907.000,00	0,00	2.154.000,00	1.907.000,00	2.154.000,00
4	Puskesmas Penanggal	0,00	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
5	Puskesmas Pasirian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Puskesmas Bades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Puskesmas Tempeh	2.350.000,00	0,00	1.858.640,00	1.090.000,00	3.118.640,00
8	Puskesmas Gesang	52.065.000,00		0,00	52.065.000,00	0,00
9	Puskesmas Rogotrunan	31.180.000,00	0,00	0,00	31.180.000,00	0,00
10	Puskesmas Labruk Kidul	28.060.000,00	0,00	0,00	28.060.000,00	0,00
11	Puskemas Tekung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Puskemas Kunir	1.525.000,00	0,00	860.000,00	1.525.000,00	860.000,00
13	Puskesmas Yosowilangun	44.860.000,00		73.510.000,00	44.860.000,00	73.510.000,00
14	Puskemas Sumpersari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Puskesmas Jatiroto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Nama SKPD	Saldo 31 Des 24	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 25
16	Puskesmas Randuagung	0,00	0,00	19.090.000,00	0,00	19.090.000,00
17	Puskesmas Sukodono	1.855.000,00	0,00	44.097.500,00	1.855.000,00	44.097.500,00
18	Puskesmas Padang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Puskesmas Pasrujambe	1.446.000,00	0,00	986.000,00	1.446.000,00	986.000,00
20	Puskesmas Senduro	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00	0,00
21	Puskesmas Gucialit	0,00	0,00	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00
22	Puskesmas Kedungjajang	9.444.000,00	0,00	15.074.000,00	9.444.000,00	15.074.000,00
23	Puskesmas Klakah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Puskesmas Ranuyoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Puskesmas Tunjung	851.000,00	0,00	0,00	851.000,00	0,00
	Jumlah (1)	179.657.000,00	0,00	257.620.140,00	175.347.000,00	261.930.140,00
II	Pelayanan Kesehatan di RSUD					
1	RSUD Pasirian	144.900.970,00	(5.161.944,00)	77.753.764,00	124.494.314,00	92.998.476,00
2	RSUD dr. Haryoto	22.005.447.265,00	0,00	96.076.741.253,00	116.288.942.776,00	1.793.245.742,00
	Jumlah (2)	22.150.348.235,00	(5.161.944,00)	96.154.495.017,00	116.413.437.090,00	1.886.244.218,00
	Total (1) + (2)	22.330.005.235,00	(5.161.944,00)	96.412.115.157,00	116.588.784.090,00	2.148.174.358,00

Tabel 129. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2025

Dalam Rupiah				
Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2025
Lancar	< 1 bulan	645.502.115,00	0,50%	3.227.510,58
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	176.586.098,00	10%	17.658.609,80
Diragukan	>3 – 12 bulan	132.735.607,00	50%	66.367.803,50
Macet	> 12 bulan	1.193.350.538,00	100%	1.193.350.538,00
Jumlah		2.148.174.358,00		1.280.604.461,88

(2) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp5.612.812,50, tidak ada penambahan maupun pengurangan piutang.

Tabel 130. Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Saldo 31 Des 2024	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2025
	Retribusi Daftar Ulang				
1	Serangin	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2	Toga	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
3	Senduro	1.562.000,00	0,00	0,00	1.562.000,00
4	Agropolitan	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5	Sukodono	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

No	Uraian	Saldo 31 Des 2024	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo 31 Des 2025
6	Klakah	969.500,00	0,00	0,00	969.500,00
7	Nogosari	178.625,00	0,00	0,00	178.625,00
8	Tempeh	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
9	Pasirian	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
10	Candipuro	1.179.437,50	0,00	0,00	1.179.437,50
11	Pronojiwo	467.250,00	0,00	0,00	467.250,00
	Jumlah	5.612.812,50	0,00	0,00	5.612.812,50

Tabel 131. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 bulan	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00
Macet	> 12 bulan	5.612.812,50	100%	5.612.812,50
Jumlah		5.612.812,50		5.612.812,50

(3) Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo (3) Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp401.016.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terinci sebagai berikut:

Tabel 132. Daftar Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 31 Des 2024	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	401.016.000,00	0,00	0,00	0,00	401.016.000,00
	JUMLAH	401.016.000,00	0,00	0,00	0,00	401.016.000,00

Tabel 133. Perhitungan Penyisihan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2025

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 bulan	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00
Macet	> 12 bulan	401.016.000,00	100%	401.016.000,00
Jumlah		401.016.000,00		401.016.000,00

(4) Piutang Retribusi Terminal

Saldo Piutang Retribusi Terminal per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.984.400,00. Jumlah tersebut merupakan sewa kios terminal yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 134. Daftar Piutang Retribusi Terminal Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Retribusi Terminal	Saldo 31 Des 2024	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha (Kios)	32.604.600,00	0,00	42.512.400,00	48.132.600,00	26.984.400,00
JUMLAH		32.604.600,00	0,00	42.512.400,00	48.132.600,00	26.984.400,00

Tabel 135. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Terminal Tahun 2025

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2025
Lancar	< 1 bulan	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	0,00	50%	0,00
Macet	> 12 bulan	26.984.400,00	100%	26.984.400,00
Jumlah		26.984.400,00		26.984.400,00

(7) Piutang Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, khususnya piutang sewa Tanah Stren Kali dengan leading sektor Dinas Perumahan dan Tata Ruang pada tahun 2025 sebesar Rp164.374.470,00

Tabel 136. Piutang Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 2025

Dalam Rupiah

No	Piutang Sewa Tanah Stren Kali (Dinas PUTR)	Saldo 31 Des 2024	Koreksi/ Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	2019	58.309.860,00	0,00	0,00	0,00	58.309.860,00
2	2020	13.924.805,00	0,00	0,00	955.000,00	12.969.805,00
3	2021	14.317.555,00	0,00	0,00	2.275.700,00	12.041.855,00
4	2022	21.287.650,00	0,00	0,00	5.656.650,00	15.631.000,00
5	2023	25.277.250,00	0,00	0,00	7.810.400,00	17.466.850,00
6	2024	38.754.900,00	0,00	0,00	11.779.300,00	26.975.600,00
7	2025	0,00	0,00	20.979.500,00	0,00	20.979.500,00
Jumlah		171.872.020,00	0,00	20.979.500,00	28.477.050,00	164.374.470,00

**Tabel 137.Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan
Aset Daerah 2025**

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang Retribusi	Jumlah	% Penyisihan	Penyisihan Piutang per 31 Des 2025
Lancar	< 1 bulan	20.979.500,00	0,50%	104.897,50
Kurang Lancar	< 1 – 3 bulan	0,00	10%	0,00
Diragukan	>3 – 12 bulan	27.080.100,00	50%	13.540.050,00
Macet	> 12 bulan	116.314.870,00	100%	116.314.870,00
Jumlah		164.374.470,00		129.959.817,50

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
i) Belanja di Bayar di Muka	416.266.666,67	0,00

Belanja di Bayar di Muka sebesar Rp416.266.666,67 merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk barang/jasa yang manfaatnya akan diterima di masa depan berupa sewa rumah singgah (bangunan rumah tinggal) yang berdiri di atas tanah seluas 463 m² sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 1950 / Kelurahan Pacarkembang, Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Pacarkembang yang dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dengan leading sektor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan akta perjanjian sewa menyewa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sherly Dian Meirawati, S.H.,M.H tanggal 19 September 2025 dengan masa sewa selama 5 tahun dimulai sejak tanggal 19 September 2025 dan akan berakhir pada tanggal 19 September 2030.

Untuk menyewa dengan jangka waktu tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang membayar biaya sewa sebesar Rp446.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor: 1.06.2.08.0.00.01.0000/LS/05156 tanggal 1 Oktober 2025.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
j) Piutang Lainnya	58.708.291.290,76	22.041.619.890,76

Piutang Lainnya merupakan piutang yang tidak dapat dikategorikan sebagai piutang pajak dan piutang retribusi. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 terinci sebagai berikut:

Piutang Lainnya	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah:		
- Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	35.174.400,00	24.750.000,00
- Piutang Remunerasi Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.214.265,76	0,00
- Piutang Pendapatan Bunga	0,00	3.214.265,76
- Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	24.872.901,00	24.872.901,00
- Piutang Pendapatan BLUD	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	65.261.566,76	54.837.166,76
Piutang Transfer Dana Perimbangan	50.883.518.000,00	14.096.831.000,00
Piutang Lain-lain	7.759.511.724,00	7.889.951.724,00
Jumlah Piutang Lainnya	58.708.291.290,76	22.041.619.890,76

i. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak ada perubahan, masing-masing tercatat sebesar Rp35.174.400,00 dan Rp24.750.000,00. Saldo tersebut merupakan piutang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Dinas Pertanian yang sampai dengan 31 Desember 2025 masih belum diterima.

Tabel 138. Daftar dan Mutasi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025

Dalam Rupiah						
No	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	Saldo 31 Des 2024	Reklasifikasi/ Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	Sewa Kebun Dinas an. Puryanto	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00
2	Sewa Rusunawa	0,00	0,00	10.424.400,00	0,00	10.424.400,00
JUMLAH		24.750.000,00	0,00	10.424.400,00	0,00	35.174.400,00

ii. Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.214.265,76. Saldo ini merupakan reklasifikasi dari Piutang Pendapatan Bunga.

Saldo piutang tersebut muncul atas adanya penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* Transfer (TDF) sesuai dengan surat nomor: S-1210/WPB.16/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Buletin Teknis nomor 21 tentang Akuntansi Transfer berbasis Akrual pada point 4.3 Koreksi Utang - Piutang Transfer disebutkan bahwa “ Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan

b

penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar“ Berdasarkan hal tersebut untuk piutang transfer bagi hasil pemerintah pusat tidak terdapat penyisihan piutang.

Tabel 139. Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)
Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2024	Reklasifikasi/ Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	Remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas Treasury Deposit Facility Transfer ke daerah (TDF-TKD) Tahun 2022	0,00	3.214.265,76	0,00	0,00	3.214.265,76
JUMLAH		0,00	3.214.265,76	0,00	0,00	3.214.265,76

iii. Piutang Pendapatan Bunga

Saldo Piutang Pendapatan Bunga Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Semula saldo piutang pendapatan bunga tersebut muncul atas adanya penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* Transfer (TDF) sesuai dengan surat nomor: S-1210/WPB.16/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022. Namun pada tahun 2025 di reklasifikasi ke Piutang Remunerasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal Pemutakhiran Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF.

Tabel 140. Piutang Pendapatan Bunga Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2024	Reklasifikasi/ Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	Remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas Treasury Deposit Facility Transfer ke daerah (TDF-TKD) Tahun 2022	3.214.265,76	(3.214.265,76)	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		3.214.265,76	(3.214.265,76)	0,00	0,00	0,00

iv. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Saldo Piutang Atas Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.872.901,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2024	Reklas/koreksi/ Mutasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	TGR Kec. Kunir (Mulyadi setoran PBB)	9.268.059,00	0,00	0,00	0,00	9.268.059,00
2	TGR Kaur Keu. Desa Kabuaran (Tohari setoran PBB)	604.842,00	0,00	0,00	0,00	604.842,00
3	TGR Dinas Perikanan (Yunan Maulana Muhammad)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
JUMLAH		24.872.901,00	0,00	0,00	0,00	24.872.901,00

Tabel 142. Perhitungan Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	> 2 - 3 Tahun	15.000.000,00	50%	7.500.000,00
Macet	> 3 Tahun	9.872.901,00	100%	9.872.901,00
Jumlah		24.872.901,00		17.372.901,00

v. Piutang Pendapatan BLUD

Saldo piutang pendapatan BLUD sebesar Rp2.000.000,00 merupakan piutang atas kontribusi pengelolaan parkir pada RSUD Pasirian yang masih belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 143. Piutang Pendapatan BLUD

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2024	Reklasifikasi/ Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	RSUD PASIRIAN	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
JUMLAH		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Tabel 144. Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 Tahun	2.000.000,00	0,50%	10.000,00
Kurang Lancar	< 1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	> 2 - 3 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 3 Tahun	0,00	100%	0,00
Jumlah		2.000.000,00		10.000,00

vi. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp50.883.518.000,00. Jumlah tersebut merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil tahun 2024 dan belum mendapatkan informasi di tetapkan oleh Menteri Keuangan di tahun 2025.

Tabel 145. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2024	Reklasifikasi/ Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
	Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat					
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	2.693.345.000,00	2.344.538.000,00	0,00	0,00	5.037.883.000,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	2.009.293.000,00	7.213.375.000,00	0,00	0,00	9.222.668.000,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	472.531.000,00	1.934.478.000,00	0,00	0,00	2.407.009.000,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	2.282.452.000,00	7.499.471.000,00	0,00	0,00	9.781.923.000,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	3.202.587.000,00	17.447.878.000,00	0,00	0,00	20.650.465.000,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	2.654.902.000,00	(1.142.951.000,00)	0,00	0,00	1.511.951.000,00
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	5.563.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	11.743.000,00
8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.638.000,00	10.745.000,00	0,00	0,00	13.383.000,00
9	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	773.520.000,00	1.442.699.000,00	0,00	0,00	2.216.219.000,00
10	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan	0,00	30.274.000,00	0,00	0,00	30.274.000,00
	JUMLAH	14.096.831.000,00	36.786.687.000,00	0,00	0,00	50.883.518.000,00

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Buletin Teknis nomor 21 tentang Akuntansi Transfer berbasis Akrual pada point 4.3 Koreksi Utang - Piutang Transfer disebutkan bahwa “Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar“. Berdasarkan hal tersebut untuk piutang dana perimbangan tidak terdapat penyisihan piutang.

vii. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain merupakan piutang dari pengeluaran pembiayaan pemberian pinjaman kepada masyarakat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian . Saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar dan Rp7.759.511.724,00 dan Rp7.889.951.724,00

Pada tahun 2025 terdapat pengurangan sebesar Rp625.000,00 yang merupakan penerimaan kembali piutang pemberian pinjaman Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan serta sebesar Rp129.815.000,00 merupakan penerimaan kembali piutang pemberian pinjaman pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tabel 146. Piutang Lain-lain

Dalam Rupiah

No	Pemberian Pinjaman Leading Sektor	Saldo 31 Des 2024	Reklasifikasi/ Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2025
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan	7.044.087.700,00	0,00	0,00	625.000,00	7.043.462.700,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	845.864.024,00	0,00	0,00	129.815.000,00	716.049.024,00
JUMLAH		7.889.951.724,00	0,00	0,00	130.440.000,00	7.759.511.724,00

Tabel 147. Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain

Dalam Rupiah

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah (Rp)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Des 2025
Lancar	< 1 Tahun	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	< 1 – 2 Tahun	0,00	10%	0,00
Diragukan	> 2 - 3 Tahun	0,00	50%	0,00
Macet	> 3 Tahun	7.759.511.724,00	100%	7.759.511.724,00
Jumlah		7.759.511.724,00		7.759.511.724,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
i) Penyisihan Piutang	(23.073.707.247,15)	(19.574.654.478,48)
Terdiri dari:		
Penyisihan Piutang Pajak	(13.420.333.008,27)	(10.087.095.332,44)
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.844.177.491,88)	(1.547.974.521,04)
Penyisihan Piutang Lainnya	(7.809.196.747,00)	(7.939.584.625,00)
Jumlah Penyisihan Piutang	(23.073.707.247,15)	(19.574.654.478,48)

Rincian penyisihan piutang pajak, peyisihan piutang retribusi dan penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 148. Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Penyisihan Piutang	Nama SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2025	Koreksi / Reklas Penyisihan Piutang 2025	Penambahan Penyisihan Piutang 2025	Pengurangan Penyisihan Piutang 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH					
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame		4.793.089,97	1.507.500,00	2.131.420,50	911.895,75	7.520.114,72
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		36.186,20	95.730,40	158.158,90	9.233,10	280.842,40
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam		186.265.143,75	75.142.500,00	83.858.062,50	1.186.331,25	344.079.375,00
	Penyisihan Piutang PBB P2		9.879.448.901,50	0,00	3.423.168.231,78	253.857.475,28	13.048.759.658,00
	Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		16.552.011,03	1.877.280,00	17.815.738,15	16.552.011,03	19.693.018,15
	Jumlah		10.087.095.332,45	78.623.010,40	3.527.131.611,83	272.516.946,41	13.420.333.008,27

Tabel 149. Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Penyisihan Piutang	Nama SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2025	Koreksi / Reklas Penyisihan Piutang 2025	Penambahan Penyisihan Piutang 2025	Pengurangan Penyisihan Piutang 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	RETRIBUSI JASA UMUM		1.412.652.935,54	81.364.180,00	717.654.345,17	524.438.186,33	1.687.233.274,38
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		1.006.024.123,04	81.364.180,00	717.654.345,17	524.438.186,33	1.280.604.461,88
	A. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		3.381.735,00	0,00	4.906.650,69	876.735,00	7.411.650,69
		Puskesmas Tempursari	1.875.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	3.050.000,00
		Puskesmas Pronojiwo	0,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
		Puskesmas Candipuro	9.535,00	0,00	10.770,00	9.535,00	10.770,00
		Puskesmas Penanggal	0,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
		Puskesmas Pasirian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Puskesmas Bades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Puskesmas Tempeh	635.450,00		639.293,19	5.450,00	1.269.293,19
		Puskesmas Gesang	260.325,00	0,00	0,00	260.325,00	0,00
		Puskesmas Rogotrunan	155.900,00	0,00	0,00	155.900,00	0,00
		Puskesmas Labruk Kidul	140.300,00	0,00	0,00	140.300,00	0,00
		Puskemas Tekung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Puskemas Kunir	7.625,00	0,00	4.300,00	7.625,00	4.300,00
		Puskesmas Yosowilangun	224.300,00		367.550,00	224.300,00	367.550,00
		Puskemas Sumbersari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Puskesmas Jatiroto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Puskesmas Randuagung	0,00	0,00	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
		Puskesmas Sukodono	9.275,00	0,00	220.487,50	9.275,00	220.487,50
		Puskesmas Padang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Puskesmas Pasrujambe	7.230,00		4.930,00	7.230,00	4.930,00

No.	Jenis Penyisihan Piutang	Nama SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2025	Koreksi / Reklas Penyisihan Piutang 2025	Penambahan Penyisihan Piutang 2025	Pengurangan Penyisihan Piutang 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
		Puskesmas Senduro	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00
		Puskesmas Gucialit	0,00	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00
		Pukesmas Kedungjajang	47.220,00	0,00	75.370,00	47.220,00	75.370,00
		Puskesmas Klakah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Puskesmas Ranuyoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Puskesmas Tunjung	4.255,00	0,00	0,00	4.255,00	0,00
	B. Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah		1.002.642.388,04	81.364.180,00	712.747.694,48	523.561.451,33	1.273.192.811,19
		RSUD Pasirian	8.604.299,33	81.364.180,00	10.037.621,09	79.061.974,32	20.944.126,10
		RSUD dr. Haryoto	994.038.088,71	0,00	702.710.073,39	444.499.477,01	1.252.248.685,09
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar		5.612.812,50	0,00	0,00	0,00	5.612.812,50
	A. Piutang Retribusi Pelayanan pasar-Pelataran	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5.612.812,50	0,00	0,00	0,00	5.612.812,50
	Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		401.016.000,00	0,00	0,00	0,00	401.016.000,00
	A. Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	401.016.000,00	0,00	0,00	0,00	401.016.000,00
2	RETRIBUSI JASA USAHA		135.321.585,50	0,00	24.543.332,00	2.920.700,00	156.944.217,50
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		110.028.444,50	0,00	22.852.073,00	2.920.700,00	129.959.817,50
	A. Penyisihan Piutang Sewa Pemakaian Tanah Stren Kali	Dinas PUTR	110.028.444,50	0,00	22.852.073,00	2.920.700,00	129.959.817,50
							0,00
	B. Penyisihan Piutang Sewa ruang Auditorium Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Terminal		25.293.141,00	0,00	1.691.259,00	0,00	26.984.400,00
	A. Penyisihan Piutang Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan	25.293.141,00	0,00	1.691.259,00	0,00	26.984.400,00
	Jumlah (1+2)		1.547.974.521,04	81.364.180,00	742.197.677,17	527.358.886,33	1.844.177.491,88

Tabel 150. Daftar Mutasi Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Penyisihan Piutang	Nama SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2025	Koreksi / Reklas Penyisihan Piutang 2025	Penambahan Penyisihan Piutang 2025	Pengurangan Penyisihan Piutang 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah		49.632.901,00	0,00	62.122,00	10.000,00	49.685.023,00
	a. penyisihan piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		24.750.000,00	0,00	52.122,00	0,00	24.802.122,00
	- Sewa kebun dinas a.n Puryanto	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.750.000,00	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00
	- Sewa Rusunawa	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	52.122,00	0,00	52.122,00
	b. penyisihan piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	BPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas Treasury Deposit Facility Transfer ke daerah (TDF-TKD) Tahun 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. penyisihan piutang Pendapatan Bunga	BPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. penyisihan piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	BPKD	24.872.901,00	0,00	0,00	0,00	24.872.901,00
	TGR Kec. Kunir (Mulyadi setoran PBB)		9.268.059,00	0,00	0,00	0,00	9.268.059,00
	TGR Kaur. Keu. Desa Kabuaran (Tohari setoran PBB)		604.842,00	0,00	0,00	0,00	604.842,00
	TGR Dinas Perikanan (Yunan Maulana Muhammad)		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	e. penyisihan piutang Pendapatan BLUD	RSUD Pasirian	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Kontribusi Pengelolaan Parkiran		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	penyisihan piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. penyisihan piutang Dana Perimbangan	BPKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Jenis Penyisihan Piutang	Nama SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2025	Koreksi / Reklas Penyisihan Piutang 2025	Penambahan Penyisihan Piutang 2025	Pengurangan Penyisihan Piutang 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	penyisihan piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	penyisihan piutang Lainnya		7.889.951.724,00	0,00	0,00	130.440.000,00	7.759.511.724,00
	a. penyisihan piutang Lain-lain	BPKD	7.889.951.724,00	0,00	0,00	130.440.000,00	7.759.511.724,00
	penyisihan piutang Atas Pinjaman Modal Kepada Masyarakat - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan		7.043.937.700,00	0,00	0,00	625.000,00	7.043.312.700,00
	penyisihan piutang Atas Pinjaman Modal Kepada Masyarakat - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		846.014.024,00	0,00	0,00	129.815.000,00	716.199.024,00
	Jumlah (1+2+3)		7.939.584.625,00	0,00	62.122,00	130.450.000,00	7.809.196.747,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
j) Persediaan	74.100.366.010,74	61.798.763.925,46

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian diukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 151. Daftar Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Persediaan	2025	2024
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	807.174.751,83	572.454.018,87
2	Bahan Kimia	1.548.933.022,10	1.245.074.479,96
3	Bahan Baku	97.000,00	6.960.500,00
4	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	81.200,00
5	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.700.000,00	0,00
6	Isi Tabung Gas	128.271.655,12	148.255.568,83
7	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	185.761.400,00	183.600.000,00
8	Bahan Lainnya	29.522.320.963,24	22.881.939.960,24
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	12.890.000,00	12.890.000,00
10	Alat Tulis Kantor	3.832.855.486,60	3.956.229.889,82
11	Kertas dan Cover	1.204.694.873,79	1.157.418.379,88
12	Bahan Cetak	3.916.923.174,77	2.960.547.104,29

No	Persediaan	2025	2024
13	Benda Pos	16.074.500,00	21.097.000,00
14	Bahan Komputer	739.260,00	0,00
15	Perabot Kantor	23.762.120,00	38.545.380,00
16	Alat Listrik	1.497.203.793,77	655.198.817,43
17	Perlengkapan Dinas	33.370.000,00	104.150.000,00
18	Perlengkapan Pendukung Olahraga	102.907.700,00	82.101.035,00
19	Suvenir/Cendera Mata	12.332.100,00	16.500.000,00
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	3.500,00
21	Obat	25.135.830.450,67	19.630.500.356,78
22	Obat-obatan Lainnya	328.035.520,81	435.854.789,86
23	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.054.283.127,60	7.097.468.762,08
24	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	416.398.950,00	317.915.000,00
25	Natura	291.490.735,44	241.297.057,22
26	Natura dan Pakan Lainnya	25.315.425,00	32.681.125,20
JUMLAH		74.100.366.010,74	61.798.763.925,46

Tabel 152. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	14.155.550,00
2	DINKES P2KB	3.505.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	788.044.201,83
4	Inspektorat Daerah	1.470.000,00
Jumlah		807.174.751,83

Tabel 153. Persediaan Bahan Kimia

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	6.679.024,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	20.607.372,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	9.137.609,36
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	70.673.571,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	20.123.400,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	18.343.860,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	11.407.328,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	48.227.280,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	22.484.160,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	20.300.679,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	480.000,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	22.991.165,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	32.639.430,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	181.764,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	62.806.500,00
16	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	970.092.069,34

No	Nama SKPD	Jumlah
17	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	211.757.810,40
Jumlah		1.548.933.022,10

Tabel 154. Persediaan Bahan Baku

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	97.000,00
Jumlah		97.000,00

Tabel 155. Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	2.700.000,00
Jumlah		2.700.000,00

Tabel 156. Persediaan Isi Tabung Gas

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	1.134.420,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	672.660,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	310.800,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	1.811.520,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	781.440,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	1.838.160,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	352.980,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	395.160,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	579.420,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	941.280,00
11	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	49.921.140,00
12	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	64.148.065,12
13	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	5.384.610,00
Jumlah		128.271.655,12

Tabel 157. Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perikanan	185.761.400,00
Jumlah		185.761.400,00

Tabel 158. Persediaan Bahan Lainnya

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	177.093.800,00
2	DINKES P2KB	43.041.457,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	412.429.570,26

No	Nama SKPD	Jumlah
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	352.380.375,62
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	522.207.627,09
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	399.813.747,92
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	746.897.649,83
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	449.833.772,89
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	679.806.216,75
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	349.487.032,82
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	961.914.374,49
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	293.754.724,99
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	328.281.324,10
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	192.886.884,80
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	316.851.159,90
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Summersari	372.065.413,73
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	585.428.563,33
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	358.734.723,06
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	659.140.040,13
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	377.569.514,40
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	387.823.187,95
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	493.952.889,42
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	146.118.762,93
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	631.071.483,41
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	873.664.200,10
26	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	131.561.184,60
27	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	240.774.083,50
28	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	123.128.062,30
29	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	9.924.694.342,56
30	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	5.045.430.386,83
31	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	2.802.203.780,53
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17.775.580,00
33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	103.508,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja	188.715,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00
36	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.720.000,00
37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	536.000,00
38	Dinas Lingkungan Hidup	10.394.040,00
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	133.755,00
40	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97.958,00
41	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	668.998,00
42	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	379.600,00
43	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	7.514.521,00
44	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	65.021.415,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	386.000,00
46	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	22.345.000,00
47	Badan Kepegawaian Daerah	323.300,00

No	Nama SKPD	Jumlah
48	Inspektorat Daerah	12.210,00
49	Kecamatan Sukodono	510.000,00
50	Kecamatan Senduro	244.000,00
51	Kecamatan Tempeh	643.356,00
52	Kecamatan Candipuro	173.500,00
53	Kecamatan Jatiroto	109.170,00
Jumlah		29.522.320.963,24

Tabel 159. Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.890.000,00
Jumlah		12.890.000,00

Tabel 160. Persediaan Alat Tulis Kantor

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	511.015.547,50
2	DINKES P2KB	80.667.370,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	5.806.928,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	5.787.916,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	34.279.728,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	31.591.301,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	39.762.213,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	20.201.466,14
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	41.119.606,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	47.076.605,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	26.560.460,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	38.413.390,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	41.020.380,17
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	147.001.841,67
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	50.816.293,33
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	35.194.648,33
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	52.376.135,92
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	25.262.921,08
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	42.224.940,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	30.249.001,10
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	16.264.330,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	10.543.300,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	39.322.728,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	49.798.545,48
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	64.658.620,60
26	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	21.639.030,50
27	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	47.887.701,50

b

No	Nama SKPD	Jumlah
28	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	18.295.525,25
29	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	2.211.675,00
30	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	236.185.601,25
31	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	311.510.128,33
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19.798.972,50
33	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.623.315,00
34	Satuan Polisi Pamong Praja	16.650,00
35	DINSOS P3A	9.862.490,00
36	Dinas Tenaga Kerja	473.637,00
37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	780.330,00
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	828.644.780,60
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.269.616,00
40	Dinas Perhubungan	231.465,54
41	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.865,00
42	DISKOPINDAG	19.272.375,00
43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	700.095,92
44	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.891.540,28
45	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pemerintahan	3.932.910,00
46	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	4.867.975,00
47	Sekretariat Daerah - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2.397.379,00
48	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	2.258.500,00
49	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	15.554.291,50
50	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	290.742.685,00
51	Sekretariat DPRD	10.284.746,00
52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.448.715,00
53	Badan Pengelola Keuangan Daerah	317.601.008,66
54	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	158.649.506,45
55	Badan Kepegawaian Daerah	1.457.316,00
56	Inspektorat Daerah	996.336,00
57	Kecamatan Lumajang	423.000,00
58	Kecamatan Senduro	22.500,00
59	Kecamatan Pasrujambe	388.874,00
60	Kecamatan Tempeh	1.301.919,00
61	Kecamatan Candipuro	128.500,00
62	Kecamatan Pronojiwo	210.900,00
63	Kecamatan Tempursari	301.280,00
64	Kecamatan Kunir	1.499.854,00
65	Kecamatan Tekung	895.770,00
66	Kecamatan Randuagung	156.510,00
	Jumlah	3.832.855.486,60

Tabel 161. Persediaan Kertas dan Cover

		Dalam Rupiah
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	276.613.651,60
2	DINKES P2KB	95.884.000,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	2.897.100,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	4.408.090,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	6.607.315,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	41.444.965,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	310.224,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	21.634.062,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	15.232.927,20
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	6.571.995,80
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	8.573.000,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	34.052.600,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	33.862.000,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	12.110.300,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	10.906.100,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	30.005.965,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	16.500.568,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	12.553.000,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	4.792.536,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	17.282.000,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	3.780.000,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	8.640.173,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	6.433.710,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	24.512.815,00
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	12.897.645,00
26	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	13.951.566,00
27	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	37.264.170,00
28	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	2.331.161,00
29	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	139.688.020,23
30	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	104.048.292,47
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.393.882,90
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	271.950,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	263.070,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	324.500,00
35	DINSOS P3A	319.680,00
36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.027.077,59
37	Dinas Lingkungan Hidup	271.000,00
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.451.880,00
39	Dinas Perhubungan	324.570,00
40	DISKOPINDAG	7.469.700,00
41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	552.500,00
42	Dinas Pemuda dan Olahraga	454.300,00

No	Nama SKPD	Jumlah
43	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.730.000,00
44	Dinas Perikanan	598.002,00
45	Dinas Pariwisata	305.250,00
46	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pemerintahan	385.001,00
47	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	300.000,00
48	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.403.002,00
49	Sekretariat Daerah - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	736.501,00
50	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	300.000,00
51	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	47.963.510,00
52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.929.262,00
53	Badan Pengelola Keuangan Daerah	34.969.920,00
54	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	66.823.978,00
55	Badan Kepegawaian Daerah	64.850,00
56	Inspektorat Daerah	5.044.950,00
57	Kecamatan Lumajang	194.100,00
58	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Citrodiwangsan	430.400,00
59	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Ditotrunan	430.400,00
60	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogotrunan	664.400,00
61	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogoyudan	129.800,00
62	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Tompokersan	516.000,00
63	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Rogotrunan	410.250,00
64	Kecamatan Gucialit	321.345,00
65	Kecamatan Pasrujambe	903.000,00
66	Kecamatan Sumpersuko	1.480.000,00
67	Kecamatan Tempeh	1.052.800,00
68	Kecamatan Pasirian	108.000,00
69	Kecamatan Candipuro	788.750,00
70	Kecamatan Pronojiwo	621.600,00
71	Kecamatan Tempursari	638.400,00
72	Kecamatan Kunir	1.140.000,00
73	Kecamatan Yosowilangun	973.485,00
74	Kecamatan Tekung	1.058.940,00
75	Kecamatan Rowokangkung	324.500,00
76	Kecamatan Klakah	131.424,00
77	Kecamatan Ranuyoso	835.941,00
78	Kecamatan Kedungjajang	573.300,00
79	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.499.750,00
	Jumlah	1.204.694.873,79

Tabel 162. Persediaan Bahan Cetak

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	56.179.254,25
2	DINKES P2KB	19.308.870,00

No	Nama SKPD	Jumlah
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	18.709.136,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	11.005.730,29
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	6.198.920,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	4.426.000,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	6.923.420,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	9.564.308,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	80.211.323,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	48.396.555,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	36.707.100,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	7.237.700,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	3.724.050,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	81.335.047,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	13.847.975,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	29.645.901,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	26.165.050,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	37.142.865,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	1.520.029,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	51.194.518,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	19.640.000,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	1.725.000,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	21.559.805,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	11.526.551,00
25	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	24.756.850,00
26	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	483.000,00
27	DINKES P2KB - UPT RSUD dr Haryoto	331.445.113,98
28	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	354.847.522,81
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16.842.650,00
30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	455.100,00
31	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	527.882,10
32	Dinas Lingkungan Hidup	34.080.900,00
33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.038.566,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	904.000,00
35	Dinas Perhubungan	217.043.576,61
36	DISKOPINDAG	70.188.136,00
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22.203.075,00
38	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.451.674,00
39	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	361.474,00
40	Dinas Pariwisata	63.729.807,00
41	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.378.176,00
42	Sekretariat Daerah - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	400.932,00
43	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	507.825,00
44	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	40.099.320,00
45	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	111.784.061,00
46	Sekretariat DPRD	614.190,00

No	Nama SKPD	Jumlah
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	410.000,00
48	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.416.995.775,73
49	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	566.123.000,00
50	Badan Kepegawaian Daerah	292.770,00
51	Kecamatan Sukodono	185.000,00
52	Kecamatan Gucialit	88.800,00
53	Kecamatan Tempeh	451.200,00
54	Kecamatan Tekung	245.000,00
55	Kecamatan Jatiroto	92.690,00
Jumlah		3.916.923.174,77

Tabel 163. Persediaan Benda Pos

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	11.354.500,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	200.000,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	700.000,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	610.000,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	1.050.000,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	180.000,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	170.000,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	620.000,00
9	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	1.190.000,00
Jumlah		16.074.500,00

Tabel 164. Persediaan Bahan Komputer

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	739.260,00
Jumlah		739.260,00

Tabel 165. Persediaan Perabot Kantor

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	3.000.000,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	1.911.000,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	15.988.720,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	169.400,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	648.000,00
6	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	2.045.000,00
Jumlah		23.762.120,00

Tabel 166. Persediaan Alat Listrik

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	85.513.181,50
2	DINKES P2KB	46.684.590,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	1.500.975,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	4.956.150,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	6.455.850,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	3.728.397,50
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	8.111.540,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	9.860.130,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	4.270.170,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	11.355.102,50
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	20.086.010,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	17.056.924,50
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	1.425.240,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	8.308.350,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	3.519.260,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	10.869.370,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	7.061.666,67
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	794.905,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	4.619.215,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	2.504.600,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	12.100.221,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	4.600.360,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	2.801.866,00
24	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	144.000,00
25	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	117.000,00
26	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	30.170.499,63
27	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	200.362.258,33
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.383.530,00
29	Dinas Ketahanan dan Pertanian	1.863.135,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	138.500,00
31	Dinas Perhubungan	857.057.690,14
32	DISKOPINDAG	7.474.185,00
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	300.800,00
34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.462.879,00
35	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	73.433.826,00
36	Sekretariat DPRD	11.513.525,00
37	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	11.608.475,00
38	Badan Kepegawaian Daerah	244.200,00
39	Inspektorat Daerah	502.830,00
40	Kecamatan Sukodono	525.400,00
41	Kecamatan Pasrujambe	564.000,00
42	Kecamatan Tempeh	1.010.655,00
43	Kecamatan Candipuro	255.822,00

No	Nama SKPD	Jumlah
44	Kecamatan Tekung	590.250,00
45	Kecamatan Jatiroto	61.050,00
46	Kecamatan Kedungjajang	235.209,00
Jumlah		1.497.203.793,77

Tabel 167. Persediaan Perlengkapan Dinas

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB – UPT RSUD Pasirian	33.370.000,00
Jumlah		33.370.000,00

Tabel 168. Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	102.907.700,00
Jumlah		102.907.700,00

Tabel 169. Persediaan Suvenir/Cendera Mata

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	12.332.100,00
Jumlah		12.332.100,00

Tabel 170. Persediaan Obat

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	57.368.550,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	205.566.541,49
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	228.268.210,22
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	318.711.117,90
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	208.525.104,80
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	411.711.346,49
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	178.139.841,45
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	384.720.061,24
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	163.376.465,53
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	289.406.301,15
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	231.623.944,70
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	134.407.599,54
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	279.495.742,18
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	268.084.250,93
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	205.101.986,95
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	231.911.819,10

No	Nama SKPD	Jumlah
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	110.408.370,87
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	280.590.583,28
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	172.802.885,59
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	216.960.027,46
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	230.783.392,94
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	128.651.206,12
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	371.186.165,67
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	369.021.059,16
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	209.292.144,64
26	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	113.456.217,68
27	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	14.633.518.020,55
28	DINKES P2KB - UPT RSUD dr Haryoto	3.162.870.438,57
29	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	1.166.832.107,47
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	173.038.947,00
	Jumlah	25.135.830.450,67

Tabel 171. Persediaan Obat-obatan Lainnya

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	997.890,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	46.899.137,03
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	36.332.270,62
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	22.054.800,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	87.725.385,04
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	12.976.600,12
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	42.103.603,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	2.775.000,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	6.875.340,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	34.650,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	8.698.900,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	897.595,00
13	DINSOS P3A	2.630.700,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.923.050,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.600,00
	Jumlah	328.035.520,81

Tabel 172. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	5.414.757,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	113.539.820,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	138.951.882,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	177.678.060,00

No	Nama SKPD	Jumlah
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	87.754.738,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	206.351.690,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	157.750.086,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	22.089.600,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	109.082.554,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	190.949.570,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	266.877.159,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	3.024.000,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	115.727.785,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	132.090.552,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	189.644.356,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	199.423.102,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	248.752.006,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	4.941.942,00
19	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	282.750.000,00
20	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	2.104.290,00
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	497.162.000,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.486.652.354,00
23	DINSOS P3A	124.960.616,00
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.729.681,60
25	Dinas Lingkungan Hidup	163.640.002,00
26	Dinas Perikanan	51.090.525,00
27	Inspektorat Daerah	6.500.000,00
28	Kecamatan Candipuro	12.650.000,00
	Jumlah	5.054.283.127,60

Tabel 173. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	416.398.950,00
	Jumlah	416.398.950,00

Tabel 174. Persediaan Natura

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINDIKBUD	40.000,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	5.021.300,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	32.289.080,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	917.650,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	2.711.914,51
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	842.330,00

No	Nama SKPD	Jumlah
7	DINKES P2KB - UPT RSUD dr Haryoto	187.300.578,93
8	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	62.367.882,00
	Jumlah	291.490.735,44

Tabel 175. Persediaan Natura dan Pakan Lainnya

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	3.696.530,00
2	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	21.618.895,00
	TOTAL	25.315.425,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b. INVESTASI JANGKA PANJANG	49.892.261.042,84	41.518.694.472,38

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi jangka panjang pemerintah Kabupaten Lumajang berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jatim, Tbk, PT BPR Jatim, Perumda BPR Bank Lumajang, Perumda Semeru dan Perumda Air Minum Tirta Mahameru.

Terhadap PT Bank Jatim Tbk dan PT BPR Jatim, pemerintah Kabupaten Lumajang adalah pemegang saham minoritas sehingga penyertaan modal dicatat menggunakan metode biaya. Sedangkan terhadap Perumda BPR Bank Lumajang, Perumda Semeru dan Perumda Air Minum Tirta Mahameru, pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham mayoritas (pengendali) penyertaan modal pada perusahaan tersebut dicatat menggunakan metode ekuitas.

Kebijakan akuntansi terhadap metode penilaian investasi sebagai berikut:

Tabel 176. Metode Penilaian Investasi

Dalam Rupiah					
No	Nama Perusahaan	% Kepemilikan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal Per Lembar	Metode Penilaian
1	PT Bank Jatim, Tbk	0,45%	67.206.045	250,00	Metode Biaya
2	PT BPR Jatim	0,35%	14.900	100.000,00	Metode Biaya
3	Perumda BPR Bank Lumajang	100%	0,00	0,00	Metode Ekuitas
4	Perumda Semeru	100%	0,00	0,00	Metode Ekuitas
5	Perumda Air Minum Tirta Mahameru	100%	0,00	0,00	Metode Ekuitas

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	49.892.261.042,84	41.518.694.472,38

Saldo Investasi Permanen – Penyertaan Modal per 31 Desember 2025 dan 2024 pada beberapa perusahaan daerah, terinci sebagai berikut:

**Tabel 177. Perkembangan Investasi Jangka Panjang-Penyertaan Modal
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah						
No	Nama Perusahaan	1 Januari 2025	Koreksi Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6
1	PT. Bank Jatim	16.801.511.250,00	0,00	0,00	0,00	16.801.511.250,00
2	PT. BPR Jatim	1.490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000.000,00
3	BPR Bank Pasar (Bank Lumajang)	10.854.750.870,90	0,00	1.959.060.990,00	528.565.869,15	12.285.245.991,75
4	PD. Semeru	2.292.887.160,51	36.433.959,42	0,00	45.903.108,49	2.283.418.011,44
5	PDAM	10.079.545.190,97	6.097.203.259,28	3.276.781.437,00	2.421.444.097,60	17.032.085.789,65
	Jumlah	41.518.694.472,38	6.133.637.218,70	5.235.842.427,00	2.995.913.075,24	49.892.261.042,84

Koreksi Penyertaan Modal sebesar Rp6.133.637.218,70 merupakan :

1) Koreksi Perumda Semeru sebesar Rp36.433.959,42 atas:

a. Koreksi Hutang Pajak senilai Rp70.513.743,00.

Merupakan koreksi tahun 2024 atas tagihan pajak tahun buku 2020 s/d 2024 untuk perhitungan hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang didasarkan pada perhitungan Account Representatif/petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama tetapi tidak didasarkan pada bukti tagihan dan tidak terdapat bukti tagihan pajaknya.

b. Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp30.951.066,94) merupakan :

- Aset yang telah laku terjual tetapi masih tercatat dalam neraca audited 2024 yaitu aset sebesar (Rp28.125.000,00).

- Kesalahan pencatatan nilai aset sebesar (Rp2.826.066,94) yang seharusnya bukan merupakan aset tetap tetapi merupakan barang ekstrakomptabel.

c. Koreksi penyisihan piutang UD. Hidayah sebesar (Rp3.128.716,64)

Merupakan koreksi lebih catat atas penyisihan piutang tak tertagih 2024, karena kesalahan hitung persentase penyisihan piutang 2024.

2) Koreksi Perumda Air Minum Tirta Mahameru sebesar Rp6.097.203.259,28 merupakan :

a. Koreksi kurang catat atas saldo awal cadangan umum sebesar Rp6.747.216.503,35 yang kurang catat saldo akhir penyertaan modal tahun 2024 atas nilai cadangan umum tahun 2017 s/d 2024 di neraca yang sebelumnya diakui sebagai kewajiban dan berdasarkan SAK entitas Privat bagi BUMD Air Minum Perpamsi agustus 2024 bahwa Dana Cadangan merupakan komponen ekuitas sehingga harus diakui sebagai penambah penyertaan modal BUMD senilai Rp6.747.216.503,35.

b) Koreksi kurang catat saldo penyertaan modal sebesar Rp352.958.664,00 berdasarkan hasil audit KAP 2024 yang terdiri atas penerimaan bantuan dari bank tabungan negara tahun 2017 senilai Rp198.194.000,00, bantuan dari IUWASH PLUS tahun 2014

senilai Rp152.584.414,00, hadiah dari Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tahun 2022 – 2024 senilai Rp2.180.250,00 yang tercatat sebelumnya sebagai pendapatan ditangguhkan di neraca tetapi seharusnya merupakan komponen pendapatan dilaporkan Laba/Rugi Perumda Air Minum Tirta Mahameru.

- c) Koreksi lebih catat saldo akhir penyertaan modal tahun 2024 atas hasil audit KAP terhadap laba perusahaan sebesar Rp1.033.406.066,07 (laba unaudited sebesar Rp4.060.211.188,07 menjadi audited sebesar Rp3.026.805.122,00).
- d) Koreksi kurang catat penyertaan modal sebesar Rp 30.434.158,00 karena adanya penyajian kembali atas Laporan Keuangan audited tahun 2024 berdasarkan penerapan kebijakan akuntansi sesuai SAK Indonesia untuk entitas privat yang mengakibatkan penyesuaian kebijakan akuntansi tertentu dan berdampak pada perubahan akun aset pajak tangguhan, laba tahun berjalan dan manfaat (beban) pajak tangguhan.

Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp5.235.842.427,00 meliputi:

- 1) Penambahan pada Perumda BPR Bank Lumajang sebesar Rp1.959.060.990,00 merupakan pengakuan atas laba bersih tahun 2025.
- 2) Penambahan pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru sebesar Rp3.276.781.437,00 merupakan pengakuan atas laba bersih tahun 2025.

Pengurangan Penyertaan Modal sebesar Rp2.995.913.075,24 terdiri dari:

- 1) Setoran bagian laba Perumda BPR Bank Lumajang kepada Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebesar Rp528.565.869,15.
- 2) Rugi Perumda Semeru tahun 2025 sebesar Rp45.903.108,49.
- 3) Setoran bagian laba Perumda Tirta Mahameru sebesar Rp1.664.742.817,10, alokasi Dana Sosial dan Pendidikan Rp302.680.512,20, Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan Rp302.680.512,20, Jasa Produksi Rp151.340.256,10 = Rp2.421.444.097,60.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
(1) Penyertaan Modal		
pada Bank Jatim	16.801.511.250,00	16.801.511.250,00

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham seri A sebanyak 67.206.045 lembar dari 11.934.147.982 lembar saham seri A yang dikeluarkan oleh Perseroan (0,45%), oleh karenanya kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mencatat investasi dan pendapatan dari hasil investasi adalah metode biaya, dimana pendapatan dari hasil investasi (dividen) dicatat sebagai pendapatan dan tidak diakui sebagai penambahan investasi.

Atas penyertaan modal pada PT Bank Jatim, Tbk pada Tahun 2025 diperoleh pendapatan dividen tunai atas laba bersih Tahun 2024 sebesar Rp3.676.842.721,95 dan pada Tahun 2024 diperoleh pendapatan dividen tunai atas laba bersih Tahun 2023 sebesar Rp3.655.336.787,55.

Pada Tahun 2025 tidak ada penambahan maupun penarikan kembali penyertaan modal pada PT Bank Jatim, Tbk. Rincian penyertaan modal pada PT Bank Jatim Tbk sebagai berikut:

Tabel 178. Perkembangan Penyertaan Modal Pada Bank Jatim

Dalam Rupiah

Tahun	Nominal	Keterangan
s/d 2007	4.139.779.323,71	Perda. No. 02 Th. 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT Bank Jatim
2008	1.500.000.000,00	Perda. No. 08 Th. 2008 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT Bank Jatim
2011	1.000.000.000,00	Perda. No. 07 Th. 2011 tentang Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT Bank Jatim
2012	9.508.511.250,00	Perda. No. 03 Th. 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kab. Lumajang pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Penerimaan Dana Cadangan Umum Bank Jatim yang dikonversi menjadi saham)
2018	653.220.676,29	Pengakuan atas stock dividen Tahun 2007 (Perda No. 17 Tahun 2018)
Jumlah	16.801.511.250,00	67.206.045 lembar @ Rp.250,00

	31 Desember 2025 (Rp)	32 Desember 2024 (Rp)
(2) Penyertaan Modal pada PT BPR Jatim	1.490.000.000,00	1.490.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pemegang saham minoritas dengan kepemilikan saham sebanyak 14.900 lembar dari 3.994.823 lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (0,35%), oleh karenanya kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mencatat investasi dan pendapatan dari hasil investasi adalah metode biaya, dimana pendapatan dari hasil investasi (dividen) dicatat sebagai pendapatan dan tidak diakui sebagai penambahan investasi.

Pada Tahun 2025 tidak ada penambahan maupun penarikan kembali penyertaan modal pada PT BPR Jatim. Rincian jumlah setoran modal pembelian saham PT BPR Jatim sebagai berikut:

Tabel 179. Perkembangan Penyertaan Modal Pada BPR Jatim

Dalam Rupiah

Tahun	Nominal	Keterangan
2001	60.000.000,00	Setoran tunai
2002	180.000.000,00	Setoran tunai
2004	150.000.000,00	Setoran tunai
2005	100.000.000,00	Setoran tunai
2006	100.000.000,00	Setoran tunai
2007	200.000.000,00	Setoran tunai
2008	200.000.000,00	Setoran tunai
2012	500.000.000,00	Setoran tunai
Jumlah	1.490.000.000,00	

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(3) Penyertaan Modal Perumda BPR Bank Lumajang	12.285.245.991,75	10.854.750.870,90

Perumda BPR Bank Lumajang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 03 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang. Pada Tahun 2005 berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang. Pada Tahun 2020 Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang.

Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 100%, sehingga pencatatan investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas, dimana Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih Perumda BPR Bank Lumajang sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100%. Bagian laba yang diterima dari Perumda BPR Bank Lumajang dicatat sebagai pengurang penyertaan modal sebesar jumlah bagian laba yang diterima.

Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017, bahwa modal dasar Perumda BPR Bank Lumajang sebesar Rp18.475.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Jumlah modal disetor sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp18.475.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terinci sebagai berikut:

- Modal disetor berupa uang s/d Tahun 2017 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
- Modal disetor berupa penyerahan aset tetap tanah dan bangunan dengan nilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Tambahan modal disetor berupa uang pada Tahun 2018 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melalui pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dalam APBD 2018.
- Tambahan modal disetor berupa uang pada Tahun 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dalam APBD 2019.

Saldo penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Lumajang dan rincian modal disetor per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 180. Penyertaan Modal Pada Perumda BPR Bank Lumajang

Keterangan	Dalam Rupiah	
	2025	2024
1. Modal disetor	18.475.000.000,00	18.475.000.000,00
2. Tambahan Modal disetor	0,00	0,00
3. Jumlah modal disetor s/d 2018 (1+2)	18.475.000.000,00	18.475.000.000,00
4. Saldo laba (rugi) tahun lalu	(7.620.249.129,10)	(8.496.198.871,10)
5. Laba tahun berjalan	1.959.060.990,00	961.028.853,00

b

Keterangan	2025	2024
6. Koreksi saldo laba tahun lalu	0,00	(12.466.094,00)
7. Surplus Revaluasi Aset Tetap	0,00	310.440.000,00
8. Setoran bagian laba kepada Pemda	(528.565.869,15)	(383.053.017,00)
9. Jumlah saldo laba (rugi) (4+5+6+7)	(6.189.754.008,25)	(7.620.249.129,10)
10. Jumlah Penyertaan Modal (3+8)	12.285.245.991,75	10.854.750.870,90

Tabel 181. Jumlah Modal Disetor-Penyertaan Modal pada Perumda BPR Bank Lumajang
Dalam Rupiah

Tahun	Nominal	Keterangan
2003	1.377.413.000,00	Jumlah s/d 2003
2003	975.000.000,00	Tanah dan Bangunan
2004	622.587.000,00	
2005	4.000.000.000,00	
2006	6.000.000.000,00	
2012	500.000.000,00	
2018	3.000.000.000,00	
2019	2.000.000.000,00	
Jumlah	18.475.000.000,00	

Pada 2025 modal inti Perumda BPR Bank Lumajang telah mencapai Rp12.285.245.991,75 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah koma tujuh lima sen).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(4) Penyertaan Modal Pada Perumda Semeru	2.283.418.011,44	2.292.887.160,51

Perumda Semeru merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Lumajang. Pada Tahun 2020 Perusahaan Daerah Semeru berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Semeru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Semeru.

Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018, modal dasar Perumda Semeru Kabupaten Lumajang sampai dengan 31 Desember 2017 ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan modal disetor setelah 31 Desember 2017 ditetapkan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah). Jumlah modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang sampai dengan Tahun 2025 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Metode penilaian investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih Perumda Semeru sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100% dan mencatat pembagian laba sebagai pengurang penyertaan modal sebesar bagian laba yang diterima.

Saldo penyertaan modal pada Perumda Semeru dan jumlah modal disetor per 31 Desember 2025 dan 2024, terinci sebagai berikut:

Tabel 182. Penyertaan Modal Pada Perumda Semeru Lumajang

Dalam Rupiah

Keterangan	2025	2024
1. Modal disetor	7.000.000.000,00	6.500.000.000,00
2. Tambahan penyertaan modal	0,00	500.000.000,00
3. Jumlah modal disetor (2+3)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
4. Saldo laba (rugi) tahun lalu	(4.707.112.839,49)	(3.692.693.092,49)
5. Koreksi Laba (rugi) tahun lalu	36.433.959,42	(342.792.992,00)
6. Laba tahun berjalan	(45.903.108,49)	(671.626.755,00)
7. Setoran bagian laba kepada Pemda	0,00	0,00
8. Corporate Socil Responsibility (CSR)	0,00	0,00
9. Jumlah saldo laba (rugi) (4+5+6+7+8)	(4.716.581.988,56)	(4.707.112.839,49)
10. Jumlah Penyertaan Modal (3+9)	2.283.418.011,44	2.292.887.160,51

Tabel 183. Jumlah Modal Disetor - Penyertaan Modal Pada PD Semeru Kabupaten Lumajang

Dalam Rupiah

Tahun	Nominal
2004	200.000.000,00
2005	1.000.000.000,00
2013	500.000.000,00
2014	800.000.000,00
2018	1.000.000.000,00
2019	2.000.000.000,00
2021	500.000.000,00
2022	500.000.000,00
2024	500.000.000,00
Jumlah	7.000.000.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
(5) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru	17.032.085.789,65	10.079.545.190,97

Perumda Air Minum Tirta Mahameru merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 18 September 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang. Pada Tahun 2020 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru.

Di dalam Perda Perumda Air Minum Tirta Mahameru telah ditentukan besarnya modal dasar. Metode penilaian investasi yang diterapkan adalah metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengakui laba (rugi) bersih Perumda Air Minum Tirta Mahameru sebagai penambah (pengurang) penyertaan modal sebesar 100%.

Perkembangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru sebagai berikut:

Tabel 184. Perkembangan Penyertaan Modal Pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru

Dalam Rupiah		
Keterangan	2025	2024
1. Modal disetor	61.024.725.983,76	61.024.725.983,76
2. Tambahan modal disetor berupa uang	0,00	0,00
3. Tambahan modal disetor berupa barang	0,00	0,00
4. Koreksi Saldo awal Hibah BTN	0,00	0,00
5. Jumlah modal disetor (1+2+3+4)	61.024.725.983,76	61.024.725.983,76
5. Saldo laba (rugi) tahun lalu	(50.945.180.792,79)	(50.098.118.241,60)
6. Koreksi Laba(rugi) tahun lalu	6.097.203.259,28	(125.661.471,00)
7. Laba tahun berjalan	3.276.781.437,00	4.060.211.188,07
8. Setoran bagian laba kepada Pemda	(1.664.742.817,10)	(2.629.886.747,54)
9. Alokasi laba PDAM untuk cadangan umum	0,00	(956.322.453,65)
10. Alokasi Laba PDAM untuk dana sosial dan pendidikan	(302.680.512,20)	(478.161.226,83)
11. Alokasi laba PDAM untuk Jasa Produksi	(151.340.256,10)	(239.080.613,41)
12. Alokasi laba PDAM untuk sumbangan pensiun dan sokongan	(302.680.512,20)	(478.161.226,83)
13. Jumlah saldo laba (rugi) (5+6+7)	(43.992.640.194,11)	(50.945.180.792,79)
14. Jumlah penyertaan modal Pemda (4+8)	17.032.085.789,65	10.079.545.190,97

Tabel 185. Jumlah Modal Disetor–Penyertaan Modal Pada Perumda Air Minum Tirta Mahameru Kabupaten Lumajang

Dalam Rupiah			
No.	Tahun	Nominal	Keterangan
1		339.076.107,00	Nilai aset eks Jaman Belanda
2		127.216.615,00	Nilai aset Eks SAM Pedesaan
3		122.850.500,00	Nilai aset Eks DIPA TK. II
4		23.250.000,00	Nilai aset Eks P3KT
5		18.032.500,00	Nilai aset Eks PD-PKT
6		798.545.000,00	Nilai Aset berupa tanah
7		3.000.000,00	Nilai aset berupa kendaraan/Truk
8		578.650.000,00	Nilai aset berupa Instalasi Air
9		1.427.707.895,00	Penyertaan Pemerintah Pusat
10		1.800.000.000,00	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
11	2010	2.494.829.496,88	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda berupa aset jaringan air bersih (selokambang) Dinas PU yang dihibahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Mahameru
12	2015	6.589.241.525,42	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
13	2016	33.341.808.344,45	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda

No.	Tahun	Nominal	Keterangan
14	2017	3.449.000.000,00	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
15	2018	4.500.000.000,00	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
16	2018	812.518.000,00	Penambahan modal disetor berupa barang yaitu pembangunan sistem penyediaan IKK sumber air minum (SPAM) IKK sumpersuko dan IKK padang yang telah diserahkan tahun 2016
17	2019	4.599.000.000,00	Penambahan dana penyertaan modal dari pemda
Jumlah		61.024.725.983,75	

Jumlah penyertaan modal tersebut belum termasuk Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditentukan Statusnya (YBDS) sebesar Rp34.801.375.373,16 yang sudah dicatat oleh Perumda Tirta Mahameru sebagai bagian dari modal (ekuitas) sedangkan Pemerintah Kabupaten Lumajang belum mengakuinya karena belum tersedia dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan. Pada saat ini Perumda Tirta Mahameru masih berproses untuk menyelesaikan pelimpahan/penyerahannya dari Pemerintah Pusat.

Rincian Penyertaan Pemerintah Pusat Yang Belum Ditentukan Statusnya (YBDS) terdiri dari:

1.	Penyerahan Tahun 1991	98.556.221,10
2.	Penyerahan Tahun 1994	50.580.350,00
3.	Penyerahan Tahun 1996	1.507.039.024,00
4.	Penyerahan Tahun 1997	86.678.430,00
5.	Penyerahan Tahun 1999	1.940.625.561,00
6.	Penyerahan Tahun 2000	2.082.485.864,00
7.	Penyerahan Tahun 2009	867.039.584,00
8.	Penambahan Tahun 2011	6.366.264.960,00
9.	Instalasi Trans & Dist Koreksi atas Audit 2010	25.650.179,06
10.	Penyerahan Tahun 2014	1.303.839.900,00
11.	Penyerahan Tahun 2016	9.148.615.300,00
12.	Pengembangan SPAM KSPN BTS Kec. Senduro BASTP No.1394/BA/Stategis-AM/XII/2018	11.324.000.000,00
		34.801.375.373,16

Pada tahun 2025 dalam Laporan Keuangan Perumda Tirta Mahameru mencatat penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar Rp4.154.047.528,40 yang sudah dicatat sebagai bagian dari modal (ekuitas) sedangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mengakuinya karena masih menunggu proses penghapusan aset tetap yang nantinya akan diserahkan kepada Perumda Tirta Mahameru. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tersebut hanya mencatat penyertaan modal sebesar Rp1.671.816.000,00 dan sisanya sebesar Rp2.482.231.526,40 masih dalam proses pengajuan Peraturan Daerah.

Rincian Penyertaan Modal yang belum tercatat yang terdiri dari:

1	Tanah Tempat Pembuangan Sampah Milik Dinas Lingkungan Hidup	127.225.000,00
2	Tanah Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Mahameru Residen	32.993.000,00
3	Bangunan Reservoir Kapasitas 100 m3	244.288.000,00
4	Bangunan Rumah Panel	52.324.000,00
5	Listrik, Pompa dan Perlengkapannya, Switch Pressure Tank	69.402.000,00
6	Sambungan Rumah (SR)	177.476.000,00
7	Menara Air	207.643.000,00
8	Jaringan Pipa	760.465.000,00

Jumlah I

1.671.816.000,00

1	Jaringan Air Minum Perdesaan Desa Bondoyudo	597.474.790,08
2	Jaringan Air Minum Perdesaan Desa Sumberejo	768.868.063,68
3	Jaringan Air Minum Perkotaan Kelurahan Rogotrunan	1.115.888.672,64

Jumlah I

2.482.231.526,40

Total I + II

4.154.047.526,40

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
c. ASET TETAP	2.609.959.809.767,92	2.490.840.203.229,76

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, serta konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut:

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya diabaikan.
- Aset tetap disusutkan per semester sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat diubah kecuali:
 - (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.609.959.809.767,92 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.490.840.203.229,76 maka mengalami kenaikan sebesar 4,78% (Rp119.119.606.538,16), berasal dari penambahan aset tetap Tahun 2025 sebesar Rp165.212.597.124,46 dan pengurangan aset tetap Tahun 2025 sebesar Rp46.092.990.586,29.

Tabel 186. Daftar Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah					
No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2025
			Bertambah	Berkurang	
1.	Tanah	587.603.849.784,46	9.930.417.340,00	4.105.831.983,00	593.428.435.141,46
2.	Peralatan dan Mesin	942.745.218.049,85	72.940.454.058,62	8.786.258.544,00	1.006.899.413.564,47
3.	Gedung dan Bangunan	1.246.721.151.816,71	49.733.326.087,07	14.731.265.023,58	1.281.723.212.880,20
4.	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	1.857.282.921.550,28	188.458.519.546,36	30.232.290.554,24	2.015.509.150.542,40

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2024	Mutasi		Saldo Akhir 31 Des 2025
			Bertambah	Berkurang	
5.	Aset Tetap Lainnya	136.149.553.353,69	11.003.959.922,00	22.709.277.605,69	124.444.235.670,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.121.519.767,85	2.584.639.180,98	9.906.654.550,85	4.799.504.397,98
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.291.784.011.093,08)	(169.438.719.010,57)	(44.378.587.675,07)	(2.416.844.142.428,59)
	Jumlah	2.490.840.203.229,76	165.212.597.124,46	46.092.990.586,29	2.609.959.809.767,92

Penambahan Aset Tetap

Penambahan Aset Tetap di Tahun 2025 sebanyak 227.878 buah dengan nilai perolehan aset tetap sebesar Rp165.212.597.124,46 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 187. Penambahan Aset Tetap Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2025			Total Jumlah barang sebanyak 226.975 buah senilai Rp171.240.910.470,75
	- Tanah	2	855.646.000,00	
	- Peralatan dan Mesin	14.234	72.047.391.795,00	
	- Gedung dan Bangunan	17	22.010.344.774,68	
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	30	65.357.007.049,07	
	- Aset Tetap Lainnya	212.692	10.970.520.852,00	
2.	Penambahan dari Belanja Modal yang lain			Total Jumlah barang sebanyak 21 buah senilai Rp10.513.445.841,28
	Peralatan dan Mesin			
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	8.950.000,00	Dari belanja modal aset tetap lainnya (Speaker dan Wireless Sound)
	Gedung dan Bangunan			
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	50.000.000,00	Dari belanja modal peralatan mesin (Menara EWS)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RSUD dr. Haryoto)	0	4.463.725.200,00	Dari belanja modal jalan irigasi dan jaringan (Tambah Daya Listrik)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	- Dinas Lingkungan Hidup	2	3.676.100.710,30	Dari belanja modal gedung dan bangunan (Jalan Alun-Alun dan Drainase Alun-Alun)
	- Dinas Komunikasi & Informatika	0	92.224.350,00	Dari belanja modal peralatan mesin (Jaringan Telepon diatas Tanah)
	Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)			
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	172.456.300,00	Dari belanja modal gedung dan bangunan (Biaya Perencanaan Rehab Sekolah)
	- Dinas Perhubungan	1	83.720.000,00	Dari belanja modal jalan irigasi dan jaringan (Perencanaan pengadaan pasang baru PJU)
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	3	44.719.618,00	Dari belanja modal gedung dan bangunan (Perencanaan pasar agropolitan-pasang portal, rehab pasar Yosowilangun dan rehab pasar Klojen)

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	1.033.281.000,00	Dari belanja modal gedung dan bangunan (Biaya MC 100 % Bangunan IGD RSUD, Perencanaan Pembangunan Kampus Unej di Lumajang, dan Perencanaan Pembangunan Gedung Polinema Tahap III)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	888.268.662,98	Dari belanja modal jalan irigasi dan jaringan (Perencanaan Peningkatan Jalan Gesang -Tumpeng, Perencanaan Peningkatan Jalan Sumbermujur - Penanggal, Perencanaan Peningkatan Jalan Gunung Sawur - Penanggal, Perencanaan Peningkatan Jalan Tanggung - Kalisemut, Perencanaan Peningkatan Jalan Wonosari - Kabuaran, Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Umbulrejo, Perencanaan Peningkatan Jalan Tumpeng - Pasrujambe, Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tunjung - Kaibanter, Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kalidilem - Sukosari, dan Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ranu Klakah - Sumberingin)
3.	Realisasi Belanja Barang & Jasa			Total Jumlah barang sebanyak 84 buah senilai Rp499.993.050,00
	Peralatan dan Mesin			
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	6.387.000,00	Berupa Pompa Air Alkon 4 tak / 5.5 HP
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28	20.179.800,00	Berupa Meter Dasar (Basic Meter), Model Jantung, Model Mata, Rongga Dada dan Stop Watch / Jam Henti Analog 1 Tombol
	- Dinas Kependudukan dan Capil	0	1.677.400,00	Berupa ongkos kirim
	- Satuan Polisi Pamong Praja	4	8.857.800,00	Berupa helm pemadam
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50	27.000.750,00	Berupa kursi pertemuan
	Gedung dan Bangunan			
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	0	73.696.700,00	Berupa Instalasi Listrik dan Tambah Daya
	Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)			
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	362.193.600,00	Perencanaan berupa dokumen FS, DED, UKL UPL
4.	Koreksi Kurang Catat			Total Jumlah barang sebanyak 115 buah senilai Rp9.132.319.999,82
	Tanah			
	- Dinas Lingkungan Hidup	1	1.768.826.880,00	Berupa Tanah Taman Husni Thamrin
	- Kecamatan Lumajang	1	342.875.050,00	Berupa Tanah Asrama / Mess Perwira
	Gedung dan Bangunan			
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49	7.020.618.069,82	Berupa Penggabungan Gedung Bangunan dan Pemisahan Gedung Bangunan
	Aset Tetap Lainnya			

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64	-	Koreksi kurang catat jumlah barang (Buku)
5.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Ekstrakomptabel			Total Jumlah barang sebanyak 21 buah senilai Rp15.114.380,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21	15.114.380,00	Berupa Catu Daya, Pompa Air, Tempat cuci tangan portable, dan Mikroskop Siswa
6.	Kewajiban Pengembang			Total Jumlah barang sebanyak 40 buah senilai Rp6.963.069.410,00
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40	6.963.069.410,00	Penyerahan tanah Prasarana Sarana Umum (PSU) dari 12 Pengembang Perumahan
7.	Hibah			Total Jumlah barang sebanyak 622 buah senilai Rp125.815.431.015,33
	Peralatan dan Mesin			
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	10	13.000.000,00	Hibah dari Bank Jatim (CSR) berupa terpal tenda
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25	770.374.999,00	Hibah BPBD Provinsi berupa sprayer, helm rescue, chainsaw, dan tenda dom (keluarga), Hibah dari Masyarakat berupa laptop, Hibah dari BNPB berupa mobil pick up, dan mobil dapur umum
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	14.020.134,62	Berupa freeze free cold Box FFCCB-20L, rak buku, HT Redel dan tandu lipat
	- Dinas Perhubungan	4	7.500.000,00	Hibah dari Bank Jatim (CSR) berupa cover tenda
	Gedung dan Bangunan			
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	3	2.442.983.191,72	Hibah dari KemenPU berupa gebalan rumput, taman reservoir dan taman median jalan double way
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38	4.109.932.600,00	Hibah dari Komite di 13 Lembaga Sekolah berupa bangunan gedung sekolah
	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	32	80.518.218.152,79	Hibah dari KemenPU berupa SPAM KSPN BTS Kec Senduro, Fasum Huntap Korban Erupsi Semeru (Jalan Lingkungan, Drainase, Jembatan dan Dinding Penahan Tanah Area Jembatan)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	37.905.962.867,20	Hibah dari KemenPU berupa Peningkatan Jalan Lingkar Timur Lumajang
	Aset Tetap Lainnya			
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	500	33.439.070,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional berupa buku
8.	Reklasifikasi Antar Golongan Barang			Total senilai Rp10.083.195.013,85
	Gedung dan Bangunan			
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	196.800.000,00	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) berupa biaya Perencanaan Gedung IGD Baru
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	9.150.397.605,00	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) berupa biaya Pembangunan IGD RSUD dr. HARYOTO Lumajang
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	14.976.945,85	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) berupa biaya Perencanaan Bangunan Gedung kantor (Depan)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	219.275.463,00	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa IPAL RSUD Pasirian

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	492.595.000,00	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa biaya perencanaan pembangunan jalan
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	9.150.000,00	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Perencanaan Jalan Cempaka Kelurahan Jogotrunan
9.	Hutang Belanja			Total senilai Rp387.836.954,00
	Gedung dan Bangunan			
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	199.851.000,00	- Rehab SDN Klakah 02
	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	187.985.954,00	- Rehab Talud Jalan Banyuputih Kidul - Randuagung dan Rehab Talud Jalan Karanganyar - Kraton
10.	Akumulasi Penyusutan	0	(169.438.719.010,57)	
	Jumlah Penambahan	227.878	165.212.597.124,46	

Pengurangan Aset Tetap

Pengurangan Aset Tetap pada Tahun 2025 sebanyak 953.259 buah dengan nilai Rp46.092.990.586,29 meliputi transaksi sebagai berikut:

Tabel 188. Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Penghapusan Aset Tetap			Total sebanyak 340 buah senilai Rp30.425.099.324,93
	Tanah			Total sebanyak 25 bidang senilai Rp4.105.831.983,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	25.780.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/68/KEP/427.12/2025, tanggal 23 Oktober 2025, Penghapusan karena Aset Bukan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 1 bidang (Tanah SDN Wonorejo 02)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23	4.014.411.483,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/11/KEP/427.12/2025, tanggal 21 April 2025, Penghapusan karena Alasan Pemindahtanganan Melalui mekanisme Hibah sebanyak 23 bidang (Tanah Jalan Karanganom-Senduro sebanyak 13 bidang, Tanah Jalan Banjarwaru-Karanganom sebanyak 9 bidang, Tanah Jalan Semeru sebanyak 1 bidang)
	- Bagian Tata Pemerintahan Setda	1	65.640.500,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/5/KEP/427.12/2025, tanggal 20 Februari 2025, Penghapusan karena Sebab Lain sebanyak 1 bidang (Tanah Oloran)
	Peralatan dan Mesin			Total sebanyak 296 bidang senilai Rp637.559.030,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3.672.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/47/KEP/427.12/2025, tanggal 31 juli 2025, penghapusan karena pemusnahan sebanyak 2 barang (lemari dan rak kayu)

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	6.900.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/78/KEP/427.12/2025, tanggal 28 november 2025, penghapusan karena kecurian sebanyak 1 barang (LCD Proyektor)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55	199.365.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/10/KEP/427.12/2025, tanggal 21 maret 2025, penghapusan karena menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (tensimeter merkuri)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	5.000.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/41/KEP/427.12/2025, tanggal 16 juli 2025, penghapusan karena sebab lain (sepeda motor)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	233	416.638.030,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/89/KEP/427.12/2025, tanggal 5 desember 2025, penghapusan karena pemusnahan (alat kantor dan rumah tangga, alat kedokteran, alat laboratorium, dan komputer)
	- Dinas Perhubungan	4	5.984.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/73/KEP/427.12/2025, tanggal 1 november 2025, penghapusan karena pemindahtanganan melalui mekanisme hibah (water block)
	Gedung dan Bangunan			Total sebanyak 9 buah senilai Rp2.392.942.370,67
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	5	96.559.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/83/KEP/427.12/2025, tanggal 28 november 2025, penghapusan karena alasan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan langsung sebanyak 5 barang (Menara : Papan Reklame)
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	10.000.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/83/KEP/427.12/2025, tanggal 28 november 2025, penghapusan karena alasan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan langsung sebanyak 1 barang (Papan Pengumuman)
	- Dinas Komunikasi & Informatika	1	22.320.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/83/KEP/427.12/2025, tanggal 28 november 2025, penghapusan karena alasan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan langsung sebanyak 1 barang (Bangunan Menara Telpon)
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	2	2.264.063.370,67	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/14/KEP/427.12/2025, tanggal 28 april 2025, penghapusan karena alasan di bongkar total untuk dibangun kembali menjadi rest area agropolitan sebanyak 2 barang (Bangunan Pasar Agropolitan dan Pasar Agropolitan Los Baru)
	Jalan, Irigasi dan Jaringan			Total sebanyak 9 buah senilai Rp23.264.030.941,26
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9	23.246.030.941,26	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/11/KEP/427.12/2025, tanggal 21 April 2025, Penghapusan karena Alasan Pemindahtanganan Melalui mekanisme Hibah sebanyak 9 barang (Jalan Karanganom-Senduro, Jalan Semeru, Jalan Banjarwaru-Karanganom, Saluran Drainase Jalan Sarikemuning-Senduro (Karanganom-Senduro, Saluran Drainase Jalan Sarikemuning-Senduro, Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Banjarwaru-Karanganom, Talud Jalan Klanting-Purwosono (Banjarwaru-Karanganom), Talud Jalan Purwosono, Talud Jalan Karanganom-Senduro)

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)			Total sebanyak 1 buah senilai Rp42.735.000,00
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	42.735.000,00	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/22/KEP/427.12/2025 Tanggal 19 Mei 2025, Penghapusan karena Alasan Kadaluwarsa
2.	Reklasifikasi ke Aset Tetap Extrakomptabel			Total sebanyak 2 buah senilai Rp800.000,00
	Peralatan dan Mesin			
	- Kecamatan Randuagung	2	800.000,00	Berupa printer
3.	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain- Lain)			Total sebanyak 945.109 buah senilai Rp30.889.945.802,48
	Peralatan dan Mesin			Total sebanyak 2.254 buah senilai Rp7.439.143.840,00
	- Inspektorat Daerah	23	128.460.000,00	Berupa Sepeda Motor, Meteran Dorong, Mesin Ketik, Mesin Penghitung Uang, Alat Penghancur Kertas, dan AC
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118	604.428.500,00	Berupa Sepeda Motor, LCD, Kursi, Mesin Pemotong Rumput, AC, TV, Dispenser, UPS, Handycam, Komputer, Laptop dll
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	161	726.581.122,00	Berupa AC, LCD, TV, UPS, Telepon PABX, Faximile, Komputer, Laptop, dan Printer
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	153	548.571.000,00	Berupa Genset, Pompa, Mesin Perahu, Perahu Karet, Sepeda Motor, GPS, Gergaji Mesin, Velbed. HT, dll
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68	150.867.000,00	Berupa Komputer, Faximile, Komputer, Printer, Scanner, Kursi Kerja Eselon, Vacuum Cleaner, UPS, Laptop, Hardisk External, Camera, dll
	- Dinas Kependudukan dan Capil	251	1.008.556.320,00	Berupa Lemari Arsip, Brandkas, Mesin Penghancur Kertas, Mesin Laminating, Meja, Kursi, Korden, Speaker, AC, TV, dll
	- Satuan Polisi Pamong Praja	307	1.031.892.905,00	Berupa Pick Up, Locker, Brandkas, Papan Nama, LCD, Meja, Velbed, Tempat Cuci Tangan Portabel, AC, Kipas Angin, HT, dll
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15	60.997.450,00	Berupa Rak Buku Dobel, Rak Buku Kecil, Rak Buku Kecil, Papan Nama, dan Meja Sirkulasi
	- Dinas Lingkungan Hidup	128	743.904.034,00	Berupa Generating Set, Amroll (Truk Tangki), Sepeda Motor, Kendaraan Roda 3, Mesin Gergaji, Lemari besi, Filling Cabinet, dll
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	467	586.293.276,00	Berupa Alat Kedokteran
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	98.446.400,00	Berupa AC, UPS, Dispenser, Handycam, Telepon Paralel Antar Ruangan, Mesin Fax, Komputer, Laptop dan Printer
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	64	235.883.500,00	Berupa Sepeda Motor, Sepeda Motor Roda 3, Mesin Gerinda Tangan, Rol Meter, Kursi, Karpet, Tempat Cuci Portabel, UPS, PC dan Printer
	- Kecamatan Pasrujambe	66	198.624.883,00	Berupa Pompa Air, Mesin Ketik, Filling Cabinet, LCD, Meja, Bangku Tunggu, Mesin Potong Rumput, Kursi, HT, Komputer, Laptop, Printer dan Scanner
	- Kecamatan Sumbersuko	44	160.966.700,00	Berupa UPS, Stavolt, OHP/LCD, Mesin Ketik, Brandkas, Ratel, Facsimille, Komputer, Laptop, Printer, Almari Arsip dan Kursi Pejabat
	- Kecamatan Klakah	14	12.200.000,00	Berupa White Board dan Printer
	- Kecamatan Randuagung	59	180.653.000,00	Berupa Lemari Kayu, Overhead Proyektor, Display, Lemari Es, AC, UPS, Tustel, Tangga Aluminium, Meja Kerja, Kursi

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				Kerja, Proyektor, Facsimile, VHF, PC, Laptop, Scanner, Monitor dan printer
	- Kecamatan Yosowilangun	45	129.969.950,00	Berupa Outdoor Display, Meja Kerja Kayu, AC, TV, UPS, Stabiliator, Camera, Handtruck Troly, Kursi, Mesin Pelubang, Mesin Press, VHF, PC, Laptop dan Printer
	- Kecamatan Tempeh	48	206.875.950,00	Berupa Sepeda Motor, Lemari Kayu, LCD, Gordyn, TV, CD Player, Mic Wireless, UPS, Camera Digital, Alat Pemadam, Meja, Kursi, Punc Card, Mesin Fax, PC, Laptop dan Printer
	- Kecamatan Pasirian	104	290.706.750,00	Berupa Genset, Sepeda Angin, AC, Running Text, Almari, Papan Pengumuman, Bangku Tunggu, Neon Box, Brandkas, Kursi, Meja Kerja, TV, Mesin Pemotong Rumput, UPS, Kamera Pocket, Gorden, dll
	- Kecamatan Pronojiwo	42	157.465.000,00	Berupa Meja Kursi Tamu, TV, UPS, Lemari Arsip, Kursi Kerja, TV, LCD, Printer, Komputer, Printer, dan Laptop
	- Kecamatan Tempursari	50	176.800.100,00	Berupa Mesin Ketik, Brandkas, LCD, AC, TV, Loudspeaker, Sound System, UPS, Handtruck Troly, Alat Pemadam, Meja Kerja, Microphone, HT, Facsimile, PC, Monitor, Printer dan Transportabel Genset
	Gedung dan Bangunan			Total sebanyak 1 buah senilai Rp80.493.482,79
	- Dinas Lingkungan Hidup	1	80.493.482,79	Berupa Taman Lalu Lintas
	Jalan, Irigasi dan Jaringan			Total sebanyak 115 buah senilai Rp1.256.274.150,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	115	1.256.274.150,00	Berupa Tong Pilah Sampah, Tong Sampah Portabel, dan Lampu Hias
	Aset Tetap Lainnya			Total sebanyak 943.206 buah senilai Rp22.700.327.605,69
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	943.103	22.646.991.605,69	Berupa Buku
	- Dinas Lingkungan Hidup	103	53.336.000,00	Berupa Buku, dan Piala
4.	Koreksi Lebih Catat			Total sebanyak 29 buah senilai Rp7.020.618.069,82
	Gedung dan Bangunan			Total sebanyak 25 buah senilai Rp7.020.618.069,82
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25	7.020.618.069,82	Berupa Penggabungan Gedung Bangunan sebanyak 31 unit senilai Rp5.466.256.046,82 dan Pemisahan Gedung Bangunan sebanyak 18 unit senilai Rp1.554.362.023,00
	Aset Tetap Lainnya			Total sebanyak 4 buah
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	0,00	Koreksi lebih catat jumlah barang (Buku)
5.	Reklasifikasi Antar Golongan Barang			Total sebanyak 8 buah senilai Rp10.083.195.013,85
	Gedung dan Bangunan			Total senilai Rp219.275.463,00
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	219.275.463,00	Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan (RSUD Pasirian - IPAL)
	Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)			Total sebanyak 8 buah senilai Rp9.863.919.550,85

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	196.800.000,00	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Biaya Perencanaan Gedung IGD Baru (RSUD dr Haryoto)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	9.150.397.605,00	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Pembangunan IGD RSUD dr. HARYOTO Lumajang
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	492.595.000,00	Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Perencanaan Peningkatan Jalan Paket 1 (Peningkatan Jalan Sumberjati - Karangrejo), Perencanaan Peningkatan Jalan Paket 3 (Peningkatan Jalan Sumberwuluh - Gunung Sawur), Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 4 (Jalan Pasrujambe - Tawonsongo), Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 5 (Jalan Grobogan - Curah Petung), dan Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 3 (Jalan Klakah - Sawaran Kulon)
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		14.976.945,85	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Gedung kantor (Depan)
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	9.150.000,00	Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Perencanaan Rehabilitasi Jalan Cempaka Kelurahan Jogotrunan
6.	Belanja Modal Reklasifikasi Ke Aset Tetap yang lain			Total sebanyak 21 buah senilai Rp10.513.445.841,28
	Peralatan dan Mesin			Total sebanyak 1 buah senilai Rp142.224.350,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	50.000.000,00	Reklas ke Gedung dan Bangunan berupa 1 unit Menara EWS
	- Dinas Komunikasi & Informatika	-	92.224.350,00	Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Jaringan Telepon diatas Tanah
	Gedung dan Bangunan			Total sebanyak 7 buah senilai Rp4.926.557.628,30
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	172.456.300,00	Reklas ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang Guru, Pembangunan Toilet, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dan Rehabilitasi Toilet
	- Dinas Lingkungan Hidup	2	3.676.100.710,30	Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Alun-Alun dan Drainase Alun-Alun
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	3	44.719.618,00	Reklas ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa Perencanaan pasar agropolitan-pasang portal, rehab pasar Yosowilangun dan rehab pasar Klojen
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	1.033.281.000,00	Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Biaya MC 100 % Bangunan IGD RSUD, Perencanaan Pembangunan Kampus Unej di Lumajang, dan Perencanaan Pembangunan Gedung Polinema Tahap III
	Jalan Irigasi dan Jaringan			Total sebanyak 11 buah senilai Rp971.988.662,98
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	4.463.725.200,00	Reklas ke Gedung dan Bangunan (RSUD dr Haryoto - Tambah Daya Listrik)
	- Dinas Perhubungan	1	83.720.000,00	Reklas ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa Perencanaan pengadaan pasang baru PJU
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	888.268.662,98	Reklas ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa Perencanaan Peningkatan Jalan Gesang -Tumpang, Perencanaan

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				Peningkatan Jalan Sumbermujur - Penanggal, Perencanaan Peningkatan Jalan Gunung Sawur - Penanggal, Perencanaan Peningkatan Jalan Tanggung - Kalisemut, Perencanaan Peningkatan Jalan Wonosari - Kabuaran, Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Umbulrejo, Perencanaan Peningkatan Jalan Tumpeng - Pasrujambe, Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tunjung - Kaibanter, Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kalidilem - Sukosari, dan Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ranu Klakah - Sumberingin
	Aset Tetap Lainnya			Total sebanyak 2 buah senilai Rp8.950.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	8.950.000,00	Reklas ke Peralatan dan Mesin berupa Speaker dan Wireless Sound
7.	Belanja Modal Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)			Total sebanyak 3 buah senilai Rp294.271.600,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	294.271.600,00	- Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tidak Berwujud berupa Kajian Teknis Pembangunan Jalan Kali Gede - Karangmenjangan, Database drainase, dan Leger jalan paket 1
8.	Belanja Modal Reklasifikasi ke Aset Tetap Ekstrakomptabel			Total sebanyak 779 buah senilai Rp309.658.956,00
	Peralatan dan Mesin			
	- Inspektorat Daerah	41	15.727.490,00	Berupa Kursi Putar, Gorden Spending Vitrase, Headphone Flat Monitoring, Converter USB, Kabel XLR Microphone Arm, Microphone Shock Mount, Pop Filter dan Tanda Parkir
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	20	6.799.993,00	Berupa Printer Thermal Bluetooth
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	354	146.621.000,00	Berupa Meja Sekolah, Kursi Guru, Kursi Siswa, Timbangan Orang, Papan Tulis, Kipas angin dan Keyboard
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	255	108.413.000,00	Berupa Suhu dan Kelembaban, Pencacah Sampel, Coolbox, Timbangan Digital, Medical Oksigen Regulator, Tensimeter Aneroid, Timbangan Badan Digital Gea, Partus Instrument Set, Timbangan Bayi, dan Dressing Forceps, Stand str 14,5 cm
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	109	51.714.900,00	Berupa Kursi Lipat dan Dispenser
9.	Belanja Modal Reklasifikasi ke Persediaan / Barang Pakai Habis			Total sebanyak 6.500 buah senilai Rp235.664.941,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	1.262.070,00	Berupa Kaca Cermin 40x153 cm
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.497	234.402.871,00	Berupa Obat, Alkohol Swab, Syringe Steril, Corong Kaca, Rak Tabung, Tabung Reaksi, Sarung Tangan, Botol Sampel, Tas Peralatan, HB Meter, Alat Cek Kolesterol, Alat Cek Asam Urat, dan Partus Set
10.	Belanja Modal Reklasifikasi ke Pemeliharaan			Total sebanyak 1 buah senilai Rp92.968.009,00
	Peralatan dan Mesin			
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	147.000,00	Berupa biaya pemeliharaan laptop

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Lingkungan Hidup	0	1.443.000,00	Berupa biaya Pemeliharaan alat lab kimia (DO Meter)
	Gedung dan Bangunan			
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	0	91.378.009,00	Berupa biaya pemeliharaan pasar candipuro dan pasar baru
11.	Akumulasi Penyusutan	0	44.378.587.675,07	
	Jumlah Pengurangan	953.259	46.092.990.586,29	

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Tanah	593.428.435.141,46	587.603.849.784,46

Saldo Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp593.428.435.141,46 (5.736 bidang) dan 31 Desember 2024 sebesar Rp587.603.849.784,46 (5.717 bidang). maka mengalami kenaikan nilai sebesar 0,99% berasal dari penambahan aset tetap tanah Tahun 2025 sebesar Rp9.930.417.340,00 dan pengurangan sebesar Rp4.105.831.983,00 maka penambahan riil sebesar Rp5.824.585.357,00.

a) Penambahan Aset Tetap Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah di Tahun 2025 sebanyak 44 bidang dengan nilai aset tetap tanah sebesar Rp9.930.417.340,00 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 189. Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Barang (bidang)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025			Jumlah Total sebanyak 2 bidang senilai Rp855.646.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	719.000.000,00	Pengadaan Tanah (SDN Jatimulyo 01 Kunir dan SDN Wonorejo 02 Kedungjajang)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	136.646.000,00	Biaya Perjadin Penyertifikatan Tanah
2.	Koreksi Kurang Catat			Jumlah Total sebanyak 2 bidang senilai Rp2.111.701.930,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	1	1.768.826.880,00	Hasil inventarisasi, validasi & penilaian Tanah Taman MH. Thamrin, SK Bupati No. 100.3.3.2/222/KEP/427.12/2025 Tanggal 4 Juni 2025
	- Kecamatan Lumajang (Kelurahan Kepuharjo)	1	342.875.050,00	Hasil inventarisasi, validasi & penilaian Tanah Mess Perwira, SK Bupati No. 100.3.3.2/667/KEP/427.12/2025 Tanggal 29 Desember 2025
3.	Kewajiban Pengembang			Jumlah Total sebanyak 40 bidang senilai Rp6.963.069.410,00
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40	6.963.069.410,00	Penyerahan dari 12 pengembang Perumahan berupa tanah Prasarana Sarana Umum (PSU)
	Jumlah Penambahan	44	9.930.417.340,00	

Kewajiban pengembang adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Untuk lebih jelasnya penambahan tanah Fasilitas Umum Perumahan ke Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 1 (Daftar Tanah Fasilitas Umum Perumahan yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025).

b) Pengurangan Aset Tetap Tanah

Pengurangan Aset Tetap Tanah di Tahun 2025 sebanyak 25 bidang dengan nilai aset tetap tanah sebesar Rp4.105.831.983,00 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 190. Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Barang (bidang)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Penghapusan			Jumlah Total sebanyak 25 bidang senilai Rp4.105.831.983,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	25.780.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/68/KEP/427.12/2025, tanggal 23 Oktober 2025, Penghapusan karena Aset Bukan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 1 bidang (Tanah SDN Wonorejo 02.)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23	4.014.411.483,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/11/KEP/427.12/2025, tanggal 21 April 2025, Penghapusan karena Alasan Pemindahtanganan Melalui mekanisme Hibah sebanyak 23 bidang (Tanah Jalan Karangnom-Senduro sebanyak 13 bidang, Tanah Jalan Banjarwaru-Karangnom sebanyak 9 bidang, Tanah Jalan Semeru sebanyak 1 bidang)
	- Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)	1	65.640.500,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/5/KEP/427.12/2025, tanggal 20 Februari 2025, Penghapusan karena Sebab Lain sebanyak 1 bidang (Tanah Oloran)
Jumlah Pengurangan		25	4.105.831.983,00	

c) Kondisi Aset Tetap Tanah

(1) Jumlah Bidang Tanah

Jumlah Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lumajang di tahun 2025 adalah 5.736 bidang dan pada tahun 2024 sebanyak 5.717 bidang, maka jumlah tanah bertambah sebanyak 19 bidang dengan rincian sebagai berikut:

(a) Penambahan jumlah bidang tanah:

- Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 : 2 bidang
- Koreksi kurang catat : 2 bidang
- Penyerahan dari Pengembang : 40 bidang
- Jumlah Penambahan : 44 bidang

(b) Pengurangan jumlah bidang tanah:

- Penghapusan : 25 bidang
- Jumlah Pengurangan : 25 bidang
- Jumlah Penambahan Bidang Tanah riil : 19 bidang

(2) Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat

Tanah yang telah bersertifikat di Tahun 2025 naik sebesar 0,77% dibanding tahun 2024 yaitu dari 3.748 bidang tanah menjadi 3.777 bidang tanah bersertifikat. Sertifikat bertambah 29 bidang tanah yang bersertifikat di tahun 2025. untuk lebih jelasnya dirinci sebagai berikut:

1. Kenaikan Tanah yang bersertifikat berasal dari:

(a) Sertifikat yang selesai di tahun 2023 sebanyak (diserahkan di tahun 2025)	: 6 bidang
(b) Sertifikat yang selesai di tahun 2024 (diserahkan di tahun 2025)	: 51 bidang
(c) Sertifikat yang selesai di tahun 2025	: <u>61 bidang</u>
Jumlah sertifikat yang diserahkan di tahun 2025	: 118 bidang

Untuk lebih jelasnya penambahan tanah yang bersertifikat di tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran 2 (Jumlah Perkembangan Tanah yg Bersertifikat Tahun 2025).

2. Pengurangan Tanah yang bersertifikat berasal dari:

(a) Pengurangan karena hibah ke provinsi	: 23 bidang
(b) Pengurangan karena balik nama di tahun 2024 (Salah Catat)	: 49 bidang
(c) Pengurangan karena balik nama di tahun 2025	: <u>17 bidang</u>
Jumlah pengurangan sertifikat di tahun 2025	: 89 bidang
Jumlah kenaikan sertifikat	: 29 bidang

Dari uraian poin (1) dan (2) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah Tanah Pemerintah Kab. Lumajang Tahun 2025	: 5.736 bidang
- Jumlah Tanah yang sudah bersertifikat	: 3.777 bidang
- Jumlah Tanah yang belum bersertifikat	: 1.959 bidang

(3) Pemanfaatan

Mekanisme Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang menggunakan perikatan:

(a) Pinjam Pakai

Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah:

- Pinjam Pakai Tanah yang ada perjanjian dan masih berlaku : 3 bh

Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah:

- Pinjam Pakai Tanah & Bangunan ada perjanjian & berlaku : 7 bh

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 3 (Daftar Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang)

(b) Sewa

Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan yang terdiri dari:

- Sewa Tanah sebagian : 16 penyewa

- Sewa Tanah seluruhnya (Properti Investasi) : 33 penyewa

- Sewa Tanah sebagian dan Bangunan (milik Pemda) : 18 penyewa

- Sewa Tanah sebagian dan Bangunan (milik pihak ketiga) : 20 penyewa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4 (Daftar Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Lumajang)

(4) Tanah Milik TNI, PGRI dan BUMN yang tercatat di KIB A

- (a) Tanah milik TNI : 2 bidang
- (b) Tanah milik PGRI : 3 bidang
- (c) Tanah milik Badan Usaha Milik Negara (PT KAI, PTP dan Perhutani) : 39 bidang

Jumlah Tanah milik TNI dan BUMN : 44 bidang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5 (Daftar Tanah milik TNI dan BUMN yang tercatat pada KIB Pemerintah Kabupaten Lumajang)

(5) Tanah Sengketa/Bermasalah

Pada tahun 2025 terdapat 2 bidang tanah yaitu Tanah Kantor Kecamatan Kedungjajang dan Tanah SDN Wonorejo 02 Kecamatan Kedungjajang. Tanah Kantor Kecamatan Kedungjajang bersengketa/bermasalah yang berproses di Mahkamah Agung. Proses ini dimenangkan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3685 K/Pdt/2025. Sedangkan Tanah SDN Wonorejo 02 Kecamatan Kedungjajang bersengketa/bermasalah di Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang. Proses ini berakhir dengan inkrah damai.

(6) Tanah Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Penampungan Sementara Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Penampungan Sementara Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru dan Lahan Usahnya Atas Nama Pemerintah Kabupaten Lumajang Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur seluas 90.98 ha.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Peralatan dan Mesin	1.006.899.413.564,47	942.745.218.049,85

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.006.899.413.564,47 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp942.745.218.049,85 maka mengalami peningkatan sebesar 6,81%, berasal dari penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.940.454.058,62 dan pengurangan sebesar Rp8.786.258.544,00 maka penambahan riil sebesar Rp64.154.195.514,62.

a) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Tahun 2025 sebanyak 14.389 buah dengan penambahan nilai sebesar Rp72.940.454.058,62 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 191. Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025			Jumlah Total sebanyak 14.234 buah senilai Rp72.047.391.795,00
	- Sekretariat DPRD	116	665.671.882,00	
	- Inspektorat Daerah	384	4.025.545.056,00	
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	337.750.000,00	
	- Badan Kepegawaian Daerah	13	526.311.000,00	
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	56	851.020.452,00	
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	61	455.050.664,00	
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45	127.390.000,00	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.545	8.203.831.759,00	
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	18	234.168.745,00	
	- Dinas Kependudukan dan Capil	32	385.107.760,00	
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	6.771.000,00	
	- Satuan Polisi Pamong Praja	54	842.098.800,00	
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10	106.676.550,00	
	- Dinas Lingkungan Hidup	54	518.674.329,00	
	- Dinas Pariwisata	17	142.507.350,00	
	- Dinas Komunikasi & Informatika	2	206.609.850,00	
	- Dinas Tenaga Kerja	2	11.450.001,00	
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.027	43.930.794.569,00	
	- Dinas Perhubungan	32	74.253.965,00	
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	293	1.268.313.389,00	
	- Dinas Perikanan	6	53.502.000,00	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	70	2.161.471.400,00	
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	83.975.940,00	
	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16	180.224.002,00	
	- Bagian Umum	301	6.326.822.116,00	
	- Kecamatan Gucialit	3	20.967.900,00	
	- Kecamatan Senduro	4	27.006.300,00	
	- Kecamatan Pasrujambe	4	32.010.700,00	
	- Kecamatan Sumbersuko	1	3.589.740,00	
	- Kecamatan Kedungjajang	4	32.218.860,00	
	- Kecamatan Jatiroto	2	20.112.875,00	
	- Kecamatan Klakah	2	8.658.000,00	
	- Kecamatan Randuagung	2	19.092.000,00	
	- Kecamatan Ranuyoso	2	22.177.800,00	
	- Kecamatan Tekung	6	30.609.090,00	

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Kecamatan Tempeh	2	19.863.450,00	
	- Kecamatan Pasirian	1	15.351.300,00	
	- Kecamatan Candipuro	6	27.650.000,00	
	- Kecamatan Pronojiwo	4	30.558.301,00	
	- Kecamatan Tempursari	4	11.532.900,00	
2.	Penambahan dari Belanja Modal yang lain			Jumlah total sebanyak 2 buah senilai Rp8.950.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Sidomulyo 02 Pronojiwo)	1	4.000.000,00	Berupa 1 unit Speaker senilai Rp4.000.000,00 (dari belanja modal aset tetap lainnya)
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Sumberurip 02 Pronojiwo)	1	4.950.000,00	Berupa 1 unit Wireless Sound senilai Rp4.950.000,00 (dari belanja modal aset tetap lainnya)
3.	Pengadaan dari Belanja Barang dan Jasa			Jumlah total sebanyak 83 buah senilai Rp64.102.750,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	6.387.000,00	Berupa 1 unit Pompa Air 4 tak / 5.5 HP
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Satap Burno Senduro)	7	5.044.950,00	Berupa Meter Dasar (Basic Meter) 2 unit senilai Rp1.036.740,00, Model Jantung 1 unit senilai Rp555.000,00, Model Mata 1 unit senilai Rp622.710,00, Rongga Dada 1 unit senilai Rp888.000,00 dan Stop Watch / Jam Henti Analog 1 Tombol 2 unit senilai Rp1.942.500,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Satap Tambahrejo Candipuro)	7	5.044.950,00	Berupa Meter Dasar (Basic Meter) 2 unit senilai Rp1.036.740,00, Model Jantung 1 unit senilai Rp555.000,00, Model Mata 1 unit senilai Rp622.710,00, Rongga Dada 1 unit senilai Rp888.000,00 dan Stop Watch / Jam Henti Analog 1 Tombol 2 unit senilai Rp1.942.500,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Satap Wonokerto Gucialit)	7	5.044.950,00	Berupa Meter Dasar (Basic Meter) 2 unit senilai Rp1.036.740,00, Model Jantung 1 unit senilai Rp555.000,00, Model Mata 1 unit senilai Rp622.710,00, Rongga Dada 1 unit senilai Rp888.000,00 dan Stop Watch / Jam Henti Analog 1 Tombol 2 unit senilai Rp1.942.500,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 3 Lumajang)	7	5.044.950,00	Berupa Meter Dasar (Basic Meter) 2 unit senilai Rp1.036.740,00, Model Jantung 1 unit senilai Rp555.000,00, Model Mata 1 unit senilai Rp622.710,00, Rongga Dada 1 unit senilai Rp888.000,00 dan Stop Watch / Jam Henti Analog 1 Tombol 2 unit senilai Rp1.942.500,00
	- Dinas Kependudukan dan Capil	0	1.677.400,00	Berupa ongkos kirim
	- Satuan Polisi Pamong Praja	4	8.857.800,00	Berupa helm pemadam
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Yosowilangun)	50	27.000.750,00	Berupa kursi pertemuan
4.	Reklasifikasi dari Aset Tetap Ektrakomptabel			Jumlah total sebanyak 21 buah senilai Rp15.114.380,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Klakah)	2	1.947.000,00	Berupa Catu Daya 2 unit senilai Rp1.947.000,00 (Perolehan tahun 2021)
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Paisirian)	1	1.750.000,00	Berupa Pompa Air sebanyak 1 unit senilai Rp1.750.000,00 (Perolehan 2011)
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Sumbersuko)	2	1.947.000,00	Berupa Catu Daya 2 unit senilai Rp1.947.000,00 (Perolehan tahun 2021)
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 2 Candipuro)	10	5.000.000,00	Berupa Tempat cuci tangan portable sebanyak 10 unit senilai Rp5.000.000,00 (Perolehan tahun 2020)
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 2 Sukodono)	4	2.523.380,00	Berupa Mikroskop Siswa sebanyak 4 unit senilai Rp2.523.380,00 (Perolehan tahun 2018)
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 2 Tekung)	2	1.947.000,00	Berupa Catu Daya 2 unit senilai Rp1.947.000,00 (Perolehan tahun 2021)

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
5.	Hibah			Jumlah total sebanyak 49 buah senilai Rp804.895.133,62
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	2	2.600.000,00	Hibah dari Bank Jatim (CSR) tanggal 18 februari 2025 berupa terpal tenda
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	8	10.400.000,00	Hibah dari Bank Jatim (CSR) tanggal 30 september 2025 berupa cover tenda
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	7.292.700,00	Hibah dari BPBD Provinsi dengan nomor BA.360/00121/208.3/2025 tanggal 23 maret 2025, berupa 9 unit sprayer
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	33.277.800,00	Hibah dari BPBD Provinsi dengan nomor BA.360/0720/208.3/2025 tanggal 7 juli 2025, berupa 10 unit helm rescue senilai Rp18.514.800,00 dan 1 unit chainsaw senilai Rp14.763.000,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	15.600.000,00	Hibah dari Masyarakat dengan nomor BA 300.2.1/1825/427.76/2025 tanggal 17 juli 2025, berupa 2 unit laptop
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	17.000.000,00	Hibah dari BPBD Provinsi dengan nomor BA.360/0813/208.3/2025 tanggal 23 juli 2025, berupa 1 unit tenda dom (keluarga)
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	319.899.999,00	Hibah dari BNPB dengan nomor BA.144/BNPB/OJLP/LP.02.03/12/2025 tanggal 1 desember 2025, berupa mobil pick up
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	377.304.500,00	Hibah dari BNPB tanggal 19 desember 2025, berupa mobil dapur umum
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	3.658.635,00	Hibah dari Kementerian Kesehatan dengan nomor BA KN.01.08/C.IV/2412/2025 tanggal 15 agustus 2025, berupa freeze free cold Box FFCB-20L
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Klakah)	1	1.299.999,81	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. /4.2/PPM.07/ .2025 tanggal 8 september 2025, berupa rak buku
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Yosowilangun)	1	1.498.500,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. /4.2/PPM.07/ .2025 tanggal 12 november 2025, berupa rak buku
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Tekung)	1	1.299.999,81	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. /4.2/PPM.07/ .2025 tanggal 12 november 2025, berupa rak buku
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Penanggal)	1	1.498.500,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. /4.2/PPM.07/ .2025 tanggal 18 november 2025, berupa rak buku
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Tempeh)	1	1.498.500,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. /4.2/PPM.07/ .2025 tanggal 18 november 2025, berupa rak buku
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Candipuro)	4	3.266.000,00	Hibah dari Mer-C dengan nomor BA /BAST/MER-C-JOGJA/ /20 tanggal 24 november 2025, berupa 3 unit HT Redel senilai Rp2.646.000,00 dan 1 unit tandu lipat senilai Rp620.000,01
	- Dinas Perhubungan	4	7.500.000,00	Hibah dari Bank Jatim (CSR) tanggal 16 desember 2025, berupa 2 set tenda senilai Rp4.900.000,00 dan 2 unit cover tenda senilai Rp2.600.000,00
	Jumlah Penambahan	14.389	72.940.454.058,62	

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Tahun 2025 lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 6 (Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025).

b) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebanyak 9.833 barang dengan nilai Rp8.786.258.544,00 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 192. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Penghapusan			Jumlah Total sebanyak 296 buah senilai Rp637.559.030,00
	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3.672.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/47/KEP/427.12/2025, tanggal 31 juli 2025, penghapusan karena pemusnahan sebanyak 2 barang (lemari dan rak kayu)
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	6.900.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/78/KEP/427.12/2025, tanggal 28 november 2025, penghapusan karena kecurian sebanyak 1 barang (LCD Proyektor)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55	199.365.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/10/KEP/427.12/2025, tanggal 21 maret 2025, penghapusan karena menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (tensimeter merkuri)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	5.000.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/41/KEP/427.12/2025, tanggal 16 juli 2025, penghapusan karena sebab lain (sepeda motor)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	233	416.638.030,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/89/KEP/427.12/2025, tanggal 5 desember 2025, penghapusan karena pemusnahan (alat kantor dan rumah tangga, alat kedokteran, alat laboratorium, dan komputer)
	- Dinas Perhubungan	4	5.984.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/73/KEP/427.12/2025, tanggal 1 november 2025, penghapusan karena pemindahtanganan melalui mekanisme hibah (water block)
2.	Reklasifikasi ke Aset Tetap Extrakomptabel			Total sebanyak 2 buah senilai Rp800.000,00
	- Kecamatan Randuagung	2	800.000,00	Berupa printer
3.	Reklasifikasi ke Aset lainnya (Aset Lain-Lain)			Total sebanyak 2.254 buah senilai Rp7.439.143.840,00
	- Inspektorat Daerah	23	128.460.000,00	Berupa Sepeda Motor, Meteran Dorong, Mesin Ketik, Mesin Penghitung Uang, Alat Penghancur Kertas, dan AC
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118	604.428.500,00	Berupa Sepeda Motor, LCD, Kursi, Mesin Pemotong Rumput, AC, TV, Dispenser, UPS, Handycam, Komputer, Laptop dll
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	161	726.581.122,00	Berupa AC, LCD, TV, UPS, Telepon PABX, Faximile, Komputer, Laptop, dan Printer
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	153	548.571.000,00	Berupa Genset, Pompa, Mesin Perahu, Perahu Karet, Sepeda Motor, GPS, Gergaji Mesin, Velbed. HT, dll
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68	150.867.000,00	Berupa Komputer, Faximile, Komputer, Printer, Scanner, Kursi Kerja Eselon, Vacuum Cleaner, UPS, Laptop, Hardisk External, Camera, dll

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Kependudukan dan Capil	251	1.008.556.320,00	Berupa Lemari Arsip, Brandkas, Mesin Penghancur Kertas, Mesin Laminating, Meja, Kursi, Korden, Speaker, AC, TV, dll
	- Satuan Polisi Pamong Praja	307	1.031.892.905,00	Berupa Pick Up, Locker, Brandkas, Papan Nama, LCD, Meja, Velbed, Tempat Cuci Tangan Portabel, AC, Kipas Angin, HT, dll
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15	60.997.450,00	Berupa Rak Buku Dobel, Rak Buku Kecil, Rak Buku Kecil, Papan Nama, dan Meja Sirkulasi
	- Dinas Lingkungan Hidup	128	743.904.034,00	Berupa Generating Set, Amroll (Truk Tangki), Sepeda Motor, Kendaraan Roda 3, Mesin Gergaji, Lemari besi, Filling Cabinet, dll
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	467	586.293.276,00	Berupa Alat Kedokteran
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	98.446.400,00	Berupa AC, UPS, Dispenser, Handycam, Telepon Paralel Antar Ruangan, Mesin Fax, Komputer, Laptop dan Printer
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	64	235.883.500,00	Berupa Sepeda Motor, Sepeda Motor Roda 3, Mesin Gerinda Tangan, Rol Meter, Kursi, Karpet, Tempat Cuci Portabel, UPS, PC dan Printer
	- Kecamatan Pasrujambe	66	198.624.883,00	Berupa Pompa Air, Mesin Ketik, Filling Cabinet, LCD, Meja, Bangku Tunggu, Mesin Potong Rumput, Kursi, HT, Komputer, Laptop, Printer dan Scanner
	- Kecamatan Sumbersuko	44	160.966.700,00	Berupa UPS, Stavolt, OHP/LCD, Mesin Ketik, Brandkas, Ratel, Facsimile, Komputer, Laptop, Printer, Almari Arsip dan Kursi Pejabat
	- Kecamatan Klakah	14	12.200.000,00	Berupa White Board dan Printer
	- Kecamatan Randuagung	59	180.653.000,00	Berupa Lemari Kayu, Overhead Proyektor, Display, Lemari Es, AC, UPS, Tustel, Tangga Aluminium, Meja Kerja, Kursi Kerja, Proyektor, Facsimile, VHF, PC, Laptop, Scanner, Monitor dan printer
	- Kecamatan Yosowilangun	45	129.969.950,00	Berupa Outdoor Display, Meja Kerja Kayu, AC, TV, UPS, Stabiliator, Camera, Handtruck Trolly, Kursi, Mesin Pelubang, Mesin Press, VHF, PC, Laptop dan Printer
	- Kecamatan Tempeh	48	206.875.950,00	Berupa Sepeda Motor, Lemari Kayu, LCD, Gordyn, TV, CD Player, Mic Wireless, UPS, Camera Digital, Alat Pemadam, Meja, Kursi, Punc Card, Mesin Fax, PC, Laptop dan Printer
	- Kecamatan Pasirian	104	290.706.750,00	Berupa Genset, Sepeda Angin, AC, Running Text, Almari, Papan Pengumuman, Bangku Tunggu, Neon Box, Brandkas, Kursi, Meja Kerja, TV, Mesin Pemotong Rumput, UPS, Kamera Pocket, Gorden, dll
	- Kecamatan Pronojiwo	42	157.465.000,00	Berupa Meja Kursi, Kursi Kerja, TV, LCD, Printer, Komputer, Printer, dan Laptop
	- Kecamatan Tempursari	50	176.800.100,00	Berupa Mesin Ketik, Brandkas, LCD, AC, TV, Loudspeaker, Sound System, UPS, Handtruck Trolly, Alat Pemadam, Meja Kerja, Microphone, HT, Facsimile, PC, Monitor, Printer dan Transportabel Genset
4.	Belanja Modal Reklasifikasi Ke Aset Tetap yang lain			Jumlah Total sebanyak 1 buah senilai Rp142.224.350,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	50.000.000,00	Berupa Menara EWS ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Komunikasi & Informatika	0	92.224.350,00	Berupa Jaringan Telepon diatas Tanah ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
5.	Belanja Modal Reklasifikasi ke Aset Tetap Ekstrakomptabel			Jumlah Total sebanyak 779 buah senilai Rp329.276.386,00
	- Inspektorat Daerah	41	15.727.490,00	Berupa Kursi Putar 5 unit senilai Rp2.275.000,00, Gorden Spending Vitrase sebanyak 14 buah senilai Rp6.293.700,00, Headphone Flat Monitoring 4 unit senilai Rp1.958.040,00, Converter USB 1 unit senilai Rp243.090,00, Kabel XLR Microphone Arm 4 unit senilai Rp1.904.760,00, Microphone Shock Mount 4 unit senilai Rp927.960,00, Pop Filter 4 unit senilai Rp796.980,00 dan Tanda Parkir 1 unit senilai Rp400.000,00
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	20	6.799.993,00	Berupa Printer Thermal Bluetooth 20 unit senilai Rp6.799.993,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Citrodwangsan 01)	30	11.250.000,00	Berupa Meja Sekolah
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Gesang 01)	11	4.125.000,00	Berupa Meja Sekolah
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Karanglo 01)	3	1.353.000,00	Berupa Kursi Guru
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Rowokangkung 01)	16	6.432.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Rowokangkung 06)	1	327.000,00	Berupa Timbangan Orang
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Tegalrandu 02)	6	2.730.000,00	Berupa Papan Tulis
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Summersari 03)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Bondoyudo 02)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Umbul 02)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Pasrujambe 05)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Penanggal 04)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Bence 03)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Bandaran)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Kaliboto Lor 04)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Dadapan 04)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Bades 06)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Ranupakis 02)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Tegalcit 01)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Sukosari 01)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Duren 01)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Jatisari 01 Kedungjajang)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Jatisari 02 Kedungjajang)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Ranuyoso 01)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Mojosari 02)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Tumpeng 02)	15	6.300.000,00	Berupa Kursi Siswa
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Ranuyoso)	1	475.000,00	Berupa Kipas angin
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Yosowilangun)	1	229.000,00	Berupa Keyboard
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	255	108.413.000,00	Berupa Suhu dan Kelembaban, Pencacah Sampel, Coolbox, Timbangan Digital, Medical Oksigen Regulator, Tensimeter Aneroid, Timbangan Badan Digital Gea, Partus Instrument Set, Timbangan Bayi, dan Dressing Forceps, Stand str 14,5 cm
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	109	51.714.900,00	Berupa Kursi Lipat 108 buah senilai Rp51.248.700,00 dan Dispenser 1 unit senilai Rp466.200,00
6.	Belanja Modal Reklasifikasi ke Barang Pakai Habis			Jumlah Total sebanyak 6.500 buah senilai Rp235.664.941,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Citrodwangsan 03)	3	1.262.070,00	Berupa Kaca Cermin 40x153 cm
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.497	234.402.871,00	Berupa Obat, Alkohol Swab, Syringe Steril, Corong Kaca, Rak Tabung, Tabung Reaksi, Sarung Tangan, Botol Sampel, Tas Peralatan, HB Meter, Alat Cek Kolesterol, Alat Cek Asam Urat, dan Partus Set
7.	Belanja Modal Reklasifikasi ke Pemeliharaan			Jumlah Total sebanyak 1 buah senilai Rp1.590.000,00

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Barat 01)	1	147.000,00	Berupa biaya pemeliharaan laptop
	- Dinas Lingkungan Hidup	0	1.443.000,00	Berupa biaya Pemeliharaan alat lab kimia (DO Meter)
	Jumlah Pengurangan	9.833	8.786.258.544,00	

c) Kondisi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang dipinjam pakai sebagai berikut:

Kendaraan Bermotor:

- Dengan Intansi Pemerintah yang ada perjanjian dan berlaku : 10 unit;
- Dengan Non Instansi Pemerintah yang ada perjanjian dan berlaku : 2 unit;

Peralatan dan Mesin:

- Dengan Intansi Pemerintah yang ada perjanjian dan berlaku : 90 unit;

Untuk lebih jelasnya pada lampiran 7 (Daftar Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor dan Peralatan & Mesin milik Pemerintah Kabupaten Lumajang).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3) Gedung dan Bangunan	1.281.723.212.880,20	1.246.721.151.816,71

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.281.723.212.880,20 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.246.721.151.816,71 maka mengalami penambahan sebesar 2,81%, berasal dari penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.733.326.087,07 dan pengurangan sebesar Rp14.731.265.023,58 maka penambahan riil sebesar Rp35.002.061.063,49.

a) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di tahun 2025 sebanyak 108 gedung dengan penambahan nilai sebesar Rp49.733.326.087,07 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 193. Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Jumlah Total sebanyak 17 buah senilai Rp22.010.344.774,68
	- Inspektorat Daerah	0	484.398.193,36	
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	49.163.400,00	

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Badan Kepegawaian Daerah	0	194.693.844,80	
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	224.775.000,00	
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	2	349.540.525,00	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	9.751.245.400,00	
	- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	0	370.498.774,66	
	- Dinas Lingkungan Hidup	6	4.225.524.300,00	
	- Dinas Pemuda dan Olahraga	0	215.234.860,00	
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1.310.085.549,00	
	- Dinas Perhubungan	0	161.606.930,00	
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	4	801.356.792,00	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	2.502.630.917,00	
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	373.876.724,07	
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	145.278.205,00	
	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0	137.439.604,37	
	- Bagian Umum	0	632.746.179,00	
	- Kecamatan Pasrujambe	0	46.358.000,00	
	- Kecamatan Jatiroto	0	33.891.576,42	
2.	Penambahan dari Belanja Modal yang lain			Jumlah Total sebanyak 1 unit senilai Rp4.513.725.200,00
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	50.000.000,00	Berupa 1 unit Menara EWS (dari belanja modal peralatan dan mesin)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RSUD dr Haryoto)	0	79.690.000,00	Berupa Perencanaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang (Tambah Daya) (dari belanja modal jalan irigasi dan jaringan)
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RSUD dr Haryoto)	0	4.384.035.200,00	Berupa Tambah Daya Gedung Power House (dari belanja modal jalan irigasi dan jaringan)
3.	Pengadaan dari Belanja Barang dan Jasa			Jumlah Total senilai Rp73.696.700,00
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	0	73.696.700,00	Berupa Instalasi Listrik senilai Rp63.400.000,00 dan Tambah Daya senilai Rp10.296.700,00
4.	Koreksi Kurang Catat			Jumlah Total sebanyak 49 unit senilai Rp7.020.618.069,82
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49	7.020.618.069,82	Berupa Penggabungan Gedung Bangunan sebanyak 31 unit senilai Rp5.466.256.046,82 dan Pemisahan Gedung Bangunan sebanyak 18 unit senilai Rp1.554.362.023,00
5.	Hibah			Jumlah Total sebanyak 41 unit senilai Rp6.552.915.791,72
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	3	2.442.983.191,72	Hibah dari KemenPU dengan nomor 198.1/BA/DC/2025 dan 000.2.5/1231/427.73/2025 tanggal 2 juni 2025, berupa 1 unit penanaman gebalan rumput senilai Rp1.105.944.541,14, 1 unit

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				taman reservoir senilai Rp813.679.567,39 dan 1 unit taman median jalan double way senilai Rp523.359.083,19
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 2 Klakah)	14	1.675.158.600,00	Hibah Komite tanggal 3 januari 2025, berupa : 1 unit gedung ruang kelas senilai Rp113.400.000,00 1 unit bangunan warung sekolah senilai Rp85.000.000,00 1 unit bangunan gudang senilai Rp108.000.000,00 1 unit gedung kamar mandi siswa senilai Rp28.800.000,00 1 unit gedung ruang kelas senilai Rp113.400.000,00 1 unit gedung ruang kelas senilai Rp170.100.000,00 1 unit kamar mandi siswa senilai Rp10.800.000,00 1 unit mushollah Al-Furqon senilai Rp260.507.800,00 1 unit gedung laboratorium senilai Rp108.000.000,00 1 unit tempat parkir senilai Rp20.750.000,00 1 unit pos satpam senilai Rp14.400.000,00 1 unit pagar tembok keliling senilai Rp223.500.800,00 1 unit gazebo senilai Rp40.500.000,00 1 unit lapangan basket senilai Rp378.000.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Ranuyoso)	2	181.300.000,00	Hibah Komite tanggal 3 januari 2025, berupa : 1 unit ruang OSIS, Pramuka dan Drumband senilai Rp55.750.000,00 dan 1 unit musholla senilai Rp125.550.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Rowokangkung 06 Rowokangkung)	4	1.102.768.000,00	Hibah Komite tanggal 6 januari 2025, berupa : 1 unit gedung kelas senilai Rp748.165.750,00, 1 unit rumah dinas senilai Rp134.334.000,00, 1 unit kamar mandi senilai Rp27.986.250,00 dan 1 unit pagar sekolah senilai Rp192.282.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Dawuhan Wetan 02 Rowokangkung)	1	17.772.000,00	Hibah Komite tanggal 6 januari 2025, berupa : 1 unit pagar senilai Rp17.772.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 4 Pasirian Satap)	1	147.900.000,00	Hibah Komite tanggal 13 januari 2025, berupa : 1 unit perpustakaan senilai Rp147.900.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Sawaran Kulon 02 Kedungjajang)	1	15.000.000,00	Hibah dari Komite tanggal 28 april 2025, berupa : 1 unit toilet siswa senilai Rp15.000.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 2 Tempeh)	4	493.834.000,00	Hibah Komite tanggal 28 april 2025, berupa : 1 unit musholla senilai Rp212.109.000,00, 1 unit pagar senilai Rp133.630.000,00,

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				1 unit pentas senilai Rp98.950.000,00 dan 1 unit kantin senilai Rp49.145.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMPN 1 Sumbersuko)	2	212.500.000,00	Hibah dari Komite tanggal 19 mei 2025, berupa : 1 unit ruang serbaguna senilai Rp62.500.000,00 dan 1 unit pagar keliling senilai Rp150.000.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Sumberwuluh 01 Candipuro)	2	130.000.000,00	Hibah dari Komite tanggal 11 agustus 2025, berupa : 1 unit kelas senilai Rp100.000.000,00 dan 1 unit perumahan senilai Rp30.000.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Tambahrejo 02 Candipuro)	1	50.000.000,00	Hibah dari Komite tanggal 19 september 2025, berupa : 1 unit bangunan gedung 3 senilai Rp50.000.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Pagowan 01 Pasrujambe)	2	28.500.000,00	Hibah dari Komite tanggal 4 november 2025, berupa : 1 unit kamar mandi senilai Rp17.000.000,00, dan 1 unit pagar senilai Rp11.500.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Tambahrejo 01 Candipuro)	1	10.200.000,00	Hibah Komite tanggal 10 november 2025, berupa : 1 unit mushollah senilai Rp10.200.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Sumberwuluh 01 Candipuro)	3	45.000.000,00	Hibah dari Komite tanggal 2 desember 2025, berupa : 1 unit toilet perempuan senilai Rp10.000.000,00, 1 unit toilet laki-laki senilai Rp15.000.000,00 dan 1 unit pagar senilai Rp20.000.000,00
6.	Reklasifikasi Antar Golongan Barang			Jumlah Total senilai Rp9.362.174.550,85
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RSUD dr Haryoto)	0	196.800.000,00	Berupa biaya Perencanaan Gedung IGD Baru dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	9.150.397.605,00	Berupa biaya Pembangunan IGD RSUD dr. HARYOTO Lumajang dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	14.976.945,85	Berupa biaya Perencanaan Bangunan Gedung kantor (Depan) dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
7.	Hutang Belanja			Jumlah Total senilai Rp199.851.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	199.851.000,00	- Rehab SDN Klakah 02
Jumlah Penambahan		108	49.733.326.087,07	

Rincian dapat dilihat pada lampiran 8 (Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025).

b) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di tahun 2025 sebanyak 42 gedung dengan pengurangan nilai sebesar Rp14.731.265.023,58 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 194. Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Penghapusan			Jumlah Total sebanyak 9 buah senilai Rp2.392.942.370,67
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	5	96.559.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/83/KEP/427.12/2025, tanggal 28 november 2025, penghapusan karena alasan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan langsung sebanyak 5 barang (Menara : Papan Reklame)
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	10.000.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/83/KEP/427.12/2025, tanggal 28 november 2025, penghapusan karena alasan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan langsung sebanyak 5 barang (Papan Pengumuman)
	- Dinas Komunikasi & Informatika	1	22.320.000,00	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/83/KEP/427.12/2025, tanggal 28 november 2025, penghapusan karena alasan pemindahtanganan melalui mekanisme penjualan langsung sebanyak 5 barang (Bangunan Menara Telpon)
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	2	2.264.063.370,67	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/14/KEP/427.12/2025, tanggal 28 april 2025, penghapusan karena alasan di bongkar total untuk dibangun kembali menjadi rest area agropolitan sebanyak 2 barang (Bangunan Pasar Agropolitan dan Pasar Agropolitan Los Baru)
2.	Reklasifikasi ke Aset lainnya (Aset Lain-Lain)			Jumlah Total sebanyak 1 buah senilai Rp80.493.482,79
	- Dinas Lingkungan Hidup	1	80.493.482,79	Berupa Taman Lalu Lintas
3.	Koreksi Lebih Catat			Jumlah Total sebanyak 25 buah senilai Rp7.020.618.069,82
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25	7.020.618.069,82	Berupa Penggabungan Gedung Bangunan sebanyak 31 unit senilai Rp5.466.256.046,82 dan Pemisahan Gedung Bangunan sebanyak 18 unit senilai Rp1.554.362.023,00
4.	Reklasifikasi Antar Golongan Barang			Jumlah Total senilai Rp219.275.463,00
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	219.275.463,00	Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan (RSUD Pasirian - IPAL)
5.	Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Lain			Jumlah Total sebanyak 7 buah senilai Rp4.926.557.628,30
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	172.456.300,00	Reklas ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang Guru, Pembangunan Toilet, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dan Rehabilitasi Toilet
	- Dinas Lingkungan Hidup	2	3.676.100.710,30	Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Jalan Alun-Alun sebanyak 1 unit senilai Rp2.300.038.059,86 dan Drainase

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				Alun-Alun sebanyak 1 unit senilai Rp1.376.062.650,44
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	3	44.719.618,00	Reklas ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa Perencanaan pasar agropolitan-pasang portal sebanyak 1 paket senilai Rp23.064.868,00, rehab pasar Yosowilangun sebanyak 1 paket senilai Rp9.574.500,- dan rehab pasar Klojen sebanyak 1 paket senilai Rp12.080.250,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	1.033.281.000,00	Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Biaya MC 100 % Bangunan IGD RSUD senilai Rp934.812.800,00, Perencanaan Pembangunan Kampus Unej di Lumajang sebanyak 1 paket senilai Rp2.557.000,00, dan Perencanaan Pembangunan Gedung Polinema Tahap III sebanyak 1 paket senilai Rp95.911.200,00
6.	Reklasifikasi ke Pemeliharaan			Jumlah Total senilai Rp91.378.009,00
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	0	91.378.009,00	Berupa biaya pemeliharaan pasar candipuro senilai Rp43.759.468,00 dan pasar baru senilai Rp47.618.541,00
	Jumlah Pengurangan	42	14.731.265.023,58	

c) Kondisi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kondisi Aset Tetap ini difokuskan pada Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang (milik TNI, PGRI dan BUMN) yaitu :

- Tanah milik TNI : 2 lembaga
- Tanah milik PGRI : 3 lembaga
- Tanah milik BUMN (PT KAI, PTP dan Perhutani) : 37 lembaga
- Jumlah Gedung dan Bangunan : 42 lembaga

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 9 (Daftar Bangunan milik Pemerintah Kabupaten yang menempati Tanah milik TNI dan BUMN)

d) Aset Tetap Gedung dan Bangunan Hunian Tetap Akibat Bencana Erupsi Gunung Semeru

Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Rumah Khusus Hunian Tetap Semeru berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebanyak 1.951 unit Nomor: 1216/BA/DR/2023 dan Nomor: 028/1304/427.1/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang digunakan untuk masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru.

Pada tahun 2024 direklasifikasi ke kelompok aset lainnya. jenis aset lain-lain. objek aset lain-lain dan sub rincian obyek aset lain-lain lainnya. Dikarenakan aset tetap gedung dan bangunan berupa rumah khusus hunian tetap yang diperuntukkan untuk masyarakat terdampak erupsi gunung semeru ini akan diserahkan kepada masyarakat.

e) Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapatkan Bantuan Revitalisasi

Pada Tahun 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat aset tetap gedung dan bangunan yang mendapatkan bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bantuan ini diberikan kepada 33 (tiga puluh tiga) satuan pendidikan dengan rincian 1 (satu) satuan pendidikan jenjang taman kanak-kanak, 26 (dua puluh enam) satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan 6 (enam) satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama. Total bantuan yang diberikan untuk 33 (tiga puluh tiga) satuan pendidikan ini berjumlah Rp24.477.630.141,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh satu rupiah).

Total nilai bantuan revitalisasi satuan pendidikan ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala Sekolah dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lumajang. Sampai saat ini masih belum ada BAST dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sehingga nilai bantuan revitalisasi satuan pendidikan ini masih belum dicatat / menambah aset gedung dan bangunan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Nilai bantuan revitalisasi satuan pendidikan ini akan dicatat / ditambahkan ke nilai aset gedung dan bangunan milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang setelah ada / terbit BAST dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Rincian Bantuan revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada lampiran 10 (Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan dari kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.015.509.150.542,40	1.857.282.921.550,28

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.015.509.150.542,40 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.857.282.921.550,28 maka mengalami peningkatan sebesar 8,52%, berasal dari penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp188.458.519.546,36 dan pengurangan sebesar Rp30.232.290.554,24 maka penambahan riil sebesar Rp158.226.228.992,12.

a) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2025 sebanyak 64 buah dengan penambahan nilai sebesar Rp188.458.519.546,36 lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 195. Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan			Jumlah total sebanyak 30 buah senilai Rp65.357.007.049,07
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	6.096.919.200,00	
	- Dinas Perhubungan	1	103.370.000,00	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24	55.264.701.193,07	
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4	3.892.016.656,00	
2.	Penambahan dari Belanja Modal yang lain			Jumlah total sebanyak 2 buah senilai Rp3.768.325.060,30
	- Dinas Lingkungan Hidup	2	3.676.100.710,30	Berupa Jalan Alun-Alun sebanyak 1 unit senilai Rp2.300.038.059,86 dan Drainase Alun-Alun sebanyak 1 unit senilai Rp1.376.062.650,44 dari belanja modal gedung dan bangunan
	- Dinas Komunikasi & Informatika	0	92.224.350,00	Berupa Jaringan Telepon diatas Tanah dari belanja modal peralatan mesin
3.	Hibah			Jumlah total sebanyak 32 buah senilai Rp118.424.181.019,99
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	32	80.518.218.152,79	Hibah dari KemenPU dengan nomor 198.1/BA/DC/2025 dan 000.2.5/1231/427.73/2025 tanggal 2 juni 2025, berupa: - 1 unit SPAM KSPN BTS Kec Senduro senilai Rp10.224.034.759,95, - 1 unit Jalan Lingkungan Double Way + Akses Sumbersari senilai Rp3.461.718.126,12, - 1 unit Jalan Lingkungan Akses Kebondeli senilai Rp209.929.944,22 - 1 unit Jalan Lingkungan Kebondeli Selatan senilai Rp1.804.762.646,93 - 1 unit Jalan Lingkungan Kebondeli Utara senilai Rp3.589.251.872,93 - 1 unit Jalan Lingkungan Kajar Kuning senilai Rp2.730.885.710,38 - 1 unit Jalan Lingkungan Lingkungan Kamar Kajang senilai Rp1.131.816.247,45 - 1 unit Jalan Lingkungan Curah Koboan senilai Rp5.162.543.311,99 - 1 unit Jalan Lingkungan Gumuk Mas senilai Rp470.686.373,87 - 1 unit Jalan Lingkungan Sumbersari senilai Rp4.521.270.916,35 - 1 unit Drainase Double Way senilai Rp3.370.515.818,04 - 1 unit Drainase Akses Kebondeli senilai Rp210.145.635,03 - 1 unit Drainase Kebondeli Selatan senilai Rp4.418.825.215,02 - 1 unit Drainase Kebondeli Utara senilai Rp7.535.500.479,68 - 1 unit Drainase Kajar Kuning senilai Rp5.588.613.034,75 - 1 unit Drainase Lingkungan Kamar Kajar senilai Rp1.592.378.255,12 - 1 unit Drainase Curah Koboan senilai Rp7.678.079.553,00 - 1 unit Drainase Gumuk Mas senilai Rp334.429.010,97

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				- 1 unit Drainase Sumpersari senilai Rp6.803.533.921,18 - 1 unit Drainase Saluran Perkampungan senilai Rp82.755.313,13 - 1 unit Jembatan 1 senilai Rp989.725.295,57 - 1 unit Jembatan 2 senilai Rp989.725.295,57 - 1 unit Jembatan 3 senilai Rp989.725.295,57 - 1 unit Jembatan 4 senilai Rp989.725.295,57 - 1 unit Dinding Penahan Tanah Area Jembatan 1 senilai Rp182.693.443,09 - 1 unit Dinding Penahan Tanah Area Jembatan 2 senilai Rp182.693.443,09 - 1 unit Dinding Penahan Tanah Area Jembatan 3 senilai Rp182.693.443,09 - 1 unit Dinding Penahan Tanah Area Jembatan 4 senilai Rp182.693.443,09 - 1 unit Dinding Penahan Saluran Penangkap dan Pembuang senilai Rp1.918.679.035,56 - 1 unit Dinding Penahan Area Permukiman senilai Rp2.748.829.911,46 - 1 unit Gorong-gorong (4 unit) senilai Rp119.679.052,51 - 1 unit Jalan Masuk ke Hunian senilai Rp119.679.052,51
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	37.905.962.867,20	Hibah dari KemenPU dengan nomor Ps 0403/Bb8.7/233 tanggal 14 maret 2025, berupa Paket Peningkatan Jalan Lingkar Timur Lumajang
4.	Reklasifikasi Antar Golongan Barang			Jumlah total senilai Rp721.020.463,00
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	219.275.463,00	Berupa IPAL RSUD Pasirian reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	492.595.000,00	Berupa biaya perencanaan pembangunan jalan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) yaitu : - Perencanaan Peningkatan Jalan Paket 1 (Peningkatan Jalan Sumberjati - Karangrejo) senilai Rp99.990.000,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Paket 3 (Peningkatan Jalan Sumberwuluh - Gunung Sawur) senilai Rp95.016.000,00, - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 4 (Jalan Pasrujambe - Tawonsongo) senilai Rp99.700.000,00, - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 5 (Jalan Grobogan - Curah Petung) senilai Rp99.932.000,00, dan - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 3 (Jalan Klakah - Sawaran Kulon) senilai 97.957.000,00.
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	9.150.000,00	Berupa Perencanaan Jalan Cempaka Kelurahan Jogotrunan dari Konstruksi Dalam Pekerjaan

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
5.	Hutang Belanja			Jumlah total senilai Rp187.985.954,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	187.985.954,00	Berupa Rehab Talud Jalan Banyuputih Kidul - Randuagung senilai Rp93889548,50 dan Rehab Talud Jalan Karanganyar - Kraton senilai Rp94.096.405,50
Jumlah Penambahan		64	188.458.519.546,36	

Rincian dapat dilihat pada lampiran 11 (Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025).

b) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2025 sebanyak 138 buah dengan pengurangan nilai sebesar Rp30.232.290.554,240 lebih jelasnya pada tabel berikut.

Tabel 196. Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Penghapusan			Jumlah total sebanyak 9 buah senilai Rp23.246.030.941,26
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9	23.246.030.941,26	- SK Sekretaris Daerah Nomor: 100.3.3.5/11/KEP/427.12/2025, tanggal 21 April 2025, Penghapusan karena Alasan Pemindahtanganan Melalui mekanisme Hibah sebanyak 9 barang (Jalan Karanganom- Senduro, Jalan Semeru, Jalan Banjarwaru-Karanganom, Saluran Drainase Jalan Sarikemuning- Senduro (Karanganom-Senduro, Saluran Drainase Jalan Sarikemuning-Senduro, Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Banjarwaru-Karanganom, Talud Jalan Klatung-Purwosono (Banjarwaru-Karanganom), Talud Jalan Purwosono, Talud Jalan Karanganom-Senduro)
2.	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-Lain)			Jumlah total sebanyak 115 buah senilai Rp1.256.274.150,00
	- Dinas Lingkungan Hidup	115	1.256.274.150,00	Berupa Tong Pilah Sampah sebanyak 85 buah senilai Rp606.574.150,00, Tong Sampah Portabel sebanyak 20 buah senilai Rp139.700.000,00, dan Lampu Hias sebanyak 10 buah senilai Rp510.000.000,00
3.	Belanja Modal Reklasifikasi Ke Aset Tetap yang lain			Jumlah total sebanyak 11 buah senilai Rp5.435.713.862,98
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	4.463.725.200,00	Reklas ke Gedung dan Bangunan (RSUD dr Haryoto - Tambah Daya Listrik)
	- Dinas Perhubungan	1	83.720.000,00	Reklas ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa Perencanaan pengadaan pasang baru PJU
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	888.268.662,98	Reklas ke Konstruksi dalam Pekerjaan berupa : - Perencanaan Peningkatan Jalan Gesang -Tumpang senilai Rp102.821.507,98, - Perencanaan Peningkatan Jalan Sumbermujur - Penanggal senilai Rp89.873.967,00,

b

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				- Perencanaan Peningkatan Jalan Gunung Sawur - Penanggal senilai Rp99.870.000,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Tanggung - Kalisemut senilai Rp69.750.000,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Wonosari - Kabuaran senilai Rp89.750.000,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Umbulrejo senilai Rp39.883.188,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Tumpeng - Pasrujambe senilai Rp99.870.000,00, - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tunjung - Kalibanter senilai Rp97.000.000,00, - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kalidilem - Sukosari senilai Rp99.650.000,00, dan - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ranu Klakah - Sumberingin senilai Rp99.800.000,00.
4.	Belanja Modal Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)			Jumlah total sebanyak 3 buah senilai Rp294.271.600,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	294.271.600,00	Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Tidak Berwujud berupa : - Kajian Teknis Pembangunan Jalan Kali Gede - Karangmenjangan senilai Rp99.204.640,00, - Database drainase senilai Rp99.606.906,00, dan - Leger jalan paket 1 senilai Rp95.460.00,00.
Jumlah Penambahan		138	30.232.290.554,24	

c) Jalan yang dibangun di Tanah Pihak Lain

Jalan yang dibangun di Tanah Pihak Lain sebanyak 40 ruas jalan yaitu:

- Seluruh ruas jalan tanahnya milik pihak lain : 32 ruas
- Sebagian dari ruas jalan tanahnya milik pihak lain : 8 ruas
- Jumlah : 40 ruas

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 12 (Daftar Jalan yang dibangun bukan diatas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang).

d) Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan yang berada di Kawasan Hunian Tetap Akibat Bencana Erupsi Gunung Semeru

Status Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan yang berada di Kawasan Hunian Tetap Akibat Bencana Erupsi Gunung Semeru berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan, Drainase, Jembatan dan Dinding Penahan Tanah, SPAM 25 l/detik dan Sanitasi Pada Kawasan Relokasi Bencana Semeru 2000 KK antara Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Timur dengan Bupati Lumajang Nomor: 280/BA/Cb16/2022 dan 050/2830/427.71/2022, tanggal 12 Oktober 2022. maka statusnya masih milik Pemerintah Pusat. sehingga belum dicatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Pada tahun 2024 berdasarkan berita acara serah terima barang milik negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten

Lumajang Nomor 703.1/BA/Dc/2024 dan 028/2281/427.1/2024, tanggal 10 Oktober 2024 tentang penyerahan barang milik negara berupa jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa sistem pengelolaan air minum, sistem tempat sampah terpadu dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Maka berdasarkan berita acara serah terima barang milik negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut untuk aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa sistem pengelolaan air minum, sistem tempat sampah terpadu dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dicatat di neraca Pemerintah Kabupaten Lumajang.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5) Aset Tetap Lainnya	124.444.235.670,00	136.149.553.353,69

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 sebesar Rp124.444.235.670,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp136.149.553.353,69 maka mengalami penurunan sebesar 8,60%, berasal dari penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp11.003.959.922,00 dan pengurangan sebesar Rp22.709.277.605,69 maka pengurangan riil sebesar (Rp11.705.317.683,69).

a) Penambahan Aset Tetap Lainnya

Penambahan Penambahan Aset Tetap Lainnya di tahun 2025 sebanyak 213.256 buah dengan penambahan nilai sebesar Rp11.003.959.922,00, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 197. Penambahan Aset tetap Lainnya Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			Jumlah total sebanyak 212.692 buah senilai Rp10.970.520.852,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203.774	10.047.486.652,00	
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.918	923.034.200,00	
2.	Koreksi Kurang Catat			Jumlah total sebanyak 64 buah
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	64		Koreksi kurang catat jumlah barang (Buku)
3.	Hibah			Jumlah total sebanyak 500 buah senilai Rp33.439.070,00
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Klakah)	100	6.669.748,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. 50627/4.2/PLK.03.07/XI.2025 tanggal 25 november 2025, berupa 100 buah buku
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Yosowilangun)	100	6.699.858,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. 51656/4.2/PLK.03.07/XI.2025 tanggal 12 november 2025, berupa 100 buah buku

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Tekung)	100	6.669.748,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. 50626/4.2/PLK.03.07/XI.2025 tanggal 12 november 2025, berupa 100 buah buku
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Penanggal)	100	6.699.858,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. 51654/4.2/PLK.03.07/XI.2025 tanggal 13 november 2025, berupa 100 buah buku
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Puskesmas Tempeh)	100	6.699.858,00	Hibah dari Perpustakaan Nasional dengan nomor BA. 51655/4.2/PLK.03.07/XI.2025 tanggal 13 november 2025, berupa 100 buah buku
Jumlah Penambahan		213.256	11.003.959.922,00	

b) Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Pengurangan Aset Tetap Lainnya di tahun 2025 sebanyak 943.212 buah dengan pengurangan nilai sebesar Rp22.709.277.605,69, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 198. Pengurangan Aset tetap Lainnya Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jml Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-Lain)			Jumlah total sebanyak 943.206 buah senilai Rp22.700.327.605,69
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	943.103	22.646.991.605,69	Berupa Buku
	- Dinas Lingkungan Hidup	103	53.336.000,00	Berupa Buku, dan Piala
2.	Koreksi Lebih Catat			Jumlah total sebanyak 4 buah
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	0	Koreksi lebih catat jumlah barang (Buku)
3.	Reklasifikasi Antar Golongan Barang			Jumlah total sebanyak 2 buah senilai Rp8.950.000,00
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Sidomulyo 02 Pronojiwo)	1	4.000.000,00	Berupa 1 unit Speaker senilai Rp4.000.000,00 reklasifikasi ke peralatan dan mesin
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SDN Sumberurip 02 Pronojiwo)	1	4.950.000,00	Berupa 1 unit Wireless Sound senilai Rp4.950.000,00 reklasifikasi ke peralatan dan mesin
Jumlah Pengurangan		943.212	22.709.277.605,69	

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.799.504.397,98	12.121.519.767,85

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.799.504.397,98 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp12.121.519.767,85 maka mengalami penurunan sebesar 60.41%, berasal dari penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.584.639.180,98 dan pengurangan sebesar Rp9.906.654.550,85 maka pengurangan riil sebesar (Rp7.322.015.369,87).

a) Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2025 berasal dari Reklasifikasi dari Belanja Modal yang lain sebanyak 16 buah/paket dan Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebanyak 1 buah/paket dengan nilai Rp2.584.639.180,98 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 199. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Dalam Rupiah				
No.	Uraian	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Reklasifikasi dari Belanja Modal yang lain			Jumlah total sebanyak 16 buah senilai Rp2.222.445.580,98
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	172.456.300,00	Dari Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan (Biaya Perencanaan Rehab Sekolah di 31 satuan pendidikan) berupa : - Pembangunan R. Kelas Baru (SMPN Satap Ranupane) senilai Rp13.986.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Sumbermujur 01) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kalipenggung 04) senilai Rp5.911.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Banyuputih Kidul 02) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Sawaran Kulon 02) senilai Rp5.854.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Curah Petung 03) senilai Rp3.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Krasak 01) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kaliboto Lor 02) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Grobogan 01) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Pagowan 01) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Citrodiwangsan 01) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kedawung 03) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Merakan 02) senilai Rp3.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Wonokerto 03) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Karanganom 02) senilai Rp5.950.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Gucialit 01) senilai Rp6.000.000,00

b

No.	Uraian	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				- Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Ranuyoso 01) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Nogosari 02) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kalisemut 03) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Uranggantung 01) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Sentul 01) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Karangbendo 05) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Tegalrejo 02) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Yosowilangun Lor 03) senilai Rp6.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kalidilem 03) senilai Rp6.000.000,00 - Rehab Ruang Guru (SDN Kenongo) senilai Rp2.961.300,00 - Rehab Ruang Guru (SDN Citrodwangsan 01) senilai Rp2.794.000,00 - Pembangunan Ruang Kelas (SDN Salak 01) senilai Rp6.000.000,00 - Pembangunan Toilet (SDN Bago 03) senilai Rp3.000.000,00 - Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (SMPN 1 Ranuyoso) senilai Rp4.000.000,00 - Rehabilitasi Toilet (SMP SSA Negeri Wonokerto) senilai Rp2.000.000,00
	- Dinas Perhubungan	1	83.720.000,00	Dari Belanja Modal Aset Jalan Irigasi dan Jaringan (Perencanaan pengadaan pasang baru PJU)
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	3	44.719.618,00	Dari Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan berupa : - Perencanaan pasar agropolitan-pasang portal sebanyak 1 paket senilai Rp23.064.868,00, - rehab pasar Yosowilangun sebanyak 1 paket senilai Rp9.574.500,- dan - rehab pasar Klojen sebanyak 1 paket senilai Rp12.080.250,00)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	1.033.281.000,00	Dari Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan (Biaya MC 100 % Bangunan IGD RSUD senilai Rp934.812.800,00, Perencanaan Pembangunan Kampus Unej di Lumajang sebanyak 1 paket senilai Rp2.557.000,00, dan Perencanaan Pembangunan Gedung Polinema Tahap III sebanyak 1 paket senilai Rp95.911.200,00)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	888.268.662,98	Dari Belanja Modal Aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa : - Perencanaan Peningkatan Jalan Gesang -Tumpang senilai Rp102.821.507,98, - Perencanaan Peningkatan Jalan Sumbermujur - Penanggal senilai Rp89.873.967,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Gunung Sawur - Penanggal senilai Rp99.870.000,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Tanggung - Kalisemut senilai Rp69.750.000,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Wonosari - Kabuaran senilai Rp89.750.000,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Umbulrejo senilai Rp39.883.188,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Tumpang - Pasrujambe senilai

No.	Uraian	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
				Rp99.870.000,00, - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tunjung - Kalibanter senilai Rp97.000.000,00, - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kalidilem - Sukosari senilai Rp99.650.000,00, dan - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ranu Klakah - Sumberingin senilai Rp99.800.000,00.
2.	Reklasifikasi dari Belanja Barang & Jasa			Jumlah total sebanyak 1 buah senilai Rp362.193.600,00
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	362.193.600,00	Perencanaan berupa dokumen FS, DED, UKL UPL
	Jumlah Penambahan	17	2.584.639.180,98	

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 13 (Daftar Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025).

b) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2025 sebanyak 9 buah/paket dengan pengurangan nilai sebesar Rp9.906.654.550,85 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 200. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Penghapusan			Jumlah total sebanyak 1 buah senilai Rp42.735.000,00
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (RSUD Pasirian)	1	42.735.000,00	Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/22/KEP/427.12/2025 Tanggal 19 Mei 2025, Penghapusan karena Alasan Kadaluwarsa
2.	Reklasifikasi Antar Golongan Barang			Jumlah total sebanyak 8 buah senilai Rp9.863.919.550,85
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	196.800.000,00	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Biaya Perencanaan Gedung IGD Baru (RSUD dr Haryoto)
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	9.150.397.605,00	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Pembangunan IGD RSUD dr. HARYOTO Lumajang
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	492.595.000,00	Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa - Perencanaan Peningkatan Jalan Paket 1 (Peningkatan Jalan Sumberjati - Karangrejo) senilai Rp99.990.000,00, - Perencanaan Peningkatan Jalan Paket 3 (Peningkatan Jalan Sumberwuluh - Gunung Sawur) senilai Rp95.016.000,00, - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 4 (Jalan Pasrujambe - Tawonsongo) senilai Rp99.700.000,00, - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 5 (Jalan Grobogan - Curah Petung) senilai Rp99.932.000,00, dan - Perencanaan Rehabilitasi Jalan Paket 3 (Jalan Klakah - Sawaran Kulon) senilai 97.957.000,00.

No.	Uraian	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	14.976.945,85	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Gedung kantor (Depan)
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	9.150.000,00	Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan karena konstruksi selesai dikerjakan berupa Perencanaan Rehabilitasi Jalan Cempaka Kelurahan Jogotrunan
	Jumlah Pengurangan	9	9.906.654.550,85	

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
7) Akumulasi Penyusutan	(2.416.844.142.428,59)	(2.291.784.011.093,08)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.416.844.142.428,59) dan 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.291.784.011.093,08) di Tahun 2025 terjadi penambahan penyusutan sebesar (Rp6.913.251.715,31) dan pengurangan sebesar (Rp44.378.587.675,07) serta adanya beban penyusutan tahun 2025 sebesar (Rp162.525.467.295,26). untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 201. Perkembangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Nilai Barang (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	(2.291.784.011.093,08)
2.	Bertambah/masuk	(6.913.251.715,31)
3.	Berkurang/keluar	44.378.587.675,07
4.	Beban Penyusutan Tahun 2025	(162.525.467.295,26)
5.	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025	(2.416.844.142.428,59)

a) Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

Penambahan Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar (Rp6.913.251.715,31) yang berasal dari koreksi kurang catat dan mutasi masuk. dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 202. Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Koreksi Kurang Catat Saldo Awal	Reklas Antar Golongan Barang	Mutasi Masuk
1	Peralatan dan Mesin	(214.863.250,00)	(150.084.000,00)	(2.253.523.750,00)
2	Gedung dan Bangunan	(1.112.226.920,52)	0,00	(319.709.819,80)
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	(1.965.303.108,84)	(46.493.866,15)	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	(851.047.000,00)
Jumlah		(3.292.393.279,36)	(196.577.866,15)	(3.424.280.569,80)
Jumlah Total		(6.913.251.715,31)		

b) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

Pengurangan Akumulasi Penyusutan tahun 2025 sebesar (Rp44.378.587.675,07) yang berasal dari koreksi lebih catat dan mutasi keluar. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 203. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Koreksi Lebih Catat Saldo Awal	Penghapusan	Reklasifikasi Antar Golongan Barang	Reklasifikasi Ke Aset Tetap Extra komptabel	Reklasifikasi Ke Aset Lainnya - Aset Lain-Lain	Mutasi Keluar
1	Peralatan dan Mesin	(2.917.400,01)	(628.731.030,00)	(150.084.000,00)	(200.000,00)	(7.371.541.199,47)	(2.253.523.750,00)
2	Gedung dan Bangunan	(916.645.131,27)	(718.657.395,52)	(46.493.866,15)	0,00	(12.074.022,41)	(319.709.819,80)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(8.686.004.558,26)	(21.585.760.856,05)	0,00	0,00	(697.658.646,13)	0,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	(137.539.000,00)	(851.047.000,00)
Jumlah		(9.605.567.089,54)	(22.933.149.281,57)	(196.577.866,15)	(200.000,00)	(8.218.812.868,01)	(3.424.280.569,80)
Jumlah Total		(44.378.587.675,07)					

c) Beban Penyusutan di Tahun 2025

Beban Penyusutan di tahun 2025 sebesar (Rp162.525.467.295,26) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 204. Beban Penyusutan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	U R A I A N	Beban Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	(59.416.544.903,93)
2	Gedung dan Bangunan	(23.985.946.738,63)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(79.113.335.152,70)
4	Aset Tetap Lainnya	(9.640.500,00)
Jumlah		(162.525.467.295,26)

Dari uraian tersebut di atas maka tersusun daftar Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 yang dapat dilihat pada lampiran 15 (Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025).

d. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Properti Investasi	16.688.419.600,00	16.688.419.600,00

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan dan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap). Pencatatan Properti Investasi ini berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2023 tanggal 20 September 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.

Saldo Properti Investasi Per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.688.419.600,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.688.419.600,00. Pada tahun 2025 tidak ada penambahan ataupun pengurangan Aset Properti Investasi.

Rincian daftar properti investasi sebagaimana disajikan pada lampiran 15 (Daftar Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Saldo nol ini dikarenakan Properti Investasi tahun 2025 berupa tanah sehingga tidak ada penyusutan.

Tabel 205. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025

Dalam Rupiah		
No	Uraian	Nilai Barang
1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024	0,00
2	Penambahan (reklasifikasi dari Aset Lainnya - Properti Investasi)	0,00
3	Pengurangan	0,00
4	Beban Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025	0,00
5	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025	0,00

e. DANA CADANGAN

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
1) Dana Cadangan	15.189.318.358,61	0,00

Pada tahun 2025 realisasi Dana Cadangan sebesar Rp15.189.318.358,61 dan Tahun 2024 Rp0,00. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selaku Bendahara Umum Daerah dengan P.T Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Lumajang tentang Penempatan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2029 dalam Bentuk Deposito Nomor : 916/810/427.73/2025 dan Nomor : 064/724/LMK/PN/PKS tanggal 4 Agustus 2025 dengan Nomor Seri DB 682300 sebesar Rp15.000.000.000,00 serta bunga deposito dimasukkan ke Rekening Giro Dana Cadangan Pemda Lumajang Nomor 0091320355 sebesar Rp189.318.358,61 (Jasa Giro Dana Cadangan Rp1.201.920,27 + Bunga Deposito Dana Cadangan Rp188.116.438,34).

Tabel 206. Dana Cadangan 2025

Dalam Rupiah					
NO	PERIODE	DEPOSITO POKOK DANA CADANGAN	JASA GIRO DANA CADANGAN	BUNGA DEPOSITO DANA CADANGAN	SALDO DANA CADANGAN
1	SALDO AWAL 2025	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
2	PENAMBAHAN 2025:				
3	September		1.095.000,00	54.143.835,61	55.238.835,61
4	Oktober		13.764,06	46.232.876,71	46.246.640,77
5	November		34.853,67	44.589.041,09	44.623.894,76
6	Desember		58.302,54	43.150.684,93	43.208.987,47
7	JUMLAH PENAMBAHAN 2025 (3 s/d 6)	0,00	1.201.920,27	188.116.438,34	189.318.358,61
8	TOTAL 2025 (1+7)	15.000.000.000,00	1.201.920,27	188.116.438,34	15.189.318.358,61
9	PENCAIRAN DANA CADANGAN				0,00
10	SALDO AKHIR 2025				15.189.318.358,61

f. ASET LAINNYA

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
ASET LAINNYA	459.427.465.627,51	437.323.899.003,13

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp459.427.465.627,51 dan saldo Per 31 Desember 2024 sebesar Rp437.323.899.003,13, terinci sebagai berikut:

Tabel 207. Saldo Aset Lainnya Tahun 2025

Dalam Rupiah			
No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Aset Tak Berwujud (ATB)	57.186.988.844,22	53.516.116.701,22
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud (ATB)	(46.806.103.554,67)	(43.042.315.671,27)
3	Aset yang dibatasi penggunaannya	1.135.924.343,57	1.114.660.144,25
4	Aset Lain – lain	485.012.060.670,32	455.308.234.453,18
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain – lain	(37.101.404.675,93)	(29.572.796.624,25)
	Saldo akhir	459.427.465.627,51	437.323.899.003,13

Rincian per jenis aset lainnya sebagaimana disajikan pada lampiran 16 (Daftar Rincian Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Aset Tidak Berwujud (ATB)	57.186.988.844,22	53.516.116.701,22

Aset Tidak Berwujud adalah aset berupa perangkat lunak (software) komputer dan kajian yang dilakukan oleh SKPD. Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 890 buah dengan nilai sebesar Rp57.186.988.844,22 sedangkan saldo Per 31 Desember 2024 sebanyak 867 buah sebesar Rp53.516.116.701,22 maka mengalami peningkatan sebesar 6,86%, berasal dari penambahan sebesar Rp3.782.871.943,00 dan pengurangan sebesar Rp111.999.800,00 maka penambahan riil sebesar Rp3.670.872.143,00.

a) Penambahan Aset Tidak Berwujud

Pada Tahun 2025 terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud sebanyak 31 buah dengan nilai sebesar Rp3.782.871.943,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 208. Penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Jumlah Barang (buah)	Nilai Barang (Rp)	Keterangan
1.	Realisasi Belanja Modal ATB			Jumlah total sebanyak 28 buah senilai Rp3.488.600.343,00
	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	824.378.200,00	
	- Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	197.802.000,00	
	- Badan Pajak dan Retribusi Daerah	1	199.746.750,00	
	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	24.999.900,00	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	79.868.718,00	
	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	100.207.000,00	
	- Dinas Lingkungan Hidup	2	182.482.650,00	
	- Dinas Komunikasi & Informatika	1	132.720.000,00	
	- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	149.175.120,00	
	- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	3	310.728.405,00	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	1.118.992.600,00	
	- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	94.350.000,00	
	- Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	73.149.000,00	
2.	Penambahan dari Belanja Modal Aset Tetap			Jumlah total sebanyak 3 buah senilai Rp294.271.600,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	294.271.600,00	Dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (Kajian)
Jumlah Penambahan		31	3.782.871.943,00	

b) Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Pada Tahun 2025 terdapat pengurangan Aset Tidak Berwujud sebanyak 8 buah dengan nilai sebesar Rp111.999.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Penghapusan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 100.3.3.5/42/KEP/427.12/2025 Tanggal 18 Juli 2025 sebanyak 8 buah senilai Rp111.999.800,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Akumulasi Amortisasi ATB	(46.806.103.554,67)	(43.042.315.671,27)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025 sebesar (Rp46.806.103.554,67) dan 31 Desember 2024 sebesar (Rp43.042.315.671,27) dengan pengurangan sebesar (Rp111.999.800,00) dan beban Amortisasi sebesar (Rp3.875.787.683,40) dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 209. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	U R A I A N	Nilai Barang (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi ATB Tahun 2024	(43.042.315.671,27)
2	Penambahan	0,00
3	Pengurangan	111.999.800,00
4	Beban Amortisasi Tahun 2025	(3.875.787.683,40)
5	Akumulasi Amortisasi ATB Tahun 2025	(46.806.103.554,67)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3) Aset yang dibatasi Penggunaannya	1.135.924.343,57	1.114.660.144,25

Aset yang dibatasi Penggunaannya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan kas milik pihak ketiga sebagai jaminan pembongkaran bangunan papan reklame yang telah diikat dengan perjanjian bersama antara pihak ketiga dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kas tersebut akan dapat dicairkan oleh pihak ketiga jika kewajiban pembongkaran papan reklame yang sudah habis ijinnya telah dilaksanakan. Kas tersebut akan menjadi milik pemerintah jika pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya.

Saldo akhir aset yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp1.135.924.343,57. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

6

Tabel 210. Rincian Aset Yang Dibatasi Penggunaanya Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. SERI	TANGGAL DEPOSITO	POKOK JAMINAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN TAHUN 2025				PENGURANGAN	SALDO AKHIR
					1-Jan-25	TW 1	TW2	TW3	TW4	TAHUN 2025	31-Dec-25
A.	JABONG REKLAME										
1	CV Adhi Kartika Jaya	DB. 371387	15-May-18	11.800.000,00	14.134.165,50	75.412,53	77.502,86	77.925,58	77.497,43		14.442.503,90
2	PT Cahaya Sembilan Bintang	DB. 371450	3-Jul-18	2.500.000,00	3.111.062,93	20.757,94	21.361,91	21.507,61	21.418,41		3.196.108,80
3	PT Berlian Indo Medika	DB. 371579	6-Aug-18	2.500.000,00	3.099.873,57	20.683,28	21.285,08	21.430,26	21.341,38		3.184.613,57
4	PT Cahaya Sembilan Bintang	DB. 371602	16-Aug-18	2.500.000,00	3.099.217,02	20.678,90	21.280,58	21.425,73	0.00	3.162.602	0.00
5	CV Prakasa Jaya	DB. 371627	4-Sep-18	3.998.000,00	4.736.907,07	25.273,66	25.974,21	26.115,88	25.972,18		4.840.243,00
6	CV Prakasa Jaya	DB. 371628	4-Sep-18	3.998.000,00	4.735.171,99	25.264,41	25.964,71	26.106,32	25.962,57		4.838.470,00
7	CV Puncak Jaya	DB. 371865	25-Sep-18	4.820.000,00	5.926.150,83	39.541,05	40.691,54	40.969,09	40.798,49		6.088.151,00
8	CV Prakasa Jaya	DB. 371889	9-Oct-18	4.802.800,00	5.672.886,29	30.267,56	31.106,55	31.276,20	31.103,40		5.796.640,00
9	CV Prakasa Jaya	DB. 413070	21-Nov-18	3.998.000,00	4.707.582,44	25.117,20	25.813,42	25.954,20	25.810,74		4.810.278,00
10	CV Prakasa Jaya	DB. 413071	21-Nov-18	3.998.000,00	4.707.582,44	25.117,20	25.813,42	25.954,20	25.810,74		4.810.278,00
11	PT. Colorindo Adhi Perkasa	DB. 413134	28-Dec-18	3.400.200,00	3.989.008,73	21.283,26	21.873,21	21.992,52	21.871,28		4.076.029,00
12	CV. Garuda Sakti Indonesia (3 titik)	DB. 413607	5-Jul-19	3.400.000,00	4.055.298,79	27.058,17	27.845,44	28.035,38	27.918,22		4.166.156,00
13	Kartono	DB. 451476	30-Nov-20	4.060.700,00	4.570.699,12	30.497,13	31.384,41	31.598,49	31.466,85		4.695.646,00
14	CV Central	DB.446872	28-Apr-21	2.694.700,00	2.926.418,17	15.613,83	16.046,64	16.134,15	16.045,21		2.990.258,00
15	CV Central	DB.446557	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
16	CV Central	DB.446558	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
17	CV Central	DB.446559	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
18	CV Central	DB.446560	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
19	CV Central	DB.446561	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
20	CV Central	DB.446562	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
21	CV Central	DB.446563	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
22	CV Central	DB.446564	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. SERI	TANGGAL DEPOSITO	POKOK JAMINAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN TAHUN 2025				PENGURANGAN	SALDO AKHIR
					1-Jan-25	TW 1	TW2	TW3	TW4	TAHUN 2025	31-Dec-25
23	CV Central	DB.446565	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
24	CV Central	DB.446566	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
25	CV Central	DB.446567	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
26	CV Central	DB.446568	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
27	CV Central	DB.446569	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
28	CV Central	DB.446570	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
29	CV Central	DB.446571	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
30	CV Central	DB.446572	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
31	CV Central	DB.446573	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
32	CV Central	DB.446574	4-Jun-21	2.694.700,00	2.913.277,45	15.543,73	15.974,58	16.061,70	15.972,54		2.976.830,00
33	CV Central	DB.446525	19-Aug-21	2.694.700,00	2.900.168,04	15.473,79	15.902,69	15.989,42	15.901,06		2.963.435,00
34	CV Central	DB.446526	19-Aug-21	2.694.700,00	2.900.168,04	15.473,79	15.902,69	15.989,42	15.901,06		2.963.435,00
35	Katiningsih	DB.452017	20-Jan-22	12.772.000,00	13.606.996,62	72.599,83	74.612,19	75.019,15	74.606,21		13.903.834,00
36	Ryo Mey Martino	DB.452021	27-Jan-22	2.901.000,00	3.090.659,02	16.490,15	16.947,22	17.039,66	16.945,95		3.158.082,00
37	Ryo Mey Martino	DB.452020	27-Jan-22	2.897.000,00	3.086.397,51	16.467,40	16.923,87	17.016,17	16.922,05		3.153.727,00
38	Ryo Mey Martino	DB.452022	27-Jan-22	4.000.000,00	4.261.508,47	22.737,19	23.367,43	23.494,89	23.365,02		4.354.473,00
JUMLAH JABONG REKLAME				134.934.400,00	151.756.917	841.595,41	865.142,51	870.084,92	844.163,97	3.162.602,23	152.015.301,27
B	JABONG MENARA TELEKOMUNIKASI										
1	PT. Citra Gaia	DB.371339	25-Apr-18	15.788.150,00	18.957.538,47	101.147,54	103.950,99	104.518,37	103.943,93		19.371.099,30
2	PT. Citra Gaia	DB.371340	25-Apr-18	15.678.850,00	18.826.297,04	100.447,30	103.230,66	103.795,49	103.223,51		19.236.994,00
3	PT. Citra Gaia	DB.371341	25-Apr-18	15.708.400,00	18.861.779,11	100.636,60	103.425,29	103.991,04	103.417,96		19.273.250,00
4	PT. Citra Gaia	DB.371342	25-Apr-18	17.824.600,00	21.402.795,16	114.194,15	117.358,69	118.000,31	117.350,69		21.869.699,00
5	PT Solusindo Kreasi Pratama	DB. 371367	4-May-18	11.841.373,00	14.186.127,71	75.689,76	77.787,53	78.212,32	77.781,68		14.495.599,00
6	PT Protelindo	DB. 371361	4-May-18	6.890.250,00	8.254.614,32	44.042,31	45.262,37	45.510,73	45.259,27		8.434.689,00
7	PT Protelindo	DB. 371362	4-May-18	6.890.250,00	8.254.614,32	44.042,32	45.262,36	45.510,73	45.259,27		8.434.689,00

6

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. SERI	TANGGAL DEPOSITO	POKOK JAMINAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN TAHUN 2025				PENGURANGAN	SALDO AKHIR
					1-Jan-25	TW 1	TW2	TW3	TW4	TAHUN 2025	31-Dec-25
8	PT Protelindo	DB. 371363	4-May-18	6.890.250,00	8.254.614,32	44.042,33	45.262,35	45.510,73	45.259,27		8.434.689,00
9	PT Protelindo	DB. 371364	4-May-18	6.890.250,00	8.254.614,32	44.042,34	45.262,34	45.510,73	45.259,27		8.434.689,00
10	PT Protelindo	DB. 371365	4-May-18	6.890.250,00	8.254.614,32	44.042,35	45.262,33	45.510,73	45.259,27		8.434.689,00
11	PT Protelindo	DB. 371366	4-May-18	6.890.250,00	8.254.614,32	44.042,36	45.262,32	45.510,73	45.259,27		8.434.689,00
12	PT Dayamitra Telekomunikasi	DB. 371417	5-Jun-18	3.832.700,00	4.578.406,63	24.427,99	25.104,38	25.242,74	25.103,26		4.678.285,00
13	PT Dayamitra Telekomunikasi	DB. 371418	5-Jun-18	3.832.700,00	4.578.406,63	24.427,99	25.104,38	25.242,74	25.103,26		4.678.285,00
14	PT Iforte Solusi Infoten	DB. 371425	7-Jun-18	9.245.500,00	11.045.070,15	58.930,73	60.564,12	60.894,63	60.559,37		11.286.019,00
15	PT De Sehati	DB. 371439	27-Jun-18	8.900.000,00	10.620.458,66	56.665,23	58.235,11	58.554,32	58.231,68		10.852.145,00
16	PT De Sehati	DB. 371440	27-Jun-18	8.900.000,00	10.620.458,66	56.665,23	58.235,11	58.554,32	58.231,68		10.852.145,00
17	PT De Sehati	DB. 371441	27-Jun-18	8.900.000,00	10.620.458,66	56.665,23	58.235,11	58.554,32	58.231,68		10.852.145,00
18	PT Centratama Menara Indonesia	DB. 371878	3-Oct-18	7.839.000,00	9.258.523,53	49.398,65	50.767,82	51.044,90	50.764,10		9.460.499,00
19	PT Centratama Menara Indonesia	DB. 371879	3-Oct-18	7.839.000,00	9.258.523,53	49.398,65	50.767,82	51.044,90	50.764,10		9.460.499,00
20	PT Protelindo	DB. 371884	5-Oct-18	18.094.000,00	21.370.546,79	114.022,09	117.182,12	117.822,25	117.173,75		21.836.747,00
21	PT Protelindo	DB. 371885	5-Oct-18	17.786.200,00	21.007.008,96	112.082,43	115.188,61	115.818,06	115.180,94		21.465.279,00
22	PT Dayamitra Telekomunikasi	DB. 371921	24-Oct-18	3.832.700,00	4.522.909,86	24.131,89	24.800,25	24.936,59	24.798,41		4.621.577,00
23	PT Asri Duta Indonesia	DB. 413058	12-Nov-18	15.406.500,00	18.145.180,01	96.813,21	99.495,78	100.040,38	99.489,62		18.541.019,00
24	PT. Centratama Menara Indonesia	DB.413144	3-Jan-19	11.907.700,00	13.944.161,99	74.398,77	76.460,24	76.878,81	76.455,19		14.248.355,00
25	PT Protelindo	DB. 413177	23-Jan-19	15.428.500,00	18.051.790,17	96.314,93	98.983,90	99.525,28	98.977,72		18.445.592,00
26	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 413236	25-Feb-19	10.188.000,00	11.889.896,60	63.438,29	65.196,11	65.552,91	65.192,09		12.149.276,00
27	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 413538	2-Jul-19	13.609.600,00	15.671.041,57	83.612,49	85.929,94	86.398,99	85.924,01		16.012.907,00
28	PT Protelindo	DB. 413685	19-Aug-19	15.497.600,00	17.790.617,57	94.921,44	97.551,99	98.085,17	97.544,83		18.178.721,00
29	PT Protelindo	DB. 413687	19-Aug-19	13.547.300,00	15.551.752,13	82.976,04	85.275,83	85.741,31	85.269,69		15.891.015,00
30	PT Protelindo	DB. 413686	19-Aug-19	16.952.200,00	19.460.439,53	103.830,75	106.708,72	107.290,86	106.701,14		19.884.971,00
31	PT Protelindo	DB. 413502	26-Sep-19	17.055.900,00	19.505.911,76	104.073,36	106.957,88	107.541,76	106.950,24		19.931.435,00

6

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. SERI	TANGGAL DEPOSITO	POKOK JAMINAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN TAHUN 2025				PENGURANGAN	SALDO AKHIR
					1-Jan-25	TW 1	TW2	TW3	TW4	TAHUN 2025	31-Dec-25
32	PT Protelindo	DB. 413803	26-Sep-19	15.428.500,00	17.644.742,29	94.143,14	96.752,57	97.280,44	96.745,56		18.029.664,00
33	PT. Inti Bangun Sejahtera, TBK	DB. 451833	13-May-20	34.885.166,00	39.048.160,55	208.340,60	214.114,85	215.284,01	214.099,99		39.900.000,00
34	PT. Tower Bersama	DB. 451316	7-Jul-20	17.400.000,00	19.366.216,85	103.328,02	106.192,13	106.771,33	106.184,67		19.788.693,00
35	PT. Tower Bersama	DB. 451317	7-Jul-20	17.890.000,00	19.911.587,31	106.237,84	109.181,85	109.778,86	109.174,14		20.345.960,00
36	PT. Tower Bersama	DB. 451318	7-Jul-20	17.890.000,00	19.911.587,31	106.237,84	109.181,85	109.778,86	109.174,14		20.345.960,00
37	PT. Tower Bersama	DB. 451319	7-Jul-20	17.890.000,00	19.911.587,31	106.237,84	109.181,85	109.778,86	109.174,14		20.345.960,00
38	PT. Tower Bersama	DB. 451320	7-Jul-20	18.700.000,00	20.813.118,08	111.047,93	114.125,99	114.748,54	114.117,46		21.267.158,00
39	PT. Tower Bersama	DB. 451635	29-Sep-20	14.400.000,00	15.919.970,87	84.940,77	87.294,36	87.771,95	87.288,05		16.267.266,00
40	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 451452	19-Oct-20	21.160.000,00	23.344.927,60	124.556,35	128.008,05	128.707,89	127.999,11		23.854.199,00
41	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 451453	19-Oct-20	21.297.000,00	23.496.073,91	125.362,79	128.837,30	129.540,75	128.828,25		24.008.643,00
42	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 451454	19-Oct-20	21.005.000,00	23.173.922,75	123.643,96	127.070,29	127.765,18	127.061,82		23.679.464,00
43	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 451451	19-Oct-20	20.276.000,00	22.369.647,98	119.352,76	122.660,26	123.330,87	122.652,13		22.857.644,00
44	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 451455	19-Oct-20	21.005.000,00	23.185.575,53	123.706,12	127.134,35	127.829,27	127.125,73		23.691.371,00
45	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 451498	11-Jan-21	14.885.900,00	16.292.297,31	86.927,20	89.336,49	89.824,17	89.329,83		16.647.715,00
46	PT. Inti Bangun Sejahtera, TBK	DB. 451500	13-Jan-21	24.140.700,00	26.421.476,82	140.971,20	144.877,98	145.669,69	144.868,31		26.997.864,00
47	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 446807	20-Jan-21	17.277.200,00	18.905.077,16	100.867,63	103.663,21	104.229,26	103.655,74		19.317.493,00
48	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 446807	20-Jan-21	14.885.900,00	16.288.466,19	86.906,75	89.315,06	89.803,47	89.308,53		16.643.800,00
49	PT. Dayamitra Telekomunikasi	DB. 446532	24-Aug-21	14.885.900,00	16.026.278,78	85.507,86	87.877,36	88.357,99	87.871,01		16.375.893,00
50	PT. Persada Sokka Tama	DB. 427775	21-Sep-21	10.930.400,00	11.737.911,56	62.627,37	64.363,07	64.714,61	64.358,39		11.993.975,00
51	PT. Inti Bangun Sejahtera, TBK	DB. 446549	30-Sep-21	11.957.500,00	12.840.456,08	68.510,06	70.408,86	70.793,11	70.403,89		13.120.572,00
52	PT. Protelindo	DB. 446625	22-Oct-21	19.004.200,00	20.326.573,65	108.451,98	111.457,37	112.066,79	111.450,21		20.770.000,00
53	PT. Protelindo	DB. 446624	24-Nov-21	14.020.100,00	14.995.663,87	80.009,03	82.226,10	82.675,92	82.220,08		15.322.795,00
54	PT. Tower Bersama	DB. 446629	20-Nov-21	20.136.000,00	21.537.128,20	114.911,03	118.095,77	118.740,43	118.087,57		22.006.963,00
55	PT. Tower Bersama	DB. 446630	20-Nov-21	21.936.000,00	23.462.378,10	125.183,16	128.652,74	129.354,76	128.643,24		23.974.212,00

6

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO. SERI	TANGGAL DEPOSITO	POKOK JAMINAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN TAHUN 2025				PENGURANGAN	SALDO AKHIR
					1-Jan-25	TW 1	TW2	TW3	TW4	TAHUN 2025	31-Dec-25
56	PT. Protelindo	DB. 446631	30-Nov-21	16.708.600,00	17.871.238,69	95.351,73	97.994,58	98.529,13	97.986,87		18.261.101,00
57	PT. Centratama Menara Indonesia	DB. 452006	29-Dec-21	17.948.900,00	19.160.676,25	102.231,49	105.064,26	105.638,95	105.057,05		19.578.668,00
58	PT. Protelindo (Kekurangan Bayar Deposito No. DB. 446624)	DB. 452007	30-Dec-21	3.111.900,00	3.321.992,39	17.724,44	18.215,17	18.315,61	18.214,39		3.394.462,00
59	Dayamitra Telekomunikasi PT	DB.452024	20-Jan-22	11.200.900,00	11.933.182,67	63.669,23	65.433,10	65.791,92	65.429,08		12.193.506,00
60	Centratama Menara Indonesia	DB.452253	5-Apr-22	13.622.600,00	14.431.524,70	76.999,09	79.133,21	79.565,19	79.127,81		14.746.350,00
JUMLAH JABONG MENARA TELEKOMUNIKASI				852.657.339,00	962.903.227,56	5.137.549,96	5.279.922,48	5.308.784,96	5.279.557,34	0,00	983.909.042,30
TOTAL				987.591.739,00	1.114.660.144,25	5.979.145,37	6.145.064,99	6.178.869,88	6.123.721,31	3.162.602,23	1.135.924.343,57

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
4) Aset Lain-lain	485.012.060.670,32	455.308.234.453,18

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp485.012.060.670,32 dan saldo 31 Desember 2024 sebesar Rp455.308.234.453,18. Ada penambahan pada aset lain-lain sebesar Rp31.477.208.411,82 berasal dari reklasifikasi aset karena rusak berat dan sudah diusulkan penghapusan sedangkan pengurangan sebesar Rp1.773.382.194,68 dari penghapusan aset, reklasifikasi ke aset lain-lain ekstrakomptabel karena nilai perolehan di bawah kapitalisasi dan pengurangan Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 211. Perkembangan Aset Lain-lain Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	URAIAN	Saldo Awal 01-Jan-25	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31 Des 2025	Keterangan	
1.	Reklasifikasi karena Rusak Berat dan tidak diketemukan	454.926.986.453,18	31.477.208.411,82	1.392.134.194,68	485.012.060.670,32	Bertambah :	31.477.208.411,82
						Reklasifikasi dari Aset Tetap karena rusak berat	
						- Inspektorat Kabupaten	128.460.000,00
						- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	604.428.500,00
						- Badan Pengelola Keuangan Daerah	727.550.455,34
						- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	548.571.000,00
						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.797.858.605,69
						- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.008.556.320,00
						- Satuan Polisi Pamong Praja	1.031.892.905,00
						- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	60.997.450,00
						- Dinas Lingkungan Hidup	2.134.007.666,79
						- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	586.293.276,00
						- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	98.446.400,00
						- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	235.883.500,00
						- Kecamatan Pasrujambe	198.624.883,00
						- Kecamatan Sumbersuko	160.966.700,00
						- Kecamatan Klakah	12.200.000,00
						- Kecamatan Randuagung	180.653.000,00
						- Kecamatan Yosowilangun	129.969.950,00
						- Kecamatan Tempeh	206.875.950,00
						- Kecamatan Pasirian	290.706.750,00
						- Kecamatan Pronojiwo	157.465.000,00

No.	URAIAN	Saldo Awal 01-Jan-25	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir 31 Des 2025	Keterangan	
						- Kecamatan Tempursari	176.800.100,00
						Berkurang :	1.392.134.194,68
						Penghapusan	
						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : penghapusan (gedung dan bangunan) karena pemusnahan berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 100.3.3.5/8/KEP/427.12/2025 tanggal 20 maret 2025	189.838.920,00
						- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik : penghapusan (meja tamu) karena pemusnahan berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 100.3.3.5/47/KEP/427.12/2025 tanggal 31 juli 2025	2.500.000,00
						- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : penghapusan (tensimeter raksa) karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 100.3.3.5/53/KEP/427.12/2025 tanggal 6 agustus 2025	598.305.901,00
						Reklasifikasi	
						- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : reklasifikasi aset lain-lain ekstrakomptabel karena nilai perolehan dibawah kapitalisasi	601.489.373,68
2.	Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)	381.248.000,00	0,00	381.248.000,00	0,00		
	Jumlah	455.308.234.453,18	31.477.208.411,82	1.773.382.194,68	485.012.060.670,32		

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, pada pasal 47 ayat 6 bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dapat dilakukan dengan (1). Penerbitan SBN dan/atau (2). *Treasury Deposit Facility*.

Maka pada akhir tahun 2023 Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain di BI TDF-TKD Pemda yang disediakan oleh BUN bagi Pemda.

Secara umum proses bisnis penyaluran DBH melalui rekening TDF-TKD telah diatur dalam Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Nomor: S-574/WPB.16/2024 tanggal 16 Februari 2024 Hal Penyampaian Data Saldo Rekening *Treasury Deposit Facility*-Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Periode 1 Desember 2023-12 Januari 2024, sebesar Rp15.823.096.000,00 maka berdasarkan proses bisnis tersebut Pemerintah Daerah perlu menatausahakan dan mencatat transaksinya sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang

disalurkan melalui fasilitas TDF pada APBD yang akan ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2025 TDF-TKD sebesar Rp0,00.

Tabel 212. Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	TDF-TKD	2025	2024
1	DBH SDA Gas Bumi	0,00	141.241.000,00
2	DBH SDA Pertambangan Umum	0,00	810.000,00
3	DBH SDA Pertambangan Umum – Royalti	0,00	237.488.000,00
4	DBH SDA Pertambangan Panas Bumi-luran Tetap	0,00	1.708.000,00
5	DBH SDA Kehutanan	0,00	1.000,00
JUMLAH		0,00	381.248.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5) Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain	(37.101.404.675,93)	(29.572.796.624,25)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain – Lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp37.101.404.675,93) dan 31 Desember 2024 sebesar (Rp29.572.796.624,25). Ada penambahan nilai penyusutan aset lain – lain sebesar (Rp8.218.812.868,01) dan pengurangan nilai penyusutan aset lain - lain sebesar Rp690.204.816,33. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 213. Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Akumulasi penyusutan aset lain - lain tahun 2024	(29.572.796.624,25)
2	Penambahan tahun 2025	(8.218.812.868,01)
3	Pengurangan tahun 2025	690.204.816,33
4	Akumulasi penyusutan aset lain - lain tahun 2025	(37.101.404.675,93)

5.3.2 KEWAJIBAN

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34.019.915.456,62	42.550.082.655,79

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang lain, dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek pemerintah daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp34.019.915.456,62 dan Rp42.550.082.655,79.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Utang PFK	0,00	20.041,00

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan-potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah. Pada tahun 2025 tidak ada utang PFK.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Pendapatan Diterima Dimuka	2.070.437.535,04	2.755.495.020,54

Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah. Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap penerimaan pendapatan daerah seluruhnya diakui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir Tahun 2025 dan 2024 saldo pendapatan diterima dimuka masing-masing sebesar Rp2.070.437.535,04 dan Rp2.755.495.020,54 yang merupakan pendapatan diterima dimuka atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Jasa Umum, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Jumlah tersebut tercatat di beberapa entitas akuntansi sebagai berikut:

Tabel 214. Pendapatan Diterima Dimuka

Dalam Rupiah			
No	Nama SKPD	2025	2024
1	Puskesmas Tempeh	20.000.000,00	3.875.000,00
2	Puskesmas Yosowilangun	23.333.333,34	7.104.166,67
3	Puskesmas Ranuyoso	20.000.000,00	3.875.000,00

No	Nama SKPD	2025	2024
4	Puskesmas Randuagung	15.833.333,00	0,00
5	RSUD dr. Haryoto	170.146.633,00	61.069.433,00
6	RSUD Pasirian	15.333.333,35	31.333.333,35
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	1.341.489.416,64
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.187.500,00	183.233.333,33
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	546.779.256,65	678.786.004,27
10	Badan Pengelola Keuangan Daerah	366.273.000,02	444.729.333,28
11	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	886.551.145,68	0,00
JUMLAH		2.070.437.535,04	2.755.495.020,54

Tabel 215. Rekap Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Jenis Pendapatan diterima dimuka	SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2025	Koreksi/Mutasi Pendapatan diterima dimuka 2025	Saldo Setelah koreksi	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2025	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH							
	- Pajak Reklame	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0,00	0,00	0,00	886.551.145,68	0,00	886.551.145,68
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH							
	- Retribusi Pelayanan Pasar	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	640.111.004,27	97.500,00	640.208.504,27	207.008.783,21	346.351.280,83	500.866.006,65
	-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00		0,00	28.125.000,00	0,00	28.125.000,00
	Jumlah PAD		640.111.004,27	97.500,00	640.208.504,27	1.121.684.928,89	346.351.280,83	1.415.542.152,33
2	LAIN-LAIN PAD YANG SAH							
	SEWA TANAH							
	- Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	RSUD HARYOTO	61.069.433,00	0,00	61.069.433,00	180.000.000,00	70.922.800,00	170.146.633,00
	- Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	444.729.333,28	1.341.489.416,64	1.786.218.749,92	138.720.000,00	1.558.665.749,90	366.273.000,02
	- Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	PKM TEMPEH	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	24.000.000,00	7.875.000,00	20.000.000,00
	- Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	PKM YOSOWILANGUN	7.104.166,67	0,00	7.104.166,67	24.000.000,00	7.770.833,33	23.333.333,34
	- Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	PKM RANUYOSO	3.875.000,00	0,00	3.875.000,00	24.000.000,00	7.875.000,00	20.000.000,00

No	Jenis Pendapatan diterima dimuka	SKPD	Saldo Awal 1 Januari 2025	Koreksi/Mutasi Pendapatan diterima dimuka 2025	Saldo Setelah koreksi	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2025	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	PKM RANDUAGUNG	0,00	0,00	0,00	15.833.333,00	0,00	15.833.333,00
	- Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	RSUD PASIRIAN	31.333.333,35	0,00	31.333.333,35	0,00	16.000.000,00	15.333.333,35
	- Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38.675.000,00	0,00	38.675.000,00	17.788.250,00	38.675.000,00	17.788.250,00
	- Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	183.233.333,33	0,00	183.233.333,33	8.250.000,00	185.295.833,33	6.187.500,00
	- Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.341.489.416,64	(1.341.489.416,64)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		2.115.384.016,27	0,00	2.115.384.016,27	432.591.583,00	1.893.080.216,56	654.895.382,71
	TOTAL		2.755.495.020,54	97.500,00	2.755.592.520,54	1.554.276.511,89	2.239.431.497,39	2.070.437.535,04

3) Utang Lain

31 Desember 2025
(Rp)

5.547.721.088,57

31 Desember 2024
(Rp)

11.046.744.716,25

Utang Lain-lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan di Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 216. Rekap Utang Lain-lain Tahun 2025

Dalam Rupiah						
No	Rincian Utang	Saldo Awal 1 Januari 2025	Koreksi Saldo Awal 2025	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa	7.294.208.928,00	0,00	2.980.403.980,00	7.294.208.928,00	2.980.403.980,00
2	Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa	1.178.979.844,00	0,00	403.241.865,00	1.178.979.844,00	403.241.865,00
3	Utang jangka pendek lainnya	183.205.000,00	695.124.000,00	0,00	0,00	878.329.000,00
4	Utang Jaminan Jasa Bongkar	1.114.660.144,25	0,00	24.426.801,55	3.162.602,23	1.135.924.343,57
5	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.275.690.800,00	107.555.544,00	149.821.900,00	1.383.246.344,00	149.821.900,00
JUMLAH		11.046.744.716,25	802.679.544,00	3.557.894.546,55	9.859.597.718,23	5.547.721.088,57

- a) Koreksi saldo awal Tahun 2025 sebesar Rp11.046.744.716,25 merupakan koreksi atas kurang catat utang jangka pendek lainnya atas lebih salur Dana Bagi Hasil berdasarkan PMK Nomor 120 tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2025 sebesar Rp695.124.000,00 dan sebesar Rp107.555.544,00

merupakan koreksi atas hasil audit pasca klaim dari BPJS Kesehatan dimana terdapat kelebihan pembayaran pada klaim obat kronis RJTL Tahun 2024 sebesar Rp2.835.844,00 dan pengawasan internal BPJS kesehatan atas kasus tahun 2024 sebesar Rp104.719.700,00 pada RSUD Pasirian.

- b) Penambahan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa sebesar Rp2.980.403.980,00 merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa yang belum disalurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengurangan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa sebesar Rp7.294.208.928,00 merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2024 ke Desa yang sudah disalurkan kepada Desa sesuai dengan SP2D Nomor: 5.02.0.00.0.00.01.0000/LS/01642 tanggal 30 April 2025.

Rincian Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 217. Rekap Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
1	2	3
	Sumbersuko	
1	Sumbersuko	23.040.362,00
2	Kebonsari	19.231.161,00
3	Grati	13.352.782,00
4	Labruk Kidul	9.270.235,00
5	Mojosari	14.009.105,00
6	Purwosono	12.078.292,00
7	Petahunan	21.780.528,00
8	Sentul	14.935.009,00
	Jumlah	127.697.474,00
	Sukodono	
1	Karangsari	18.888.881,00
2	Selok Besuki	25.219.948,00
3	Kutorenon	24.759.551,00
4	Dawuhan Lor	15.160.857,00
5	Klanting	11.281.107,00
6	Kebonagung	14.753.274,00
7	Sumberejo	18.738.684,00
8	Uranggantung	9.560.375,00
9	Selok Gondang	11.300.969,00
10	Bondoyudo	12.255.184,00
	Jumlah	161.918.830,00
	Padang	
1	Merakan	11.062.249,00
2	Tanggung	13.101.453,00
3	Kalisemut	9.502.851,00
4	Padang	10.029.621,00
5	Mojo	10.833.310,00
6	Kedawung	9.489.867,00
7	Babakan	9.813.378,00
8	Bodang	10.970.427,00
9	Barat	13.447.354,00
	Jumlah	98.250.510,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
	Gucialit	
1	Wonokerto	10.109.946,00
2	Pakel	9.353.739,00
3	Kenongo	9.125.658,00
4	Gucialit	9.821.520,00
5	Dadapan	10.317.357,00
6	Kertowono	9.458.133,00
7	Tunjung	9.196.510,00
8	Jeruk	8.813.376,00
9	Sombo	8.118.015,00
	Jumlah	84.314.254,00
	Pasrujambe	
1	Pasrujambe	20.178.969,00
2	Jambekumbu	8.643.241,00
3	Sukorejo	8.378.508,00
4	Jambearum	8.572.556,00
5	Kertosari	11.524.541,00
6	Pagowan	9.969.818,00
7	Karanganom	11.743.205,00
	Jumlah	79.010.838,00
	Senduro	
1	Senduro	16.744.068,00
2	Purworejo	12.743.765,00
3	Sarikemuning	11.182.720,00
4	Burno	10.533.967,00
5	Pandansari	10.449.130,00
6	Bedayu	8.554.350,00
7	Bedayu Talang	8.129.615,00
8	Wonocempokoayu	8.241.902,00
9	Kandangan	11.864.524,00
10	Kandang Tepus	12.410.240,00
11	Argosari	8.129.615,00
12	Ranupani	8.469.235,00
	Jumlah	127.453.131,00
	Tempeh	
1	Tempeh Kidul	11.332.297,00
2	Tempeh Tengah	17.906.410,00
3	Kaliwungu	10.019.745,00
4	Tempeh Lor	21.056.425,00
5	Besuk	17.084.018,00
6	Pandanwangi	17.755.250,00
7	Sumberjati	9.503.312,00
8	Lempeni	21.355.145,00
9	Pulo	20.716.176,00
10	Jatisari	13.756.843,00
11	Gesang	13.482.420,00
12	Jokarto	13.129.123,00
13	Pandanarum	11.264.866,00
	Jumlah	198.362.030,00
	Pasirian	
1	Condro	11.804.429,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
2	Pasirian	27.668.230,00
3	Gondoruso	43.217.605,00
4	Bades	21.980.540,00
5	Bago	49.087.059,00
6	Selok Awar-awar	12.397.269,00
7	Kalibendo	12.071.691,00
8	Madurejo	10.493.282,00
9	Sememu	9.984.617,00
10	Nguter	10.063.920,00
11	Selok Anyar	9.752.528,00
	Jumlah	218.521.170,00
	Candipuro	
1	Jarit	17.463.658,00
2	Candipuro	13.024.451,00
3	Jugosari	116.351.203,00
4	Sumberejo	9.298.197,00
5	Sumberwuluh	228.838.514,00
6	Sumbermujur	11.611.153,00
7	Penanggal	12.721.183,00
8	Tambahrejo	11.163.071,00
9	Kloposawit	16.942.376,00
10	Tumpeng	11.413.252,00
	Jumlah	448.827.058,00
	Pronojiwo	
1	Sidomulyo	47.951.029,00
2	Tamanayu	8.489.057,00
3	Sumberurip	23.314.955,00
4	Oro-oro Ombo	38.980.404,00
5	Supiturang	76.365.892,00
6	Pronojiwo	61.310.774,00
	Jumlah	256.412.111,00
	Tempursari	
1	Tegalrejo	8.423.801,00
2	Bulurejo	9.653.587,00
3	Tempurejo	8.697.025,00
4	Purorejo	8.002.289,00
5	Tempursari	14.581.929,00
6	Pundungsari	8.440.315,00
7	Kaliuling	8.624.355,00
	Jumlah	66.423.301,00
	Kedungjajang	
1	Curahpetung	9.589.813,00
2	Wonorejo	18.280.165,00
3	Tempursari	8.700.335,00
4	Bandaran	8.362.047,00
5	Grobogan	9.216.430,00
6	Kedungjajang	17.150.574,00
7	Bence	8.699.859,00
8	Krasak	8.390.015,00
9	Jatisari	8.142.321,00
10	Pandansari	11.559.568,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
11	Sawaran Kulon	8.847.443,00
12	Umbul	9.617.368,00
	Jumlah	126.555.938,00
	Klakah	
1	Klakah	30.641.839,00
2	Mlawang	10.006.709,00
3	Tegalrandu	9.833.482,00
4	Ranupakis	9.707.409,00
5	Kebonan	12.021.501,00
6	Sruni	10.239.567,00
7	Sawaran Lor	8.132.355,00
8	Tegalciut	8.229.835,00
9	Kudus	11.396.343,00
10	Papringan	8.241.130,00
11	Sumberwringin	8.548.112,00
12	Duren	11.904.336,00
	Jumlah	138.902.618,00
	Ranuyoso	
1	Ranuyoso	9.761.345,00
2	Jenggrong	8.398.252,00
3	Meninjo	8.165.615,00
4	Tegalbangsri	8.039.815,00
5	Sumberpetung	8.991.600,00
6	Alun-alun	8.542.414,00
7	Ranubedali	10.734.694,00
8	Wonoayu	11.504.146,00
9	Penawungan	8.802.129,00
10	Wates Kulon	10.426.304,00
11	Wates Wetan	9.135.899,00
	Jumlah	102.502.213,00
	Randuagung	
1	Randuagung	13.104.788,00
2	Gedangmas	9.515.670,00
3	Kalidilem	8.142.335,00
4	Tunjung	11.027.388,00
5	Kalipenggung	11.376.610,00
6	Salak	9.613.734,00
7	Ranulogong	11.420.211,00
8	Ledok Tempuro	9.402.864,00
9	Ranu Wurung	10.283.751,00
10	Buwek	8.497.097,00
11	Pejarakan	8.826.111,00
12	Banyuputih Lor	11.113.018,00
	Jumlah	122.323.577,00
	Tekung	
1	Tekung	14.958.058,00
2	Wonogriyo	10.760.257,00
3	Wonosari	9.313.681,00
4	Mangunsari	10.420.996,00
5	Wonokerto	20.072.922,00
6	Karangbendo	15.729.548,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
7	Klampokarum	10.466.111,00
8	Tukum	38.026.751,00
	Jumlah	129.748.324,00
	Kunir	
1	Kunir Kidul	12.170.497,00
2	Kunir Lor	12.710.662,00
3	Sukosari	10.746.769,00
4	Jatimulyo	11.165.735,00
5	Jatirejo	9.850.204,00
6	Jatigono	10.183.511,00
7	Sukorejo	10.035.378,00
8	Kedungmoro	10.082.339,00
9	Karanglo	10.675.788,00
10	Kabuaran	17.408.849,00
11	Dorogowok	18.296.576,00
	Jumlah	133.326.308,00
	Yosowilangun	
1	Yosowilangun Lor	17.122.426,00
2	Yosowilangun Kidul	15.169.562,00
3	Kalipepe	9.457.820,00
4	Tunjungrejo	9.896.058,00
5	Kebonsari	12.106.330,00
6	Munder	12.883.949,00
7	Krai	10.255.107,00
8	Karanganyar	8.582.605,00
9	Karangrejo	10.403.015,00
10	Kraton	12.553.737,00
11	Darungan	11.956.975,00
12	Wotgalih	19.850.072,00
	Jumlah	150.237.656,00
	Rowokangkung	
1	Sidorejo	9.598.277,00
2	Nogosari	15.002.534,00
3	Dawuhan Wetan	12.214.205,00
4	Sumbersari	10.376.315,00
5	Kedungrejo	8.002.318,00
6	Rowokangkung	9.963.836,00
7	Sumberanyar	8.629.671,00
	Jumlah	73.787.156,00
	Jatiroto	
1	Kaliboto Lor	15.170.174,00
2	Jatiroto	13.009.837,00
3	Kaliboto Kidul	8.020.661,00
4	Rojopolo	9.464.034,00
5	Banyuputih Kidul	12.196.382,00
6	Sukosari	11.343.182,00
	Jumlah	69.204.270,00
	Lumajang (Perdesaan)	
1	Banjarwaru	10.799.292,00
2	Labruk Lor	14.141.774,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
3	Denok	9.385.604,00
4	Blukon	13.515.292,00
5	Boreng	18.783.251,00
	Jumlah	66.625.213,00
	TOTAL	2.980.403.980,00

- c) Penambahan utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp403.241.865,00 merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa Tahun 2025 yang belum disalurkan kepada Desa sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengurangan sebesar Rp1.178.979.844,00 merupakan pembayaran penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa tahun 2024 sesuai dengan SP2D Nomor : 5.02.0.00.0.00.01.0000/LS/01643 tanggal 30 April 2025.

Rincian Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 218. Rincian Utang Bagi Hasil Retribusi

Dalam Rupiah

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
	Sumbersuko	
1	Sumbersuko	2.883.650,00
2	Kebonsari	1.575.549,00
3	Grati	1.615.263,00
4	Labruk Kidul	1.632.561,00
5	Mojosari	1.712.026,00
6	Purwosono	27.166.840,00
7	Petahunan	1.970.684,00
8	Sentul	1.205.833,00
	Jumlah	39.762.406,00
	Sukodono	
1	Karangsari	719.751,00
2	Selok Besuki	2.188.324,00
3	Kutorenon	4.979.679,00
4	Dawuhan Lor	3.472.877,00
5	Klanting	1.496.299,00
6	Kebonagung	1.184.176,00
7	Sumberejo	1.530.217,00
8	Uranggantung	2.015.212,00
9	Selok Gondang	1.194.211,00
10	Bondoyudo	1.230.550,00
	Jumlah	20.011.296,00
	Padang	
1	Merakan	1.195.059,00
2	Tanggung	1.283.160,00
3	Kalisemut	1.235.791,00
4	Padang	1.220.966,00
5	Mojo	1.313.911,00
6	Kedawung	1.286.506,00
7	Babakan	1.310.153,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
8	Bodang	1.333.455,00
9	Barat	1.269.604,00
	Jumlah	11.448.605,00
	Gucialit	
1	Wonokerto	1.285.898,00
2	Pakel	1.207.571,00
3	Kenongo	1.209.178,00
4	Gucialit	1.388.939,00
5	Dadapan	1.189.121,00
6	Kertowono	1.191.313,00
7	Tunjung	1.190.073,00
8	Jeruk	1.172.999,00
9	Sombo	1.169.958,00
	Jumlah	11.005.050,00
	Pasrujambe	
1	Pasrujambe	1.956.688,00
2	Jambekumbu	1.180.158,00
3	Sukorejo	1.181.718,00
4	Jambearum	1.225.037,00
5	Kertosari	1.357.147,00
6	Pagowan	1.184.003,00
7	Karanganom	1.207.670,00
	Jumlah	9.292.421,00
	Senduro	
1	Senduro	11.368.552,00
2	Purworejo	1.722.782,00
3	Sarikemuning	1.211.240,00
4	Burno	1.193.081,00
5	Pandansari	1.206.429,00
6	Bedayu	1.188.409,00
7	Bedayu Talang	1.180.427,00
8	Wonocempokoayu	1.174.431,00
9	Kandangan	1.255.021,00
10	Kandang Tepus	1.188.659,00
11	Argosari	1.237.768,00
12	Ranupani	1.134.837,00
	Jumlah	25.061.636,00
	Tempeh	
1	Tempeh Kidul	1.452.849,00
2	Tempeh Tengah	8.249.544,00
3	Kaliwungu	1.184.127,00
4	Tempeh Lor	1.190.571,00
5	Besuk	1.481.062,00
6	Pandanwangi	1.502.541,00
7	Sumberjati	1.199.696,00
8	Lempeni	3.264.434,00
9	Pulo	1.300.492,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
10	Jatisari	1.214.159,00
11	Gesang	1.311.919,00
12	Jokarto	1.422.091,00
13	Pandanarum	2.036.381,00
	Jumlah	26.809.866,00
	Pasirian	
1	Condro	1.566.881,00
2	Pasirian	18.646.286,00
3	Gondoruso	1.220.830,00
4	Bades	1.275.601,00
5	Bago	1.247.574,00
6	Selok Awar-awar	2.563.001,00
7	Kalibendo	1.221.387,00
8	Madurejo	1.350.883,00
9	Sememu	1.344.285,00
10	Nguter	1.636.183,00
11	Selok Anyar	1.514.412,00
	Jumlah	33.587.323,00
	Candipuro	
1	Jarit	1.339.369,00
2	Candipuro	1.342.788,00
3	Jugosari	1.194.505,00
4	Sumberejo	4.203.695,00
5	Sumberwuluh	1.257.807,00
6	Sumbermujur	1.233.931,00
7	Penanggal	1.606.645,00
8	Tambahrejo	1.216.164,00
9	Kloposawit	2.372.555,00
10	Tumpeng	1.370.187,00
	Jumlah	17.137.646,00
	Pronojiwo	
1	Sidomulyo	2.077.563,00
2	Tamanayu	1.191.461,00
3	Sumberurip	1.239.781,00
4	Oro-oro Ombo	906.870,00
5	Supiturang	1.207.963,00
6	Pronojiwo	8.322.721,00
	Jumlah	14.946.359,00
	Tempursari	
1	Tegalrejo	1.193.719,00
2	Bulurejo	1.193.621,00
3	Tempurejo	1.186.876,00
4	Purorejo	1.183.682,00
5	Tempursari	1.262.359,00
6	Pundungsari	1.222.257,00
7	Kaliuling	1.174.663,00
	Jumlah	8.417.177,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
	Kedungjajang	
1	Curahpetung	1.607.120,00
2	Wonorejo	5.399.493,00
3	Tempursari	1.257.099,00
4	Bandaran	1.439.751,00
5	Grobogan	1.130.609,00
6	Kedungjajang	1.352.177,00
7	Bence	1.183.053,00
8	Krasak	1.167.739,00
9	Jatisari	1.278.939,00
10	Pandansari	1.404.513,00
11	Sawaran Kulon	1.303.819,00
12	Umbul	1.218.239,00
	Jumlah	19.742.551,00
	Klakah	
1	Klakah	1.898.774,00
2	Mlawang	11.367.524,00
3	Tegalrandu	3.164.317,00
4	Ranupakis	1.234.433,00
5	Kebonan	1.262.135,00
6	Sruni	1.226.715,00
7	Sawaran Lor	1.448.813,00
8	Tegalciut	1.208.856,00
9	Kudus	1.136.833,00
10	Papringan	1.205.227,00
11	Sumberwringin	1.188.231,00
12	Duren	1.183.794,00
	Jumlah	27.525.652,00
	Ranuyoso	
1	Ranuyoso	1.306.249,00
2	Jenggrong	1.225.349,00
3	Meninjo	1.219.658,00
4	Tegalbangsri	1.192.261,00
5	Sumberpetung	1.206.665,00
6	Alun-alun	1.186.964,00
7	Ranubedali	1.327.683,00
8	Wonoayu	1.988.775,00
9	Penawungan	1.191.681,00
10	Wates Kulon	1.187.055,00
11	Wates Wetan	5.364.014,00
	Jumlah	18.396.354,00
	Randuagung	
1	Randuagung	7.688.313,00
2	Gedangmas	1.188.442,00
3	Kalidilem	1.359.251,00
4	Tunjung	1.290.707,00
5	Kalipenggung	1.398.283,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
6	Salak	1.332.332,00
7	Ranulogong	1.165.537,00
8	Ledok Tempuro	1.221.875,00
9	Ranu Wurung	1.191.491,00
10	Buwek	1.174.665,00
11	Pejarakan	1.247.833,00
12	Banyuputih Lor	1.199.583,00
	Jumlah	21.458.312,00
	Tekung	
1	Tekung	1.487.929,00
2	Wonogriyo	1.186.617,00
3	Wonosari	1.208.833,00
4	Mangunsari	1.217.055,00
5	Wonokerto	2.294.213,00
6	Karangbendo	1.204.243,00
7	Klampokarum	1.716.516,00
8	Tukum	2.421.935,00
	Jumlah	12.737.341,00
	Kunir	
1	Kunir Kidul	2.572.561,00
2	Kunir Lor	7.831.903,00
3	Sukosari	1.322.477,00
4	Jatimulyo	1.181.603,00
5	Jatirejo	1.174.637,00
6	Jatigono	1.247.779,00
7	Sukorejo	1.237.065,00
8	Kedungmoro	1.191.523,00
9	Karanglo	1.185.231,00
10	Kabuaran	1.201.347,00
11	Dorogowok	1.220.834,00
	Jumlah	21.366.960,00
	Yosowilangun	
1	Yosowilangun Lor	15.372.599,00
2	Yosowilangun Kidul	6.184.699,00
3	Kalipepe	1.268.049,00
4	Tunjungrejo	1.919.829,00
5	Kebonsari	1.262.960,00
6	Munder	1.140.959,00
7	Krai	1.802.025,00
8	Karanganyar	1.198.821,00
9	Karangrejo	1.286.743,00
10	Kraton	1.219.181,00
11	Darungan	1.254.219,00
12	Wotgalih	2.079.820,00
	Jumlah	35.989.904,00
	Rowokangkung	
1	Sidorejo	1.207.227,00

NO	DESA	KURANG BAYAR PERIODE 01 JULI S/D 31 DESEMBER 2025
2	Nogosari	4.185.074,00
3	Dawuhan Wetan	1.428.551,00
4	Sumbersari	1.262.989,00
5	Kedungrejo	1.266.197,00
6	Rowokangkung	1.299.220,00
7	Sumberanyar	1.217.474,00
	Jumlah	11.866.732,00
	Jatiroto	
1	Kaliboto Lor	1.700.842,00
2	Jatiroto	2.275.672,00
3	Kaliboto Kidul	1.289.611,00
4	Rojopolo	1.224.649,00
5	Banyuputih Kidul	1.446.586,00
6	Sukosari	1.387.374,00
	Jumlah	9.324.734,00
	Lumajang (Perdesaan)	
1	Banjarwaru	1.376.446,00
2	Labruk Lor	1.841.974,00
3	Denok	1.201.166,00
4	Blukon	1.181.921,00
5	Boreng	1.752.033,00
	Jumlah	7.353.540,00
	TOTAL	403.241.865,00

d) Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Kelebihan/Kurang bayar Pemerintah Pusat sebesar Rp878.329.000,00 berdasarkan PMK Nomor 120 tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2025.

e) Utang Jasa Bongkar merupakan utang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas penerimaan jaminan Jasa Bongkar Tahun 2025 sebesar Rp1.135.924.343,57. Penambahan sebesar Rp24.426.801,55 merupakan Jasa Bongkar baru di Tahun 2025. Pengurangan sebesar Rp3.162.602,23 merupakan Jasa Bongkar yang telah ditutup di Tahun 2025.

(Rincian dapat dilihat pada penjelasan akun Neraca-Aset yang Dibatasi Penggunaannya).

Tabel 219. Rincian Utang Jasa Bongkar Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Utang Jasa Bongkar	Saldo 31-Dec-24	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31-Dec-25
1	Menara Telekomunikasi	962.903.227,56	21.005.814,74	0,00	983.909.042,30
2	Reklame	151.756.916,69	3.420.986,81	3.162.602,23	152.015.301,27
	TOTAL	1.114.660.144,25	24.426.801,55	3.162.602,23	1.135.924.343,57

- f) Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp149.821.900,00 merupakan piutang pada RSUD Pasirian atas kelebihan klaim BPJS yang belum tercatat.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
4) Utang Belanja	26.401.756.833,01	28.747.822.878,00

Utang Belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, antara lain: Utang Belanja Pegawai, Utang Barang dan Jasa, dan Utang Belanja Tidak Terduga.

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp26.401.756.833,01 turun dari Tahun 2024 sebesar Rp28.747.822.878,00 yang terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp15.194.963.620,52, utang belanja barang dan jasa sebesar Rp9.553.816.537,49, Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp187.985.954,00, Utang Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp199.851.000,00, dan utang belanja tak terduga sebesar Rp1.265.139.721,00.

Tabel 220. Rincian Utang Belanja Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Jenis Utang	01-Jan-25	Koreksi Saldo Awal 2025	Reklas Utang 2025	Penambahan 2025	Pengurangan 2025	31-Des-25
1	Utang Belanja Pegawai	19.494.000.872,00	(140.300.608,00)	(1.363.396,00)	15.194.963.620,52	19.352.336.868,00	15.194.963.620,52
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.695.941.400,00	(184.112.644,00)	1.363.396,00	9.553.816.537,49	8.513.192.152,00	9.553.816.537,49
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	187.985.954,00	0,00	187.985.954,00
4	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.851.000,00	0,00	199.851.000,00
5	Utang Belanja BTT	557.880.606,00	0,00	0,00	1.262.259.115,00	555.000.000,00	1.265.139.721,00
Jumlah		28.747.822.878,00	(324.413.252,00)	0,00	26.398.876.227,01	28.420.529.020,00	26.401.756.833,01

a) Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.194.963.620,52 merupakan kewajiban atas belanja gaji PNS, belanja tambahan penghasilan serta belanja insentif bagi ASN yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi di entitas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan seperti RSUD dr. Haryoto, RSUD Pasirian, dan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta kekurangan lain yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2025.

Tabel 221. Rekap Utang Belanja Pegawai Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	17.841.253,00
2	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	25.494.969,00
3	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	1.500.574,00
4	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PPPK	2.364.840,00
5	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS	9.800.000,00
6	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	6.915.000,00
7	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	540.000,00
8	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	72.420,00
9	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/ Tunjangan Khusus PNS	478.736,00
10	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	2.454,00
11	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK	754,00
12	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	473.103.597,00
13	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	69.175.289,00
14	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	42.828,00
15	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	61.210,00
16	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	128.489,00
17	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PPPK	183.630,00
18	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.180.844.831,00
19	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	13.388.341,00
20	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	295.398,00
21	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	196.310,00
22	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN	3.700.068,00
23	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.557.397,00
24	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.272.843,00
25	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan	26.923.630,00
26	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	24.275.325,00
27	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.313.724.075,52
28	Utang Belanja Insentif badi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.079.359,00
	TOTAL	15.194.963.620,52

Tabel 222. Rincian Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	17.841.253,00
	TOTAL	17.841.253,00

Tabel 223. Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	21.140.729,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	4.354.240,00
	TOTAL	25.494.969,00

Tabel 224. Rincian Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	1.406.164,00
2	Kecamatan Candipuro	94.410,00
	TOTAL	1.500.574,00

Tabel 225. Rincian Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	1.972.800,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	392.040,00
	TOTAL	2.364.840,00

Tabel 226. Rincian Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.470.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	560.000,00
3	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	3.360.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.240.000,00
5	Kecamatan Candipuro	1.170.000,00
	TOTAL	9.800.000,00

Tabel 227. Rincian Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	6.385.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	530.000,00
	TOTAL	6.915.000,00

Tabel 228. Rincian Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pariwisata	540.000,00
	TOTAL	540.000,00

Tabel 229. Rincian Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Kecamatan Candipuro	72.420,00
	TOTAL	72.420,00

Tabel 230. Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	361.333,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	31.968,00
3	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	69.794,00
4	Kecamatan Candipuro	15.641,00
	TOTAL	478.736,00

Tabel 231. Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	2.087,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200,00
3	Kecamatan Candipuro	167,00
	TOTAL	2.454,00

Tabel 232. Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	50,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	704,00
	TOTAL	754,00

Tabel 233. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	5.086.196,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	11.987.423,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	2.705.253,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	2.370.406,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	3.236.847,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	2.332.053,00

No	Nama SKPD	Jumlah
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	4.310.221,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	5.744.838,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	3.616.455,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	6.277.522,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	3.184.818,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	8.280.820,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	7.447.895,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	6.730.657,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	8.813.991,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	5.949.120,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	7.106.165,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	4.033.204,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	11.395.396,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	3.528.788,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	2.715.252,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	836.033,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	3.250.584,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	10.643.852,00
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	5.163.912,00
26	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	6.793.396,00
27	Badan Pengelola Keuangan Daerah	329.562.500,00
Jumlah		473.103.597,00

**Tabel 234. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-
Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	1.884.596,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	4.385.362,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	1.243.176,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	1.423.231,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	1.728.473,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	1.183.042,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	1.899.156,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	2.595.875,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	1.042.457,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	2.024.976,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	1.411.211,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	3.805.756,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	5.013.568,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	2.895.140,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	7.920.113,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	2.700.208,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	1.744.671,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	721.708,00

No	Nama SKPD	Jumlah
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	4.431.792,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sensuro	1.490.797,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	804.753,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	2.193.912,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	5.787.328,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	5.088.804,00
25	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	3.755.184,00
Jumlah		69.175.289,00

**Tabel 235. Utang Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-
luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	42.828,00
TOTAL		42.828,00

**Tabel 236. Utang Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-
luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	50.760,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	10.450,00
TOTAL		61.210,00

**Tabel 237. Utang Belanja luran Jaminan Kematian ASN-
luran Jaminan Kematian PNS**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	128.489,00
TOTAL		128.489,00

**Tabel 238. Utang Belanja luran Jaminan Kematian ASN-
luran Jaminan Kematian PPPK**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB	152.280,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	31.350,00
TOTAL		183.630,00

**Tabel 239. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	240.617.069,00
2	DINKES P2KB	234.928.110,00

No	Nama SKPD	Jumlah
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	166.318.650,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	97.264.620,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	95.477.820,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.589.657,00
7	DINSOS P3A	73.909.147,00
8	Dinas Tenaga Kerja	72.095.355,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	266.676.983,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	337.263.192,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55.732.300,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	59.552.377,00
13	Dinas Perhubungan	219.615.760,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	81.904.038,00
15	DISKOPINDAG	150.914.153,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	56.844.955,00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	45.646.769,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.943.948,00
19	Dinas Perikanan	66.194.553,00
20	Dinas Pariwisata	67.238.965,00
21	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	243.434.012,00
22	Sekretariat DPRD	62.505.429,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	67.579.991,00
24	Badan Pengelola Keuangan Daerah	108.699.372,00
25	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	85.873.757,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	134.633.341,00
27	Inspektorat Daerah	161.623.853,00
28	Kecamatan Lumajang	158.155.861,00
29	Kecamatan Sukodono	33.139.264,00
30	Kecamatan Padang	33.571.103,00
31	Kecamatan Gucialit	29.563.404,00
32	Kecamatan Senduro	29.216.354,00
33	Kecamatan Pasrujambe	29.906.910,00
34	Kecamatan Sumbersuko	32.294.142,00
35	Kecamatan Tempeh	26.908.718,00
36	Kecamatan Pasirian	34.248.159,00
37	Kecamatan Candipuro	32.637.472,00
38	Kecamatan Pronojiwo	24.475.636,00
39	Kecamatan Tempursari	25.996.624,00
40	Kecamatan Kunir	33.371.579,00
41	Kecamatan Yosowilangun	30.321.541,00
42	Kecamatan Tekung	32.948.895,00
43	Kecamatan Rowokangkung	34.269.786,00
44	Kecamatan Jatiroto	43.436.590,00
45	Kecamatan Randuagung	27.378.717,00
46	Kecamatan Klakah	35.280.778,00
47	Kecamatan Ranuyoso	17.234.498,00

No	Nama SKPD	Jumlah
48	Kecamatan Kedungjajang	34.254.174,00
49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54.156.450,00
	TOTAL	4.180.844.831,00

**Tabel 240. Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	13.388.341,00
	TOTAL	13.388.341,00

Tabel 241. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	295.398,00
	Jumlah	295.398,00

Tabel 242. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	196.310,00
	Jumlah	196.310,00

**Tabel 243. Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan bagi ASN**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	3.700.068,00
	Jumlah	3.700.068,00

**Tabel 244. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi
Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	14.557.387,00
	Jumlah	14.557.387,00

**Tabel 245. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	4.272.843,00
	Jumlah	4.272.843,00

Tabel 246. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	26.923.630,00
Jumlah		26.923.630,00

Tabel 247. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Lingkungan Hidup	24.275.325,00
Jumlah		24.275.325,00

Tabel 248. Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	174.269.447,00
2	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	409.319.630,00
3	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	98.721.976,00
4	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	96.493.885,00
5	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	126.661.872,00
6	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS BADES	90.681.493,00
7	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TEMPEH	157.190.060,00
8	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS GESANG	220.687.811,00
9	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	116.472.563,00
10	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	213.430.397,00
11	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TEKUNG	117.420.804,00
12	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS KUNIR	308.939.924,00
13	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	316.110.216,00
14	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	240.948.734,00
15	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS JATIROTO	421.657.860,00
16	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	216.232.578,00
17	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS SUKODONO	229.652.740,00
18	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PADANG	118.872.774,00
19	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	395.680.124,00
20	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS SENDURO	129.134.079,00
21	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	67.881.292,00
22	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	44.886.425,00
23	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS KLAKAH	136.112.423,00
24	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	410.779.453,00
25	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	220.067.251,00
26	DINKES P2KB - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	126.246.225,00
27	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. HARYOTO	18.311.002,00
28	DINKES P2KB - UPT RSUD PASIRIAN	485.591.743,00
29	DINKES P2KB - UPT RSUD Haryoto	4.605.269.294,52
Jumlah		10.313.724.075,52

f

Tabel 249. Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	5.079.359,00
Jumlah		5.079.359,00

b) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.553.816.537,49 merupakan kewajiban atas barang dan jasa yang telah dikonsumsi/diterima oleh entitas di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air Perumda Air Minum Tirta Mahameru, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.

Tabel 250. Rekap Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Dalam Rupiah		
No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	750.000,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	421.796.266,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	2.889.436.243,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.255.000,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	821.313.757,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	135.915.872,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	1.294.000,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	170.297.000,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700.000,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	17.640.000,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	1.500.000,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	3.869.909,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	9.418.709,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	43.227.905,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	656.014.532,00
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah	250.000,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	81.120.958,00
18	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	333.630,00
19	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.800.000,00
20	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	1.097.941.647,00
21	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	3.551.223,00

No	Uraian	Jumlah
22	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.365.739,00
23	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	604.489,00
24	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	442.953,00
25	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	24.915.409,00
26	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	388.300.037,00
27	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	155.076.548,00
28	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	17.761.000,00
29	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.445.411.841,49
30	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	93.323.213,00
31	Utang Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	752.607,00
32	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	761.050,00
33	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.675.000,00
	TOTAL	9.553.816.537,49

Tabel 251. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	750.000,00
	TOTAL	750.000,00

Tabel 252. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	1.509.600,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	1.562.880,00
3	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	418.723.786,00
	TOTAL	421.796.266,00

Tabel 253. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	2.889.436.243,00
	TOTAL	2.889.436.243,00

Tabel 254. Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.255.000,00
	TOTAL	9.255.000,00

b

Tabel 255. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	821.313.757,00
TOTAL		821.313.757,00

Tabel 256. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	135.915.872,00
TOTAL		135.915.872,00

Tabel 257. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	390.000,00
2	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	904.000,00
TOTAL		1.294.000,00

Tabel 258. Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	65.340.000,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	22.400.000,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	41.360.000,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	6.440.000,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	1.577.000,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	4.000.000,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	18.360.000,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	4.480.000,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	6.340.000,00
TOTAL		170.297.000,00

Tabel 259. Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	700.000,00
TOTAL		700.000,00

Tabel 260. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	17.640.000,00
TOTAL		17.640.000,00

Tabel 261. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perhubungan	1.500.000,00
TOTAL		1.500.000,00

Tabel 262. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	2.150.070,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	1.669.839,00
3	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	50.000,00
TOTAL		3.869.909,00

Tabel 263. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	308.916,00
2	DINKES P2KB	347.218,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	52.451,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	25.866,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	55.984,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	58.000,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	274.911,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	47.400,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	25.366,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	37.410,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	41.850,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	73.987,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	34.846,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	65.993,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	73.467,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	42.937,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	80.294,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	78.580,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	102.121,00
20	DINKES P2KB - UPT Labkes	8.050,00
21	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	64.050,00
22	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	151.875,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	299.394,00
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	66.936,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	99.736,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.493.200,00
27	DINSOS P3A	58.000,00
28	Dinas Tenaga Kerja	66.936,00

No	Nama SKPD	Jumlah
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	117.110,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	61.832,00
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.040,00
32	Dinas Perhubungan	1.810.700,00
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	628.085,00
34	DISKOPINDAG	36.466,00
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.022,00
36	Dinas Pemuda dan Olahraga	123.660,00
37	Dinas Perikanan	25.866,00
38	Dinas Pariwisata	378.516,00
39	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	39.516,00
40	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	66.436,00
41	Sekretariat Daerah - Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	58.500,00
42	Sekretariat DPRD	216.246,00
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	137.148,00
44	Badan Pengelola Keuangan Daerah	205.466,00
45	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	50.674,00
46	Badan Kepegawaian Daerah	66.436,00
47	Inspektorat Daerah	310.166,00
48	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogotrunan	47.400,00
49	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Rogotrunan	48.066,00
50	Kecamatan Senduro	30.916,00
51	Kecamatan Pasrujambe	30.250,00
52	Kecamatan Sumbersuko	67.824,00
53	Kecamatan Candipuro	31.416,00
54	Kecamatan Pronojiwo	30.916,00
55	Kecamatan Yosowilangun	42.016,00
56	Kecamatan Rowokangkung	25.366,00
57	Kecamatan Jatiroto	30.916,00
58	Kecamatan Kedungjajang	47.566,00
59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	384.398,00
	TOTAL	9.418.709,00

Tabel 264. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	718.700,00
2	DINKES P2KB	2.296.250,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	765.200,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	3.604.000,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	45.000,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	46.000,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	544.605,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	567.600,00

No	Nama SKPD	Jumlah
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	4.196.720,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	1.941.900,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	156.200,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	169.200,00
13	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	30.400,00
14	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	45.400,00
15	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	1.809.300,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	179.600,00
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	247.900,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	47.500,00
19	DINSOS P3A	2.622.400,00
20	Dinas Tenaga Kerja	78.550,00
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.784.800,00
22	Dinas Lingkungan Hidup	386.250,00
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	217.600,00
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	674.500,00
25	Dinas Perhubungan	619.600,00
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	53.200,00
27	DISKOPINDAG	98.600,00
28	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	360.800,00
29	Dinas Pemuda dan Olahraga	909.900,00
30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	556.200,00
31	Dinas Perikanan	201.200,00
32	Dinas Pariwisata	692.400,00
33	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	4.855.800,00
34	Sekretariat DPRD	6.203.500,00
35	Badan Pengelola Keuangan Daerah	89.000,00
36	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	445.400,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.183.700,00
38	Inspektorat Daerah	29.300,00
39	Kecamatan Lumajang	386.600,00
40	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Jogotrunan	21.230,00
41	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Tompokersan	153.600,00
42	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Kepuharjo	95.600,00
43	Kecamatan Sukodono	119.000,00
44	Kecamatan Pasirian	122.200,00
45	Kecamatan Tempursari	349.100,00
46	Kecamatan Kunir	54.000,00
47	Kecamatan Klakah	239.900,00
48	Kecamatan Ranuyoso	56.400,00
49	Kecamatan Kedungjajang	126.800,00
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.300,00
	TOTAL	43.227.905,00

Tabel 265. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.299.734,00
2	DINKES P2KB	22.608.718,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	1.487.510,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	3.504.890,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	3.187.218,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	1.789.025,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	8.863.638,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	2.631.436,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	6.119.348,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	2.922.020,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	8.261.490,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	3.851.138,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	4.239.786,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	7.358.016,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	4.209.496,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumpersari	5.114.970,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	6.968.740,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	5.249.050,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	7.439.563,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	4.687.565,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	1.880.978,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	2.416.130,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	1.526.800,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	4.643.033,00
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	7.477.330,00
26	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	5.566.543,00
27	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	4.861.547,00
28	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	8.158.230,00
29	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	13.781.480,00
30	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	44.291.716,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	21.237.142,00
32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.746.236,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	5.604.954,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.872.550,00
35	DINSOS P3A	9.007.612,00
36	Dinas Tenaga Kerja	2.955.035,00
37	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.750.834,00
38	Dinas Lingkungan Hidup	74.238.322,00
39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.496.978,00
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.061.681,00
41	Dinas Perhubungan	9.389.821,00
42	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.460.549,00

No	Nama SKPD	Jumlah
43	DISKOPINDAG	39.557.838,00
44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.919.155,00
45	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.443.292,00
46	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.747.469,00
47	Dinas Perikanan	3.897.726,00
48	Dinas Pariwisata	25.464.622,00
49	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	68.529.477,00
50	Sekretariat DPRD	8.761.081,00
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.906.294,00
52	Badan Pengelola Keuangan Daerah	13.395.200,00
53	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	10.582.377,00
54	Badan Kepegawaian Daerah	8.145.181,00
55	Inspektorat Daerah	9.918.361,00
56	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Citrodiwangsan	1.292.480,00
57	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Kepuharjo	35.081,00
58	Kecamatan Sukodono	2.223.257,00
59	Kecamatan Padang	3.092.516,00
60	Kecamatan Gucialit	1.095.747,00
61	Kecamatan Senduro	266.260,00
62	Kecamatan Pasrujambe	558.746,00
63	Kecamatan Sumbersuko	1.303.740,00
64	Kecamatan Tempeh	3.144.779,00
65	Kecamatan Tempursari	1.304.840,00
66	Kecamatan Kunir	3.055.119,00
67	Kecamatan Yosowilangun	1.958.767,00
68	Kecamatan Tekung	1.399.226,00
69	Kecamatan Rowokangkung	192.376,00
70	Kecamatan Jatiroto	2.392.539,00
71	Kecamatan Randuagung	987.528,00
72	Kecamatan Klakah	1.490.000,00
73	Kecamatan Ranuyoso	682.872,00
74	Kecamatan Kedungjajang	2.001.734,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.050.000,00
TOTAL		656.014.532,00

Tabel 266. Utang Belanja Jasa Kantor-LangganJurnal/Surat Kabar/Majalah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	250.000,00
TOTAL		250.000,00

Tabel 267. Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	2.655.691,00

No	Nama SKPD	Jumlah
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	1.711.730,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	2.992.170,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	1.313.580,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumpersari	1.585.408,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	1.316.466,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	919.860,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	989.390,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	658.000,00
10	DDINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	1.145.190,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	1.015.211,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	745.590,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	2.855.927,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	1.313.580,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	959.711,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	1.312.580,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	1.196.050,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	1.120.551,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	771.675,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	2.422.580,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	1.769.900,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	780.000,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	2.101.680,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	1.189.590,00
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	1.144.690,00
26	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	656.290,00
27	DINKES P2KB - UPT Instalasi Farmasi	452.550,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.790.916,00
29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.084.750,00
30	Dinas Perhubungan	505.050,00
31	DISKOPINDAG	1.655.850,00
32	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.674.890,00
33	Badan Pengelola Keuangan Daerah	325.230,00
34	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	1.652.800,00
35	Kecamatan Padang	2.553.100,00
36	Kecamatan Gucialit	1.276.890,00
37	Kecamatan Senduro	1.768.230,00
38	Kecamatan Pasrujambe	1.154.400,00
39	Kecamatan Sumpersuko	1.142.640,00
40	Kecamatan Tempeh	1.803.422,00
41	Kecamatan Pasirian	755.250,00
42	Kecamatan Candipuro	1.410.150,00
43	Kecamatan Pronojiwo	1.166.890,00
44	Kecamatan Tempursari	1.161.900,00
45	Kecamatan Kunir	634.090,00
46	Kecamatan Yosowilangun	1.370.522,00
47	Kecamatan Tekung	1.194.640,00

No	Nama SKPD	Jumlah
48	Kecamatan Rowokangkung	745.090,00
49	Kecamatan Jatiroto	984.411,00
50	Kecamatan Randuagung	720.950,00
51	Kecamatan Klakah	1.360.416,00
52	Kecamatan Ranuyoso	1.704.077,00
53	Kecamatan Kedungjajang	1.428.764,00
	TOTAL	81.120.958,00

Tabel 268. Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	333.630,00
	TOTAL	333.630,00

Tabel 269. Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	1.800.000,00
	TOTAL	1.800.000,00

Tabel 270. Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Perhubungan	1.097.941.647,00
	TOTAL	1.097.941.647,00

Tabel 271. Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	793.650,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	2.757.573,00
	TOTAL	3.551.223,00

Tabel 272. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	1.478.588,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	3.335.342,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	1.229.528,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	963.622,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	1.671.424,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	1.025.626,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	1.655.324,00

No	Nama SKPD	Jumlah
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	1.524.727,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	1.405.691,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	853.364,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	1.332.819,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	1.572.865,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	2.662.764,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	1.996.848,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	2.960.552,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	2.457.036,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	1.968.131,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	830.728,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	2.203.120,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	1.435.374,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	582.872,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajajng	681.809,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	1.856.100,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	3.486.952,00
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	1.223.200,00
26	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	12.390.356,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	128.916,00
28	DINSOS P3A	257.832,00
29	Dinas Tenaga Kerja	242.978,00
30	Dinas Perhubungan	1.214.890,00
31	Dinas Pariwisata	607.445,00
32	Kecamatan Kunir	128.916,00
	TOTAL	57.365.739,00

Tabel 273. Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB – UPT Puskesmas Senduro	303.233,00
2	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	301.256,00
	TOTAL	604.489,00

Tabel 274. Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB – UPT Puskesmas Senduro	262.413,00
2	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	180.540,00
	TOTAL	442.953,00

Tabel 275. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Restribusi Daerah	24.915.409,00
TOTAL		24.915.409,00

Tabel 276. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Restribusi Daerah	388.300.037,00
TOTAL		388.300.037,00

Tabel 277. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Restribusi Daerah	155.076.548,00
TOTAL		155.076.548,00

Tabel 278. Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS PARIWISATA	17.761.000,00
TOTAL		17.761.000,00

Tabel 279. Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN

Dalam Rupiah		
No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	36.964.615,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	83.383.555,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	30.737.959,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	24.090.559,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	41.785.543,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	25.640.622,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	41.383.229,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	38.118.142,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	35.142.349,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	21.334.176,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	33.320.493,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	36.284.096,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	66.569.159,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumber Sari	49.921.115,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	74.013.805,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	49.277.078,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	49.203.372,00

No	Nama SKPD	Jumlah
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	20.768.237,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	55.077.407,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	35.884.325,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	14.425.908,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	17.045.215,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	46.402.545,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	87.173.852,00
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	66.830.579,00
26	DINKES P2KB - UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten	54.105.525,00
27	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	459.706.028,00
28	DINKES P2KB - UPT RSUD HARYOTO	850.822.353,49
	TOTAL	2.445.411.841,49

Tabel 280. Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	93.323.213,00
	TOTAL	93.323.213,00

Tabel 281. Utang Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	752.607,00
	TOTAL	752.607,00

Tabel 282. Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINSOS P3A	761.050,00
	TOTAL	761.050,00

Tabel 283. Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	1.675.000,00
	TOTAL	1.675.000,00

c) Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Merupakan Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp187.985.954,00 yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Talud Jalan Banyuputih Kidul – Randuagung dengan pelaksana CV. Guna Bakti.

d) Utang Belanja Aset Tetap Lainnya

Merupakan Utang Belanja Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp199.851.000,00 yang akan dipergunakan untuk Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD Negeri Klakah 02 dengan pelaksana CV. SAMUDRA JAYAKARTA yang disebabkan keterlambatan penyerahan jaminan pemeliharaan oleh Kontraktor Pelaksana dan berdampak pada keterlambatan penyusunan dan pengajuan administrasi pertanggungjawaban.

e) Utang Belanja Tidak Terduga

Saldo Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.265.139.721,00 merupakan:

- Utang pengembalian kelebihan salur Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (Dana BOP PAUD) Tahun 2023 karena penggabungan dan penutupan Lembaga Sekolah (Lembaga KB MAWAR) sebesar Rp2.880.000,00.
- Sisa Dana Bantuan Keuangan yang belum disetor ke RKUD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.262.259.115,00 (sesuai dengan rekap utang belanja tidak terduga nomor 4 – nomor 8) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 284. Rekap Utang Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

Dalam Rupiah					
No.	Rincian	Saldo Awal 1 Januari 2025	Penambahan Hutang Tahun 2025	Pengurangan Hutang Tahun 2025	Saldo Akhir 31 Desember 2025
1	Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2024	555.000.000,00	0,00	555.000.000,00	0,00
2	Pengembalian kelebihan salur Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (Dana BOP PAUD) Tahun 2023 karena penggabungan dan penutupan Lembaga sekolah (Lembaga KB MAWAR)	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00
3	Tagihan dari Rumah Sakit Tersier atas pasien Jamkesda yang belum terbayarkan di tahun 2022 dan 2023	606,00	0,00	0,00	606,00
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jatim Puspa	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Honorarium Aparatur Pemerintah	0,00	241.075.000,00	0,00	241.075.000,00
6	Kesehatan	0,00	127.565.115,00	0,00	127.565.115,00
7	Pendidikan	0,00	384.850.000,00	0,00	384.850.000,00
8	Pendidikan, Rehabilitasi Ruang Kelas SD	0,00	508.718.000,00	0,00	508.718.000,00
JUMLAH		557.880.606,00	1.262.259.115,00	555.000.000,00	1.265.139.721,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b. Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Tidak ada Kewajiban Jangka Panjang pada tahun 2025 tahun 2024.

5.3.3 EKUITAS

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ekuitas	3.654.038.555.876,61	3.323.649.487.930,75

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

**Tabel 285. Daftar Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah			
No	Akun	31 Des 2025	31 Des 2024
1	Jumlah Aset	3.688.058.471.333,23	3.366.199.570.586,54
2	Jumlah Kewajiban	34.019.915.456,62	42.550.082.655,79
3	Ekuitas (1-2)	3.654.038.555.876,61	3.323.649.487.930,75

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, sebagai berikut:

**Tabel 286. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah			
No	Uraian	2025	2024
1	Ekuitas Awal	3.323.649.487.930,75	3.115.910.728.265,84
2	Surplus (Defisit) LO	279.675.182.010,37	196.077.309.667,29
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar	50.713.885.935,49	11.661.449.997,62
4	Ekuitas Akhir	3.654.038.555.876,61	3.323.649.487.930,75

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.4.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO meliputi Pendapatan Asli Daerah-LO; Pendapatan Transfer-LO dan Lain-lain pendapatan yang sah - LO.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah-LO	468.683.889.790,27	405.241.495.390,99
PAD-LO terdiri dari:		
- Pajak Daerah	183.438.080.532,52	120.402.133.817,00
- Retribusi Daerah	256.262.110.655,62	266.845.723.786,67
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.195.743.868,45	8.715.556.828,63
- Lain-lain PAD yang sah	20.787.954.733,68	9.278.080.958,69
Jumlah PAD-LO	468.683.889.790,27	405.241.495.390,99

Pendapatan Asli Daerah LO terinci sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Pendapatan Pajak Daerah LO	183.438.080.532,52	120.402.133.817,00

Pendapatan Pajak-LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, terinci sebagai berikut:

Tabel 287. Daftar Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No.	Pendapatan Pajak Daerah	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Pajak Reklame	1.210.987.107,32	2.079.567.409,00
2	Pajak Air Tanah	1.185.226.386,00	1.127.977.400,00
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.013.510.125,20	24.628.469.088,00
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	23.173.749.618,00	23.320.869.841,00
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.346.566.606,00	24.498.626.661,00
6	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	46.584.361.790,00	44.746.623.418,00
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	45.231.016.500,00	0,00
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.692.662.400,00	0,00
	JUMLAH	183.438.080.532,52	120.402.133.817,00

Tabel 288. Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Pajak LRA	Penambahan - LO	Pengurangan - LO		Total Pendapatan Pajak - LO
			Penambahan Piutang Pajak 2025	Penerimaan Piutang Tahun 2024	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2025	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4) - (5+6)
1	Pajak Reklame	2.045.192.403,00	234.724.944,00	182.379.094,00	886.551.145,68	1.210.987.107,32
2	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.941.047.203,00	234.514.944,00	182.271.594,00	886.551.145,68	1.106.739.407,32
3	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.941.047.203,00	234.514.944,00	182.271.594,00	886.551.145,68	1.106.739.407,32
4	Pajak Reklame Kain	104.145.200,00	210.000,00	107.500,00	0,00	104.247.700,00
5	Pajak Reklame Kain	104.145.200,00	210.000,00	107.500,00	0,00	104.247.700,00
6	Pajak Air Tanah	1.178.497.194,00	8.032.260,00	1.303.068,00	0,00	1.185.226.386,00
7	Pajak Air Tanah	1.178.497.194,00	8.032.260,00	1.303.068,00	0,00	1.185.226.386,00
8	Pajak Air Tanah	1.178.497.194,00	8.032.260,00	1.303.068,00	0,00	1.185.226.386,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.060.776.375,20	0,00	47.266.250,00	0,00	24.013.510.125,20
10	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	24.060.776.375,20	0,00	47.266.250,00	0,00	24.013.510.125,20
11	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	24.060.776.375,20	0,00	47.266.250,00	0,00	24.013.510.125,20
12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18.908.814.878,00	6.170.941.980,00	1.906.007.240,00	0,00	23.173.749.618,00
13	PBBP2	18.908.814.878,00	6.170.941.980,00	1.906.007.240,00	0,00	23.173.749.618,00
14	PBBP2	18.908.814.878,00	6.170.941.980,00	1.906.007.240,00	0,00	23.173.749.618,00
15	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.346.566.606,00	0,00	0,00	0,00	26.346.566.606,00
16	BPHTB-Pemindahan Hak	26.346.566.606,00	0,00	0,00	0,00	26.346.566.606,00
17	BPHTB-Pemindahan Hak	26.346.566.606,00	0,00	0,00	0,00	26.346.566.606,00
18	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	46.331.616.366,00	3.563.147.629,00	3.310.402.205,00	0,00	46.584.361.790,00
19	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.364.177.592,00	24.423.175,00	0,00	0,00	5.388.600.767,00
20	PBJT-Restoran	2.095.334.733,00	17.349.775,00	0,00	0,00	2.112.684.508,00
21	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.268.842.859,00	7.073.400,00	0,00	0,00	3.275.916.259,00
22	PBJT-Tenaga Listrik	37.964.264.753,00	3.529.817.754,00	3.310.402.205,00	0,00	38.183.680.302,00
23	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	37.964.264.753,00	3.529.817.754,00	3.310.402.205,00	0,00	38.183.680.302,00
24	PBJT-Jasa Perhotelan	1.344.843.493,00	7.616.000,00	0,00	0,00	1.352.459.493,00
25	PBJT-Hotel	1.142.254.093,00	3.256.000,00	0,00	0,00	1.145.510.093,00

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Pajak LRA	Penambahan - LO	Pengurangan - LO		Total Pendapatan Pajak - LO
			Penambahan Piutang Pajak 2025	Penerimaan Piutang Tahun 2024	Penambahan Pendapatan diterima dimuka 2025	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4) - (5+6)
26	PBJT-Losmen	5.187.000,00	0,00	0,00	0,00	5.187.000,00
27	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	197.402.400,00	4.360.000,00	0,00	0,00	201.762.400,00
28	PBJT-Jasa Parkir	473.880.441,00	1.290.700,00	0,00	0,00	475.171.141,00
29	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	473.880.441,00	1.290.700,00	0,00	0,00	475.171.141,00
30	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.184.450.087,00	0,00	0,00	0,00	1.184.450.087,00
31	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	55.154.377,00	0,00	0,00	0,00	55.154.377,00
32	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
33	PBJT-Pameran	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
34	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
35	PBJT-Permainan Ketangkasan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
36	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	36.711.400,00	0,00	0,00	0,00	36.711.400,00
37	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	1.061.934.310,00	0,00	0,00	0,00	1.061.934.310,00
38	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	22.350.000,00	0,00	0,00	0,00	22.350.000,00
39	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	45.231.016.500,00	0,00	0,00	0,00	45.231.016.500,00
40	Opsen PKB	45.231.016.500,00	0,00	0,00	0,00	45.231.016.500,00
41	Opsen PKB	45.231.016.500,00	0,00	0,00	0,00	45.231.016.500,00
42	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.692.662.400,00	0,00	0,00	0,00	15.692.662.400,00
43	Opsen BBNKB	15.692.662.400,00	0,00	0,00	0,00	15.692.662.400,00
44	Opsen BBNKB	15.692.662.400,00	0,00	0,00	0,00	15.692.662.400,00
	JUMLAH	179.795.142.722,20	9.976.846.813,00	5.447.357.857,00	886.551.145,68	183.438.080.532,52

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO	256.262.110.655,62	266.845.723.786,67

Pendapatan Retribusi-LO yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, terinci sebagai berikut:

Tabel 289. Daftar Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No.	Pendapatan Retribusi	31 Des 2025	31 Des 2024
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Jasa Umum	251.205.928.265,62	262.230.105.912,67
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	242.714.558.429,00	251.965.343.143,00
b	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.275.041.000,00	2.892.581.541,67
c	Retribusi Pelayanan Pasar	6.461.291.273,62	6.570.688.163,96
d	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	85.511.800,00
e	Retribusi Pelayanan Kebersihan	755.037.563,00	715.981.264,04
2	Retribusi Jasa Usaha	4.199.991.180,00	3.724.905.283,00
f	Retribusi Terminal	42.512.400,00	44.240.400,00
g	Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan	24.680.000,00	9.790.000,00
h	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	391.417.000,00	207.948.500,00
i	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	222.620.000,00	265.350.000,00
j	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.110.904.432,00	2.131.405.650,00
k	Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah	8.250.000,00	6.345.000,00
l	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.399.607.348,00	1.059.825.733,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	856.191.210,00	890.712.591,00
m	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	796.311.210,00	890.712.591,00
n	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	59.880.000,00	0,00
	JUMLAH	256.262.110.655,62	266.845.723.786,67

Tabel 290. Pendapatan Retribusi LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO				Total Pendapatan Retribusi - LO
			Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Jasa Transaksi Keuangan	Pengakuan Pendapatan atas Klaim BPJS	Penurunan Penyisihan piutang	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	Pembayaran Kelebihan Klaim 2025	Kelebihan penerimaan klaim BPJS 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10+11+12)
1	Retribusi Jasa Umum	270.009.783.432,00	96.412.115.157,00	346.351.280,83	43.500,00	1.383.246.344,00	3.325,00	116.588.784.090,00	207.008.783,21	0,00	149.821.900,00	251.205.928.265,62
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	261.657.756.093,00	96.412.115.157,00	0,00	43.500,00	1.383.246.344,00	3.325,00	116.588.784.090,00	0,00	0,00	149.821.900,00	242.714.558.429,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	69.413.670.082,00	257.620.140,00	0,00	37.700,00	0,00	3.325,00	175.347.000,00	0,00	0,00	0,00	69.495.984.247,00
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	185.480.566.011,00	96.154.495.017,00	0,00	5.800,00	1.383.246.344,00	0,00	116.413.437.090,00	0,00	0,00	149.821.900,00	166.455.054.182,00
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	6.763.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763.520.000,00
14	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.275.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.041.000,00
15	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.275.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.041.000,00
16	Retribusi Pelayanan Pasar	6.321.948.776,00	0,00	346.351.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207.008.783,21	0,00	0,00	6.461.291.273,62
17	Retribusi Pelataran	769.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.683.200,00
18	Retribusi Los	1.111.957.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.957.662,50
19	Retribusi Kios	4.440.307.913,50	0,00	346.351.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	207.008.783,21	0,00	0,00	4.579.650.411,12
47	Retribusi Pelayanan Kebersihan	755.037.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.037.563,00
48	Retribusi Pelayanan Persampahan	693.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.170.000,00
49	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	61.867.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867.563,00

b

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO				Total Pendapatan Retribusi - LO
			Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Jasa Transaksi Keuangan	Pengakuan Pendapatan atas Klaim BPJS	Penurunan Penyisihan piutang	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	Pembayaran Kelebihan Klaim 2025	Kelebihan penerimaan klaim BPJS 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10+11+12)
53	Retribusi Jasa Usaha	4.241.233.930,00	63.491.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.609.650,00	28.125.000,00	0,00	0,00	4.199.991.180,00
68	Retribusi Terminal	48.132.600,00	42.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.132.600,00	0,00	0,00	0,00	42.512.400,00
70	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	48.132.600,00	42.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.132.600,00	0,00	0,00	0,00	42.512.400,00
80	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	223.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.295.000,00
81	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	223.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.295.000,00
90	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	24.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.000,00
91	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	24.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.000,00
95	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	391.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.417.000,00
96	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	391.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.417.000,00
97	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	222.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00
98	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	222.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00
101	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.887.609.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.609.432,00
102	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.887.609.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887.609.432,00
105	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
106	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00

6

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO				Total Pendapatan Retribusi - LO
			Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Jasa Transaksi Keuangan	Pengakuan Pendapatan atas Klaim BPJS	Penurunan Penyisihan piutang	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	Pembayaran Kelebihan Klaim 2025	Kelebihan penerimaan klaim BPJS 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10+11+12)
107	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.435.229.898,00	20.979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.477.050,00	28.125.000,00	0,00	0,00	1.399.607.348,00
108	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.435.229.898,00	20.979.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.477.050,00	28.125.000,00	0,00	0,00	1.399.607.348,00
109	Retribusi Perizinan Tertentu	856.191.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.191.210,00
125	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	796.311.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.311.210,00
126	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	796.311.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.311.210,00
127	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	59.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.880.000,00
128	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	59.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.880.000,00
	JUMLAH	275.107.208.572,00	96.475.607.057,00	346.351.280,83	43.500,00	1.383.246.344,00	3.325,00	116.665.393.740,00	235.133.783,21	0,00	149.821.900,00	256.262.110.655,62

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	242.714.558.429,00	251.965.343.143,00

Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO sebagaimana tabel berikut:

Tabel 291. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	SKPD	2025	2024
1	2	4	5
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	242.714.558.429,00	251.965.343.143,00
I	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	69.495.984.247,00	65.283.498.648,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	1.940.019.375,00	2.068.022.675,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	2.490.507.379,00	1.948.922.427,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	2.865.795.861,00	2.574.940.572,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	2.132.219.699,00	1.910.203.566,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	3.924.767.055,00	3.613.151.800,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	1.787.108.443,00	1.613.670.806,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	3.647.355.858,00	3.796.972.104,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	2.119.489.233,00	2.069.429.206,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	3.328.391.944,00	3.192.004.715,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	1.969.517.579,00	1.849.385.913,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	2.385.286.529,00	1.987.366.846,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	3.856.858.054,00	3.788.969.742,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	3.300.834.722,00	3.086.273.625,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumber Sari	2.715.822.721,00	2.555.715.470,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	3.184.665.328,00	2.844.036.848,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	2.633.298.947,00	2.274.665.470,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	2.744.951.175,00	2.573.060.262,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	2.523.916.409,00	2.388.318.868,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	2.016.657.850,00	1.647.000.614,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	3.042.132.720,00	2.871.063.916,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	1.895.307.565,00	1.753.674.599,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	3.338.972.652,00	3.333.976.467,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	4.217.498.879,00	4.293.957.546,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	3.013.455.034,00	3.022.066.733,00
	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	2.421.153.236,00	2.226.647.858,00
II	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	166.455.054.182,00	182.519.220.495,00
	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	134.060.869.658,00	147.484.454.711,00
	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	32.394.184.524,00	35.034.765.784,00
III	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	6.763.520.000,00	4.162.624.000,00
	DINKES P2KB - UPT LABKES	6.763.520.000,00	4.162.624.000,00
TOTAL		242.714.558.429,00	251.965.343.143,00

Tabel 292. Hubungan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas LRA dan LO

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO			Pengurangan - LO	Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2024	Jasa Transaksi Keuangan	Penurunan Penyisihan piutang	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	$7 = (3+4+5+6)-7$
1	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	1.940.019.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.019.375,00
2	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	2.428.707.379,00	61.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.507.379,00
3	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	2.865.545.961,00	2.154.000,00	2.900,00	0,00	1.907.000,00	2.865.795.861,00
4	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	2.131.129.699,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.219.699,00
5	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	3.924.767.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924.767.055,00
6	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS BADES	1.787.108.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.108.443,00
7	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TEMPEH	3.646.584.318,00	1.858.640,00	2.900,00	0,00	1.090.000,00	3.647.355.858,00
8	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS GESANG	2.171.551.333,00	0,00	2.900,00	0,00	52.065.000,00	2.119.489.233,00
9	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	3.359.569.044,00	0,00	2.900,00	0,00	31.180.000,00	3.328.391.944,00
10	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	1.997.574.679,00	0,00	2.900,00	0,00	28.060.000,00	1.969.517.579,00
11	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TEKUNG	2.385.286.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.286.529,00
12	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS KUNIR	3.857.516.829,00	860.000,00	2.900,00	3.325,00	1.525.000,00	3.856.858.054,00
13	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	3.272.181.822,00	73.510.000,00	2.900,00		44.860.000,00	3.300.834.722,00
14	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	2.715.822.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.822.721,00
15	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS JATIROTO	3.184.665.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184.665.328,00
16	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	2.614.208.947,00	19.090.000,00	0,00	0,00	0,00	2.633.298.947,00
17	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS SUKODONO	2.702.705.775,00	44.097.500,00	2.900,00	0,00	1.855.000,00	2.744.951.175,00
18	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PADANG	2.523.916.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.916.409,00
19	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	2.017.114.950,00	986.000,00	2.900,00	0,00	1.446.000,00	2.016.657.850,00

No	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO			Pengurangan - LO	Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2024	Jasa Transaksi Keuangan	Penurunan Penyisihan piutang	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	7 = (3+4+5+6)-7
20	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS SENDURO	3.043.193.820,00	0,00	2.900,00	0,00	1.064.000,00	3.042.132.720,00
21	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	1.858.207.565,00	37.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.895.307.565,00
22	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	3.333.336.852,00	15.074.000,00	5.800,00	0,00	9.444.000,00	3.338.972.652,00
23	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS KLAKAH	4.217.498.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.498.879,00
24	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	3.013.455.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.455.034,00
25	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	2.422.001.336,00	0,00	2.900,00	0,00	851.000,00	2.421.153.236,00
		69.413.670.082,00	257.620.140,00	37.700,00	3.325,00	175.347.000,00	69.495.984.247,00

Tabel 293. Hubungan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO			Pengurangan - LO				Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2024	Jasa Transaksi Keuangan	Pemotongan BPJS	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	Kontra Pos	Pelunasan Pemotongan BPJS	Kelebihan penerimaan klaim BPJS 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	$10 = (3+4+5+6) - (7+8+9)$
1	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. HARYOTO	154.273.071.181,00	96.076.741.253,00	0,00	0,00	116.288.942.776,00	0,00	0,00	0,00	134.060.869.658,00
2	DINKES P2KB - UPT RSUD PASIRIAN	31.207.494.830,00	77.753.764,00	5.800,00	1.383.246.344,00	124.494.314,00	0,00	0,00	149.821.900,00	32.394.184.524,00
		185.480.566.011,00	96.154.495.017,00	5.800,00	1.383.246.344,00	116.413.437.090,00	0,00	0,00	149.821.900,00	166.455.054.182,00

Tabel 294. Hubungan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO			Pengurangan - LO			Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2025	Jasa Transaksi Keuangan	Pemotongan BPJS	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Kontra Pos	Pelunasan Pemotongan BPJS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$10 = (3+4+5+6) - (7+8+9)$
1	DINKES P2KB - UPT LABKES	6.763.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763.520.000,00
	JUMLAH	6.763.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763.520.000,00

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.275.041.000,00	2.892.581.541,67

Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum-LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 (Dinas Perhubungan), terinci sebagai berikut:

Tabel 295. Pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	Dinas Perhubungan	1.275.041.000,00	2.892.581.541,67
	Jumlah	1.275.041.000,00	2.892.581.541,67

Tabel 296. Hubungan Pendapatan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum LRA dan LO

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (3+4+5)-(6+7)$
1	Dinas Perhubungan	1.275.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.041.000,00
	Jumlah	1.275.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.041.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
c) Retribusi Pelayanan Pasar-LO	6.461.291.273,62	6.570.688.163,96

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 297. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	SKPD	Retribusi Pelataran	Retribusi Los	Retribusi Kios	2025	2024
1	2	3	4	5	$6 = (3+4+5)$	7
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	769.683.200,00	1.111.957.662,50	4.579.650.411,12	6.461.291.273,62	6.570.688.163,96
	TOTAL	769.683.200,00	1.111.957.662,50	4.579.650.411,12	6.461.291.273,62	6.570.688.163,96

Pendapatan Retribusi Pelataran-LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 298. Hubungan Pendapatan Retribusi Pelataran LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi - LRA	Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6-7)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	769.683.200,00	0,00	0,00	0,00	769.683.200,00	769.683.200,00
	Jumlah	769.683.200,00	0,00	0,00	0,00	769.683.200,00	769.683.200,00

Tabel 299. Hubungan Pendapatan Retribusi Los LRA dan LO

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi - LRA	Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2023	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6-7)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.111.957.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.957.662,50
	Jumlah	1.111.957.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.957.662,50

Tabel 300. Hubungan Pendapatan Retribusi Kios LRA dan LO

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6-7)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.440.307.913,50	0,00	346.351.280,83	0,00	207.008.783,21	4.579.650.411,12
	Jumlah	4.440.307.913,50	0,00	346.351.280,83	0,00	207.008.783,21	4.579.650.411,12

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
d) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	85.511.800,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 301. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	2	3	4
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	85.511.800,00
TOTAL		0,00	85.511.800,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
e) Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO	755.037.563,00	715.981.264,04

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 302. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	Dinas Lingkungan Hidup		
	Retribusi Pelayanan Persampahan	693.170.000,00	647.869.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	61.867.563,00	68.112.264,04
	Jumlah	755.037.563,00	715.981.264,04

Tabel 303. Hubungan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan LRA dan LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan-LO			Pengurangan-LO		Total Pendapatan Retribusi-LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi-LRA	Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6-7)
1	Dinas Lingkungan Hidup	693.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.170.000,00
	Jumlah	693.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.170.000,00

Tabel 304. Hubungan Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus LRA dan LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan-LO			Pengurangan-LO		Total Pendapatan Retribusi-LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi-LRA	Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Tahun 2023	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6+7)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	61.867.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867.563,00
	Jumlah	61.867.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.867.563,00

**31 Desember 2025
(Rp)**

**31 Desember 2024
(Rp)**

f) Retribusi Terminal-LO

42.512.400,00

44.240.400,00

Pendapatan Retribusi Terminal-LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp42.512.400,00 dan Rp44.240.400,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah retribusi yang menjadi pendapatan daerah ini adalah Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Tabel 305. Pendapatan Retribusi Terminal - Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	2	3	4
1	Dinas Perhubungan	42.512.400,00	44.240.400,00
	TOTAL	42.512.400,00	44.240.400,00

Pendapatan Retribusi Terminal - Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 306. Hubungan Pendapatan Retribusi Terminal - Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha LRA dan LO

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2023	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6+7)
1	Dinas Perhubungan	48.132.600,00	42.512.400,00	0,00	48.132.600,00	0,00	42.512.400,00
	Jumlah	48.132.600,00	42.512.400,00	0,00	48.132.600,00	0,00	42.512.400,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
g) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	24.680.000,00	9.790.000,00

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 307. Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	SKPD	2024	2023
1	Dinas Lingkungan Hidup	24.680.000,00	9.790.000,00
	Jumlah	24.680.000,00	9.790.000,00

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 308. Hubungan Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya LRA dan LO

Dalam Rupiah							
No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2023	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6+7)
1	Dinas Lingkungan Hidup	24.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.000,00
	Jumlah	24.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.680.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
h) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	391.417.000,00	207.948.500,00

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

**Tabel 309. Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	Dinas Perhubungan	265.570.000,00	207.948.500,00
2	DISKOPINDAG	125.847.000,00	0,00
	Jumlah	391.417.000,00	207.948.500,00

**Tabel 310. Hubungan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
LRA dan LO**

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2023	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)- (6+7)
1	Dinas Perhubungan	391.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.417.000,00
	Jumlah	391.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.417.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
i) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO	222.620.000,00	265.350.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

**Tabel 311. Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	222.620.000,00	265.350.000,00
	Jumlah	222.620.000,00	265.350.000,00

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

**Tabel 312. Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2023	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2023	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (3+4+5)-(6+7)$
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	222.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00
	Jumlah	222.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.620.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
j) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga - LO	2.110.904.432,00	2.131.405.650,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

**Tabel 313. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	Dinas Kesehatan P2KB	52.840.000,00	52.461.000,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	223.295.000,00	261.899.000,00
3	Dinas Pariwisata	1.834.769.432,00	1.817.045.650,00
	Jumlah	2.110.904.432,00	2.131.405.650,00

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

**Tabel 314. Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (3+4+5)-(6+7)$
1	Dinas Kesehatan P2KB	52.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.840.000,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	223.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.295.000,00
3	Dinas Pariwisata	1.834.769.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.769.432,00
	Jumlah	2.110.904.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.904.432,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
k) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO	8.250.000,00	6.345.000,00

Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 315. Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	Dinas Kesehatan P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	5.000.000,00	2.500.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	3.250.000,00	3.845.000,00
	Jumlah	8.250.000,00	6.345.000,00

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 316. Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6+7)
1	Dinas Kesehatan P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
	Jumlah	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
l) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	1.399.607.348,00	1.059.825.733,00

Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 317. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO
Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	6.120.000,00	1.090.000,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	7.940.000,00	2.100.000,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	11.730.000,00	11.550.000,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	10.970.000,00	6.490.000,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	7.220.000,00	3.640.000,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	550.000,00	600.000,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	9.375.000,00	3.800.000,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	7.560.000,00	3.240.000,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	1.500.000,00	600.000,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	3.100.000,00	700.000,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	4.500.000,00	2.700.000,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	11.210.000,00	5.860.000,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	6.260.000,00	1.180.000,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumpersari	4.770.000,00	2.180.000,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	2.520.000,00	800.000,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	8.320.000,00	10.610.000,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	1.000.000,00	500.000,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	5.200.000,00	2.300.000,00
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	9.500.000,00	12.250.000,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	14.524.000,00	6.298.000,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	1.910.000,00	590.000,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	6.305.000,00	9.152.500,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	24.535.000,00	25.977.500,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	27.540.000,00	7.845.000,00
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	3.500.000,00	2.950.000,00
26	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	314.642.768,00	106.291.600,00
27	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	0,00	115.830.383,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	682.435.580,00	650.364.750,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	7.445.000,00	7.277.000,00
30	DISKOPINDAG	23.925.000,00	55.059.000,00
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	750.000,00	0,00
32	Dinas Pariwisata	172.750.000,00	0,00
	Jumlah	1.399.607.348,00	1.059.825.733,00

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 terinci sebagai berikut:

**Tabel 318. Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6+7)
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	6.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pronojiwo	7.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940.000,00
3	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Candipuro	11.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730.000,00
4	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Penanggal	10.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970.000,00
5	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasirian	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220.000,00
6	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempeh	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375.000,00
8	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gesang	7.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00
9	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Rogotrunan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Labruk Kidul	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
11	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tekung	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kunir	11.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210.000,00
13	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Yosowilangun	6.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260.000,00
14	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00
15	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Jatiroto	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
16	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Randuagung	8.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00
17	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sukodono	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Padang	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00

6

No.	Nama SKPD	Jumlah Pendapatan Retribusi LRA	Penambahan - LO		Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
			Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
19	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
20	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Senduro	14.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524.000,00
21	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Gucialit	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00
22	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Kedungjajang	6.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.000,00
23	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Klakah	24.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.535.000,00
24	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Ranuyoso	27.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540.000,00
25	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tunjung	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
26	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. Haryoto	314.642.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.642.768,00
27	DINKES P2KB - UPT RSUD Pasirian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	689.933.130,00	20.979.500,00	0,00	28.477.050,00	0,00	682.435.580,00
29	Dinas Lingkungan Hidup	7.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445.000,00
30	DISKOPINDAG	52.050.000,00		0,00	0,00	28.125.000,00	23.925.000,00
31	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
32	Dinas Pariwisata	172.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.750.000,00
	Jumlah	1.435.229.898,00	20.979.500,00	0,00	28.477.050,00	28.125.000,00	1.399.607.348,00

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
m) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	796.311.210,00	890.712.591,00

Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp796.311.210,00 dan Rp890.712.591,00.

Tabel 319. Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	796.311.210,00	890.712.591,00
	Jumlah	796.311.210,00	890.712.591,00

Tabel 320. Hubungan Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung LRA dan LO

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi - LRA	Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6-7)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	796.311.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.311.210,00
	Jumlah	796.311.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.311.210,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
n) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)- LO	59.880.000,00	0,00

**Tabel 321. Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	SKPD	2025	2024
1	Dinas Tenaga Kerja	59.880.000,00	0,00
	Jumlah	59.880.000,00	0,00

**Tabel 322. Hubungan Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
LRA dan LO**

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Total Pendapatan Retribusi - LO
		Jumlah Pendapatan Retribusi - LRA	Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2025	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2024	Penerimaan Piutang Retribusi Tahun 2024	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3+4+5)-(6-7)
1	Dinas Tenaga Kerja	59.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.880.000,00
Jumlah		59.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.880.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.195.743.868,45	8.715.556.828,63

Jumlah tersebut merupakan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yang menjadi hak Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

**Tabel 323. Daftar Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penerimaan Dividen PT. Bank Jatim	3.676.842.721,95	3.655.336.787,55
2	Penerimaan Dividen PT. BPR Jatim	39.760.000,00	38.980.000,00
3	Penerimaan Bagian Laba PD. BPR Bank Lumajang	528.565.869,15	383.053.017,00
4	Penerimaan Bagian Laba PDAM	1.664.742.817,10	2.629.886.747,54
5	Penerimaan Bagian Laba PD. Semeru	0,00	0,00
6	Jumlah Pendapatan – LRA (1 s/d 5)	5.909.911.408,20	6.707.256.552,09
7	Laba PD. BPR Bank Lumajang	1.959.060.990,00	961.028.853,00
8	Laba PDAM	3.276.781.437,00	4.060.211.188,07
9	Laba PD. SEMERU	0,00	0,00
10	Setoran Bagian Laba PDAM	(1.664.742.817,10)	(2.629.886.747,54)
11	Alokasi bagian laba PDAM untuk cadangan umum, jasprod, dana sosial, pendidikan, sumbangan pensiun dan sokongan	(756.701.280,50)	0,00
12	Setoran Bagian Laba PD. BPR Bank Lumajang	(528.565.869,15)	(383.053.017,00)
13	Setoran Bagian Laba PD. Semeru	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan – LO (6 s/d 13)	8.195.743.868,45	8.715.556.828,63

Tabel 324. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LRA	Penambahan - LO	Pengurangan - LO	Total Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO
			Pengakuan Laba BUMD Tahun 2025	Penerimaan Bagian Laba BUMD 2024	
1	2	3	4	5	6=(3+4)-(5)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.909.911.408,20	5.235.842.427,00	2.950.009.966,75	8.195.743.868,45
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.245.168.591,10	1.959.060.990,00	528.565.869,15	5.675.663.711,95
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.245.168.591,10	1.959.060.990,00	528.565.869,15	5.675.663.711,95
4	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.664.742.817,10	3.276.781.437,00	2.421.444.097,60	2.520.080.156,50
5	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	1.664.742.817,10	3.276.781.437,00	2.421.444.097,60	4.095.055.664,36
	JUMLAH	5.909.911.408,20	5.235.842.427,00	2.950.009.966,75	8.195.743.868,45

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	20.787.954.733,68	9.278.080.958,69

Pendapatan Asli Daerah Lainnya, yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 325. Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO Per 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Lain-lain PAD yang Sah	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	157.450.000,00	305.398.000,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	96.900.000,00
3	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	96.900.000,00
4	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	142.816.000,00	208.498.000,00
5	Hasil Penjualan Biota Perairan	70.816.000,00	136.498.000,00
6	Hasil Penjualan Tanaman	72.000.000,00	72.000.000,00
7	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	14.634.000,00	0,00
8	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	14.634.000,00	0,00

No.	Lain-lain PAD yang Sah	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
9	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.848.123.777,23	1.881.783.666,78
10	Hasil Sewa BMD	3.662.827.943,90	1.616.833.666,78
11	Hasil Sewa BMD	3.662.827.943,90	1.616.833.666,78
12	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	185.295.833,33	264.950.000,00
13	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	185.295.833,33	264.950.000,00
14	Jasa Giro	2.778.944.085,89	1.631.664.836,65
15	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.611.190.851,45	1.456.976.865,97
16	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.611.190.851,45	1.456.976.865,97
17	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	165.875.794,96	170.821.552,15
18	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	165.875.794,96	170.821.552,15
19	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	1.201.920,27	3.359.568,70
20	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	1.201.920,27	3.359.568,70
21	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	675.519,21	506.849,83
22	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	675.519,21	506.849,83
23	Pendapatan Bunga	1.290.289.923,19	1.682.182.471,11
24	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.290.289.923,19	1.682.182.471,11
25	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.290.289.923,19	1.682.182.471,11
26	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.472.675,00	23.500.000,00
27	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.472.675,00	23.500.000,00
28	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.472.675,00	23.500.000,00
29	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	399.785.362,86	35.861.899,00
30	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	399.785.362,86	35.861.899,00
31	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	399.785.362,86	35.861.899,00
32	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	123.633.494,43
33	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	207.466,00
34	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	87.871,00
35	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	115.745,00
36	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0,00	3.850,00
37	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	6.144.465,00
38	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	333.411,00
39	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	37.348,00
40	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	519.589,00
41	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	2.000,00
42	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	11.250,00
43	Pendapatan Denda Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	5.240.867,00
44	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	4.000,00
45	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0,00	1.000,00
46	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	3.000,00
47	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.747.523,00	1.383.931,25
48	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.744.523,00	1.383.931,25
49	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	3.000,00	0,00

No.	Lain-lain PAD yang Sah	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
50	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	61.903,00
51	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	61.903,00
52	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	489.233,00	215.794,18
53	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	489.233,00	215.794,18
54	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	111.300,00	4.513.750,00
55	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	111.300,00	4.513.750,00
56	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	187.405.689,00	111.102.185,00
57	Pendapatan Denda PBBP2	187.405.689,00	111.102.185,00
58	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	224.000,00	0,00
59	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	224.000,00	0,00
60	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	7.769.158,00	0,00
61	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO	630.575,00	0,00
62	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	6.754.764,00	0,00
63	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	142.692,00	0,00
64	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO	136.455,00	0,00
65	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	75.922,00	0,00
66	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO	1.000,00	0,00
67	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	25.750,00	0,00
68	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	2.000,00	0,00
69	Pendapatan dari Pengembalian	9.824.164.874,90	1.166.514.965,37
70	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.413.000,00	4.683.952,00
71	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.413.000,00	4.683.952,00
72	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	4.616.682,00	0,00
73	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.118.400,00	0,00
74	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.498.282,00	0,00
75	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	524.187.900,00	20.838.712,00
76	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	19.718.712,00
77	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	1.120.000,00
78	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS-LO	524.187.900,00	0,00
79	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	23.106.337,00	0,00
80	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	23.106.337,00	0,00

No.	Lain-lain PAD yang Sah	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
81	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.955.878,88	6.213.800,00
82	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	0,00	6.213.800,00
83	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan-LO	15.955.878,88	0,00
84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	5.000.000,00
85	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	5.000.000,00
86	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	8.988.000,00	7.756.000,00
87	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	7.756.000,00
88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	8.988.000,00	0,00
89	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000,00	0,00
90	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000,00	0,00
91	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	7.856.629.127,02	40.000.000,00
92	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan-LO	0,00	40.000.000,00
93	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan-LO	7.856.629.127,02	0,00
94	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	244.148.950,00	257.104.174,12
95	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	244.148.950,00	244.144.174,12
96	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	12.960.000,00
97	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	500.000,00
98	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	500.000,00
99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	106.771.000,00	0,00
100	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan-LO	85.346.000,00	0,00
101	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	21.425.000,00	0,00
102	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	9.598.000,00	823.418.327,25

No.	Lain-lain PAD yang Sah	31-Des-25	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
103	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	9.598.000,00	823.418.327,25
104	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.020.750.000,00	0,00
105	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.020.750.000,00	0,00
106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	1.000.000,00
107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	1.000.000,00
108	Pendapatan BLUD	2.280.454.865,67	2.422.392.957,35
109	Pendapatan BLUD	0,00	0,00
110	Pendapatan BLUD	0,00	0,00
111	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.448.704.944,33	1.714.935.178,77
112	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.448.704.944,33	1.714.935.178,77
113	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	831.749.921,34	707.457.778,58
114	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	821.991.666,34	707.457.778,58
115	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD-LO	9.758.255,00	0,00
116	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.879.800,00	1.953.200,00
117	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	1.879.800,00	1.953.200,00
118	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	1.879.800,00	1.953.200,00
119	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	113.700,00
120	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	113.700,00
121	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	113.700,00
122	Penerimaan Lain - lain	4.642.465,94	3.081.768,00
123	Penerimaan Lain - lain	4.642.465,94	3.081.768,00
124	Penerimaan Lain - lain	4.642.465,94	3.081.768,00
	Pendapatan Asli Daerah Lainnya- LO	20.787.954.733,68	9.278.080.958,69

Tabel 326. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Lainnya LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA	Penambahan - LO		Pengurangi - LO		Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Penambahan Piutang Tahun 2025	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	Penerimaan Piutang Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	157.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.450.000,00
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	142.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.816.000,00
3	Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya	70.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.816.000,00
4	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
5	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	14.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634.000,00
6	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	14.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634.000,00
7	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.219.821.044,00	10.424.400,00	1.782.636.583,23	0,00	164.758.250,00	3.848.123.777,23
8	Hasil Sewa BMD	2.211.571.044,00	10.424.400,00	1.597.340.749,90	0,00	156.508.250,00	3.662.827.943,90
9	Hasil Sewa BMD	2.211.571.044,00	10.424.400,00	1.597.340.749,90	0,00	156.508.250,00	3.662.827.943,90
10	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	8.250.000,00	0,00	185.295.833,33	0,00	8.250.000,00	185.295.833,33
11	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	8.250.000,00	0,00	185.295.833,33	0,00	8.250.000,00	185.295.833,33
12	Jasa Giro	2.778.944.085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778.944.085,89
13	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.611.190.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.190.851,45
14	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.611.190.851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.190.851,45
15	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	165.875.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165.875.794,96
16	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	165.875.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165.875.794,96
17	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	1.201.920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.920,27
18	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	1.201.920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.920,27
19	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	675.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	675.519,21
20	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	675.519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	675.519,21

b

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA	Penambahan - LO		Pengurangi - LO		Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Penambahan Piutang Tahun 2025	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	Penerimaan Piutang Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Pendapatan Bunga	1.290.289.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.289.923,19
22	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.290.289.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.289.923,19
23	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.290.289.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.289.923,19
24	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.472.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.675,00
25	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.472.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.675,00
26	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	4.472.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.675,00
27	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	399.785.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	399.785.362,86
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	399.785.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	399.785.362,86
29	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	399.785.362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	399.785.362,86
30	Pendapatan Denda Pajak Daerah	197.746.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.746.903,00
31	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.747.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.523,00
32	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.744.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.523,00
33	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
34	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	489.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.233,00
35	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	489.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.233,00
36	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
37	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
38	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	187.405.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.405.689,00
39	Pendapatan Denda PBBP2	187.405.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.405.689,00

6

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA	Penambahan - LO		Pengurangi - LO		Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Penambahan Piutang Tahun 2025	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	Penerimaan Piutang Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
41	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
42	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7.769.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769.158,00
43	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	630.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.575,00
44	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	6.754.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754.764,00
45	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	142.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.692,00
46	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	136.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.455,00
47	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	75.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.922,00
48	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
49	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
50	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51	Pendapatan dari Pengembalian	9.824.164.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824.164.874,90
52	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413.000,00
53	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413.000,00
54	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	4.616.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616.682,00
55	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.400,00
56	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-	3.498.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.282,00

6

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA	Penambahan - LO		Pengurangi - LO		Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Penambahan Piutang Tahun 2025	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	Penerimaan Piutang Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perjalanan Dinas Dalam Kota						
57	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	524.187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.187.900,00
58	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	524.187.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.187.900,00
59	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	23.106.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106.337,00
60	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	23.106.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106.337,00
61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.955.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955.878,88
62	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	15.955.878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.955.878,88
63	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	8.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988.000,00
64	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi	8.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988.000,00
65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
67	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.856.629.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856.629.127,02

6

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA	Penambahan - LO		Pengurangi - LO		Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Penambahan Piutang Tahun 2025	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	Penerimaan Piutang Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.856.629.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856.629.127,02
69	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	244.148.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.148.950,00
70	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	244.148.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.148.950,00
71	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	106.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.771.000,00
72	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	85.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.346.000,00
73	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	21.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.425.000,00
74	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	9.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598.000,00
75	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	9.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598.000,00
76	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.020.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.750.000,00
77	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.020.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.750.000,00
78	Pendapatan BLUD	2.437.844.565,34	2.000.000,00	110.443.633,33	2.000.000,00	267.833.333,00	2.280.454.865,67
79	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.606.094.644,00	2.000.000,00	110.443.633,33	2.000.000,00	267.833.333,00	1.448.704.944,33
80	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.606.094.644,00	2.000.000,00	110.443.633,33	2.000.000,00	267.833.333,00	1.448.704.944,33

6

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah LRA	Penambahan - LO		Pengurangi - LO		Total Lain-lain PAD yang Sah - LO
			Penambahan Piutang Tahun 2025	Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	Penerimaan Piutang Tahun 2024	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	831.749.921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	831.749.921,34
82	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	821.991.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	821.991.666,34
83	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	9.758.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758.255,00
84	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.879.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.800,00
85	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	1.879.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.800,00
86	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	1.879.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.800,00
87	Penerimaan Lain-lain	4.642.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.465,94
88	Penerimaan Lain-lain	4.642.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.465,94
89	Penerimaan Lain-lain	4.642.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.465,94
	Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah	19.317.041.700,12	12.424.400,00	1.893.080.216,56	2.000.000,00	432.591.583,00	20.787.954.733,68

6

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya.
- Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.398.423.058.958,00	1.459.540.433.757,00

Tabel 327. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	4	3
1	Bagi hasil pajak	63.913.134.600,00	52.203.951.462,00
2	Bagi hasil SDA	33.225.485.000,00	28.173.199.550,00
3	Dana Alokasi Umum	960.719.475.165,00	979.563.765.934,00
4	Dana Alokasi Khusus	340.564.964.193,00	399.599.516.811,00
	Jumlah	1.398.423.058.958,00	1.459.540.433.757,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak-LO	63.913.134.600,00	52.203.951.462,00

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp63.913.134.600,00 dan Rp52.203.951.462,00 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 328. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Bagi hasil pajak	63.913.134.600,00	52.203.951.462,00
	Jumlah	63.913.134.600,00	52.203.951.462,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b) Pendapatan Transfer		
Pemerintah Pusat-Dana Bagi	33.225.485.000,00	28.173.199.550,00
Hasil Sumber Daya Alam-LO		

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp33.225.485.000,00 dan Rp28.173.199.550,00 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 329. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Bagi hasil SDA	33.225.485.000,00	28.173.199.550,00
	Jumlah	33.225.485.000,00	28.173.199.550,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
c) Pendapatan Transfer		
Pemerintah Pusat-Dana	960.719.475.165,00	979.563.765.934,00
Alokasi Umum-LO		

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp960.719.475.165,00 dan Rp979.563.765.934,00 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 330. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	960.719.475.165,00	979.563.765.934,00
	Jumlah	960.719.475.165,00	979.563.765.934,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
d) Pendapatan Transfer		
Pemerintah Pusat-Dana	340.564.964.193,00	399.599.516.811,00
Alokasi Khusus-LO		

Pendapatan Transfer Dana Alokasi Umum-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp340.564.964.193,00 dan Rp399.599.516.811,00 dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel 331. Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Dana Alokasi Khusus LO
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus	340.564.964.193,00	399.599.516.811,00
Jumlah		340.564.964.193,00	399.599.516.811,00

Tabel 332. Hubungan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	Pengurangan- LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan LO
			Pencairan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024 ke RKUD	
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Dana Perimbangan	1.398.804.306.958,00	381.248.000,00	1.398.423.058.958,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	97.519.867.600,00	381.248.000,00	97.138.619.600,00
3	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.206.905.800,00	0,00	10.206.905.800,00
4	DBH PPh Pasal 21	15.617.585.200,00	0,00	15.617.585.200,00
5	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.179.083.600,00	0,00	2.179.083.600,00
6	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.909.560.000,00	0,00	35.909.560.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	26.008.297.000,00	0,00	26.008.297.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	4.151.521.000,00	141.241.000,00	4.010.280.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	14.501.000,00	1.708.000,00	12.793.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.428.000,00	810.000,00	2.618.000,00
11	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.149.403.000,00	237.488.000,00	1.911.915.000,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	298.473.000,00	1.000,00	298.472.000,00
13	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	981.110.000,00	0,00	981.110.000,00
14	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	960.719.475.165,00	0,00	960.719.475.165,00
15	DAU	835.724.195.927,00	0,00	835.724.195.927,00
16	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00
17	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14.873.826.238,00	0,00	14.873.826.238,00
18	DAU yang Ditentukan Pergunaannya Bidang Pendidikan	62.428.437.000,00	0,00	62.428.437.000,00
19	DAU yang Ditentukan Pergunaannya Bidang Kesehatan	46.293.016.000,00	0,00	46.293.016.000,00
20	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	13.621.572.268,00	0,00	13.621.572.268,00

No.	Nama Akun Pendapatan - LRA	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA	Pengurangan-LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan LO
			Pencairan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2024 ke RKUD	
1	2	3	4	5=(3-4)
21	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	564.359.520,00	0,00	564.359.520,00
22	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	215.774.001,00	0,00	215.774.001,00
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	5.979.141.816,00	0,00	5.979.141.816,00
24	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	1.033.726.700,00	0,00	1.033.726.700,00
25	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	2.134.900.000,00	0,00	2.134.900.000,00
26	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	3.693.670.231,00	0,00	3.693.670.231,00
27	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	326.943.391.925,00	0,00	326.943.391.925,00
28	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	691.528.540,00	0,00	691.528.540,00
29	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	99.216.762.123,00	0,00	99.216.762.123,00
30	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4.160.750.000,00	0,00	4.160.750.000,00
31	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	20.718.066.092,00	0,00	20.718.066.092,00
32	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	690.000.000,00	0,00	690.000.000,00
33	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.219.534.750,00	0,00	5.219.534.750,00
34	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00
35	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.478.895.158,00	0,00	12.478.895.158,00
36	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	209.748.000,00	0,00	209.748.000,00
37	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.296.765.979,00	0,00	14.296.765.979,00
38	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	158.224.799.300,00	0,00	158.224.799.300,00
39	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	114.000.000,00	0,00	114.000.000,00
40	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	10.159.461.983,00	0,00	10.159.461.983,00
41	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	538.080.000,00	0,00	538.080.000,00
	Jumlah	1.398.804.306.958,00	381.248.000,00	1.398.423.058.958,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	28.673.188.000,00	23.022.995.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan Insentif Fiskal.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bahwa Dana Desa (DD) merupakan dana yang dialokasikan melalui APBN kepada Pemerintahan Desa, yang penyalurannya melalui rekening kas desa (RKD). Dengan demikian Dana Desa bagi pemerintah daerah bukan merupakan pendapatan, karena Dana Desa yang diterima merupakan hak Pemerintah Desa, sehingga di dalam Laporan Operasional Dana Desa tidak diakui sebagai pendapatan LO karena penyalurannya langsung ke RKD (rekening kas desa) tanpa melalui rekening kas umum daerah (RKUD).

Tabel 333. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Dana Desa	0,00	0,00
2	Insentif Fiskal	28.673.188.000,00	23.022.995.000,00
Jumlah		28.673.188.000,00	23.022.995.000,00

Tabel 334. Hubungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	Pengurangan- LO Penyaluran Dana Desa (DD) langsung ke RKD (Rekening Kas Desa) tanpa melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO
1	2	3	4	5 =(3-4)
1	Dana Desa	191.486.714.934,00	191.486.714.934,00	0,00
2	Dana Desa	191.486.714.934,00	191.486.714.934,00	0,00
3	Dana Desa	191.486.714.934,00	191.486.714.934,00	0,00
4	Insentif Fiskal	28.673.188.000,00	0,00	28.673.188.000,00
5	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.999.212.000,00	0,00	22.999.212.000,00
6	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	22.999.212.000,00	0,00	22.999.212.000,00
7	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	5.673.976.000,00	0,00	5.673.976.000,00
8	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	5.673.976.000,00	0,00	5.673.976.000,00
Jumlah		220.159.902.934,00	191.486.714.934,00	28.673.188.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	125.597.701.885,00	177.242.842.600,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi meliputi pendapatan bagi hasil pajak provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil pajak air tanah, dan bagi hasil pajak rokok serta pendapatan bagi hasil berupa bantuan keuangan.

Tabel 335. Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	125.597.701.885,00	177.242.842.600,00
2	Pendapatan Bagi Hasil	113.959.707.000,00	169.600.395.100,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.605.283.700,00	44.144.659.900,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.208.781.200,00	18.498.225.600,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.851.288.400,00	46.597.613.100,00
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	653.491.400,00	565.566.700,00
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	61.640.862.300,00	59.794.329.800,00
8	Bantuan Keuangan	11.637.994.885,00	7.642.447.500,00
9	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.637.994.885,00	7.642.447.500,00
10	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.637.994.885,00	7.642.447.500,00
	Jumlah	125.597.701.885,00	177.242.842.600,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Bagi Hasil-LO	113.959.707.000,00	169.600.395.100,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi bagi hasil pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp113.959.707.000,00 dan Rp169.600.395.100,00 dengan rincian berikut:

Tabel 336. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.605.283.700,00	44.144.659.900,00

No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.208.781.200,00	18.498.225.600,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.851.288.400,00	46.597.613.100,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	653.491.400,00	565.566.700,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	61.640.862.300,00	59.794.329.800,00
	Jumlah	113.959.707.000,00	169.600.395.100,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Bantuan Keuangan-LO	11.637.994.885,00	7.642.447.500,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

**Tabel 337. Pendapatan Transfer Antar Daerah Bantuan Keuangan-LO
Tahun 2025 dan 2024**

Dalam Rupiah			
No.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.637.994.885,00	7.642.447.500,00
	Jumlah	11.637.994.885,00	7.642.447.500,00

Tabel 338. Hubungan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah				
No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LRA	Pengurangan - LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LO
			Utang belanja Tahun 2025 (pengembalian sisa pendapatan bantuan keuangan propinsi)	
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Bagi Hasil	113.959.707.000,00	0,00	113.959.707.000,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	113.959.707.000,00	0,00	113.959.707.000,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.605.283.700,00	0,00	4.605.283.700,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.208.781.200,00	0,00	2.208.781.200,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.851.288.400,00	0,00	44.851.288.400,00
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	653.491.400,00	0,00	653.491.400,00
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	61.640.862.300,00	0,00	61.640.862.300,00
8	Bantuan Keuangan	12.900.254.000,00	1.262.259.115,00	11.637.994.885,00
9	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.900.254.000,00	1.262.259.115,00	11.637.994.885,00

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LRA	Pengurangan - LO	Total Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi LO
			Utang belanja Tahun 2025 (pengembalian sisa pendapatan bantuan keuangan propinsi)	
1	2	3	4	5
10	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	12.900.254.000,00	1.262.259.115,00	11.637.994.885,00
	Jumlah	126.859.961.000,00	1.262.259.115,00	125.597.701.885,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, diantaranya adalah pendapatan hibah uang dan/atau barang baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau dari pihak lainnya serta pendapatan lainnya seperti bantuan keuangan.

Tabel 339. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	3
I	Pendapatan Hibah	175.782.018.210,98	116.155.556.626,96
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	154.100.215.106,98	108.659.183.380,46
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	248.229.750,00	15.601.800,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	9.401.990.400,00	673.456.000,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	11.518.013.710,00	871.667.987,50
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	513.569.244,00	5.935.647.459,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00
7	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
II	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.920.333,24	241.303.833,84
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	12.000.000,00	0,00
2	Lain-lain Pendapatan	88.920.333,24	241.303.833,84
	Jumlah	175.882.938.544,22	116.396.860.460,80

Tabel 340. Hubungan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Pendapatan - LO	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA	Penambahan- LO						Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO
			Pendapatan hibah dari pemerintah pusat	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	Pendapatan hibah dari badan/ lembaga/ organisasi dalam negeri	Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan	Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	Pengurangan penyisihan piutang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (3+4+5+6+7+8+9)
1	Pendapatan Hibah	513.569.244,00	154.100.215.106,98	248.229.750,00	4.554.944.300,00	9.401.990.400,00	6.963.069.410,00	0,00	175.782.018.210,98
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	154.100.215.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.100.215.106,98
3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	248.229.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.229.750,00
4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	9.401.990.400,00	0,00	0,00	9.401.990.400,00
5	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	4.554.944.300,00	0,00	6.963.069.410,00	0,00	11.518.013.710,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	513.569.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.569.244,00
7	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.962.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.957.428,24	100.920.333,24
8	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
9	Pendapatan Lainnya	13.962.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.957.428,24	88.920.333,24
	Jumlah	539.532.149,00	154.100.215.106,98	248.229.750,00	4.554.944.300,00	9.401.990.400,00	6.963.069.410,00	74.957.428,24	175.882.938.544,22

b

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1) Pendapatan Hibah-LO	175.782.018.210,98	116.155.556.626,96

Pendapatan Hibah-LO meliputi pendapatan hibah uang dan hibah barang terinci sebagai berikut:

Tabel 341. Pendapatan Hibah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Pendapatan Hibah	2025	2024
1	PENDAPATAN HIBAH UANG		
1.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	2.238.000.000,00
	- Hibah untuk sanitasi/air limbah setempat	0,00	2.238.000.000,00
1.2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	90.000.000,00	138.150.000,00
	Hibah Uang untuk <i>Sponsorship</i> :		
	- Segoro Topeng Kaliwungu Tahun 2025	90.000.000,00	138.150.000,00
	- Support Kegiatan Sholawat dan Doa Hari Santri		
1.3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	513.569.244,00	0,00
	- Sumbangan dari PG Jatiroto	513.569.244,00	0,00
A.	Jumlah Pendapatan Hibah Uang (1.1. + 1.2. + 1.3.)	603.569.244,00	2.376.150.000,00
2	PENDAPATAN HIBAH BARANG		
2.1	Hibah dari pemerintah pusat	154.100.215.106,98	106.421.183.380,46
	- Hibah Barang Persediaan	32.434.082.691,65	22.607.275.516,92
	- Hibah Aset Tetap	121.666.132.415,33	83.813.907.863,54
2.2	Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	248.229.750,00	15.601.800,00
	- Hibah barang persediaan	248.229.750,00	15.601.800,00
2.3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	9.401.990.400,00	673.456.000,00
	- Hibah Barang Persediaan	9.386.390.400,00	0,00
	- Hibah Aset Tetap	15.600.000,00	673.456.000,00
2.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	4.464.944.300,00	733.517.987,50
	- Hibah Barang Persediaan	320.345.700,00	83.913.000,00
	- Hibah Aset Tetap	4.133.698.600,00	619.604.987,50
	- Hibah Lainnya	0,00	30.000.000,00
	- Hibah Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00
	- Hibah Jasa	5.900.000,00	0,00
2.5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	6.963.069.410,00	5.935.647.459,00
	Hibah Aset	6.963.069.410,00	5.935.647.459,00
B.	Jumlah Pendapatan Hibah Barang (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4.+2.5.)	175.178.448.966,98	113.950.342.626,96
3	Jumlah Pendapatan Hibah LO (A+B)	175.782.018.210,98	116.155.556.626,96

Hibah barang berupa aset tetap, hibah barang persediaan, dan jasa terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 342. Rincian Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	3.658.635,00	22.949.626.801,65	0,00	0,00	22.953.285.436,65		
				18.856.552.667,65				DINKES PPKB Provinsi Jatim	1. Bahan Senilai Rp1.338.441.857,50 2. Obat Senilai Rp17.518.110.810,15
				1.098.431.452,00				BKKBN	1. Bahan lain senilai Rp102.735.612,00 2. Obat senilai Rp995.695.840,00
				2.994.642.682,00				Kemenkes/Kemenhan	1. Bahan lain senilai Rp1.033.125.082,00 2. Obat senilai Rp. 979.966.200,00 3. Cetak senilai Rp1.585.200,00 4. Nattura senilai Rp 979.966.200,00
			3.658.635,00					Kemenkes	Freeze Cold Box FFCB - 20 L 1 Unit senilai Rp3.658.635,00
2	PUSKESMAS PENANGGAL	0,00	8.198.358,00	0,00	0,00	0,00	8.198.358,00		
			1.498.500,00					Perpustakaan Nasional RI	Rak Buku 1 Unit Senilai Rp1.498.500,00
			6.699.858,00					Perpustakaan Nasional RI	Buku 100 Judul/Ekseplar Senilai Rp6.699.858,00
3	PUSKESMAS TEMPEH	0,00	8.198.358,00	0,00	0,00	0,00	8.198.358,00		
			1.498.500,00					Perpustakaan Nasional RI	Rak Buku 1 Unit Senilai Rp1.498.500,00
			6.699.858,00					Perpustakaan Nasional RI	Buku 100 Judul/Ekseplar Senilai Rp6.699.858,00
4	PUSKESMAS YOSOWILANGUN	0,00	8.198.358,00	0,00	0,00	0,00	8.198.358,00		
			1.498.500,00					Perpustakaan Nasional RI	Rak Buku 1 Unit Senilai Rp1.498.500,00
			6.699.858,00					Perpustakaan Nasional RI	Buku 100 Judul/Ekseplar Senilai Rp6.699.858,00
5	PUSKESMAS KLAKAH	0,00	7.969.747,81	0,00	0,00	0,00	7.969.747,81		
			1.299.999,81					Perpustakaan Nasional RI	Rak Buku 1 Unit Senilai Rp1.299.999,81
			6.669.748,00					Perpustakaan Nasional RI	Buku 100 Judul/Ekseplar Senilai Rp6.669.748,00

b

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
6	PUSKESMAS TEKUNG	0,00	7.969.747,81	0,00	0,00	0,00	7.969.747,81		
			1.299.999,81					Perpustakaan Nasional RI	Rak Buku 1 Unit Senilai Rp1.299.999,81
			6.669.748,00					Perpustakaan Nasional RI	Buku 100 Judul/Ekseplar Senilai Rp6.669.748,00
7	RSUD dr. HARYOTO	0,00	0,00	98.850.000,00	0,00	0,00	98.850.000,00		
				98.850.000,00				Kemenkes	PKMK Transvita 1.500 Kotak Senilai Rp98.850.000,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0,00	37.905.962.867,20	537.656.250,00	0,00	0,00	38.443.619.117,20		
				537.656.250,00				Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov. Jatim	Aspal 250 Drum senilai Rp537.656.250,00
			37.905.962.867,20						
9	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	0,00	754.774.999,00	3.182.395.345,00	0,00	0,00	3.937.170.344,00		
				3.182.395.345,00				BPBD Provinsi Jatim	Bantuan Logistik dari Pemerintah Pusat senilai sesuai dalam lampiran Dokumen Persediaan Tahun 2025
			754.774.999,00					1. BNPB 2. BNPB 3. BPBD Propinsi Jatim 4. BPBD Propinsi Jatim 5. BPBD Propinsi Jatim 6. BPBD Propinsi Jatim	1. Mobil Pick Up Senilai Rp377.304.500,00 2. Mobil Dapur Umum Lapangan Senilai Rp319.899.999,00 3. Sprayer 9 Unit @ Rp810.300,00; = Rp7.292.700,00 4. Chain saw 1unit Rp14.763.000,00 5. Helm rescue 10 Unit @ Rp1.851.480,00 = Rp18.514.800,00 6. Tenda keluarga 1 Unit Rp17.000.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	0,00	4.891.722.295,00	0,00	0,00	4.891.722.295,00		
				4.833.857.418,00				Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	Obat vaksin untuk hewan senilai Rp4.833.857.418,00
				57.864.877,00				Kementerian Pertanian	Obat untuk hewan senilai Rp57.864.877,00

6

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	0,00	0,00	773.832.000,00	0,00	0,00	773.832.000,00		
				773.832.000,00				Ditjen Dukcapil Kemendagri	Blanko KTP-EL 10.000 senilai Rp773.832.000,00
12	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	0,00	82.961.201.344,51	0,00	0,00	0,00	82.961.201.344,51		
			2.442.983.191,72					Kementrian Pekerjaan Umum	Sesuai dengan BA Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2025
			80.518.218.152,79					Kementrian Pekerjaan Umum	Sesuai dengan BA Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2025
		0,00	121.666.132.415,33	32.434.082.691,65	0,00	0,00	154.100.215.106,98		

6

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp248.229.750,00 meliputi hibah barang berupa persediaan, terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 343. Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
1	DINKES P2KB			17.071.750,00			17.071.750,00		
				6.850.000,00				Dinkes Kab. Probolinggo	Bahan lain senilai Rp6.850.000,00
				1.581.750,00				Dinkes Kab. Malang	Obat senilai Rp1.581.750,00
				8.640.000,00				Dinkes Kota Malang	Obat senilai Rp8.640.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			231.158.000,00			231.158.000,00		
				231.158.000,00				1. BPBD Kab. Bondowoso 2. BPBD Kab. Malang	Bantuan Logistik dari Pemerintah Daerah senilai sesuai dalam lampiran Dokumen Persediaan Tahun 2025
				248.229.750,00			248.229.750,00		

6

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri Tahun 2025 sebesar Rp9.401.990.400,00 meliputi hibah barang berupa aset, terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 344. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri–LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		15.600.000,00	9.386.390.400,00			9.401.990.400,00		
				9.386.390.400,00				Kelompok Masyarakat	Bantuan Logistik dari Kelompok Masyarakat senilai sesuai dalam lampiran Dokumen Persediaan Tahun 2025
			15.600.000,00					An. Dzulfikar Ramadhani	Laptop 2 Unit senilai Rp15.600.000,00
			15.600.000,00	9.386.390.400,00			9.401.990.400,00		

6

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2025 sebesar Rp4.464.944.300,00 meliputi hibah barang berupa uang, aset, persediaan, dan lainnya terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 345. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri–LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
1	DINDIKBUD		4.109.932.600,00				4.109.932.600,00		
			4.109.932.600,00				4.109.932.600,00	Komite Sekolah	1. SDN Rowokangkung 06 senilai Rp1.102.768.000,00 2. SDN Dawuhan Wetan 02 senilai Rp17.772.000,00 3. SMPN 1 Ranuyoso senilai Rp181.300.000,00 4. SMPN 2 Tempeh senilai Rp493.834.000,00 5. SMPN 4 Pasirian Satap senilai Rp147.900.000,00 6. SMPN 2 Klakah senilai Rp1.675.158.600,00 7. SMPN 1 Sumbersuko Senilai Rp212.500.000,00 8. SDN Sawaran Kulon 02 senilai Rp15.000.000,00 9. SDN Sumberwuluh 1 senilai Rp130.000.000,00 SDN Sumberwuluh 1 senilai Rp45.000.000,00 10. SDN Tambahrejo 02 senilai Rp50.000.000,00 11. SDN Pagowan 1 senilai Rp28.500.000,00 12. SDN Tambahrejo 01 senilai Rp10.200.000,00
2	DINKES P2KB			80.947.200,00			80.947.200,00		
				80.947.200,00				UNAIR	1. Retinol Pammitate 100K 80 Btl Senilai Rp2.673.040,00 2. Retinol Pammitate 200K 1.400 Btl Senilai Rp78.274.000,00

6

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
3	Puskesmas Candipuro		3.266.000,00	150.000,00			3.416.000,00		
			3.266.000,00					MER-C	1. HT Redell 2022 3 Buah 2. Tandu Lipat One Hert Medical 1 Pcs
				150.000,00				MER-C	Senter 5 Pcs senilai Rp150.000,00
4	RSUD dr. Haryoto			6.967.500,00			6.967.500,00		
				6.967.500,00				Bank Jatim	1. Nasi tumpeng 1 pkt Rp500.000,00 2. Papan Bunga 1 Pcs Rp500.000,00 3. Smart TV Politron 1 Unit Rp1.350.000,00 4. Kulkas Chanhong 1 Unit Rp1.250.000,00 5. Headphone Readmi 1 Unit Rp1.200.000,00 6. Blender Yamakama 8 Unit Rp760.000,00 7. Kompor Portable 8 Unit Rp665.000,00 8. Mug Custem Jatim 45 Pcs Rp742.500,00
5	RSUD Pasirian			95.525.000,00			95.525.000,00		
				85.525.000,00				PT. Hospi niaga Utama	1. Antikusteriquick 1.050 box senilai Rp21525.000,00 2. Enviros Eco Surgical Mask 2.000 Box senilai Rp55.000.000,00 3. Enviros Pro Protective Gown 250 Box senilai Rp9.000.000,00
				10.000.000,00				Bank Jatim	Kaos Senilai Rp10.000.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			4.000.000,00			4.000.000,00		
				4.000.000,00				Bank Jatim	Bingkisan Kelahiran Bayi 20 Bks senilai Rp4.000.000,00

6

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
7	Dinas Perhubungan		7.500.000,00	2.500.000,00			10.000.000,00		
				2.500.000,00				Bank Jatim	Snack 100 Pack Suport Kegaitan Mudik Gratis
			7.500.000,00					Bank Jatim	1. Tenda 2 Set senilai Rp4.900.000,002. Cover Tenda 2 Buah senilai Rp4.900.000,00
8	Dinas Pariwisata	75.000.000,00					75.000.000,00		
		75.000.000,00						Bank Jatim	Sponsorship dana Kegiatan Segoro Topeng Kaliwungu Tahun 2025
9	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat	15.000.000,00		28.200.000,00			43.200.000,00		
		15.000.000,00						Bank Jatim	Support Kegiatan Sholawat dan Doa Hari Santri
				28.200.000,00				Bank Jatim	Sapi 1 Ekor senilai Rp. 28.200.000 Kegiatan Qurban Idul Adha 1446 H
10	Sekretariat DPRD			9.690.000,00			9.690.000,00		
				9.690.000,00				Bank Jatim	Kaos Olahraga 51 Set senilai Rp9.690.000,00
11	Badan Pajak dan Retribusi Daerah		13.000.000,00	68.266.000,00	5.000.000,00		86.266.000,00		
					5.000.000,00			Bank Jatim	Revitalisasi Neon Box

6

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
				68.266.000,00				Bank Jatim	1. Rompi 60 buah Rp9.000.000,00 2. Kartu e-Pasir 2.500 Pcs Rp10.000.000,00 3. Kartu e-Pasir 2.000 Pcs Rp10.000.000,00 4. Kartu e-Pajak MBLB 1.000 Rp5.000.000,00 5. Souvenir keg. TP2DD 50 Pcs Rp3.050.000,00 6. Kartu e-Pajak MBLB 1.000 Rp5.000.000,00 7. Kartu e-Pajak MBLB 2.894 Rp14.470.000,00 8. Kaos 30 Pcs Rp3.000.000,00 9. Konsumsi Snack 48 Pack & Godybag 30 Pack Rp8.246.000,00
			13.000.000,00					Bank Jatim	1. Terpal Tenda 2 Buah senilai Rp2.600.000,00 2. Cover Tenda 8 Buah senilai Rp10.400.000,00
12	Badan Kepegawaian Daerah			24.100.000,00		5.900.000,00	30.000.000,00		
				24.100.000,00				Bank Jatim	1. Kertas Bufalo 90 Rim senilai Rp. 2.250.000,00 2. Cetak Map Logo Garuda 4.300 Bh senilai Rp. 19.350.000,00 3. Kertas HVS F4 50 Rim senilai Rp2.500.000,00
						5.900.000,00		Bank Jatim	1. Sewa Laser Jet 10 Buah senilai Rp1.500.000,00 2. Toner 85A 24 Buah senilai Rp2.400.000,00 3. Tinta Epson 20 buah Rp2.000.000,00
		90.000.000,00	4.133.698.600,00	320.345.700,00	5.000.000,00	5.900.000,00	4.554.944.300,00		

6

Tabel 346. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		6.963.069.410,00				6.963.069.410,00		
			6.963.069.410,00					Sesuai dengan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) terlampir	40 Bidang Tanah, sesuai dengan BA serahterima terlampir
			6.963.069.410,00				6.963.069.410,00		

Tabel 347. Pendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	SKPD	JENIS HIBAH					JUMLAH Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	KETERANGAN	
		UANG	ASET	PERSEDIAAN	PEMELIHARAAN	JASA		YANG MENGHIBAHKAN	RINCIAN
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	513.569.244,00					513.569.244,00		
		236.217.354,00						PG Jatiroto	Sumbangan PAD
		277.351.890,00						PG Jatiroto	Sumbangan PAD
		513.569.244,00					513.569.244,00		

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
2) Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100.920.333,24	241.303.833,84

Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terinci sebagai berikut:

Tabel 348. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No.	Jenis Pendapatan	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		241.303.833,84
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	12.000.000,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	88.920.333,24	241.303.833,84
	Jumlah	100.920.333,24	241.303.833,84

Tabel 349. Pendapatan Lainnya LRA dan LO Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA	Penambahan - LO Pengurangan penyisihan piutang yang diakui sebagai pendapatan lainnya	Pengurangan - LO Penerimaan Piutang Lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun 2024	Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
3	Pendapatan Lainnya				
4	DINKES P2KB- UPT Puskesmas Rogotrunan	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00
5	DINKES P2KB- UPT Puskesmas Labruk Kidul	0,00	140.300,00	0,00	140.300,00
6	DINKES P2KB- UPT Puskesmas PASRUJAMBE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
7	DINKES P2KB- UPT Puskesmas Senduro	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
8	DINKES P2KB- UPT Puskesmas Tunjung	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00
9	DINKES P2KB- UPT RSUD dr. Haryoto	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DINKES P2KB- UPT RSUD Pasirian	0,00	69.024.353,24	0,00	69.024.353,24
11	Badan Pengelola Keuangan Daerah	13.962.905,00	5.625.000,00	0,00	19.587.905,00
	Jumlah	25.962.905,00	74.957.428,24	0,00	100.920.333,24

5.4.2 BEBAN

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Pegawai-LO	817.987.972.550,52	812.797.452.736,24

Beban Pegawai meliputi beban gaji dan tunjangan pegawai, honorarium dan uang lembur. Rincian beban pegawai Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 350. Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Beban Pegawai	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Gaji Pokok PNS	274.546.807.250,00	292.347.589.214,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	93.745.638.987,00	66.128.586.721,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	25.789.472.514,00	27.568.372.993,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8.716.070.702,00	6.203.114.296,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.696.003.950,00	5.190.511.756,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	20.918.704.550,00	21.975.613.800,00
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.682.805.000,00	2.884.295.700,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.415.025.774,00	3.824.655.000,00
9	Beban Tunjangan Beras PNS	13.962.482.915,00	14.971.018.140,00
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.987.099.290,00	4.255.229.414,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.152.422.350,00	2.989.745.785,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	295.722.560,00	183.519.172,00
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.469.046,00	3.952.691,00
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.663.112,00	1.370.285,00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.788.151.255,00	23.682.263.358,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.008.554.778,00	3.338.976.863,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	562.030.775,00	599.710.236,00
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	197.485.540,00	142.318.863,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.686.106.516,00	1.793.899.715,00
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	592.291.131,00	424.401.846,00
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	59.576.176.284,00	63.304.360.844,00
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	189.223.318,00	190.563.230,00
23	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	3.685.222,00
24	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	14.779.299,00
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	492.823,00
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	28.396.793,00
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	72.214.662,00
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	2.153.433,00
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	172.131,00	7.722.273,00

No	Beban Pegawai	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	318.354.669,00
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	24.135.538,00	185.976.204,00
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.746.638,00	351.108.192,00
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.541.331,00	271.678.158,00
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	352.741.802,00
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	105.524.524,00
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	187.057.706,00
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	0,00	1.851.839,00
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	44.581.534,00
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	18.969.548,00
40	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.136.442,00	0,00
41	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	24.822.594,00
42	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan	24.275.325,00	22.760.438,00
43	Beban TPG PNSD	158.224.799.300,00	160.788.279.800,00
44	Beban Tamsil Guru PNSD	302.750.000,00	1.169.250.000,00
45	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	797.376.000,00	0,00
46	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	295.398,00	0,00
47	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	196.310,00	0,00
48	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.700.068,00	0,00
49	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	14.557.397,00	0,00
50	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.272.843,00	0,00
51	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.079.359,00	0,00
52	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	316.117.796,00	0,00
53	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	79.221.215.553,52	71.410.182.252,24
54	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	3.794.394.760,00
55	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	688.613.000,00
56	Beban Uang Representasi DPRD	1.109.535.000,00	1.094.415.000,00
57	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	121.665.600,00	121.277.100,00
58	Beban Tunjangan Beras DPRD	159.396.420,00	158.382.540,00
59	Beban Uang Paket DPRD	95.035.500,00	93.681.000,00
60	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.608.825.750,00	1.586.901.750,00
61	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.650.700,00	127.372.300,00

No	Beban Pegawai	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
62	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00	33.571.125,00
63	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.775.900.000,00	8.658.300.000,00
64	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.440.600.000,00
65	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	154.087.156,00	4.755.155,00
66	Beban Pembulatan Gaji DPRD	19.495,00	20.690,00
67	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.202.000,00	95.998.360,00
68	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.280.852,00	2.248.344,00
69	Beban Jaminan Kematian DPRD	6.842.556,00	6.745.032,00
70	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	8.315.808.150,00	8.169.739.900,00
71	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	7.027.200.000,00	6.988.800.000,00
72	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.575.000,00	473.865.000,00
73	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	0,00
74	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.544.000,00	0,00
75	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	0,00
76	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00	0,00
77	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.820.204,00	0,00
78	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	760,00	0,00
79	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.097.520,00	0,00
80	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	0,00
81	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	0,00
82	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	8.206.436,00
83	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	47.415.613,00
84	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	1.052.039,00
85	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.782.203,00	21.002.814,00
86	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	180.599.023,00
87	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	4.220.246,00
88	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.495.494,00	5.891.520,00
89	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.152.335,00	197.561.067,00
90	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.451.791,00	143.508.167,00
91	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	203.970.453,00	263.290.876,00
92	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	196.334.695,00	38.010.192,00
93	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	360.360.000,00
94	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00
	Jumlah	817.987.972.550,52	812.797.452.736,24

Hubungan Beban Pegawai pada laporan operasional dengan belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 351. Hubungan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pegawai LRA	Penambahan - LO		Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	Total Beban Pegawai - LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	Belanja BLUD		
1	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7
1	Belanja Pegawai	736.541.961.022,00	15.194.963.620,52	85.603.384.776,00	19.352.336.868,00	817.987.972.550,52
2	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	485.040.652.054,00	607.706.043,00	2.232.392.470,00	132.742.572,00	487.748.007.995,00
3	Belanja Gaji Pokok ASN	368.272.629.724,00	43.336.222,00	0,00	23.519.709,00	368.292.446.237,00
4	Belanja Gaji Pokok PNS	274.552.485.706,00	17.841.253,00	0,00	23.519.709,00	274.546.807.250,00
5	Belanja Gaji Pokok PPPK	93.720.144.018,00	25.494.969,00	0,00	0,00	93.745.638.987,00
6	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	34.504.565.350,00	3.865.414,00	0,00	2.887.548,00	34.505.543.216,00
7	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	25.790.859.488,00	1.500.574,00	0,00	2.887.548,00	25.789.472.514,00
8	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.713.705.862,00	2.364.840,00	0,00	0,00	8.716.070.702,00
9	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.686.203.950,00	9.800.000,00	0,00	0,00	4.696.003.950,00
10	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.686.203.950,00	9.800.000,00	0,00	0,00	4.696.003.950,00
11	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.917.982.460,00	6.915.000,00	0,00	6.192.910,00	20.918.704.550,00
12	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.917.982.460,00	6.915.000,00	0,00	6.192.910,00	20.918.704.550,00
13	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.097.290.774,00	540.000,00	0,00	0,00	8.097.830.774,00
14	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.682.265.000,00	540.000,00	0,00	0,00	2.682.805.000,00
15	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.415.025.774,00	0,00	0,00	0,00	5.415.025.774,00
16	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.949.944.305,00	72.420,00	0,00	434.520,00	19.949.582.205,00
17	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.962.845.015,00	72.420,00	0,00	434.520,00	13.962.482.915,00
18	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.987.099.290,00	0,00	0,00	0,00	5.987.099.290,00
19	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.447.972.182,00	478.736,00	0,00	306.008,00	2.448.144.910,00
20	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.152.249.622,00	478.736,00	0,00	306.008,00	2.152.422.350,00
21	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	295.722.560,00	0,00	0,00	0,00	295.722.560,00
22	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.130.528,00	3.208,00	0,00	1.578,00	5.132.158,00
23	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.468.170,00	2.454,00	0,00	1.578,00	3.469.046,00
24	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.662.358,00	754,00	0,00	0,00	1.663.112,00
25	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.121.209.160,00	542.278.886,00	2.232.392.470,00	99.174.483,00	25.796.706.033,00

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pegawai LRA	Penambahan - LO		Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	Total Beban Pegawai - LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	Belanja BLUD		
1	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7
26	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.733.446.292,00	472.205.625,00	1.654.017.453,00	71.518.115,00	19.788.151.255,00
27	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.387.762.868,00	70.073.261,00	578.375.017,00	27.656.368,00	6.008.554.778,00
28	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	759.468.725,00	104.038,00	0,00	56.448,00	759.516.315,00
29	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	562.044.395,00	42.828,00	0,00	56.448,00	562.030.775,00
30	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	197.424.330,00	61.210,00	0,00	0,00	197.485.540,00
31	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.278.254.896,00	312.119,00	0,00	169.368,00	2.278.397.647,00
32	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.686.147.395,00	128.489,00	0,00	169.368,00	1.686.106.516,00
33	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	592.107.501,00	183.630,00	0,00	0,00	592.291.131,00
34	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	219.976.111.444,00	4.194.233.172,00	133.622.917,00	5.178.910.551,00	219.125.056.982,00
35	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	59.792.186.935,00	4.180.844.831,00	121.346.917,00	4.518.202.399,00	59.576.176.284,00
36	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	59.792.186.935,00	4.180.844.831,00	121.346.917,00	4.518.202.399,00	59.576.176.284,00
37	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	189.446.636,00	13.388.341,00	0,00	13.611.659,00	189.223.318,00
38	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	189.446.636,00	13.388.341,00	0,00	13.611.659,00	189.223.318,00
39	Belanja Insentif bagi ASN	159.994.477.873,00	0,00	12.276.000,00	647.096.493,00	159.359.657.380,00
40	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	13.993.807,00	0,00	0,00	13.993.807,00	0,00
41	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	3.977.631,00	0,00	0,00	3.805.500,00	172.131,00
42	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	156.883.696,00	0,00	0,00	156.883.696,00	0,00
43	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	84.942.280,00	0,00	0,00	60.806.742,00	24.135.538,00
44	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	176.771.117,00	0,00	0,00	173.024.479,00	3.746.638,00
45	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	183.413.401,00	0,00	0,00	179.872.070,00	3.541.331,00
46	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	1.851.839,00	0,00	0,00	1.851.839,00	0,00
47	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	32.035.766,00	0,00	0,00	32.035.766,00	0,00

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pegawai LRA	Penambahan - LO		Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	Total Beban Pegawai - LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	Belanja BLUD		
1	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7
48	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.136.442,00	0,00	0,00	0,00	3.136.442,00
49	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	24.822.594,00	0,00	0,00	24.822.594,00	0,00
50	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	158.224.799.300,00	0,00	0,00	0,00	158.224.799.300,00
51	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	302.750.000,00	0,00	0,00	0,00	302.750.000,00
52	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	785.100.000,00	0,00	12.276.000,00	0,00	797.376.000,00
53	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	10.393.024.405,52	83.237.369.389,00	14.040.683.745,00	79.589.710.049,52
54	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	28.101.375,00	0,00	0,00	28.101.375,00
55	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	295.398,00	0,00	0,00	295.398,00
56	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	196.310,00	0,00	0,00	196.310,00
57	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	3.700.068,00	0,00	0,00	3.700.068,00
58	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	14.557.397,00	0,00	0,00	14.557.397,00
59	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	4.272.843,00	0,00	0,00	4.272.843,00
60	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	5.079.359,00	0,00	0,00	5.079.359,00
61	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	51.198.955,00	332.520.575,00	43.326.409,00	340.393.121,00
62	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	26.923.630,00	332.520.575,00	43.326.409,00	316.117.796,00
63	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	24.275.325,00	0,00	0,00	24.275.325,00
64	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	10.313.724.075,52	82.904.848.814,00	13.997.357.336,00	79.221.215.553,52
65	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	10.313.724.075,52	82.904.848.814,00	13.997.357.336,00	79.221.215.553,52
66	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.854.799.429,00	0,00	0,00	0,00	29.854.799.429,00
67	Belanja Uang Representasi DPRD	1.109.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.535.000,00
68	Belanja Uang Representasi DPRD	1.109.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.535.000,00
69	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.665.600,00	0,00	0,00	0,00	121.665.600,00
70	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.665.600,00	0,00	0,00	0,00	121.665.600,00

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pegawai LRA	Penambahan - LO		Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	Total Beban Pegawai - LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	Belanja BLUD		
1	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7
71	Belanja Tunjangan Beras DPRD	159.396.420,00	0,00	0,00	0,00	159.396.420,00
72	Belanja Tunjangan Beras DPRD	159.396.420,00	0,00	0,00	0,00	159.396.420,00
73	Belanja Uang Paket DPRD	95.035.500,00	0,00	0,00	0,00	95.035.500,00
74	Belanja Uang Paket DPRD	95.035.500,00	0,00	0,00	0,00	95.035.500,00
75	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.608.825.750,00	0,00	0,00	0,00	1.608.825.750,00
76	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.608.825.750,00	0,00	0,00	0,00	1.608.825.750,00
77	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.650.700,00	0,00	0,00	0,00	153.650.700,00
78	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.650.700,00	0,00	0,00	0,00	153.650.700,00
79	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00	0,00	0,00	0,00	28.775.250,00
80	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00	0,00	0,00	0,00	28.775.250,00
81	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.775.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.775.900.000,00
82	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.775.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.775.900.000,00
83	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000.000,00
84	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205.000.000,00
85	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	154.087.156,00	0,00	0,00	0,00	154.087.156,00
86	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	154.087.156,00	0,00	0,00	0,00	154.087.156,00
87	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	19.495,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00
88	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	19.495,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00
89	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.414.133.558,00	0,00	0,00	0,00	8.414.133.558,00
90	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.202.000,00	0,00	0,00	0,00	89.202.000,00
91	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.280.852,00	0,00	0,00	0,00	2.280.852,00
92	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.842.556,00	0,00	0,00	0,00	6.842.556,00
93	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	8.315.808.150,00	0,00	0,00	0,00	8.315.808.150,00
94	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.027.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.027.200.000,00
95	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.027.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.027.200.000,00
96	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pegawai LRA	Penambahan - LO		Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	Total Beban Pegawai - LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	Belanja BLUD		
1	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7
97	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
98	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	677.278.095,00	0,00	0,00	0,00	677.278.095,00
99	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00
100	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00
101	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.544.000,00	0,00	0,00	0,00	5.544.000,00
102	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.544.000,00	0,00	0,00	0,00	5.544.000,00
103	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	0,00	0,00	0,00	84.240.000,00
104	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	84.240.000,00	0,00	0,00	0,00	84.240.000,00
105	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00	0,00	0,00	0,00	5.214.240,00
106	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00	0,00	0,00	0,00	5.214.240,00
107	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.820.204,00	0,00	0,00	0,00	1.820.204,00
108	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.820.204,00	0,00	0,00	0,00	1.820.204,00
109	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
110	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
111	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.097.520,00	0,00	0,00	0,00	4.097.520,00
112	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.097.520,00	0,00	0,00	0,00	4.097.520,00
113	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
114	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
115	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
116	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
117	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	529.186.971,00	0,00	0,00	0,00	529.186.971,00
118	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	6.782.203,00	0,00	0,00	0,00	6.782.203,00
119	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.495.494,00	0,00	0,00	0,00	8.495.494,00
120	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.152.335,00	0,00	0,00	0,00	33.152.335,00
121	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.451.791,00	0,00	0,00	0,00	80.451.791,00

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pegawai LRA	Penambahan - LO		Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2024	Total Beban Pegawai - LO
			Utang Belanja Pegawai Tahun 2025	Belanja BLUD		
1	3	4	5	6	7	8 = 4+5+6-7
122	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	203.970.453,00	0,00	0,00	0,00	203.970.453,00
123	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	196.334.695,00	0,00	0,00	0,00	196.334.695,00
124	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	0,00	0,00	0,00	993.120.000,00
125	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	0,00	0,00	0,00	393.120.000,00
126	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	0,00	0,00	0,00	393.120.000,00
127	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
128	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
	Jumlah	736.541.961.022,00	15.194.963.620,52	85.603.384.776,00	19.352.336.868,00	817.987.972.550,52

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b. Beban Persediaan	216.416.854.048,83	199.624.163.322,31

Beban Persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/ dikonsumsi selama Tahun 2025 dan 2024, terinci sebagai berikut:

Tabel 352. Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
NO	Beban Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.285.050.319,04	2.973.668.379,17
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.566.163.474,86	2.514.937.078,97
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.649.749.616,00	7.938.727.593,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	182.896.123,00	264.314.452,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	48.666.870,00	54.826.400,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	78.864.028,00	91.983.400,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	3.082.574.163,71	2.971.915.930,19
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	81.137.350,00	131.269.200,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	49.195.686.533,52	21.629.321.834,39
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.697.600,00	50.262.429,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	185.236.682,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	34.150.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.554.937.616,22	11.651.119.096,57
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.487.795.039,09	4.268.347.617,52
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	17.745.504.790,12	19.986.503.093,97
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	324.472.500,00	338.701.299,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	463.000,00	2.205.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	452.657.387,00	316.726.074,25
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.082.628.612,66	2.118.385.460,61
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	168.476.960,00	42.931.000,00
21	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	555.000.000,00
22	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	290.100.500,00	269.850.000,00
23	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	13.300.930,00	183.721.500,00
24	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	158.600.500,00	172.700.000,00
25	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	216.336.600,00	402.117.000,00
26	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	149.485.100,00	145.000.000,00
27	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.400.000,00	3.300.000,00
28	Beban Pakaian Adat Daerah	250.849.996,00	89.050.000,00
29	Beban Pakaian Batik Tradisional	36.647.500,00	339.276.680,00
30	Beban Pakaian Olahraga	164.784.201,00	348.256.500,00

6

NO	Beban Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
31	Beban Pakaian Paskibraka	348.986.745,00	251.772.000,00
32	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.070.346.355,00	1.119.584.370,00
33	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	141.128.626,00	156.289.075,00
34	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	72.224.707,00	134.869.270,00
35	Beban Obat-Obatan-Obat	51.003.972.060,97	42.412.518.660,22
36	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	404.214.749,05	746.103.006,31
37	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.595.755.248,61	41.093.981.356,45
38	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	319.587.000,00	58.327.000,00
39	Beban Natura dan Pakan-Natura	8.591.296.564,78	8.155.497.308,39
40	Beban Natura dan Pakan-Pakan	128.986.398,00	193.567.500,00
41	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	802.511.786,20	1.065.241.312,30
42	Belanja Barang Sampel Pangan	3.529.750,00	0,00
43	Beban Makanan dan Minuman Rapat	19.939.428.997,00	16.414.684.201,00
44	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.252.716.180,00	1.671.992.510,00
45	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	145.095.771,00	156.664.400,00
46	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.849.158.000,00	2.516.733.000,00
47	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.399.777.000,00	1.334.922.152,00
48	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	201.780.000,00	135.525.000,00
49	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.847.430.800,00	1.922.486.000,00
50	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	9.601.500,00
Jumlah		216.416.854.048,83	199.624.163.322,31

Tabel 353. Hubungan Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	Nama Akun Persediaan	Persediaan Awal	Koreksi Tahun Lalu Persediaan	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Persediaan LRA	Penambahan - LO				
						Utang Belanja persediaan thn 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Menerima Hibah Persediaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bahan Pakai Habis	61.798.763.925,46	6.907.121,00	Belanja Barang Pakai Habis	95.000.622.824,13	4.450.058.138,00	31.014.359.592,00	62.497.998.660,60	5.803.031.950,00	42.389.048.541,65
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	572.454.018,87	0,00	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	359.892.317,00	0,00	1.616.783.485,00	5.439.000,00	0,00	537.656.250,00
2	Bahan Kimia	1.245.074.479,96	0,00	Belanja Bahan-Bahan Kimia	489.882.310,00	0,00	0,00	2.380.139.707,00	0,00	0,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.717.823.244,00	750.000,00	2.250.000,00	924.119.331,00	91.237.000,00	0,00
4	Bahan Baku	6.960.500,00	0,00	Belanja Bahan-Bahan Baku	105.675.750,00	0,00	70.356.873,00	0,00	0,00	0,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	81.200,00	0,00	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	46.963.270,00	0,00	1.622.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	2.700.000,00	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	55.638.028,00	0,00	0,00	23.226.000,00	0,00	0,00
7	Isi Tabung Gas	148.255.568,83	3.007.121,00	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	612.243.290,00	421.796.266,00	0,00	2.028.710.534,00	0,00	0,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	183.600.000,00	0,00	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	82.998.750,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Bahan Lainnya	22.881.939.960,24	0,00	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.423.538.068,00	2.889.436.243,00	2.939.356.651,00	28.944.322.213,00	0,00	2.566.827.551,50
10	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Suku Cadang Alat Laboratorium	12.890.000,00	0,00	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Tulis Kantor	3.956.229.889,82	1.200.000,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.073.006.106,00	0,00	6.479.869.842,00	877.487.265,00	0,00	0,00
13	Kertas dan Cover	1.157.418.379,88	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	837.572.484,00	0,00	2.829.388.956,00	863.360.093,00	0,00	4.750.000,00
14	Bahan Cetak	2.960.547.104,29	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.697.117.520,00	9.255.000,00	10.495.746.270,00	2.735.607.670,60	26.356.250,00	794.767.200,00
15	Benda Pos	21.097.000,00	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	95.015.000,00	0,00	162.795.000,00	61.640.000,00	0,00	0,00
16	Bahan Komputer	0,00	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	739.260,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Perabot Kantor	38.545.380,00	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	208.531.280,00	0,00	75.462.500,00	194.475.506,00	0,00	0,00
18	Alat Listrik	655.198.817,43	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.022.767.134,00	0,00	1.214.864.700,00	448.487.342,00	0,00	0,00
19	Perlengkapan Dinas	69.980.000,00	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	98.496.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		0,00	0,00	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	290.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0,00	0,00	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	13.300.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	158.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	Nama Akun Belanja	Penambahan - LO							
		Beban Bertambah dari Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset tetap Dan Jadi Barang Persediaan	Mutasi Masuk Persediaan	Retur Persediaan dari Swasta	Belanja Tidak Terduga yang menjadi persediaan	Reklas dari beban hibah yang menjadi barang persediaan	Reklas dari beban lainnya yang menjadi barang persediaan	Reklas Dari Beban Pemeliharaan Yang Menjadi Barang Persediaan	Reklas Belanja Pemeliharaan yang menjadi Barang Persediaan
		12	13	14	15	16	17	18	19
	Belanja Barang Pakai Habis	235.664.940,00	91.990.074.148,03	1.680.120,00	260.800.000,00	913.560.950,00	67.328.356,00	1.238.514.413,00	0,00
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	196.017.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	235.664.940,00	32.212.176.031,25	0,00	0,00	0,00	17.350.745,00	0,00	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	168.860.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	53.340.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	602.860.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.041,00	0,00	0,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.514.413,00	0,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6

NO	Nama Akun Belanja	Pengurangan - LO			Pengurangan - LO						
		Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Hibah kepada swasta/ masyarakat	Persediaan Kadaluausa	Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Mutasi Keluar Persediaan	Persediaan Akhir 2025	Reklas dari beban persediaan menjadi aset tetap	Reklas Ke Lainnya (Ekstrakomtable)	Jumlah Beban Persediaan
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Belanja Barang Pakai Habis	11.944.315.493,00	385.677.887,00	1.290.375.259,08	563.309.944,19	867.033.687,00	91.990.074.150,03	74.100.366.010,74	23.947.300,00	86.459.900,00	216.416.854.048,83
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.174.751,83	0,00	0,00	2.285.050.319,04
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.933.022,10	0,00	0,00	2.566.163.474,86
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	86.429.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649.749.616,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	182.896.123,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.666.870,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	78.864.028,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166.961,00	196.017.120,00	128.271.655,12	0,00	0,00	3.082.574.163,71
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.761.400,00	0,00	0,00	81.137.350,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	497.088.648,30	22.915.189,68	647.702.535,00	32.212.176.033,25	29.522.320.963,24	8.857.800,00	3.864.700,00	49.195.686.533,52
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697.600,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.860.542,00	3.832.855.486,60	0,00	0,00	9.554.937.616,22
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.340.510,00	1.204.694.873,79	0,00	0,00	4.487.795.039,09
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	55.844.050,00	0,00	602.860.059,00	3.916.923.174,77	1.125.000,00	0,00	17.745.504.790,12
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074.500,00	0,00	0,00	324.472.500,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.260,00	0,00	0,00	463.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.762.120,00	0,00	82.595.200,00	452.657.387,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.203.793,77	0,00	0,00	3.082.628.612,66
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.476.960,00
20	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.100.500,00
21	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300.930,00
22	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.600.500,00

6

NO	Nama Akun Persediaan	Persediaan Awal	Koreksi Tahun Lalu Persediaan	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Persediaan LRA	Penambahan - LO				
						Utang Belanja persediaan thn 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Menerima Hibah Persediaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23		34.170.000,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	200.079.300,00	0,00	0,00	15.457.300,00	0,00	0,00
24		0,00	0,00	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	149.485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah	250.849.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		0,00	0,00	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga	106.348.541,00	0,00	0,00	38.745.660,00	0,00	19.690.000,00
29		0,00	0,00	Belanja Pakaian Paskibraka	348.986.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Perlengkapan Pendukung Olahraga	82.101.035,00	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.377.500,00	0,00	1.085.775.520,00	0,00	0,00	0,00
31	Suvenir/Cendera Mata	16.500.000,00	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	100.629.936,00	0,00	8.820.000,00	27.510.790,00	0,00	0,00
32	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.500,00	0,00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54.237.837,00	0,00	0,00	9.505.800,00	500.000,00	0,00
33	Obat	19.630.500.356,78	0,00	Belanja Obat-Obatan-Obat	14.838.420.936,00	821.313.757,00	557.011.895,00	17.065.877.799,00	0,00	24.575.514.095,15
34	Obat-obatan Lainnya	435.854.789,86	0,00	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	241.032.010,00	0,00	0,00	55.363.470,00	0,00	0,00
35	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	7.097.468.762,08	0,00	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.175.677.838,13	0,00	0,00	9.980.011,00	0,00	12.907.377.245,00
36	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	317.915.000,00	0,00	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Natura	241.297.057,22	0,00	Belanja Natura	1.459.596.988,00	135.915.872,00	0,00	3.123.869.083,00	2.942.142.100,00	979.966.200,00
38	Pakan	0,00	0,00	Belanja Pakan	128.986.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Natura dan Pakan Lainnya	32.681.125,20	0,00	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	4.050.500,00	0,00	0,00	680.643.486,00	107.952.100,00	2.500.000,00
40		0,00	0,00	Belanja Barang Sampel Pangan	3.529.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0,00	0,00	Belanja Makmin Rapat	15.172.399.497,00	1.294.000,00	1.592.909.500,00	551.946.000,00	2.634.844.500,00	0,00
42		0,00	0,00	Belanja Makmin Jamuan Tamu	3.141.832.980,00	0,00	31.425.000,00	79.458.200,00	0,00	0,00
43		0,00	0,00	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	122.570.371,00	0,00	0,00	22.525.400,00	0,00	0,00
44		0,00	0,00	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	1.849.158.000,00	0,00	0,00	0,00
45		0,00	0,00	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	170.297.000,00	0,00	1.318.101.000,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	201.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		0,00	0,00	Belanja Makmin Aktivitas Lapangan	1.835.430.800,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	61.798.763.925,46	6.907.121,00		95.000.622.824,13	4.450.058.138,00	31.014.359.592,00	62.497.998.660,60	5.803.031.950,00	42.389.048.541,65

6

NO	Nama Akun Belanja	Penambahan - LO							
		Beban Bertambah dari Belanja Modal Yang Tidak Menambah Aset tetap Dan Jadi Barang Persediaan	Mutasi Masuk Persediaan	Retur Persediaan dari Swasta	Belanja Tidak Terduga yang menjadi persediaan	Reklas dari beban hibah yang menjadi barang persediaan	Reklas dari beban lainnya yang menjadi barang persediaan	Reklas Dari Beban Pemeliharaan Yang Menjadi Barang Persediaan	Reklas Belanja Pemeliharaan yang menjadi Barang Persediaan
		12	13	14	15	16	17	18	19
23	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977.570,00	0,00	0,00
33	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	54.711.769.699,78	1.680.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	4.000.930.976,00	0,00	260.800.000,00	497.162.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	416.398.950,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Natura	0,00	44.119.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Barang Sampel Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Makmin Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Makmin Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Makmin Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.664.940,00	91.990.074.148,03	1.680.120,00	260.800.000,00	913.560.950,00	67.328.356,00	1.238.514.413,00	0,00

6

NO	Nama Akun Belanja	Pengurangan - LO			Pengurangan - LO						
		Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Hibah kepada swasta/ masyarakat	Persediaan Kadaluarsa	Pembayaran Hutang Belanja Tahun 2024	Mutasi Keluar Persediaan	Persediaan Akhir 2025	Reklas dari beban persediaan menjadi aset tetap	Reklas Ke Lainnya (Ekstrakomtable)	Jumlah Beban Persediaan
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
23	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370.000,00	0,00	0,00	216.336.600,00
24	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.485.100,00
25	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00
26	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.849.996,00
27	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.647.500,00
28	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.784.201,00
29	Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.986.745,00
30	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.907.700,00	0,00	0,00	1.070.346.355,00
31	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332.100,00	0,00	0,00	141.128.626,00
32	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.224.707,00
33	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	31.565.900,00	793.286.610,78	484.550.704,51	41.113.232,00	54.711.769.699,78	25.135.830.450,67	0,00	0,00	51.003.972.060,97
34	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.035.520,81	0,00	0,00	404.214.749,05
35	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.944.315.493,00	354.111.987,00	0,00	0,00	0,00	4.000.930.976,00	5.054.283.127,60	0,00	0,00	22.595.755.248,61
36	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.398.950,00	0,00	0,00	319.587.000,00
37	Belanja Natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119.210,00	291.490.735,44	0,00	0,00	8.591.296.564,78
38	Belanja Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.986.398,00
39	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.315.425,00	0,00	0,00	802.511.786,20
40	Belanja Barang Sampel Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.750,00
41	Belanja Makmin Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964.500,00	0,00	19.939.428.997,00
42	Belanja Makmin Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.716.180,00
43	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.095.771,00
44	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.158.000,00
45	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	88.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.777.000,00
46	Belanja Makmin pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.780.000,00
47	Belanja Makmin Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.430.800,00
		11.944.315.493,00	385.677.887,00	1.290.375.259,08	563.309.944,19	867.033.687,00	91.990.074.150,03	74.100.366.010,74	23.947.300,00	86.459.900,00	216.416.854.048,83

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
c. Beban Jasa	309.574.634.055,61	310.884.541.474,33

Beban Jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp309.574.634.055,61 dan Rp310.884.541.474,33.

Tabel 354. Daftar Rincian Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No.	Beban Jasa	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Jasa Kantor	218.665.912.128,49	241.414.856.220,73
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.293.539.500,00	20.460.271.000,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.864.063.936,00	1.425.167.703,00
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	14.050.000,00
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	530.840.000,00	7.000.000,00
6	Beban Honorarium Rohaniwan	2.200.000,00	9.770.000,00
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	1.169.836.750,00	1.044.010.250,00
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	337.600.000,00	9.600.000,00
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	276.900.000,00	275.400.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	22.586.613.000,00	31.128.093.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	15.176.197.729,00	22.559.831.929,00
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	1.810.427.175,00	1.798.618.956,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.680.955.000,00	4.311.643.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.184.500.000,00	2.598.400.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	408.000.000,00	428.400.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	87.900.000,00	606.000.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.139.800.000,00	1.392.600.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.409.500.000,00	1.274.000.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	198.220.000,00	22.750.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	209.100.000,00	50.250.000,00
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	44.664.672.000,00	46.885.546.361,00
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.200.000,00	0,00
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.769.015.000,00	724.880.920,00
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	928.154.780,00	3.432.238.500,00
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	12.712.317.798,00	12.059.200.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.958.136.750,00	2.160.614.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Supir	2.187.196.750,00	1.968.500.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	1.005.315.150,00	1.020.257.524,00
29	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	3.000.000,00	49.903.250,00
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	194.180.000,00	115.500.000,00
31	Beban Jasa Tata Rias	238.225.000,00	165.300.000,00

6

No.	Beban Jasa	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	126.400.000,00
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	84.009.979,00	33.474.180,00
34	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	2.097.800,00	3.021.700,00
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.487.067.400,00	1.550.257.125,00
36	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	47.760.015,00	43.960.000,00
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	35.408.550,00	27.921.700,00
38	Beban Jasa Kalibrasi	1.034.066.519,00	905.084.550,00
39	Beban Jasa Pengolahan Sampah	885.421.887,00	994.287.264,00
40	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	5.152.000,00	5.328.000,00
41	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.371.049.460,00	2.063.790.000,00
42	Beban Tagihan Telepon	192.007.945,00	210.591.842,00
43	Beban Tagihan Air	889.266.102,00	981.240.837,00
44	Beban Tagihan Listrik	11.358.838.795,00	11.465.999.747,00
45	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	41.518.000,00	130.618.000,00
46	Beban Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	7.331.116.074,00	7.445.011.133,00
47	Beban Paket/Pengiriman	60.692.812,00	24.102.228,00
48	Beban Penambahan Daya	3.256.850,00	507.000,00
49	Belanja Registrasi/Keanggotaan	227.792.472,00	127.526.531,00
50	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.623.219,00	32.352.186,00
51	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	14.252.767.123,00	16.568.271.921,00
52	Beban Pengolahan Air Limbah	410.471.492,00	467.160.875,00
53	Beban Lembur	8.371.462.800,00	6.583.827.408,00
54	Beban Medical Check Up	110.219.154,00	77.068.300,00
55	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	28.237.263.309,49	33.549.257.300,73
56	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	59.841.653,00	0,00
57	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.350.211.400,00	0,00
58	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	756.923.000,00	0,00
59	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	76.265.558.114,79	54.021.346.562,00
60	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.559.051.888,00	2.346.734.160,00
61	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	58.611.280.000,00	39.990.440.000,00
62	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	6.051.486.000,00	4.637.099.600,00
63	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.606.933.098,00	5.832.992.906,00
64	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	331.955.807,06	380.007.105,66
65	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	408.215.744,18	473.721.620,34
66	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	67.537.000,00	0,00
67	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	1.835.592.577,55	360.351.170,00
68	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	451.976.000,00	0,00
69	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	341.530.000,00	0,00
70	Beban Sewa Tanah	236.068.632,33	625.850.998,00
71	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	29.733.333,33	0,00

No.	Beban Jasa	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
72	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	20.000.000,00
73	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	153.335.300,00	158.335.300,00
74	Beban Sewa Tanah Persil Lainnya	0,00	10.000.000,00
75	Beban Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	13.000.000,00	15.600.000,00
76	Beban Sewa Tanah untuk Jalan	0,00	401.915.699,00
77	Beban Sewa Tanah untuk Taman	39.999.999,00	19.999.999,00
78	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.784.603.522,00	2.898.926.252,60
79	Beban Sewa Electric Generating Set	50.632.499,00	19.500.000,00
80	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	6.000.000,00
81	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	101.525.000,00	0,00
82	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.237.629.949,00	1.538.750.000,00
83	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	82.100.000,00	28.300.000,00
84	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.900.000,00	0,00
85	Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	7.000.000,00
86	Beban Sewa Alat Panen	0,00	4.998.000,00
87	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	66.132.000,00	49.502.000,00
88	Beban Sewa Mebel	146.766.908,00	103.340.000,00
89	Beban Sewa Alat Pendingin	4.000.000,00	8.000.000,00
90	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	674.735.956,00	698.646.400,00
91	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	9.400.000,00
92	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	66.500.000,00	73.530.000,00
93	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	6.000.000,00
94	Beban Sewa Analytical Instrument	0,00	3.408.102,60
95	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	24.200.000,00	11.900.000,00
96	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.100.000,00	2.000.000,00
97	Beban Sewa Peralatan Personal Computer	0,00	0,00
98	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	40.100.000,00	84.200.000,00
99	Beban Sewa Peralatan Personal Computer	105.556.804,00	82.011.750,00
100	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	4.100.000,00
101	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	171.724.406,00	155.340.000,00
102	Beban Sewa Peralatan Senam	0,00	3.000.000,00
103	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	593.337.000,00	1.165.603.500,00
104	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	29.000.000,00
105	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	70.000.000,00
106	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	562.367.000,00	837.123.500,00
107	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00	29.400.000,00
108	Beban Sewa Taman	0,00	1.000.000,00
109	Beban Sewa Hotel	24.970.000,00	13.080.000,00
110	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	186.000.000,00
111	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	15.000.000,00
112	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	30.000.000,00	15.000.000,00

No.	Beban Jasa	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
113	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	796.354.119,00	1.701.862.288,00
114	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	3.500.000,00	0,00
115	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	38.241.701,00	28.034.544,00
116	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	47.644.749,00	2.998.998,00
117	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	97.111.680,00
118	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	19.218.325,00	654.900,00
119	Beban Jasa Konsultansi PerencanaanRekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	373.890.985,00	0,00
120	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	4.983.900,00	423.255.392,00
121	Beban Jasa Konsultansi PerencanaanRekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	9.977.790,00
122	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	5.423.840,00
123	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	5.300.000,00	0,00
124	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	0,00	194.216.700,00
125	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	7.766.595,00	9.333.200,00
126	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	44.250.341,00	8.239.370,00
127	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	5.969.000,00
128	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2.687.703,00	386.838.224,00
129	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	99.191.820,00	0,00
130	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	247.546.650,00
131	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000,00	182.362.000,00
132	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (<i>Engineering</i>) Terpadu	99.678.000,00	99.900.000,00
133	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.292.879.239,00	2.743.548.661,00
134	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	199.000.000,00	0,00
135	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	689.893.400,00	446.690.500,00
136	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	0,00	89.321.700,00
137	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	477.564.805,00	17.760.000,00
138	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	149.416.794,00	546.880.000,00
139	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	17.000.000,00	17.000.000,00
140	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	740.004.240,00	1.447.370.561,00
141	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	20.000.000,00	178.525.900,00
142	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.262.450.381,00	5.445.814.078,00
143	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	5.971.450.381,00	5.014.839.078,00
144	Beban Bimbingan Teknis	291.000.000,00	430.975.000,00

No.	Beban Jasa	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4
145	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.385.378.169,00	740.822.478,00
146	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	2.167.923,00
147	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	8.694.287,00
148	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	289.915,00
149	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	33.128.736,00	16.748.313,00
150	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	42.482.056,00
151	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	1.266.810,00
152	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	13.110.528,00	4.554.565,00
153	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	388.300.037,00	187.764.288,00
154	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	302.466.509,00	109.395.493,00
155	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	285.359.584,00	0,00
156	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	207.082.183,00
157	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	363.012.775,00	160.376.645,00
158	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	74.705.236,00
159	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	74.705.236,00
160	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	262.092.750,00	36.205.200,00
161	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	33.325.000,00	11.855.000,00
162	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	228.767.750,00	24.350.200,00
	JUMLAH	309.574.634.055,61	310.884.541.474,33

Hubungan Beban Jasa pada Laporan Operasional dengan belanja jasa pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 355. Hubungan Beban Jasa dengan Belanja Jasa Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja jasa LRA (SIKPD)	Penambahan - LO						Pengurangan - LO			Total Beban Jasa - LO
			Penambahan Utang Jasa tahun 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Beban dipotong langsung oleh pihak lain (BPJS)	Hibah Belanja Jasa	Belanja dibayar dimuka	Reklas Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	Pengurangan Hutang Jasa Tahun 2024	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (4+5+6+7+8+9+10) - (11+12+13)
1	Beban Jasa Kantor	131.190.997.624,00	4.362.780.354,49	30.825.642.856,00	57.214.752.120,00	2.403.480.993,00	43.500,00	0,00	0,00	75.374.100,00	7.256.411.219,00	218.665.912.128,49
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.688.060.000,00	700.000,00	13.441.939.500,00	162.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293.539.500,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.721.755.000,00	0,00	0,00	142.308.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.063.936,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	529.340.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.840.000,00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
6	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	9.500.000,00	0,00	1.160.336.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.836.750,00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	337.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.600.000,00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	276.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.900.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	15.635.600.000,00	0,00	6.951.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586.613.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.244.105.000,00	0,00	0,00	10.303.912.500,00	1.634.055.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875.000,00	15.176.197.729,00
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	912.661.400,00	17.640.000,00	0,00	880.125.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.427.175,00
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.893.135.000,00	0,00	703.330.000,00	84.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.955.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.184.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.500.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	408.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	87.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.139.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.800.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.409.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.500.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	198.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.220.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	207.000.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.100.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	39.502.736.000,00	0,00	1.766.036.000,00	3.395.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.664.672.000,00

No.	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja jasa LRA (SIKPD)	Penambahan - LO						Pengurangan - LO			Total Beban Jasa - LO
			Penambahan Utang Jasa tahun 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Beban dipotong langsung oleh pihak lain (BPJS)	Hibah Belanja Jasa	Belanja dibayar dimuka	Reklas Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	Pengurangan Hutang Jasa Tahun 2024	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (4+5+6+7+8+9+10) - (11+12+13)
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.211.630.000,00	0,00	0,00	1.557.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.015.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	812.874.780,00	0,00	115.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.154.780,00
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.521.277.798,00	0,00	1.542.192.000,00	2.648.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712.317.798,00
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	835.376.750,00	0,00	328.260.000,00	794.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.136.750,00
26	Beban Jasa Tenaga Supir	1.587.696.750,00	1.500.000,00	0,00	598.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187.196.750,00
27	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	22.500.000,00	0,00	0,00	471.000.000,00	511.815.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.315.150,00
28	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	192.980.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.180.000,00
30	Beban Jasa Tata Rias	15.825.000,00	0,00	222.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.225.000,00
31	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	152.996.269,00	0,00	2.385.110,00	2.325.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.696.700,00	0,00	84.009.979,00
32	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	978.300,00	0,00	0,00	1.076.000,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097.800,00
33	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.437.767.400,00	0,00	0,00	49.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.067.400,00
34	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	0,00	0,00	7.760.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760.015,00
35	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	26.719.850,00	0,00	5.550.000,00	3.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.408.550,00
36	Beban Jasa Kalibrasi	252.939.637,00	0,00	0,00	781.126.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.066.519,00
37	Beban Jasa Pengolahan Sampah	157.220.083,00	3.869.909,00	19.300.000,00	754.168.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136.549,00	885.421.887,00
38	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	1.600.000,00	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152.000,00
39	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.369.939.460,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.049.460,00
40	Beban Tagihan Telepon	165.718.696,00	9.418.709,00	7.236.035,00	18.781.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.353,00	192.007.945,00
41	Beban Tagihan Air	483.382.603,00	43.227.905,00	294.929.917,00	109.026.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.301.110,00	889.266.102,00
42	Beban Tagihan Listrik	8.531.244.620,00	656.014.532,00	1.234.381.981,00	1.571.669.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.471.679,00	11.358.838.795,00
43	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.955.000,00	250.000,00	22.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	41.518.000,00
44	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.182.647.963,00	81.120.958,00	2.563.962.256,00	565.808.562,00	11.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.799.665,00	7.331.116.074,00
45	Beban Paket/Pengiriman	59.589.185,00	333.630,00	0,00	2.447.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.400,00	0,00	60.692.812,00

No.	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja jasa LRA (SIKPD)	Penambahan - LO						Pengurangan - LO			Total Beban Jasa - LO
			Penambahan Utang Jasa tahun 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Beban dipotong langsung oleh pihak lain (BPJS)	Hibah Belanja Jasa	Belanja dibayar dimuka	Reklas Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	Pengurangan Hutang Jasa Tahun 2024	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (4+5+6+7+8+9+10) - (11+12+13)
46	Beban Penambahan Daya	0,00	0,00	3.256.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.850,00
47	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	0,00	224.492.457,00	3.300.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.792.472,00
48	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.312.186,00	1.800.000,00	0,00	23.311.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	30.623.219,00
49	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	14.472.587.683,00	1.097.941.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.762.207,00	14.252.767.123,00
50	Beban Pengolahan Air Limbah	30.822.704,00	3.551.223,00	0,00	385.216.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119.108,00	410.471.492,00
51	Beban Lembur	7.979.341.300,00	0,00	208.573.000,00	183.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371.462.800,00
52	Beban Medical Check Up	110.219.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.219.154,00
53	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	2.445.411.841,49	0,00	30.659.240.402,00	246.234.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113.623.548,00	28.237.263.309,49
54	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	59.841.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.841.653,00
55	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.516.256.400,00	0,00	0,00	833.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.211.400,00
56	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	542.844.000,00	0,00	0,00	214.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.923.000,00
57	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	73.688.349.234,00	76.710.738,00	0,00	2.540.171.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.672.874,00	76.265.558.114,79
58	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.559.051.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.051.888,00
59	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	58.611.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.611.280.000,00
60	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.053.101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.600,00	6.051.486.000,00
61	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.529.136.374,00	57.365.739,00	0,00	2.057.627.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.196.908,00	5.606.933.098,00
62	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	276.806.091,00	450.845,00	0,00	55.083.197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.326,00	331.955.807,06
63	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	339.485.850,00	380.547,00	0,00	68.825.387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.040,00	408.215.744,18
64	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	49.776.000,00	17.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.537.000,00
65	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	1.476.205.431,00	752.607,00	0,00	358.634.539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.592.577,55
66	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	451.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.976.000,00
67	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	341.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.530.000,00

6

No.	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja jasa LRA (SIKPD)	Penambahan - LO						Pengurangan - LO			Total Beban Jasa - LO
			Penambahan Utang Jasa tahun 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Beban dipotong langsung oleh pihak lain (BPJS)	Hibah Belanja Jasa	Belanja dibayar dimuka	Reklas Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	Pengurangan Hutang Jasa Tahun 2024	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (4+5+6+7+8+9+10) - (11+12+13)
68	Beban Sewa Tanah	652.335.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.266.666,67	0,00	0,00	236.068.632,33
69	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	446.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.266.666,67	0,00	0,00	29.733.333,33
70	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	153.335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.335.300,00
71	Beban Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
72	Beban Sewa Tanah untuk Taman	39.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999.999,00
73	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.810.834.722,00	0,00	887.542.000,00	80.326.800,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.784.603.522,00
74	Beban Sewa Electric Generating Set	50.632.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.632.499,00
75	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	101.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.525.000,00
76	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	492.289.949,00	0,00	745.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.629.949,00
77	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.800.000,00	0,00	45.500.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.100.000,00
78	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
79	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	102.000,00	66.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.132.000,00
80	Beban Sewa Mebel	146.016.908,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.766.908,00
81	Beban Sewa Alat Pendingin	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
82	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	650.535.956,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.735.956,00
83	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	66.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500.000,00
84	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
85	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00
86	Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
87	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00
88	Beban Sewa Peralatan Personal Computer	90.910.004,00	0,00	0,00	8.746.800,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	105.556.804,00
89	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	171.724.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.724.406,00
90	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	593.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.337.000,00
91	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	562.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.367.000,00

No.	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja jasa LRA (SIKPD)	Penambahan - LO						Pengurangan - LO			Total Beban Jasa - LO
			Penambahan Utang Jasa tahun 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Beban dipotong langsung oleh pihak lain (BPJS)	Hibah Belanja Jasa	Belanja dibayar dimuka	Reklas Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	Pengurangan Hutang Jasa Tahun 2024	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (4+5+6+7+8+9+10) - (11+12+13)
92	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
93	Beban Sewa Hotel	24.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.970.000,00
94	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
95	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
96	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	765.736.079,00	0,00	0,00	377.722.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.104.100,00	0,00	796.354.119,00
97	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitekural	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
98	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	34.901.701,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.241.701,00
99	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	43.938.459,00	0,00	0,00	3.706.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644.749,00
100	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	19.218.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.218.325,00
101	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	13.351.885,00	0,00	0,00	360.539.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.890.985,00
102	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	252.839.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.855.700,00	0,00	4.983.900,00
103	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
104	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	6.316.595,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766.595,00
105	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	39.063.591,00	0,00	0,00	5.186.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.250.341,00
106	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	2.687.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.703,00
107	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	99.191.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.191.820,00

6

No.	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja jasa LRA (SIKPD)	Penambahan - LO						Pengurangan - LO			Total Beban Jasa - LO
			Penambahan Utang Jasa tahun 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Beban dipotong langsung oleh pihak lain (BPJS)	Hibah Belanja Jasa	Belanja dibayar dimuka	Reklas Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	Pengurangan Hutang Jasa Tahun 2024	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (4+5+6+7+8+9+10) - (11+12+13)
108	Beban Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	99.248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.248.400,00	0,00	0,00
109	Beban Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
110	Beban Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	99.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.678.000,00
111	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.767.966.599,00	0,00	0,00	624.912.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	2.292.879.239,00
112	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	199.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000.000,00
113	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	241.200.000,00	0,00	0,00	448.693.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.893.400,00
114	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	459.804.805,00	0,00	0,00	17.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.564.805,00
115	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	249.416.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	149.416.794,00
116	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
117	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	598.545.000,00	0,00	0,00	141.459.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.004.240,00
118	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
119	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.841.740.900,00	0,00	1.223.865.000,00	1.196.844.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262.450.381,00
120	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.550.740.900,00	0,00	1.223.865.000,00	1.196.844.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971.450.381,00
121	Beban Bimbingan Teknis	291.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000.000,00
122	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1.073.621.284,00	661.615.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.858.322,00	1.385.378.169,00
123	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	16.534.136,00	24.915.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.809,00	33.128.736,00
124	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	15.373.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.775,00	13.110.528,00
125	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	93.284.067,00	388.300.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.284.067,00	388.300.037,00

No.	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja jasa LRA (SIKPD)	Penambahan - LO						Pengurangan - LO			Total Beban Jasa - LO
			Penambahan Utang Jasa tahun 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	Beban dipotong langsung oleh pihak lain (BPJS)	Hibah Belanja Jasa	Belanja dibayar dimuka	Reklas Belanja Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	Pengurangan Hutang Jasa Tahun 2024	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (4+5+6+7+8+9+10) - (11+12+13)
126	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	183.546.046,00	155.076.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.156.085,00	302.466.509,00
127	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	388.241.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.881.482,00	285.359.584,00
128	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	376.642.666,00	93.323.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.953.104,00	363.012.775,00
129	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	242.767.750,00	0,00	0,00	19.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.092.750,00
130	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.000.000,00	0,00	0,00	19.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325.000,00
131	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	228.767.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.767.750,00
	JUMLAH	215.657.686.491,00	5.101.106.299,49	32.937.049.856,00	62.054.054.197,79	2.403.480.993,00	43.500,00	5.900.000,00	416.266.666,67	522.478.200,00	7.645.942.415,00	309.574.634.055,61

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
d. Beban Pemeliharaan	29.230.453.609,84	36.655.785.563,79

Beban Pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp29.230.453.609,84 dan Rp36.655.785.563,79.

Tabel 356. Daftar Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No.	Beban Pemeliharaan	31-Dec-25 (Rp)	31-Dec-24 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	397.003.000,00
2	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0,00	397.003.000,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.549.951.428,00	18.267.884.532,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	99.900.000,00	149.647.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	20.000.000,00	52.000.000,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	136.110.900,00	123.196.700,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	151.759.200,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	7.190.000,00	14.357.750,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	199.800.000,00	98.900.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	214.127.487,00	329.749.075,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	9.591.000,00	6.944.500,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor	111.055.621,00	21.183.800,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.580.160.272,00	3.448.243.528,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	739.296.137,00	1.030.084.840,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	700.156.011,00	756.593.781,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	405.905.675,00	334.823.800,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	141.847.256,00	134.067.144,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.901.052.090,00	1.409.156.899,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	74.583.000,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	346.129.840,00	0,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3.559.400,00	7.100.000,00
22	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	0,00	99.109.458,00

6

No.	Beban Pemeliharaan	31-Dec-25 (Rp)	31-Dec-24 (Rp)
1	2	3	4
23	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	7.000.000,00	0,00
24	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	13.477.000,00	0,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	99.750.150,00	0,00
26	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.800.000,00	9.791.450,00
27	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	0,00	8.945.000,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	66.464.400,00	88.733.400,00
29	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	1.200.000,00
30	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	403.011.643,00	578.133.050,00
31	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.560.021.508,00	2.217.476.402,00
32	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	16.035.000,00	21.357.200,00
33	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	886.675.838,00	900.989.612,00
34	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	5.497.000,00	593.500,00
35	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	763.990.553,00	512.420.452,00
36	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	3.875.000,00
37	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	27.999.972,00	14.900.000,00
38	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF	0,00	4.000.000,00
39	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	14.700.000,00	5.700.000,00
40	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	706.097.138,00	613.919.582,00
41	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	82.615.943,00	56.874.000,00
42	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	351.160.077,00	221.753.577,00
43	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	47.430.004,00	19.850.000,00
44	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	16.650.000,00	13.041.509,00
45	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	81.039.264,00	18.538.273,00
46	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	45.348.312,00	199.150.800,00
47	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.510.000,00	3.800.000,00
48	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	163.463.033,00	206.571.230,00

No.	Beban Pemeliharaan	31-Dec-25 (Rp)	31-Dec-24 (Rp)
1	2	3	4
49	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	32.312.100,00	32.190.000,00
50	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	1.570.000,00	0,00
51	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	104.813.324,00	65.146.350,00
52	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	249.556.545,00	248.443.000,00
53	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	0,00	4.050.000,00
54	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-UnitAlat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	20.500.000,00	20.500.000,00
55	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	34.000.000,00	34.000.000,00
56	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	133.185.332,00	96.508.150,00
57	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	5.700.000,00	15.077.478,00
58	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	12.700.000,00	9.200.000,00
59	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	2.850.000,00	2.600.000,00
60	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	0,00	46.300.000,00
61	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	1.443.000,00	0,00
62	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	177.443.025,00	141.815.406,00
63	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit- <i>Personal Computer</i>	2.126.165.753,00	2.208.238.850,00
64	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	3.250.000,00	0,00
65	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.358.369.825,00	1.438.185.986,00
66	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	77.699.800,00	62.294.000,00
67	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	71.015.000,00	31.980.000,00
68	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.119.999.624,84	1.975.129.463,79
69	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.662.208.044,84	150.879.407,01
70	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	52.170.000,00	0,00
71	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.496.239.867,00	897.814.061,00
72	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	1.586.000,00
73	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.256.250,00	0,00
74	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	138.550.800,00

b

No.	Beban Pemeliharaan	31-Dec-25 (Rp)	31-Dec-24 (Rp)
1	2	3	4
75	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	265.200.000,00	0,00
76	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	227.807.609,00	452.021.427,78
77	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	5.322.100,00
78	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	66.571.914,00	44.000.000,00
79	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	24.617.000,00
80	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	4.967.500,00
81	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	78.099.000,00	48.668.433,00
82	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	95.150.440,00	95.000.000,00
83	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan	134.296.500,00	0,00
84	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	0,00	96.702.735,00
85	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	15.000.000,00
86	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.521.580.402,00	15.713.337.408,00
87	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	985.648.000,00	9.500.849.000,00
88	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00	7.200.000,00
89	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan- Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	749.679.000,00
90	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan- Jembatan Pengukur	69.255.600,00	49.904.600,00
91	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-BangunanAir Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	3.114.275.000,00	3.140.654.000,00
92	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	81.482.000,00	109.273.000,00
93	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	278.313.000,00	247.455.000,00
94	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	4.242.420,00	0,00
95	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor- Bangunan Air Kotor Lainnya	13.500.000,00	0,00
96	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	217.000,00
97	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	162.527.280,00	212.464.077,00
98	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	247.231.197,00	368.239.152,00
99	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	149.220.505,00	89.879.640,00
100	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	0,00	64.343.500,00

b

No.	Beban Pemeliharaan	31-Dec-25 (Rp)	31-Dec-24 (Rp)
1	2	3	4
101	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	90.851.400,00	766.415.710,00
102	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	8.602.500,00	152.123.000,00
103	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	159.363.171,00	184.717.500,00
104	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	157.068.329,00	69.923.229,00
105	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.932.155,00	8.501.400,00
106	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	7.501.400,00
107	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	23.932.155,00	1.000.000,00
108	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	14.990.000,00	293.929.760,00
109	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	14.990.000,00	293.929.760,00
	Jumlah	29.230.453.609,84	36.655.785.563,79

Hubungan Beban Pemeliharaan pada laporan operasional dengan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

b

Tabel 357. Hubungan Beban pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan

Dalam Rupiah

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
			Utang belanja pemeliharaan 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas Pemeliharaan menjadi Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.827.107.240,00	761.050,00	4.140.261.500,00	4.581.618.638,00	5.000.000,00	1.590.000,00	0,00	6.387.000,00	19.549.951.428,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	99.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	136.110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.110.900,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	151.759.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.759.200,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	7.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	199.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	130.040.000,00	0,00	0,00	84.087.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.127.487,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	9.591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	60.883.621,00	0,00	0,00	50.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.055.621,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor Perorangan	3.541.378.439,00	761.050,00	0,00	38.020.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.160.272,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor Penumpang	587.342.404,00	0,00	0,00	151.953.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.296.137,00

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
			Utang belanja pemeliharaan 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas Pemeliharaan menjadi Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10)
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	700.094.811,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.156.011,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	391.881.500,00	0,00	0,00	14.024.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.905.675,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	141.209.756,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.847.256,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.210.146.710,00	0,00	0,00	697.292.380,00	0,00	0,00	0,00	6.387.000,00	1.901.052.090,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	346.129.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.129.840,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3.559.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559.400,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	13.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477.000,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	99.750.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750.150,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00

6

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
			Utang belanja pemeliharaan 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas Pemeliharaan menjadi Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10)
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	37.754.400,00	0,00	1.500.000,00	27.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.464.400,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	82.265.646,00	0,00	291.435.500,00	29.310.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.011.643,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	118.447.508,00	0,00	2.426.530.000,00	15.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.021.508,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	14.135.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035.000,00
27	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	465.419.900,00	0,00	46.750.000,00	374.505.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.675.838,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	297.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	139.237.347,00	0,00	0,00	619.753.206,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	763.990.553,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	27.999.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999.972,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	53.642.073,00	0,00	0,00	652.455.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.097.138,00
33	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	39.499.994,00	0,00	0,00	43.115.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.615.943,00

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
			Utang belanja pemeliharaan 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas Pemeliharaan menjadi Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10)
34	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	351.160.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.160.077,00
35	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	39.430.003,00	0,00	0,00	8.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.430.004,00
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00
37	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	81.039.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039.264,00
38	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	45.348.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.348.312,00
39	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00
40	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	163.463.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.463.033,00
41	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy	0,00	0,00	0,00	32.312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312.100,00
42	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00

6

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
			Utang belanja pemeliharaan 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas Pemeliharaan menjadi Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10)
43	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	104.813.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.813.324,00
44	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	249.556.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.556.545,00
45	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
46	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
47	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	126.110.548,00	0,00	0,00	7.074.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.185.332,00
48	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
49	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
50	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
51	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.000,00	0,00	0,00	1.443.000,00
52	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	177.443.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.443.025,00

6

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
			Utang belanja pemeliharaan 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas Pemeliharaan menjadi Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10)
53	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	952.804.983,00	0,00	896.636.000,00	276.577.770,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	2.126.165.753,00
54	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
55	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	648.480.310,00	0,00	473.230.000,00	236.659.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.369.825,00
56	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	45.389.000,00	0,00	4.180.000,00	28.130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.699.800,00
57	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	71.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.015.000,00
58	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.208.156.975,66	0,00	0,00	1.820.464.640,18	0,00	91.378.009,00	0,00	0,00	4.119.999.624,84
59	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.319.639.271,66	0,00	0,00	342.568.773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.208.044,84
60	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	52.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.170.000,00
61	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	56.629.000,00	0,00	0,00	1.439.610.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.239.867,00
62	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.256.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.256.250,00
63	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	265.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.200.000,00

6

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
			Utang belanja pemeliharaan 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas Pemeliharaan menjadi Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10)
64	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	136.429.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.378.009,00	0,00	0,00	227.807.609,00
65	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	66.571.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.571.914,00
66	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	39.814.000,00	0,00	0,00	38.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.099.000,00
67	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	95.150.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.150.440,00
68	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan	134.296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.296.500,00
69	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.157.597.559,00	0,00	0,00	602.497.256,00	0,00	0,00	1.238.514.413,00	0,00	5.521.580.402,00
70	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	985.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.648.000,00
71	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Pengukur	69.255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.255.600,00
72	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	3.114.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.275.000,00
73	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	81.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.482.000,00
74	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	278.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.313.000,00
75	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	4.242.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242.420,00

6

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Pemeliharaan LRA	Penambahan - LO					Pengurangan - LO		Jumlah Beban Pemeliharaan (LO)
			Utang belanja pemeliharaan 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Menerima Hibah untuk Pemeliharaan	Belanja modal yang tidak menambah aset tetap	Reklas ke dalam beban persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas Pemeliharaan menjadi Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (3+4+5+6+7+8) - (9+10)
76	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
77	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	162.527.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.527.280,00
78	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	139.894.975,00	0,00	0,00	107.336.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.231.197,00
79	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	0,00	149.220.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.220.505,00
80	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	1.329.365.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.514.413,00	0,00	90.851.400,00
81	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	159.363.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.363.171,00
82	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.602.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.602.500,00
83	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	0,00	0,00	0,00	157.068.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.068.329,00
84	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.932.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932.155,00
85	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	23.932.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932.155,00
86	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990.000,00
87	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990.000,00
	Jumlah	19.231.783.929,66	761.050,00	4.140.261.500,00	7.004.580.534,18	5.000.000,00	92.968.009,00	1.238.514.413,00	6.387.000,00	29.230.453.609,84

6

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
e. Beban Perjalanan Dinas	36.101.405.847,00	66.603.050.470,00

Beban Perjalanan Dinas meliputi Perjalan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Perjalanan Dinas Dalam negeri meliputi Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan saldo sebagai berikut:

Tabel 358. Daftar Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Beban Perjalanan Dinas	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.101.405.847,00	66.603.050.470,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.576.191.729,00	28.854.708.870,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.369.729.592,00	28.119.350.727,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.101.214.226,00	6.446.306.494,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.054.270.300,00	3.182.684.379,00
Jumlah		36.101.405.847,00	66.603.050.470,00

Hubungan Beban Perjalanan Dinas pada laporan operasional dengan belanja perjalanan dinas pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 359. Hubungan Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025

Dalam Rupiah							
NO	Nama Akun Belanja	Penambahan - LO					Jumlah Beban Perjalanan Dinas (LO)
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas LRA	Utang belanja perjalanan dinas 2025	Belanja BOS	Belanja BLUD	Belanja BOK	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4+5+6+7
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.011.499.569,00	1.675.000,00	2.092.028.692,00	938.442.586,00	7.057.760.000,00	36.101.405.847,00
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	12.844.748.143,00	1.675.000,00	2.280.000,00	727.488.586,00	0,00	13.576.191.729,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.454.458.900,00	0,00	2.089.748.692,00	209.062.000,00	6.616.460.000,00	18.369.729.592,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.659.914.226,00	0,00	0,00	0,00	441.300.000,00	3.101.214.226,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.052.378.300,00	0,00	0,00	1.892.000,00	0,00	1.054.270.300,00
Jumlah		26.011.499.569,00	1.675.000,00	2.092.028.692,00	938.442.586,00	7.057.760.000,00	36.101.405.847,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
f. Beban Bunga	0,00	1.725.238.316,39

Tidak ada Beban Bunga tahun 2025. Sedangkan tahun 2024 Rp1.725.238.316,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 360. Daftar Rincian Belanja Bunga dan Beban Bunga Tahun 2025

Dalam Rupiah			
No	Beban Bunga	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	0,00	1.725.238.316,39
JUMLAH		0,00	1.725.238.316,39

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
g. Beban Hibah	118.457.265.370,08	194.394.561.465,34

Tabel 361. Daftar Rincian Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Beban Hibah	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	47.422.620.600,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	7.245.754.275,00
3	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	385.677.887,00	9.452.660,00
4	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	0,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.172.340.000,00	14.753.768.000,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	76.500.000,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.449.280.430,00	22.390.920.195,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	221.173.050,00	393.701.000,00
9	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.690.100.000,00	39.921.539.600,00
10	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.050.485.362,08	14.894.752.460,34
11	Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	1.029.336,00

No	Beban Hibah	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
12	Beban Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.157.505.000,00	3.041.975.000,00
13	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	17.902.102.799,00	15.830.463.639,00
14	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	26.484.066.092,00	22.274.830.000,00
15	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.444.534.750,00	6.137.254.700,00
JUMLAH		118.457.265.370,08	194.394.561.465,34

Hubungan Beban Hibah pada Laporan Operasional dengan Beban hibah pada laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 362. Hubungan Beban hibah dengan Belanja hibah Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Hibah LRA	Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Total Beban Hibah - LO
			Hibah kepada swasta/masyarakat	Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Reklas Beban Hibah menjadi Persediaan	Retur Persediaan dari Swasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6) - (7+8)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00
2	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00
4	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	385.677.887,00	0,00	0,00	0,00	385.677.887,00
5	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	385.677.887,00	0,00	0,00	0,00	385.677.887,00
6	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	385.677.887,00	0,00	0,00	0,00	385.677.887,00
7	Belanja Hibah kepada BUMN	416.398.950,00	0,00	0,00	0,00	416.398.950,00	0,00	0,00
8	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	416.398.950,00	0,00	0,00	0,00	416.398.950,00	0,00	0,00
9	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	416.398.950,00	0,00	0,00	0,00	416.398.950,00	0,00	0,00
10	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	47.847.530.210,00	11.944.315.493,00	0,00	1.290.375.259,08	497.162.000,00	1.680.120,00	60.583.378.842,08
11	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.172.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172.340.000,00
12	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.172.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.172.340.000,00
13	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.670.453.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670.453.480,00
14	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.449.280.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.449.280.430,00
15	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	221.173.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.173.050,00
16	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.004.736.730,00	11.944.315.493,00	0,00	1.290.375.259,08	497.162.000,00	1.680.120,00	28.740.585.362,08
17	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.690.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690.100.000,00
18	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.314.636.730,00	11.944.315.493,00	0,00	1.290.375.259,08	497.162.000,00	1.680.120,00	15.050.485.362,08

6

No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Hibah LRA	Penambahan - LO			Pengurangan - LO		Total Beban Hibah - LO
			Hibah kepada swasta/masyarakat	Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Reklas Beban Hibah menjadi Persediaan	Retur Persediaan dari Swasta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6) - (7+8)
19	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.157.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.505.000,00
20	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.157.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.505.000,00
21	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.157.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157.505.000,00
22	Belanja Hibah Dana BOSP	49.830.703.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.830.703.641,00
23	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	17.902.102.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902.102.799,00
24	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	17.902.102.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902.102.799,00
25	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS PAUD	26.484.066.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.484.066.092,00
26	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	26.484.066.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.484.066.092,00
27	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.444.534.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.534.750,00
28	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	5.444.534.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444.534.750,00
29	JUMLAH	105.752.137.801,00	11.944.315.493,00	385.677.887,00	1.290.375.259,08	913.560.950,00	1.680.120,00	118.457.265.370,08

6

Penambahan Beban hibah terdiri dari:

- 1) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp385.677.887,00 pada DINKES P2KB dengan rincian sebagai berikut:
 - Hibah obat kepada Dinkes Kabupaten Bondowoso Rp23.175.900,00;
 - Hibah obat kepada Dinkes Kabupaten Blitar Rp347.500,00;
 - Hibah obat kepada Dinkes Kabupaten Nganjuk Rp347.500,00;
 - Hibah obat kepada Dinkes Kabupaten Bangkalan Rp7.695.000,00;
 - Hibah BKB Kit Stunting kepada desa-desa Rp354.111.987,00.
- 2) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp13.233.010.632,08 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Hibah logistik yang diserahkan kepada Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.944.315.493,00;
 - b) Pada DINKES P2KB – UPT Instalasi Farmasi sebesar Rp1.290.375.259,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada RS Bhayangkara Lumajang Rp91.929.792,25;
 - Hibah Obat Kepada RS Bhayangkara Lumajang Rp167.903.355,06;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada RS Islam Lumajang Rp79.253.112,00;
 - Hibah Obat Lainnya Kepada RS Islam Lumajang Rp95.731.531,13;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada RS Muhammadiyah Lumajang Rp52.156.261,75;
 - Hibah Obat Kepada RS Muhammadiyah Lumajang Rp34.838.318,68;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada RS Wijaya Kusuma Lumajang Rp88.995.160,25;
 - Hibah Obat Kepada RS Wijaya Kusuma Lumajang Rp216.510.353,58;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada RS Djatiroto Lumajang Rp95.447.103,30;
 - Hibah Obat Kepada RS Djatiroto Lumajang Rp108.351.974,13;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada RS NU Permata Lumajang Rp46.908.245,75;
 - Hibah Obat Kepada RS NU Permata Lumajang Rp276.617,00;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada BPM Luluk Alkatiri Lumajang Rp910.055,00;
 - Hibah Obat Kepada BPM Luluk Alkatiri Lumajang Rp1.810.000,00;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Ain Hartoko Lumajang Rp3.205.755,20;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Ain Hartoko Lumajang Rp9.176.730,00;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Bunda Alisha Lumajang Rp1.861.480,50;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Bunda Elsa Lumajang Rp4.559.017,60;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik DKT Lumajang Rp1.078.330,00;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Kesehatan DKT Lumajang Rp2.448.425,00;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Edifuz Lumajang Rp14.520.204,80;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Hakim Medika Lumajang Rp1.305.218,80;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Hakim Medika Lumajang Rp4.065.810,00;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Jatiroto Medika Lumajang Rp1.224.460,00;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Jatiroto Medika Lumajang Rp7.483.900,00;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Nahada Candipuro Rp2.547.209,00;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Nahada Candipuro Rp14.096.680,00;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Panasea Lumajang Rp19.593.578,30;
 - Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Ronaa Husada Lumajang Rp1.832.580,00;
 - Hibah Obat Kepada Klinik Ronaa Husada Lumajang Rp17.523.960,00;

- Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Rumah Sehat Islam Sumbersuko Rp674.180,00;
- Hibah Obat Kepada Klinik Rumah Sehat Islam Sumbersuko Rp4.463.010,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Sinar Bhakti Rowokangkung – Lumajang Rp3.109.414,00;
- Hibah Obat Kepada Klinik Sinar Bhakti Rowokangkung – Lumajang Rp17.726.410,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Syahbi Padang – Lumajang Rp2.707.574,00;
- Hibah Obat Kepada Klinik Syahbi Padang – Lumajang Rp18.399.260,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Usaha Karya Tempeh – Lumajang Rp1.360.585,00;
- Hibah Obat Kepada Klinik Usaha Karya Tempeh – Lumajang Rp4.113.950,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Bunda Mulia Lumajang Rp314.360,00;
- Hibah Obat Kepada Klinik Bunda Mulia Lumajang Rp1.994.150,00;
- Hibah Obat Kepada BPOM – Jember Rp1.091.760,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Klinik Husada Mulia Tunjung - Randuagung – Lumajang Rp80.000,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Kodim 0821 Lumajang Rp2.926.907,00;
- Hibah Obat Kepada Kodim 0821 Lumajang Rp2.853.465,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Pusdik Arhanud - Kota Batu – Malang Rp7.783.274,00;
- Hibah Obat Kepada Pusdik Arhanud - Kota Batu – Malang Rp3.652.300,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Batalyon 527 Lumajang Rp10.459.071,00;
- Hibah Obat Kepada Batalyon 527 Lumajang Rp4.002.370,00;
- Hibah Bahan Lainnya Kepada Polres Lumajang Rp880.000,00;
- Hibah Obat Kepada PT Rajawali Nusindo Rp14.238.000,00.

Pengurangan beban hibah berasal dari:

- 1) Retur Hibah Obat dari RS Bhayangkara Lumajang sebesar Rp1.413.720,00;
- 2) Retur Hibah Obat dari RS Djatiroto Lumajang sebesar Rp266.400,00;
- 3) Reklas Beban Hibah yang menjadi Persediaan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 913.560.950,00 dikarenakan barang yang mau diserahkan/dihibahkan belum diserahkan kepada penerima.
 - Hibah Barang kepada BUMN reklas ke Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya senilai Rp416.398.950,00
 - Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan reklas ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat senilai Rp497.162.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
h. Beban Bantuan Sosial	29.748.572.818,00	48.108.437.450,00

Beban Bantuan Sosial yang menjadi beban Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 363. Daftar Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Beban Bantuan Sosial	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.539.800.000,00	4.262.400.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Pada Keluarga	2.842.500.000,00	2.860.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	226.673.370,00	187.714.400,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	240.000.000,00	4.408.650.000,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.380.540.000,00	3.579.525.000,00
6	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.104.804.448,00	1.451.595.000,00
7	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	35.000.000,00	29.000.000,00
8	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	79.005.000,00	418.529.100,00
9	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	13.378.900.000,00	28.244.023.950,00
10	Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	10.800.000,00	0,00
11	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.051.200.000,00	1.046.400.000,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	259.200.000,00	254.400.000,00
13	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	1.600.150.000,00	1.366.200.000,00
	JUMLAH	29.748.572.818,00	48.108.437.450,00

Tabel 364. Daftar Beban Bantuan Sosial LRA dan LO Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Bantuan Sosial LRA	Penambahan - LO		Total Beban Bantuan Sosial - LO
		Menerima Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	Reklas dari Beban Lain-lain	
1	2	3	4	5 = (2+3+4)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.539.800.000,00	0,00	0,00	2.539.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.539.800.000,00	0,00	0,00	2.539.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.539.800.000,00	0,00	0,00	2.539.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.069.173.370,00	0,00	0,00	3.069.173.370,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.842.500.000,00	0,00	0,00	2.842.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.842.500.000,00	0,00	0,00	2.842.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	226.673.370,00	0,00	0,00	226.673.370,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	226.673.370,00	0,00	0,00	226.673.370,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	90.000.000,00	0,00	240.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	90.000.000,00	0,00	240.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	90.000.000,00	0,00	240.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.380.540.000,00	0,00	0,00	5.380.540.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.380.540.000,00	0,00	0,00	5.380.540.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	5.380.540.000,00	0,00	0,00	5.380.540.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	18.519.059.448,00	18.519.059.448,00

Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Bantuan Sosial LRA	Penambahan - LO		Total Beban Bantuan Sosial - LO
		Menerima Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	Reklas dari Beban Lain-lain	
1	2	3	4	5 = (2+3+4)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	18.519.059.448,00	18.519.059.448,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	2.104.804.448,00	2.104.804.448,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	79.005.000,00	79.005.000,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	13.378.900.000,00	13.378.900.000,00
Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	0,00	0,00	1.051.200.000,00	1.051.200.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	0,00	0,00	259.200.000,00	259.200.000,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	0,00	1.600.150.000,00	1.600.150.000,00
JUMLAH	11.139.513.370,00	90.000.000,00	18.519.059.448,00	29.748.572.818,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
i. Beban Penyusutan	166.401.254.978,69	160.668.312.467,18

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp166.401.254.978,69 dan Rp160.668.312.446,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 365. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Beban Penyusutan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	59.416.544.903,96	60.937.372.556,89
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.985.946.738,63	23.428.613.492,42
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.113.335.152,70	72.216.134.119,32
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	9.640.500,00	5.890.500,00
5	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	162.525.467.295,29	156.588.010.668,63
6	Beban Penyusutan Aset lain lain	0,00	0,00
7	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	3.875.787.683,40	4.080.301.798,55
9	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
	Jumlah	166.401.254.978,69	160.668.312.467,18

**Tabel 366. Hubungan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dengan Beban Penyusutan
Amortisasi Tahun 2025**

Dalam Rupiah

No	Uraian	Penyusutan Aset Tetap	Amortisasi	Penyusutan Aset Lain-lain	Penyusutan Properti Investasi	Jumlah
1	Saldo awal akumulasi	(2.291.784.011.093,08)	(43.042.315.671,27)	(29.572.796.624,25)	0,00	(2.364.399.123.388,60)
2	PENGURANGAN AKUMULASI:					
3	Penghapusan aset	(22.933.149.261,56)	(111.999.800,00)	(690.204.816,33)	0,00	(23.623.354.077,89)
4	Koreksi lebih catat	(9.408.989.223,39)	0,00	0,00	0,00	(9.520.989.023,39)
5	Reklasifikasi antar golongan barang	(196.577.866,15)	0,00	0,00	0,00	(196.577.866,15)
6	Reklasifikasi ke aset lainnya	(8.219.012.868,01)	0,00	0,00	0,00	(8.219.012.868,01)
7	Jumlah Pengurangan (3+4+5+6)	(40.757.729.219,11)	(111.999.800,00)	(690.204.816,33)	0,00	(41.559.933.835,44)
8	PENAMBAHAN AKUMULASI:					
9	Koreksi kurang catat	(3.292.393.259,33)	0,00	0,00	0,00	(3.292.393.259,33)
10	Reklasifikasi antar golongan barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Reklasifikasi dari aset tetap	0,00	0,00	(8.218.812.868,01)	0,00	(8.218.812.868,01)
12	Jumlah Penambahan (9+10+11)	(3.292.393.259,33)	0,00	(8.218.812.868,01)	0,00	(11.511.206.127,34)
13	Total saldo akumulasi penyusutan sebelum beban penyusutan/beban amortisasi (1-7+12)	2.254.318.675.133,30)	(42.930.315.871,27)	(37.101.404.675,57)	0,00	(2.334.350.395.680,50)
14	Saldo akhir akumulasi penyusutan 2024	(2.416.844.142.428,59)	(46.806.103.554,67)	(37.101.404.675,93)	0,00	(2.500.751.650.659,19)
15	Beban Penyusutan / amortisasi akhir (14-13)	(162.525.467.295,29)	(3.875.787.683,40)	0,00	0,00	(166.401.254.978,69)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
j. Beban Penyisihan Piutang	3.539.101.656,51	3.554.645.598,01

Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.539.101.656,51 dan Rp3.554.645.598,01, jumlah penyisihan piutang tak tertagih di neraca per 31 Desember 2025.

Tabel 367. Penyisihan Piutang Dengan Beban Penyisihan Piutang

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penyisihan piutang 2024	19.574.654.478,48
2	Koreksi saldo awal penyisihan piutang	159.726.865,40
3	Penyisihan piutang setelah koreksi	19.734.381.343,88
4	Penyisihan piutang 2025	23.073.707.247,15
5	Reklas penyisihan piutang ke pendapatan-LO	74.960.753,24
6	Penghapusan Penyisihan piutang	124.815.000,00
7	Beban penyisihan piutang 2025 (4+5+6-3)	3.539.101.656,51

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
k. Beban Transfer	177.332.307.211,00	142.284.449.948,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer dimaksud adalah beban bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang yang menjadi beban Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp177.332.307.211,00 dan Rp142.284.449.948,00, termasuk pula bantuan keuangan kepada desa.

Tabel 368. Daftar Rincian Transfer Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Beban Transfer	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Bagi Hasil	7.603.600.035,00	8.473.188.772,00
3	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	6.653.065.657,00	7.294.208.928,00
4	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	950.534.378,00	1.178.979.844,00
5	Beban Bantuan Keuangan	169.728.707.176,00	133.811.261.176,00
6	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	125.091.799.200,00	118.632.000.000,00
7	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	44.636.907.976,00	15.179.261.176,00
	JUMLAH	177.332.307.211,00	142.284.449.948,00

Tabel 369. Daftar Rincian Transfer LRA dan LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Nama Akun Belanja	Belanja Transfer - LRA	Penambahan - LO	Pengurangan - LO		Total Beban Transfer - LO
			Utang Belanja transfer 2025	Pembayaran utang belanja transfer 2024	Penyaluran Dana Desa (DD) langsung ke RKD (Rekening Kas Desa) tanpa melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4) - (5+6)
1	Belanja Bagi Hasil	12.693.142.962,00	3.383.645.845,00	8.473.188.772,00	0,00	7.603.600.035,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.966.870.605,00	2.980.403.980,00	7.294.208.928,00	0,00	6.653.065.657,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.966.870.605,00	2.980.403.980,00	7.294.208.928,00	0,00	6.653.065.657,00
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.966.870.605,00	2.980.403.980,00	7.294.208.928,00	0,00	6.653.065.657,00
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.726.272.357,00	403.241.865,00	1.178.979.844,00	0,00	950.534.378,00
6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.726.272.357,00	403.241.865,00	1.178.979.844,00	0,00	950.534.378,00

No	Nama Akun Belanja	Belanja Transfer - LRA	Penambahan - LO	Pengurangan - LO		Total Beban Transfer - LO
			Utang Belanja transfer 2025	Pembayaran utang belanja transfer 2024	Penyaluran Dana Desa (DD) langsung ke RKD (Rekening Kas Desa) tanpa melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)	
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4) - (5+6)
7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.726.272.357,00	403.241.865,00	1.178.979.844,00	0,00	950.534.378,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	361.215.422.110,00	0,00	0,00	191.486.714.934,00	169.728.707.176,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	361.215.422.110,00	0,00	0,00	191.486.714.934,00	169.728.707.176,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	361.215.422.110,00	0,00	0,00	191.486.714.934,00	169.728.707.176,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	44.636.907.976,00	0,00	0,00	0,00	44.636.907.976,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	191.486.714.934,00	0,00	0,00	191.486.714.934,00	0,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	125.091.799.200,00	0,00	0,00	0,00	125.091.799.200,00
	JUMLAH	373.908.565.072,00	3.383.645.845,00	8.473.188.772,00	191.486.714.934,00	177.332.307.211,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
I. Beban Lain - lain	801.184.051,00	2.605.564.003,00

Beban Lain-lain merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan. beban jasa. beban pemeliharaan. beban perjalanan dinas. seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel. Beban Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp801.184.051,00 dan Rp2.605.564.003,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 370. Daftar Rincian Beban Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Beban Lainnya	Dalam Rupiah	
		31-Dec-25 (Rp)	31-Dec-24 (Rp)
1	2	3	4
	Beban Barang Tak Habis Pakai	97.481.399,00	334.524.477,00
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	441.860,00	33.444.000,00
2	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	97.039.539,00	267.715.500,00
3	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	33.364.977,00
	Beban Peralatan dan Mesin	703.702.652,00	2.271.039.526,00
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	3.400.000,00

No	Beban Lainnya	31-Dec-25	31-Dec-24
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	22.990.000,00
6	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	189.165.803,00	1.793.739.800,00
7	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	5.690.000,00
8	Beban Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	240.663.460,00	272.232.950,00
9	Beban Peralatan dan mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.950.000,00
10	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	45.310.200,00	19.900.000,00
11	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	7.293.790,00	1.900.000,00
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	3.583.080,00	0,00
13	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum	55.335.842,00	15.502.462,00
14	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Gigi	5.511.930,00	0,00
15	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	3.529.000,00
16	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	4.762.700,00	2.627.914,00
17	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	0,00	60.283.800,00
18	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	0,00	56.733.600,00
19	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	133.221.661,00	0,00
20	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.599.993,00	7.760.000,00
21	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	10.454.993,00	2.800.000,00
22	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	799.200,00	0,00
	Jumlah	801.184.051,00	2.605.564.003,00

Tabel 371. Hubungan Beban Lain-lain dengan Belanja Lain-lain Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Lainnya LRA	Penambahan - LO				Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
			Belanja BLUD	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Reklas Aset Tetap yang menjadi Ekstrakomptabel	Reklas dari Belanja Persediaan ke Belanja Lainnya	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 =(3+4+5+6+7)- (8+9+10)
1	Belanja Barang Tak Habis Pakai	96.639.539,00	0,00	841.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.481.399,00
2	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	441.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.860,00
3	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	96.639.539,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.039.539,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin	320.760.506,00	96.871.006,00	328.434.526,00	800.000,00	86.459.900,00	62.294.930,00	67.328.356,00	0,00	703.702.652,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	131.593.296,00	27.000.750,00	48.322.507,00	0,00	16.000.000,00	33.750.750,00	0,00	0,00	189.165.803,00
6	Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.099.560,00	42.666.041,00	208.414.200,00	0,00	25.149.700,00	0,00	42.666.041,00	0,00	240.663.460,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	45.310.200,00	0,00	0,00	0,00	45.310.200,00
8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	535.000,00	0,00	6.758.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293.790,00
9	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	3.583.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.080,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Umum	3.402.150,00	21.170.120,00	48.176.342,00	0,00	0,00	0,00	17.412.770,00	0,00	55.335.842,00
11	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Gigi	6.727.380,00	2.205.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.050,00	0,00	5.511.930,00
11	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	3.828.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.495,00	0,00	0,00
12	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	800.000,00	0,00	3.962.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762.700,00
13	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	161.765.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.544.180,00	0,00	0,00	133.221.661,00
14	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	6.799.993,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599.993,00
15	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.454.999,00	0,00	5.999.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454.993,00
16	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.200,00
17	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.519.059.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519.059.448,00	0,00

6

NO	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Lainnya LRA	Penambahan - LO				Pengurangan - LO			Jumlah Beban Lainnya (LO)
			Belanja BLUD	Reklas dari Belanja Modal Tidak Menambah Aset tetap	Reklas Aset Tetap yang menjadi Ekstrakomptabel	Reklas dari Belanja Persediaan ke Belanja Lainnya	Reklas Dari Belanja Lainnya Menambah Aset Tetap	Reklas ke Beban Persediaan karena menghasilkan barang persediaan	Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 =(3+4+5+6+7)- (8+9+10)
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.519.059.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519.059.448,00	0,00
19	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.104.804.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.804.448,00	0,00
20	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
21	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	79.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.005.000,00	0,00
22	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	13.378.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378.900.000,00	0,00
23	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.051.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.200.000,00	0,00
25	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	259.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200.000,00	0,00
26	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	1.600.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.150.000,00	0,00
	Jumlah	18.936.459.493,00	96.871.006,00	329.276.386,00	800.000,00	86.459.900,00	62.294.930,00	67.328.356,00	18.519.059.448,00	801.184.051,00

6

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	2.037.400.200,00

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.037.400.200,00. Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak melakukan inventarisasi, validasi dan penilaian.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
b. Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	(8.193.879.441,36)	(4.216.356.192,74)

Defisit Penghapusan Aset Non Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp8.193.879.441,36) dan (Rp4.216.356.192,74). Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2025 terinci sebagai berikut:

Tabel 372. Daftar Defisit Penghapusan Aset Non Lancar Tahun 2025

Dalam Rupiah				
Uraian		No. SK Penghapusan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Penghapusan Aset Tetap beserta akumulasi penyusutannya karena ada SK Penghapusan Aset Tetap				
A	ASET TETAP TANAH			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SK Sekda Nomor : 100.3.3.5/7/KEP/427.12/2024	0,00	(95.855.207,00)
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SK Sekda 100.3.3.5/68/KEP/427.12/2025	(25.780.000,00)	0,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	SK Sekda 100.3.3.5/11/KEP/427.12/2025	(4.014.411.483,00)	0,00
4	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	SK Sekda 100.3.3.5/5/KEP/427.12/2025	(65.640.500,00)	0,00
JUMLAH			(4.105.831.983,00)	(95.855.207,00)
B	ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN			
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	100.3.3.5/55/KEP/427.12/2024	0,00	(775.546.500,00)
2	DINAS PERHUBUNGAN	100.3.3.5/46/KEP/427.12/2024	(2.618.000,00)	(32.260.000,00)
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SK Sekda 100.3.3.5/78/KEP/427.12/2025	(6.210.000,00)	0,00
JUMLAH			(8.828.000,00)	(807.806.500,00)

Uraian		No. SK Penghapusan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
C	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN			
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	100.3.3.5/55/KEP/427.12/2024	0,00	310.218.600,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	100.3.3.5/46/KEP/427.12/2024	0,00	4.032.500,00
JUMLAH			0,00	314.251.100,00
D	ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	100.3.3.5/16/KEP/427.12/2024	0,00	(62.871.120,00)
2	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD dr. HARYOTO	100.3.3.5/50/KEP/427.12/2024	0,00	(93.279.000,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	100.3.3.5/16/KEP/427.12/2024	0,00	(223.411.680,00)
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.3.3.5/30/KEP/427.12/2024	0,00	(744.445.864,00)
5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.3.3.5/50/KEP/427.12/2024	(18.139.040,78)	(1.365.086.597,54)
6	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SK Sekda 100.3.3.5/14/KEP/427.12/2025	(1.593.331.516,88)	0,00
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SK Sekda 100.3.3.5/82/KEP/427.12/2025	0,00	0,00
8	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	SK Sekda 100.3.3.5/82/KEP/427.12/2025	(8.500.000,00)	0,00
9	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	SK Sekda 100.3.3.5/82/KEP/427.12/2025	(54.314.437,50)	0,00
JUMLAH			(1.674.284.995,16)	(2.489.094.261,54)
E	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	100.3.3.5/16/KEP/427.12/2024	0,00	6.287.112,00
2	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD dr. HARYOTO	100.3.3.5/50/KEP/427.12/2024	0,00	30.782.070,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	100.3.3.5/16/KEP/427.12/2024	0,00	22.341.168,00
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.3.3.5/30/KEP/427.12/2024	0,00	394.745.170,61
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	100.3.3.5/50/KEP/427.12/2024	0,00	385092498,33
JUMLAH			0,00	839.248.018,94
F	ASET TETAP JALAN, JARINGAN DAN INSTALASI			
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	SK Sekda 100.3.3.5/11/KEP/427.12/2025	(1.660.270.085,21)	0,00
JUMLAH			(1.660.270.085,21)	0,00
G	ASET TETAP LAINNYA			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100.3.3.5/30/KEP/427.12/2024	0,00	(175.679.206,94)
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD PASIRIAN		(42.735.000,00)	0,00
JUMLAH			(42.735.000,00)	(175.679.206,94)

Uraian		No. SK Penghapusan	Realisasi 2025	Realisasi 2024
H	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan			
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD PASIRIAN	SK Sekda 100.3.3.5/22/KEP/427.12/2025	0,00	(7.800.000,00)
JUMLAH			0,00	(7.800.000,00)
Penghapusan Aset Lainnya dan akumulasi penyusutan karena ada SK penghapusan Aset Lainnya				
I	ASET LAIN - LAIN			
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		0,00	(522.497.250,20)
JUMLAH			0,00	(522.497.250,20)
Penghapusan Aset Lain-lain dan akumulasi penyusutan karena ada SK penghapusan Aset Lain-lain				
J	ASET LAIN - LAIN			
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS CANDIPURO		0,00	(8.590,00)
2	DINAS PARIWISATA		0,00	(51.960.145,00)
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		0,00	(11.047.850,00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		0,00	(1.208.106.301,00)
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SK Sekda 100.3.3.5/8/KEP/427.12/2025	(701.929.377,99)	0,00
JUMLAH			(701.929.377,99)	(1.271.122.886,00)
TOTAL			(8.193.879.441,36)	(4.216.356.192,74)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	(609.013.052,68)	(764.018.305,17)

Jumlah tersebut merupakan nilai barang cetakan (karcis), nilai obat-obatan dan persediaan bahan lainnya yang sudah kedaluwarsa di Tahun 2025 sebesar (Rp609.013.052,68) dan tahun 2024 sebesar (Rp764.018.305,17). Rincian karcis dan obat-obatan yang sudah kedaluwarsa dan rusak terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 373. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

Dalam Rupiah				
NO	NAMA SKPD	JENIS PERSEDIAAN KEDALUWARSA	REALISASI 2025	REALISASI 2024
1	DISKOPINDAG	Persediaan Cetak Karcis Kedaluwarsa	0,00	(2.041.545,00)
2	DKPP	Persediaan Cetak Karcis Kedaluwarsa	0,00	(1.577.210,00)
3	DISPORA	Persediaan Cetak Karcis Kedaluwarsa	0,00	(2.600.163,50)
4	DISHUB	Persediaan Cetak Karcis Kedaluwarsa	(5.649.050,00)	0,00

NO	NAMA SKPD		JENIS PERSEDIAAN KEDALUWARSA	REALISASI 2025	REALISASI 2024
5	BPRD		Persediaan Cetak Karcis Kedaluwarsa	(50.195.000,00)	(4.875.000,00)
6	Jumlah (1 s/d 5)			(55.844.050,00)	(11.093.918,50)
9	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. HARYOTO		Persediaan Obat Kedaluwarsa	(21.145.788,33)	(6.913.182,00)
10	DINKES P2KB - UPT RSUD PASIRIAN		Persediaan Obat Kedaluwarsa	(37.645.151,72)	(13.327.287,80)
11	DINKES P2KB - UPT INSTALASI FARMASI		Persediaan Obat Kedaluwarsa	(447.879.250,14)	(388.920.291,00)
12	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PADANG		Persediaan Obat Kedaluwarsa	0,00	(1.549.215,25)
13	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS PENANGGAL		Persediaan Obat Kedaluwarsa	(363.650,00)	-
14	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS CANDIPURO		Persediaan Obat Kedaluwarsa	0,00	(3.091.738,50)
15	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS SUKODONO		Persediaan Obat Kedaluwarsa	0,00	(3.620.935,00)
16	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TEKUNG		Persediaan Obat Kedaluwarsa	(432.054,00)	(2.759.132,50)
17	Jumlah (9 s/d 16)			(507.465.894,19)	(420.181.782,05)
18	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS TEKUNG		Persediaan Bahan-Bahan Lainnya Kedaluwarsa	0,00	(3.303.075,00)
19	DINKES P2KB - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG		Persediaan Bahan-Bahan Lainnya Kedaluwarsa	0,00	(4.405.275,00)
20	DINKES P2KB - UPT RSUD PASIRIAN		Persediaan Bahan-Bahan Lainnya Kedaluwarsa	0,00	(76.724.897,96)
21	DINKES P2KB - UPT INSTALASI FARMASI		Persediaan Bahan-Bahan Lainnya Kedaluwarsa	0,00	(33.930.649,00)
22	DINKES P2KB - UPT RSUD dr. HARYOTO		Persediaan Bahan-Bahan Lainnya Kedaluwarsa	0,00	(15.501.225,00)
23	Jumlah (18 s/d 22)			0,00	(133.865.121,96)
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	0,00	(103.426.076,90)
25	49 SKPD		Aset Lain-lain	0,00	(14.918.200,94)
26	Jumlah (24 s/d 25)			0,00	(118.344.277,84)
27	KECAMATAN RANDUAGUNG		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	200.000,00	0,00
28	Jumlah (27)			200.000,00	0,00
29	PERUMDA SEMERU	Laba (Rugi)		(45.903.108,49)	(80.533.204,82)
30	Jumlah (29)			(45.903.108,49)	(80.533.204,82)
	TOTAL (6+17+23+26+28+30)			(609.013.052,68)	(764.018.305,17)

5.4.4 POS-POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan kejadian luar biasa yang yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran; tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah, sehingga penyajian Pos-pos luar biasa terpisah dari Pos-pos operasional dan non operasional. Pos-pos luar biasa meliputi pendapatan luar biasa dan beban luar biasa.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
a. Beban Luar Biasa	(3.191.696.476,00)	(2.518.140.429,00)

Beban Luar Biasa Tahun 2025 sebesar (Rp3.191.696.476,00) dan Tahun 2024 sebesar (Rp2.518.140.429,00), merupakan Beban tak terduga, yaitu merupakan kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang dan di luar kendali entitas pemerintah daerah.

Tabel 374. Beban Luar Biasa

Dalam Rupiah			
No	Beban Luar Biasa	31 Des 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Tak Terduga	(3.191.696.476,00)	(2.518.140.429,00)
	JUMLAH (LO)	(3.191.696.476,00)	(2.518.140.429,00)

Tabel 375. Hubungan Belanja Luar Biasa dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025

Dalam Rupiah					
No	Nama Akun Belanja	Jumlah Belanja Tidak Terduga LRA	Pengurangan		Total Beban Tidak Terduga - LO
			Reklas Belanja tidak terduga yang menjadi Aset Tetap	Pembayaran utang Bantuan Keuangan dari Pemprop Jatim tahun 2023	
1	2	3	4	5	6 = 3-4-5
1	Belanja Tidak Terduga	4.007.496.476,00	260.800.000,00	555.000.000,00	3.191.696.476,00
2	Belanja Tidak Terduga	4.007.496.476,00	260.800.000,00	555.000.000,00	3.191.696.476,00
	JUMLAH (LO)	4.007.496.476,00	260.800.000,00	555.000.000,00	3.191.696.476,00

Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	<u>279.675.182.010,37</u>	<u>196.077.309.667,29</u>

Surplus (Defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut:

Tabel 376. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Surplus (defisit)	2025	2024
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	291.669.770.980,41	201.538.424.394,20
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	(8.802.892.494,04)	(2.942.974.297,91)
3	Pos Luar Biasa	(3.191.696.476,00)	(2.518.140.429,00)
	Jumlah	279.675.182.010,37	196.077.309.667,29

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Tujuan dari LAK adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas pemerintah kabupaten Lumajang Tahun 2025 merupakan Arus Kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	2.226.335.557.443,52	2.293.895.944.229,91
Jumlah Arus Kas Keluar	1.909.831.030.391,36	2.028.651.310.593,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	316.504.527.052,16	265.244.633.636,22

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber-sumber pendanaan dari luar. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 377. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah		
URAIAN	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	179.795.142.722,20	116.114.772.143,00
Retribusi Daerah	275.107.208.572,00	261.093.948.672,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.909.911.408,20	6.802.256.552,09
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	19.159.591.700,12	9.558.018.092,26
Dana Bagi Hasil Pajak	28.003.574.600,00	25.877.280.462,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam)	33.606.733.000,00	40.047.486.550,00
Dana Alokasi Cukai	35.909.560.000,00	30.976.244.000,00
Dana Alokasi Umum	960.719.475.165,00	979.563.765.934,00
Dana Alokasi Khusus	340.564.964.193,00	399.599.516.811,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	220.159.902.934,00	244.170.863.000,00

URAIAN	2025	2024
Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	113.959.707.000,00	169.600.395.100,00
Dana Bagi Hasil Lainnya	12.900.254.000,00	8.197.447.500,00
Hibah	513.569.244,00	2.238.000.000,00
Pendapatan Lainnya	25.962.905,00	55.949.413,52
Jumlah Arus Kas Masuk	2.226.335.557.443,52	2.293.895.944.229,91
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	822.145.345.798,00	809.308.568.776,01
Belanja Barang dan Jasa	592.877.971.874,36	645.327.410.714,68
Belanja Bunga	0,00	1.791.485.606,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	105.752.137.801,00	190.056.893.844,00
Belanja Bantuan Sosial	11.139.513.370,00	15.130.139.400,00
Belanja Tidak Terduga	4.007.496.476,00	3.583.315.382,00
Belanja Bagi Hasil Pajak	10.966.870.605,00	6.706.632.157,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi	1.726.272.357,00	1.787.735.538,00
Belanja Bantuan Keuangan	361.215.422.110,00	354.959.129.176,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.909.831.030.391,36	2.028.651.310.593,69
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	316.504.527.052,16	265.244.633.636,22

5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	157.450.000,00	35.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	189.629.510.813,75	184.876.264.107,16
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(189.472.060.813,75)	(149.876.264.107,16)

Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

Tabel 378. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	35.000.000.000,00
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	142.816.000,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset lainnya	14.634.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	157.450.000,00	35.000.000.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00
Belanja Tanah	855.646.000,00	585.773.600,00
Belanja Peralatan dan Mesin	72.047.391.795,00	57.685.686.097,75
Belanja Gedung dan Bangunan	22.010.344.774,68	57.436.151.960,41
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	65.357.007.049,07	56.976.108.552,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	10.970.520.852,00	7.837.161.820,00
Belanja Aset Lainnya	3.388.600.343,00	3.855.382.077,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	189.629.510.813,75	184.876.264.107,16
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(189.472.060.813,75)	(149.876.264.107,16)

5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	5.625.000,00	98.335.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	64.283.084.169,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.625.000,00	(64.184.749.169,00)

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 379. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.625.000,00	98.335.000,00
Penerimaan Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Talangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.625.000,00	98.335.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Hutang	0,00	64.283.084.169,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Dana Talangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	64.283.084.169,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.625.000,00	(64.184.749.169,00)

5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah misalnya penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) dan pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang. Penerimaan/pengeluaran PFK yaitu penerimaan/penyetoran potongan-potongan SP2D seperti potongan Taspen, Taperum, Pajak Penghasilan dan PPN ke kas negara.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Jumlah Arus Kas Masuk	79.887.517.277,03	88.846.351.681,00
Jumlah Arus Kas Keluar	79.887.537.318,03	88.847.330.422,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(20.041,00)	(978.741,00)

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 380. Rincian Potongan Per Jenis Pajak Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Nama Rekening	Potongan	Setor	Saldo
1	Utang PPh 22	1.571.258.170,91	1.571.141.025,91	117.145,00
2	Utang Taspen	23.345.254.277,00	23.345.254.277,00	0,00
3	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	13.707.313.779,00	13.707.313.779,00	0,00

No	Nama Rekening	Potongan	Setor	Saldo
4	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	761.855.665,00	761.855.665,00	0,00
5	Utang Iuran Jaminan Kematian	2.285.564.422,00	2.285.564.422,00	0,00
6	Utang PPh 21	13.746.619.424,00	13.746.213.324,00	406.100,00
7	Utang PPh 23	819.999.185,00	820.274.430,00	(275.245,00)
8	Utang PPN Pusat	22.019.268.865,12	22.019.536.906,12	(268.041,00)
9	Utang PPh Pasal 4 Ayat 2	1.630.383.489,00	1.630.383.489,00	0,00
	TOTAL	79.887.517.277,03	79.887.537.318,03	(20.041,00)

Tabel 381. Daftar Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

Arus Masuk/Arus Keluar	Tahun 2025	Tahun 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	79.887.517.277,03	88.846.351.681,00
Jumlah Arus Masuk Kas	79.887.517.277,03	88.846.351.681,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	79.887.537.318,03	88.847.330.422,00
Jumlah Arus Keluar Kas	79.887.537.318,03	88.847.330.422,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(20.041,00)	(978.741,00)

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
a. Kenaikan (Penurunan) Kas	127.038.071.197,41	51.182.641.619,06

Kenaikan (Penurunan) Kas merupakan jumlah dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Tabel 382. Rincian Kenaikan Kas Tahun 2025 dan 2024

Dalam Rupiah

No	Arus Kas Bersih	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	316.504.527.052,16	265.244.633.636,22
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(189.472.060.813,75)	(149.876.264.107,16)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	5.625.000,00	(64.184.749.169,00)
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(20.041,00)	(978.741,00)
	Kenaikan (Penurunan) Kas	127.038.071.197,41	51.182.641.619,06

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
b. Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	259.634.262.438,03	208.452.255.818,97

Saldo awal kas setelah Koreksi Tahun 2025 adalah saldo akhir kas Tahun 2024, dan saldo awal kas setelah koreksi Tahun 2024 adalah saldo akhir kas Tahun 2023 Rincian Saldo Awal Kas Setelah Koreksi terinci sebagai berikut:

1. Saldo Kas di BUD	190.671.849.474,49	110.038.907.873,19
2. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	998.782,00
3. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	1.090.953,00	188.552.250,00
4. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	66.959.313.528,08	94.948.954.767,13
5. Saldo Akhir Kas Lainnya (BOS)	231.092.611,46	124.147.982,46
6. Saldo Akhir Kas Lainnya (BOK)	1.771.550.871,00	1.521.162.203,00
7. Saldo Dana Cadangan	0,00	1.629.531.961,19
8. Jumlah saldo awal kas sebelum koreksi	259.634.897.438,03	208.452.255.818,97
9. Koreksi saldo awal kas	(635.000,00)	0,00
10. Saldo awal kas setelah koreksi (8+10)	259.634.262.438,03	208.452.255.818,97

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
c. Saldo Akhir Kas	386.672.333.635,44	259.634.897.438,03

Saldo Akhir Kas adalah saldo awal di tambah dengan kenaikan (penurunan) kas selama satu periode tertentu. Rincian saldo kas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

	2025	2025
1. Saldo Akhir Kas di BUD	291.749.912.862,52	190.671.849.474,49
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1.660.000,00	1.090.953,00
4. Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dan Puskesmas	93.661.545.815,85	66.959.313.528,08
5. Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS)	265.852.691,46	231.092.611,46
6. Saldo Akhir Kas Lainnya (BOK)	804.043.907,00	1.771.550.871,00
7. Saldo Dana Cadangan 2025	189.318.358,61	0,00
Saldo kas per 31 Desember 2025	386.672.333.635,44	259.634.897.438,03

5.6.1 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.2 EKUITAS AWAL	3.323.649.487.930,75	3.115.910.728.265,84

Saldo ekuitas awal Tahun 2025 sebesar Rp3.323.649.487.930,75 merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca Tahun 2024 *audited*. Sedangkan ekuitas awal Tahun 2024 sebesar Rp3.115.910.728.265,84 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2023 *audited*.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3 SURPLUS (DEFISIT) LO	279.675.182.010,37	196.077.309.667,29

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut:

Tabel 383. Surplus/Defisit LO
Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah			
No	Uraian	2025	2024
1	Pendapatan LO	2.197.260.777.177,49	2.181.444.627.208,79
2	Beban	1.905.591.006.197,08	1.979.906.202.814,59
3	Surplus/Defisit Dari Operasional (1-2)	291.669.770.980,41	201.538.424.394,20
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(8.802.892.494,04)	(2.942.974.297,91)
5	Pos Luar Biasa	(3.191.696.476,00)	(2.518.140.429,00)
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	279.675.182.010,37	196.077.309.667,29

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	50.713.885.935,49	11.661.449.997,62

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar pada tahun 2025 sebesar Rp50.713.885.935,49. Koreksi secara akuntansi atas adanya beberapa pos atau akun yang masih perlu disesuaikan terdiri dari:

Tabel 384. Rekapitulasi Daftar Akun Yang Dikoreksi Tahun 2025

Dalam Rupiah		
No.	Akun yang dikoreksi	Jumlah (Rp)
1	Piutang Lainnya	(635.000,00)
1.1	Kas di BLUD	(635.000,00)
2	Piutang Pajak	4.697.104,00
2.1	Piutang Pajak Reklame	(525.000,00)
2.2	Piutang Pajak Air Tanah	957.304,00
2.3	Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	3.627.000,00
2.4	Piutang PBJT-Jasa Parkir	120.000,00
2.5	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	517.800,00
3	Piutang Retribusi	(5.161.944,00)
3.1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(5.161.944,00)
4	Piutang Lain-lain	36.786.687.000,00
4.1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	2.344.538.000,00
4.2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	7.213.375.000,00
4.3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	1.934.478.000,00
4.4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	7.499.471.000,00
4.5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	17.447.878.000,00
4.6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	6.180.000,00
4.7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	10.745.000,00
4.8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.442.699.000,00
4.9	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	30.274.000,00
4.10	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	(1.142.951.000,00)
5	Penyisihan Piutang	(159.726.865,40)
5.1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(1.507.500,00)
5.2	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(95.730,40)
5.3	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Perhotelan	(1.813.500,00)
5.4	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Parkir	(12.000,00)
5.5	Penyisihan Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	(51.780,00)
5.6	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	(75.142.500,00)

No.	Akun yang dikoreksi	Jumlah (Rp)
5.7	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	260.325,00
5.8	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(81.364.180,00)
6	Persediaan	6.907.121,00
6.1	Alat Tulis Kantor	1.200.000,00
6.2	Isi Tabung Gas	3.007.121,00
6.3	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.700.000,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.133.637.218,70
7.1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.133.637.218,70
8	Aset Tetap	8.424.875.760,21
8.1	Tanah	2.111.701.930,00
8.2	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(212.077.926,66)
8.3	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(195.505.698,52)
8.4	Akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	6.720.757.455,39
9.	Aset Lainnya	969.332,98
9.1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	969.332,98
10	Pendapatan diterima dimuka	(97.500,00)
10.1	Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Pelayanan Pasar	(97.500,00)
11	Utang Belanja	324.413.252,00
11.1	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	105.524.524,00
11.2	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	110.084.800,00
11.3	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	(288.072,00)
11.4	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	(230.448,00)
11.5	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	74.705.236,00
11.6	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	(158.872,00)
11.7	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.776.084,00
12	Utang Jangka Pendek	(802.679.544,00)
12.1	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	(802.679.544,00)
	Total	50.713.885.935,49

Berdasarkan daftar rekapitulasi daftar akun-akun yang dikoreksi Tahun 2025 di atas, di bawah ini dijelaskan daftar perincian obyek akun yang dikoreksi dan daftar OPD yang melakukan koreksi terhadap saldo akhir akun Tahun 2024. Berikut daftar rinciannya:

Tabel 385. Koreksi Kas di BLUD

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	(635.000,00)	Mencatat Koreksi lebih catat saldo akhir 2024 karena Kesalahan Tranfer Bank Jatim Atas Pendapatan Puskesmas Pronojiwo tahun 2024 yang ditransferkan ke rekening puskesmas tempursari
Total		(635.000,00)	

Tabel 386. Koreksi Piutang Pajak Reklame

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(525.000,00)	Koreksi lebih catat saldo awal piutang Reklame karena adanya SK Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah nomor 188/97/427.74/2024 tentang pembatalan SKPD Reklame atas WP PT. Jalur Mandiri Tahun Pajak 2023 - BPRD
Total		(525.000,00)	

Tabel 387. Koreksi Piutang Pajak Air Tanah

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	957.304,00	Koreksi Kurang catat saldo awal piutang pajak air tanah karena terdapat SKP tahun 2023 yang belum terbayar dan tidak tercatat didalam Neraca tahun 2023
Total		957.304,00	

Tabel 388. Koreksi Piutang PBJT - Jasa Perhotelan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	3.627.000,00	Kurang catat saldo awal piutang pajak barang dan jasa tertentu(PBJT) Jasa Perhotelan karena ada SKP yang belum terbayar dan belum dicatat sebagai piutang pada tahun 2020
Total		3.627.000,00	

Tabel 389. Koreksi Piutang PBJT - Jasa Parkir

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	120.000,00	Kurang catat saldo awal piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Jasa Parkir karena ada SKP yang belum terbayar dan belum dicatat sebagai piutang pada tahun 2023
Total		120.000,00	

Tabel 390. Koreksi Piutang PBJT – Penyedia Jasa Boga atau Katering

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	517.800,00	Kurang catat saldo awal piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Penyedia Jasa Boga atau Katering karena ada SKP yang belum terbayar dan belum dicatat sebagai piutang pada tahun 2023 sebesar Rp162.800, tahun 2024 sebesar Rp355.000
Total		517.800,00	

Tabel 391. Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD PASIRIAN	(5.161.944,00)	Mencatat Koreksi lebih catat saldo akhir 2024 Piutang Retribusi dikarenakan klaim ditolak oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan surat konfirmasi BPJS ketenagakerjaan tgl 22 Januari 2026 Nomor B/2843/012026
Total		(5.161.944,00)	

Tabel 392. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum - DBH PBB

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	2.344.538.000,00	koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH PBB tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		2.344.538.000,00	

Tabel 393. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	7.213.375.000,00	koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH PPh Pasal 21 tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		7.213.375.000,00	

**Tabel 394. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/
WPOPDN**

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.934.478.000,00	koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		1.934.478.000,00	

Tabel 395. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum - DBH CHT

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	7.499.471.000,00	koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH CHT tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		7.499.471.000,00	

Tabel 396. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	17.447.878.000,00	koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH SDA Minyak Bumi tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		17.447.878.000,00	

Tabel 397. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	6.180.000,00	koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		6.180.000,00	



Tabel 398. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	10.745.000,00	koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		10.745.000,00	

Tabel 399. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.442.699.000,00	koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		1.442.699.000,00	

Tabel 400. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan - PSDH

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	30.274.000,00	Koreksi kurang catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH SDA Kehutanan-PSDH tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		30.274.000,00	

Tabel 401. Koreksi Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	(1.142.951.000,00)	koreksi lebih catat saldo awal piutang bagi hasil transfer pemerintah pusat-DBH SDA Gas Bumi tahun 2023 dan 2024 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025
Total		(1.142.951.000,00)	



**Tabel 402. Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame
Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(1.560.000,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir piutang pajak reklame tahun 2024 a.n MAULANA YUSUF karena tidak dicatat dalam kertas kerja penyisihan piutang tahun 2024
2	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	52.500,00	Koreksi lebih catat saldo awal penyisihan piutang Reklame karena adanya SK Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah nomor 188/97/427.74/2024 tentang pembatalan SKPD Reklame atas WP PT. Jalur Mandiri Tahun Pajak 2023 – BPRD
Total		(1.507.500,00)	

Tabel 403. Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(95.730,40)	Koreksi Kurang catat saldo awal penyisihan piutang pajak air tanah karena terdapat SKP tahun 2023 yang belum terbayar dan tidak tercatat didalam Neraca tahun 2023
Total		(95.730,40)	

Tabel 404. Koreksi Penyisihan Piutang PBJT - Jasa Perhotelan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(1.813.500,00)	Koreksi Kurang catat saldo awal penyisihan piutang pajak barang dan jasa tertentu(PBJT) Jasa Perhotelan karena ada SKP yang belum terbayar dan belum dicatat sebagai piutang pada tahun 2020
Total		(1.813.500,00)	

Tabel 405. Koreksi Penyisihan Piutang PBJT - Jasa Parkir

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(12.000,00)	koreksi Kurang catat saldo awal penyisihan piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Jasa Parkir karena ada SKP yang belum terbayar dan belum dicatat sebagai piutang pada tahun 2023
Total		(12.000,00)	

Tabel 406. Koreksi Penyisihan Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering
Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(51.780,00)	Kurang catat saldo awal penyisihan piutang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) Penyedia Jasa Boga atau Katering karena ada SKP yang belum terbayar dan belum dicatat sebagai piutang pada tahun 2023 sebesar Rp162.800, tahun 2024 sebesar Rp355.000
Total		(51.780,00)	

Tabel 407. Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan - MBLB
Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(75.142.500,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir penyisihan piutang pajak MBLB karena kelebihan nilai pengurang penyisihan piutang tahun 2024 disebabkan kesalahan menghitung ditambah dengan nilai pengurang piutang atas nama herman, vivi dan rahman
Total		(75.142.500,00)	

Tabel 408. Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - PUSKESMAS GESANG	260.325,00	Koreksi lebih catat saldo awal penyisihan piutang pelayanan kesehatan di puskesmas Gesang karena diketahui bahwa terdapat saldo penyisihan piutang yang dibentuk pada tahun 2024 yang tidak lagi mencerminkan kondisi piutang yang sebenarnya, karena kesalahan pengakuan piutang tahun 2024 yang seharusnya merupakan penerimaan ditahun 2025 sebab hasil umpan balik verifikasi bpjs adalah di tahun 2025 sehingga bukan merupakan piutang 2024, hal ini menyebabkan perhitungan penyisihan piutang 2024 lebih saji sebesar Rp260.325,00.
Total		260.325,00	

Tabel 409. Koreksi Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD PASIRIAN	467.901,34	Mencatat Koreksi lebih catat Saldo Akhir Penyisihan Piutang Retribusi pelayanan kesehatan 2024 klaim ditolak oleh BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan surat konfirmasi BPJS ketenagakerjaan tgl 22 Januari 2026 Nomor B/2843/012026



No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD PASIRIAN	(81.832.081,34)	koreksi kurang catat saldo awal penyisihan piutang retribusi pada RSUD sebesar Rp86.020.317,74 dan lebih catat penyisihan piutang retribusi pada RSUD sebesar Rp4.188.236,40 karena terdapat kesalahan dalam perhitungan penyisihan piutang di RSUD Pasirian dan Haryoto. Kesalahan perhitungan ini berasal dari penentuan persentase penyisihan piutang yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang No. 83 Tahun 2022 dimana tarif yang digunakan untuk perhitungan penyisihan piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan menggunakan tarif penyisihan piutang lainnya bukan menggunakan tarif penyisihan piutang retribusi)
Total		(81.364.180,00)	

Tabel 410. Koreksi Persediaan Alat Tulis Kantor

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Kecamatan Summersuko	1.200.000,00	Koreksi kurang catat saldo akhir persediaan ATK tahun 2024 karena kesalahan penulisan barang pada daftar persediaan 2024 yang seharusnya jumlah barang bolpoint sejumlah 6 pcs dengan harga satuan Rp600.000,00 salah ketik menjadi -6 pcs dengan harga satuan - Rp600.000
Total		1.200.000,00	

Tabel 411. Koreksi Persediaan Isi Tabung Gas

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Sumbersari	3.007.121,00	Mencatat koreksi kurang catat saldo persediaan isi tabung gas 2024 karena hasil pemeriksaan fisik inspektorat
Total		3.007.121,00	

Tabel 412. Koreksi Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Summersari	2.700.000,00	Mencatat koreksi kurang catat saldo persediaan isi tabung gas 2024 karena hasil pemeriksaan fisik inspektorat
Total		2.700.000,00	

Tabel 413. Penyeritaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	36.433.959,42	a) Koreksi kurang catat saldo akhir penyeritaan modal (PD Semeru) thn 2024 atas tagihan pajak thn 2020 sd 2024 terhadap perhitungan hutang pajak (PPN) didasarkan pada hitungannya AR (account representatif/ petugas KPP Pratama) tetapi tidak didasarkan pada bukti tagihan pajak sehingga hutang pajak senilai Rp.70.513.743 tidak terdapat bukti tagihan pajaknya; b) Koreksi lebih catat saldo akhir penyeritaan modal (PD.Semeru) atas aset kantor karena Ada aset yang sudah laku terjual tetapi masih tercatat dalam neraca dan adanya kesalahan pencatatan nilai aset tetap yang seharusnya masuk kedalam barang ekstrakomptabel senilai Rp30.951.066,94 ; dan c) Koreksi lebih catat atas penyisihan piutang tak tertagih 2024, karena kesalahan hitung persentase penyisihan piutang 2024 senilai Rp3.128.716,64
2	Badan Pengelola Keuangan Daerah	6.066.769.101,28	a) Koreksi kurang catat saldo akhir penyeritaan modal (PDAM) 2024 atas nilai cadangan umum tahun 2017 s/d 2024 dineraca yang sebelumnya diakui sebagai kewajiban dan berdasarkan SAK entitas Privat bagi BUMD Air Minum Perpamsi agustus 2024 bahwa Dana Cadangan merupakan komponen ekuitas sehingga harus diakui sebagai penambah penyeritaan modal BUMD senilai Rp6.747.216.502,50; b) Koreksi kurang catat saldo penyeritaan modal (PDAM) berdasarkan hasil audit KAP 2024 atas penerimaan dari bantuan dari Bank Tabungan Negara tahun 2017 senilai Rp198.194.000, bantuan dari IUWASH PLUS tahun 2014 senilai Rp152.584.414, hadiah dari BPR Jatim tahun 2022, 2023 dan 2024 senilai Rp2.180.250 yang tercatat sebelumnya sebagai pendapatan ditanggihkan di neraca tetapi seharusnya merupakan komponen pendapatan dilaporkan Laba/Rugi PDAM ; dan c) Koreksi lebih catat saldo akhir penyeritaan modal (PDAM) 2024 atas hasil audit KAP terhadap laba perusahaan sebesar Rp1.033.406.066,07 (laba unaudited sebesar Rp 4.060.211.188,07 menjadi audited sebesar Rp3.026.805.122,00)
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	30.434.158,00	Koreksi kurang catat saldo awal penyeritaan modal BUMD TIRTA MAHAMERU karena adanya penyajian kembali atas LK BUMD TIRTA MAHAMERU audited 2024 berdasarkan penerapan kebijakan akuntansi sesuai SAK Indonesia untuk entitas privat yang mengakibatkan penyesuaian kebijakan akuntansi tertentu dan berdampak pada perubahan akun aset pajak tangguhan, laba tahun berjalan dan manfaat (beban) pajak tangguhan
Total		6.133.637.218,70	



Tabel 414. Koreksi Aset Tetap Tanah

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	1.768.826.880,00	Koreksi kurang catat saldo akhir tanah 2024 karena Hasil Penilaian BMD berupa tanah berdasarkan SK Bupati Lumajang No.103.3.3.2/222/KEP/427.12/2025
2	Kecamatan Lumajang - Kelurahan Kepuharjo	342.875.050,00	Koreksi kurang catat saldo akhir tanah 2024 karena Hasil Penilaian BMD berupa tanah berdasarkan SK Bupati Lumajang nomor 100.3.3.2/667/KEP/427.12/2025
Total		2.111.701.930,00	

Tabel 415. Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.541.400,00	Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 2025
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	0,01	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin
3	Kecamatan Pronojiwo	(1.498.750,00)	Mencatat Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2024
4	Kecamatan Senduro	376.000,00	Mencatat Koreksi Saldo Awal (Lebih Catat) Akumulasi Penyusutan Tahun 2025
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(14.144.500,00)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2024
6	Dinas Perhubungan	(490.000,00)	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 2024
7	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Pasrujambe	(132.076,68)	Mencatat koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024
8	Dinas Lingkungan Hidup	0,01	Koreksi karena kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan 2025
9	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	(198.730.000,00)	Mencatat Koreksi karena Kurang Catat Saldo akhir Akumulasi penyusutan 2025
Total		(212.077.926,66)	

Tabel 416. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT INSTALASI FARMASI	(3.910.706,51)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
2	DINAS TENAGA KERJA	(10.871.038,27)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
3	KECAMATAN SENDURO	(7.072.564,82)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(434.609,88)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
5	KECAMATAN PRONOJIWO	(124.798,10)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
6	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	(235.107,43)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
7	KECAMATAN KUNIR	(241.197,60)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
8	KECAMATAN KLAKAH	269.863,28	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
9	KECAMATAN TEMPURSARI	(184.069,99)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
10	KECAMATAN YOSOWILANGUN	(185.899,66)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(249.543,97)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
12	KECAMATAN TEMPEH	25.353.448,41	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(2.679.987,38)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
14	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	(137.494,20)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
15	KECAMATAN PASIRIAN	(529.445,36)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
16	KECAMATAN CANDIPURO	(212.973.282,81)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
17	KECAMATAN SENDURO	6.380.835,06	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(2.057.601,23)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(298.272,10)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
20	KECAMATAN PASRUJAMBE	(248.641,35)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
21	KECAMATAN PADANG	(255.423,73)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
22	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(2.337.126,94)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
23	DINAS PERHUBUNGAN	(1.712.839,54)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
24	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(5.629.737,65)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
25	DINAS PERIKANAN	(1.574.713,70)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
26	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	36.758,27	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
27	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(1.430.150,70)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
28	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(608.410,24)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
29	DINAS PARIWISATA	(8.614.455,74)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
30	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	(1.188.610,30)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(779.857,66)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
32	KECAMATAN RANUYOSO	(203.429,32)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(157.400,37)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
34	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS SUMBERSARI	46.708,36	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
35	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL	(337.349,70)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
36	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	41.783,82	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
37	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TEMPEH	(34.933,34)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
38	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	(497.863,19)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
39	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	1.495.824,87	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
40	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	77.783,46	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
41	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	(621.242,97)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
42	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	68.919,67	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
43	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS JATIROTO	115.056,10	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
44	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	169.924,55	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
45	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS KLAKAH	139.679,35	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
46	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TEKUNG	47.887,17	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
47	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS BADES	(92.819,12)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
48	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS KUNIR	(376.794,26)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
49	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS GESANG	(397.495,82)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
50	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	(415.846,92)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
51	SEKRETARIAT DPRD	(6.817.666,67)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
52	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD dr. HARYOTO	(9.747.388,35)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
53	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN	(690.898,79)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
54	KECAMATAN JATIROTO	(147.828,71)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
55	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(396.586,27)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
56	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(3.163.784,52)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
57	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	509.186,91	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
58	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	(56.005,92)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
59	KECAMATAN GUCIALIT	50.962.185,09	Koreksi karena lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan tahun 2025
60	KECAMATAN GUCIALIT	(5.136,52)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
61	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(34.769.668,83)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
62	KECAMATAN SUMBERSUKO	(120.805,47)	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Karena Salah Rumus Tahun 2024
63	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	546.242.281,36	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
64	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	(106.803,50)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
65	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	(101.399,66)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
66	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS SENDURO	298.973,98	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
67	KECAMATAN SUKODONO	(158.421,48)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
68	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(216.689,65)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
69	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(7.274.610,32)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
70	KECAMATAN TEKUNG	(148.512,51)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
71	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	(3.051.995,53)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
72	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUNAN	(290.826,24)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
73	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUNAN	(226.644,25)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
74	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN TOMPOKERSAN	(91.760,66)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
75	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	(276.936,18)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
76	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	(65.086,74)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
77	KECAMATAN LUMAJANG	(4.377,50)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
78	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	(123.320,94)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
79	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	(112.477,05)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
80	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUNAN	(0,01)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
81	KECAMATAN LUMAJANG	4.302.496,41	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
82	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	(0,01)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
83	KECAMATAN RANDUAGUNG	(187.278,72)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan gedung tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
84	INSPEKTORAT KABUPATEN	(225.542,75)	Koreksi kurang catat saldo awal penyusutan Gedung dan bangunan karena kesalahan rumus perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024
85	SEKRETARIAT DPRD	10.409.187,16	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
86	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	51.357,78	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
87	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	591.795,77	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
88	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(33.084.939,95)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
89	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(251.952,66)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
90	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	86.290.107,00	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
91	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.967.403,42	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
92	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,02	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
93	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	120.839.718,59	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
94	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,02	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
95	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.673.561,93	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
96	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(632.103,32)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
97	DINAS PARIWISATA	13.730.503,61	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
98	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	7.414.029,10	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
99	DINAS PERHUBUNGAN	9.904.809,62	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(1.786.805,17)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
101	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(2.113.221,87)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
102	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.069.961,41	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
103	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	2.238.359,28	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
104	KECAMATAN LUMAJANG	18.415.530,28	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
105	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN CITRODIWANGSAN	(364.846.315,21)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
106	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN DITOTRUMAN	3.371.153,69	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
107	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOTRUMAN	4.979.119,11	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
108	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	13.763.342,59	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
109	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN TOMPOKERSAN	1.576.794,89	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
110	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	15.221.579,25	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
111	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN KEPUHARJO	7.380.283,62	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
112	KECAMATAN SUKODONO	(1.886.891,48)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
113	KECAMATAN PADANG	761.828,83	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
114	KECAMATAN GUCIALIT	117.044,31	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
115	KECAMATAN SENDURO	(589.267,77)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
116	KECAMATAN PASRUJAMBE	(85.607,98)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
117	KECAMATAN SUMBERSUKO	59.914,03	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
118	KECAMATAN JATIROTO	572.761,92	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
119	KECAMATAN KLAKAH	(21.216,20)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
120	KECAMATAN RANDUAGUNG	230.464,72	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
121	KECAMATAN TEKUNG	(30.456,23)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
122	KECAMATAN ROWOKANGKUNG	282.595,97	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
123	KECAMATAN YOSOWILANGUN	5.034.983,28	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
124	KECAMATAN KUNIR	1.500.147,48	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
125	KECAMATAN TEMPEH	(5.743.326,38)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
126	KECAMATAN PASIRIAN	(105.647,10)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
127	KECAMATAN CANDIPURO	356.728,14	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
128	KECAMATAN PRONOJIWO	(105.804,50)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
129	KECAMATAN TEMPURSARI	(0,01)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
130	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(28.570.637,74)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
131	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS BADES	(2.635.382,81)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
132	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS CANDIPURO	50.349,25	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
133	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS GESANG	(268.301,13)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
134	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS GUCIALIT	21.541,97	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
135	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS JATIROTO	(484.198,21)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
136	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS KEDUNGJAJANG	0,02	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
137	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS KLAKAH	(57.849,10)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
138	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS KUNIR	758.814,63	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
139	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS LABRUK	(71.491,52)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
140	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS PADANG	0,01	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
141	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS PASIRIAN	(463.290,60)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
142	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE	0,01	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
143	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS PENANGGAL	(58.528,14)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
144	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS PRONOJIWO	11.697.403,08	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
145	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG	(53.715,89)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
146	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS RANUYOSO	(411.495.335,54)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
147	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS ROGOTRUMAN	151.359,95	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
148	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS SENDURO	(2.984.581,76)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
149	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS SUKODONO	(113.984,97)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
150	PUSK SUMBERSARI	(46.708,33)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
151	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TEKUNG	(47.887,14)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
152	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TEMPURSARI	(975.195,36)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
153	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TUNJUNG	(73.401,00)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
154	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN	29.178.734,10	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
155	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT INSTALASI FARMASI	2.388.733,67	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
156	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	(509.186,91)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
157	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	(49.602.716,00)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
158	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD dr. HARYOTO	23.957.865,45	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa Gedung dan Bangunan
Total		(195.505.698,52)	

Tabel 417. Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	KECAMATAN SENDURO	(2.772.173,09)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	(29.000,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
3	KECAMATAN TEMPURSARI	(165.248,75)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(12.665,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
5	KECAMATAN PASIRIAN	(2.159,82)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	(275.200,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(767.713,51)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(21.970.385,09)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
9	DINAS PERHUBUNGAN	(9.398.583,55)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
10	DINAS PERIKANAN	(3.586.277,32)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
11	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	(18.750,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
12	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(1.259,52)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
13	DINAS PARIWISATA	(7.578.576,10)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
14	DINAS PARIWISATA	9.482.794,30	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(1.873,13)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
16	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD PASIRIAN	1.952.785,14	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
17	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TEMPEH	(85.371,51)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
18	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD dr. HARYOTO	2.687.577,80	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
19	SEKRETARIAT DPRD	(21.875,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
20	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	(76.633,33)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(79.423.577,89)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
22	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	66.945,08	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	(711.363.824,84)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
24	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	8.625.859,03	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
25	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	(56.525,03)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
26	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS SENDURO	(77.873,78)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
27	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	(5.171,09)	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2025
28	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN JOGOYUDAN	(964.386,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
29	KECAMATAN LUMAJANG	(5.379,28)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2024
30	KECAMATAN LUMAJANG - KELURAHAN ROGOTRUNAN	(128.294,06)	Koreksi lebih catat saldo akhir akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024 karena kesalahan rumus perhitungan pada kertas kerja penyusutan tahun 2026
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	(257.750,65)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
32	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	(3.227.796,76)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
33	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	11.587.241,58	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(17.063.685,57)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
35	DINAS PARIWISATA	4.915.862,16	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	192.193.729,30	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
37	DINAS PERHUBUNGAN	11.103.036,53	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
38	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	8.390.997.946,93	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
39	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(1.106.080.159,83)	Koreksi kurang catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
40	SEKRETARIAT DAERAH - BAGIAN UMUM	2.042.215,31	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
41	KECAMATAN SENDURO	0,01	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
42	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT PUSKESMAS TEMPEH	694.834,36	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
43	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	21.462,85	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
44	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN	42.834.279,41	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
45	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD dr. HARYOTO	6.969.055,10	Koreksi lebih catat saldo awal akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan hasil perhitungan kertas kerja akumulasi penyusutan terdapat kesalahan perhitungan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh kesalahan rumus dan kesalahan perhitungan sisa umur masa manfaat beberapa jalan, irigasi dan jaringan
Total		6.720.757.455,39	

Tabel 418. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Bades	(0,01)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan aset lain-lain 2024 karena salah input masuk ke dalam akumulasi penyusutan aset lain-lain dinas kesehatan tahun 2024
2	DINKES P2KB - UPT Puskesmas Tempursari	(0,35)	Koreksi kurang catat saldo akhir akumulasi penyusutan aset lain-lain 2024 karena salah input masuk ke dalam akumulasi penyusutan aset lain-lain dinas kesehatan tahun 2024
3	Badan Pengelola Keuangan Daerah	969.333,34	koreksi lebih catat aset lain-lain tahun 2024 karena hasil temuan BPK atas penghapusan akumulasi penyusutan aset lain-lain
Total		969.332,98	

Tabel 419. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka-Retribusi Pelayanan Pasar

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DISKOPINDAG	(97.500,00)	Koreksi kurang catat pendapatan diterima dimuka-retribusi pelayanan pasar (perijinan)
Total		(97.500,00)	

Tabel 420. Koreksi Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	105.524.524,00	Koreski Saldo Awal yang lebih catat terkait Hutang belanja insentif untuk ASN dan Non ASN (sehubungan dengan Perbup No. 22 Thn 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 4 ayat 3), dikarekan anggaran pendapatan pada Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 800.000.000,00 sedangkan menurut Perbup minal anggaran Pendapatan yang bisa mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.000.000.000,00
Total		105.524.524,00	

Tabel 421. Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINKES P2KB	110.084.800,00	koreksi lebih catat utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang dicatat terlalu tinggi apda tahun 2024
Total		110.084.800,00	

Tabel 422. Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(288.072,00)	Kereksi kurang catat saldo akhir Utang iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN tahun 2024 berdasarkan surat tagihan dari BPJS kesehatan Nomor: B/157/082025.
Total		(288.072,00)	

Tabel 423. Koreksi Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(230.448,00)	Kereksi kurang catat saldo akhir Utang iuran jaminan kematian bagi non ASN tahun 2024 berdasarkan surat tagihan dari BPJS kesehatan Nomor: B/157/082025.
Total		(230.448,00)	



Tabel 424. Koreksi Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	74.705.236,00	Koreski Saldo Awal yang lebih catat terkait Hutang belanja insentif untuk ASN dan Non ASN (sehubungan dengan Perbup No. 22 Thn 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 4 ayat 3), dikarekan anggaran pendapatan pada Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 800.000.000,00 sedangkan menurut Perbup minal anggaran Pendapatan yang bisa mendapatkan insentif sebesar Rp1.000.000.000,00
Total		74.705.236,00	

Tabel 425. Koreksi Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	(158.872,00)	Koreksi kurang catat saldo akhir hutang tagihan telpon tahun 2024 karena tidak dimasukkan dalam daftar hutang belanja tahun 2024
Total		(158.872,00)	

Tabel 426. Koreksi Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	34.776.084,00	Koreksi karena lebih catat saldo akhir 2024 utang belanja tambahan berdasarkan beban kerja ASN-Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS tahun 2024 karena kesalahan perhitungan TPP pada bagian protokol di tahun 2024
Total		34.776.084,00	

Tabel 427. Koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Dalam Rupiah

No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD PASIRIAN	(107.555.544,00)	koreksi lebih catat saldo akhir tahun 2024 karena adanya audit pasca klaim dari BPJS kesehatan atas kelebihan pembayaran pada klaim obat kronis RJTL tahun 2024 sebesar Rp2.835.844,00 dan pengawasan internal BPJS kesehatan atas kasus 2024 sebesar Rp.104.719.700,00 berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengembalian RSUD pasirian ke BPJS nomor 900.1.3.1/946/427.52.02/2025 tanggal 21 juli 2025 dan Berita acara kompensasi pembayaran klaim BPJS nomor 900.1.3.1/931/427.52.02/2025 tanggal 18 Juli 2025



No.	Nama SKPD	Jumlah	Keterangan
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - UPT RSUD PASIRIAN	(695.124.000,00)	Koreksi kurang catat saldo awal utang jangka pendek lainnya atas lebih salur DBH gas bumi sebesar Rp456.434.000 dan DBH perikanan sebesar Rp238.690.000 berdasarkan PMK nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2025)
Total		(802.679.544,00)	

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.5 Ekuitas Akhir	3.654.038.555.876,61	3.323.649.487.930,75

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 2024, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 428. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Rupiah			
No	Keterangan	2025	2024
1	Ekuitas Awal	3.323.649.487.930,75	3.115.910.728.265,84
2	Surplus (defisit) LO	279.675.182.010,37	196.077.309.667,29
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	50.713.885.935,49	11.661.449.997,62
4	Ekuitas Akhir	3.654.038.555.876,61	3.323.649.487.930,75

VI. INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 SEJARAH LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah (naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1–3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang Tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam Tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak Tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928–1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941–1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948–1959);

- 4) R. Sukardjono (1959–1966);
- 5) N.G. Subowo (1966–1973);
- 6) Suwandi (1973–1983);
- 7) Karsid (1983–1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988–1993);
- 9) Tarmin Ariyadi (1993–1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998–2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi–H. Hartono, SH, S.Sos (2003–2008);
- 12) Dr.H. Sjahrazad Masdar, MA–Drs. As'at (2008–2013);
- 13) Dr.H. Sjahrazad Masdar, MA–Drs. As'at (2013–2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014–2018);
- 15) H. Thoriqul Haq, M.ML – Ir. H. Indah Amperawati, M.Si (2018–September 2023);
- 16) Ir. H. Indah Amperawati, M.Si–Yudha Adji Kusuma, S.H. (10 Februari 2025–sekarang).

6.2 VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang tercantum di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 – 2029 yaitu ‘Terwujudnya Lumajang Yang Amanah, Manusiawi Dan Berkeadilan’.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- 1) Lumajang Melayani, Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang inovatif
- 2) Lumajang Tangguh, Mewujudkan daerah aman, kondusif dan tangguh melalui penguatan kewaspadaan terhadap ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan bencana.
- 3) Lumajang Membangun, Meningkatkan pemerataan akses infrastruktur daerah yang berkelanjutan.
- 4) Lumajang Eksotik, Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi wisata dan hilirisasi industri
- 5) Lumajang Peduli, Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komunitas dan peningkatan akses terhadap kesempatan ekonomi secara inklusif.
- 6) Lumajang Unggul, Meningkatkan Kualitas SDM melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta pengembangan inovasi teknologi secara inklusif.

- 7) Lumajang Lestari, Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 8) Lumajang Lumbung Pangan, Meningkatkan produksi dan produktivitas Pertanian dan Perikanan melalui optimalisasi pengelolaan dan pengendalian alih fungsi lahan

Dalam rangka perwujudan Visi dan Misi, telah dirumuskan tujuan dan sasaran di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:

Tabel 429. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Lumajang Melayani	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.	Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang efektif dan efisien.
2	Lumajang Tangguh	Terwujudnya wilayah yang aman, kondusif dan tangguh.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.
3	Lumajang Membangun	Terwujudnya akselerasi konektivitas dan pemerataan infrastruktur daerah antar wilayah.	1. Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Wilayah dan Keterhubungan Antar Wilayah. 2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap Infrastruktur Dasar yang Berkualitas.
4	Lumajang Eksotik	Terwujudnya pengembangan ekonomi inklusif berbasis sumber daya alam.	1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja. 2. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan industri. 3. Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif.
5	Lumajang Peduli	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif.	1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif. 2. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. 3. Terwujudnya Desa yang Mandiri.
6	Lumajang Unggul	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Inklusif.	1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan karakter masyarakat. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
7	Lumajang Lestari	Penguatan kelestarian lingkungan hidup.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
8	Lumajang Lumbung Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan.	Meningkatnya Ketahanan Pangan.

Sumber : Perda Nomor 8 Tahun 2025

6.3 LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km², terbagi menjadi 21 kecamatan, 195 desa dan 7 kelurahan. Batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112°-53' -113°-23' Bujur Timur dan 7°-54' -8°-23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan Tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24° C–23° C. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada di atas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperatur terendah mencapai 5° C.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Sektor Pertanian yang menjadi andalan adalah padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Provinsi Jawa Timur) dan produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

6.3.1 Klimatologi Dan Hidrologi

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan per tahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

6.3.2 Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan 0-15% (61% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25% (7% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (13% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversi, 40% keatas (19% luas wilayah) merupakan daerah yang mutlak dihutankan sebagai pelindung sumber daya alam.

Sedangkan potensi hidrogafi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri dan pariwisata, Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai, 369 dam, 254 pompa air dan 6 air terjun. Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial yang bisa diandalkan untuk pariwisata.

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu: daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Summersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan di atas 2000m di atas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100–500m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian >2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

6.3.3 Tata Guna Tanah

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60 Ha, hutan produksi seluas 22.964,20 Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20 Ha.

6.4 STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Lumajang di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan entitas sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Daerah, meliputi Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Bagian Protokol dan TU Pimpinan dan Bagian Perekonomian dan SDA
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat Daerah
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 5) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi entitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai berikut:
 - RSUD dr. Haryoto
 - RSUD Pasirian
 - Puskesmas Rogotruran
 - Puskesmas Sukodono
 - Puskesmas Padang
 - Puskesmas Gucialit

- Puskesmas Senduro
 - Puskesmas Pasrujambe
 - Puskesmas Sumbersuko
 - Puskesmas Tempeh
 - Puskesmas Pasirian
 - Puskesmas Candipuro
 - Puskesmas Pronojiwo
 - Puskesmas Tempursari
 - Puskesmas Kunir
 - Puskesmas Yosowilangun
 - Puskesmas Tekung
 - Puskesmas Rowokangkung
 - Puskesmas Jatiroto
 - Puskesmas Randuagung
 - Puskesmas Klakah
 - Puskesmas Ranuyoso
 - Puskesmas Kedungjajang
 - Puskesmas Sumbersari
 - Puskesmas Penanggal
 - Puskesmas Labruk Kidul
 - Puskesmas Tunjung
 - Laboratorium Kesehatan
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja
 - 10) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - 11) Dinas Lingkungan Hidup
 - 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - 13) Dinas Pemuda dan Olahraga
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 15) Dinas Tenaga Kerja
 - 16) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 17) Dinas Perhubungan

- 18) Dinas Pariwisata
- 19) Dinas Perikanan
- 20) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 21) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 22) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 25) Badan Kepegawaian Daerah
- 26) Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 27) Kecamatan Lumajang
- 28) Kecamatan Sukodono
- 29) Kecamatan Padang
- 30) Kecamatan Gucialit
- 31) Kecamatan Senduro
- 32) Kecamatan Pasrujambe
- 33) Kecamatan Sumbersuko
- 34) Kecamatan Tempeh
- 35) Kecamatan Pasirian
- 36) Kecamatan Candipuro
- 37) Kecamatan Pronojiwo
- 38) Kecamatan Tempursari
- 39) Kecamatan Kunir
- 40) Kecamatan Yosowilangun
- 41) Kecamatan Tekung
- 42) Kecamatan Rowokangkung
- 43) Kecamatan Jatiroto
- 44) Kecamatan Randuagung
- 45) Kecamatan Klakah
- 46) Kecamatan Ranuyoso
- 47) Kecamatan Kedungjajang

VII. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan Tahun 2025 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang .
 - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 terdiri dari:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
 - (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2025.
 - (7) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.

3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan.

BUPATI LUMAJANG

INDAH AMPERAWATI

Lampiran 1. Daftar Tanah Fasilitas Umum Perumahan Yang Diserahkan Ke Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Tanggal BAST	Nomor BAST	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Luas (M²)	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
								Hak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tanah Jalan + RTH Perumahan Mokayama City	2 Maret 2023	034/87/427.58/2023	PT. Moru Kaia Jaya Utama (MOH. DEDE PERKASA ALIMIN)	Mokayama City	1.240	Desa Grati, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	44.640.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
2	Tanah Jalan + RTH + IPAL + TPS Perumahan D'Green Village	23 Januari 203	034/11/427.58/2023	PT. Arunika Jaya Property (Tri Agung Budi Rahardjo)	D'Green Village	7.692	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	276.912.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
3	Tanah Taman + Jalan Perumahan The Hasanah Residence 4 (Cluster Adara Park)	3 April 2024	600.2.8/102/427.58/2024	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	The Hasanah Residence	1.442	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	38.943.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
4	Tanah Jalan + Taman Perumahan The Hasanah Residence 4 (Cluster Adara Park)	3 April 2024	600.2.8/102/427.58/2024	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	The Hasanah Residence	6.819	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	184.113.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
5	Tanah Jalan Perumahan Perumahan Leiden Park	17 April 2024	600.2.8/106/427.58/2024	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	Leiden Park	3.453	Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	93.231.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
6	Tanah Jalan Masuk Perumahan Leiden Park	17 April 2024	600.2.8/106/427.58/2024	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	Leiden Park	413	Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	11.151.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
7	Tanah Jalan + RTH Perumahan Villa Shofia	19 Juni 2024	600.2.8/175/427.58/2024	PT. Nabawi Cahaya Mulya (Zainul Husen)	Villa Shofia	1.221	Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	43.956.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
8	Tanah Jalan + RTH Akses Perumahan Perumahan Villa Shofia	19 Juni 2024	600.2.8/175/427.58/2024	PT. Nabawi Cahaya Mulya (Zainul Husen)	Villa Shofia	930	Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	33.480.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
9	Tanah Jalan Drainase + RTH + TPS Perumahan Emerald Residence Tahap 2	25 Juni 2024	600.2.8/236/427.58/2024	PT. KSB Property Bersyariah (Agus Triyono)	Emerald Residence	2.550	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	91.800.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025

f

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Tanggal BAST	Nomor BAST	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Luas (M ²)	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
								Hak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Tanah Jalan + RTH + TPS + Pos Satpam Perumahan Anggrek Indah Residence	15 Juli 2024	600.2.8/292/427.58/2024	PT. Nabawi Cahaya Mulya (Zainul Husen)	Anggrek Indah Residence	1.410	Desa Grati, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	50.760.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
11	Tanah Jalan + Taman + Balai + Lapangan Perumahan Graha Semeru	5 September 2024	600.2.8/387/427.58/2024	PT Jatim Graha Utama (Mirza Muttaqien, SH)	Graha Semeru	8.493	Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	4.246.500.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
12	Tanah Jalan + Fasum RT 001 RW 008 Kelurahan Rogotrunan					37	Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	7.400.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
13	Tanah Jalan + Fasum RT 002 RW 008 Kelurahan Rogotrunan					35	Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	7.000.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
14	Tanah Jalan + Fasum TPS, RTH, Pos Satpam, Hydrant) Perumahan HR City Life's	28 Pebruari 2025	600.2.8/029/427.58/2025	PT. Nabawi Indah Permai (Suhariyanto)	HR City Life's	1.504	Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	123.328.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
15	Tanah Jalan + Fasum TPS, Lahan Balai Warga, RTH, Hydrant) Perumahan HR Residence Tahap 2	28 Pebruari 2025	600.2.8/028/427.58/2025	PT. Nabawi Indah Permai (Suhariyanto)	HR Residence	4.433	Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	212.784.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
16	Tanah Jalan 1 Perumahan HR Residence Tahap 2	28 Pebruari 2025	600.2.8/028/427.58/2025	PT. Nabawi Indah Permai (Suhariyanto)	HR Residence	177	Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	8.496.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
17	Tanah Jalan 2 Perumahan HR Residence Tahap 2	28 Pebruari 2025	600.2.8/028/427.58/2025	PT. Nabawi Indah Permai (Suhariyanto)	HR Residence	361	Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	17.328.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
18	Tanah Jalan + Fasum Perumahan Grand Fayez	28 Mei 2025	600.2.8/180/427.58/2025	PT. Zahir Fayeز Gemilang (Syarifatul Istiqomah)	Grand Fayeز	1.945	Desa Madurejo, Kecamatan Pasirian	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	93.360.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025

6

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Tanggal BAST	Nomor BAST	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Luas (M ²)	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
								Hak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Tanah Jalan + Fasum 1 Perumahan Clarysa Grande	2 Juni 2025	600.2.8/183/427.58/2025	PT. East Kedaton Jayaland (Alfian Mahardika, SH)	Clarysa Grande	1.221	Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	58.608.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
20	Tanah Jalan + Fasum 2 Perumahan Clarysa Grande	2 Juni 2025	600.2.8/183/427.58/2025	PT. East Kedaton Jayaland (Alfian Mahardika, SH)	Clarysa Grande	4.639	Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	222.672.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
21	Tanah Jalan dan Fasilitas Umum Perumahan Adara Park 2	20 Juni 2025	600.2.8/197/427.58/2025	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	Adara Park 2	1.317	Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	37.017.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
22	Tanah Jalan + Fasum Perumahan Leiden Park Pengembangan	20 Juni 2025	600.2.8/198/427.58/2025	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	Leiden Park	2.625	Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	94.500.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
23	Tanah Jalan dan Fasum (RTH, Balai Warga, Pos Jaga, TPS) Perumahan Harmony Sanga	1 Juli 2025	600.2.8/252.1/427.58/2025	PT. Rizwan Cahaya Sembilan (Yudha Hermawan)	Harmony Sanga	3.024	Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	311.472.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
24	Tanah Jalan dan Fasilitas Umum (RTH, TPS, Pos Satpam) Perumahan Arum Residence	15 Juli 2025	600.2.8/251.1/427.58/2025	PT. Hanoon Bangun Jaya (Latifah Hanun)	Arum Residence	1.086	Desa Kelampokarum, Kecamatan Tekung	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	69.504.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
25	Tanah Jalan dan Fasilitas Umum (RTH, Pos Satpam dan Sempadan Saluran) Perumahan Nusantara Estate	17 Juli 2025	600.2.8/273/427.58/2025	PT. Bumi Nusantara Regency (Khittotun Nahidin)	Nusantara Estate	2.020	Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	129.280.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
26	Tanah Jalan Lingkungan RT 01 RW 04 & RT 01 RW 05 Desa Senduro					579	Desa Senduro, Kecamatan Senduro	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	59.685.410,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
27	Tanah Musholla Perumahan D'Green Vilage	23 Januari 203	034/11/427.58/2023	PT. Arunika Jaya Property (Tri Agung Budi Rahardjo)	D'Green Village	20	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	720.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025

6

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Tanggal BAST	Nomor BAST	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Luas (M ²)	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
								Hak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Tanah Taman 2 (Gazebo) Perumahan The Hasanah Residence 4 (Cluster Adara Park)	3 April 2024	600.2.8/102/427.58/2024	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	The Hasanah Residence	119	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	3.213.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
29	Tanah Taman Perumahan Leiden Park	17 April 2024	600.2.8/106/427.58/2024	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	Leiden Park	126	Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	3.402.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
30	Tanah Masjid Perumahan Leiden Park	17 April 2024	600.2.8/106/427.58/2024	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	Leiden Park	257	Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	6.939.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
31	Tanah TPS Perumahan Leiden Park	17 April 2024	600.2.8/106/427.58/2024	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	Leiden Park	27	Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	729.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
32	Tanah Masjid Perumahan Villa Shofia	19 Juni 2024	600.2.8/175/427.58/2024	PT. Nabawi Cahaya Mulya (Zainul Husen)	Leiden Park	94	Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	3.384.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
33	Tanah Musholah Perumahan Anggrek Indah Residence	15 Juli 2024	600.2.8/292/427.58/2024	PT. Nabawi Cahaya Mulya (Zainul Husen)	Anggrek Indah Residence	52	Desa Grati, Kecamatan Sumbersuko	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	1.872.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
34	Tanah Masjid Perumahan Graha Semeru	5 September 2024	600.2.8/387/427.58/2024	PT Jatim Graha Utama (Mirza Muttaqien, SH)	Graha Semeru	548	Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	274.000.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
35	Tanah Makam (diluar Perumahan) Perumahan D'Green Vilage	4 Oktober 2024	600.2.8/447/427.58/2024	PT. Arunika Jaya Property (Tri Agung Budi Rahardjo)	D'Green Village	500	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	18.000.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
36	Tanah Makam (Diluar Perumahan) Perumahan Emerald Residence	4 Oktober 2024	600.2.8/446/427.58/2024	PT. KSB Property Bersyariah (Agus Triyono)	Emerald Residence	500	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	40.000.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
37	Tanah Makam (Diluar Perumahan) Perumahan Adara Park 2	10 Maret 2025	600.2.8/030/427.58/2025	PT. Bintang Indonesia Sentosa (Imam Mashadi)	Adara Park 2	960	Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	20.160.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025

6

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Tanggal BAST	Nomor BAST	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Luas (M²)	Letak / Alamat	Status Tanah	Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
								Hak			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Tanah MusholahPerumahan Clarysa Grande	2 Juni 2025	600.2.8/183/427.58/2025	PT. East Kedaton Jayaland(Alfian Mahardika, SH)	Clarysa Grande	86	Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	4.128.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
39	Tanah Mushollah Perumahan Harmony Sanga	1 Juli 2025	600.2.8/252.1/427.58/2025	PT. Rizwan Cahaya Sembilan (Yudha Hermawan)	Harmony Sanga	70	Desa Tempeh Lor, Kecamatan Tempeh	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	7.210.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
40	Tanah Musholah Perumahan Nusantara Estate	17 Juli 2025	600.2.8/273/427.58/2025	PT. Bumi Nusantara Regency (Khittotun Nahidin)	Nusantara Estate	178	Desa Sumberejo, Kecamatan Sukodono	Belum Bersertifikat	Fasum & Fasos	11.392.000,00	Kewajiban Pengembang diserahkan tahun 2025
	JUMLAH					64.203				6.963.069.410,00	

6

Lampiran 2. Jumlah Perkembangan Tanah Yang Bersertifikat Tahun 2025

No	Nama SKPD	Sertifikat selesai tahun 2023 diserahkan tahun 2025	Sertifikat Jadi Tahun 2024 diserahkan tahun 2025	Sertifikat Jadi Tahun 2025	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	8	2	10	- 8 sertifikat terbit tahun 2024 diserahkan ke Pemda tahun 2025
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	40	43	88	- 5 sertifikat terbit tahun 2023 diserahkan ke Pemda tahun 2025 - 40 sertifikat terbit tahun 2024 diserahkan ke Pemda Tahun 2025
3.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	2	16	19	- 1 sertifikat terbit tahun 2023 diserahkan ke Pemda tahun 2025 - 2 sertifikat terbit tahun 2024 diserahkan ke Pemda Tahun 2025
4.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	1	0	1	- 1 sertifikat terbit tahun 2024 diserahkan ke Pemda Tahun 2025
JUMLAH		6	51	61	118	

f

Lampiran 3. Daftar Pinjam Pakai Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	No. Register	JENIS ASET	LOKASI / TEMPAT	JUMLAH	UKURAN	NO. SERTIFIKAT	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PENGUNAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSTANSI PEMERINTAH										
A	TANAH MILIK PEMERINTAH, BANGUNAN MILIK PIHAK KETIGA										
1	Kecamatan Gucialit	Polsek Gucialit	00001	Tanah	Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Lumajang	1	Luas Tanah : 832 m2	No. 4	No. 028/3264/427.73/2020 No. B/9/XII/LOG.1.7/2020 Sarpras	5 Tahun 10-12-2020 09-12-2025	Markas Kepolisian Gucialit
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	-	Tanah	Gumuk Pelarian Dusun Krajan Desa Bades Kecamatan Pasirian	1	10 x 10 m	-	028/7225/427.59/2022 HK.08.00/001/KKRK/V/2022	5 Tahun 11-05-2022 10-05-2027	Shelter Sensor Seismograph Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Badan Geologi	0018	Tanah	Jalan Raya Randuagung Desa Kebonan Kecamatan Klakah	1	5 x 5 m (25 m2)	-	590/2143/427.44/2023 85/KS.02/BGV/2023	5 Tahun 16-06-2023 15-06-2028	Pemasangan Peralatan Pemantauan Gunung Api Lamongan
	JUMLAH					3					
B	TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH										
1	Dinas Pendidikan	Bawaslu	00001 00001	Tanah Bangunan	Jl. Kalimas, Lumajang, Rogotrunan	1	Luas Tanah : 2485 m2 dan Luas Bangunan : 597 m2	No. 12	000.2.5/1233/427.41/2024 016/PL.03.02/K.JI-10/03/2024	5 Tahun 18-02-2024 18-02-2029	Kantor Bawaslu
2	Pengelola	Kejaksaan Negeri Lumajang	0002 00001	Tanah Bangunan	Jalan Pisang Agung No. 4 Kelurahan Kepuharjo	1	Luas Tanah : 380 m2 , Luas Bangunan : 305 m2	No. 38 Tanggal 22 Februari 1994	000.2.5/1131/427.73/2025 B-1864/M.5.28/Cpl/05/2025	5 Tahun 01-06-2025 31-05-2030	Mengoptimalkan dan Mendayagunakan Aset milik Pemerintah Kab. Lumajang
3	Pengelola	Komisi Pemilihan Umum	0007 00004	Tanah Bangunan	Jalan Veteran No. 70 kelurahan Rogotrunan	1	Luas Tanah : 345 m2 , Luas Bangunan : 90 m2 dan 132	No. 23 Tanggal 22 Februari 1989	000.2.5/1808/427.73/2025 30/KU.03.02-SD/3508/1/2025	5 Tahun 03-08-2025 03-08-2030	Mengoptimalkan dan Mendayagunakan Aset milik Pemerintah Kab. Lumajang

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	No. Register	JENIS ASET	LOKASI / TEMPAT	JUMLAH	UKURAN	NO. SERTIFIKAT	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	PENGUNAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							m2				
4	Pengelola	Polinema	0005	Tanah	Jalan Lintas Timur Kelurahan Jogoyudan	1	Luas Tanah : 53.130 m2, Luas Bangunan : Gedung A = 720 m2, B = 720 m2 dan C = 360 m2	No. 16	No. 119/2689/427.1/2021	5 Tahun	Prasarana Perkuliahan Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Politeknik Negeri Malang di Lumajang
			00003	Bangunan					No. 19727.2/PL2/HK/2021	07-05-2021	
										06-05-2026	
5	Kecamatan Candipuro	Polsek Candipuro	00001	Tanah	Jl. Jend. Sudirman 35 Sumberejo Kec. Candipuro Lumajang	1	Luas Tanah : 744 m2 , Luas Bangunan : 105 m2	No. 3	No. 000.2.5/3046/427.73/2025	5 Tahun	Markas Kepolisian Candipuro
			00001	Bangunan					No. B/2185/XI/LOG.1.7/2020	08-12-2025	
										08-12-2030	
6	Pengelola	Polres Lumajang	0011	Tanah	Ds. Sumbersuko	1	2178 m2	No. 9	028/2045/427.73/2023	5 Tahun	Polsek Sumbersuko
			00001	Bangunan			148,5 m2		B/1930/VII/LOG.1.7/2023Log	15-08-2023	
										15-08-2028	
7	Kecamatan Lumajang	Perumda Semeru	00002	Tanah	Jalan Ahmad Yani No. 9 Lumajang	1	1.125 m2	No. 49	000.2.5/111/427.73/20226	5 Tahun	Kantor dan Kegiatan Usaha Perusahaan Umum Daerah Semeru
			00001	Bangunan			746 m2		500/04/427.202/2026	23-01-2026	
										23-01-2031	
	JUMLAH B					7					
	JUMLAH A + B					10					

6

Lampiran 4. Daftar Sewa Tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Penyewa	Jenis Aset	Lokasi/ Tempat	Ukuran	No. Sertifikat	No. Tgl. Perjanjian	Masa Berlaku	Nilai Perolehan	Biaya Sewa					Penggunaan
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	TANAH														
I	TANAH SEBAGIAN BANGUNAN MILIK PEMKAB														
1	Rsud Pasirian	PT. BANGUN JAYA POWER	Tanah	Jl. Raya Pasirian No. 225 A	176 m2 dan 22,4 m2	12	445/1216/427.52.02/2023 447/DIR/BJP/IX/2023 19 Sept 2023	5 Tahun (1-10-2023 s/d 30-09-2028)	155.630.000,00		120.000.000,00				Lahan Parkir
2	Dinas Pertanian	RUDIYANTO	Tanah	RPH Yosowilangun lor RT.8 RW.2	62,56 m2	6	000.2.3.2/5520/427.44/2025 08 Desember 2025	1 Tahun (01-12-2025 s/d 30-11-2026)	103.785.500,00				350.000,00		Garasi mobil semi permanen
3	Dinas Pertanian	TAUFIK HIDAYAT	Tanah	RPH Yosowilangun lor RT.8 RW.2	200 m2	6	000.2.3.2/5518/427.44/2025 08 Desember 2025	1 Tahun (01-12-2025 s/d 30-11-2026)	103.785.500,00				1.950.000,00		Kandang penampungan permanen
4	Dinas Pertanian	MURYADI	Tanah	RPH Yosowilangun lor RT.8 RW.2	158,4 m2	6	000.2.3.2/5522/427.44/2025 08 Desember 2025	1 Tahun (01-12-2025 s/d 30-11-2026)	103.785.500,00				800.000,00		bangunan rumah tangga semi permanen
5	Dinas Pertanian	MOCHAMAD AZIZ	Tanah	RPH Yosowilangun lor RT.8 RW.2	255,44 m2	6	000.2.3.2/5521/427.44/2025 08 Desember 2025	1 Tahun (01-12-2025 s/d 30-11-2026)	103.785.500,00				1.600.000,00		bangunan rumah tangga semi permanen
6	Dinas Pertanian	BAMBANG SUPRIYADI	Tanah	RPH Yosowilangun kidul RT.2 RW.1	216 m2	6	000.2.3.2/5523/427.44/2025 08 Desember 2025	1 Tahun (01-12-2025 s/d 30-11-2026)	103.785.500,00				2.106.000,00		Kandang penampungan permanen
7	Dinas Pertanian	BAMBANG RUDI SANTOSO	Tanah	RPH Yosowilangun lor RT.8 RW.2	63,92 m2	6	000.2.3.2/5519/427.44/2025 08 Desember 2025	1 Tahun (08-12-2025 s/d 30-11-2026)	103.785.500,00				625.000,00		bangunan rumah tangga permanen
8	Dinas Pariwisata	Perumda Tirta Mahameru	Tanah	Desa Purwosono Sumbersuko	2.601,99 m2	9	500.13.1/640/427.48/2024 500.13.1/960/427.200/2024 24 Okt 2024	3 Tahun (27-9-2024 s/d 27-9-2027)	10.732.829.582,85		15.000.000,00				Rumah jaga & tandon air bersih Perumda
9	Rsud dr. Haryoto	PT. BANGUN JAYA POWER	Tanah	Tanah Kantor RSU 1/ utara	1000 m2		445/61/PKS- RSUDH/427.52.01/2023 449/DIR/BJP/XII/2023 29 Des 2023	5 tahun (29-12-2023 s/d 28-12-2028)	4.923.926.463,00		480.000.000,00				Lahan Parkir
10	Dinas Perdagangan	CV. MOTION PICTURE INDONESIA	Tanah & Bangunan	Pasar Plaza Lumajang Lantai II dan III	1.097 m2	37	000.2.5/383/427.54/2025 18 Juni 2025	1 Tahun (1-6-2025 s/d 31-5-2026)	1.818.400.000,00				93.000.000,00		Gedung Bioskop
11	BPKD	Bank Jatim Kas Pemda	Tanah & Bangunan	Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Kel. Rogotrunan	16 m2	No. 3	000.2.5/1811/427.73/2025 064/724/LMJ/UM&AKT I/PKS 4 Agustus 2025	2 Tahun (01-1-2025 s/d 31-12-2026)	795.476.667,00				55.000.000,00		Kantor Kas Pemda Cabang Lumajang
12	Dinas Kesehatan	KPRI Karya Husada	Tanah & Bangunan	Jl. Jend. S.Parman No. 13 Lumajang	75 m2 150 m2	9 Tahun 1985	028/031/427.55/2025 003/KPRI-KH/I/2025 2 Januari 2025	1 Tahun (18-9-2024 s/d 18-9-2025)	1.343.475.000,00				10.000.000,00		Tempat operasional KPRI Karya Husada
13	Rsud dr. Haryoto	Dharma Wanita	Tanah & Bangunan	Jl. Basuki Rahmat No. 56	65 m2		100.3.7/26/PKS- RSUDH/427.52.01/2024 06/Set/DWP RSUDH/VIII/2024 02 Agt 2024	2 Tahun (02-8-2024 s/d 01-8-2026)	10.761.820.204,00				17.645.600,00		Pertokoan / Kantin
14	BPKD	Dewan Pimpinan PPP	Tanah & Bangunan	Jl. Iptu Jama'ari No.31	420 m2 121 m2	No. 9	000.2.5/2609/427.73/2024 024328/PRM/DPC/XII/202408 November 2024	2 Tahun (01-1-2024 s/d 31-12-2025)	97.589.000,00				9.000.000,00		Kantor DPC PPP Cabang Lumajang
15	Kecamatan Pasirian	Bumdesma Mitra Kompak Sejahtera Pasirian	Tanah & Bangunan	Jl. Raya Pasirian No. 15	1.050 m2 150 m2	No.6/ 1986	000.2.5/542/427.84/2024 108/BUMDESMA	1 Tahun (1-1-2025 s/d 31-12-2025)	12.000.000,00				5.000.000,00		Kantor Bumdesma

6

No	Nama OPD	Penyewa	Jenis Aset	Lokasi/ Tempat	Ukuran	No. Sertifikat	No. Tgl. Perjanjian	Masa Berlaku	Nilai Perolehan	Biaya Sewa					Penggunaan
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							MKS/XII/2024 23 Desember 2024								
16	Kecamatan Pasirian	Sumarno	Tanah & Bangunan	Jl. Raya Pasirian No. 15	48 m2		000.2.5/543/427.84/2024 23 Desember 2024	1 Tahun (1-1-2025 s/d 31-12-2025)	161.600.000,00				1.500.000,00		Rumah tempat tinggal
17	Kecamatan Gucialit	UPK Bumdesma LKD Damma Amreta	Tanah & Bangunan	Jl. Jend. Sudirman No.214 Gucialit	160 m2	No. 4/ 1994	000.2.5/652/427.93/2025 022/UPK.44545/VIII/2025 25 Agustus 2025	2 Tahun (1-1-2025 s/d 31-12-2026)					7.000.000,00		Kantor UPK Bumdesma
18	Kecamatan Tempeh	Suswito	Tanah & Bangunan	Jl. Raya Kunir Kecamatan Tempeh	710 m2 700 m2		000.2.5/265/427.85/2025 11 Juli 2025	1 Tahun (10-7-2025 s/d 10-7-2026)					1.500.000,00		Rumah tempat tinggal
	JUMLAH A								31.425.459.916,85	-	600.000.000,00	15.000.000,00	207.076.600,00	-	
B	TANAH SEBAGIAN BANGUNAN MILIK PIHAK KETIGA														
1	Dinas Kesehatan (Puskesmas Randuagung)	BANK JATIM CAB. LUMAJANG	Tanah	Jln Raya Randuagung No. 192. Pkm.Randuagung	4 m2	No. 9 tahun 1994	000.2.5/8848/427.52.18/2024 063/1214.1/LMJ/UM&A KT/PKS 7 Oktober 2024	3 Tahun (10-8-2024 s/d 10-8-2027)	139.629.867,00			30.000.000,00			ATM Bank Jatim
2	Rsud Pasirian	Bank BNI	Tanah	Jl. Raya Pasirian No. 225A	6,9 m2	12	LMJ/2/PKS/037/2023 28 Mar 2023	3 Tahun (01-4-2023 s/d 30-3-2026)	155.630.000,00		24.000.000,00				ATM Bank BNI
3	Bagian Umum	Bank Jatim	Tanah	Jl. Alun-alun utara no. 7	9 m2	No. 3	593.33/213/427.18/2023 3 062/941/LMJ/UM&AKT /PKS 15 Juni 2023	5 Tahun (21-4-2023 s/d 21-4-2028)	795.476.667,00		52.340.000,00				ATM Bank Jatim
4	Dinas Perdagangan	Bank Jatim	Tanah	Dusun Kp. Baru, Central Tempeh, Tempeh, Lumajang	3m x 2m	No. 3	000.2.5/983/427.54/2025 062/1498/LMJ/UM/PKS S 09 Des 2025	3 Tahun (25-7-2025 s/d 24-7-2028)	395.790.000,00				21.345.900,00		ATM Bank Jatim
5	Kecamatan Ranuyoso	Bank Jatim	Tanah	Ds. Ranuyoso	4 m2	No. 02	000.2.5/1146/427.73/2024 063/724/LMJ/UM/PKS 12 Juni 2024	5 Tahun (01-1-2024 s/d 31-12-2028)	892.176.000,00			40.000.000,00			ATM Bank Jatim
6	BPKD	Bank Jatim	Tanah & Bangunan	Desa Pasirian	1.050 m2 644 m2	No. 6	000.2.5/1145/427.73/2024 063/723/LMJ/UM/PKS 12 Juni 2024	2 Tahun (01-1-2024 s/d 31-12-2025)	231.466.667,00			136.000.000,00			Kantor cabang Bank Jatim Pasirian
7	Rsud dr. Haryoto	KPRI Pangudi Luhur	Tanah	Jl. Basuki Rahmat No. 56	190 m2		100.3.7/24/PKS- RSUDH/427.52.01/2024 4 34/KPRI-PUA/III/2024 01 Agt 2024	2 Tahun (1-8-2024 s/d 31-7-2026)	10.761.820.204,00			19.163.000,00			Untuk Kantin
8	Dinas Kesehatan	BANK BNI CAB. LUMAJANG	Tanah	Jalan Raya Soekarno Hatta no. 12 - Tempeh Pkm. Tempeh	6 m2	17	000.4.7.1/250/427.52.09/2025 LMJ/12/054/2025 11 Jul 2025	3 Tahun (1-7-2025 s/d 30-6-2028)	340.065.500,00				24.000.000,00		ATM Bank BNI
9	Dinas Kesehatan	BANK BNI CAB. LUMAJANG	Tanah	Jl. Stadion No.334 - Yosowilangun Pkm. Yosowilangun	6 m2	6	445/1211/427.52.16/2025 LMJ/12/053/2025 11 Jul 2025	3 Tahun (1-12-2025 s/d 30-11-2028)	322.624.750,00				24.000.000,00		ATM Bank BNI
10	Dinas Kesehatan	BANK BNI CAB. LUMAJANG	Tanah	Jalan Raya Ranuyoso Pkm. Ranuyoso	6 m2	36	900.1.3/616/427.52.27/2025 LMJ/12/052/2025 11 Jul 2025	3 Tahun (15-06-2025 s/d 14-06-2028)	115.584.833,00				24.000.000,00		ATM Bank BNI
11	Rsud dr. Haryoto	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Tanah	Jl. Basuki Rahmat No. 5 Lumajang	6 m2		503/2399/427.73/2022 Dmt.858/CL1/DBS- a10000000/IX/2022	5 Tahun (15-7-2022 s/d 14-7-2027)	10.761.820.204,00	100.000.000,00					Menara telekomunikasi mikroseluler

6

No	Nama OPD	Penyewa	Jenis Aset	Lokasi/ Tempat	Ukuran	No. Sertifikat	No. Tgl. Perjanjian	Masa Berlaku	Nilai Perolehan	Biaya Sewa					Penggunaan
										2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							13 Sep 2022								
12	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik	PT. Dayamitra Telekomunikasi	Tanah	Jl. Ahmad Yani no. 209 Lumajang	6 m2	No. 39	503/2399/427.73/2022 Dmt.858/CL1/DBS- a10000000/I/X/2022 13 Sep 2022	5 Tahun (15-7-2022 s/d 14-7- 2027)	596.400.000,00	100.000.000,00					Menara telekomunikasi mikroseluler
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Tanah	Jl. Sultan Hasanudin No. 4 Lumajang	6 m2		503/2399/427.73/2022 Dmt.858/CL1/DBS- a10000000/I/X/202213 Sep 2022	5 Tahun (15-7-2022 s/d 14-7-2027)	315.424.000,00	100.000.000,00					Menara telekomunikasi mikroseluler
14	Dinas Lingkungan Hidup	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Tanah	Jl. Langsep No. 15 Lumajang	6 m2		503/2399/427.73/2022 Dmt.858/CL1/DBS- a10000000/I/X/2022 13 Sep 2022	5 Tahun (15-7-2022 s/d 14-7- 2027)	63.000.000,00	100.000.000,00					Menara telekomunikasi mikroseluler
15	Dinas Pariwisata	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Tanah	Jl. KWT Lumajang	6 m2		503/2399/427.73/2022 Dmt.858/CL1/DBS- a10000000/I/X/2022 13 Sep 2022	5 Tahun (15-7-2022 s/d 14-7- 2027)	-	100.000.000,00					Menara telekomunikasi mikroseluler
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	Tanah	Jl. Gubernur Suryo Lumajang	6 m2		503/2399/427.73/2022 Dmt.858/CL1/DBS- a10000000/I/X/2022 13 Sep 2022	5 Tahun (15-7-2022 s/d 14-7- 2027)	1.180.771.296,00	100.000.000,00					Menara telekomunikasi mikroseluler
17	Rsud dr. Haryoto	PT. Bank Syariah Indonesia	Tanah & Bangunan	Jl. Basuki Rahmat No. 56 Lumajang	10 m2 6,6 m2		Akta Notaris No.28 (Rahmadi Halim, SH,MKn.) 23 Sep 2022	3 Tahun (1-10-2022 s/d 1-10- 2025)	10.761.820.204,00	23.400.000,00					ATM BSI
18	Rsud dr. Haryoto	BANK JATIM CAB. LUMAJANG	Tanah & Bangunan	Jl. Basuki Rahmat No. 56 Lumajang	165 m2		Akta Notaris No.3 (Dr. Pringgo Soebowo, SH,M.Kn.) 04 Sept 2024	2 Tahun (1-10-2023 s/d 30- 09-2025)	10.761.820.204,00		110.000.000,00				Kantor kas dan ATM Bank Jatim
19	Rsud dr. Haryoto	KPRI Pangudi Luhur	Tanah & Bangunan	Jl. Basuki Rahmat No. 56	87 m2		100.3.7/25/PKS- RSUDH/427.52.01/202 4 33/KPRI-PLV/III/2024 01 Agt 2024	2 Tahun (01-8-2024 s/d 31-7- 2026)	10.761.820.204,00			23.809.000,00			Untuk Perkantoran dan Pertokoan
20	Rsud Pasirian	Bank BSI	Tanah	Jl. Raya Pasirian No. 225A	6 m2	12	Akta Notaris No.2 (Denny Irtanto, SH, M.Kn) 2 Sep 2024	3 Tahun (1-9-2024 s/d 1-9- 2027)	155.630.000,00			24.000.000,00			ATM Bank BSI
	JUMLAH TOTAL B								59.508.770.600,00	623.400.000,00	186.340.000,00	272.972.000,00	93.345.900,00	-	
	JUMLAH TOTAL = A+B								90.934.230.516,85	623.400.000,00	786.340.000,00	287.972.000,00	300.422.500,00	-	

6

Lampiran 5. Daftar Tanah Milik TNI dan BUMN yang tercatat pada KIB Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	NAMA SKPD	PENGUNAAN TANAH	LUAS (M2)	Jumlah Bidang	Tanggal Pengadaan (Perolehan)	LETAK / ALAMAT	Harga berdasarkan Appraisal (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UPT. Pend. Kec. Lumajang	SDN Kepuharjo 02	11.546	1	1/1/1964	Jl A. Yani No. 152	696.480.000,00	Tanah Batalyon (TNI)
2	UPT. Pend. Kec. Sukodono	UPT. Pendidikan Kec. Sukodono	757	1	-	Sukodono	117.713.500,00	Tanah PGRI
3	UPT. Pend. Kec. Gucialit	SDN Gucialit 02	2.015	1	1/1/1975	Desa Gucialit	20.888.833,33	Tanah PTP
4	UPT. Pend. Kec. Gucialit	SDN Kertowono 02	714	1	1/1/1982	Desa Kertowono	5.533.500,00	Tanah PTP
5	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 04	3.167	1	12/31/1979	Kaliboto Lor	96.940.790,00	Tanah PG
6	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 05	1.095	1	12/30/1979	Kaliboto Lor	35.481.600,00	Tanah PG
7	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 09	300	1	1/1/1981	Nyeoran	918.000,00	Tanah PG
8	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 10	1.341	1	1/1/1973	Kaliboto Lor	70.645.223,33	Tanah PG
9	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 11	4.350	1	1/1/1982	Kaliboto Lor	172.890.000,00	Tanah PG
10	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Lor 15	3.168	1	1/1/1980	Kaliboto Lor	9.694.080,00	Tanah PG
11	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 01	5.372	1	1/1/1925	Jl. Ranupakis Kaliboto Kidul	282.925.333,33	Tanah PG
12	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 04	2.500	1	1/2/1968	Kaliboto Kidul	132.479.521,00	Tanah PG
13	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Kaliboto Kidul 06	1.320	1	1/3/1968	Kaliboto Kidul	33.673.000,00	Tanah PG
14	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Rojopolo 02	329	1	1/1/1978	Desa Sukosari	25.161.920,00	Tanah PG
15	UPT. Pend. Kec. Jatiroto	SDN Rojopolo 07	1.060	1	1/1/1986	Desa Sukosari	3.349.600,00	Tanah PG
16	UPT. Pend. Kec. Klakah	UPT. Pendidikan Kec. Klakah	390	1	-	Mlawang	26.041.600,00	Tanah PT. KAI
17	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Gedangmas 03	1.600	1	1/2/1976	Gedang Mas	163.200.000,00	Tanah PG
18	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Kalidilem 02	738	1	1/2/1982	Kalidilem	63.290.880,00	Tanah PG
19	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Kalidilem 03	517	1	1/3/1982	Kalidilem	84.374.400,00	Tanah PG
20	UPT. Pend. Kec. Randuagung	SDN Tunjung 02	2.156	1	1/2/1971	Desa Tunjung	53.725.000,00	Tanah PG
21	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 02	3.500	1	11/12/1994	Rowokangkung	43.540.000,00	Tanah PG
22	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 03	3.500	1	1/1/1972	Persil Banter	807.563.333,00	Tanah PG

f

No.	NAMA SKPD	PENGUNAAN TANAH	LUAS (M2)	Jumlah Bidang	Tanggal Pengadaan (Perolehan)	LETAK / ALAMAT	Harga berdasarkan Appraisal (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 04	3.116	1	1/1/1964	Persil Blimbing	110.301.333,00	Tanah PG
24	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Rowokangkung 05	5.320	1	1/1/1972	Jl. Loji Persil Genitri	76.340.000,00	Tanah PG
25	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Sumbersari 02	1.366	1	1/1/1964	Sumbersari	25.489.560,00	Tanah PG
26	UPT. Pend. Kec. Rowokangkung	SDN Dawuhan Wetan 02	3.221	1	1/1/1972	Jl. Blukon persil	417.439.750,00	Tanah PG
27	UPT. Pend. Kec. Kunir	UPT. Pendidikan Kec. Kunir	310	1	-	Jl. PB. Sudirman 22	12.854.667,00	Tanah PGRI
28	UPT. Pend. Kec. Kunir	SDN Jatimulyo 02	690	1	12/31/1976	Jatimulyo	14.306.000,00	Tanah Perhutani
29	UPT. Pend. Kec. Tempeh	SDN Pandanwangi 03	3.387	1	12/31/1979	Pandanwangi	70.685.833,00	Tanah Translok (TNI)
30	UPT. Pend. Kec. Pasirian	UPT. Pendidikan Kec. Pasirian	136	1	-	Pasirian	3.626.667,00	Tanah PGRI
31	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Gondoruso 01	1.633	1	1/1/1930	Desa Gondoruso	139.349.334,00	Tanah Perhutani
32	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Bades 06	2.960	1	1/1/1973	Dampar	62.357.333,33	Tanah PTP
33	UPT. Pend. Kec. Pasirian	SDN Bago 04	1.192	1	1/1/1982	Desa Bago	43.306.667,00	Tanah Perhutani
34	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 02	2.800	1	1/2/1958	Jl. Kajar Kuning Sumberwuluh	29.493.333,00	Tanah Perhutani
35	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 03	2.808	1	1/3/1958	Jl. Jaya Negara Sumberwuluh	29.577.600,00	Tanah Perhutani
36	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberwuluh 04	2.500	1	1/1/1988	Jl. Kebondeli Sumberwuluh	65.833.333,00	Tanah Perhutani
37	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Penanggal 03	1.175	1	1/1/1983	Jl. Proyek Cengkeh Penanggal	61.883.333,00	Tanah Perhutani
38	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Sumberejo 03	3.615	1	1/1/1978	Jl. Penanggal	5.000.000,00	Tanah Perhutani
39	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 02	600	1	1/1/1980	Jl. Raya Kloposawit	5.688.560,00	Tanah Perhutani
40	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 02	600	1	1/1/1980	Jl. Raya Kloposawit	682.000,00	Tanah Perhutani
41	UPT. Pend. Kec. Candipuro	SDN Kloposawit 03	924	1	1/1/1986	Jl. Kebonjati	9.640.400,00	Tanah Perhutani
42	SMPN 1 Jatiroto	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	7.104	1	1/1/1962	Jl. Raya No. 02 Jatiroto	22.448.640,00	Tanah HGB PG Jatiroto
43	SMPN 2 Jatiroto	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	6.117	1	1/1/1965	Jl. Nyeoran Jatiroto	248.758.000,00	Tanah HGB PG Jatiroto
44	Kecamatan Jatiroto	Tanah Kantor Kecamatan Jatiroto	1.172	1	7/4/1997	Desa Jatiroto	325.866.000,00	Tanah PG

6

Lampiran 6. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Pengadaan dari Belanja Modal		Penambahan dari Belanja Modal yang lain		Pengadaan dari Belanja Barang & Jasa		Reklasifikasi dari Ekstra Komptabel		Hibah		Jumlah	
		Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang
1	Sekretariat DPRD	116	665.671.882,00									116	665.671.882,00
2	Inspektorat Kabupaten	384	4.025.545.056,00									384	4.025.545.056,00
3	BAPPEDA	11	337.750.000,00									11	337.750.000,00
4	Badan Kepegawaian Daerah	13	526.311.000,00									13	526.311.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan Daerah	56	851.020.452,00									56	851.020.452,00
6	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	61	455.050.664,00							10	13.000.000,00	71	468.050.664,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45	127.390.000,00			1	6.387.000,00			25	770.374.999,00	71	904.151.999,00
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.545	8.203.831.759,00	2	8.950.000,00	28	20.179.800,00	21	15.114.380,00			2.596	8.248.075.939,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	18	234.168.745,00									18	234.168.745,00
10	Dinas Kependudukan dan Capil	32	385.107.760,00				1.677.400,00					32	386.785.160,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10	6.771.000,00									10	6.771.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	54	842.098.800,00			4	8.857.800,00					58	850.956.600,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10	106.676.550,00									10	106.676.550,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	54	518.674.329,00									54	518.674.329,00
15	Dinas Pariwisata	17	142.507.350,00									17	142.507.350,00

f

No	Uraian	Pengadaan dari Belanja Modal		Penambahan dari Belanja Modal yang lain		Pengadaan dari Belanja Barang & Jasa		Reklasifikasi dari Ekstra Komptabel		Hibah		Jumlah	
		Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang
16	Dinas Komunikasi & Informatika	2	206.609.850,00									2	206.609.850,00
17	Dinas Tenaga Kerja	2	11.450.001,00									2	11.450.001,00
18	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	10.027	43.930.794.569,00			50	27.000.750,00			10	14.020.134,62	10.087	43.971.815.453,62
19	Dinas Perhubungan	32	74.253.965,00							4	7.500.000,00	36	81.753.965,00
20	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	293	1.268.313.389,00									293	1.268.313.389,00
21	Dinas Perikanan	6	53.502.000,00									6	53.502.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	70	2.161.471.400,00									70	2.161.471.400,00
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	83.975.940,00									12	83.975.940,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	16	180.224.002,00									16	180.224.002,00
25	Bagian Umum	301	6.326.822.116,00									301	6.326.822.116,00
26	Kec. Gucialit	3	20.967.900,00									3	20.967.900,00
27	Kec. Senduro	4	27.006.300,00									4	27.006.300,00
28	Kec. Pasrujambe	4	32.010.700,00									4	32.010.700,00
29	Kec. Sumbersuko	1	3.589.740,00									1	3.589.740,00
30	Kec. Kedungjajang	4	32.218.860,00									4	32.218.860,00
31	Kec. Jatiroto	2	20.112.875,00									2	20.112.875,00
32	Kec. Klakah	2	8.658.000,00									2	8.658.000,00
33	Kec. Randuagung	2	19.092.000,00									2	19.092.000,00
34	Kec. Ranuyoso	2	22.177.800,00									2	22.177.800,00
35	Kec. Tekung	6	30.609.090,00									6	30.609.090,00
36	Kec. Tempeh	2	19.863.450,00									2	19.863.450,00

6

No	Uraian	Pengadaan dari Belanja Modal		Penambahan dari Belanja Modal yang lain		Pengadaan dari Belanja Barang & Jasa		Reklasifikasi dari Ekstra Komptabel		Hibah		Jumlah	
		Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang
37	Kec. Pasirian	1	15.351.300,00									1	15.351.300,00
38	Kec. Candipuro	6	27.650.000,00									6	27.650.000,00
39	Kec. Pronojiwo	4	30.558.301,00									4	30.558.301,00
40	Kec. Tempursari	4	11.532.900,00									4	11.532.900,00
	TOTAL	14.234	72.047.391.795,00	2	8.950.000,00	83	64.102.750,00	21	15.114.380,00	49	804.895.133,62	14.389	72.940.454.058,62

6

Lampiran 7. Daftar Pinjam Pakai Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2025

Dalam Rupiah

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	NOMOR			PENGUNAAN
										RANGKA	MESIN	POLISI	
I	INSTANSI PEMERINTAH												
1	Pengelola	Datasemen Polisi Militer	00010	Toyota Vioz Th. 2011	Jl. Yos Sudarso	1	232.650.000,00	028/582/427.73/2021	5 Tahun	MHKG2CJ2J7K008175	DAF2968	N 30 YP	Operasional
								B/06/XII/2021	09-03-2021				
								3/9/2021	08-03-2026				
2	Bagian Umum	Komando Distrik Militer 0821 Lumajang	00001	Toyota/Kijang Innova	Jl. Alun-alun Utara No. 09 Lumajang	1	284.837.000,00	028/149/427.18/2022	5 Tahun	MHFXW43G6E4084889	1TR7751676	N 1079 YP	Operasional
									11-04-2022				
									11-04-2026				
3	Pengelola	Badan Pengawas Pemilihan Umum	00018	Daihatsu F700RG TX MT Th. 2007	Jl. Kalimas No.15, Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang	1	122.750.000,00	000.2.5/210/427.18/2024	5 Tahun	MHKG26J2J7K008172	DAF3063	N 410 YP	Operasional
								009/PL.03.03/K.JI-10/02/2024	05-02-2024				
									05-02-2029				
4	Pengelola	Badan Pengawas Pemilihan Umum	00005	Kend. Toyota Toyota Avanza Th. 2011	Jl. Kalimas No.15, Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang	1	141.825.000,00	000.2.5/210/427.18/2024	5 Tahun	MHFM1BA2JBK037145	DH74640	N 523 YP	Operasional
								009/PL.03.03/K.JI-10/02/2024	05-02-2024				
									05-02-2029				
5	Bagian Umum	Pengadilan Negeri	00001	Mitsubishi / Pajero Sport 2.5 L Th. 2018	Jl. Gatot Subroto No. 74 Lumajang	1	463.838.000,00	000.2.5/027/427.18/2024	5 Tahun	MK2KRWMDYJJ 000943	4D56UUAU2258	N 1056 YP	Operasional
								295/KPN.W14-U14/PL1.2/2024	11-01-2024				
									11-01-2029				
6	Bagian Umum	Kejaksanaan Negeri	00001	Mitsubishi / Pajero Sport 2.5 L Th. 2018	Jl. Gatot Subroto No. 74 Lumajang	1	463.838.000,00	000.2.5/029/427.18/2024	5 Tahun	MKR2KRWMDYJJ 000921	4D56UAT5359	N 1057 YP	Operasional
								B-306/M.5.28/Cpl/01/2024	11-01-2024				
									11-01-2029				
7	Bagian Umum	Komando Distrik Militer 0821	00001	Mitsubishi / Pajero Sport 2.5 L Th. 2018	Jl. Alun-Alun Utara No. 9 Lumajang	1	463.838.000,00	000.2.5/093/427.18/2024	5 Tahun	MK2KRWMDYJJ 000935	4D56UUAU2242	N 1054 YP	Operasional
								SK/10/1/2024	11-01-2024				

f

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	NOMOR			PENGUNAAN
										RANGKA	MESIN	POLISI	
8	Bagian Umum	Komando Distrik Militer 0821	00001	Hino / Truck 130 HD Th. 2018	Jl. Alun-Alun Utara No. 9 Lumajang	1	371.522.900,00	000.2.5/093/427.18/2024	5 Tahun	MJEC1JG43J 5163917	W04DTRR55303	N 9105 YP	Operasional
								SK/10/1/2024	11-01-2024				
									11-01-2029				
9	Bagian Umum	Kepolisian Resort Lumajang	00001	Mitsubishi / Pajero Sport 2.5 L Th. 2018	Jl. Alun-alun Utara No. 11 Lumajang	1	463.838.000,00	000.2.5/031/427.18/2024	5 Tahun	MK2KRWMDYJJ 000934	4D56UAU2241	N 1055 YP	Operasional
								B/246/III/HUK.8.1/2024	22-01-2024				
									22-01-2029				
10	Pengelola	Perumda Semeru	0004	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Tahun 2021	Jalan Ahmad Yani No. 9 Lumajang	1	536.910.000,00	000.2.5/111/427.73/20226	5 Tahun	MHFAB8CSXM0488534	2GDC888012	N 1261 YP	Operasional
								500/04/427.202/2026	23-01-2026				
									23-01-2031				
		JUMLAH A				10	3.545.846.900,00						
II	NON INSTANSI PEMERINTAH												
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Wates Kulon Kec.Ranuyoso	00003	Truck Tangki Th. 2017	Desa Wates Kulon	1	356.700.936,00	000.2.1.2/348/427.76/2026	2 Tahun	MHMFE74P5HK 176128	4D34TR90I46	N 9093 YP	Operasional
									02-01-2026				
									31-12-2027				
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Desa Kedawung Kec. Padang	00004	Truck Tangki Th. 2017	Desa Kedawung	1	356.700.936,00	000.2.1.2/347/427.76/2026	2 Tahun	MHMFE74P5HK 176129	4D34TR90144	N 9094 YP	Operasional
									02-01-2026				
									31-12-2027				
		JUMLAH A				2	713.401.872,00						
		JUMLAH A+B				12	4.259.248.772,00						

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
I	INSTANSI PEMERINTAH										
1	Bagian Umum	Kejaksaan Negeri		Kursi Tunggu	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.425.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi Tunggu	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.425.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi Tunggu	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.425.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Reception	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	10.306.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi Tamu	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	8.103.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Kursi Sofa Seraton 3111	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.414.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.414.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Meja Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.414.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.414.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.414.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.414.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	2.414.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Bulat	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	11.988.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Meja Kerja Custom 3 Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	14.541.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi Kerja Eselon	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	3.163.500,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Kursi Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	1.942.500,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	1.942.500,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	1.942.500,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi Kerja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	1.942.500,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Lemari Etalase	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	5.766.450,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Lemari Etalase	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	5.766.450,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Handmade	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Lampu Gantung	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	3.774.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun		Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Kursi	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	427.350,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Infinity	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Filling Cabinet	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	3.746.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Acero AA-FD4	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaa Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				Filling Cabinet	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	3.746.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Acero AA-FD4	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Filling Cabinet	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	3.746.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Acero AA-FD4	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Filling Cabinet	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	3.746.250,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Acero AA-FD4	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Alat Pemadam Kebakaran	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	1.498.500,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	EsPyro	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Alat Pemadam Kebakaran	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	1.498.500,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	EsPyro	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				AC	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	6.438.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Sharp Zcy Series	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				AC	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	6.438.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Sharp Zcy Series	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				AC	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	6.438.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Sharp Zcy Series	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		

6

NO	NAMA SKPD	LEMBAGA YANG PINJAM	NO. Register	NAMA / JENIS BARANG	LOKASI/TEMPAT	JUMLAH BARANG	NILAI PEROLEHAN	NO.TGL.PERJANJIAN	MASA BERLAKU	MERK/TYPE	PENGUNAAN
				AC	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	8.325.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Sharp AC 2 PK AHA18SAY2	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				AC	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	8.325.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	Sharp AC 2 PK AHA18SAY2	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
									22-10-2027		
				Sofa dan Meja	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Nomor 131 Lumajang	1	17.316.000,00	000.2.5/562/427.18/2025	2 Tahun	King Master	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Lumajang
								22-10-2025	22-10-2025		
								22-10-2025	22-10-2027		
						90	190.548.150,00				

6

Lampiran 8. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Pengadaan dari Belanja Modal		Penambahan dari Belanja Modal yang lain		Pengadaan dari Belanja Barang & Jasa		Koreksi Kurang Catat		Hibah		Reklasifikasi Antar Gol. Barang		Hutang Belanja		Jumlah	
		Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang
1	Inspektorat Kabupaten		484.398.193,36														484.398.193,36
2	BAPPEDA	1	49.163.400,00													1	49.163.400,00
3	Badan Kepegawaian Daerah		194.693.844,80														194.693.844,80
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah		224.775.000,00							3	2.442.983.191,72					3	2.667.758.191,72
5	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	2	349.540.525,00													2	349.540.525,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			1	50.000.000,00											1	50.000.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	9.751.245.400,00					49	7.020.618.069,82	38	4.109.932.600,00				199.851.000,00	88	21.081.647.069,82
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA		370.498.774,66														370.498.774,66
9	Dinas Lingkungan Hidup	6	4.225.524.300,00													6	4.225.524.300,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga		215.234.860,00														215.234.860,00
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB		1.310.085.549,00		4.463.725.200,00								196.800.000,00				5.970.610.749,00
12	Dinas Perhubungan		161.606.930,00														161.606.930,00
13	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	4	801.356.792,00				73.696.700,00									4	875.053.492,00

f

No	Uraian	Pengadaan dari Belanja Modal		Penambahan dari Belanja Modal yang lain		Pengadaan dari Belanja Barang & Jasa		Koreksi Kurang Catat		Hibah		Reklasifikasi Antar Gol. Barang		Hutang Belanja		Jumlah	
		Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang
	Perdagangan																
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	2.502.630.917,00										9.150.397.605,00			3	11.653.028.522,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		373.876.724,07										14.976.945,85				388.853.669,92
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		145.278.205,00														145.278.205,00
17	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		137.439.604,37														137.439.604,37
18	Bagian Umum		632.746.179,00														632.746.179,00
19	Kec. Pasrujambe		46.358.000,00														46.358.000,00
20	Kec. Jatiroto		33.891.576,42														33.891.576,42
	TOTAL	17	22.010.344.774,68	1	4.513.725.200,00		73.696.700,00	49	7.020.618.069,82	41	6.552.915.791,72		9.362.174.550,85		199.851.000,00	108	49.733.326.087,07

6

Lampiran 9. Daftar Bangunan Milik Pemkab Lumajang yang menempati Tanah milik TNI dan BUMN

Dalam Rupiah

No	Nama Lembaga	Letak / Lokasi Alamat	Jumlah Bangunan	Luas (M ²)	Harga Perolehan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	KANTOR UPT PENDIDIKAN KECAMATAN KUNIR	Jl. PB Sudirman Kunir Lor	1	36	10.800.000,00	Tanah PGRI
2	KANTOR UPT PENDIDIKAN KECAMATAN PASIRIAN	Jl. Raya Pasirian	3	401	230.000.000,00	Tanah PGRI
3	KANTOR UPT PENDIDIKAN KECAMATAN SUKODONO	Jl Kelud Dawuhan Lor	1	128	250.000.000,00	Tanah PGRI
4	Kecamatan Jatiroto	Jl. Gajahmada 02	5	24501	1.118.493.021,00	Tanah PG
5	SDN BADES 06	jl.ptpn xii krajan	5	554	690.485.000,00	Tanah PTP
6	SDN BAGO 04	jl banyu adem bago rekesan	4	555	660.955.721,00	Tanah Perhutani
7	SDN DAWUHAN WETAN 02	Desa Dawuhan Wetan	5	420	892.088.579,00	Tanah PG
8	SDN GEDANGMAS 03	Jl. Patih Nambi, Gedangmas, Randuagung	6	206	778.384.000,00	Tanah PG
9	SDN GONDORUSO 01	jl. semeru gondoruso	8	4341	740.000.000,00	Tanah Perhutani
10	SDN GUCIALIT 02	Afdiling Puring PTPN XII Kebun Kertowono - Gucialit	4	813	930.079.085,00	Tanah PTP
11	SDN JATIMULYO 02	Jl. Pantai Selatan RT 919 RW 4 Jatimulyo	2	200	249.709.520,00	Tanah Perhutani
12	SDN KALIBOTO KIDUL 01	Jl. Ranupakis No. 20 Kaliboto Kidul - Jatiroto	10	1214	1.405.467.136,00	Tanah PG
13	SDN KALIBOTO KIDUL 04	Dusun Umbulsari Desa Kaliboto Kidul	2	572	415.000.000,00	Tanah PG
14	SDN KALIBOTO KIDUL 06	Dusun Petung Jaya Desa Kaliboto Kidul	4	761	514.530.158,00	Tanah PG
15	SDN KALIBOTO LOR 04	JL. Gajah Mada No. 04 Jatiroto	5	491.547	738.178.000,00	Tanah PG
16	SDN KALIBOTO LOR 05	Persil Nyeoran Kec. Jatiroto	4	742	1.170.474.158,00	Tanah PG
17	SDN KALIBOTO LOR 09	Kampung Persil Nyeoran	8	1620	1.719.717.358,00	Tanah PG
18	SDN KALIBOTO LOR 10	Jl. KH. Achmad Dahlan No 04 Jatiroto	3	763	570.306.500,00	Tanah PG
19	SDN KALIBOTO LOR 11	Belakang RSU Jatiroto	4	469	454.527.860,00	Tanah PG
20	SDN KALIBOTO LOR 15	Persil Genitri lor	1	530	276.490.720,00	Tanah PG
21	SDN KALIDILEM 02	Dusun Curah Lapak Desa Kalidilem	2	738	796.415.000,00	Tanah PG

No	Nama Lembaga	Letak / Lokasi Alamat	Jumlah Bangunan	Luas (M ²)	Harga Perolehan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
22	SDN KALIDILEM 03	Desa Kalidilem Kec. Randuagung	2	199	300.000.000,00	Tanah PG
23	SDN KEPUHARJO 02	Jl. A. Yani No. 152 , Kepuharjo	8	908	849.274.104,00	tanah batalyon
24	SDN KERTOWONO 04	Afdeling Kamar Tengah PTPN XII Kebun Kertowono	2	489	278.552.000,00	Tanah PTP
25	SDN KLOPOSAWIT 02	Jl. Raya Kloposawit	6	680	663.111.920,00	Tanah Perhutani
26	SDN KLOPOSAWIT 03	Jl. Kebonjati	2	318	318.033.200,00	Tanah Perhutani
27	SDN PANDANWANGI 03	Jln.tunjungan NO.47 Desa Pandanwangi	3	1644	283.394.260,00	Tanah Translok
28	SDN PENANGGAL 03	Jl. Proyek Cengkeh	3	563	558.488.080,00	Tanah Perhutani
29	SDN ROJOPOL 02	Rojopolo Persil	2	700	239.218.000,00	Tanah PG
30	SDN ROJOPOL 07	Dusun Rowokul Desa Sukosari	2	3.563	255.360.000,00	Tanah PG
31	SDN ROWOKANGKUNG 02	Persil banter Desa Rowokangkung	4	417	482.581.384,00	Tanah PG
32	SDN ROWOKANGKUNG 03	Persil Blimbing Desa Rowokangkung	4	459	363.467.600,00	Tanah PG
33	SDN ROWOKANGKUNG 04	Persil Genitri Kidul Desa Rowokangkung	5	658	1.006.246.031,87	Tanah PG
34	SDN ROWOKANGKUNG 05	Desa Rowokangkung	5	487	783.547.127,65	Tanah PG
35	SDN SUMBEREJO 03	Jl. Penanggal	5	392	498.645.600,00	Tanah Perhutani
36	SDN SUMBERSARI 02	Desa Sumbersari	4	490	474.360.000,00	Tanah PG
37	SDN SUMBERWULUH 02	Jl. Kajar Kuning	3	454	358.758.684,00	Tanah Perhutani
38	SDN SUMBERWULUH 03	Jl. Jaya Negara	4	527	541.992.680,00	Tanah Perhutani
39	SDN SUMBERWULUH 04	Jl. Kebondeli	6	1155	898.902.880,00	Tanah Perhutani
40	SDN TUNJUNG 02	Persil Gedangan Desa Tunjung Kec.Randuagung	6	278	600.743.158,00	Tanah PG
41	SMPN 1 JATIROTO	Jl. Raya No. 02 Jatiroto	15	3019	2.593.373.828,75	Tanah HGB PG Jatiroto
42	SMPN 2 JATIROTO	Jl. Nyeoran Jatiroto	10	2109,4	1.874.331.395,00	Tanah HGB PG Jatiroto
			188		28.834.483.749,27	

6

Lampiran 10. Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam Rupiah

No	Nama Sekolah	Alamat			Nilai Diterima	Uraian Pekerjaan	Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten			
1	2	3	4	5	6	7	8
	JENJANG TAMAN KANAK-KANAK				484.407.000,00		1 Satuan Pendidikan
1	TK NEGERI PEMBINA YOSOWILANGUN	YOSOWILANGUN	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	484.407.000,00	REHABILITASI RUANG ADMINISTRASI, REHABILITASI RUANG KELAS	
	JENJANG SEKOLAH DASAR				19.079.228.141,00		26 Satuan Pendidikan
2	SD NEGERI BULUREJO 02	BULUREJO	TEMPURSARI	LUMAJANG	517.534.440,00	REHABILITASI RUANG KELAS, REHABILITASI TOILET, PEMBANGUNAN TOILET	
3	SD NEGERI JARIT 01	JARIT	CANDIPURO	LUMAJANG	730.907.363,00	PEMBANGUNAN TOILET, REHABILITASI RUANG KELAS	
4	SD NEGERI KALIPEPE 02	KALIPEPE	YOSOWILANGUN	LUMAJANG	535.385.357,00	PEMBANGUNAN TOILET, REHABILITASI RUANG ADMINISTRASI, REHABILITASI RUANG KELAS	
5	SD NEGERI KEPUHARJO 01	KEPUHARJO	LUMAJANG	LUMAJANG	1.212.385.594,00	REHAB RUANG KELAS, PEMBANGUNAN TOILET, PEMBANGUNAN RUANG UKS, PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN	
6	SD NEGERI KUNIR LOR 01	KUNIR	KUNIR	LUMAJANG	819.195.797,00	PEMBANGUNAN TOILET, REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN, REHABILITASI RUANG KELAS	
7	SD NEGERI KUTORENON 03	KUTORENON	LUMAJANG	LUMAJANG	461.590.049,00	PEMBANGUNAN TOILET, REHABILITASI RUANG KELAS	
8	SD NEGERI PRONOJIWO 01	PRONOJIWO	PRONOJIWO	LUMAJANG	592.660.621,00	REHAB RUANG KELAS, PEMBANGUNAN TOILET	
9	SD NEGERI SUMBERMUJUR 02	SUMBERMUJUR	CANDIPURO	LUMAJANG	448.067.466,00	PEMBANGUNAN TOILET, REHAB RUANG KELAS, REHAB RUANG ADMINISTRASI	
10	SD NEGERI SUMBERSUKO	SUMBERSUKO	SUMBERSUKO	LUMAJANG	230.021.042,00	PEMBANGUNAN LABORATORIUM	
11	SD-SMP NEGERI SATU ATAP BURNO SENDURO	BURNO	SENDURO	LUMAJANG	726.289.000,00	REHAB RUANG KELAS, REHAB TOILET, PEMBANGUNAN UKS	
12	SD NEGERI PASRUJAMBE 09	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	923.131.876	REHABILITASI RUANG KELAS, REHABILITASI RUANG ADMINISTRASI, PEMBANGUNAN RUANG UKS, PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN	
13	SD NEGERI PASRUJAMBE 03	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	775.947.749	REHAB RUANG KELAS, REHAB RUANG ADMIN, REHAB TOILET	
14	SD NEGERI ORO ORO OMBO 01	ORO ORO OMBO	PRONOJIWO	LUMAJANG	676.259.734	REHABILITASI TOILET, REHABILITASI RUANG KELAS	
15	SD NEGERI PAKEL 01	PAKEL	GUCIALIT	LUMAJANG	861.539.793	PEMBANGUNAN UKS, REHAB RUANG KELAS, REHAB TOILET, REHAB RUANG ADMINISTRASI, REHAB RUMAH DINAS	
16	SD NEGERI PAGOWAN 02	PAGOWAN	PASRUJAMBE	LUMAJANG	735.898.538	REHABILITASI RUANG KELAS, PEMBANGUNAN RUANG UKS, PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN	
17	SD NEGERI RANDUAGUNG 03	RANDUAGUNG	RANDUAGUNG	LUMAJANG	768.646.498	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN, PEMBANGUNAN UKS, REHAB RUANG KELAS	
18	SD NEGERI PULO 04	PULO	TEMPEH	LUMAJANG	361.868.642	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN, REHAB RUANG KELAS	

f

No	Nama Sekolah	Alamat			Nilai Diterima	Uraian Pekerjaan	Keterangan
		Desa	Kecamatan	Kabupaten			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	SD NEGERI PURWOREJO 01	PURWOREJO	SENDURO	LUMAJANG	978.427.781	REHABILITASI RUANG KELAS,REHABILITASI PERPUSTAKAAN,REHABILITASI TOILET,PEMBANGUNAN RUANG RKB	
20	SD NEGERI KERTOSARI 02	KERTOSARI	PASRUJAMBE	LUMAJANG	828.649.481	PEMBANGUNAN TOILET,PEMBANGUNAN UKS,PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN,REHABILITASI RUANG KELAS	
21	SD NEGERI SENDURO 03	SENDURO	SENDURO	LUMAJANG	704.884.334	REHABILITASI RUANG KELAS,REHABILITASI KANTOR ADMINISTRASI,REHABILITASI TOILET	
22	SD NEGERI BURNO 01	BURNO	SENDURO	LUMAJANG	650.037.772	PEMBANGUNAN UKS,REHAB RUANG KELAS,REHAB RUANG ADMIN	
23	SD NEGERI KALISEMUT 02	KALISEMUT	PADANG	LUMAJANG	883.073.433	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN,PEMBANGUNAN UKS,REHAB RUANG KELAS,REHAB RUANG ADMINISTRASI	
24	SD NEGERI SENTUL 02	SENTUL	SUMBERSUKO	LUMAJANG	851.781.548	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN,PEMBANGUNAN UKS,REHAB RUANG KELAS,REHAB RUANG ADMINITRASI,REHAB TOILET	
25	SD NEGERI MERAKAN 03	MERAKAN	PADANG	LUMAJANG	915.939.727	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN,PEMBANGUNAN UKS,REHAB RUANG KELAS	
26	SD NEGERI GRATI 02	GRATI	SUMBERSUKO	LUMAJANG	987.259.740	REHAB RUANG KELAS,REHAB TOILET,PEMBANGUNAN UKS,REHAB RUANG ADMINISTRASI,PEMBANGUNAN UKS	
27	SD NEGERI RANUYOSO 01	RANUYOSO	RANUYOSO	LUMAJANG	901.844.766	PEMBANGUNAN UKS,PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN,REHAB RUANG KELAS,REHAB RUANG ADMINISTRASI,REHAB TOILET	
	JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				4.913.995.000		6 Satuan Pendidikan
28	SMP NEGERI 1 KLAKAH	KLAKAH	KLAKAH	LUMAJANG	1.020.772.000,00	RUANG KELAS,PEMBANGUNAN UKS,REHAB TOILET	
29	SMP NEGERI 1 KUNIR	KUNIR LOR	KUNIR	LUMAJANG	919.166.000,00	PEMBANGUNAN TOILET,REHABILITASI RUANG KELAS	
30	SMP NEGERI 1 ROWOKANGKUNG	ROWOKANGKUNG	ROWOKANGKUNG	LUMAJANG	899.796.000,00	PEMBANGUNAN TOILET,REHAB RUANG KELAS,REHAB LABORATORIUM	
31	SMP NEGERI 1 TEKUNG	TEKUNG	TEKUNG	LUMAJANG	898.484.000,00	PEMBANGUNAN LABORATORIUM,REHAB KELAS,REHAB TOILET	
32	SMP NEGERI 3 LUMAJANG	GRATI	LUMAJANG	LUMAJANG	683.568.000	REHAB RUANG KELAS,PEMBANGUNAN TOILET	
33	SMP NEGERI 2 PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	PASRUJAMBE	LUMAJANG	492.209.000	PEMBANGUNAN RKB	
	JUMLAH TOTAL				24.477.630.141,00		

6

Lampiran 11. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Uraian	Pengadaan dari Belanja Modal		Reklasifikasi dari Belanja Modal yang lain		Hibah		Reklasifikasi Antar Gol. Barang		Hutang Belanja		Jumlah	
		Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	0,00	0	0,00	32	80.518.218.152,79	0	0,00	0	0,00	32	80.518.218.153
2	Dinas Lingkungan Hidup	0	0,00	2	3.676.100.710,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.676.100.710
3	Dinas Komunikasi & Informatika	0	0,00	0	92.224.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	92.224.350
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1	6.096.919.200,00	0	0,00	0	0,00	0	219.275.463,00	0	0,00	1	6.316.194.663
5	Dinas Perhubungan	1	103.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	103.370.000
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24	55.264.701.193,07	0	0,00	0	37.905.962.867,20	0	492.595.000,00	0	187.985.954,00	24	93.851.245.014
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	3.892.016.656,00	0	0,00	0	0,00	0	9.150.000,00	0	0,00	4	3.901.166.656
	TOTAL	30	65.357.007.049,07	2	3.768.325.060,30	32	118.424.181.019,99	0	721.020.463,00	0	187.985.954,00	64	188.458.519.546,36

f

Lampiran 12. Daftar Jalan yang dibangun bukan di atas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang

Dalam Rupiah

No	KODE RUAS	Nama Ruas	NAMA PENGENAL		Panjang	Kecamatan	Kepemilikan tanah
					(Km)		
1	2	3	4		5	6	7
1	066.00	Sumberwuluh - Gunung sawur	Sumberwuluh	Gunung Sawur	4,45	Candipuro	PERUM (PERHUTANI)
2	068.00	Penanggal - Klopasawit	Penanggal	Klopasawit	5,45	Candipuro	PERHUTANI AWAL RUAS
3	204.00	Candipuro - Penanggal	Candipuro	Penanggal	6,35	Candipuro	PERUM (PERHUTANI)
4	206.00	Sumbermujur - Penanggal	Sumbermujur	Penanggal	5,2	Candipuro	PERHUTANI AKHIR RUAS
5	209.00	Sumbermujur - Umbulrejo	Sumbermujur	Umbulrejo	1,35	Candipuro	PERUM (PERHUTANI)
6	017.00	Gondoruso - Dampar	Gondoruso	Dampar	4,6	Pasirian	PTPN AKHIR RUAS
7	018.00	Dampar - Kali Gede	Dampar		6,6	Pasirian	PTPN TENGAH RUAS
8	041.00	JLS – Bambang	Bago	Pantai Bambang	2,45	Pasirian	PERUM (PERHUTANI)
9	196.00	Lingkar Watu Udel	Watu Udel	Watu Udel	2,25	Pasirian	PERUM (PERHUTANI)
10	197.00	Dampar – Pantai	Dampar	Pantai Dampar	2,55	Pasirian	PTPN
11	005.00	Wonorejo - Curah Petung	Wanorejo	Curah Petung	2,3	Kedungjajang	PT. KAI
12	008.00	Karanganom - Senduro	Karanganom	Senduro	7,75	Kedungjajang	PERUM (PERHUTANI)
13	019.00	Kali Gede - Karangmenjangan	Kali Gede	Karangmenjangan	12,4	Tempursari	PERHUTANI
14	038.00	Pandanwangi - JLS	Pandanwangi	Jalan Lintas Selatan	0,7	Tempursari	TNI AU
15	064.00	Persil - Summersari	Persil	Summersari	3,4	Tempursari	PG. JATIROTO
16	132.00	Summersari - Nogosari	Summersari	Nogosari	2	Tempursari	PG. JATIROTO
17	032.00	Rojopolo – Persil	Rojopolo	Persil	4	Jatiroto	PG. JATIROTO
18	063.00	Jatiroto – Persil	Jatiroto	Persil	6,8	Jatiroto	PG. JATIROTO
19	129.00	Curahwedi - Kaliboto	Curahwedi	Kaliboto	2,55	Jatiroto	PT. KAI AWAL RUAS
20	263.00	Puskesmas	Jembatan Puskesmas	Alun alun Jatiroto	0,42	Jatiroto	PG. JATIROTO
21	264.00	Kecamatan Jatiroto	Polsek Jatiroto	Kecamatan Jatiroto	0,16	Jatiroto	PG. JATIROTO
22	265.00	Stasiun Jatiroto	Pertigaan Beringin	Perempatan Pabrik	1,13	Jatiroto	PG. JATIROTO
23	118.00	Umbul – Pajarakan	Umbul	Pajarakan	5,25	Randuagung	PERUM (PERHUTANI) Awal Ruas
24	122.00	Tunjung - Kalibanter	Tunjung	Kalibanter	9	Randuagung	PERHUTANI / PTP AKHIR RUAS
25	127.00	Kalidilem - Banyuputih Kidul	Kalidilem	Banyuputih Kidul	2,25	Randuagung	PG. JATIROTO AKHIR RUAS
26	097.00	Ranu Klakah - Ranu Pakis	Ranu Klakah	Ranu Pakis	2,55	Klakah	PERUM (PERHUTANI)
27	098.00	Papringan - Gunung Lemongan	Papringan	Gunung Lemongan	2,5	Klakah	Kehutanan

f

No	KODE RUAS	Nama Ruas	NAMA PENGENAL		Panjang	Kecamatan	Kepemilikan tanah
					(Km)		
1	2	3	4		5	6	7
28	261.00	Stasiun Klakah	Kantor Telkom	Pasar Klakah	0,42	Klakah	PT. KAI
29	051.00	Senduro - Ranu Pane	Senduro	Ranu Pane	30,45	Senduro	TNBTS
30	053.00	Kayu Enak - Argosari	Kandangan	Argosari	15,25	Senduro	TNBTS
31	025.00	Kedawung - Gucialit	Kedawung	Gucialit	5,65	Gucialit	PTP
32	074.00	Wonokerto - Gucialit	Wonokerto	Gucialit	5,45	Gucialit	PERUM (PERHUTANI)
33	077.00	Jeruk - Sombo	Jeruk	Sombo	6,75	Gucialit	PERKEBUNAN
34	256.00	Wonokerto - Kenongo	Wonokerto	Kenongo	7,7	Gucialit	PERUM (PERHUTANI)
35	416.00	Brigjen Katamso	Simpang Lima Pasar Besar	Perempatan Toga	0,83	Dalam Kota	PT. KAI
36	417.00	Gajah Mada	Perempatan Toga	Perempatan LSC	1,46	Dalam Kota	PT. KAI
37	418.00	Hayam Wuruk	Perempatan LSC	Pertigaan Pasar Sukodono	0,39	Dalam Kota	PT. KAI
38	451.00	Demokrasi	Pertigaan Pasar Hewan	Pertigaan MKS	0,8	Dalam Kota	PT. KAI
39	466.00	Piere Tendean	Pertigaan Gedung Kematian	Simpang Lima Pasar Besar	0,47	Dalam Kota	PT. KAI
40	488.00	Iskandar Muda	Perempatan RSI	Pertigaan Warung Bu Kaji	0,33	Dalam Kota	PT. KAI

6

Lampiran 13. Daftar Rincian Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Perolehan	Asal Usul Pembiayaan	Jumlah Barang	Nilai Kontrak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan R. Kelas Baru (SMPN Satap Ranupane)	11 Juni 2025	Belanja Modal	0	13.986.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Sumbermujur 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kalipenggung 04)	04 November 2025	Belanja Modal	0	5.911.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Banyuputih Kidul 02)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Sawaran Kulon 02)	04 November 2025	Belanja Modal	0	5.854.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Curah Petung 03)	04 November 2025	Belanja Modal	0	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Krasak 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kaliboto Lor 02)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Grobogan 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Pagowan 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Citrodiwangsan 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kedawung 03)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Merakan 02)	04 November 2025	Belanja Modal	0	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Wonokerto 03)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Karanganom 02)	04 November 2025	Belanja Modal	0	5.950.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Gucialit 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Ranuyoso 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Nogosari 02)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kalisemut 03)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Uranggantung 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Sentul 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Karangbendo 05)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Tegalrejo 02)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Yosowilangun Lor 03)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	Rehabilitasi Ruang Kelas (SDN Kalidilem 03)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Rehab Ruang Guru (SDN Kenongo)	04 November 2025	Belanja Modal	0	2.961.300,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Rehab Ruang Guru (SDN Citrodiwangsan 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	2.794.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Pembangunan Ruang Kelas (SDN Salak 01)	04 November 2025	Belanja Modal	0	6.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

f

No	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Perolehan	Asal Usul Pembiayaan	Jumlah Barang	Nilai Kontrak	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
29	Pembangunan Toilet (SDN Bago 03)	04 November 2025	Belanja Modal	0	3.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (SMPN 1 Ranuyoso)	04 November 2025	Belanja Modal	0	4.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	Rehabilitasi Toilet (SMP SSA Negeri Wonokerto)	04 November 2025	Belanja Modal	0	2.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	Biaya perencanaan pengadaan pasang baru PJU	2025	Belanja Modal	1	83.720.000,00	Dinas Perhubungan
33	Perencanaan pasar agropolitan pemasangan portal	2025	Belanja Modal	1	23.064.868,00	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan
34	Perencanaan Rehab Pasar Yosowilangun	2025	Belanja Modal	1	9.574.500,00	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan
35	Perencanaan Rehab Pasar Klojen	2025	Belanja Modal	1	12.080.250,00	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan
36	Pembangunan IGD RSUD dr. HARYOTO Lumajang (MC 100%)	2025	Belanja Modal	0	934.812.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
37	Perencanaan Pembangunan Kampus Unej di Lumajang	2025	Belanja Modal	1	2.557.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
38	Perencanaan Pembangunan Gedung Polinema Tahap III	2025	Belanja Modal	1	95.911.200,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
39	Perencanaan Peningkatan Jalan Gesang -Tumpeng	2025	Belanja Modal	1	102.821.507,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
40	Perencanaan Peningkatan Jalan Sumbermujur - Penanggal	2025	Belanja Modal	1	89.873.967,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
41	Perencanaan Peningkatan Jalan Gunung Sawur - Penanggal	2025	Belanja Modal	1	99.870.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
42	Perencanaan Peningkatan Jalan Tanggung - Kalisemut	2025	Belanja Modal	1	69.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
43	Perencanaan Peningkatan Jalan Wonosari - Kabuaran	2025	Belanja Modal	1	89.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
44	Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkar Umbulrejo	2025	Belanja Modal	1	39.883.188,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
45	Perencanaan Peningkatan Jalan Tumpeng - Pasrujambe	2025	Belanja Modal	1	99.870.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
46	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Tunjung - Kaibanter	2025	Belanja Modal	1	97.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
47	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Kalidilem - Sukosari	2025	Belanja Modal	1	99.650.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
48	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Ranu Klakah - Sumberingin	2025	Belanja Modal	1	99.800.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
49	Perencanaan (Dokumen FS, DED, UKL UPL)	2025	Belanja Modal	1	362.193.600,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	TOTAL JUMLAH			17	2.584.639.180,98	

6

Lampiran 14. Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Penambahan						Pengurangan					
		Reklasifikasi dari Belanja Modal		Pengadaan dari Belanja Barang & Jasa		Jumlah Penambahan		Penghapusan Aset		Reklasifikasi Antar Golongan Barang		Jumlah Pengurangan	
		Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang	Jml	Nilai Barang
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		172.456.300,00			-	172.456.300,00						
2	Dinas Perhubungan	1	83.720.000,00			1	83.720.000,00						
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB							1	42.735.000,00	1	196.800.000,00	2	239.535.000,00
4	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan	3	44.719.618,00			3	44.719.618,00						
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12	1.921.549.662,98			12	1.921.549.662,98			6	9.642.992.605,00	6	9.642.992.605,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										14.976.945,85		14.976.945,85
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			1	362.193.600,00	1	362.193.600,00			1	9.150.000,00	1	9.150.000,00
	TOTAL	16	2.222.445.580,98	1	362.193.600,00	17	2.584.639.180,98	1	42.735.000,00	8	9.863.919.550,85	9	9.906.654.550,85

f

Lampiran 15. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset tetap Tahun 2025

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Beban penyusutan Tahun 2025	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025
1	Peralatan dan Mesin	(787.161.521.371,78)	(2.618.471.000,00)	(10.406.997.379,48)	(59.416.544.903,93)	(838.789.539.896,23)
2	Gedung dan Bangunan	(377.778.659.849,63)	(1.431.936.740,32)	(2.013.580.235,15)	(23.985.946.738,63)	(401.182.963.093,43)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.124.121.556.405,03)	(2.011.796.974,99)	(30.969.424.060,44)	(79.113.335.152,70)	(1.174.277.264.472,28)
4	Aset Tetap Lainnya	(2.722.273.466,64)	(851.047.000,00)	(988.586.000,00)	(9.640.500,00)	(2.594.374.966,64)
Jumlah		(2.291.784.011.093,08)	(6.913.251.715,31)	(44.378.587.675,07)	(162.525.467.295,26)	(2.416.844.142.428,59)

f

Lampiran 16. Daftar Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Penyewa	Lokasi/ Tempat	Ukuran	No. Sertifikat	No. Tgl. Perjanjian	Masa Berlaku	Nilai Perolehan	Biaya Sewa					Penggunaan
									2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	TANAH													
I	TANAH KESELURUHAN													
1	Dinas Pertanian	DIDIK PURNIAWAN	Ds. Sumberurip Kec. Pronojiwo	0,590 Ha	No. 1/22 Sept. 1987	593.1/ 2704/427.73/2025 29 Okt 2025	1 Tahun (29-10-2025 s/d 28- 10-2026)	823.113.333,00				8.250.000,00		Tanaman Salak Pondoh
2	Pengelola	SANUSI	Kel. Jogotrunan	2,850 Ha		593.1/14994/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	645.290.000,00				120.000.000,00		Sawah
3	Pengelola	KETANG	Ds. Bago	0,526 Ha		593.1/15014/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-1-2025 s/d 20-12- 2026)	57.500.000,00				5.850.000,00		Sawah
4	Pengelola	sukandar	Kel Jogotrunan	1,456 Ha		593.1/15008/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	86.700.000,00				51.166.000,00		Sawah
5	Pengelola	INDRA WIBOWO LEKSANA	Kel. Jogoyudan	0,506 Ha		593.1/14989/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	128.500.000,00				10.900.000,00		Sawah
6	Pengelola	M. HERI FEBRIANTO	Kel. Jogoyudan	0,549 Ha		593.1/14990/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	131.250.000,00				12.500.000,00		Sawah
7	Pengelola	M.ISMAIL MARZUKI	Kel. Jogoyudan	0,960 Ha		593.1/15005/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	96.000.000,00				24.350.000,00		Sawah
8	Pengelola	PURNOMO	Kel. Jogoyudan	1,501 Ha		593.1/15003/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	531.300.000,00				55.000.000,00		Sawah
9	Pengelola	PURNOMO	Kel. Jogoyudan	2,769 Ha		593.1/19769/427.56/2024 20 Nov 2023	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)					98.000.000,00		Sawah
10	Pengelola	PURNOMO	Kel. Jogoyudan	1,054 Ha		593.1/15002/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)					23.000.000,00		Sawah
11	Pengelola	PURNOMO	Kel. Jogoyudan	1,759 Ha		593.1/15004/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	175.900.000,00				58.000.000,00		Sawah
12	Pengelola	FIRDAUS MUKHAMMAD LUTHFI	Kel. Jogoyudan	1,463 Ha		593.1/15005/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	146.300.000,00				51.750.000,00		Sawah
13	Pengelola	PURNOMO	Kel. Kepuharjo	1,638 Ha		593.1/19766/427.56/2024 27 Nov 2023	1 Tahun (01-4-2025 s/d 20-3- 2026)	165.300.000,00				51.000.000,00		Sawah

f

No	Nama OPD	Penyewa	Lokasi/ Tempat	Ukuran	No. Sertifikat	No. Tgl. Perjanjian	Masa Berlaku	Nilai Perolehan	Biaya Sewa					Penggunaan
									2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Pengelola	YASIN BUNINGWAR	Kel. Kepuharjo	1,665 Ha		593.1/15006/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-4-2025 s/d 20-3- 2026)	56.900.000,00				51.550.000,00		Sawah
15	Pengelola	PURNOMO	Kel. Kepuharjo	1,653 Ha		593.1/15009/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-4-2025 s/d 20-3- 2026)	150.000.000,00				51.000.000,00		Sawah
16	Pengelola	SUNYONO	Kel. Kepuharjo	0,532 Ha		593.1/15010/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-4-2025 s/d 20-3- 2026)	167.058.200,00				16.050.000,00		Sawah
17	Pengelola	M. HERI FEBRIANTO	Kel. Kepuharjo	0,575 Ha		593.1/15015/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-4-2025 s/d 20-3- 2026)	80.458.400,00				17.008.000,00		Sawah
18	Pengelola	M. HERI FEBRIANTO	Kel. Kepuharjo	0,629 Ha		593.1/15012/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-4-2025 s/d 20-3- 2026)					18.005.000,00		Sawah
19	Pengelola	RIYANTO	Kel. Ditotrunan	1,428 Ha		593.1/14995/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	1.483.965.000,00				58.500.000,00		Sawah
20	Pengelola	SANUSI	Kel. Ditotrunan	1,215 ha		593.1/14996/427.56/2024 16 Des 2025	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	2.604.630.000,00				35.000.000,00		Sawah
21	Pengelola	SANUSI	Kel. Ditotrunan	1,030 ha		593.1/14997/427.56/2024 16 Des 2025	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)					30.000.000,00		Sawah
22	Pengelola	SUNYONO	Kel. Ditotrunan	0,600 ha		593.1/14998/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	624.960.000,00				13.400.000,00		Sawah
23	Pengelola	RIYANTO	Kel. Ditotrunan	0,700 ha		593.1/14999/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	723.345.000,00				29.000.000,00		Sawah
24	Pengelola	JOKO SAMPURNO	Kel. Ditotrunan	1,958 ha		593.1/15000/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	3.113.355.000,00				80.000.000,00		Sawah
25	Pengelola	JOKO SAMPURNO	Kel. Ditotrunan	1,272 ha		593.1/15001/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)					32.700.000,00		Sawah
26	Pengelola	RIYANTO	Kel. Citrodiwangsan. Ds. Labruk Lor	2,499 Ha		593.1/14988/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-2-2025 s/d 20-1- 2026)	525.000.000,00				62.000.000,00		Sawah
27	Pengelola	SUDIRMAN	Kel. Citrodiwangsan.	1,150 Ha		593.1/14992/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-4-2025 s/d 20-3- 2026)	431.160.500,00				30.100.000,00		Sawah
28	Pengelola	SUDIRMAN	Kel. Citrodiwangsan.	0,585 Ha		593.1/14991/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-04-2025 s/d 20- 03-2026)	131.250.000,00				20.600.000,00		Sawah

6

No	Nama OPD	Penyewa	Lokasi/ Tempat	Ukuran	No. Sertifikat	No. Tgl. Perjanjian	Masa Berlaku	Nilai Perolehan	Biaya Sewa					Penggunaan
									2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	Pengelola	SUDIRMAN	Kel. Citrodiwangsan.	1,728 Ha		593.1/14991/427.56/2024 16 Des 2024	1 Tahun (01-04-2025 s/d 20- 03-2026)	393.750.000,00				55.100.000,00		Sawah
30	Pengelola	ARIF	Ds. Wonosari Kec. Tekung	4,895 Ha		593.1/2403/427.73/2025 29 Okt 2025	1 Tahun (29-20-20235 s/d 28- 10-2026)	2.500.000.000,00				129.976.200,00		TanamanTebu
31	Pengelola	MUHAMMAD ABDUL MUKID	Desa Duren Kec. Klakah	2,550 Ha		593.1/2707/427.73/2025 29 Okt 2025	1 Tahun (29-10-2025 s/d 28- 10-2026)	162.350.000,00				67.756.350,00		TanamanTebu
32	Pengelola	MUSYAFAK	Ds. Krai Kec. Yosowilangun	2,064 Ha	No. 1/11 Nop. 1986	593.1/2704/427.73/2025 29 Okt 2025	1 Tahun (29-10-2025 s/d 28- 10-2026)	516.100.000,00				56.975.650,00		TanamanTebu
33	Pengelola	DIAN SULUNG WIDIANTORO	Ds.Wonorejo Kec. Kedungjajang	0,549 Ha	1/ th.1987	593.1/2705/427.73/2025 29 Okt 2025	1 Tahun (29-10-2025 s/d 28- 10-2026)	139.995.000,00				10.500.000,00		TanamanTebu
	JUMLAH TANAH KESELURUHAN							16.791.430.433,00	-	-	-	1.434.987.200,00	-	

6

Lampiran 17. Daftar Rincian Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Lumajang Per 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

No	Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Beban Penyusutan 2025	31 Desember 2025 (Rp)
			(Rp)	(Rp)		
1	Aset Tak Berwujud (ATB)	53.516.116.701,22	3.782.871.943,00	111.999.800,00	0,00	57.186.988.844,22
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud (ATB)	(43.042.315.671,27)	0,00	(111.999.800,00)	(3.875.787.683,40)	(46.806.103.554,67)
3	Aset yang dibatasi penggunaannya	1.114.660.144,25	24.426.801,55	3.162.602,23	0,00	1.135.924.343,57
4	Aset Lain – lain	455.308.234.453,18	31.477.208.411,82	1.773.382.194,68	0,00	485.012.060.670,32
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain – lain	(29.572.796.624,25)	(8.218.812.868,01)	(690.204.816,33)	0,00	(37.101.404.675,93)
	Jumlah	437.323.899.003,13	27.065.694.288,36	1.086.339.980,58	(3.875.787.683,40)	459.427.465.627,51

f